ACADEMIA
Accelerating the world's research.

Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabu...

Ahmad Mustanir

Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)

Cite this paper

Downloaded from Academia.edu

Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles

Related papers

Download a PDF Pack of the best related papers



Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muham...
Untari Narulita MD

Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana ...
Ahmad Mustanir

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIFATIF DI DAERAH
Muhammad R A I S R A H M A T Razak

ISBN 978-602-50710-6-5



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL KE-7

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH
(APPPTMA)

"Orientasi Program Pascasarjana PTM: Memperkuat Tradisi Riset dan Publikasi"

2

EKONOMI DAN SOSIAL POLITIK

Organized by:

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE-7
ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH (APPPTMA)
EKONOMI DAN SOSIAL POLITIK
2

PPS UMY Penerbit Program Pascasarjana
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

9 786025 071065

PROSIDING
KONFERENSI NASIONAL KE- 7

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH 'AISYIYAH
(APPPTMA)

Orientasi Program Pascasarjana PTM: Memperkuat Tradisi Riset dan Publikasi

2

SOSIAL POLITIK & EKONOMI

Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
23-25 Maret 2018

Organized by

ASOSIASI PROGRAM PASCASARJANA
Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah

PPS UMY Penerbit Program Pascasarjana
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Prosiding

Konferensi Nasional Ke-7
Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (APPPTMA)
Orientasi Program Pascasarjana PTM: Memperkuat Tradisi Riset dan Publikasi

Ketua Panitia	:	Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Panitia	:	Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc
Setretaris	:	Dr. Sudarno Shobron
Bendahara	:	Tri Maryati, S.E., MM
Reviewer	:	Dr. Dwi Sulisworo Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc Dr. M. Nurul Yamin Prof. Dr. Absori, M.Hum M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D Mufdlilah
Editor	:	Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. Dr. Sudarno Shobron Dr. M. Nurul Yamin
Cover dan Layot	:	Laeli Nur Khanifah, S.IP, MIP Priyatmoko Nugroho, S.E., M.Eng.
ISBN	:	978-602-50710-6-5
Cetakan Pertama	:	Juni 2018 vi + 323 halaman, 170 x 250 mm

Penerbit : **Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dari mahasiswa dan dosen program pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia yang dipresentasikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 23-25 Maret 2018. Total Pengirim Paper berjumlah 110 dan paper terpublikasi dalam prosiding berjumlah 95. Paper hasil penelitian mahasiswa dan dosen terbagi menjadi beberapa kategori bidang ilmu: pendidikan, pemikiran Islam, sosial dan politik, hukum, ekonomi, kesehatan, teknologi.

Dengan terbitnya prosiding ini diharapkan dapat menjadi cermin dari tahapan penting dari penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Asosiasi Pengelola Program Pascasarjana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, terutama editor yang telah meluangkan waktunya untuk mereview dan mengedit prosiding sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk prosiding baik *hard book* maupun *e-book*. Harapan kami, sebagai pengelola pascarjana dapat secara terus menerus meningkatkan suasana dan kualitas akademik program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil penelitian, kami mengharapkan prosiding ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sejenis baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk jumlah sitasi yang meningkat. Dengan semakin meningkatnya jumlah sitasi, maka semakin penting penelitian tersebut.

Segala kekurangan dapat disampaikan kepada kami.

Yogyakarta, 15 Juni 2018

Prof. Dr. Khuzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
Ketua Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah se-Indonesia

Daftar Isi

Halaman Judul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

JILID 11. Sosial Politik dan Ekonomi

Sosial Politik

Hierarki Prilaku Organisasi Melalui Distorsi Komunikasi Kepemimpinan Studi: Efek Comunication Leadership Terhadap Produktifitas Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kab. Enrekang
Arsal, Hariyanti Hamid, Jamaluddin Ahmad- 1

Politik Indonesia dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna
Adityo Arifianto- 11

Membangun Pelayanan Publik Dan Prilaku Birokrasi Transformasional Dalam Bingkai Otonomi Daerah : Studi Pelayanan Publik Di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan
Amirullah, Jamaluddin Ahmad, Barisan- 23

Konsep Pengendalian Tata Ruang Sesuai Asas Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Sleman
Bayu Susena, Yeni Widowaty- 32

Analisa Belum Tersistematisnya Diplomasi Bencana Dengan Menggunakan Analisa Konten Terhadap Regulasi Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Bondan Gazali Muchtar- 43

Eksistensi Muhammadiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Beragama Masyarakat Di Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
Bustanul Iman Rn, M.Ag. Irfan, Hairul, Sihab, Taslim Tahir- 57

Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Bantuan Kultivator Kabupaten Enrekang
Fatmawati, Erfina, Jamaluddin Ahmad- 70

Peran Pasukan Perdamaian Indonesia Dalam Misi Keamanan Di Lebanon 2006-2012
Hamdy Maulana- 82

Pengaruh Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang
Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan- 89

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang
Misnawati, Andi Astinah Adnan, Agustinus- 104

Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Nurinayah- 115

Inovasi Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Retnowati Wd Tuti, Kurniasih Mufidayati, Mawar- 127

Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia-Thailand Dalam Menanggulangi HIV AIDS
Revlinur Rahmawati- 138

Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Enrekang
Rijal, Lahibu Tuwu, Andi Nilwana, Kamaruddin Sellang- 148

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang
Rosmawati, Herman Demak, Andi Nilwana- 162

Konsep Perencanaan Pembangunan Partisifatif di Daerah
Rusman Sitonda, Rais Rahmat Razak, Lahibu Tuwu- 172

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai
Sjahril Effendy, Juliandri Raka Putra- 194

Pengaruh *Organizational Citizenship Behaviour* (Ocb) Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Stres Kerja Pada Pt. Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara
Syaiful Bahri1, Muhammad Zaki2, Fahrizal Zulkarnain- 200

Kebijakan Kjri Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia
Untari Narulita Madyar Dewi- 209

Ekonomi

Pemilihan Strategi Pemasaran Desa Wisata Edukasi Dengan Metode QSPM
Cahyani Kurniastuti- 221

Pengaruh Karakteristik Pegawai Terhadap Produktivitas Kerja
Fajar Pasaribu- 231

Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan *Letter Of Credit* Ekspor Pada Bank Syariah
Muhammad Rizal, Roni Sutrisno- 243

Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap *Organizational Citizenship Behavior* Pada Perawat
Novan Riansyah, Susanto- 254

Simbiosis Mutualisme Dalam Bisnis Ojek On-Line(Gojek) Di Yogyakarta
R. Nanang W, Bambang N, Jumintono- 265

Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Mangga Dua Jakarta Pusat 2017
Rahman Shaleh, Sudarno Shobron- 270

Organization Development At E-Commerce Online Pharmacy Based On Open System Method
Arsepta Kurnia Sandra, Fithriwati, D- 294

Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud Diamond
Triana Zuhrotun Aulia- 306

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur Audit
Widia Astuty - 316

HIERARKI PRILAKU ORGANISASI MELALUI DISTORSI KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN

Studi : Efek comunication leadership terhadap produktifitas kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Enrekang

Arsal, Hariyanti Hamid, Jamaluddin Ahmad
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
Arfitfit@yahoo.co.id, tantistisip@yahoo.co.id, jahmadlado@yahoo.co.id

ABSTRAK – **Kualitas kepemimpinan yang masih rendah belum berkualitas, profesional dan bertanggung jawab, Sering kali terjadi pekerjaan di kantor yang selesai tidak sesuai jadwal sehingga produktifitas kerja lebih berat pada output (hasil) dan tidak banyak mempertimbangkan aspek pada *outcomes*, dimana *outcomes* dari suatu program kerja pada akhirnya akan menjadi sebuah evaluasi baik-buruknya suatu kinerja pegawai tersebut. Tujuan utamanya adalah peranan Kepemimpinan sebagai interpersonal roles, informasional roles dan Desicional roles terhadap Produktifitas Kerja.Tipe kepemimpinan sangat berperan penting tercapainya organisasi. observasi, wawancara, dukumentasi dan sebuah rasio pada produkstifitas di Dinas Petanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, menunjukkan bahwa tipe perilaku kepemimpinan, komunikasi dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik, professional.**

Kata Kunci — Tipe Kepemimpinan, Komunikasi, Produktifitas kerja.

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi tergantung pada keahlian dan keterampilan pegawainya masing-masing yang bekerja didalamnya, seorang pimpinan harus melakukan suatu langkah manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai. Keberhasilan suatu organisasi dapat tercapai apabila manajemen kinerjanya didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dikantor berjalan dengan baik. Manusia yang berada dalam organisasi tersebut harus selalu mempunyai sikap yang responsive terhadap lingkungan termasuk tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya. Produktifitas yang belum maksimal akan memungkinkan organisasi itu dapat mengecewakan terhadap pelayanan masyarakat sebab pada umumnya manuntut untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Dalam konteks organisasi kepemimpinan mempunyai peranan utama dalam dinamika kehidupan organisasi, kepemimpinan berperan sebagai motor organisasi dalam mencapai tujuannya akan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dari pimpinan suatu organisasi,baik dalam lingkungan organisasi swasta maupun organisasi pemerintahan.

Kualitas kepemimpinan merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok agar dapat mendukung sepenuhnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Salah satu alat ukur untuk menetapkan apakah sebuah organisasi memiliki kinerja yang baik adalah tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Adapun pencapaian sasaran organisasi sangat didukung oleh kinerja dari sumber daya manusia yang ada. Jika kinerja sumber daya manusianya baik, maka diharapkan kinerja organisasi pun akan baik pula. Namun demikian untuk mendapatkan produktifitas kerja yang baik, perlu ada komunikasi antara persona (kepemimpinan dan bawahan).

Banyak tindakan pemimpin yang seringkali tidak sesuai dengan konsep keberhasilan dari yang dikemukankan beberapa teori kepemimpinan. Pemimpin hanya mengutamakan kekuatan legitiminasinya untuk mengambil kebijakan / keputusan yang menyakut kehidupan masyarakat tanpa bermusyawarah.

Menangani masalah yang seperti ini, maka seorang pemimpin dari sebuah instansi pemerintah harus bertindak tegas terhadap para pegawainya yang tidak dapat melaksanakan tugas secara professional. Tugas seorang pemimpin adalah mengatur segala sesuatu yang ada di lingkup organisasi yang dipimpinnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan komonikasi kepemimpinan merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok melalui komunikasi agar dapat mendukung sepenuhnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian kepemimpinan berperan dominan dalam kehidupan organisasi yang baik dari seorang pimpinan.

Dalam kenyataannya bahwa perilaku kepemimpinan di Dinas Pertanaian dan Perkebunan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan tidak lepas dari variable – variable lain yang merupakan diterminasi dari kepemimpinannya, sehingga seringkalai dalam melakukan pengambilan otoritas. Seperti terdapat interpensi-interpensi yang kuat dari beberapa elemen-elemen yang ada pada tingkat atasnya, sebagai konsekuensi dari jabatan kepemimpinannya dalam lingkup tugas Pemerintah Daerah, di mana terdapat atasan yang lebih tinggi, dimana bahwa seorang Kepala Dinas tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang ada akan tetapi juga harus menunjukkan loyalitas kepada atasannya, meskipun itu kurang sejalan dengan harapannya. Begitu pentingnya komunikasi terhadap tipe kepemimpinan dalam rangka menuju manajemen kerja.

Berbagai literatur telah mendukungnya seperti Henry Pratt Fairchild dalam " Dictionary Of Sociology and Reiated Sciences"yang dikutip oleh Kartono (1994:33) [1] menyatakan bahwa :

> "*Pemimpin dalam pengertian luas adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku social dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha orang lain,atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi, Pemimpin dalam pengertian terbatas adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan penerimaan sukarela oleh pengikutnya.*"

Pendapat lain tentang pemimpin dikemukakan oleh Hasibuan (1996:43) [2] bahwa pemimpin adalah :

> *"seseorang yang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaanya dalam mencapai tujuan"*

Sedangkan pengertian pemimpin dikemukakan pula oleh permadi (1996:43) bahwa:

a. Seorang yang mempunyai pengaruh positif terhadap orang lain.
b. Seorang yang mempunyai lebih banyak pengaruh positif daripada anggota – anggota lain dalam suatu organisasi.
c. Seseorang yang dipilih sebagai pemimpin oleh kelompok.
d. Seseorang yang paling banyak berpengaruh dalam menentukan dan mencapai tujuan kelompok atau organisasi.

Lebih lanjut Gary Yukl (1998:2) [3] mengutif beberapa definisi kepemimpinan para ahli yang dianggap dapat mewakili selama seperempat abad adalah sebagai berikut :

> "*Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktifitas-aktifitas suatu kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shaared goal) Hemhill & Coons, 1957:7)*

Dr. Hafied Cangara, M. Sc.). Shannon & Weaver, 1949, [4] Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. *Prof. Dr. Hafied Cangara, M. Sc. 1998, hal 20, dan* Louis Forsdale (1981), [5]ahli

komunikasi dan pendidikan "communication is the process by which a system is established, maintained and altered by means of shared signals that operate according to rules". Komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. Sedangkan menurut **G. Yukl (2002: 11) [6]**kepemimpinan adalah sebuah proses dan ada tiga variabel kunci dalam kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kepemimpinan yang dituliskan sebagai berikut :

1. Karakteristik Pemimpin
   Dalam menentukan karakteristik dari pemimpin, Yukl mencantumkan beberapa factor seperti trait yang berisikan motivasi dan kepribadian dari pemimpin, lalu factor skiils mencakup keterampilan konseptual, social dan teknikal. Ada juga factor perilaku, integritas, kepercayaan diri dan optimism.
2. Karakteristik Pengikut.
   Seperti karakteristik pemimpin,pengikut pun ada factor trait. Tapi factor trait di sini terdiri dari kebutuhan dan konsep diri. Ada factor lain juga seperti kepercayaan diri dan optimisme, skiil, kepercayaan pada pemimpin, komitmen akan tugas dan kepuasan atas pekerjaan dan pemimpin.
3. Karakteristik Situasi
   Karakteristik situasi dapat dilihat dari factor tipe dan ukuran unit organisasi, posisi kekuatan dan kekuasaan, struktur tugas dan komplektisitas serta ketidakpastian lingkungan sekitar.

Menurut George R. Terry dalam Herujito (2000 : 182) [7] kepemimpinan dipengaruhi empat variabel yaitu pemimpin, pengikut, organisasi dan nilai-nilai social serta politik. Tiap variabel itu mengadung beberapa indicator yaitu:

1. Pemimpin.
   a. Nilai-nilai pemimpin
   b. Kepercayaan terhadap anggota kelompok
2. Pengikut
   a. Minat dan keterlibatan dalam pemecahan masalah
   b. Pengetahuan dan pengalaman.
   c. Kesamaan tujuan dengan tujuan manajeman
3. Organisasi
   a. Struktur dan pola tugas
   b. Pengaruh teknologi
4. Nilai sosial politik
   a. Kekuatan budaya
   b. Pengaruh masyarakat dan social.

Mintsberg (Wahjosumidjo (2001 : 88) .[8] peranan kepemimpinan ***interpersonal, informasional dan decisional roles*** yaitu :

a. Peranan hubungan antar perseorangan (*Interpesonal Roles)*,peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang manajer yang meliputi melekat symbol-simbol kedudukan yang melekat dalam dirinya sebagai kepala, kemimpinan yaitu mencerminkan pada tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia dan peranan selaku penghubung terhadap berbagai kepentingan dalam system yang dipimpinya tersebut.
b. Peranan informasional (informasional roles), pemimpin memegang kendali atas informasi yang dapat diteruskan kepada semua elemen yang ada di organisasi tersebut.
c. Sebagai pengambil kebijakan (*decisional roles*) merupakan peran yang paling penting, sebab keputusan-keputusan yang diambil harus mencerminkan inovasi terhadap program-program, memberikan rasa aman pada lingkungannya, aspek keadilan(siapa yang akan memperoleh) terhadap kebutuhan – kebutuhan, mencerminkan sikap keterbukaan melalui musyawarah dengan lingkungan sosialnya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Paul Hersey CS, (Wahjosumidjo(2001:101) [9] mengatakan bahwa untuk melaksanakan tugas kepemimpinan dengan efektif, paling tidak harus memiliki tiga macam bidang keterampilan yaitu :

1) Technical Skill
   a. Menguasai pengetahuan tentang metode, proses, prosedul dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus.

b. Kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.

2) Human skill
   a. Memahami perilaku manusia.
   b. Memahami sikap dan motif orang lain.
   c. Kemampuan berkomonikasi
   d. Menciptakan kerja sama
   e. Mampu berperilaku yang dapat diterima
3) Conseptual skill
   a. Kemampuan analisis
   b. Kemampuan berpikir rasional
   c. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi
   d. Mampu menganalisis berbagai kejadian.
   e. Mampu mengantisipasikan perintah
   f. Mampu mengenali macam-macam kesempatan dan prolem-prolem social.

Pendapat lain yang agak berbeda mengenai kepemimpinan di kemukakan oleh Hicks dan Gullet (Wahjosumidjo : 2001:106), dimana dikemukakan ada delapan rangkaian peranan kepemimpinan yaitu.

1) Adil.
   Seorang pimimpin akan menghadapi berbagai kepentingan bawahannya, sehingga tidak mustahil menjadi komplik. Untuk itu dalam menghadapi hal tersebut pemimpin harus bertindak adil.
2) Memberikan sugesti.
   Sugesti di sini dimaksud sebagai dorongan semangat dalam bentuk sarana, petunjuk serta anjuran dalam bentuk pengaruh, sehingga semua orang yang ada dalam konteks kepemimpinannya itu dapat melaksanakan tugas dengan baik.
3) Mendukung tercapainya tujuan
   Seorang pemimpin bertanggung jawab atas penyediaan sarana-sarana pendukung guna mencapai tujuan organisasi, baik berupa dana maupun peralatan.
4) Sebagai katalisator, dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para bawahannya dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Catalysing).
5) Menciptakan rasa aman.
   Seorang pemimpin harus mampu menciptakan rasa aman didalam lingkungan sekitarnya, dimana dapat memberikan jaminan rasa aman.
6) Sebagai pemimpin harus mampu menjaga integritas kepemimpinannya dari pandangan orang lain, agar dapat dipercaya dan dihormati.
7) Sumber inspirasi, harus mampu menumbuhkan semangat pencapaian tujuan organisasi (inspiring).

Menurut Hersey (1994:29) [10] mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan – tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Jadi gaya kepemimpinan ini dapat tercermin dari kata-kata dan tindakan-tindakan yang ditampilkan oleh pemimpin ketika menjalankan kepemimpinannya.

Sedangkan menurut Siagian (1992:59) memberikan pemahaman yang sama antara gaya dengan tipe kepemimpinan sebagai berikut :

"Gaya kepemimpinan seorang akan identik dengan tipe kepemimpinan orang yang bersangkutan. Artinya untuk kepentingan pembahasan, istilah tipe dengan gaya dapat dipandang sebagai sinonim".

Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki tipe kepemimpinan sendiri-sendiri. Tipe kepemimpinan adalah merupakan ciri khas dan sifat seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan.

Kartono (1994:69)[11] mengemukakan 8 tipe kepemimpinan sebagai berikut :

a. Tipe Kharimatis
   Tipe kharimatis ini memiliki kekuatan energy, daya tarik dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain.
b. Tipe Paternalistis
   Tipe ke bapakan dengan sifat menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak /belum dewasa, dia bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil

keputusan sendiri, selalu bersikap maha tahu dan maha besar dll.

c. Tipe Militeristis
Sifatnya sok kemiliteran, hanya gaya luarnya saja yang mencontohkan gaya militer. Tetapi jika dilihat secara saksama tipe ini mirip sekali tipe otoriter.

d. Tipe Otokratis
Tipe mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Setiap peintah dan kebijakan ditetapkan tanpa konsultasi dengan bawahannya.

e. Tipe Laesser Faire (bebas)
Tipe ini sang pemimpin tidak memimpin, dia hanya membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri.

f. Tipe Populistis
Tipe ini kepemimpinannya berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat tradisional. Juga kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan dari luar organisasi.

g. Tipe Administratif
Tipe berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efesien kepada pengikutnya.

h. Tipe Demokratis
Tipe ini menghargai potensi setiap individu,mau mendengar nasehat dan mengerti bawahannya.

Tipe kepemimpinan mewakili perasaan, filsafat,keterampilan dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya tersebut berbeda atas dasar motivasi,kuasa atau orientasi terhadap tugas dan orang. Meskipun gaya itu digunakan dalam kombinasi tertentu atau bahkan ditetapkan secara berbeda terhadap berbagai pegawai.

Simanjutak, 1998 :35) [12] Produktifitas mempunyai arti secara filosofis – kualitatif dan secara kuantitatif – tehnis operasional, secara filosofis – kualitatif, produktifitas mengadung pengertian pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan

Hasibuan (2010: 3) [13] berpendapat bahwa produktifitas kerja adalah perbandingan antara output (hasil) dan input (masukan). Jika produktifitas ini naik, hanya mungkin oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga) dan system kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dan tenaga kerja.

Tarwaka, Bakri, dan Sudiajeng, (2004, : 137) [14] Produktivitas Kinerja pada dasarnya merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini dikerjakan untuk kebaikan hari esok. Pada dasarnya indikator peningkatan produktivitas tenaga kinerja seorang pegawai ada 3 faktor yaitu beban kerja, kapasitas kerja, dan beban tambahan akibat lingkungan kerja. Beban kerja berhubungan dengan beban fisik, mental maupun sosial yang mempengaruhi tenaga kerja. Kapasitas kerja berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan pada waktu tertentu Sedangkan beban tambahan akibat lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, dan faktor pada tenaga kerja sendiri yang meliputi faktor biologi, fisiologis, dan psikologis.

Produktivitas tenaga kerja adalah rasio dari jumlah keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja dan jam kerja. Tenaga kerja bisa dinyatakan telah bekerja dengan produktif jikalau ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya keluaran yang dihasilkan secara normal dan diselesaikan dalam jangka waktu yang layak pula (Sritomo Wignjosoebroto, 2003:7).[15] Agar seorang tenaga kerja dapat terjamin keadaan kesehatan dan produktivitas kerjanya, perlu keseimbangan dari faktor: beban kerja, beban tambahan akibat dari lingkungan kerja dan kapasitas kerja Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang (Sedarmayanti, 2001: 56).

Produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting di semua tingkatan ekonomi. Pada Kantor/Dinas produktivitas digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produktifitas. Manfaat lain yang diperoleh dari produktivitas yaitu menentukan target atau sasaran tujuan yang nyata dan pertukaran

informasi antara tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan (Muchdarsyah Sinungan, 2003: 21). Pengukuran merupakan hal yang paling penting dalam mengetahui ada tidaknya perubahan, perbedaan dan sebagainya. Untuk itulah pengukuran menjadi penting sebagai standar dalam pengambilan keputusan. Jika hasil pengukuran menunjukan produktivitas kerja rendah, maka dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan akan mengeluarkan berbagai hal yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan demikian dimasa yang akan datang terjadi peningkatan produktivitas kerja orang telah bekerja dengan produktif jikalau ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya keluaran yang dihasilkan secara normal dan diselesaikan dalam jangka waktu yang layak pula. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa disini ada dua unsur yang bisa dimasukkan sebagai kriteria produktivitas, yaitu: 1) Besar / kecilnya keluaran yang dihasilkan, dan 2) Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. (Ahmad Tohardi, 2002 : 454)

Tipe kepemimpinan mewakili perasaan (hati), komunikasi *(interpersonal roles, informasional roles, dan desicional roles)*, filsafat, skill, karakter dan sikap pemimpin dalam politik. digunakan dalam kombinasi tertentu sebagai kriteria produktivitas, yaitu: 1) Besar / kecilnya keluaran yang dihasilkan, dan 2) Waktu kerja yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Model deskriptif untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual dan aktual yang terjadi di lokasi penelitian dan untuk menjelaskan tentang pengaruh Komunikasi Kepemimpinan terhadap peningkatan produktifitas .Dikatakan demikian karena menurut Sugoyono dalam Kamaruddin (2015) [16] prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian secara sistimatis,faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskrespikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Untuk maksud tersebut ada empat teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) kuesioner, dan 4) penelitian pustaka. Adapun teknik analisis datanya adalah Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel yang ada dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel presentasi. Pemberian predikat setiap variabel dapat diukur dengan menggunakan bobot presentase dan kemudian dikembangkan dalam bentuk narasi menurut standar dan kategori tertentu (Nazir, 1989:98)[17].

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pertanyaan positif dilakukan dengan kata-kata dan diberi skor berdasarkan skala likert.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepemimpinan sebagai Interpersonal Roles

Hubungan antar perseorangan (*Interpesonal Roles)*, peranan ini timbul akibat otoritas formal dari seorang manajer yang meliputi melekat simbol-simbol kedudukan yang melekat dalam dirinya sebagai kepala, kemimpinan yaitu mencerminkan pada tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia dan peranan selaku penghubung terhadap berbagai kepentingan dalam system yang dipimpinnya tersebut.

Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang merupakan merupakan institusi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yang memberikan pelayanan pada stake holders pemerintah dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pemerintah yang

bertumbuh pada kemandirian lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang berorientasi pada agribisnis dalam upaya memberikan dukungan pada kelancaran tugas-tugas tersebut.

Dilihat dari segi hubungan antar manusia yang ada di Dinas Pertanian dan Perkebuna Kabupaten Enrekang, maka tidak jauh berbeda dengan aktifitas organisasi birokrasi pemerintah yang ada di Kabupaten Enrekang pada umumnya, yaitu berlangsung dalam suasana dinamis, sehingga menimbulkan peluang hubungan diantara semua unsur organisasi kerja di dalamnya, baik dalam suasana formal maupun informal, baik dalam kerangka hubungan yang bersifat structural/vertical, horizontal maupun dalam kerangka diagonal.

Keterampilan hubungan interpersonal yaitu kemampuan membangun dan memelihara hubungan positif, kemampuan merasakan kebutuhan, perhatian dan keadaan pribadi orang lain, kemampuan mengenali dan menyelesaikan konflik, kemampuan menggunakan keterampilan dan mendengarkan secara efektif, kemampuan memberitahukan, menginterpretasi dan merespon perilaku nonverbal, kemampuan menggunakan secara efektif urutan komunikasi lisan dan tulisan dan kemampuan memberikan umpan balik yang sesuai dalam suasana yang sensitif (peka).

Hubungan antar manusia yang bersifat structural/vertical adalah hubungan bersifat formal antara pimpinan dengan bawahan dalam organisasi kerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, dalam hal ini tentu berlangsung dalam suasana kerja yang formal, sebab penafsiran dari tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada masing-masing bagian dan sub bagian, tentu saja memerlukan suatu proses interpersonal yang melibatkan pranata (tingkah laku sosial) hubungan antar manusia didalamnya sebagai sarana dalam berkomunikasi, maksudnya dari hubungan antar manusia secara formal ini adalah agar seluruh tujuan- tujuan dan program –program kerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan selaras dan seimbang berdasarkan prinsip-prinsip organisasional, seperti prinsip kesatuan tindakan, prinsip kesatuan arah dan prinsip kesatuan komando.

Interpersonal Reles yang berlangsung secara formal juga dimaksud untuk selalu menyamakan visi dan misi dalam pelaksanaan pekerjaan anatar semua lini dalam organisasi yang bersangkutan. Pimpinan akan merasa puas, karena dapat memastikan pelaksanaan tugas-tugas secara lebih baik karena adanya respon dari bawahannya ketika mendengarkan kesanggupannya dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan, dan sebaliknya para bawahannya akan merasa puas bilaman mendapatkan pengarahan dan petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya, bahkan melalui pertemuan-pertemuan akan diperoleh singkronisasi antara keinginan pimpinan dilain pihak dengan kemampuan bawahannya dalam mencapainya. Demikian pula halnya seluruh system kerja yang ada tersebut tentu saja dapat memberikan kepastian pada pencapaian tujuan bilamana individu-individu dalam organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang mewujudkan suatu keharmonisan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sebagai penghubung, maka pemimpin menempatkan dirinya sebagai perantara yang baik dalam menjembatani kepentingan- kepentingan antara pegawai dalam organisasi.

Angota-anggota kelompok sekunder dalam organisasi terikat satu sama lain karena tujuan dan sasaran bersama. Akan tetapi disamping tujuan dan sasaran bersama ada lagi unsur lain yang merupkan tali penghubung antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dan perasaan terikat antara anggota dengan kelompok sebagai keseluruhan. Perasaan terikat ini dinamakan kohesi kelompok. Makin lebih tinggi tingkat kohesi, makin lebih mantap keutuhan satu kelompok.

Pemimpin baik menjadi penggerak dan Pembina kohesi dalam kelompok. Tentu saja semakin besar jumlah manusai yang tergabung dalam satu kelompok, semakin sulit diadakan hubungan tatap muka (*Face To face relations*). Akan tetapi dengan alat-alat komunikasi yang lebih missal hubungan antara anggota organisasi

dapat diadakan sedemikian rupa, sehingga para pemimpin dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai penggerak dan Pembina kohesi.

B. Peranan Kepemimpinan sebagai Informasional Roles.

Hubungan informasional *(informasional roles),* pemimpin memegang kendali atas informasi yang dapat diteruskan kepada semua elemen yang ada di organisasi tersebut.

Memelihara hubungan–hubungan harmonis antara atasan dengan atasan dan antara bawahan dengan bawahan merupkan tugas kepemimpinan–kepemimpinan, seorang pemimpin harus mampu meletakkan landasan yang kuat bagi terjalinnya hubungan antara manusia dalam organisasi, sebab merupakan tanggungjawab mereka untuk melakukan katalisasi terhadap kemungkinan terjadinya konflik – konflik antara pribadi dalam organisasi.

Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi untuk mengatur dan mengelola bawahannya dengan baik, memberikan kesempatan untuk berkembang serta mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh bawahannya.

Sebagaimana dikemukan sebelumnya bahwa hakekat kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain, dan hakekat manajemen adalah menggerakkan orang lain, Bila dikatakan kepemimpinan dalam manajemen adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Esensi dari kalimat mempengaruhi dan mempengaruhinya dan faktor yang dapat menggerakkannya. Faktor tersebut merupakan alasan seseorang untuk mau dipengaruhi, diperoleh dan digerakkan.

Seorang pemimpin yang efektif, harus memiliki visi dan misi dalam meningkatkan kesejehateraan orang-orang yang dipimpinnya, dalam hal ini bagaimana mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mulai dari kebutuhan dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi dirinya. Disamping itu hal yang lebih penting diperankan oleh seorang pemimpinn dalam implementasikan kepemimpinannya adalah kemampuannya untuk memberikan informasi yang akurat kepada bawahannya, terutama dalam penyelesaian tugas-tugasnya selaku pegawai.

Banyak kesalahan-kesalahan yang timbul yang diperbuat oleh bawahan, terutama disebabkan karena kurangnya informasi yang diberikan oleh atasan atau pimpinan dalam pekerjaannya. Tindakan pimpinan yang selalu mencari-cari kesalahan – kesalahan bawahannya, justru dapat menjadi malapetaka dalam gerak laju organisasi. Oleh sebab itu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memberikan perlindungan kepada bawahnnya melalui berbagai informasi yang memadai dalam melaksanakan tugas. Bentuk informasi tersebut dapat berupa pengarahan, bimbingan serta saran dan kritik yang membangun atas cara-cara kerja yang sedang dijalankan bawahan.

Sesuai dengan perkembnagan dan tuntutan pembangunan borikrasi pemerintahan di Indonesia, yang menuntut berlakunya : Good Govermance". Maka tentu saja akuntabilitas kepemimpinannya harus mampu mewujudkan apa yang disebut dengan transparansi, demokrasi, equity (keadilan) serta kejujuran, meskipun tetap harus menjunjung tinggi prinsip ketegasan dan keberanian.

Bagi kepemimpinan birokrasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, maka tentu saja harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka yang berkembang sesuai dengan tuntutan tersebut. Dan hampir dipastikan tidak ada lagi tempat bagi gaya kepemimpinan yang otoriter, arisiokrat, militeristik. Masyarakat atau orang-orang yang dipimpin hanya membutuhkan orang-orang yang mampu bersikap demokratis, yaitu mau mendengarkan bawahannya, bersedia dikritik serta bersedia ditegur oleh bawahannya bila berbuat salah.

C. Peranan Kepemimpinan sebagai Desicional Roles

Sebagai pengambil kebijakan *(decisional roles)* merupakan peran yang paling penting, sebab keputusan-keputusan yang diambil harus mencerminkan inovasi terhadap program-program, memberikan rasa aman pada lingkungannya, aspek keadilan (siapa yang akan memperoleh) terhadap kebutuhan – kebutuhan,

mencerminkan sikap keterbukaan melalui musyawarah dengan lingkungan sosialnya.

Hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan organisasi, merupakan esensi kepentingan yang saling menjawab, dalam arti individu tidak mungkin mencapai tujuanany tanpa melalui organisasi dan sebaliknya organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan jika kerja sama sekelompok orang sebagai anggota organisasi tidak dapat diorganisir dengan baik. Dalam konteks tersebut, maka pengelolaan sumber Daya Manusia diperlukan falsafah yang mengakui pentingnya nilai pegawai atau pegawai sebagai individu, dimana salah satu keberhasilan organisasi sangat tergantung pada perilaku individu.

Terdapat banyak hal atau factor penyebab timbulnya ketidakpuasan kerja pegawai diantaranya prilaku kepemimpinan dalam organisasi yang kadang kurang diterima oleh orang-orang yang dipimpinnya. Adakalanya perilaku kepemimpinan yang cukup arogan, otoriter, pilih kasih sehingga menyebabkan hubungan–hubungan terhadap bawahannya menjadi renggang, bahkan cenderung tidak diterima, dan tentu hal ini sangat berimplikasi pada prestasi kerja pegawai dalam organisai. Salah satu masalah yang sering timbul yang menyebabkan sering diciptakannya fungsi kepemimpinan yang berkeadilan, seperti adanya pegawai yang kelihatan mendapat perhatian lebih menonjol dari pegawai lainnya, mendapat fasilitas yang lebih banyak. Demikian pula terhadap keputusan–keputusan pimpinan yang kadang-kadang memberikan kepuasan pada pihak tertentu namun merugikan pihak lainnya, hal ini banyak menimbulkan gesekan-gesekan yang berakibatkan pada terjadinya hubungan yang tidak harmmonis antara pegawai itu sendiri.

Pemimpin bukan sekedar seorang atasan, Seorang pemimpin harus memiliki idealism, artinya memiliki gambaran yang jelas dan tegas kemana atau kearah mana ia ingin membawa yang dipimpinnya. Pemimpin harus memahami apa yang menjadi tujuan dari kelompoknya atau organisasi dimana ia memimpin dan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingannya. Ia harus memiliki komitmen kepada tujuan itu dan senantiasa berupaya untuk mencapainya. Seorang pemimpin juga harus berwawasan luas, memiliki pengetahuan, untuk dapat secara efektif membawa yang dipimpin kearah tujuan yang telah ditetapkan. Sebab masyarakat akan semakin canggih dan tuntutan kepada pemimpinnya akan semakin canggih pula, Masa depan akan semakin padat tekhnologi, maka seorang pemimpin harus mempunyai apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan tekhnoligi, ini berarti bahwa seorang pemimpin, bukan hanya mengerti teknik kepemimpinan, tetapi juga menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu instansi pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang membantu bupati dalam bidang sub sector Pertanian dan Perkebunan jelas aspek kepemimpinan merupakan suatu hal yang esensial, apalagi banyak aspek yang mutlak dikoordinasikan dalam pelaksanaan tugas, agar seluruh system manajemen organisasi dapat berjalan satu arah dan satu tujuan, dan tidak terjadi saling tumpang tindih satu sama lainnya.

Peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan (*desecion making*), jelas merupakan suatu peranan yang secara langsung melekat dalam arti kepemimpinan, sebab tugas utama dari seorang kepemimpinan adalah melakukan pengambilan keputusan.

Keputusan berarti alternative pilihan terbaik dalam pelaksanaan tugas dalam dunia birokrasi pemerintahan, keputusan merupakan tindakan nyata dari para birokarat terhadap apa yang seharusnya dan apa tidak seharusnya dilaksanakan, Keputusan tersebut memiliki implikasi yang sangat luas terhadap semua dimensi dari wilayah keputusan itu sendiri.

Para Pakar organisasi dan manajemen sepakat bahwa pusat dari seluruh kegiatan organisasi dan manajemen adalah terletak pada keputusan-keputusan dari manajemen puncaknya, dan tentu saja tidak berkelebihan bila dikatakann bahwa keputusan stratejik merupakan roh dari kepemimpinan dalam organsiasi, sebab keputusan menjadi pusat dari operasi manajerial.

Untuk mengatasi ***Problem Statemen /*** masalah yang timbul disebabkan oleh komunikasi leadership/kepemimpinan belum optimal sehingga belum tercipta produktifitas kerja yang maksimal, dalam mengelolah, mempengaruhi, memotivasi bawahan/staf agar mampu berkontribusi dalam peningkatan efisiensi dan keberhasilan organisasi dimana tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. sehingga tatanan organisasi pemerintahan tidak sesuai yang diharapkan. Maka dengan perilaku birokrasi menerapkan 'Open Government Partnership', keterbukaan pemerintahan bagi publik, artinya Publik ikut berkontribusi mengatasi masalah. Dengan prinsip 'Open Government Partnership' (OGP).

IV. KESIMPULAN.

1. Diciptakannya hubungan interpersonal dalam arti yang lebih luwes, melalui hubungan informal antara atasan dan bawahan, baik terhadap atasan langsung maupun level kepemimpinan yang ada secara menyeluruh dalam arti bahwa ada kondisi yang menyenangkan yang sengaja diciptakan memupuk rasa persaudaraan antara sesame pegawai dalam bekerja.
2. Peranan kepemimpinan dalam hal Informasional roles dapat dijalankan dengan aspek memerlukan kemampuan kepemimpinan dalam mengarahkan, terutama dalam memberikan arahan-arahan yang lebih signifikan bagi penyelesaian pekerjaan secara lebih tepat dan akurat, melalui informasional yang dikuasai oleh atasan atau pimpinan.
3. Komitmen, tanggung jawab kepemimpinan yang dapat diberikan dalam arti bahwa seluruh keputusan – keputusan organisasi yang merupakan output dari organisasi dapat dipertanggung jawabkan oleh kepemimpinan yang ada.

Pemimpin yang baik haruslah mempunyai dua langkah : Punya Strategis kerja yang mau dia laksanakan untuk berElaborasi dengan hati (jiwa) menuju tujuan yang diharapkan.

Organisasi – Adminstrasi - Kepemimpinan + Manajemen + Politik = Tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dr. H. Mustafa Hasbar, SE,MM. 2014, *Menguak Perilaku Organisasi* Penerbit : Ombak, Jogjakarta.

[2] Dr.Jamaluddin Ahmad,S.Sos.M.Si, 2011. *Perilaku Birokrasi Dan Pengambilan Keputusan* Penerbit : Badan Penerbit UNM, Makassar

[3] Dr. Drs. Zainuddin Samad, B.A,M.Si, 2016 *Birograsi dalam Pelayanan Publik* Penerbit : Ombak Jokjakarta

[4] Dr.Arni Muhammad 2002 *Komunikasi Organisasi* penerbit PT.Bumi Aksara

[5] Hasibuan, H. Malayu S. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia.*: Bumi Aksara, Jakarta

[6] Ibrahim, Amin. 2004. *Perilaku Administrasi dan Pemberdayaan I, Bandung,* Program Pasca Sarjana : UNPAD

[7] Kartini Kartono, 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan* . Penerbit PT. Gramedia,Jakarta.

[8] Prof. Dr. Hafied Cangara, M. Sc. *1998 Pengantar Ilmu komunikasi,* penerbit PT.Bumi Aksara

[9] Wahyosumidjo, 2001. *Kepemimpinan dan Motiva,* Jakarta. Ghalia Indonesia.

[10] Weber (tanpa tahun) dalam Albrow (2007:43) *Teori Birokrasi.* Penerbit : UNM Makassar.

[11] Yulk, Gary, 1994, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* Penerbit *:* Jakarta PT. Prenhallindo

[12] Yulk Gery, 1998, *Leadership in Organization. Terjemahan Jusuf Udayana. Kepemimpinan dalam Organisasi Edisi 3.* Penerbit : Prenhallindo, Jakarta.

Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna

Adityo Arifianto
Program Studi Hubungan International, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
adityoarifianto@yahoo.co.id

ABSTRAK —Klaim sepihak oleh Cina terkait wilayah blok Natuna merupakan bagian dari wilayahnya membuat hubungan Indonesia dengan Cina memanas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan prinsip analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna dipengaruhi oleh Rezim yang berkuasa. Dengan menganut politik luar negeri bebas aktif, Jokowi melakukan 4 pendekatan dalam mensikapi konflik laut Cina Selatan, yaitu geopolitik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi, dan kerjasama ekonomi. Pendekatan Geopolitik ditunjukkan dengan munculnya Doktrin Poros Maritim Dunia. Pertahanan dan keamanan ditunjukkan dengan peningkatan anggaran militer terutama untuk menambah dan mengganti alutsista. Pendekatan Hukum dan Diplomasi telah dilakukan sepanjang jaman. Pendekatan kerjasama ekonomi dilakukan dengan memperbanyak kerjasama dalam bidang ekonomi di kawasan laut Cina Selatan.

Kata Kunci — Konflik, Laut Cina Selatan, Politik.

I. PENDAHULUAN

Konflik laut cina selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini masih belum mencapai titik penyelesaian, serta rawan mengganggu stabilitas kawasan di masa yang akan datang. Sengketa ini diawali oleh klaim sepihak negara China yang memperluas wilayah perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Konflik ini memerlukan penyelesaian yang bersifat tetap dan mengikat, karena jika tidak potensi perebutan wilayah sangat besar.

Terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik laut cina selatan. Pertama, mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi, keanekaragaman hayati dan perikanan serta kekayaan laut lainnya. Kedua, merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan laut cina selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah laut cina selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. [1]

Sumber lain menyebutkan bahwa alasan pokok laut cina selatan diperebutkan diantaranya adalah karena merupakan wilayah strategis, dikelilingi 10 negara. Kemudian kaya akan sumber daya perikanan, merupakan penyumbang 10% dari perikanan global. Dan merupakan potensi migas yang sangat besar, 11 miliar barrel cadangan minyak dan 190 triliun kubik kaki kandungan gas alam. Sedangkan kapal-kapal ikan negara lain selalu incar natuna karena terdapat potensi perikanan 504 ribu ton atau penyumbang 21% hasil tangkapan ikan Indonesia. [2]

Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik laut cina selatan menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan yaitu Paracel dan Spratly. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas laut cina selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah "Nine-Dashed Line".

Sementara itu, Indonesia dan negara Asean lainnya telah mengikuti aturan Zona Ekonomi Ekslusif dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang sudah baku. Hal ini berarti jika ada suatu negara yang ingin mengklaim suatu wilayah yang termasuk ke dalam ZEE Indonesia maka akan menjadi sebuah masalah yang besar karena akan mengganggu integritas wilayah Indonesia. Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah (*non claimant state*), namun Indonesia terlibat dalam konflik ini. Keterlibatan Indonesia dalam konflik ini karena didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut. [3]

Perkembangan konflik laut cina selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan territorial Indonesia. [4] Berbagai upaya dilakukan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Di antaranya adalah Filipina yang melayangkan Gugatan pada tahun 2013 kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Hasilnya menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum apapun bagi Cina untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya di lautan yang terdapat di 'sembilan garis batas' di kawasan Laut Cina Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda 2017, klaim Cina di salah satu perairan terluas di dunia tersebut dinyatakan melanggar kedaulatan Filipina.

Masalah konflik Indonesia dengan China terkait dengan masalah laut Cina Selatan, Blok Natuna merupakan konflik yang berkaitan dengan geopolitik, hukum internasional dan masalah kemaritiman. Semuanya bermuara pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan dasar filosofis dari presiden pertama yatu Soekarno. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo konsep filosofi Trisakti memperoleh legitimasi kembali dengan beberapa kebaruan, termasuk dalam konsep politik luar negeri.

Politik luar merupakan konsep dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara yang secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri dapat juga sebagai jembatan batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri wujudnya dapat berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. [5]

Kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat penting dalam merespon konflik ini. Baik dengan pendekatan militer maupun diplomasi ataupun pendekatan yang lain misalnya hukum dan sosial ekonomi. Hal ini diantaranya dikarenakan dalam penelitianRyan Muhammad menjelaskan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna menunjukkan hasil nilai akhir yang berada pada nilai koefisien skala "sedang". Hal ini berarti potensi ancaman yang dihadapi Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan kepulauan Natuna tergolong sedang bagi Indonesia, dalam hal ini tidak tergolong tinggi dan tidak pula tergolong rendah. [6]

Besar kecilnya ancaman konflik bersenjata dalam konteks negara harus diantisipasi segala kemungkinannya. Kemudian bagaimana dengan politik Indonesia dalam menghadapi konflik laut

china selatan, terutama di Blok Natuna. Politik dalam arti luas merujuk pada politik luar negeri Indonesia dalam mensikapi klaim blok natuna sebagai wilayah Cina. Politik luar negeri tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang maritim, pertahanan keamanan, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tema ini dengan tujuan untuk mengetahui politik Indonesia dalam konflik laut cina selatan. Riset ini diharapkan mempunyai kontribusi atau manfaat akademis dan praktis. Secara akademis diharapkan dapat sumbangsi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti terait dengan isu-isu konflik laut cina selatan dalam perspektif politik Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapakan bisa menjadi rujukan bagi sejumlah pihak baik dari Indonesia, maupun dalam lingkup sub negara tersebut berupa lembaga negara yang berwenang memanfaatkan wilayah maritim.

Penelitian terdahulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan politik luar negeri dan yang menyangkut konflik laut cina selatan telah banyak dilakukan. Penelitian terkait identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982 menjadi dasar dari kepentingan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. Doktrin ini mempengaruhi komponen dalam negeri yakni norma, struktur, serta hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain. Indonesia yang pada masa pemerintahan Jokowi menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerjasama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Strategi tersebut juga berarti bahwa sektor ekonomi diposisikan sebagai salah satu pendukung utama bahkan tujuan dari pertahanan, sehingga segala aktifitas pemerintahan harus mengarah pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi negara. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto defense support prosperity. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian. [7]

Pada kasus Filiphina yang melayangkan Gugatan kepada Mahkamah Arbitrase International. Gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui Permanent Court of Arbitration (PCA), gugatan yang diajukan Filipina sudah benar dan tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan hal ini tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan negara. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik.[8] Penelitian yang lain menjelaskan bahwa klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Arbitrase di Den Haag tanggal 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak Cina tidak memiliki hak atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya. Untuk aktivitas militer di wilayah sengketa, Cina harus menghentikan segala aktivitas disana dan segera menarik kekuatan militernya. Negara lainnya yang turut bersengketa untuk menahan diri sesuai dengan *declaration of conduct* Laut Cina Selatan sampai tercapainya kesepakatan. [9]

Penelitian tentang kebijakan luar Negeri Indonesia yang menyimpulkan bahwa Indonesia masih menggunakan pendekatan faktor geografis sebagai sumber dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha Indonesia yang secara terus-menerus berpartisi dalam berbagai isu-isu regional yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, misalnya isu konflik di Laut China Selatan dan LautTimur China. Indonesia selalu semangat dan gencar melakukan diplomasi perbatasan untuk mempertahankan perdamaian regional sekaligus territorialnya.[10]

Respon dan kebijakan terhadap klaim sepihak dari Cina ini direspon secara berbeda oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono dan Pemerintahan Joko Widodo. Dalam penelitian ditemukan perbedaan tersebut pada

bahwa pada penelitian Soesilo Bambang Yudoyono respon dan kebijakan cenderung datar, mendorong upaya-upaya perdamaian kawasan dengan perundingan-perundingan dan kerjasama internasional. Sedangkan pemerintahan lebih tegas dengan mempersiapkan antisipasi pertahanan keamanan, kemaritiman serta tetap mengusahakan diplomasi-diplomasi lagsung maupun tidak langsung. [11] Penelitian lain dalam konteks 2013 menyimpulkan bahwa kebijakandan strategi pertahanan Indonesia masih menganggap bahwa konflik di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui*soft power* dan tidak mengantisipasi penggunaan *hard power*karena akan berimplikasi terhadap kepentingan nasionalIndonesia.[12] Meskipun dalam perkembangannya rezim pemerintahan berikutnya mulau memikirkan penguatan pertahaan keamanan di wilayah laut cina selatan, terutam blok natuna.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar atas apa yang telah diupayakan dalam menjaga perdamaian kawasan terkait konflik laut cina selatan. Juga telah mengetahui respon dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dari masa ke masa dan dari sudut pandang berbagai bidang. Penelitian ini akan berangkat dalam sudut pandang politik Indonesia secara umum dalam menghadapi konflik laut cina selatan. Politik yang dimaksud meliputi politik luar negeri Indonesia yang melahirkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian laut cina selatan.

Secara teoritis, politik Indonesia dalam konflik laut cina selatan berangkat dari politik luar negeri pemerintah, yang tentu mengalami dinamisasi sesuai dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik bagi suatu negara adalah lanjutan dan refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit merefleksikan pada tingkat internasional.[13] Hal ini berarti antara politik dalam negeri dengan luar negeri sangat erat kaitannya. Ciri kas rezim yang berkuasa juga menjadi cerminan politik luar negeri yang diterapkan. Termasuk politik dalam menghadapi konflik di laut cina selatan.

Politik luar negeri suatu negara selalu mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu unsur keajegan atua tetap dan unsur yang berubah. Unsur tetap biasanya terdiri dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang telah disepakati sejak awal pembentukan negara, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan yang bersifat strategis, prioritas dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.[14] Unsur tetap dalam konteks Indonesia, politik luar negeri mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila yang dipilih karena sila-silanya (5 sila) merupakan pedoman hidup dan aturan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara yang ideal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Landasan operasional yang selalu berubah menyesuaikan kepentingan nasional. Politik internasioanl bebas aktif dalam arti tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain dan bersedia melakukan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. [15]

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kebijakan yang mempunyai peran dan pengaruh dalam hubungan suatu negara atau pemerintah dengan negara (pemerintah) lainnya sebagai tanggapan terhadap kejadian dan masalah dunia internasional. Atau dengan kata lain, politik luar negeri adalah sintesa perwujudan tujuan dan kemampuan (kapabilitas)nasional.[16] Sehingga meskipun mempunyai unsur tetap, namun ketika unsur perubahan secara operasional dapat berbeda setiap rezimn kekuasaan.

William D. Coplin mengidentifikasikan ada 4 determinan atau indikator dari politik luar negeri, yaitu konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri. Konteks internasional meliputi geografi, ekonomi, dan politik. Perilaku pengambil keputusan meliputi pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Kemampuan ekonomi dan

militer suatu negara dapat memengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain. Politik dalam negeri yang meliputi sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional dan internasional.[17]

Rezim yang saat ini berkuasa adalah pemerintahan Joko Widodo, politik luar negerinya masih berprinsip pada politik luar negeri bebas dan aktifberdasarkan filosofi Trisakti Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya) dalam konteks saat ini. Politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat dari rumusan Renstra Kemenlu 2015-2019. Politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada identitas sebagai negara kepulauan dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik.Arah kebijakan politik luar negeri dilaunching dengan Doktrin Poros Maritim Dunia (2014), Deklarasi Kerja Sama Negara-Negara Maritim (2014), Perumusan Peran Indonesia dalam G-20, dan Evaluasi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.Meningkatkan pelibatan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, serta menata infrastruktur diplomasi. Politik luar negeri ditempatkan dalam integrasi dengan kementerian yang lainnya melalui tiga kata kunci: perdagangan, maritim, dan investasi. Diplomasi ekonomi menjadi basis politik luar negeri dengan orientasi baru, sebuah terminologi baru dalam perjalanan panjang diplomasi RI yang untuk waktu lama didominasi isu-isu keamanan dan politik.[18]

Doktrin poros maritim dunia dalam Renstra Kemenlu terdiri dariLima pilar utama, yaitu: a) membangun kembali budaya maritim Indonesia; b) menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; c) memberikan prioritas pada pembangunan infrastrukturdan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan wisata maritim; d) menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan; d) membangun kekauatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. [19]

Berdasarkan politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan, dengan doktrin poros maritim dunia, maka dapat dilihat bahwa pemerintahan Jokowi mempunyai paling tidak 4 pendekatan dalam mengelola konflik di laut cina selatan blok natuna, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dandiplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Geopolitik memelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis. Geopolitik merupakan daerah irisan antara *political science* dengan *political geography* sehinga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut human geography yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *psycal features*. Artinya erat hubungan antara prilaku politik negara dan lingkungan geografinya. [20].

Griffith menyatakan bahwa " *Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states"* [21]. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan sebab aklibat antara kekuatan politik dan ruang geografis. Terminologi ini merupakan formulasi khusus yang berhubungan antara kepentingan strategis relatif dengan pentingnya potensi geografis dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori

geopolitik berhubungan dengan korelasiantara kekuatan dalam bidang politik, unsur wilayah geografis inti dari perspektif internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki oleh suatu negara. Pendekatan geopilitik dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan terkait kebijakan luar negerinya baik dalam konteks kerjasama ataupun penyelesaian hubungan konfliktual. Geopolitik merupakan peta bagi negara untuk bermain dalam politik internasional baik dalam skala lokal, regional maupun global. Berdasarkan teori geopolitik dapat dilihat visi kedepan tentang sesuatu aktivitas yang menyangkut dengan kepentingan nasional. Doktrin Poros Maritim Dunia itu sendiri termasuk dalam pendekatan geopolitik pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi ke depan.

Pendekatan pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan kekuatan militer yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk teritorial maritim. Dalam konteks konflik laut cina selatan blok natuna, pendekatan militer bukan merupakan pendekatan utama namun merupakan langkah antisipasi yang di siapkan untuk kondisi-kondisi yang diperlukan. Teori yang relevan dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan adalah teori strategi keamanan.Strategi dirancang berdasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan, bukan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional lainnya. Berpedoman strategi para pembuat kebijakan dalam usaha mencapai kepentingan nasional dan mencegah timbulnya masalah dan hambatan atas kepentingan tersebut. [22].

Konsep keamanan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (survival)dalam mengahadapi ancaman yang nyata (*existential threat*). Keberlangsungan hidup suatu negara adalah bagaimana memproteksi dan memproyeksikan kedaulatan wilayah dan bagaimana mengembangkan serta mempertahankan identitasnya sebagai suatu bangsa.[23]. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan doktrin poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menghadapi konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut. [24].Pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam konteks konflik laut cina selatan adalah terkait dengan ketersediaan alutsista, personil, pangkalan militer, strategi dan kebijakan pendanaan.

Pendekatan Hukum dan diplomasi merupakan pendekatan yang mengedepankan pemahaman hukum-hukum internasional yang mendasari hubungan kerjasama, wilayah perbatasan dan upaya perdamaian. Diplomasi dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi merupakan bagian penting sebagai solusi penyelesaian konflik secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi pada situasi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung. [25]. Diplomasi dalam konteks konflik laut Cina Selatan dapat dilakukan terhadap sesama negara ASEAN maupun dengan negara-negara di luar ASEAN. Bahkan diforum-forum internasional lain yang dapat membantu terbentuknya perdamaian regional. Diplomasi dibangun diantaranya dengan membangun hubungan bilateral dan multilateral.

Pendekatan kerjasama ekonomi merupakan pendekatan pembangunan perekonomian bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan. Pendekatan ekonomi diharapkan dapat mencairkan ketegangan regional. Pendekatan penyelesaian konflik dengan paradigma pembangunan kerjasama ekonomi merupakan paradigma bauru, karena selama ini seringkali dilakukan dengan pendekatan politik dan keamanan. Kerjasama ekonomi yang

dimaksud juga melibatkan masyarakat dalam negeri termasuk diwilayah yang rawan terjadi konflik.

Dengan empat pendekatan tersebut, politik Indonesia dalam konflik laut cina selatan blok natuna diharapkan dapat disikapi dengan bijaksana, strategis dan dalam kerangka terjaminnya kedaulatan negara tanpa ada konflik terbuka dengan pihak manapun.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu tipe penelitian yang berusaha membuat gambaran fenomena atau kejadian tertentu dengan apa adanya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadioleh subjek penelitian secara utuh dan menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari subyek langsung yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan subyek-subyek hukum. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada telaah pustaka atau *library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi pustaka.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta- fakta yang ada kemudian dihubungkan antar fakta fakta, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Seperti yang di katakan Stuart. A.Schlegel bahwa model analisis kualitatif dapat berbentuk data → analisis data dan hipotesa dari data yang di dapatkan → teori yang dipakai [26].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini terfokus pada tema penelitian yaitu terkait dengan tujuan penelitian yaitu politik Indonesia terkait dengan konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan politik Indonesia dalam konflik laut Cina selatan tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berangkat dari konsep politik Jokowi pada saat kampanye pemilihan presiden dan kemudian dijadikan sebagai dasar visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodoatau yang dikenal dengan Nawacitra pemerintahan Joko Widodo. Jokowi dalam Nawacita poin pertama menegaskan misinya akan menghadirkan negara dalam rangka melindungi bangsa (termasuk rakyatnya) dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Presiden Jokowi menggunakan politik luar negeri sebagai upaya dalam meningkatkan ketahanan nasional dan mewujudkan agenda pembangunan yang direncanakan. Hal ini didasari pemikiran bahwa Indonesia akan dianggap oleh dunia dengan tiga syarat, yaitu demokrasi yang terus berkembang, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta upaya membina hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Pada awalnya prioritas pertama adalah terkait politik dalam negeri, karena 2 diantara 3 urusan tersebut masuk dalam urusan domestik. Kemudian pemerintah saat ini telah mulai memprioritaskan kebijakan luar negeri dalam rangkamendukung agenda pembangunan nasional seperti diplomasi ekonomi untuk meningkatkan investasi masuk, penguatan integritas teritorial melalui berbagai diplomasi, dan perlindungan WNI yang ada diluar negeri melalui pendekatan hukum dan diplomasi serta hubungan diplomatik. Praktik demokrasi ekonomi yang demikian ini menjadi basis politik luar negeri pada era Jokowi ditunjukkan dengan partisipasinya dalam forum-forum internasional seperti APEC, KTT ASEAN,

dan KTT G-20 serta forum lainnya. Presiden menggunakan forum-forum tersebut untuk menarik investasi asing datang ke Indonesia, membuka pasar luar negeri yang luas dan mengundang lebih banyak turis asing masuk berwisata ke Tanah Air. Tidak terkecuali posisi Indonesia juga sering menjadi penengah dan pendorong terbentuknya resolusi konflik yang terjadi, termasuk mendorong terwujudnya perdamaian di regional ASEAN terkait dengan konflik laut cina selatan.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno. Politik luar negeri Indonesia dalam konflik laut Cina selatan terutama Blok Natuna berdasarkan penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi dilakukan dengan konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Berdasarkan wilayah maritim yang sangat luas, bentuk negara kepulauan dan segala potensi sumberdaya yang tersedia, maka lahirlah doktrin poros maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik presiden Jokowi. Indonesia mulaimenyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi, yaitu pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur. Negara-negara Asia sedang bangkit perekonomian dan perkembangan tekonologinya. Jalur laut Asia merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Ide Poros Maritim Dunia dalam Renstra Kementerian Luar Negeriterdiri dari lima elemen. Elemen pertama,pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, hal ini telah dimulai dengan paradigma pembangunan maritim ditingkatkan, bukan hanya paradigma pembangunan darat. Dalam bergagai bidang paradigma pembangunan laut telah dilakukan dan dimulai dari struktur pemerintah serta kesiapan SDM nya. Pelaut Indonesia (SDM) menjadi bagian terpenting karena sebagai subyek yang mampu menggerakan apa saja dan merupakan potensial yang wajib dilibatkan sejak awal hingga perencanaan. Indonesia perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli-ahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (*Maritime Domain Awareness/MDA*).

Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Hal ini diwujudkan dengan pemberantasan ilegal fishing oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP), pemberdayaan nelayan, konservasi kawasan laut serta program-program lain yang berada di kementerian yang lain.

Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik danindustri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pembangunan tol laut sudah mulai diwujudkan. Tol Laut merupakan sistem pengiriman atau distribusi barang menggunakan kapal-kapal kargo besar yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pengadaan kapal-kapal dan pelabuhan-pelabuhan sudah mulai diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung konektivitas orang dan barang ke seluruh Indonesia, sehingga kemajuan dapat merata.

Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Hal ini telah dilakukan terkait dengan penyelesaian konflik laut cina

selatan blok natuna. Selain itu Indonesia juga memprakarsai berbagai pertemuan untuk menciptakan kawsan ASEAN yang dama, aman, stabil dan nyaman.

Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim. Hal ini dilakukan dengan memperkuat aparat keamanan dan pertahanan laut, baik melalui jalur militer atau polisi laut atau pengamanan sipil melalui kementerian kelautan dan perikanan yang mengawasi keamanan wilayah dari pencurian ikan. Kekuatan militer digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dan sebagai antisipasi hal-hal yang tidak dapat ditolelir.

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Secara juridis formal, Indonesia sudah sangat kuat atas kepemilikan wilayah lautnya, namun mempunyai konsekuensi yang tidak ringan, yaitu Indonesia harus mampu menjaga laut dan kekayaannya dari negara lain. Jika tidak mampu menjaganya, maka negara asing semakin leluasa untuk mencuri dan mengambil alih kekayaan laut di wilayah Indonesia. Jokowi meningkatkan anggaran militer Indonesia secara bertahap denagn tujuan utama untuk memperbaruhi alutsista yang ada serta menambah alutsista yang kurang. Pembangunan pangkalan militer juga diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan terjadi konflik, kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam wilayah dan warga Indonesia.

Tujuan pendekatan pertahanan dan kemanan adadak tercapainya sea power, sebiah konsep yang diperkenalkan oleh Mahan, seorang laksamana terkemuka Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Mahan mendeskripsikan *sea power* sebagai kemampuan negara untuk melindung kepentingan politik, ekonomi, dan militernya dengan menggunakan laut. Empat prinsip yang terkandung didalam *sea power* yaitu *naval power, ocean science, ocean industry, and ocean commerce.* Menurut Corbett, sea power bukan hanya membahas tentang apa yang bisa negara lakukan di laut, tetapi juga mencakup efektifitas tindakan suatu negara di laut dan dapat memberikan dampak baik bagi aspek daratan. [27].

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik laut cina selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, presiden Jokowi dan sampai saat ini Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Penyelesaian konflik yang terjadi harus menggunakan metode penyelesaian secara damai, yaitu diplomasi yang *win-win solution*. Diplomasi *soft power asimetris*perlu diterapkan baik negara maupun organisasi sehingga mampu menjadi alternatif penyelesaian konflik dengan catatan *win-win solution* dapat dirasakan secara langsung bagi mereka yang bersengketa.Penyelesaian dengan jalan damai telah lama diupayakan dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan banyak pihak. Seperti yang dilakukan pada first track diplomacy,melalui pendekatan regional oleh ASEAN telah disepakati Deklarasi Tata Prilaku Pihak-Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) yangdirasa cukupberhasil dalam mengelola konflik, meskipun deklarasi ini belum mampu menyelesaikan sengketa secara permanen.

Indonesia sudah lama dikenal sebagai actor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN Waydan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand – Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar. [28].

Pendekatan kerjasama ekonomiyang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik laut cina selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerjasama ekonomi untuk

mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Jokowi, setelah ada klaim sepihak dari Cina atas blok Natuna, Jokowi bertemu dengan Cina untuk membicarakan kerjasama ekonomi dan hasilnya terdapat tiga kesepakata. Pertama adalah upaya meningkatkan perdagangan dengan mempersempit gap defisit perdagangan Indonesia dengan Cina. Kedua adalah mengenai investasi, dimana perlunya peningkatan investasi kedua negara, terutama di bidang manufaktur dan infrastruktur. Ketiga, mengenai pariwisata, dimana masyarakat Cina akan didorong untuk berkunjung ke Indonesia.[29]. Bukan hanya itu, pada tahun 2017 yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya pengelolaan potensi konflik China Selatan pada tanggal 16-17 November 2017 di Jakarta.Workshop diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Brunei Darussalam, RRT, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam dan China Taipei.Lokakarya ini dapat mendorong tercapainya *code of conduct* atau etika berprilaku di Laut China Selatan. Lokakarya tersebut menghasilkan 8 proyek kerjasama antar negara di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim yang kondusif dan menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan kerjasama ekonomi. [30].

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi dalam Nawacita poin pertama menegaskan misinya akan menghadirkan negara dalam rangka melindungi bangsa (termasuk rakyatnya) dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas dan aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan pertahanan dilandasi kepentingan nasional, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno. Politik luar negeri Indonesia dalam konflik laut Cina selatan terutama Blok Natuna berdasarkan penelitian, dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.

Pendekatan Geopolitik yang dilakukan pemerintah Jokowi dilakukan dengan konsep dasar hubungan politik dengan geografis Indonesia. Indonesia tepat berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo-ekonomi. Indonesia sebagai negara maritim telah menegaskan sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Doktrin Poros maritim Dunia terdiri dari lima elemen. Elemen pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Elemen kedua, yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Elemen ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik danindustri perkapalan, serta pariwisata maritim. Elemen keempat, melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut. Elemen kelima, membangun kekuatan dan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta menjaga keselamatan, pelayaran, dan keamanan maritim.

Pendekatan pertahanan dan keamanan dalam politik luar negeri Indonesia atas konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna bukan merupakan opsi yang utama, namun sebagai negara poros maritim dunia, harus mampu menunjukan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayah. Jokowi meningkatkan anggaran militer Indonesia secara bertahap denagn tujuan utama untuk memperbaruhi alutsista yang ada serta menambah alutsista yang kurang. Pembangunan

pangkalan militer juga diperlukan pada batas-batas negara serta wilayah-wilayah yang rentan terjadi konflik, kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban yang mengancam wilayah dan warga Indonesia.

Pendekatan hukum dan diplomasi dalam konflik laut cina selatan telah dilakukan Indonesia sejak lama, sejak presiden pertama sampai presiden ketujuh, presiden Jokowi dan sampai saat ini Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai.Indonesia sudah lama dikenal sebagai actor kunci dalam perundingan dan lahirnya berbagai norma ASEAN Waydan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN*Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*. Indonesia juga merupakan juru damai atau mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional yang terjadi, seperti konflik Thailand –Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.

Pendekatan kerjasama ekonomi yang dimaksud dalam konteks penyelesaian konflik laut cina selatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kerjasama ekonomi untuk mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Pendekatan ekonomi dilakukan sebagai paradigma baru. Hal ini telah dilakukan pemerintahan Jokowi, setelah ada klaim sepihak dari Cina atas blok Natuna, Jokowi bertemu dengan Cina untuk membicarakan kerjasama ekonomi. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, karena dapat saling mendukung dan menguatkan dalam upaya politik luar negeri terkait penyelesaian konflik laut cina selatan, terutama Blok Natuna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Nainggolan, P. P. 2013. *Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan.* Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.

[2] Katadata.com. 13/7/2016. https://katadata.co.id/infografik/ 2016/07/13/kenapa-laut-cina-selatan-diperebutkan (diakses 12 Desember 2017, pukul 21: 26 WIB)

[3] Tidwell, A. C. 1998. *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution.* London and New York: Continuum.

[4] NBC Indonesia. (2015, 10 16).Klaim Wilayah Natuna, Cina Kerahkan Armada Tempur Besar-besaran. http://www.nbcindonesia.com/2015/10/klaim-wilayah-natuna-cina-kerahkan.html (diakses 13 Desember 2017, puykul 19.00 WIB)

[5] Hara. A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme.*. Bandung: Penerbit Nuansa.

[6] Muhammad, Ryan. 2016. Analisis Ancaman Terhadap Isu Klaim China Atas Kepulauan Natuna Terkait Konflik Laut China Selatan Melalui Metode Analisis Intelijen "Hank Prunckun". https://lingstra.org/2016/04/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-prunckun/ (diakses 12 desember 2017, pukul 21.20 WIB)

[7] Asana, R., Suwartiningsih, S. and Nugroho, A.B.H., 2017. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala, 6(1), pp.35-58.*

[8] Trihastuti, N., Susetyorini, P. and Hanifah, M., 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration. *Diponegoro Law Review*, 6(1), pp.1-9.

[9] Al-Attar, F.S., Warno, N.D. and Hardiwinoto, S., 2017. Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp.1-13.

[10] Haryanto, A., 2015. Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional, 4(*2), pp.136-147

[11] Shabrina, N.O., 2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line Tiongkok Yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional,* 6(2), pp.133-146.

[12] Prabowo, E.E., 2013. Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, *19*(3), pp.118-129.

[13] Wuryandari, G. (ed). 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

[14] Sriyono, A. (ed). 2004. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam zaman yang Berubah, Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[15] Alami, Atiqah Nur, 2008. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia" dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.

[16] Rudy. T. M. 1993. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa.

[17] Coplin. William D. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis.* Bandung: Sinar Baru.

[18] Haryono,E. 17 – 10-2017. *Politik luar negeri tiga tahun pemerintahan Jokowi.*http://mediaindonesia.com/news/read/127568/politik-luar-negeri-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi/2017-10-17 (diakses 12 Desember 2017, Pukul 19.00 WIB)

[19] Kemenlu. 2014. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2014 – 2019.

[20] Keliat, M. 2009, Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,*Vol 13, No.1 Juli 2009, h.113.

[21] Griffiths, M. dan Terry O'Callghan, 2002, International Relations :the key concepts, Routledge: New York, hlm.120

[22] Mas'oed, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi* . Yogyakarta: Pusat antar Unversitas-Studi Sosial UGM. hlm, 90

[23] Barry buzan, 2009. Security: A New Framework for Analysis dalam Wuryandari,G. Keamanan di Perbatasan Indonesia–Timur Leste, Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. hlm.27

[24] Genewati W. Ibid. , hlm 30.

[25] S.L , Roy. 1995, Diplomasi, Jakarta: PT Raja Grafindo persada. hlm. 35.

[26] Schlegel,S. A..1986, *Penelitian Graunded Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Surakarta : FISIPOL UNS. Hal.13.

[27] Till, Geoffrey. 2004. *Seapower: A Guide for Twenty-First Century*. New York: Routledge.

[28] BPPK KEMENLU, 2015. *Laporan Akhir Riset, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM 2015*, hal 6.

[29] Asmara, Tia. 02-09-2016. Indonesia dan China Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/indonesia-china-09022016143532.html (diakses tanggal 21 Desember 2017)

[30] Ghozali, P. 16 November 2017. Indonesia dorong kerja sama selesaikan konflik laut cina selatan. https://aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-dorong-kerja-sama-selesaikan-konflik-laut-china-selatan-/966695 (diakses tanggal 12 Desember 2017, pukul 23.00 WIB)

Membangun Pelayanan Publik dan Prilaku Birokrasi Transformasional Dalam Bingkai Otonomi Daerah

Studi Pelayanan Publik Di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan

Amirullah, Jamaluddin Ahmad, Barisan
Magister Administrasi Publik
STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
Amirullah0330@gmail.com, jahmadlado@yahoo.co.id, uchenklppmstisip@yahoo.co.id

ABSTRAK — Pemberian pelayanan public sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang esensial di Indonesia masih jauh dari memuaskan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa skor integritas pelayanan public adalah 6,6 dari sakala 1-10. Maka Strategi Pemerintah yang tercantuk dalam RPJMN adalah meningkatkan kualitas pelayanan public. Pasca pemilihan Presiden tahun 2014, Presiden terpilih dan cabinet kerjanya menjadikan perbaikan sector pelayanan public merupakan agenda prioritas tertuang dalam Nawa Cita Nomor 2 (dua) yaitu Membangun transparansi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan public.

Pekerjaan besar ini memerlukan perubahan mindset dari penyelenggara pelayanan, dari "dilayani menjadi "melayani". Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintah adalah pelayanan masyarakat (public service) atau pelayanan public. Salah satu fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan (melayani) masyarakatnya, bukan dilayani oleh masyarakatnya. Pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang menjadi pelayan pemerintah. Tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan public, memperjelas mekanisme dan mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan public.

Dalam pemberian pelayanan public, beberapa hal yang penting menjadi perhatian yang menjadi standar minimal pelayanan : 1) Jangka waktu. Adalah hal yang mutlak diketahui oleh masyarakat, berapa lama waktu yang dibutuhkan apabila mereka ingin mengurusi e-KTP, ijin mendirikan bangunan, ijin usaha, dan lain-lain. 2) Biaya. Mendapatkan pelayanan bukan berarti gratis dan memberikan pelayanan bukan berarti pula bahwa pemberian itu harus suka rela. Namun, yang benar adalah adanya ketentuan terkait biaya administrasi/retrebusi yang patut diketahui masyarakat dan pemberi pelayanan tentu tidak boleh melanggar ketentuan yang ditetapkan. 3) Mekanisme penanganan keluhan. Apabila ada penyimpangan dari ketentuan standar minimal pelayanan, masyarakat dapat menyampaikan keluhannya kepada instansi terkait dan instansi wajib mengelola keluhannya dan menyampaikan tindak lanjut keluhannya kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan sebagai pelayanan public yang baik, hanya dapat diwujudkan dengan prinsip-prinsip aksesibilitas, akuntabilitas, tarnsparansi dan responsibilitas dari pemberi layanan yaitu aparatur pemerintah. Namun, perbaikan pelyanan public tidak dapat dialkukan secara parsial dan hanya dilakukan oleh Pemerintah saja. Perbaikan pelayanan public menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat. Perbaikan pelayanan hanya bias diwujudkan jika ada partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan berbagai stakeholders dan unsure-unsur masyarakat sangat menentukan kualitas layanan public yang diberikan pemerintah.

Kata Kunci — ***Pelayanan Publik, Perilaku Birokrasi, Kualitas Pelayanan.***

I. PENDAHULUAN

Fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Secara teoritis sedikitnya ada tiga

fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu public service function, development function, and protection function. Hal yang terpenting dari ketiga fungsi tersebut adalah pemerintah dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, salah satu wujud pelayanan publik pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menerapkan system informasi kependudukan yang berbasis teknologi, yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Enrekang adalah pelayanan kartu penduduk elektronik (e-KTP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa; penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum nomor induk kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya dijadikan dasar dalam penerbitan dokumen antara lain: paspor, surat ijin mengemudi, NPWP, sertifikat atas hak tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Fakta dan data yang ada, kebijakan pelayanan e-KTP di Kabupaten Enrekang ditemukan masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki dan melakukan perekaman e-KTP. Data tahun 2015 jumlah wajib KTP 162.744 orang. 62.133 orang telah memiliki e-KTP dan 99.981 orang belum memiliki e-KTP. Capaian rata-rata 62 persen dari 100 persen yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien , dan nyaman kepada masyarakat. Demikian pula Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public yaitu asas penyelenggaraan pelayanan public pada poin "K" yaitu ketepatan waktu dan poin "L" yaitu kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Belum dapat dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan public, sehingga masyarakat yang mengurus e-KTP belum merasa puas oleh karena masih rendahnya kualitas pelayanan e-KTP disebabkan karena penerapan prinsip-prinsip pelayanan public belum diterapkan secara maksimal serta masih adanya aparatur birokrasi yang belum memahami tentang konsep reformasi birokrasi.

Begitu pentingnya reformasi birokrasi dalam rangka menuju manajemen publik kelas dunia. Berbagai literatur telah mendukungnya seperti Said (2007:433) [1] menyatakan bahwa ada tiga strategi menciptakan birokrasi pemerintahan yang baik adalah melalui pendekatan perilaku, pendekatan institusional, dan pendekatan sosial. Pendekatan perilaku ditempatkan sebagai hal yang utama, karena pendekatan lain akan mengikut. Pendekatan perilaku dimaknai Robbins (2008: 10) [2] sebagai studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Demikian pula, Davis & Newstrom (1993:5) [3] dan Thoha (2007:34) [4] memandang perilaku birokrasi merupakan fungsi dari interaksi dengan lingkungan birokrasi itu sendiri.

Dengan demikian, begitu pentingnya reformasi birokrasi menuju manajemen publik kelas dunia akan dimaknai masing-masing daerah Kabupaten/Kota, terutama memberikan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Pelayanan Publik

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia berusaha melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan

pelayanan. Moenir dalam Saiful Haq, (2014). Pelayanan merupakan serangkaian kegiatan, suatu proses pelayanan berlangsung secara kontinyu dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Boediono (2003 : 60). Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya rasa kepuasa dan keberhasilan. Sedangkan pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa menurut kententuan peraturaan perundang-undangan.

Berdasarkan defenisi pelayanan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, jasa, idea tau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur serta mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan. Dari defenisi tersebut, pelayanan public merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat (public) tanpa berorientasi.

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum (public) harus mengandung sendi-sendi : Kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 : 68-70).

B. Perilaku Birokrasi

Birokrasi dan efisiensi administratif oleh Beetham (1990:1-3) [5] tetap sependapat dengan argumen birokrasi yang ditawarkan oleh Max Weber sebagai tipe ideal birokrasi. Karena menurut dia, ciri birokrasi Weber melekat pada organisasi yang berskala besar dalam sistem-sistem administrasi modern. Dimana administrasi disini diartikan sebagai koordinasi dan pelaksanaan kebijaksanaan, sedangkan sistem administrasi dipahami sebagai pengaturan jabatan-jabatan yang berkepentingan dengan upaya menerjemahkan kebijaksanaan ke dalam instruksi yang harus dilaksanakan oleh barisan terdepan sebuah organisasi.

Blau & Meyer (2000:27) [6] juga sependapat dengan Weber yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi yang dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi. Tipe ideal birokrasi dengan ciri tersebut dapat terlaksana dengan baik maka dampaknya akan positif dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat dan negara.

Pandangan yang sama adalah Albrow (2007:105-136) [7], seorang sosiolog dari Inggris. Albrow banyak menulis pandangan para ahli seputar konsep birokrasi Weber. Akhirnya, ia sendiri mengajukan beberapa konsepsinya seputar birokrasi. Albrow membagi tujuh cara pandang mengenai birokrasi. Ketujuh cara pandang ini dipergunakan sebagai pisau analisis guna menganalisis fenomena birokrasi yang banyak dipraktekkan di era modern. Ketujuh konsepsi birokrasi Albrow adalah : (a) Birokrasi sebagai organisasi rasional, sebagian besar mengikut pada pemahaman Weber. Namun, rasional di sini patut dipahami bukan sebagai segalanya terukur secara pasti dan jelas. Kajian sosial tidak pernah menghasilkan sesuatu yang pasti menurut hipotesis yang diangkat.

Birokrasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada model pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Perbedaan dengan Weber adalah, jika Weber memaklumkan birokrasi sebagai "organisasi rasional", Albrow memaksudkan birokrasi sebagai "organisasi yang di dalamnya manusia menerapkan kriteria rasionalitas terhadap tindakan mereka."(b) Birokrasi sebagai Inefesiensi Organisasi, merupakan antitesis (perlawanan) dari vitalitas

administratif dan kretivitas manajerial. Birokrasi juga dinyatakan sebagai susunan manifestasi kelembagaan yang cenderung ke arah infleksibilitas dan depersonalisasi. Selain itu, birokrasi juga mengacu pada ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsi dalam organisasi-organisasi besar.

Birokrasi terlalu percaya kepada preseden (aturan yang dibuat sebelumnya), kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan), berkembangbiaknya formulir (terlalu banyak formalitas), duplikasi usaha, dan departementalisme. Birokrasi juga merupakan organisasi yang tidak dapat memperbaiki perilakunya dengan cara belajar dari kesalahannya. Aturan-aturan di dalam birokrasi cenderung dipakai para anggotanya untuk kepentingan diri sendiri. (c) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, merupakan pelaksanaan kekuasaan oleh para administrator yang profesional. Atau, birokrasi merupakan pemerintahan oleh para pejabat. Dalam pengertian ini, pejabat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melakukan sesuatu. Juga, seringkali dikatakan birokrasi adalah kekuasaan para elit pejabat. (d) Birokrasi sebagai administrasi negara (publik), merupakan komponen sistem politik, baik administrasi pemerintahan sipil ataupun publik. Ia mencakup semua pegawai pemerintah. Birokrasi merupakan sistem administrasi, yaitu struktur yang mengalokasikan barang dan jasa dalam suatu pemerintahan.

Lewat birokrasi, kebijakan-kebijakan negara diimplementasikan. (e) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan pejabat, dianggap sebagai sebuah struktur (badan). Di struktur itu, staf-staf administrasi yang menjalankan otoritas keseharian menjadi bagian penting. Staf-staf itu terdiri dari orang-orang yang diangkat. Mereka inilah yang disebut birokrasi-birokrasi. Fungsi dari orang-orang itu disebut sebagai administrasi. (f) Birokrasi sebagai suatu organisasi, merupakan suatu bentuk organisasi berskala besar, formal, dan modern. Suatu organisasi dapat disebut birokrasi atau bukan mengikut pada ciri-ciri yang sudah disebut. (g) Birokrasi sebagai masyarakat modern, mengacu pada suatu kondisi di mana masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang diselenggarakan oleh birokrasi. Untuk itu, tidak dibedakan antara birokrasi perusahaan swasta besar ataupun birokrasi negara. Selama masyarakat tunduk kepada aturan-aturan yang ada di dua tipe birokrasi tersebut, maka dikatakan bahwa masyarakat tersebut dikatakan modern.

Uraian ini lebih mempertegas makna konseptual perilaku birokrasi pemerintahan yang dimaknai sebagai kepentingan struktur organisasi dan perilaku aktor (pribadi pejabat) guna menjalankan fungsinya, maka melahirkan berbagai karakteristik perilaku birokrasi pemerintahan, karena berbagai macam struktur dan aktor dalam suatu organisasi, yang dicirikan oleh karakteristik birokrasi dengan karakteristik individu pribadi pejabat.

Anthony Downs (tanpa tahun) dalam Bryant & White (1989:108) [8] memberikan contoh tentang arti perilaku rasional dan berpamrih pribadi (self-interested) itu pada prakteknya. Terdapat lima tipe pejabat (birokrat) yaitu; Pertama, adalah tipe pendaki (kekuasaan, penghasilan, prestise); Kedua, tipe pelestari (kenikmatan dan kemudahan, keamanan); Ketiga, tipe penggigih (komitmen pada suatu program tertentu); Keempat, tipe pendukung (komitmen pada tujuan-tujuan kebijakan secara luas); dan Kelima, adalah tipe negarawan (loyalitas pada masyarakat sebagai keutuhan menyeluruh).

Salusu (2008:442) [9] membagi tipe perilaku birokrat terdiri dari pegawai karier, politikus, profesional, dan missioner. Tipe pegawai karier dicirikan pegawai yang mengidentikkan kariernya dan penghargaan yang diterimanya dengan organisasi tempat bekerja. Mereka tidak memikirkan untuk berpindah-pindah dan ingin mempertahankan posisi dalam organisasi itu. Tipe politikus yaitu birokrat yang berusaha mengejar karier di luar organisasinya, apakah pada jabatan yang melalui pemilihan atau yang diangkat. Baginya, yang penting adalah tetap memelihara hubungan dengan berbagai sumber kekuasaan di luar organisasi, dengan harapan suatu waktu sumber-sumber itu menawarkan suatu jabatan baginya. Tipe profesional yaitu birokrat yang merasa puas dengan penghargaan profesionalisme yang diberikan kepadanya oleh kalangan seprofesi atau kalangan lain berdasarkan kemampuan

mendemonstrasikan kompetensinya sebagai tenaga profesional. Tipe missioner menjadikan seorang birokrat mempertahankan kesetiaannya pada suatu keputusan atau kebijaksanaan dan berkeinginan keras agar keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki, tanpa memikirkan kariernya, atau jabatan lain di luar, atau pengakuan profesinya.

Tipe-tipe tersebut tidak mungkin ditemukan secara terpisah. Pada umumnya tipe yang satu bergabung dengan tipe yang lain. Demikian juga, satu tipe bisa bertahan untuk suatu saat, kemudian berubah ke tipe lain pada saat dan kesempatan yang berbeda.

Sementara itu, hubungannya dengan pentingnya reformasi birokrasi berdasarkan dari filosofi Hegel dalam Thoha (2007:22) [10] birokrasi adalah jembatan antara negara dan rakyat. Rakyat yang dimaksud disini terdiri dari kelompok-kelompok profesional, usahawan, dan kelompok-kelompok tertentu yang mewakili kepentingan partikular (khusus). Sedangkan negara mewakili kepentingan umum (the general intrest). Diantara keduanya, birokrasi pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan khusus tersebut dengan kepentingan umum.

Sedangkan menurut persepsi Karl Marx dalam Thoha (2007:22) [11] yang berseberangan dengan Hegel, birokrasi tidak mewakili aslinya diri sendiri, dan negara bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada kepentingan umum (general) itu, yang ada adalah kepentingan partikular mendominasi kepentingan partikular lainnya. Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas sehingga menjadi kelas yang dominan itulah yang berkuasa. Birokrasi adalah negara dan pemerintah itu sendiri. Birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Palmer (1989:259) [12] berpendapat bahwa birokrasi berperan sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. Rasyid (1999:4) mengemukakan bahwa birokrasi merupakan pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari.

Demikian pula secara konseptual, Ndraha (2003:521) [13] berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa publik atau layanan civil tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan.

Thoha (2008:26-27) [14] menyimpulkan bahwa birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tata kepemerintahan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah pelaksana fungsi kebijakan publik yang bekerja pada suatu struktur dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan. (Ahmad, 2011) [15]

Pada sisi yang lain, birokrasi mempunyai konsep yang ideal sebagaimana digambarkan di atas dan tidak bisa dilepaskan dari aspek politik, maka dalam prakteknya, tipe ideal birokrasi itu meleset jauh ke arah yang berlawanan dan negatif. Tampaknya birokrasi dalam kenyatannya banyak mendapatkan sorotan yang kurang baik. Seperti birokrasi sebagai "redtape" atau prosedur administrasi yang "bertele-tele".

Victor Thomson (1961) dalam Riggs (1994:62) [16] dengan menggunakan neologisme mempertegas pengertian yang ditawarkan oleh Michel Crozier yang disebutnya sebagai "biro-patologi". Sejumlah karakteristik yang tidak dapat diterima mengenai birokrasi dapat dibuktikan tidak esensial bagi konsep tersebut tetapi tidak memberikan isyarat tentang kemacetan (tidak berfungsi, atau berfungsi tapi jelek), dan keadaan itu merupakan gejala malaise, sebagai sifat yang selalu ada tetapi tidak seharusnya diasosiasikan dengan organisasi birokrasi.

Siagian (1994:36) [17] menyebut sebagai "patologi birokrasi". Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan

ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. Sedangkan Dwiyanto (2008:103) [18] mengidentifikasi patologi muncul karena norma dan nilai-nilai yang menjadi acuan bertindak birokrasi lebih berorientasi ke atas, yaitu pada kepentingan politik kekuasaan, bukannya kepada publik.

C. Pelayanan e-KTP

Moenir dalam Hassel Nogi (2005 : 208), Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada 2 (dua) jenis, yaitu layanan pisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administrative yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara.

Keberhasilan proses pelayanan public sangat bergantung pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani). Untuk melihat kualitas pelayanan public perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni pertama aspek internal organisasi birokrasi, kedua aspek eksternal yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam proses pemberian pelayanan kepada warga masyarakat mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Masyarakat sebagai penerima pelayanan merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan public. Elemen kedua yakni bagaimana kemudahan suatu pelayanan untuk dikenali baik sebelum, dalam proses dan atau setelah pelayanan itu diberikan.

Untuk memahami secara mendalam tentang pelayanan yang berkualitas (serviqual) yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Barry, yaitu keputusan konsumen mengkomsumsi atau tidak mengkonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh presepsi terhadap kualitas pelayanan. Pernyataan ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan. Selanjutnya Zaithaml-Parasuraman-Barry, menyatakan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, dapat diukur melalui indicator, antara lain : Tangibles, yaitu kelengkapan sarana pisik perkantoran, komputerisasi, tempat informasi dan ruang tunggu public. Realiability, yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya. Responsivinness, yaitu kesanggupan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Assurance, yaitu kemampuan pelayanan secara sopan santun, keramahan dalam menyakinkan kepercayaan konsumen. Emphaty, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Desain penelitian ini mementingkan adanya variable-variabel sebagai objek penelitian dan variable-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk defenisi operasional variable. Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi karena kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas hasil penelitian

Untuk maksud tersebut, ada tiga proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: studi pustaka, wawancara dan pengamatan serta dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variable. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan umum dilakukan dengan mewujudkan pelayanan e-KTP yang baik. Undang-Undang tentang Pelayanan Publik (UU No.25/2009) menjadi landasan bagi peningkatan pelayanan publik di semua lini.

Seperti halnya Undang-Undang lainnya, UU No.25 tahun 2009 belum mengatur secara lengkap bagaimana seharusnya penyelenggara pelayanan publik bertindak sesuai dengan asas-asas yang dimaksud. Juga belum diatur bagaimana para pejabat dan pegawai negeri akan berperilaku dan memotivasi diri untuk melayani. Undang-Undang pelayanan publik, dengan asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), belum menjadi inspirasi untuk membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Banyak orang yang sudah tahu asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Tapi harus diakui, belum semua orang melaksanakan asas dan prinsip yang sudah diketahuinya. Banyak di antara penyelenggara pelayanan publik yang sudah memahami asas-asas pemerintahan yang baik, tapi mereka gagal memberikan pelayanan publik yang baik. Karena itu, para penyelenggara Negara, pejabat publik, pegawai negeri, dan setiap orang yang terkait belum didasari dengan pengabdian dalam melakukan pelayanan publik dan belum berkewajiban untuk menjabarkan prinsip dan asas pelayanan yang baik dalam bentuk rencana kerja yang rinci dan terukur. Rencana kerja dengan asas-asas tersebut dalam keseharian belum dilaksanakan oleh setiap unit pelayanan publik.

Kebijakan pelyanan e-KTP oleh Pemerintah kabupaten Enrekang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Untuk melihat tingkat pelaksanaan pelyanan publik ada sepuluh indikator pedoman yang digunakan berdasarkan keputusan Meteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yaitu ***kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kenyamanan.***

Dasar perilaku pejabat berupa pengabdian dapat ditelusuri dalam pelayanan e-KTP, karena mulai dari manajemen yang bertugas pada tataran konseptual sampai kepada manajemen teknis operasional terlibat secara langsung. James L. Perry dalam Keban (2008) mengemukakan bahwa setiap administrator publik membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar yaitu conceptual skill, humanity skill, and technical skill. Conceptual skill terlihat pada kemampuan membuat konsep, ide, dan gagasan.

Pelayanan e-KTP merupakan sebuah hasil dari conceptual skill oleh pemerintah pusat yang langsung menyentuh masyarakat. Pelayanan e-KTP juga memiliki Humanity skill terlihat pada kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang mengedepankan persuasive kepada masyarakat. Demikian pula, pelayanan e-KTP memiliki Technical skill terlihat pada penggunaan alat-alat teknologi yang langsung diterapkan di unit-unit pelayanan e-KTP. Ketiga skill tersebut dalam pelayanan e-KTP dilaksanakan secara berjenjang.

Meskipun demikian, pelayanan e-KTP ternyata belum selamanya berjalan baik dan sukses, berbagai kendala ditemukan di lapangan, misalnya masalah kondisi tofografi daerah, sumber daya aparatur, penggunaan sarana teknologi, anggaran yang masih terbatas pada tingkat kabupaten/kota.

Hasil penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang. Penelitian dilaksanakan pada warga yang telah mengurus dan mendapatkan pelayanan e-KTP pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik tidak signifikan mempengaruhi secara langsung kualitas pelayanan e-KTP atau rata-rata 78,44 persen. Pengaruh penerapan prilaku birokrasi signifikan terhadap kualitas pelayanan e-KTP atau rata-rata 77,38 persen. Dan apabila secara bersama penerapan prinsip pelayanan publik dan prilaku birokrasi secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan e-KTP atau 70,8 persen.

Sulit mengubah pola pikir masyarakat dan kelompok-kelompok kepentingan dari kasus tersebut, perubahan ini harus secara menyeluruh, mulai dari atas hingga ke bawah, dan tidak berakhir di situ, melainkan perubahan di bawah ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perubahan yang membawa dampak kepada masyarakat adalah ketika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Bahkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih ditemukan warga masyarakat yang sudah mengurus pembuatan e-KTP, tetapi masih belum juga memiliki e-KTP sampai sekarang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip pelayanan public tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Enrekangdengan hasil *uji hitung* lebih kecil dari nilai *t table* atau -0,637<2,000 dan nilai sig. lebih besar dari 0,05 atau 0,525>0,05. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak.
2. Prinsip perilaku Birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pelayanan Kartu Tanda Pendudukan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang dengan hasil *t hitung* lebih besar dari nilai *t table* atau 2,930>2,000 dan nilai sig. Lebih kecil dari 0,05 atau 0,004>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga apabila prinsip perilaku birokrasi lebih baik maka akan meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Prinsip Pelayanan Publik secara bersama-sama dengan prinsip perilaku Birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan catatan sipil Kabupaten Enrekang dengan hasil uji *f hitung* lebih besar dari nilai *f table* atau 6,480>3,110 dari nilai sig. lebih kecil dari 0,05 atau 0,002<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Sehingga, apabila Prinsip Pelayanan Publik diterpkan dengan baik dan secara bersama prinsip perilaku birokrasi yang baik maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik pula. Besar pengaruh Prinsip Pelayanan Public secara bersama-sama dengan prinsip perilaku birokrasi terhadap pelayanan kartu tanda penduduk eletronik pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Enrekang yaitu 12,6% termasuk dalam kriteria "sangat tidak baik" dari hasil 100% yang diharapkan .

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adisasmita Raharjo,2009,*Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah PPKED,* Makassar

[2] Amin Ibrahim, 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasiya, Pustaka Pelajar*, Yokyakarta

[3] Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Alfabeta*, Bandung

[4] Boediono B, 2003, *Pelayanan Prima Perpajakan*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

[5] Delly Mustafa, 2013, *Birokrasi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung

[6] Febriana Triwahyu, 2014, *Kualitas Pelayanan e-KTP Dinas Kependudukan dan catatan sipil*, UPN Veteran, Jawa Timur

[7] Ghozali, 2009, Dalam Kamaruddun Sellang (20015:152)

[8] H.M Ismail, 2009, *Etika Birokrasi*, Ash-Shiddiqy Press, Malang.

[9] I Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan*, Galia Indonesia, Bogor.

[10] Jamaluddin Ahmad, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Gafa Media*, Yokyakarta

[11] Jamaluddin Ahmad, 2011, *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*, Badan Penerbit UNM Makassar.

[12] Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasi. Ombak*

[13] Keban Y.T, 2014, enam dimensi strategis administrasi publik, gafa media, Yokyakarta

[14] Kusnendi, 2008; 96

[15] Lovelock dan Wright, 2005, *manajemen pemasaran jasa, indeks*, Jakarta.

[16] Moenir, 2002, *manajemen pelayanan umum di indonesia*, bumi aksara, Jakarta

[17] --------, 2008, *manajemen pelayanan umum*, bumi aksara, Jakrata

[18] Moh. Nasir, 2005, *metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

[19] Mustafa Hasbar, 2012, menguak perilaku organisasi ombak

[20] Ridwan dan Sunarto, 2007, *Pengantar Statistika untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung

[21] Sedarmayanti, 2007, Good Governance (Keperintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik),Mandar Maju, Bandung

[22] Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006 *Reformasi pelayanan publik*, Bumi Aksara, Jakarta

[23] Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* Alfabeta, Bandung.

[24] Said Mohammad, 2004, *pengaruh prilaku birokrasi terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan*, Bandung.

[25] The Liang Gie, 1993, *ensiplopedia administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

[26] Winarti, 2000,*teori organisasi dan pengorganisasian*, Rajawali Pers,Jakarta.

[27] Zainuddin Samad, 2016,*birokrasi dalam pelayanan publik*, ombak anggota Ikapi, yogyakarta.

KONSEP PENGENDALIAN TATA RUANG SESUAI ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SLEMAN

Bayu Susena, Yeni Widowaty
Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bayususena@gmail.com, yeniwidowaty@umy.ac.id

ABSTRAK: Maraknya pembangunan hotel dan mall merusak keistimewaan Yogyakarta, hadirnya bangunan tersebut menggusur kampung dan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Permohonan izin pembangunan hotel di Kabupaten Sleman pada tahun 2010 sebanyak 27 permohonan sedangkan pada bulan Maret 2012 permohonan sudah mencapai 9 permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan serta untuk merumuskan konsep ke depan pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data menggunakan tehnik studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu upaya pengendalian tata ruang di Sleman adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman.

Capaian pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman yaitu (1) Penyusunan *masterplan* komplek perkantoran Kabupaten Sleman, (2) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan jalan Kaliurang (3) Penyusunan *masterplan* kawasan bekas STM Sleman (4) Kegiatan pelayanan pertelaan (5) Kegiatan penyusunan RTBL kawasan Soropadan (6) Kegiatan penyusunan *Detail Engineering Design* Area Konservasi dan Area Masuk Utama Kawasan Lava Bantal Berbah. Pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu: Pembangunan ekonomi yang dinamis, pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima dan peka terhadap aspek budaya dan ramah terhadap lingkungan. Konsep ke depan pengendalian tata ruang dengan menekan dan meminimalkan alih fungsi lahan produktif dengan menegakkan aturan yang ada dan memaksimalkan peran masyarakat Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Pengendalian, Tata Ruang, Pembangunan Berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh. Dapat terlihat dampak negatif perbuatan manusia yang diakibatkan oleh pembangunan. Faktor pemicu persoalan lingkungan dapat terjadi keterbatasan ruang, keserakahan manusia, kegagalan dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Tafsir Al Mishbah menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut

berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang yang mengakibatkan keseimbangan lingkungan menjadi kacau baik di darat dan di laut. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampaknya kepada manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih dewasa ini. Memang Allah SWT menciptakan semua makhluk, saling kait berkait. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu maka kerusakan terjadi, dan kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.[1]

Pengelolaan tata ruang yang kurang baik mengakibatkan masalah-masalah baru yang justru memperburuk kehidupan masyarakat karena saat ini pengelolaan tata ruang telah menjadi wewenang pemerintah kota dan kabupaten, maka usaha meminimalisasi dampak akibat pembangunan terhadap lingkungan perlu dilakukan sesegera mungkin mengingat permasalahan itu semakin hari semakin menjadi isu yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan. Tata ruang sebenarnya memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upaya pengendalian tata ruang serta merupakan instrumen bagi upaya antisipasi penurunan kualitas ruang.[2]

Masalah-masalah baru akibat dampak pembangunan terhadap lingkungan harus diatasi dan perlindungan masyarakat merupakan tanggungjawab penyelenggara negara bilamana hak itu tidak dipenuhi. Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu cara untuk menjamin masyarakat mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat yaitu dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 menjelaskan strategi dalam rangka pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung, mengendalikan kawasan terbangun pada kawasan lindung, mengendalikan kegiatan budidaya pertambangan dan mengendalikan fungsi kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Merapi.

Menurut Francis Wahono, Direktur *Center for Integrated Develompment and Rural Studies* maraknya pembangunan hotel dan mall merusak keistimewaan Yogyakarta, Pasalnya hadirnya bangunan-bangunan itu menggusur kampung menyebabkan kerusakan lingkungan sekitarnya. Mall-mall dan superblock menjadi tontonan tak elok di tengah masyarakat yang setia mengawal keistimewaan penguasa. Citra rakyat yang ramah semakin pudar seiring dengan sering terjadinya konflik bernuansa sara. Kondisi Yogyakarta akan berjalan harmonis dan lestari apabila geoekologis sebagai acuan pertumbuhan, penghidupan dan pembangunan Yogyakarta.[3]

Permohonan izin pembangunan hotel di Kabupaten Sleman meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 27 permohonan untuk kegiatan penginapan, hotel, villa, kondotel dan kegiatan lain. Bulan Maret 2012 permohonan sudah mencapai 9 permohonan. Lokasi pembangunan di

[1] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Kesesuaian Al Qur'an*, Lentera Hati Volume 11, Jakarta, 2002, hlm.78

[2] Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, Alumni, Bandung, 2005,hlm. 202

[3] Berita UGM, https://www.ugm.ac.id/id/berita/9938-pembangunan.hotel.dan.mall.rugikan.masyarakat, 17 April 2017

Kecamatan Depok, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngaglik yang dekat dengan Kota Yogyakarta. Sebagian di Kecamatan Pakem sebagai salah satu tujuan wisata di Sleman yaitu Kaliurang.[4]

Pengendalian pemanfaatan tata ruang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah membuat peraturan-peraturan sebagai sarana pengendali untuk menjamin masyarakat mendapatkan lingkungan yang sehat dan menjamin pelaku usaha dalam berinvestasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas rumusan masalah yang diajukan adalah

1. Bagaimana pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana konsep ke depan pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman?

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk merumuskan konsep ke depan pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.[5]

Teknik pengumpulan data menggunakan tehnik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, website serta media lain. Wawancara dilakukan terhadap narasumber untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci, sehingga dengan adanya wawancara diharapkan dapat diperoleh data yang akurat tentang masalah yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan di Kabupaten Sleman.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang erat kaitannya dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang harus dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan harus jelas, sistematik, detail dan konkrit sehingga tidak menimbulkan multitafsir untuk diterapkan atau dijalankan.

Peluang Kabupaten Sleman dalam bidang tata ruang diantaranya :

1. Memiliki letak geografis yang strategis karena berada dalam koridor ekonomi regional (Jalan Yogya-Solo, Jalan Yogya-Magelang dan Jalan Yogya-Wates)
2. Memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengolah sumber daya alam yang ada
3. Sebagai salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kawasan strategis keistimewaan sehingga memiliki potensi menjadi tujuan wisata, pendidikan maupun tempat belanja bagi penduduk luar Sleman
4. Koordinasi dengan instansi Propinsi dan Pusat sudah terjalin

[4] KPPD, www.kppd.slemankab.go.id/permohonan-izin-pembangunan-hotel-di-sleman-meningkat.slm, 17 April 2017

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24

5. Banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sleman yang membantu kegiatan penelitian dan studi
6. Memiliki situs cagar budaya (*candi geoherriage*) dan cagar alam yang dikenal dunia internasional.

Berdasar peluang tersebut, pembangunan di Kabupaten Sleman berupaya untuk mensinergikan faktor ekonomi dan politik serta lingkungan. Dinamika sosial penduduk semakin komplek, urbanisasi mahasiswa dan pelaku bisnis berdatangan untuk investasi di Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman lebih selektif dalam memberikan izin tetapi tetap mempermudah para pelaku bisnis untuk berinvestasi. Pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selalu mempertimbangkan aspek masyarakat dan pelaku bisnis (investor). Kabupaten Sleman lebih berorientasi memperkuat perekonomian dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat bawah.

Logika berpikir pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyeimbangkan bisnis (investor) dan kelestarian lingkungan Kabupaten Sleman. Bahkan pemerintah Kabupaten Sleman melegalisasikan penataan ruang agar terlaksana dan sesuai dengan standar atau pedoman penataan ruang yang baik dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten Sleman membutuhkan aparatur yang memegang komitmen tinggi dalam penataan ruang sehingga selalu dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pengendalian tata ruang, pelatihan ini menghasilkan aparatur yang paham dan menguasai dalam bidang pengendalian tata ruang.

Pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman dilakukan dengan memantau alih fungsi pemanfaatan tanah pertanian misalnya lahan pertanian menjadi bangunan kos-kosan, apartemen, hotel, mall. Berikut data hotel yang terdiri dari hotel non bintang sampai dengan hotel berbintang lima yang ada di Kabupaten Sleman :

Tabel 1. Banyaknya hotel bintang dan non bintang dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Sleman[6]

No	Kecamatan	Non Bintang	Hotel Bintang				Jumlah	
			1	2	3	4	5	
1	Moyudan	0	0	0	0	0	0	0
2	Minggir	0	0	0	0	0	0	0
3	Seyegan	0	0	0	0	0	0	0
4	Godean	0	0	0	0	0	0	0
5	Gamping	4	0	0	0	0	0	0
6	Mlati	12	0	0	1	2	0	3
7	Depok	33	2	2	7	6	2	19
8	Berbah	1	0	0	0	0	0	0
9	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0
10	Kalasan	3	0	1	1	0	0	2
11	Ngemplak	4	0	0	0	0	0	0
12	Ngaglik	8	0	0	0	0	1	1
13	Sleman	0	0	0	0	0	0	0
14	Tempel	0	0	0	0	0	0	0
15	Turi	1	0	0	1	0	0	1
16	Pakem	258	0	0	1	0	0	1
17	Cangkringan	39	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	363	2	3	9	8	3	26

Sumber Badan Pusat Statistik Sleman

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa pemerintah Kabupaten Sleman tetap menerima pelaku bisnis (investor hotel). Kecamatan Pakem paling banyak adanya hotel non bintang yaitu 258 hotel. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 Pasal 47 bahwa Kecamatan Pakem merupakan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan serta kawasan resapan air, sedangkan pembangunan hotel merupakan kategori kegiatan yang merusak kualitas air. Pembangunan hotel tersebut juga belum mempertimbangkan aspek geologi bahwa Pakem merupakan daerah terdampak Erupsi Gunung Merapi yang rawan bencana.

Timbul konflik ketika masa pembangunan hotel. Masyarakat merasa dirugikan dengan pendirian hotel tersebut. Misalnya air sumur menjadi kering karena penggunakaan sumur bor oleh hotel, kesemrawutan jalan, dan polusi udara. Daya serap tenaga kerja masyarakat sekitar juga

[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017*, BPS Kabupaten Sleman, CV Lunar Media Sejahtera, 2017, hlm 326

rendah karena kualifikasi belum memenuhi persyaratan sebagai karyawan di hotel sehingga menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat terhadap pegawai berasal dari daerah lain. Berikut data terkait penempatan pencari kerja di Kabupaten Sleman:

Tabel 2. Penempatan Pencari Kerja Menurut Sektor Usaha[7]

No	Sektor Usaha	Persen
1	Pertanian	22,88
2	Pertambangan	2,07
3	Industri Pengolahan	10,31
4	Listrik, Gas dan Air	2,15
5	Bangunan	8,64
6	Hotel	14,97
7	Angkutan	4,45
8	Keuangan	13,26
9	Jasa Perorangan	21,28
	Jumlah	100

Sumber Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan Tabel 2 Sektor Hotel hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,97 %. Daya serap ini lebih kecil jika dibandingkan dengan daya serap Sektor Pertanian yaitu 22,88 %. Daya serap hotel termasuk rendah dan efek terhadap lingkungan kurang baik.

Menurut Emil Salim kalangan bisnislah yang "membunuh" kota-kota karena mencemari udara serta merusak lingkungan. Polusi udara dan pencemaran melebihi kemampuan lingkungan untuk menanggungnya akan dapat membuat kota menjadi sakit dan apabila tidak segera diupayakan untuk menanggulanginya, lama kelamaan kota tersebut akan mati terbunuh oleh penyakit yang telah lama diidapnya.[8]

Kota besar merupakan bentuk bencana yang hebat (*grand accident*) yang diluar kemampuan manusia untuk mengontrolnya.[9] Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena manusia dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dalam pengelolaan tata ruang. Rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula tanpa di dukung oleh para pengelola perkotaan dan daerah yang handal, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan yang jelas.[10]

Penatagunaan tanah merupakan subsistem penataan ruang sehingga penatagunaan tanah harus mampu mewujudkan rencana tata ruang wilayah sepanjang menyangkut tanah. Ketersediaan tanah sangat menentukan kerberhasilan pembangunan. Pembangunan tanpa tersedia tanah kiranya tidak mungkin karena tanah diperlukan sebagai sumber daya sekaligus sebagai tempat menyelenggarakan pembangunan. Sebaliknya tanah tidak akan memberikan kemakmuran tanpa pembangunan, sebab yang memberikan kemakmuran adalah kegiatan manusia di atasnya melalui pembangunan. Oleh karena itu penatagunaan tanah terkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pembangunan nasional.[11]

Salah satu program kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Lingkungan merupakan salah satu komponen yang menjadi pertimbangan dasar dalam kegiatan penataan ruang. Hal ini agar keputusan yang diambil dalam penataan ruang untuk kepentingan pembangunan dapat berkelanjutan serta tidak menimbulkan persoalan baru baik ekonomi, sosial budaya maupun fisik lingkungan. Masalah lingkungan merupakan hal utama dan penting dalam pengembangan wilayah. Alih fungsi lahan secara besar-besaran, degradasi lahan, pencemaran air, pencemaran tanah dan kerusakan lainnya.

Upaya pemerintah untuk pengendalian tata ruang salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman. Peraturan Bupati ini dikeluarkan karena mempertimbangkan dampak

[7] *Ibid*, hlm.71

[8] Emil Salim dalam Eko Budiharjo dan Sudanti Harjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 14

[9] Eko Budiharjo, *Tata Ruang Perkotaan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.11

[10] Eko Budiharjo dan Sudanti Harjohubojo, *Ibid*, hlm. 188

[11] Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 250

pada lingkungan, sosial dan ekonomi. Peraturan Bupati berlaku mulai tahun 2015 sampai dengan 2021. Pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman berjalan dengan efektif. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut tidak ada lagi pengeluaran izin pendirian hotel, apartemen, dan kondotel.

Menurut Gatot Saptadi selaku Plt Bupati Sleman mengatakan banyak hal yang harus dicermati lagi, tentang dampak munculnya hotel, apartemen dan kondotel, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat pasca berdirinya apartemen, hotel dan kondotel. Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Pendirian Hotel, Apartemen dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman itu tidak melarang sama sekali, melainkan hanya penghentian sementara.[12]

Pengendalian tata ruang harus tetap bersinergi dengan pembangunan. Arah pembangunan Kabupaten Sleman yaitu pada tahun 2018 yaitu meningkatkan pendampingan dan pemberdayaan sektor unggulan daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya. Arah pembangunan Kabupaten Sleman mengacu dari arah pembangunan dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Arah pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu dari arah pembangunan nasional yaitu memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Menurut Yoshiro Matsui dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka antara strategi pembangunan dan kebijakan lingkungan hidup haruslah terintegrasi, pernyataan beliau yaitu *The concept of sustainable development provides a framework for the integration of environmental policies and development strategies on the understanding that environmental and development are not separate challenges, they are inexorably linked. Development cannot subsists upon a deteriorating environmental resourse base, the environmnet cannot be protected when growth leaves out of account the costs of environmental destruction.*[13]

Strategi pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman sudah berjalan efektif, capaian pengendalian tata ruang yaitu (1) Penyusunan *masterplan* komplek perkantoran Kabupaten Sleman, keluaran dari kegiatan ini berupa pengelompokan lokasi perkantoran di Kabupaten Sleman dengan mempertahankan bangunan *heritage* yang sudah ada dan menata rencana bangunan baru. (2) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan jalan Kaliurang. RTBL tersebut seluas 63,78 Ha yang berada di Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati dan Kecamatan Ngaglik (3) Penyusunan masterplan kawasan bekas STM Sleman. Kawasan ini digunakan untuk kantor pelayanan perizinan yang representatif dan sebagai sarana penunjang kegiatan pendidikan dengan mempertimbangkan aspek fisik kawasan. (4) Kegiatan pelayanan pertelaan telah mengesahkan dua permohonan pengesahan pertelaan yaitu rumah susun *Student Castle* dan *Mataram City*. (5) Kegiatan penyusunan RTBL kawasan Soropadan seluas 50 Ha. (6) Kegiatan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Area Konservasi dan Area Masuk Utama Kawasan Lava Bantal Berbah.

Bentuk pengendalian tata ruang di Kabupaten Sleman salah satu contohnya dengan melakukan pemasangan papan peringatan. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah melakukan pemasangan papan peringatan di tiga lokasi yaitu *The Lost World Castle* di Kepuharjo Cangkirngan, Rusun Santri di Purwobinangun Pakem dan pengembangan hotel di Hargobinangun Pakem.

[12] http://krjogja.com/read/284338/moratorium-apartemen-di-sleman-telah-melalui-kajian.kr , 24 April 2017

[13] Yoshiro Matsuie, *The road to sustainable development: evalution of the concept of development in the UN*, dalam Konrad Ginther, *Sustainable Deleopment and Good Governenace*, London Penerbit Martinus Nijhoff Publishers, 1994, hlm 66

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman yang dijabat oleh Sumadi, pemasangan papan peringatan merupakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan penataan ruang di Sleman khususnya kawasan rawan bencana seperti pada pembangunan Hotel di Hargobinangun Pakem, karena daerah tersebut merupakan daerah yang rawan terdampak erupsi merapi sehingga pemerintah membatasi pembangunan hotel di kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sleman tidak memberikan izin di tiga lokasi tersebut. Ini untuk kepentingan masyarakat, kita tidak menghendaki jika ada bencana pemerintah yang disalahkan karena tidak melakukan sosialisasi. Kita tidak langsung membongkar tetapi memberikan peringatan dan dibuatkan berita acara.[14]

Pembinaan dan pengendalian izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman ada 3 bidang, yaitu bidang pertanahan, bidang tata ruang dan bidang pembinaan dan pengawasan. Bidang pembinaan dan pengawasan dibantu dua seksi, yaitu seksi pembinaan dan pengawasan dan seksi data dan informasi. Kepala Seksi Pembinaan dan pengawasan dijabat oleh Zaini Anwar, S.T., M.T. Beliau menyatakan bahwa

"Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bidang Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan pemulihan ruang. Peringatan tertulis dilakukan dengan cara melakukan tinjauan lokasi berkeliling Kabupaten Sleman atau mendapatkan informasi dari masyarakat untuk mengecek izin pemanfaatan ruang, kemudian di tuliskan dalam berita acara. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari. Sanksi pemulihan ruang belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran."[15]

Wujud nyata agar pengendalian tata ruang berjalan efektif dan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka dibuat aturan berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang bertujuan untuk memberikan acuan dalam memeriksa dan mengevaluasi indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Dasar diadakannya audit karena adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, temuan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang dan bencana yang diduga disebabkan adanya indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Susunan keanggotaan Tim Audit Tata Ruang terdiri Ketua dan Anggota yang meliputi pegawai negeri sipil yang membidangi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, ahli perencanaan wilayah dan kota, ahli sistem informasi geografis dan ahli hukum. Tim audit tata ruang Kabupaten memiliki kewenangan dalam melakukan audit tata ruang pada wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Tim audit tata ruang Kabupaten Sleman maka hanya memiliki kewenangan dalam melakukan audit tata ruang pada wilayah Kabupaten Sleman. Jangka waktu audit tata ruang paling lama sepuluh bulan dan anggaran biaya memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing. Audit harus dilaksanakan secara sistematis, objektif dan terdokumentasi untuk menentukan indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang.

Langkah-langkah dalam pengendalian tata ruang agar sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan yaitu

1. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensi yang dapat mendatangkan investasi baik pemerintah, swasta maupun masyarakat tetapi meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan mengupayakan sinergi dengan pembangunan berkelanjutan.
2. Memacu perkembangan daerah Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan potensi-potensi yang secara optimal melalui program investasi terarah dan sinergi dengan pembangunan berkelanjutan.

[14] http://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/tiga-bangunan-di-sleman-yang-tak-berizin-ini-bisa-saja-dibongkar, 24 Januari 2018

[15] Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.00

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat makmur sentosa melalui program pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan lintar sektoral baik pusat, provinsi dan kabupaten.
4. Memanfaatkan sumber daya alam untuk mengembalikan keseimbangan dan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan hidup yang sinergi dengan pembangunan berkelanjutan.

Pengendalian tata ruang di kabupaten Sleman sesuai dengan tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu:[16]

1. Pembangunan ekonomi yang dinamis (*Economically viable*)
2. Pembangunan yang secara sosial politik dapat diterima dan peka terhadap aspek budaya *(Socially- politically acceptable and culturally sensitive)*
3. Ramah terhadap lingkungan *(Environmental Friendly)*

B. Konsep ke depan pengendalian tata ruang sesuai asas pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sleman

Konsep ke depan pengendalian tata ruang yaitu menekan dan meminimalkan alih fungsi lahan produktif dengan menegakkan aturan-aturan yang ada dan memaksimalkan peran masyarakat Kabupaten Sleman. Selain itu harus didukung oleh pengelola perkotaan dan daerah yang handal, dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Besaran luas alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman sebesar 61,67 Ha berdasarkan perijinan yang diajukan dan disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Perizinan pemanfaatan ruang telah dilakukan pengawasan secara berkesinambungan agar alih fungsi lahan dapat terkendali dan tidak menganggu kelestarian lingkungan. Bentuk pengawasan lainnya yaitu meminimalisasi laju konversi lahan pertanian produktif dan menegakkan peraturan penataan ruang.

Wujud penegakan peraturan penataan ruang di Kabupaten Sleman maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Izin pemanfaatan ruang wajib dimiliki oleh setiap orang yang akan melakukan kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi. Izin pemanfaatan ruang terdiri dari izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya. Bupati Kabupaten Sleman yang memberikan izin pemanfaatan ruang atau dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang kepada kepala organisasi perangkat daerah.

Masyarakat wajib berperan aktif dalam memantau penegakan aturan-aturan. Di kabupaten Sleman sudah menerapkan *Smard City*. Menurut Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat M.Eng *Smard City* yaitu adalah kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota. Dari definisi tersebut, ciri solusi dalam *Smard City* yaitu berupa pemikiran-pemikiran baru, terintegrasi, antar lembaga pemerintah hingga lembaga non-pemerintah, responsif terhadap persoalan kota serta solusi yang dirancang untuk menjadi solusi berkelanjutan, bukan hanya solusi sesaat. Kota-kota yang sudah menerapkan *Smard City* yaitu Bandung, Surabaya, Denpasar, Makasar, Jakarta, Sleman, Menado, Binjai, Pontianak, dan Bogor [17]

Masyarakat apabila menemukan atau menilai ada ketidakwajaran dalam suatu penerapan peraturan maka dapat melaporkan langsung melalui lapor sleman. Lapor Sleman merupakan salah satu wujud *smard city* di Kabupaten Sleman. Lapor Sleman merupakan cikal bakal penerapan *smard city* di kabupaten lain di Propinsi Yogyakarta.

[16] Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, www.sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan, 11 Januari 2018

[17] Institut Teknologi Bandung, https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan , 11 Januari 2018

Menurut Bupati Sleman Sri Purnomo menjelaskan selain melalui aplikasi Lapor Sleman yang dapat diunduh di playstore, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui berbagai media lainnya yang sudah diintegrasikan seperti Twitter Kabupaten Sleman, surat warga Sleman, websitesleman.sorot.id, Facebook Kabupaten Sleman, dan melalui SMS. Dengan Lapor Sleman warga bisa berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, kritik dan laporan di lingkungan sekitarnya dengan lebih mudah dan cepat. Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kesiapan internal hingga pemahaman masyarakat akan pentingnya masukan dari masyarakat akan fasilitas Kabupaten. [18]

Bentuk partisipasi peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman yaitu:

1. Masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan ininsentif serta pengenaan sanksi.
2. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
3. Pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
4. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembuatan legislasi penataan ruang. Kecenderungan yang selama ini ditampilkan oleh pengambil kebijakan tata ruang adalah kurang menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat terkadang hanya dipolitisir untuk kepentingan lain yang sebenarnya semakin jauh dari harapan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak terlalu diperdulikan. Keputusan-keputusan yang dilaksanakan secara *top down* biasanya mendapat perlawanan dari masyarakat.

Masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan. *Pertama*, merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan. *Ketiga*, partisipasi masyarakat merupakan suatu hak demokrasi bagi masyarakat.[19]

Masyarakat dapat memberontak karena mereka menilai kepentingannya diabaikan. Proses pembuatan kebijakan yang baik sangat memerlukan partisipasi masyarakat, masyarakat dilibatkan dari awal proses, masyarakat perlu didengar dan diajak diskusi dalam suasana tanpa tekanan. Prinsipnya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tata ruang harus bermanfaat bagi masyarakat.

Selain masyarakat, tidak kalah pentingnya agar hukum dapat ditegakkan diperlukan pembenahan perilaku moral. Berjalannya hukum akan sangat tergantung dari perilaku moral para pengemban amanah hukum, mulai dari aparatur penegak hukum hingga pelaksana pendidikan hukum. Moral aparatur penegak hukum yang menjalankan hukum menjadi hal vital dari bergeraknya mesin hukum ke arah keadilan dan kebenaran. Penyucian jiwa menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan perubahan akhlak para penegak hukum. QS As Syams ayat 9-10 merupakan pedoman bagi manusia pengemban amanah hukum untuk terus berupaya melakukan pembersihan jiwa.[20]

Prinsip Moralitas sangat diperlukan dalam penyusunan peraturan tata ruang agar pembuat

[18] https://inet.detik.com/cyberlife/d-3212340/ini-cara-sleman-menuju-kota-pintar, 11 Januari 2018

[19] Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, UGM Press, 1991, hlm 154

[20] Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 170.

kebijakan terpengaruh pola pikir dan tingkah laku yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat. Prinsip ini sangat penting sebagai penyaring seluruh substansi kebijakan penataan ruang yang tidak berpihak kepada kepentingan pebisnis atau pengusaha. Selama ini pertimbangan moral dikesampingkan sehingga banyak kebijakan penataan ruang merugikan masyarakat tetapi tetap disahkan dan diberlakukan.

Konsep pembangunan di Kabupaten Sleman sebaiknya mempertimbangkan yaitu:

1. Pembangunan yang berorientasi jangka panjang menggunakan pendekatan integratif dan menghargai keanekaragaman serta menjamin pemerataan sosial.
2. Berinovasi untuk menemukan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dengan bijak sehingga generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam tersebut.
3. Perubahan iklim di Indonesia, intensitas hujan di musim hujan cenderung meningkat, sementara curah hujan di musim kemarau cenderung menurun sehingga risiko kebanjiran dan kekeringan akan semakin meningkat.
4. Transportasi yang baik dan efisien sehingga meminimalkan kemacetan.
5. Pertambahan penduduk perkotaan pada umumnya didominasi oleh tingginya arus urbanisasi.
6. Pengelolaan sampah kota jika tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas *methan* yang mencemari udara.
7. Emisi gas rumah kaca di kota dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, industri dan rumah tangga.
8. Air bersih dengan melakukan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah.
9. Pembangunan taman-taman kota sebagai ruang publik hijau dan peningkatan jumlah dan distribusi ruang terbuka hijau.

IV. KESIMPULAN

Kabupaten Sleman sudah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk dapat melaksanakan pengendalian tata ruang secara efektif sesuai asas pembangunan berkelanjutan. Konsep ke depan yang perlu dikembangkan adalah dengan menekan dan meminimalkan alih fungsi lahan produktif dengan menegakkan aturan-aturan yang ada dan memaksimalkan peran masyarakat dalam partisipasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. M.Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Kesesuaian Al Qur'an, Lentera Hati Volume 11, Jakarta, 2002, hlm.78

[2]. Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, Alumni, Bandung, 2005,hlm. 202

[3]. Berita UGM, https://www.ugm.ac.id/id/berita/9938-pembangunan.hotel.dan.mall.rugikan.masyarakat, 17 April 2017

[4]. KPPD, www.kppd.slemankab.go.id/permohonan-izin-pembangunan-hotel-di-sleman-meningkat.slm, 17 April 2017

[5]. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 24

[6]. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman Dalam Angka 2017, BPS Kabupaten Sleman, CV Lunar Media Sejahtera, 2017, hlm 326

[7]. Ibid, hlm.71

[8]. Emil Salim dalam Eko Budiharjo dan Sudanti Harjohubojo, Kota Berwawasan Lingkungan, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 14

[9]. Eko Budiharjo, Tata Ruang Perkotaan, Alumni, Bandung, 1996, hlm.11

[10]. Eko Budiharjo dan Sudanti Harjohubojo, Ibid, hlm. 188

[11]. Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm 250

[12]. http://krjogja.com/read/284338/moratorium-apartemen-di-sleman-telah-melalui-kajian.kr , 24 April 2017

[13]. Yoshiro Matsuie, The road to sustainable development: evalution of the concept of development in the UN, dalam Konrad Ginther, Sustainable Deleopment and Good Govermenace, London Penerbit Martinus Nijhoff Publishers, 1994, hlm 66

[14]. http://jogja.tribunnews.com/2017/12/05/tiga-bangunan-di-sleman-yang-tak-berizin-ini-bisa-saja-dibongkar, 24 Januari 2018

[15]. Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.00

[16]. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, www.sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan, 11 Januari 2018

[17]. Institut Teknologi Bandung, https://www.itb.ac.id/news/read/56387/home/guru-besar-itb-prof-suhono-jabarkan-konsep-kota-cerdas-sebagai-solusi-masalah-perkotaan , 11 Januari 2018

[18]. https://inet.detik.com/cyberlife/d-3212340/ini-cara-sleman-menuju-kota-pintar, 11 Januari 2018

[19]. Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, UGM Press, 1991, hlm 154

[20]. Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 170.

Analisa Belum Tersistematisnya Diplomasi Bencana dengan menggunakan Analisa Konten Terhadap Regulasi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bondan Gazali Muchtar
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Bondan_gm@yahoo.co.id

ABSTRAK: Masyarakat Indonesia menjadikan bencana sebagai *momok* yang terus menerus dipandang sebagai kejadian negative. Ketakutan terhadap dampak dari bencana menjadi alasan utama bagi masyarakat di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bencana dijadikan sebagi instrument penting dalam *Soft Power* Diplomasi pada tingkat regulasi Nasional dan Rgulasi Daerah. Metode analisa konten dianggap mampu menjawab permasalahan yang ada pada kasus yang terjadi. Penelitian ini diharpakan dapat menunjukan peran pemerintah dalam proses Diplomasi Bencana. menggunakan analisis konten terhadap regulasi Daerah yang terkait dengan bencana. Temuan dari tulisan menunjukkan bahwa Konsep Diplomasi Bencana belum dijadikan sebagai instrument penting dalam melakukan kerjasama Internasional disetiap Regulasi Daerah. Maka Korelasi dari Diplomasi Bencana berdasarkan analisa konten Diplomasi Bencana belum tersistemasi dengan regulasi Kebencanaan. Itu, menunjukan Diplomasi bencana yang ada di daerah belum secara intens merujuk kedalam singkronisasi diplomasi bencana sebagai alternative Kerjasama Internasional.

Kata Kunci : *Diplomasi Bencana, Kerjasama Internasional, Soft Power, Analisa Konten*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bencana alam terjadi tanpa mengenal batas geografis dan administratife suatu Negara. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terletak dalam "Ring of Fire" [1] tentunya seringkali terjadi bencana alam. Bencana alam yang yang terjadi di Indonesia sangat bermacam jenisnya. Potensi bencana alam yang ada di Indonesia perlu diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga tahun 2014 merekam kurang lebih telah terjadi tujuh belas tipe bencana alam yang terjadi dan tersebar di hamper di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa diantaranya adalah gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, banjir sungai, dan tanah longsor. Ditambah lagi dengan kondisi Indonesia yang terletak pada pertemuan lempeng kulit aktif yang bergerak ketika terjadi gesekan, sehingga ketika lempeng bumi tersebut bergerak akan mengakibatkan gempa bumi dan rangkaian gunung api yang berada di sejalur pada lempeng te/rsebut.

Menurut sebuah laporan UN-ISDR yang berjudul (*United Nations International Strategies for Disaster Reduction) entitled "The Asia Pacific Disaster report 2010*", Indonesia memiliki jumlah kematian terbesar kedua, terhitung 191.164 orang meninggal, karena bencana di Asia Pasifik selama dua puluh terakhir tahun.[2]

[1] Ring of Fire atau sering disebut Cincin Api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra pasifik. Ring of Fire ini terletak di samudra pasifik yang meliputi sejumlah gunung berapi aktif dan juga gempa bumi. Kawasannya membentang dari pantai barat Amerika Utara hingga ke Pantai timur asia. Sedangkan di Indoneisa terdapat gunung aktif yang merupakan jalur dari ring of fire ini.

[2] ESCAP, The Asia Pacific Disaster Report. 2010. Protecting Development Gains, UN-ISDR, Bangkok.

Dilaporkan juga bahwa kerugian finansial diprediksi sekitar US $ 22,5 miliar. Selain itu, Bappenas menyebutkan bahwa, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan dana sebesar US $ 12 triliun sebanyak 3,1% PDB Indonesia pada tahun 2007 atau 15,8% dari APBN di tahun 2007.[3]

Peneltian yang dilakukan oleh *United Nations Environment Program* (UNEP) Jakarta menempati urutan ketiga sebagai kota yang tercemar udaranya setelah Bombay (India) dan Mexico City (Meksiko)[4] kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 dapat dikatakan diluar kendali, dimana menurut Bank Dunia pada bulan Desember 2015 terdapat 100.000 titik api kebakaran hutan buatan manusia yang terjadi bulan Juni dan Oktober 2015 membakar sekitar 2,6 hektar lahan sehingga mengakibatkan kabu beracun yang menyebar tidak hanya di Indonesia saja melainkan hingga ke Negara bagian lain di kawasan Asia Tenggara, sehingga mengakibatkan gangguan diplomatic antar Negara tersebut. [5]

Pada hakikatnya kejadian bencana alam tidak mengenal batas geografis dan juga batasan Negara. Berbagai kejadian bencana di Indonesia seperti bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Sumatra pada tahun 2004 yang dampaknya memang dirasakan hingga ke Negara tetangga, seperti Thailand, Sri Langka dan Indian.[6].

Memang pemerintah dirasa perlu dalam menanggapi studi terkait dengan kebencanaan di Indonesia, begitu pula dengan kejadian bencana yang terjadi di daerah. Pemerintah daerah menjadi birokrasi pertama yang akan menangani kondisi dimana sedang terjadinya kebencanaan, sehingga dirasa perlu untuk memperhatikan regulasi kesiapiagaan kebencanaan termasuk pelatihan semenjak dini untuk mengantisipasi kebencanaan di tingkat daerah.

Pada tanggal 27 Mei 2006 tepat pukul 05.53 pagi hari, Yogyakarta diguncang gemp yang cukup besar dengan merusak sebelas wilayah yang ada di DIY dan Jawa Tengah. BMKG mencatat kekuatan gempa 5,9 Skala Richter

Sedangkan bencana yang sering terjadi lainnya dikawasan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi satu dari 129 gunungapi yang ada di wilayah Indonesia Gunung Merapi termasuk yang paling aktif. Gunung Merapi adalah

Untuk mempertegas landasan mengenai diplomasi Bencana Alam juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830).

A. *Rumusan Masalah*

Dari latar belakang yang dikemukakan disimpulkan menjadi rumusan permasalahan yaitu, Alasan Kenapa diplomasi bencana di DIY belum tersistemasi dengan regulasi kebencanaan ?

B. *Tujuan & Mnafaat Penelitian*

Penelitian ini bertujuna untuk mengetahui kendala yang dialami Pemerintah daerah dalam menyusun kerjasama internasional terkait dengan bencana di Yogyakarta. Nantinya hasil dari penelitian ini diharpakan mampu dijadikan sebuah pertimbangan dalam mengembangkan Diplomasi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta

C. *Kajian Pustaka*

1. *Diplomasi*

Setiap Negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai yang bertujuan agar

[3] Bappenas, 2007. Hasil Analisa Sistem Penanggulangan Bencana, Bappenas, Jakarta.

[4] Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, Cet.1,(Surabaya : Airlangga University Press,2004) hal.7

[5] Ibid, Pramudya Sunu

[6] Borrero, J. C. (2005). Field data and satellite imagery of tsunami effects in Banda Aceh. Science, 308(5728), 1596.

masyarakat dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman. Untuk merealisasikan kepentingan nasional tersebutsuatu Negara perlu mengadakan kerjasama dnegan Negara lain dan juga sebaliknya. Oleh karena itu maka diplomasi menjadi sebuah hal yang perlu dilakukan oleh suatu Negara agar kerjasama dapat dilakukan dengan Negara laim. Beberapa ahli mendefinisikan Diplomasi secara berbeda beda, menurut brownLie (1979) diplomasi dilakukan oleh suatu negara untuk mendirikan atau memelihara komunikasi secara harmonis satu sama lain atau untuk melakukan politik dan transaksi yang sah diantara keduanya. Hal yang sama diutarakan oleh Green (1987) bahwa diplomasi adalah alat yang digunakan oleh tiap negara untuk melakukan komunikasi dengan negara lainnya. Berbeda dengan kedua penstudi diatas, Satow (1957) berpendapat bahwa penerapan diplomasi dalam hubungan diantara dua negara, utamanya antara negara maju dan negara berkembang, adalah untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, diplomasi dapat juga berarti cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara (Mouna, 2000).[7]

2. *Diplomasi Bencana*

Sedangkan menurut Louise K. Comfort, bencana alam dalam hal ini menjadi salah satu isu yang krusial bagi penigkatan kualitas kesejahteraan manusia.Dalam hal ini bencana tidak harus selalu didefinisikan hanya sebatas isu bencana alam semata, melainkan bencana global lainnya seperti virus endemic flu burung, flu babi, bahkan hingga isu senjata mematikan dan pemanasan global. Pendefinisian bencana sebagai isu global diharpakan akan dapat meningkatkan empati dari masyarakat dunia untuk terlibat bersama dalam menyelesaikan permasalahan bencana[8]

Diplomasi bencana (*Disaster Diplomacy)* merupakan suatu kegiatan diplomasi yang diterapkan pada saat bencana alam terjadi pada suatu Negara atau daerah. Menurut Ilan Kelman dalam hasil tulisannya *Tsunami Diplomacy,* hubungan antar Negara yang didasarkan pada bencana atau penaggulangan bencana sifatnya tidak bertahan lama, teteapi bisa mengesampingkan konflik yang pernah muncul dan menghilangkan hubungan yang tidak baik. Selain itu menurut Kelman, perdamaian bisa tercipta antara pihak yang bersengketa didalam kondisi penanggulangan bencana.[9]

Diplomasi bencana memfokuskan atau memberikan perhatian yang lebih terhadap aktifitas yang terkait dengan kebencanaan yang meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana terjadi, dengan harapan dapat menghasilkan kerjasama antara pihak-pihak terkait baik secara nasional maupun secara internasional.Dalam penerapannya, diplomasi bencana dapat dikategorikan sebagai diplomasi lunak (*Soft Power Diplomasy)*.Yaitu sebuah diplomasi yang dijalankan atas dasar kesepahaman antara beberapa pihak, baik dari Negara subyek atau obyek dengan harapan untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan.[10]

Dinamika kerjasama antara berbagai organisasi dapat dipandang sebagai sebuah fenomena. Pemahaman istilah tentang *Joint venture, strategic alliances, quasi-markets, interorganitational network dan interagency* tidak dipandang sebatas sebuah pendekatan konvensional tetapi merupakan sebuah

[7]Dikutip dari jurnal on line, *Diplomasi Sebagai KomponenPenting Dalam Politik Luar Negri.http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/ diakses pada 22 Desember 2015*

[8]*Ibid*

[9] Kelman, I, 2005, Tsunami Diplomacy: Will the 26 December, 2004 Tsunami Bring Peace to the Affected Countries?, Sociological Research Online, vol. 10, issue 1, http://www.socresonline.org.uk/10/1/kelman.html,diakses pada 23 november 2015

[10] SL Roy, *Op. Cit*

perubahan kontemporer organisasi. Fenomena ini dipandang sebagai bentuk hybrid kerjasama (wehner et al. 2009)

Stephenson (2005) menyatakan upaya penignkatan kerjasama dari sejumlah organisasi bantuan kemanan dalam oprasi penanggulangan bencana dapat dicapai dengan menigkatkan kerjasma melalui kesepakatan interorganisaional. Adapun Hidden (1989) menyatakan kesuksesan oprasi management bencana dalam pelaksanaan didasarkan pada keefektifan kerjasama interagency. Bucher dan Ashton (2004) menyebutan istilah agency sebagai organisai mandiri yang bekerja sesuai dengan tujuan. Lembaga (*agency)* menunjukan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan pada masyarakat. Organisasi oleh Camphoux didefinisikan sebagai system yang melibatkan kerjasama dua atau lebih orang untuk mencapai tujuan.

II. METODE PENELITIAN

A. *Teknik Pengumpulan Data*

Peneliti menggunakan metode analisa data yang didasarai dari dokumen yang mendukung penelitian. Disamping itu, teknik analisa dokument yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada catatan–catatan atau arsip–arsip berupa jurnal, buku, Undang-undang,laporan tertulis dan dokumen–dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari BPBD DIY, BAPPEDA dan Biro Investasi dan Kerjasama juga Organisasi Internasional yang bergerak dalam kebencannan.

B. *Analisa Data*

Dalam analisis nantinya penulis menggunkan system analisa konten, dimana kata demi kata akan ditelusuri guna menenemukan artikulasi subjek yang akan dicari dan dapat disimpulkan dengan menggunakan analisa konten.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Dominasi Aktifitas Non Diplomasi dalam Regulasi Bencana*

Dominasi aktifitas Non diplomasi dibuktikan dalam bentuk penelitian pada ranah Aktifitas diplomasi dan aktifitas non diplomasi. Pada penelitian ini akan dilacak pencarian dengan kata kunci yang mengarah pada aktifitas diplomasi dan non diplomasi. Aktifitas diplomasi dibuktikan dengan indicator Perjanjian Internasional, kerjasama internasional . sedangkan untuk aktifitas non dilomasi dibuktikan dengna kata kunci yang menjadi aktifitas rutin ketika terjadinya bencana.

Penulis menggunakan 2 (dua) model analisa konten dimana keduanya dibagi menjadi regulasi nasional dan regulasi daerah dengan subjek penelitian yaitu Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dijadikan sebagai lokasi penelitian karenan memang kondisi alam yang dibilang rawan dengan bencana. Terlebih lagi kejadian 2006 silam membuktikan kepada dunia betapa dahsyatnya potensi bencana yang ada di DIY sehingga banyak organisasi internasional datang untuk meringankan beban kepada korban bencana.

Dalam kaitannya dengan hasil temuan, kemudian dua indicator tersebut dibandingkan sejauh mana bencana dapat dijadikan sebagai instrument untuk melakukan sebuahaktifitas *soft diplomacy*. Ataukah selama ini regulasi di tingkat nasional masih menganggap bencana dapat dijadikan sebuah instrument yang kuat untuk aktifitas diplomasi? Hasil pencarian dengan kata kunci sebagai berikut

Tabel I
Aktifitas DIplomasi dan Non Diplomasi pada tingkat regulasi nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Aktifitas Diplomasi	Negosiasi	0	0	0	0	0	0	0
	Komunikasi	0	0	0	1	0	1	0.0222222
	Kerjasama Internasional	0	2	0	0	0	2	0.0444444
	Perjanjian Internasional	1	0	0	1	0	2	0.0444444
	Diplomasi	0	0	0	0	0	0	0
	Interaksi	0	0	0	0	0	0	0
	Kepentingan	2	0	0	2	1	5	0.1111111
	Hubungan Internasional	0	0	0	0	0	0	0
	Pengelolaan	13	7	13	0	2	35	0.7777778
							45	0.252809
Aktifias Non Diplomasi	Pelatihan	5	11	1	0	2	19	0.1428571
	Pencegahan	7	7	2	1	5	22	0.1654135
	Kesiapsiagaan	3	0	2	0	6	11	0.0827068
	Pembinaan	0	1	0	0	8	9	0.0676692
	Perlindungan	1	5	1	3	3	13	0.0977444
	Melindungi (ML)	2	1	0	0	3	6	0.0451128
	rekonstruksi (RS)	5	10	1	0	2	18	0.1353383
	Rehabilitasi (RH)	8	18	3	1	5	35	0.2631579
							133	0.747191

Penulis menggunakan regulasi nasional yang meliputi Undang-undang No 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 serta Peraturan Ketua BPBD No 3 Tahun 2008. Dalam regulasi ini penulis menggunakan 2 (dua indicator) yaitu **Aktifitas Diplomasi** dengan kata kunci *Negosiasi, Komunikasi, Kerjasama Internasional, Perjanjian Internasional, Diplomasi , Interaksi, Kepentingan Hubungan Internasional Pengelolaan sedangkan* **Aktifitas Non Diplomasi** *dengan kata kunci Pelatihan, Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pembinaan, Perlindungan, Melindungi (ML), rekonstruksi (RS) , Rehabilitasi (RH).*

Indikator tersebut digunakan penulis guna dijadikan sebagai pembanding apakah regulasi yang ini seimbang antara keda aktifitas tersebut. Namun hasil yang diperoleh dari analisa konten yang dugunakan, menunjukkan bahwa aktifitas Non diplomasi dalam kebencanaan menunjukkan dominasinya daripada aktifitas diplomasi. Dimana aktifitas non diplomasi menyumbang presentase sebesar 74% dari total temuan dengan temuan sebanyak 133 kata. Dominasi temuan tersebut diperoleh dari kata rehabilitasi yang mendapat total temuan sebanyak 35 kata temuan. Yang tentunya menunjukkan bahwa aktifitas rehabilitasi pada korban bencana segera mungkin dilakukan guna tidak menimbulkan kerugian yang berkepanjangan terhadapt masyarakat.

Sedangkan aktifitas Diplomasi pada tragedy kebencanaan hanya muncul sebanyak 25%, hasil temuan tersebut berarti bahwa aktifitas diplomasi bencana sama sekali tidak menunjukkan adanya katifitas diplomasi kebencanaan. Pemerintah tidak memandang penting akan aktifitas tersebut. Padahal jika aktifitas tersebut didalami dan dijadikan modal

utama kerjasama kebencanaan tentunya akan menimbulkan dampak yang positif bagi kerdua belah pihak. Pengelolaan menjadi temuan terbanyak pada hasil analisa konten dengan menunjukkan sebanyak 7% temuan sedangkan Kerjasama Internasional dan Perjanjian internasional masing-masing mendapat temuan sebanyak 0,4% saja atau hanya 2 kata temuan yang didapat.

Tabel 2
Dominasi Aktifitas Non Diplomasi dalam Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan				Total	Presentase
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11		
		Score	Score	Score	Score		
Aktifitas Diplomasi	Negosiasi	0	0	0	0	0	0
	Komunikasi	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama Internasional	0	4	0	0	4	0.081632653
	Perjanjian Internasional	0	0	0	0	0	0
	Diplomasi	0	0	0	0	0	0
	Interaksi	0	0	0	0	0	0
	Kepentingan	10	7	0	2	19	0.387755102
	Hubungan Internasional	0	0	0	0	0	0
	Pengelolaan	13	12	1	0	26	0.530612245
						49	0.23902439
Aktifias Non Diplomasi	Pelatihan	13	10	0	0	23	0.147435897
	Pencegahan	6	7	3	1	17	0.108974359
	Kesiapsiagaan	9	10	1	0	20	0.128205128
	Pembinaan	0	4	1	0	5	0.032051282
	Perlindungan	15	9	1	1	26	0.166666667
	Melindungi (ML)	3	1	0	0	4	0.025641026
	rekonstruksi (RS)	11	10	1	0	22	0.141025641
	Rehabilitasi (RH)	16	17	4	2	39	0.25
						156	0.76097561

Temuan diatas adalah sebuah regulasi yang ada pada Daerah Istimewa Yogyakarta dimana seperti yang saya sebutkan diatas bahwasanyya DIY memiliki potensi bencana yang sangat besar, oleh karena itu sangat menarik bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian secara mendalam, bagaimana peran pemerintah daerah unutk mengantisipasi bencana serta sejauh mana Pemda menajdikan bencana sebagai instrument dalam melakukan kerjasama kebencanaan. Atau sebaliknya, apakah bencana masih dijadikan sebagai momok dan hanya sebatas melakukan kegiatan kesiapsiagaan terhadapa bencana ?

Tidak jauh berbeda dengna hasil yang ada pada regulasi di tingkat nasional, regulasi pada tingkat daerah tidak menunjukkan hasil yang signifikan dimana indicator Aktifitas Diplomasi tidak menunjukan ke eksistensiannya, dimana temuan hanya menghasilkan 24 % kata yang menggunakan diksi indicator Aktifitas diplomasi. Uniknya adalaha diksi Negosiasi, Komunikasi, Perjanjian Internasional, Diplomasi , Interaksi dan Hubungan Internasional sama sekali tidak disinggung dalam semua regulasi yang ada pada subjek penelitian. Sedangkan kata Kerjasama Internaional mendapat temuan sebanyak 8% sedangkan diksi Kepentingan mendapat temuan sebesar 38% dari total diksi yang digunakan.

Aktifitas Non diplomasi masih dijadikan senjata untama dalam penanggulangan bencana, dimana aktifitas ini mendapat temuan sebanyak 76% yang dapat dikategorikan sebagai aktifitas yang sangat mendominasi pada isu kebencanaan. Rehabilitasi mendapt temuan paling banyak diantara diksi lain yang digunakan yaitu 25% temuan selanjutnya kata Perlindunga mendapat temuan terbanyakkedua yaitu 26% juga aktifitas Rekonstruksi mendapat temuan sebesar 14%

kata. Artikulasi aktifitas non diplomasi menjadi indicator yang dominan pada regulasi di DIY. Hal tersebut menunjukan bahwa dominasi aktifitas non diplomasi dijadikan sebuah aktifitas penting namun Aktifitas Diplomasi dijadikan sebagai aktifitas pendukung dari isu kebencanaan di DIY.

B. *Aktor DIplomasi dalam bencana*

Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, penanggulangan tidak sebatas ketika tanggap darurat melainkan juga aktifitas sebelum terjadinya bencana, kesiapsiagaan menjadi kegiatan yang penting guna mengurangi dampak dari resiko bencana.Dalam kegiatan kebencanaan semua elemen dirasa untuk mensingkronkan program kegiatan untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana. Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Usaha ataupun Lembaga Internasional berperan penting dalam proses penanggulngan bencana. BNPB, BPBD berpartner untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik untuk mensingkronkan dengan Platform Nasinal, daerah maupun tematik. Penulis mencoba melacak singkronisasi program yang dicanangkan didalam Undang-undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah ataupun regulasi yang diterbitkan guna sebagai payung hukum dalam penanggulangan kebencanaan. Dengan menggunakan konten analisis sebagai langkah untuk menelaah apakah program tersebut dijadikan sebagai payung hukum atau sebaliknya.

Tabel 3
Aktor Kebencanaan Regulasi Nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Aktor Internasional	PBB	0	1	0	0	0	1	0.012987013
	Perserikatan Bangsa Bangsa	1	1	0	5	0	7	0.090909091
	Negara Lain	1	0	0	0	1	2	0.025974026
	Lembaga Internasioanl	3	0	0	17	0	20	0.25974026
	Internasional	12	3	0	13	3	31	0.402597403
	Masyarakat Internasional	0	0	0	0	0	0	0
	Lembaga Asing Non Pemerintah	3	0	0	13	0	16	0.207792208
							77	0.173814898
Aktor Domestik	Pemerintah Pusat	1	0	0	0	1	2	0.005464481
	Pemerintah Daerah	7	7	2	1	22	39	0.106557377
	Masyarakat	52	103	19	0	30	204	0.557377049
	Domestik	0	0	2	0	0	2	0.005464481
	Bisnis	0	0	0	0	0	0	0
	Organisasi Sosial	0	0	1	0	0	1	0.00273224
	BNPB	5	65	21	20	7	118	0.322404372
	BASARNAS	0	0	0	0	0	0	0

Pada temuan ini akan menunjukan siapakah actor yang mendominasi ketika terdapat isu kebencanaan di tingkat Nasional, dalam pengelompokan penelitian ini, penuis menggunakan 2 (dua) indicator, yaitu Aktor internasional dan actor domestic. Dalam studi hubungan internasional bencana dapat dijadikan sebagai soft power diplomacy suatu Negara untuk saling bekerjasama dalam kegiatan kebencanaan baik Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana.Dimana kerjasama tersebut bisa dilakukan antar lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan. Penulis mengkategorikan kelompok pencarian dalam indicator Aktor Internasional dengan kata PBB (UN), Negara Lain (NL), Lembaga Internasioanl

(LI), Internasional (IN), Masyarakat Internasional (MI), Lembaga Asing Non Pemerintah (NGO). Temuan yang didapat dari hasil analisa konten menunjukan bahwasanyya actor internasional belum menunjukkan eksistensinya karena dalam pencarian kata hanya terdapat temuan sebanyak 17% atau 77 kata. Kata-kata internasional yang sering muncul yaitu 31 kata juga tidak menunjukakan eksistensi actor internasional dalam regulasi kebencana pada tingkat nasional. Sama seperti lembaga internasional hanya mendapat temuan sebanyak 25% yang juga masih dikategorikan sebagai minoritas dari kata yang ada pada regulasi kebencanaan ditingkat nasional. Dapat disimpulkan bahwasanyya dalam penanggulngan bencana actor nasinal memiliki peran penting dalam penanggulangan, karena memang pada kondisi mitigasi bencana, Indonesia membutuhkan bantuan dari asing agar rekonstruksi pasca bencana dapat berlangsung dengan cepat.

Sedangkan Actor domestic memiliki peranan strategis dalam proses penanggulngan bencana, dimana actor domestic menjadi salah satu unsur pelaksana dalam penanggulangan kebencanaan. Penulis menjadikan indicator ini yang di kategorikan dengan kata kunci Pemerintah Pusat (PP), Pemerintah Daerah (PD), Masyarakat (MS), Domestik (DT), Bisnis (BS), Organisasi Sosial (OS), BNPB, BASARNAS. Pada proses analisis penulis menemukan hasil sebagai berikut, total temuan yang didapat dari regulasinasional ini adalah 82% temuan dengan masyarakat menjadi actor utama dalam kebencanaan. Dimana masyarakat memperoleh temuan sebanyak 55% atau 204 kata temuan selanjutnya BNPB menjadi lembaga nasionala yang memiliki peran penting dalam penanggulangan kebencanaan. BNPB menjadi satkorlak dalam aktifitas kebencanaan, sehingga perannya sebagai komando penanggulangan kebencanaan masih menjadi tugas utama dari actor domestic ini.

Tabel 4
Aktor Kebencanaan Pada Regulasi di Tingkat Daerah

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan				Total	Presentase
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11		
		Score	Score	Score	Score		
Aktor Internasional	PBB	0	2	0	0	2	0.035714286
	Perserikatan Bangsa Bangsa	0	2	0	0	2	0.035714286
	Negara Lain	1	2	0	0	3	0.053571429
	Lembaga Internasioanl	0	9	0	0	9	0.160714286
	Internasional	12	21	0	0	33	0.589285714
	Masyarakat Internasional	0	0	0	0	0	0
	Lembaga Asing Non Pemerintah	3	3	1	0	7	0.125
						56	0.097731239
Aktor Domestik	Pemerintah Pusat	1	0	0	0	1	0.001934236
	Pemerintah Daerah	22	19	2	1	44	0.085106383
	Masyarakat	128	96	8	3	235	0.454545455
	Domestik	0	0	0	0	0	0
	Bisnis	0	0	0	0	0	0
	Organisasi Sosial	0	17	0	0	17	0.032882012
	BNPB	34	172	14	0	220	0.425531915
	BASARNAS	0	0	0	0	0	0
						517	0.902268761

Actor memiliki peranan strategis dalam proses penanggulngan bencana, dimana actor menjadi salah satu unsur pelaksana dalam penanggulangan kebencanaan. Dalam studi hubungan internasional bencana dapat dijadikan sebagai soft power diplomacy suatu Negara

untuk saling bekerjasama dalam kegiatan kebencanaan baik Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana. Dimana kerjasama tersebut bisa dilakukan antar lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan. Dari table diatas terdpat hasil pencarian analisa konten pada regulasi kebencanaan yang ada pad tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.Akan menjadi sangat memukau bilamana hasil temuan tersebut menunjukan actor internasioanl mendominasi pada kegiatan kebencanaan. Karena pada saat terjadinya Gempa 2006 silam serta Erupsi Gunung Merapi, banyak organisasi internasional yang datang untuk memberikan bantuan bagi korban bencana.

Namun sayangnya tidak, actor internasional tidak dijadikan sebagai actor penting yang ada pada regulasi kebencanaa DIY, temuan hanya mendapatkan total 10% temuan sedangkan actor domestic mendominasi pada setiap kata di dalam regulasi tersebut yaitu 90% temuan. Lembaga Asing Non Pemerintah (NGO) yang pada saat terjadi bencana DIY menunjukkan eksistensi ternyata tidak didukung dengan adanya regulasi saat ini, diksi ini mendapat temuan sebanyak 7 (tujuh) kata atau 12% temuan dari total regulasi. Masyarakat Internasional (MI) sama sekali tidak disinggung dalam regulasi yang ada pada penelitian ini . namun pemerintah daerah (Pemda) memberikan alokasi penuh terhadapt Masyarkat local karena pada regulasi ini mendapat total temuan diski sebanyak 45%. Sedangkan untuk actor yang menjadi komando lapangan regulasi ini banyak menyebutkan BNPB sebagai actor dilapangan saat terjadinya bencana.

C. *Anggara Kebencanaan*

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki peran penting dalam pengkondisian kerusakan pasca terjadinya bencana. Dimana pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan rekonstruksi pembangunan sarana dan prasaran yang rusak akibat terjadinya bencana. Dalam pemberinan anggaran, pemerintah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan penanggulangan kebencanaan. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan rekonstruksi dan kesiapsiagaan kebencanaan. Anggaran tersebut dikatgorikan menjadi anggaran Rutin dan anggaran incidental. Berikut temuan yang dihasilkan dari regulasi Nasional dan Regulasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan Indikator Anggaran Kebencanaan.

Tabel 5
Anggaran Kebencanaan Pada Tingkat Regulasi Nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan					Total	Presentase
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08		
		Score	Score	Score	Score	Score		
Anggaran	APBN	3	6	2	0	0	11	0.39285714
	APBD	3	0	2	0	1	6	0.21428571
	Hibah	0	0	6	0	1	7	0.25
	Pinjaman	2	0	2	0	0	4	0.14285714
	Hutang	0	0	0	0	0	0	0
							28	

Pendanaan terhadap kebencanaan yang meliputi aktifitas pra bencana hingg aktifitas rekonstruksi pasca terjadinya bencana memang perlu dirumuskan di setiap regulasi. Pemerintah melalui regulasi nasional yang ada pada analisa kontenn diatas menunjukkan bahwa Pemerintah masih mengalokasikan anggaran menggunakan anggaran rutin dibandingakan dengan bantuan, pinjaman yang berasal dari lembaga internasional. Fakta temuan menunjukkan bahwa APBN dan APBD menjadi sumber pendanaan rutin terhadapt kebencanaan. Pada PP No 21 Th 2008 terdapat temuan sebanyak 6 kata yang menunjukkan APBN menjadi sumber penting

dalam setiap kebencanaan. Presentasi keduanya menunjukkan angka 39% dan 21%. Namun pada sisi lain tedapat temuan yang tentunya memiliki artikulasi yang berbeda yaitu pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD yang diberikan secara rutin, namun dalam hal ini pemerintah juga menyebut bahwa pinjaman dirasa perlu mengingat bencana terjadi setiap saat tidak mengenal waktu.

Tabel 6
Anggaran Kebencanaan Pada Tingkat Regulasi Daerah

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan				Total	Presentase
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11		
		Score	Score	Score	Score		
Anggaran	APBN	2	0	0	0	2	0.08695652
	APBD	5	6	0	0	11	0.47826087
	Hibah	3	0	0	0	3	0.13043478
	Pinjaman	6	1	0	0	7	0.30434783
	Hutang	0	0	0	0	0	0
						23	

Pemerintah DIY pada hasil analisa di setiap regulasi kebencanaan menunjukkan masih ketergantunganny dengan anggaran Rutin kebencanaan dari APBD yang temuan tersebut mendapat kan hasil 47% dimana hasil tersebut didpat dari Regulasi Perda No 8 Tahun 2008 dan Perda No 3 Tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian bencana yang dialami pada setiap kejadian, DIY mengandalankan anggaran rutin dari APBD DIY. Namun diksi Pinjaman menjadi kata sering muncul kedua dalam temuan ini, yang mengartikan bahwa bilamana APBD tidak dapat sepenuhnya mem-*Backup* kejadian bencana, Pemda mengandalkan Pinjaman untuk dialokasikan sebagai anggaran penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan dalam bencana.

D. *Respon Pasca Terjadinya Bencana*

Kegiatan manajemen bencana yang dilakukan pada setiap kejadian bencana yang ada di DIY menunjukkan aktifitas manajemen bencana guna meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan di tingkat Nasioanal ataupun pada tingkat daerah, dalam sub bab ini penulis akan menunjukan fakta dimana manajemen bencana yang ada di DIY belum mengimplemnetasi pada konsep diplomasi bencana.

Lebih lanjut penulis mengemukakan regulasi pada tingkat Nasional dan Regulasi di tingkat daerah yang tentunya sama sekali belum menjadikan Konsep Diplomasi bencana sebagai instrument yang penting dalam melakukan kerjasama bencana. Ketergantunagan terhadap aktifitas kebencanaan menjadi kriteria yang mendominasi pada setiap penelitian, sedangkan ketergantungan terhadap Diplomasi kebencanaan sama sekali tidak menunjukan eksisternsinya pada setiap regulasi yang ada. Berikut hasil temuan penelitian yang di lakukan oleh penulis.

Tabel 7
Ketergantungan Terhadap Bencana pada Regulasi Nasional

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan						
		UU 24/07	PP 21/08	PP 22/08	PP 23/08	BPBD 3/08	Total	Presentase
		Score	Score	Score	Score	Score		
Ketergantungan Terhadap Diplomasi	Bantuan Internasioanl	0	0	0	0	0	0	0
	Sister City	0	0	0	0	0	0	0
	Bantuan Asing	0	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama	0	2	0	1	4	7	0.1
	Internasional	6	3	0	51	3	63	0.9
							70	0.1018923
Aktifitas Kebencanaan	Mitigasi (MG)	4	5	1	0	6	16	0.0259319
	Pengungsi (PS)	7	2	0	0	4	13	0.0210697
	Penanggulangan	184	2	0	0	106	292	0.4732577
	Kesejahteraan (KS)	2	0	0	1	2	5	0.0081037
	Penyelamatan (PT)	8	18	2	0	3	31	0.0502431
	Evakuasi (EV)	6	11	2	0	1	20	0.0324149
	Kerugian (KG)	7	7	0	0	1	15	0.0243112
	Perbaikan (PB)	4	19	3	0	0	26	0.0421394
	Evaluasi (EV)	5	11	2	1	4	23	0.0372771
	Pemulihan (PM)	13	37	6	4	0	60	0.0972447
	Bantuan (BN)	23	37	39	17	0	116	0.1880065
							617	0.8981077

Indikator dibagi menjadi dua bagian *yaitu Ketergantungan terhadap Diplomasi Bencana* dengan kata kunci *Bantuan Internasioanl, Sister City, Bantuan Asing, Kerjasama, Internasional* sedangkan *Ketergantungan Terhadap Aktifitas Kebencanaan dengan kata kunci Mitigasi (MG), Pengungsi (PS), Penanggulangan, Kesejahteraan (KS), Penyelamatan (PT), Evakuasi (EV), Kerugian (KG), Perbaikan (PB), Evaluasi (EV), Pemulihan (PM), Bantuan (BN)*. Pada tingkat regulasi Nasional menunjukkan bahwa dominasi aktifitas didapat pada diksi *Ketergantungan Terhadap Aktifitas Kebencanaan* dimana total temuan sebanyak 89% yang menjadi mayoritas temuan dengan aktifitas terbanyak adalah Penanggulangan yang mendapat temuan sebanyak 47% temuan kata sedangakan diksi Bantuan mendapat temuan sebanyak 18%. Menunjukkan bahwa prioritas dalam regulasi ini menandakan bencana menjadi momok yang harus direspon secara cepat sehingga tidak berdampak panjang terhadap korban.

Namun secara langusng tidak menunjukkan ketergantungan terhadap Diplomasi Bencana, karena total kata temuan hanya mendapat 10% temuan saja. Minornya temuan terhadap diksi ini menunjukan bahwa diplomasi bencana sama sekali belum dilirik oleh pemerintah pusat untuk kesiapsiagaan terhadap bencana jauh sebelum terjadinya bencana. Karena Diksi Kerjasama (KS) hanya mendapat 1% temuan saja, sangat minor jika dibandingkan dengan regulasi kebencanaan ditingkat aktifits bencana.

Tabel 8
Ketergantungan Terhadapt Diplomasi Bencana pada Regulasi Daerah

INDIKATOR	Keyword	Regulasi Kebencanaan				Total	Presentase
		PD 8/10	PD 3/11	PD 10/10	PG 49/11		
		Score	Score	Score	Score		
Ketergantungan Terhadap Diplomasi	Bantuan Internasioanl	0	0	0	0	0	0
	Sister City	0	0	0	0	0	0
	Bantuan Asing	0	0	0	0	0	0
	Kerjasama	2	4	0	0	6	0.19354839
	Internasional	12	13	0	0	25	0.80645161
						31	0.04626866
Aktifitas Kebencanaan	Mitigasi (MG)	7	5	0	0	12	0.01877934
	Pengungsi (PS)	6	7	1	0	14	0.02190923
	Penanggulangan	137	170	42	23	372	0.58215962
	Kesejahteraan (KS)	1	0	0	0	1	0.00156495
	Penyelamatan (PT)	11	10	4	1	26	0.04068858
	Evakuasi (EV)	10	5	1	1	17	0.02660407
	Kerugian (KG)	11	5	1	1	18	0.02816901
	Perbaikan (PB)	39	5	0	0	44	0.06885759
	Evaluasi (EV)	0	4	4	0	8	0.01251956
	Pemulihan (PM)	22	16	1	1	40	0.06259781
	Bantuan (BN)	52	34	1	0	87	0.13615023
						639	0.95373134

Upaya merespon kejadian bencana secara cepat dan tepat memang menjadi perhatian utama BPBD DIY, dimana respon tersebut dijadikan tolak ukur dari kesiapsiagaan BPBD dalam Kebencanaan, tujuannya jelas untuk mengurangi dampak yang besar dari kejadian bencana tersebut. Dibuktikan dengan hasil temuan pada tingkat daerah yang menjadi temuan mayor dari Aktifitas Kebencanaan yaitu total temuan sebanyak 95% sedangkan ketergantungan terhadap diplomasi hanya sebanyak 5% yang dapat dikatakan temuan minor. Kerjasama (KS) yang menjadi Diksi dari Indikator Ketergantungan Terhadap Diplomasi hanya dibahas pada regulasi Perda No 8 Tahun 2010 dan Perda No 3 Tahun 2011dengan total temuan sebanyak 19% saja.

Aktifitas Ketergantungan Terhadapt Diplomasi pada diksi ini tidak menunjukkan sebagai aktifitas dengan skala prioritas dalam regulasi daerah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi ini dijadikan sebagai komponen pendukung dalam kejadian bencana yang malanda DIY.

Sedangkan aktifitas Kebencanaan menunjukkan eksistensi bahwa aktifitas ini dilakukan dalam bentuk real yaitu upya dilakukan BPBD maupun BNPB dalam melakukan kerjasama pengembangan aplikasi terpadu untuk memberikan sinyal ketika terjadinya bencana. Upaya terus dilakukan BPBD DIY, pada bulan Juli 2017 BNPB dan *Pacific Disaster Center (*PDC) berkolaborasi untuk memperdalam pemahaman tentang aplikasi InAWARE,[11] aplikasi tersebut berfungsi untuk memberikan sisitem informasi gegrafis untuk enunjang dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan fungsi BNPB dan BPBD. Hasil yang diharapkan tentunya untuk mneingkatkan peringatan dini bencana dan system penanggulangan bencana melalui akses informasi yang terkoneksikan dengan teknologi pendeteksi dini yang sudah terpasang dibeberapa titik rawan bencana.

[11] BPBD DIY Adakan Pelatihan InAware, diakses http://bpbd.jogjaprov.go.id pada 13 Desember 2017

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Pemerintah pusat juga dengan organisasai non pemerintah dirasa perlu untuk membangun sebuah konsep ataupun kerangka pelembagaan dalam upaya pencegahan, mitigasi, respon dan juga rekonstruksi bencana alam yang sistematis. Yang tentunya dalam hal ini perlu melibatkan banyak pihak didalamnya baik secara nasional maupun internsional, juga kerjasama diantara keduanya diperlukan baik secara teknis maupun politis. Membangun konsep tersebut bukan menjadi hal yang mudah ketika belum adanya pengetahuan yang mendasar oleh masyarakatnya, terlebih lagi pandangan terhadap bencana yang cenderung banyak menimbulkan kerugian. Studi kontemporer yang dilakukkan oleh beberapa ahli yang menunjukkan bahwasannya bencana alam dipahami tidak sepenuhnya destruktif, namun ada banyak hikmah yang ditarik dari kemunculan bencana alam apabila dikelola dengan meassure yang tepat.[12]

Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan bencana dalam suatu wilayah Negara yang berbatasan dengan wilayah Negara lain. Berupa suatu pola kerjasama yang melibatkan kepentingan lintas Negara, kerjasma Negara dengan Negara atau Negara dengan non Negara (NGO). Selain memiliki kerentangan tinggi terhadap bencana, Indonesia juga secara geografis berbatasan dengan beberapa Negara tetangga yang juga memiliki permasalahan yang sama dalam bencana alam, oleh karena itu untuk mewujudkan suatu pengelolaan resiko bencana dikawasan daerah yang terkena bencana ataupun kawasan perbatasan sangat diperlukan kordinasi yang lebih baik.[13]

Diplomasi bencana memaknai bencana sebagai sebuah instrumen yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi seperti kolaborasi kerjasama ekonomi antar negara secara lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berkeadaban. Fenomena bencana alam jika difahami dalam perspektif positif, justru dapat memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusian yang selama ini tak terpecahkan melalui diplomasi politik maupun ekonomi yang seringkali berwatak distributif, menang dan kalah apalagi dibantu dengan ditetapkannya uu no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penaggulangan bencana diharapkan semakin baik, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi penanggungjawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana.

Kerjasama internasional terkait dengan pencegahan bencana alam juga harus dibangun, dimana wawasan akan pencegahan sebelum terjadinya bencana perlu disampaikan kepada masyarakat yang berada pada kawasan resiko bencana. Sehingga ketika terjadi musibah, masyarakat tau tindakan yang dilakukan ketika terjadinya bencana.

[12] *Ibid*

[13] Ratih Herningtyas, Surwandono , Artikel Jurnal The First Postgraduate Research Conference Impoving Human Life: *" Indonesia's Diplomacy In Disaster Issue: How To Capitalize Disaster As Soft Diplomacy"* ,Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ring of Fire atau sering disebut Cincin Api Pasifik adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra pasifik. Ring of Fire ini terletak di samudra pasifik yang meliputi sejumlah gunung berapi aktif dan juga gempa bumi. Kawasannya membentang dari pantai barat Amerika Utara hingga ke Pantai timur asia. Sedangkan di Indoneisa terdapat gunung aktif yang merupakan jalur dari ring of fire ini.

[2] ESCAP, The Asia Pacific Disaster Report. 2010. Protecting Development Gains, UN-ISDR, Bangkok.

[3] Bappenas, 2007. Hasil Analisa Sistem Penanggulangan Bencana, Bappenas, Jakarta.

[4] Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, Cet.1,(Surabaya : Airlangga University Press,2004) hal.7

[5] Pramudya Sunu, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan Iso 14001,(Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2001)

[6] Borrero, J. C. (2005). Field data and satellite imagery of tsunami effects in Banda Aceh. Science, 308(5728), 1596.

[7] Dikutip dari jurnal on line, *Diplomasi Sebagai KomponenPenting Dalam Politik Luar Negri.http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/ diakses pada 22 Desember 2015*

[8] *Ibid*

[9] Kelman, I, 2005, Tsunami Diplomacy: Will the 26 December, 2004 Tsunami Bring Peace to the Affected Countries?, Sociological Research Online, vol. 10, issue 1, http://www.socresonline.org.uk/10/1/kelman.html,diakses pada 23 november 2015

[10] SL Roy, *Op. Cit*

[11] BPBD DIY Adakan Pelatihan InAware, diakses http://bpbd.jogjaprov.go.id pada 13 Desember 2017

[12] *Ibid*

[13] Ratih Herningtyas, Surwandono , Artikel Jurnal The First Postgraduate Research Conference Impoving Human Life: *" Indonesia's Diplomacy In Disaster Issue: How To Capitalize Disaster As Soft Diplomacy"* ,Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013

Eksistensi Muhammadiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Beragama Masyarakat Di Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

[1]Dr. Bustanul Iman RN, M.Ag. [2]Irfan, [3]Hairul, [4]Sihab, [5]Taslim Tahir
[1]Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Program Pascasarjana,
Universitas Muhammadiyah Parepare
Kota Parepare, Indonesia
[1]irfaniskandar178@yahoo.co.id, [2]hairulpontana@yahoo.com; [3]sihab82@gmail.com;
[4]taslimvr46@gmail.com

ABSTRAK---Skripsi ini membahas tentang eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya dalam menata tatanan kehidupan beragama masyarakat, khususnya di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu kabupaten Enrekang.

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, maka penelitian ini merupakan *penelitian kuantitatif,* dengan jumlah populasi adalah seluruh masyarakat desa Pasui sebanyak 2440 orang yang kemudian dilakukan penarikan sampel sebanyak 10% atau 244 orang dengan teknik penarikan sampel secara *simple stratified random sampling*. Pengumpulan data dengan teknik observasi, angket, dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui Mampu eksis di desa Pasui, serta mampu berkontribusi positif dalam menata tatanan kehidupan beragama masyarakat. Selain itu, pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat, cukup signifikan, dengan indikator sebagai berikut: pemahaman tentang agama, tata cara beribadah, pengamalan ibadah shalat, perilaku (akhlak) dalam pergaulan sehari-hari, dan hilangnya praktek beragama yang menyimpang di masyarakat.

Implikasi atau tindak lanjut dari penelitian ini, maka diharapkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui agar lebih intensif melakukan kerja-kerja nyata, sesuai yang diamanatkan oleh organisasi serta senantiasa melakukan konsolidasi dan kritik ke dalam demi perkembangan organisasi yang lebih mapan, serta kepada masyarakat desa pasui, hendaknya senantiasa mendukung usaha dakwah yang dilakukan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pasui, mengingat kebutuhan beragama merupakan sebuah keniscayaan.

Kata Kunci — Eksistensi Muhammadiyah, Kehidupan Beragama Masyarakat.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt, yang kompleks dan unik serta diciptakan dalam integrasi dua subtansi yang tidak dapat berdiri sendiri. Subtansi pertama disebut tubuh (fisik/jasmani) sebagai unsur materi, sedangkan subtansi kedua disebut jiwa (rohani/psikis) yang bersifat sebagai unsur non materi. Dalam keterpaduan kedua subtansi itu manusia menjalani hidup dan kehidupan yang kompleks dan unik. Salah satu keunikannya yang mendasar adalah kehidupannya yang dibekali dengan hakikat kemanusiaan (manusiawi) yang terdiri dari:

1. Hakikat Individualitas, setiap manusia menyadari identitasnya yang tidak sama dengan individu yang lain. Setiap individu menyadari identitasnya yang berbeda secara fisik dan psikis dari individu yang lain. Dalam ketidaksamaan itu, setiap manusia tampil sebagai individualitas, dan memerlukan

perlakuan sesuai individualitasnya masing-masing.

2. Hakikat Sosialitas, setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak seorang pun manusia di muka bumi ini yang dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakikat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada bersama pada satu tempat dan waktu yang sama, dengan saling berinteraksi.
3. Hakikat Moralitas, setiap manusia sebagai individu untuk dapat hidup secara harmonis bersama individu yang lain dalam bentuk masyarakat harus mampu membatasi diri masing-masing, agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat.[1]

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa terbentuknya organisasi dalam tatanan kehidupan masyarakat didasari oleh hakikat kemanusiaan yang pada gilirannya tertuju pada usaha pemenuhan kebutuhan. Kemampuan memenuhi kebutuhannya itu yang merupakan prasyarat penting dalam menempatkannya pada kedudukan sesuai manusia.

Melihat kenyataan manajemen sumber daya manusia, bahwa dalam berorganisasi adalah untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sedang sebaliknya kebutuhan itu pulalah yang menjadi obyek manusia berorganisasi.[2]

Ketika berbicara bahwa organisasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan, maka sesungguhnya tepatlah jika dikatakan bahwa ketaatan kepada Allah swt, juga merupakan kebutuhan beragama manusia, bahkan diakui atau pun tidak merupakan kebutuhan yang paling mendasar secara psikologis.

Salah satu organisasi yang eksis dan bertujuan mengajak umat manusia khususnya umat Islam itu sendiri, untuk taat kepada Allah swt, adalah Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, di Yogyakarta. Misi dakwah dari organisasi ini terinspirasi oleh pesan Allah swt yang memerintahkan umat manusia untuk membentuk suatu kelompok yang senantiasa mengajak kepada kebaikan *(ma'ruf)* dan mencegah sesama manusia dari perbuatan yang mungkar, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung".[3]

Berdasarkan ayat di atas, sangat jelas bahwa perintah dakwah adalah tanggung jawab umat manusia khususnya umat Islam, yang akan lebih efektif bila dilakukan dengan bersama-sama dan hal ini juga mengindikasikan bahwa hakikat sosialitas pada diri manusia merupakan hal yang cukup urgen dalam misi dakwah.

Selama berkiprah, Muhammadiyah telah melakukan kegiatan *dakwah amar ma'ruf nahi mungkar* dengan tujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik yang merupakan warisan peradaban Hindu-Buddha keseluruh pelosok negeri dan telah memasuki hampir setiap lini kehidupan masyarakat, seperti sektor ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan sebagainya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Din Syamsuddin, selaku ketua umum PP. Muhammadiyah, dalam khutbah Iftitah Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 2007 yang lalu, beliau mengungkapkan bahwa:

> Muhammadiyah telah memberikan sumbangsih yang besar kepada bangsa Indonesia, melalui gerakan pencerdasan, peningkatan kualitas kesehatan, dan

[1]Ishak Shaldi, *Manusia dan Organisasi,*http//ishouldick.wordpress.com., diakses pada tanggal 30. April 2014.

[2]*Ibid.,* diakses pada tanggal yang sama.

[3]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang: Toha Putera, 2007), h. 93.

> kehidupan sosial, pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, selain tentunya pencerahan kehidupan keberagamaan umat Islam.[4]

Semua usaha itu dilakukan Muhammadiyah dengan semangat dan untuk kepentingan dakwah Islamiyah, yaitu ajakan kepada kebaikan dan keterbaikan *(al-da'wah ila al khyar)*. Dengan semangat inilah Muhammadiyah berjuang mengusung Islam yang berkemajuan, melakukan pencerahan kebudayaan dan peradaban.

Pencerahan peradaban, sejatinya harus dimulai dari pencerahan kehidupan beragama di segenap lapisan masyarakat, karena tanpa hal itu pencerahan peradaban yang dicita-citakan hanyalah sebuah fatamorgana belaka yang tidak akan kunjung tercapai. Seperti kata syekh Rasyid Ridla, bahwa:

> Bangsa Barat mengalami kemajuan peradaban karena meninggalkan ajaran agamanya, dan umat Islam justru mengalami keterpurukan dan kemunduran, juga karena meninggalkanajaran agamanya.[5]

B. *Rumusan Masalah*

1. Bagaimana eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang?

C. *Hipotesis*

Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kini Muhammadiyah eksis di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang. Dalam melaksanakan misi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, Muhammadiyah melakukan pendekatan kultural sehingga tidak menimbulkan gesekan budaya ditengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang membuat Muhammadiyah dapat menata kehidupan beragama masyarakat dengan baik.
2. Pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, cukup signifikan.

D. *Pengertian Judul*

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap judul ini, terlebih dahulu penulis memberikan penafsiran terhadap beberapa kata yang terdapat dalam variabel judul di atas, yakni:

1. Eksistensi, dapat diartikan sebagai hal berada; keberadaan.[6]
2. Muhammadiyah, dapat diartikan sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam.[7]
3. Pengaruh, dapat diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.[8]
4. Kehidupan, dapat diartikan sebagai cara (keadaan, hal) hidup. Cara seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat menjalani hidup.[9]
5. Beragama, dapat diartikan sebagai menganut (memeluk) agama; beribadat; taat kepada agama.[10]
6. Masyarakat, dapat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya, dan

[4]Wahyudi Suudibya, *Menyongsong Sejarah Peradaban di Abad Kedua,* http//tarjihbms.wordpress.com., diakses pada tanggal 30 April 2014.

[5]Miftakhul Huda, *Ilmu Pengetahuan Islam Modern,* http//efastbook.blogsp.com., diakses pada tanggal 28 Mei 2014.

[6]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Ed. III, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 288.

[7] Chusnan Jusuf dan Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam.* (Cet. VIII, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 1992), h. 5.

[8]Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.* h. 849.

[9]*Ibid.,* h. 400.

[10]*Ibid.,* h. 12.

terikat oleh kebudayaan yang mereka anggap sama.[11]

Berdasarkan pengertian dari beberapa istilah di atas, dapatlah dikemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan secara keseluruhan berkisar pada sejauh mana eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya dalam menata kehidupan beragama masyarakat.

Adapun definisi secara operasional dari pembahasan skripsi, yakni hendak menguraikan tentang bagaimana eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada penelitian dengan judul eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, memiliki target-target yang ingin dicapai. Target tersebut diharapkan dapat tercapai setelah kegiatan penelitian ini berakhir. Oleh karena itu penelitian ini adalah suatu usaha dan kegiatan yang berproses secara bertahap yang mempunyai tujuan dan manfaat, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diupayakan untuk memperoleh informasi sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh data yang akurat mengenai gambaran eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.
b. Untuk mengetahui pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
   1) Universitas Muhammadiyah Parepare, sebagai bahan referensi bagi perpustakaan sehingga dapat menjadi bahan kajian bagi para mahasiswa tentang eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat.
   2) Persyarikatan Muhammadiyah, dapat menjadi masukan tentang kondisi Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting sehingga dapat melakukan berbagai langkah dalam upaya manajemen pengembangan dan pemberdayaan pimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting.
b. Manfaat Praktis:
   1) Sebagai bahan banding bagi peneliti lain yang berminat mengkaji permasalahan yang relevan di kemudian hari.
   2) Dapat memberi motivasi yang lebih bagi mahasiswa yang bersangkutan, untuk lebih giat lagi dalam menulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Sejarah Lahirnya Muhammadiyah*

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama nabi Muhammad saw, yang memiliki arti sebagai berikut:

1. Arti bahasa:

Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab "Muhammadiyah" yaitu nama Nabi dan Rasul terakhir; kemudian mendapatkan kata "ya" yang merupakan nisbiah (menjeniskan) artinya "pengikut-pengikut Muhammad saw." Hal ini berarti seluruh umat Islam, baik yang berada di Indonesia maupun umat Islam lainnya dari seluruh belahan dunia.[12]

2. Arti istilah:

Persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan; memakai nama Muhammad karena sesuai dengan sifatnya, yaitu menghimpun pengikut-pengikut

[11] *Ibid.,* h. 721.

[12] Chusnan Jusuf dan Musthafa Kamal Pasha, *loc.cit.*

Nabi Muhammad saw. dan bertujuan mengikuti jejak Rasulullah saw.[13]

Muhammadiyah didirikan pada tanggal. 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah, dan bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 Masehi, oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Beliau dilahirkan pada tahun 1285 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 1868 Masehi. Ketika masih kecil, beliau bernama Muhammad Darwis, ayahnya bernama KH. Abu Bakar, yang sewaktu hidupnya bekerja sebagai Khatib amin di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, Puteri H. Ibrahim yang juga merupakan penghulu di kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.[14]

Ditinjau dalam konteks historis, banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) faktor penyebab yaitu:

1) Faktor Subyektif

Faktor subyektif merupakan faktor yang berasal dari dalam diri KH. Ahmad Dahlan sendiri.

2) Faktor Obyektif

Ada beberapa sebab yang bersifat obyektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yang sebagian dapat dikelompokkan dalam faktor internal, yaitu faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan sebagiannya dapat dimasukkan ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam di Indonesia.

B. Eksistensi Muhammadiyah di Indonesia

Muhammadiyah adalah suatu gerakan Islam yang menitik beratkan pada amalan dan usaha yang bermanfaat serta dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Semua itu adalah didasarkan pada pemahaman isi dan kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang shahih. Satu contoh dalam QS. Al Ashr/103: 1-3.

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.[15]

Di sini jelas sekali, bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman serta bekerja dalam kebaikan dan kemaslahatan.

Dalam uraian berikutnya akan dijelaskan sebahagian dari amal usaha Muhammadiyah dalam berbagai bidang.

1. Penyiaran dan tabligh

   Penyiaran dan tabligh ajaran Islam yang ditekuni oleh Muhammadiyah sesungguhnya telah dirintis oleh KH. Ahmad Dahlan dengan berbagai cara tanpa menghiraukan berbagai rintangan yang ada, bahkan pada saat kondisi kesehatan beliau terganggu, semangat tablighnya justru kian bertambah, karena beliau lebih khawatir bila ajal tiba sedang tugas menyiarkan Islam dalam keadaan terlantar.[16]

2. Pendidikan dan pengajaran.

   Sebab lahirnya Muhammadiyah, antara lain adanya pendidikan yang dirasa belum memuaskan bagi kepentingan umat dan masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa pada waktu itu di Indonesia terdapat dua macam pendidikan yakni pendidikan pondok pesantren yang konsen pada ilmu pengetahuan agama saja, dan pendidikan model Barat yang berorientasi pada ilmu pengetahuan umum belaka.

[13] *Ibid*., h. 5.
[14] *Ibid.,* h. 6.
[15] Departemen Agama, *op.cit.* h. 1099.
[16] Chusnan Jusuf, *Kisar Gerak Muhammadiyah.* (Ed. I, Cet. II, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 1990), h. 47.

3. Pembinaan Kesejahteraan Umat

   Didorong oleh seruan Allah swt yang terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Maun, maka KH. Ahmad Dahlan berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat melaksanakan seruan tersebut dan mencontoh hidup Rasulullah saw dalam masalah pertolongan terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin serta orang-orang yang tertimpa bencana. Atas jerih payahnya maka terbentuklah suatu wadah yang khusus untuk menangani kaum *dhuafa,* yang disebut Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang kini telah diubah dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU).

C. Pandangan Keagamaan Muhammadiyah

Agama adalah apa yang disyari'atkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.[17]

1. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada rasul-Nya, sejak dari nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada nabi penutup Muhammad saw, sebagai hidayah dan rahmat Allah swt kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.[18]
2. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah.[19]
3. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Islam satu-satunya yang diridlai Allah swt dan agama yang sempurna.[20]
4. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi *rahmatan lil alamin* di muka bumi ini.[21]
5. Misi dakwah Muhammadiyah yang mendasar itu, merupakan perwujudan dari semangat awal persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah Swt dalam QS. Ali Imran/3: 104.

وَٱلۡعَصۡرِ ۝ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝

"dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".[22]

Kewajiban dan panggilan dakwah yang luhur itu, menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan *Khairah Ummah* sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah Swt dalam QS. Ali Imran/3: 110.

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik".[23]

---

[17] *Ibid.,* h. 278.

[18] Didik Sudjarwo, Haedar Nashir dan Imron Nasri, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah.* (Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 51.

[19] Didik Sudjarwo, Haedar Nashir dan Imron Nasri, *op.cit,* h. 59.

[20] PP. Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.* (Cet. VI, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), h. 8.

[21] M. Yusuf Amin Nugroho, *Fiqh Al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah.* (Cet. I, Bandung: Dar Mizan, 2012), h. 26.

[22] Departemen Agama, *loc.cit.*

[23] *Ibid*., h. 94.

6. Muhammadiyah dalam memaknai tajdid mengandung dua pengertian, yakni pemurnian (purifikasi) danpembaharuan (dinamisasi)[24]
7. KH. Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaharuan).[25]
8. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan *(ummatan washatan)* yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial dan lingkungan fisik yang dibangunnya.[26]

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut jenis data yang yang dipergunakan, penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif, misalnya: Historis, Deskriptif, Perkembangan, kasus dan penelitian lapangan, Korelasional, Kausal komparatif, Eksperimen murni, Eksperimen semu dan Kaji tindak.[27]

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini, berdasarkan jenis data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[28]

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sutrisno Hadi, adalah semua penduduk yang dimaksudkan untuk diteliti, [29] sementara itu Ambo Enre Abdullah mengemukakan bahwa populasi adalah sekelompok yang menjadi sasaran penelitian dan usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan.[30] Sementara itu I Made Putrawan menjelaskan bahwa populasi adalah seluruh data yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam ruang lingkup yang ditentukan. [31] Sedangkan Suharsini Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang akan meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitiannya merupakan penelitian populasi.[32]

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti dan mempunyai sifat atau lebih sebagai dasar berpijak untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

2. Sampel

Dengan pertimbangan bahwa tabel populasi penelitian ini cukup besar, maka penulis berketetapan untuk melakukan penarikan sampel sebesar 10 persen atau 244 orang yang terdiri dari 112 orang laki-laki dan 132 Orang perempuan dari jumlah keseluruhan masyarakat sebanyak 2440 orang di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.

Besarnya persentase sampel tersebut berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto (1993: 107) bahwa "jika subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih". Nur Syam dalam bukunya, Metodologi Penelitian Dakwah

[24]Haryanto, Agus. *Paham Keagamaan Muhammadiyah,* http//luqm.multiply.com., diakses pada tanggal 23 juli 2013.

[25]Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah.* (Cet. I, Yogyakarta: Roykhan, 2005), h. 46.

[26]*Ibid.,* h. 49.

[27]Hari Wijaya & Triton P.B. *Pedoman Penulisan Ilmiah; Skripsi & Tesis.* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005), h. 21.

[28]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.

[29]Sutrisno Hadi, *Metode Research.* (Cet. XXV, Yogyakarta: t.p., 1990), h. 70.

[30]Ambo Enre Abdullah, *Dasar-dasar Penulisan Sosial dan Pendidikan.* (Ujung Pandang: FKIP IKIP, 1982), h. 101.

[31]I Made Putrawan, *Pengujian Hipotesis dalam Penulisan Sosial.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 5.

[32]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan; Suatu Pendekatan Praktek.* (Cet. VI, Jakarta: Bina Aksara, t.th.), h. 5.

memberikan definisi bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang merupakan sasaran penelitian.[33]

Sedangkan menurut Herman Warsito, sampel adalah sebagian individu yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian atau sampel adalah bagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi.[34]

Pada dasarnya penggunaan sampel dalam penelitian disebabkan sulitnya meneliti populasi yang ada, mengingat karena kemampuan peneliti yang sangat terbatas baik waktu, tenaga, maupun biaya. Disamping itu jumlah populasi yang sangat banyak dan wilayah persebaran yang relatif berjauhan.

Selanjutnya, guna memperoleh sampel yang representatif, maka dilakukan penarikan sampel dengan cara simple stratified random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, mengingat populasi yang ada cukup homogen.[35]

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan, dapat berupa observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini bertujuan untuk mengambil kesimpulan dalam pembahasan tulisan.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Secara psikologis, observasi juga dikatakan sebagai pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan seluruh alat indera. Namun dalam penelitian skripsi ini observasi dilakukan hanya dengan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran.
2. Angket

   Teknik ini merupakan instrumen utama guna memperoleh data mengenai eksistensi Muhammadiyah dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang. Angket tersebut sifatnya tertutup, sehingga responden hanya diberikan kesempatan untuk mengisi alternatif jawaban yang disediakan.
3. Dokumentasi

   Dokumentasi akan memberikan data yang pasti sebagai acuan dalam langkah-langkah dan untuk melengkapi hasil penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dari lapangan, dengan teknik sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap lokasi penelitian.
2. Angket, yaitu cara memperoleh data dengan membagikan alat berupa angket yang berisi beberapa daftar pertanyaan disertai dengan alternatif jawaban.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mencatat secara langsung dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data berguna untuk mengolah kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat difahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji dan dijawab secara teliti dan cermat.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian yang bersifat kuantitatif ini, penulis menggunakan teknik analisis statistik dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk tiap-tiap variabel.

IV. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi singkat desa Pasui

Desa Pasui merupakan hasil pemekaran dari wilayah pemerintahan kecamatan Buntu

[33]Nur Syam, *Metodologi Penulisan Dakwah.* (Cet. II, Solo: Ramadhani, 1985), h. 100.

[34]Herman Warsito, *op.cit.* h. 50.

[35]Sugiyono, *op.cit,* h. 83.

Batu, yang juga merupakan pusat pemerintahan wilayah kecamatan Buntu Batu. Kecamatan Buntu Batu terdiri dari beberapa desa, yakni desa Pasui, desa Eran Batu, desa Potok Ullin, desa Buntu Mondong, desa Lunjen, desa Langda, desa Ledan dan desa Latimojong. Desa Pasui memiliki luas wilayah geografis 2548 KM^2 dan 1050 MDPL. Desa Pasui terdiri dari beberapa dusun, yaitu dusun Pasui, dusun Bangkan dan dusun Landoke. Sebagian besar penduduk desa Pasui hidup dari mata pencaharian sebagai petani. Kondisi sosial-budaya dan ekonomi masyarakat desa Pasui masih terjalin erat dan terpelihara dengan baik dilihat dari sikap gotong royong masyarakat yang masih menjadi ciri khas misalnya pada pembuatan rumah, hajatan pernikahan, menanam padi dan kerja-kerja bakti demi kepentingan masyarakat.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai dan ajaran agama relatif tinggi, terbukti dengan ramainya pengajian bulanan yang diadakan oleh organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Para penduduk rela meluangkan waktu mereka ditengah-tengah rutinitas mereka yang cukup padat untuk memperoleh pengetahuan seputar keagamaan, tapi pada perkembangannya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan keagamaan dirasa semakin meningkat, sementara itu hanya Muhammadiyahlah satu-satunya organisasi Islam yang menunjukkan eksistensinya di desa Pasui.

2. Sejarah singkat Muhammadiyah di desa Pasui

Muhammadiyah mulai diperkenalkan kepada masyarakat desa Pasui, pada khususnya dan distrik Buntu Batu pada umumnya sejak tahun 1946, masa revolusi fisik setelah pendudukan tentara Jepang di bumi Indonesia yang tercinta ini telah berakhir dan tidak lama kemudian terbentuklah Pimpinan Ranting Muhammadiyah di desa Pasui dengan nama Pimpinan Ranting Muhammadiyah Buntu Batu, dengan susunan pengurusnya yang masih sangat sederhana saat itu, yakni sebagai berikut:

a. Ketua merangkap sekretaris, yakni Palangi.
b. Ketua I, yakni Malang.
c. Penasehat, yaitu Sialla.

Faktor yang memudahkan Muhammadiyah diterima masyarakat desa Pasui, karena Muhammadiyah merupakan organisasi Islam pertama dan satu-satunya di desa Pasui pada masa itu. Selain itu, mayoritas masyarakat memang tidak mengamalkan praktek takhayul, bid'ah dan khurafat.[36]

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Buntu Batu sempat diresmikan oleh utusan dari Ujung Pandang, yaitu BS. Baranti dan Haji Sikki. Tempat kedudukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah pada saat itu bertempat di kabupaten Rappang yang diketuai oleh H. Saini, bapak kandung KH. Jabbar Asiri.

Kegiatan organisasi yang sempat dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Buntu Batu saat itu, disamping kegiatan dakwah pemahaman agama Islam yang benar dari rumah ke rumah, sempat pula mengikuti kongres Muhammadiyah di Pangkajenne. Namun sekembalinya dari kongres, tepatnya dalam kurun waktu 1947 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Buntu Batu dihadapkan pada pilihan melanjutkan organisasi atau ikut dalam gerakan merah putih mempertahankan dan membela kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman gerakan separatis DI/TII di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Kahar Muzakkar yang pusat komandonya berada di desa Pasui. Demi untuk bangsa dan negara dalam rangka membela Ibu Pertiwi yang tercinta, pilihan jatuh pada alternatif yang kedua. Sementara kegiatan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dalam bentuk yang terorganisir praktis ditinggalkan untuk sementara. Namun karena Muhammadiyah telah meninggalkan warisan berupa pemahaman, pengamalan dan penghayatan keagamaan yang telah melekat kuat di hati para Pimpinan Ranting dan masyarakat desa Pasui pada umumnya, maka semangat Muhammadiyah dengan ide pembaharuannya tetap dikenang, hingga

[36]Pammana, Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah periode 2010-2015, *wawancara,* di rumah kediaman Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui, Pasui, 08 Juni 2014.

Muhammadiyah kembali eksis di desa Pasui, pada tahun 1966.[37]

B. Hasil Penelitian

Pernyataan bahwa ada keterkaitan antara kepedulian masyarakat terhadap ajaran Islam dengan eksistensi Muhammadiyah adalah sebanyak 239 orang (97,95%), dan masyarakat yang mengaku bahwa hal itu kurang berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah adalah sebanyak 5 responden (2,05%). Hal ini berarti bahwa ternyata Muhammadiyah cukup diuntungkan dengan hal yang demikian dan memang persoalan semacam ini sangat mendukung Muhammadiyah eksis dan menata tatanan kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.

Responden yang menyatakan bahwa faktor keteladanan berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah adalah sebanyak 230 responden (94,26%), dan yang mengaku bahwa hal itu kurang berpengaruh adalah sebanyak 14 responden (5,74%), dan tidak ada responden yang mengaku bahwa hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah. Hal ini lagi-lagi membuktikan bahwa eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui sangat kental, sehingga harapan untuk melanjutkan risalah dakwah bagi pencerahan kehidupan beragama masyarakat, terus digantungkan terhadapnya.

Responden yang menyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah memiliki pengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah adalah sebanyak 190 responden (77,86%), dan sebanyak 54 responden (22,14%) yang menyatakan bahwa hal tersebut kurang berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang. Sementara itu tidak ada responden yang mengaku bahwa gerakan Muhammadiyah selama ini tidak berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah, khususnya di desa Pasui. Hal ini juga mengindikasikan bahwa keberadaan Muhammadiyah telah memperoleh respon yang positif dan cukup dibutuhkan oleh warga masyarakat setempat.

Masyarakat yang mengaku, kalau kedekatan aktivis Muhammadiyah dengan masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi Muhammadiyah, adalah sebanyak 127 responden (52,05%), sementara yang mengaku bahwa hal tersebut kurang berpengaruh, adalah sebanyak 100 responden (40,98%), dan sebanyak 17 responden (6,97%) menyatakan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kedekatan aktivis Muhammadiyah dengan masyarakat, baik karena hubungan keluarga, maupun karena hubungan sosial, adalah salah satu faktor pendukung eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, walau tak semua responden mengakui akan hal tersebut.

Responden yang menyatakan kalau kegiatan dakwah Islamiyah, berupa pengajian rutin dan kajian-kajian khusus lainnya adalah faktor yang turut mempengaruhi eksistensi Muhammadiyah adalah sebanyak 194 responden (79,50%), sedangkan sebanyak 50 responden (20,50%), mengaku bahwa hal tersebut kurang berpengaruh terhadap eksistensi Muhammadiyah. Hal ini semakin menegaskan sumbangsih dan komitmen Muhammadiyah pada usaha dakwah dan syiar Islam, terutama di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.

Pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang.

Sebanyak 220 responden (90,16%), menyatakan bahwa program dakwah Muhammadiyah berpangaruh terhadap pemahaman mereka terhadap nilai-nilai agama, dan sebanyak 17 responden (6,97%) mengaku

[37]Muhammad Ilyas, Dewan Penasehat dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan cabang Muhammadiyah Pasui, *wawancara,* rumah kediaman Dewan Penasehat dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui, Pasui, 07 Juni 2014.

bahwa hal tersebut kurang berpengaruh dan kurang bermakna terhadap pemahaman keagamaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, ada 7 responden (2,87%) yang menilai bahwa hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap pemahaman mereka akan nilai-nilai agama yang menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di desa Pasui mengakui akan besarnya peran Muhammadiyah terhadap pembentukan pemahaman akan nilai-nilai keagamaan.

Tampak bahwa yang menyatakan kalau eksistensi Muhammadiyah berpengaruh terhadap tata cara beribadah mereka, adalah sebanyak 203 responden (83,20%), jumlah responden yang mengaku kurang berpengaruh, adalah sebanyak 41 responden (16,80%), sementara itu, tidak ada responden yang mengaku bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tata cara beribadah mereka. Hal ini berarti bahwa eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui berpengaruh positif terhadap warna kehidupan beragama masyarakat. Selama ini kita meyakini bahwa umat Rasulullah saw, tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan, karena memang seperti itulah sabda Beliau.

Tampak jelas bahwa sebanyak 140 responden (57,38%), menyatakan bahwa eksistensi Muhammadiyah berpengaruh terhadap pengamalan ibadah shalat mereka, sementara itu jumlah yang hampir sama, yakni sebanyak 100 responden (40,98%) peneliti temui pada responden yang menyatakan bahwa hal tersebut kurang berpengaruh terhadap pengamalan shalat mereka, sementara itu ada sebanyak 4 responden atau (1,64%) yang menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah berpengaruh terhadap pengamalan shalat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat, cukup mendasar, dimana hal itu bahkan sampai pada hal-hal yang bersifat fundamental dalam agama.

Tampak bahwa yang menyatakan kalau eksistensi Muhammadiyah berpengaruh terhadap perilaku ataupun akhlak mereka dalam pergaulan sehari-hari, adalah sebanyak 188 responden (77,00%), sedangkan sebanyak 56 responden (23,00%) menyatakan bahwa hal tersebut kurang berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam pergaulan sehari-hari, sementara itu tidak ada responden yang menjawab bahwa hal itu tidak berpengaruh sedikit pun terhadap perilaku mereka dalam pergaulan mereka sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan dakwah yang digeluti oleh Muhammadiyah selama ini mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang olehnya itu, kita senantiasa berharap agar kedepannya organisasi mampu untuk terus menjalankan roda gerakannya, mengingat pembinaan karakter adalah hal yang sangat urgen, dan membutuhkan partisipasi semua pihak untuk terlibat di dalamnya.

Tampak bahwa sebanyak 191 responden (78, 28%), menyatakan bahwa eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui mempengaruhi menurunnya, bahkan menghilangnya praktek keagamaan yang menyimpang dari syari'at. Sementara itu, sebanyak 53 responden (21, 72%) yang menyatakan bahwa eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui, kurang berpengaruh terhadap menghilangnya praktek keagamaan yang dilakukan masyarakat awam di desa Pasui, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak berpengaruh terhadap menghilangnya praktek keagamaan yang menyimpang di desa Pasui. Hal ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah telah berperan besar terhadap upaya pemurnian aqidah bagi masyarakat di desa Pasui, sehingga merupakan hal yang cukup wajar bila sampai pada detik ini Muhammadiyah masih senantiasa menunjukkan eksistensinya.

C. Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui dalam menata tatanan kehidupan beragama masyarakat dan faktor-faktoryang mempengaruhinya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat melalui hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Mula-mula

peneliti mengambil data rekapitulasi jumlah penduduk di tiap-tiap dusun, di desa Pasui. Data rekapitulasi penduduk inilah yang kemudian menjadi populasi dalam penelitian ini, yang kemudian dari jumlah tersebut dilakukan penarikan sampel sebesar 10%.

Daftar pertanyaan pada angket nomor 1 sampai nomor 5 ini, memang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama pada bab pertama pula, dan berdasarkan data yang tersaji, tentunya hal ini mengindikasikan bahwa gambaran eksistensi Muhammadiyah di desa Pasui, adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Berdasarkan uraian dari pertanyaan angket nomor 6 sampai 10, yang tersaji di atas, nampak jelas bahwa hal tersebut merupakan beberapa hal yang menjadi indikator bahwa eksistensi Muhammadiyah memiliki pengaruh terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, yang lebih tepatnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang agama.
2. Tata cara beribadah.
3. Pengamalan ibadah shalat.
4. Perilaku (akhlak) dalam pergaulan sehari-hari.
5. Hilangnya praktek beragama yang menyimpang di masyarakat.

Kelima hal yang tersaji di atas, merupakan indikasi untuk kemudian kita mengukur bagaimana pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat. Sudah menjadi ketetapan, bahwa teori tentang eksistensi bukan hanya tentang keberadaan, tetapi juga mengenai kontribusi nyata di lapangan bagi sekitar.

Selanjutnya untuk memverifikasi data yang telah penulis peroleh, maka langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah melakukan uji hipotesis.

Hal ini menunjukkan bahwa antara hipotesis yang telah dirumuskan di bab pertama memiliki korelasi positif dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui, Mampu eksis di desa Pasui, serta mampu berkontribusi positif dalam menata tatanan kehidupan beragama masyarakat.
2. Pengaruh eksistensi Muhammadiyah terhadap kehidupan beragama masyarakat di desa Pasui, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, cukup signifikan. Pengaruh tersebut meliputi bidang aqidah, ibadah, dan akhlak, dengan indikator sebagai berikut:
    a. Pemahaman tentang agama.
    b. Tata cara beribadah.
    c. Pengamalan ibadah shalat.
    d. Perilaku (akhlak) dalam pergaulan sehari-hari.
    e. Hilangnya praktek beragama yang menyimpang di masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengajukan beberapa saran, sebagai tindak lanjut dari penelitian sebagai berikut:

1. Kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui agar lebih intensif melakukan kerja-kerja nyata, sesuai yang diamanatkan oleh organisasi, serta senantiasa melakukan konsolidasi dan kritik ke dalam, demi perkembangan organisasi yang lebih mapan.
2. Kepada segenap elemen masyarakat desa Pasui, hendaknya senantiasa mendukung usaha dakwah yang dijalankan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pasui, dan tidak segan berkontribusi positif baik berupa materi, tenaga, dan pikiran demi kelangsungan usaha *dakwah amar ma'ruf nahi mungkar,* mengingat kebutuhan beragama adalah sebuah keniscayaan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ambo Enre. *Dasar-dasar Penulisan Sosial dan Pendidikan.* (Ujung Pandang: FKIP IKIP, 1982)

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan; Suatu Pendekatan Praktek.* (Cet. VI, Jakarta: Bina Aksara, t.th.)

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit-Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang.* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980)

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* (Semarang: Toha Putera, 1989)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* (Ed. III, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Hadi, Sutrisno. *Metode Research.* (Cet. XXV, Yogyakarta: t.p., 1990)

----------. *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi,* Jilid I. (Cet. XIV, Yogyakarta: UGM, 1983)

Haryanto, Agus. *Paham Keagamaan Muhammadiyah,* http//luqm.multiply.com., diakses pada tanggal 23 juli 2013

Huda, Miftakhul. *Ilmu Pengetahuan Islam Modern* http//efast.blogsp.com., diakses pada tanggal 28 Mei 2014.

Ilyas, Yunahar. "Manhaj Fiqih Syeikh Muhammad Abdul Wahab", *Suara Muhammadiyah,* 01, Tahun ke-97, Januari, 2012

Jurdi, Fajlurrahman dkk. *Gerakan Sosial Islam, Genealogi Habitus Muhammadiyah.* (Cet. I, Makassar: Pukap, 2009)

Jusuf , Chusnan dan Musthafa Kamal Pasha. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. (Cet. VIII, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 1992)

----------. *Kisar Gerak Muhammadiyah.* (Ed. I, Cet. II, Yogyakarta: Persatuan Yogyakarta, 1990)

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998)

Mulkhan, Abdul Munir. *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah.* (Cet. I, Yogyakarta: Roykhan, 2005)

Noor, Deliar. *Gerakan Muslim Indonesia 1900-1942.* (Jakarta: LP3ES, 1980)

Nugroho, M. Yusuf Amin. *Fiqh Al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah.* (Cet. I, Bandung: Dar Mizan, 2012)

PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih.* (Cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

----------, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.* (Cet. VI, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

Putrawan, I Made. *Pengujian Hipotesis dalam Penulisan Sosial.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Ramli, Rosmiati. *Al-Islam Kemuhammadiyahan.* (Pare-pare: Umpar Press, 2012)

Sani, M. Abdul Halim. *Manifesto Gerakan Intelektual Profetik.* (Cet. I, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)

Shaldi, Ishak. *Manusia dan Organisasi,* http//ishouldick.wordpress.com., diakses pada tanggal 30. April 2014.

Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Sudjarwo, Didik. Haedar Nashir dan Imron Nasri. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah; Ideologi, Khittah dan Langkah.* (Cet. I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2009)

Suudibya, Wahyudi. *Menyongsong Sejarah Peradaban di Abad Kedua,* http//tarjihbms.wordpress.com., diakses pada tanggal 30 April 2014.

Syam, Nur. *Metodologi Penulisan Dakwah.* (Cet. II, Solo: Ramadhani, 1985)

Syamsuddin, Din. *Tentang Muhammadiyah,* www.muhammadiyah.co.id., diakses pada tanggal 05 Juni 2014.

----------. *Muhammadiyah dari masa ke masa,* www.muhammadiyah.co.id., diakses pada tanggal 06 Juni 2014.

----------. *Seabad menyinari ummat dan bangsa,* www.muhammadiyah.co.id., diakses pada tanggal 08 Juni 2014.

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TERHADAP PROGRAM BANTUAN KULTIVATOR KABUPATEN ENREKANG

Fatmawati, Erfina, Jamaluddin Ahmad
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
fatmawatibakti@yahoo.co.id, erfina.erul85@gmail.com, jahmadlado@yahoo.co.id

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui pelaksanaan Keputusan Enrekang No. 19 tahun 2012 dalam hal komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivator, 2) Untuk mengetahui efek secara individual antara komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivar, 3) Untuk mengetahui dampaknya antara komunikasi, ketersediaan sumber daya manusia, sikap dan komitmen pelaksanaan program, struktur birokrasi program bantuan kultivator Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian ini dirancang, antara lain penelitian deskriptif dan explanatory research. Populasi penelitian adalah seluruh kelompok petani yang mendapat bantuan pembudidaya di Enrekang pada tahun 2014-2015, yang diwakili oleh ketua kelompok tani yang berjumlah 88 orang, melihat populasi yang tidak terlalu banyak kemudian mengambil sampel secara keseluruhan. populasi untuk dijadikan sampel. dia mengukur hasil variabel. a) Implementasi komunikasi menunjukkan bahwa nilai total skor yang diperoleh sebanyak 577 kategori Tidak Setuju (475,2 sampai 686,3), b) Implementasi ketersediaan sumber daya menunjukkan nilai skor yang diperoleh sebanyak pada 1209, kategori Setuju (1196,8 - 1478,3), c) Penerapan sikap dan komitmen pelaksana dan penerima manfaat program menunjukkan skor 601, kategori Setuju (598,4 sampai 739,1), d) Penerapan struktur birokrasi menunjukkan skor 660, kategori Tidak Setuju (475,2 ke 686,3). Komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen, struktur biroksrasi yang berpengaruh secara individu dan bersama-sama untuk membantu program pembudidaya.

Kata kunci: Implementasi, Kulivator

I. PENDAHULUAN

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.. Terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya 1) komunikasi, 2) Ketersediaan sumberdaya, 2) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, 4) Struktur birokrasi. (Edward, 1980:1).

Salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah guna melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan ialah melalui penguatan sistem otonomi daerah. Rezim otonomi daerah bermaksud untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah. Untuk itu setiap tahun Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk bantuan hibah maupun bantuan sosial. Pemberian bantuan yang bersumber dari APBD oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikatakan "komplit" walaupun sesungguhnya masih diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementeraian Dalam Negeri. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011. Di Kabupaten Enrekang telah diundangkan Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri diatas. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengimplementasikan program bantuan hibah dan bantuan sosial.

Menurut Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Enrekang mengalokasikan anggaran bantuan hibah pada program bantuan barang berupa alat mesin pertanian (*kultivator)* kepada masyarakat tani. Pemberian bantuan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran belanja barang untuk pemberian bantuan hibah dan bantuan khusus *kultivator* di Kabupaten Enrekang bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja Barang Untuk Pemberian Bantuan Hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Realisasi Khusus *Kultivator* (Rp)	Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan *Kultivator*
1	2014	350.000.000	309.150.000	27
2	2015	1.322.060.000	915.000.000	61

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, 2016.

Tabel 1 menunjukkan realisasi anggaran belanja barang untuk pemberian bantuan hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015 lebih banyak direalisasikan pada belanja barang alat dan mesin pertanian *(Kultivator)* dimana pada tahun 2014 bantuan khusus *kultivator* direalisasikan sebanyak Rp. 309.150.000,- dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 27 kelompok tani dan pada Tahun 2015 meningkat sebanyak Rp. 915.000.000,- dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 61 kelompok tani. Meningkatnya pemberian bantuan alat dan mesin pertanian *(Kultivator)* kepada masyarakat tani, dikarenakan Kebupaten Enrekang merupakan salah satu daerah produksi pertanian yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, maka untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan kebijakan program bantuan yakni pemberian batuan alat dan mesin pertanian (*Kultivator*) kepada masyarakat petani. Program bantuan *kultivator* memiliki peranan penting dalam sasaran program Pemerintah yakni pencapaian swasembada pangan dikarenakan dengan penerapan *kultivator* dalam kegiatan pertanian dapat memberikan

mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Namun berdasarkan hasil observasi awal, telah diamati bahwa program bantuan *kultivator* khususnya di Instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang pada tataran implementasi belum terlihat kinerja yang baik, dimana dalam pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penggunaan barang *kultivator* dari penerima bantuan yakni kelompok tani masih belum berpedoman pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, kelompok tani masih belum tertib melaporkan hasil penggunaan barang *kultivator* kepadaDinas Pertanian dan Perkebunan. Padahal pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait. Disisi lain masih terdapatnya kejadian salah sasaran penyaluran bantuan terhadap kelembagaan tani yang masih belum memiliki legitimasi hukum dikarenakan kurang disiplinnya kegiatan seleksi dari pengelola program dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hal ini pun tidak sejalan dengan pasal 5 di Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan penerima hibah memiliki persyaratan yakni memeiliki kepengurusan yang jelas.

Melihat uraian permasalahan diatas maka diperlukan bentuk pengawalan apakah dalam pelaksanaan program bantuan *kultivator* tersebut bisa berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan. Agar nantinya dapat mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program bantuan *kultivator* tercapai. Dengan demikian penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia. Selain itu penulis juga melihat masih belum adanya penelitian yang terfokus mengkaji tentang implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 terhadap bantuan *Kulivator* di Kabupaten Enrekang, sehingga membuat peneliti merasa perlu berkontribusi dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan masukan bagi Pemerihtah Daerah Kabupaten Enrekang terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012.

Untuk itu maka dilakukanlah penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang terhadap Program Bantuan *Kulivator* dengan tujuan Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 dalam hal komunikasi, ketersedian Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten EnrekangUntuk menganalisis pengaruh secara sendiri-sendiri antara komunikasi, ketersedian Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten Enrekang dan Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara komunikasi, ketersedian Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap program bantuan *kultivator* di Kabupaten Enrekang.

Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesayan suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003:9) mengemukakan pengertian implementasi: Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Berdasarkan pengertian Patton dan Sawicki (Tangkilisan, 2003:9), implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk

merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Berdasarkan Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2001:193), implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran. Menurut Widodo (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: 'pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101). Nugroho (2008:494) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Edward III (1980:1) berpendapat:*"the study of public policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act. The issuing of an executive order, the handing down of judicial decision, or the promulgation of regulatory rule- and the consequences of the policy of the people whom it affects".* Bahwa proses implementasi kebijakan tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhinya. Menurutnya ada empat variabel penting yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut adalah (1)komunikasi (*communication*), (2) sumber daya pelaksana (*resource*s), (3) disposisi birokrasi (*disposition*) dan (4) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan (Edward, 1980:4) Yaitu:

1. Komunikasi (*communications)*, berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources),* berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu : a) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa

kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal. Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. b) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. c) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. d) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic strucuture*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Selanjutnya, Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". Hibah atau Pemberian sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. (Pasaribu dan Lubis, 1996). Pendapat Kansil (2002) mengemukakan hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain yang menerima kebaikannya itu.

Buletin Teknis Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapatdiberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sertatidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara

terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang, menyatakan pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pasal 2 pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Tujuan Pemberian Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, serta sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 3 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan Hibah dapat diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:

1. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
   b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah.
2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
   c. Memiliki sekretariat tetap.

Pasal 14 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban menyatakan bahwa:

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
2. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17 Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 menyatakan bahwa:

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
   a. Laporan penggunaan hibah;
   b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
   c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Hadisaputra (2013) mengemukakan bahwa Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui pengesahan pendapatan dan belanja oleh BUN/Kuasa BUN melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan nomor register; Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satker selaku PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang ke Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan dlampiri perjanjian hibah dan ringkasan hibah.
2. Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah; atas dasar persetujuan permohonan nomor register, PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening hibah kepada BUN. Pengelolaan rekening hibah dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran.
3. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; PA/KPA selanjutnya melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah langsung tersebut dalam DIPA K/L. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui mekanisme revisi DIPA yang diajukan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung; PA/KPA mengajukan SP2HL untuk pengesahan belanja dan pendapatan ke KPPN dengan dilampiri : copy rekening Koran atas rekening hibah, SPTMHL, SPTJM dan copy persetujuan pembukaan rekening hibah.

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pendekatan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini dirancang antara lain: deskriptif, jenis eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kelompok tani yang menerima bantuan kultivator di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2014-2015, yang diwakili oleh ketua kelompok tani yakni berjumlah 88 orang. Melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak maka penentuan sampel dalam penelitian ini adalah mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel atau biasa disebut sebagai sampel jenuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2007) yang menyatakan bahwa jika jumlah sampel kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlah sampel lebih dari 100 maka lebih baik diambil antara 10-15 persen dari jumlah populasi ataupun tergantung dari kemampuan peneliti. Adapun sampel yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 88 orang.

Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan, sedangkan tekhnik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji T, dan uji F.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 dalam hal Komunikasi, Ketersedian Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program, Struktur Birokrasi terhadap Program Bantuan Kultivator di Kabupaten Enrekang.

1. Komunikasi

Hasil pengukuran variabel Implementasi komunikasi menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 577, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi komunikasi berada pada kategori Tidak Setuju karena berada pada rentang kelas antara 475,2 - 686,3. Berarti dapat dinyatakan bahwa Implementasi komunikasi pada Program Bantuan *Kulivator* tidak berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani yang telah menerima bantuan *kultivator,* beranggapan bahwa penyaluran komunikasi dan kejelasan komunikasi dari pelaksana tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan terkait mekanisme bantuan *kultivato*r yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, informasinya tidak disalurkan secara jelas

atau *detail*, sehingga Kelompok Tani merasa bantuan yang telah diterima tidak perlu lagi melaporkan hasil penggunaan barang *kultivator* kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sitanggang (2014) yang mengungkapkan bahwa Proses pelaksanaan hibah dan bantuan social kemasyarakatan sudah menpunyai organisasi yang jelas, tetapi dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan beberapa masalah, yakni : Para organisasi yang ditunjuk, kurang berperan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sosialisasi program kurang optimal, serta masih adanya nepotisme. Sementara pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait. Hal ini pun seperti yang diamanatkan pada Pasal 16 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban menyatakan bahwa Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

2. Sumber daya

Hasil pengukuran variabel Implementasi ketersediaan sumberdaya menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 1209, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel ketersediaan sumberdaya berada pada kategori Setuju, dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 1196,8 - 1478,3. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Setuju bahwa ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa optimalnya ketersediaan sumberdaya pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* dikarenakan adanya pelaksana tugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan yang memiliki kualitas untuk diberikan kewenangan dalam mengelola program, dan adanya sarana alat *Kulivator* yang tersedia setiap tahunnya, serta pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBN selalu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian Jannah (2013) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun yang harus diperhatikan agar pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial menjadi lebih baik yaitu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan dengan lebih selektif, yakni mengoptimalkan SDM yang ada.

3. Sikap dan komitmen

Hasil pengukuran variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 601, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program berada pada kategori Setuju dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 316,8 - 457,5. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Setuju bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana tugas program *kulivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa optimalnya sikap dan komitmen dari pelaksana tugas dalam menyelesaikan program bantuan *Kulivator* dikarenakan sejalan dengan sikap Pemerintah Kabupaten Enrekang yang sangat antusias mendukung program bantuan *Kulivator,* disisi lain juga adanya kepatuhan aparat Pemerintah Kabupaten pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sehingga Pemerintah Kabupaten melalui Bupati mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 sebagai landasan untuk penyaluran bantuan hibah *kultivator* tersebut. Hal ini bisa dilihat tiap tahun ada penyaluran bantuan mesin pertanian (*kultivator)* dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten

Enrekang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) yang menyatakan bahwa Efektivitas program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan sudah cukup efektif. Penerima hibah yang selama ini telah mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan hibah sudah sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kerjasama antara pemerintah dengan penerima dana hibah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan dana hibah dengan baik.

4. Struktur birokrasi

Hasil pengukuran variabel Implementasi struktur birokrasi menunjukkan bahwa total keseluruhan nilai skor yang diperoleh sebanyak 660, total skor tersebut menunjukkan bahwa variabel Implementasi struktur birokrasi berada pada kategori Tidak Setuju, dikarenakan total nilai tersebut berada pada rentang kelas antara 475,2 - 686,3. Berarti dapat dikatakan bahwa responden menyatakan Tidak Setuju jika struktur birokrasi sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kelompok Tani, beranggapan bahwa masih terdapatnya kejadian yang dilakukan pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, yang salah sasaran dalam menyalurkan bantuan *Kulivator* terhadap kelompok tani yang masih belum memiliki legalitas hukum pada organisasinya, hal ini dikarenakan kurang selektifnya pengelola program dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam pemeriksaan administrasi yang diberikan kelompok tani. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sitanggang (2014) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya, dimana hasil penelitiannya mengungkapkan, bahwa proses pelaksanaan hibah dan bantuan masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditemukan beberapa masalah, yakni: Munculnya proposal yang tidak diverifikasi, banyak penerima tidak melaksanakan verifikasi data. Sementara itu temuan kondisi permasalahan diatas tidak sesuai dengan pasal 3 pada Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012, menyatakan penerima bantuan hibah memiliki persyaratan yakni memiliki kepengurusan yang jelas dan telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap.

Selanjutnya, Pengaruh secara Sendiri-sendiri antara Komunikasi (X1), Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) terhadap Program Bantuan Kultivator (Y) di Kabupaten Enrekang

a. Komunikasi (X1)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikasi regresi variabel Komunikasi (X1) sebesar 0.000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (βi) sebesar 0.201 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel (2.011 > 1.667). Hal ini menunjukkan bahwa jika implementasi komunikasi dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 20,1%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu aktif mengkomunikasikan syarat dan mekanisme dari program bantuan *kultivator* yang terkandung dalam Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 kepada kelompok tani mengingat aspek komunikasi sangatlah penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980:4) yang menyatakan bahwa Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.

Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan.

b. Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikasi regresi variabel Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0.000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (βi) sebesar 0.263 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel (2.127 > 1.667). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ketersedian Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 26,3%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan pada program bantuan *kultivator* kepada kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa beberapa faktor pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu Sumberdaya, sarana dan prasarana serta pendanaan. Sumber daya merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang. Sarana dan prasarana juga merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sementara pendanaan membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut.

c. Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program (X3)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikasi regresi variabel Implementasi sikap dan komitmen dari pelaksana program (X3) sebesar 0.001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (βi) sebesar 0.206 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel (2.320 > 1.667). Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen dari pelaksana program Manusia dilaksanakan secara baik oleh pelaksana tugas di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 20,6%, demikian pun sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang telah mengoptimalkan bentuk sikap dan komitmen dari pelaksana tugas untuk menyelesaikan program bantuan *kultivator* kepada kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d. Implementasi Struktur Birokrasi (X4)

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikasi regresi variabel Implementasi Struktur Birokrasi (X4) sebesar 0.001 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan Koefisien Regresi (βi) sebesar 0.247 dan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel (2.231 > 1.667). Hal ini menunjukkan bahwa jika Struktur Birokrasi pelaksana program dilaksanakan secara baik oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, maka kinerja program bantuan *Kulivator* akan meningkat sebesar 24,7%, demikian pun sebaliknya. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang perlu menyesuaikan prosedur standar operasi penyaluran bantuan program dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 agar bantuan program *kultivator* penyalurannya tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi (*bureaucratic strucuture*) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Berikutnya, Pengaruh secara Bersama-sama antara Komunikasi (X1), Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) terhadap Program Bantuan Kultivator (Y) di Kabupaten Enrekang. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa variabel Komunikasi (X1), Ketersedian Sumber Daya Manusia (X2), Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program (X3), Struktur Birokrasi (X4) memperoleh nilai F hitung 10.107 > Ftabel 2,48, yang berarti Komunikasi, Ketersedian Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program dan Struktur Birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap Program Bantuan *Kulivator* di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika penerapan model implementasi dalam hal ini Komunikasi, Ketersedian Sumber Daya Manusia, Sikap dan Komitmen dari Pelaksana Program dan Struktur Birokrasi diterapkan dengan baik, maka semakin besar pula peningkatan Program Bantuan *Kulivator* di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward (1980) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.. Terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya 1) komunikasi, 2) Ketersediaan sumberdaya, 2) Sikap dan komitmen dari pelaksana program, .4) Struktur birokrasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumberdaya, Sikap dan komitmen pada pelaksanaan program bantuan *kultivator* sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang No 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang. Sementara variabel Komunikasi dan Struktur biroksrasi, implementasinya pada program bantuan *kultivator* tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Komunikasi, Ketersediaan sumberdaya, Sikap dan komitmen, Struktur biroksrasi berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap program bantuan *cultivator*.
3. Komunikasi, Ketersedian Sumber Daya Manusia, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap program bantuan *kultivator*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan. Pancur Siwah.

[2] Ansori Eko Prasetyo. 2014. *Implementasi Program Bantuan Hibah bagi Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bengkelulor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.* Skripsi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra, Surabaya.

[3] Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

[4] _____. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

[5] _____. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

[6] Buletin Teknis Nomor 13 SAP *tentang Akuntansi Hibah*. Komite Standar Akutansi Pemerintahan: Indonesia.

[7] Budihardjo dan Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

[8] Carl J, Friedrich,. 1963. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.

[9] Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

[10] _____. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

[11] Dwidjowijoto, R.N. 2004. *Komunikasi Pemerintahan: Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia.* Jakarta:Elex Media Komputindo.

[12] Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang, 2016. *Realisasi Anggaran Belanja Barang Untuk Pemberian Bantuan Hibah Di Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2015*

[13] Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert. L. Peabody.

[14] Endarto, Dani . 2014. *Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.* Jurnal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa, Padang

[15] Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum* Tata Negara, Yogyakarta: Kreasi total Media.

[16] Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.

[17] Hogwood, Brian, W. dan Gunn, Lewis, A. 1978. *Policy Analysis for The Real World*. New York : Oxford University Press,

[18] Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara; Jakarta.

[19] Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

[20] James E, Anderson. 1998. *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.

[21] Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, *Konsep, Teori dan Issu*. Jogjakarta : Grava Media.

[22] Kansil. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta

[23] Kahya dan Zenju. 1996. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)"*. Http//kantinpustaka.blogspot.com. Diunduh tanggal 28 Agustus 2016.

[24] Kitab Undang-undang Hukum Perdat. *Hibah.* Jakarta: Indonesia.

[25] Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta :LAN.

[26] Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.

[27] Matland, R . 1995. *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation.* Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART, Vol. 5, No. 2. (Apr., 1995), pp. 145-174

[28] Miftahul Jannah. 2013. *Analisis Implementasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2012*. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 2, No. 2, Desember 2013 Hal. 21-48.

[29] Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.

[30] Nugroho, Riant 2008. *Kebijakan Publik (Public Policy).* PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

[31] Patton dan Sawicki. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall : Michigan University.

[32] Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

[33] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.*

[34] Peraturan Bupati Enrekang No 19 tahun 2012 *tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang*

[35] Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 *tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah* [36]Peraturan Pemerintah No 71 Tahun *2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

[37] Pasaribu, C dan Lubis, SK. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta,. Sinar Grafika.

[38] PSAK No 61 Tahun 2010. *Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*. Jakarta.

PERAN PASUKAN PERDAMAIAN INDONESIA DALAM MISI KEAMANAN DI LEBANON 2006-2012

Hamdy Maulana
Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
hamdymaulana19@gmail.com

ABSTRAK — Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu terjadinya perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan subjek penelitian ini yaitu Agus Harimusti Yudhoyono yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda XXIII-A sebagai pasukan perdamaian PBB.

Kata Kunci — Konflik, Lebanon, Israel, Pasukan Perdamaian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan mengenai perdamaian dunia menjadi topik yang hangat untuk diperbincangan terutama setelah pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1941-1945. Refleksi atas kengerian dampak kerusakan akibat PD II tersebut, melahirkan gagasan tentang perlunya mencegah terulangnya tragedi hidup manusia. Bangsa-bangsa di dunia berupaya bekerjasama menjaga terciptanya perdamaian sekaligus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konflik yang memicu terjadinya perang. Kesadaran ini menumbuhkan keinginan masyarakat dunia untuk membangun kembali kerjasama internasional dan upaya-upaya penyelesaian konflik serta permasalahan-permasalahan internasional lainnya. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perdamaian dengan melibatkan anggota PBB, dimana Indonesia termasuk didalamnya dan ikut terlihat dalam berbagai upaya untuk menjaga perdamaian dan mengatasi konflik antar negara-negara di dunia.

Berkaitan dengan peranan Indonesia pada penyelesaian konflik luar negeri, menurut Setiawati ada empat peranan yang dapat diambil Indonesia dalam penyelesaian suatu konflik antar Negara atau kelompok, yaitu sebagai: *pertama* mediator atau penengah pihak yang berkonflik, *kedua* fasilitator yaitu memberi fasilitas pada pihak yang konflik untuk berunding, *ketiga* partisipan yaitu terlibat langsung untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencegah supaya tidak muncul konflik baru misal sebagai pasukan penjaga perdamaian, dan sebagai *keempat* justifikator yaitu memberi justifikasi penyelesaian konflik [1].

Dalam hal penyelesaian konflik antara negara-negara Arab-Israel, Indonesia telah menunjukkan peranannya terutama sebagai partisipan atau pihak yang berpartisipasi aktif mengimplementasikan perdamaian dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian ke Sinai Pasca Perang Sinai 1956 yang tergabung di dalam UNEF (*United Nations Emerging Forces*), dan ke Lebanon khususnya setelah serangan Israel atas Lebanon Selatan di tahun 2006 yang kemudian tergabung

dalam pasukan Perdamaian PBB UNIFIL (*United Nations Interim Forces in Lebanon*).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 85%, Indonesia merasa memiliki kedekatan hubungan dengan Lebanon maupun dengan negara-negara Arab lainnya yang merupakan negara tempat lahirnya Agama Islam. Selain itu, keteritakatan Indonesia dengan Lebanon muncul dikarenakan Lebanon merupakan salah satu dari beberapa negara Arab (Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, dan negara Liga Arab) yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adanya kedekatan secara agama dan historis inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia merasa perlu membantu Lebanon dan negara-negara Arab yang lain dalam menyelesaikan berbagai konflik baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan sejarah, konflik yang terjadi antara Lebanon dan Israel bermula ketika Hizbullah melakukan penyerangan lewat udara ke wilayah Israel Utara yaitu kota Shlomi dan juga menembakan roket Angkatan Pertahanan Israel IDF (*Israeli Defence Force*). IDF yang sedang melakukan patroli di perbatasan menjadi korban yang mengakibatkan delapan tentara IDF tewas serta ditangkapnya dua tentara lainnya (Ehud Goldwasser dan Elgad Regev). Tentara Hizbullah juga menembakkan roket dan mortil secara beruntun ke wilayah utara Israel lainnya sebagai suatu pengalihan perhatian pada waktu yang sama.

Israel membalas menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan dua tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Menurut pejabat Israel diduga kedua tentara itu dibawa ke Iran. Hizbullah berencana melakukan penukaran tawanan dalam membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Serangan besar Israel ini diluar dugaan Hizbullah yang sebelumnya memperkirakan Israel hanya akan membalasnya dengan Operasi Komando untuk membalas menculik anggota Hizbullah,seperti yang sebelumnya pernah dilakukan. Tampaknya Israel telah lama mempersiapkan serangan ini atas dukungan dari Amerika Serikat, sebagai penjajakan untuk serangan berikutnya ke Iran. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan dihentikan jika Hizbullah membebaskan dua tentara Israel yang disandera. Israel menuduh Hizbullah telah meluncurkan 130 roket dalam waktu 48 jam yang menyebabkan belasan warga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Di saat yang sama, milisi Hizbullah meminta Israel segera menghentikan agresi militernya di wilayah Palestina. Namun, Israel sejak awal menolak berkompromi, dan kemudian melancarkan serangan ke sejumlah kamp milik Fatah dan Hamas. Termasuk beberapa lokasi yang dicurigai potensial untuk melarikan Kopral Gilad Shalit dari tempat penyergapannya di selatan Gaza (www.globalresearch.ca).

Dalam tujuh malam berturut-turut sejak penculikan tentara Israel, Jalur Gaza digempur serangan udara. Israel berusaha meningkatkan aksi militernya untuk membebaskan anggotanya. Selain dari darat, militer Israel menggempur Beirut dari udara. Sebuah kawasan pinggiran kota yang banyak dihuni kelompok Hizbullah hancur. Jembatan diwilayah Akkar, beberapa tempat di lembah Bekaa, serta ruas jalan dekat perbatasan Suriah juga tidak luput dari serangan peluru kendali Israel). Akibatnya distribusi makanan dan obat-obatan bagi warga sipil sulit disalurkan. Menurut Perdana Menteri Lebanon Fouad Siniora, dalam serangan itu sepertiga dari jumlah korban tewas berusia dibawah 12 tahun. Satu juta warga Lebanon atau seperempat populasinya kini kehilangan tempat tinggal [2].

Selain itu, Israel juga menyerang Lebanon pada tanggal 5-6 Agustus 2006. Israel antara lain menggempur kota Tirus, Nakburah dan Nabatiyeh di Lebanon Selatan. Israel juga menyerang markas Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) di Lembah Bekaa. Serangan Israel itu telah menewaskan sedikitnya lima penduduk dan 12 lainnya luka-luka di Desa Al-Ansar dekat Nabatiyeh. Menurut laporan AFP, kelimanya tewas ketika rudal Israel jatuh di sebuah rumah. Selain itu, tiga orang tewas di

Nakoura, Lebanon Selatan. Mereka juga tewas akibat tembakan rudal Israel [2]..

Mengenai konflik yang terjadi di Lebanon tersebut, kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian ke Lebanon tidak dapat dilepaskan dari idealisme bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Disamping itu platform politik luar negeri bebas aktif memberikan dorongan agar Indonesia terlibat secara aktif untuk ikut serta dan berkontribusi bagi upaya perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran Indonesia dalam operasi perdamaian yang digelar secara internasional pada masa tersebut memiliki arti penting sebagai implementasi dari nilai politik luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia.

Arti penting pengiriman pasukan dalam misi perdamaian PBB juga terkait dengan pendekatan terhadap masyarakat di negara dimana misi tersebut dilaksanakan. Kondisi ini terkait dengan tugas yang diemban tidak dapat dilepaskan dengan interaksi diantara pasukan TNI dengan masyarakat dimana mereka ditempatkan. Saat ini, jumlah personel Indonesia yang tengah bertugas dalam berbagai UN PKO (sesuai data *United Nations Department of Peacekeeping Operations* per 30 November 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, dan menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 124 *Troops/Police Contributing Countries* (T/PCC). Personel dan Pasukan Kontingen Garuda tersebut bertugas di 10 (sepuluh) MPP PBB, yaitu UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan) (Kemelu.go.id)

Keberadaan pasukan TNI di luar negeri dalam misi perdamaian secara tidak langsung merupakan representasi dari Indonesia sebagai sebuah negara. Keberadaan dari pasukan TNI sebagai bagian dari misi perdamaian PBB telah membuka sebuah peluang besar untuk menjembatani konektivitas sosial antara TNI sebagai representasi dari Indonesia dengan masyarakat dan kontingen angkatan bersenjata dari negara lain yang tergabung dalam misi PBB tersebut.

Salah satu wilayah dimana pasukan TNI secara reguler ditempatkan adalah di Lebanon Selatan, dimana dalam upaya pemeliharaan perdamaian pasukan TNI memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal maupun dengan kontingen pasukan penjaga perdamaian dari negara lain. Kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal di Lebanon Selatan dimanfaatkan dengan baik oleh TNI. Interaksi yang dilakukan oleh TNI dengan masyarakat di Lebanon Selatan menghasilkan sebuah penerimaan yang sangat baik terhadap keberadaan pasukan TNI di wilayah tersebut. Upaya untuk mendapatkan penerimaan serta pengelolaan terhadap interaksi tersebut menjadi sebuah fenomena tersendiri baik dikalangan kontingen UNIFIL maupun masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut terkait dengan sulitnya kontingen UNIFIL dari negara lain untuk dapat diterima secara baik serta oleh masyarakat di Lebanon Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, maka rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latarbelakang permasalahan, penulis merumuskan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kontribusi dari penelitian yang ingin dicapai:

1. Kontribusi Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan kontribusi permasalahan politik luar negeri khususnya yang berkaitan

dengan peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan luar negeri yang berkaitan upaya penyelesaikan konflik antar negara atau kelompok.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Hal ini berbeda dengan riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut pemapara beberapa riset terdahulu yang berkaitan dengan konflik luar negeri:

Pertama, penelitian Rachmat yang bertujuan untuk menganalisis praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL. Hasil penelitian menemuikan bahwa Diplomasi Publik yang saat ini tengah gencar dijalankan oleh berbagai negara di dunia dengan beragam variasi instrumen maupun metode membuat Indonesia perlu untuk menyadari arti penting dari praktek diplomasi publik. Salah satu praktek diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian dibawah payung PBB. Pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini tidak hanya memberikan signifikansi terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang dapat meningkatkan citra sebuah negara, namun juga dalam upaya untuk memperkenalkan diri di negara dimana misi tersebut dijalankan serta kepada negara-negara lain yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB [3].

Kedua, penelitian Sirmareza yang membahas tentang partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL MTF sebagai misi matra laut pertama dan satu-satunya di dunia sebagai sebuah naval diplomacy. Kajian-kajian terdahulu belum banyak menggunakan teori Ken Booth untuk mengembangkan *naval diplomacy* Indonesia, khususnya dalam pengiriman Satgas Maritim TNI. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis *naval diplomacy* dalam pengiriman Satgas Maritim TNI dan kontribusinya terhadap pencapaian kepentingan nasional dan sasaran kebijakan luar negeri Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menekankan dua kepentingan utama, yaitu pemeliharaan ketertiban dunia itu sendiri sebagaimana dijamin konstitusi, serta meningkatkan peran globalnya sebagai *middle power*. Dalam perspektif appropriateness yang dikemukakan Ken Booth, Satgas Maritim TNI memiliki fleksibilitas, mobilitas kemampuan proyeksi dan potensi akses untuk membawa misi diplomatik Indonesia. Secara empiris, Satgas Maritim TNI dalam derajat tertentu mendukung agenda-agenda kebijakan luar negeri Indonesia. Namun demikian, dipandang dari aspek simbolisme, peningkatan kuantitas perlu dipertimbangan agar Satgas Maritim TNI dapat menjadi signifier prestise dan komitmen internasional Indonesia yang maksimal [4].

Ketiga, penelitian Hutabarat yang membahas tentang partisipasi dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia. Semakin pentingnya PBB dan diplomasi multilateral bagi Indonesia, mengharuskan Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perannya dalam mendorong partisipasinya pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai suatu instrumen kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Indonesia telah meningkatkan peran dan inisiatifnya dalam operasi Pasukan Penjaga Perdamaian PBB pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai implementasi dari kebijakan luar negeri Indonesia yang kreatif dan dinamis. Berdasarkan pemahaman realis, partisipasi dalam operasi perdamaian dimaksudkan dapat memenuhi kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk menyusun suatu kebijakan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Strategi yang berhasil adalah suatu proses jangka panjang yang membutuhkan suatu pendekatan yang strategis dan holistik. Menjadi sepuluh besar negara kontributor pasukan pada operasi pemeliharaan perdamaian PBB akan menjadi suatu perjalanan

yang bersejarah bagi Indonesia pada dekade berikutnya. Selain itu, penyusunan suatu Buku Putih Partisipasi pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Internasional akan menjadi langkah penting yang pertama [5].

Keempat, penelitian Islamiyah dan Trilaksana yang bertujuan untuk mengetahui (1) Apa upaya-upaya yang telah dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, (2) Bagaimana implementasi kebijakan PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel 1967-1995, dan (3) Bagaimana dampak kebijakan PBB, bagi Palestina maupun Israel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PBB dinilai tidak efektif hal tersebut dapat dinilai ketika upaya PBB dalam mengimplementasikan kebijakannya tidak berhasil dijalankan oleh pihak yang bersengketa. Perdamaian dan keamanan jauh dari cita-cita khususnya keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggagalkan Veto terkait perdamaian Timur Tengah dan lebih mendukung Israel merdeka tanpa melihat dari segi Palestina. Hambatan lain yakni kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fattah yang memiliki perbedaan pandangan sehingga konflik ini sulit diselesaikan [6].

F. Kerangka Teoritik

Peacekeeping adalah suatu teknik yang dikembangkan oleh PBB untuk membantu menyelesaikan konlfik bersenjata. *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) adalah operasi *Peacekeeping* PBB yang pertama. Operasi tersebut terdiri atas pengamat militer tidak bersenjata (*unarmed military observers*) yang dikirim ke Palestina pada bulan Juni 1948 untuk mengawasi kesepakatan yang dilakukan oleh Count Bernadotte dalam perang pertama antara Israel dan Arab. Langkah utama dilakukan saat pasukan bersenjata PBB (*the United Nations Emergency Force* atau UNEF) yang ditugaskan di Mesir akibat serangan Anglo-French-Israeli terhadap negara tersebut bulan Oktober 1956.

Peacekeeping dapat disimpulkan dalam 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. *Pertama*, *peacekeeping operation* adalah operasi PBB. PBB yang menyebabkan *peacekeeping operation* dapat diterima negara anggota dimana keberadaan pasukan asing berada di wilayah kawasan negara tersebut.
2. Kedua, *peacekeeping operation* selama ini dapat dilakukan dengan adanya "*consent of the parties to the conflict in question*". Selain itu, misi dapat berhasil dengan tetap berlanjutnya "*consent*" dan kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bertikai.
3. Ketiga, *peacekeepers* harus bersikap "*impartial*" di antara kelompok yang ada. Keberadaan Pasukan PBB tidak berupaya memaksakan kepentingan satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
4. Keempat, prinsip terkait dengan kebutuhan pasukan bagi UN *Peacekeeping Operation*. Charter PBB menyatakan bahwa negara anggota terikat dengan DK PBB untuk berkomitmen dalam penyediaan pasukan. Prinsip kelima berkaitan dengan "*use of force*". Lebih dari setengah peacekeeping operation sebelum tahun 1988 hanya terdiri dari pengamat militer tidak bersenjata. Namun saat pertempuran bersenjata terjadi, prinsipnya adalah use force dilakukan seminimal mungkin dan hanya boleh dilakukan dalam skema pembelaan diri (*fire should be opened only in self-defence*).

UN *peacekeeping* membantu negara-negara yang terpecah akibat konflik dan mengupayakan terwujudnya kondisi bagi perdamaian berkelanjutan. *Peacekeeping* telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif bagi PBB guna membantu host countries melalui masa yang sulit dari fase konflik menuju perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kekuatan yang unik, termasuk "*legitimacy, burden sharing, and an ability to deploy and sustain troops and police*" dari seluruh dunia; melakukan integrasi dengan *civilian peacekeepers*; hingga "*advance multidimentional mandates*". UN peacekeepers menyediakan keamanan dan dukungan politik dan "*peacebuilding support*" untuk membantu negara melewati transisi dari konflik menuju perdamaian.

Terdapat lima motivasi yang menjadi pertimbangan suatu negara untuk memberikan

kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, yaitu:

1. Politik. Partisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian dapat membantu negara dalam memenuhi tujuan politiknya. Sejumlah negara mendapatkan penghargaan dan otoritas dalam institusi internasional, khususnya PBB, yang memungkinkannya menyuarakan isu kemanan internasional [7]. Terdapat beberapa alasan politik mengapa negara melakukan kontribusi pada pasukan PBB, antara lain tekanan atau persuasi oleh negara sekutu, negara besar, atau Sekjen PBB, dan persepsi bahwa kontribusi pada pasukan PBB. memperkuat "*national prestige*" negara atau mungkin memperkuat pencalonannya untuk kursi tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB [8].
2. Ekonomi. Argument utamanyaadalah insentif ekonomi merupakan alasan utama bagi kontribusi Pasukan PBB. Salah satu elemen utama dari argumen ini adalah adanya sistem pembayaran kompensasi PBB bagi negara yang menyediakan pasukan PBB. Namun dalam pertimbangan finansial ini, perlu didefinisikan terkait siapa saja yang memperoleh manfaat.
3. Keamanan. Operasi penjaga perdamaian PBB tidak selalu diasosiasikan dengan pertahanan nasional atau kepentingan utama keamanan nasional. Negara biasanya memiliki pandangan bahwa penyediaan pasukan PBB akan mempromosikan kepentingan keamanan nasionalnya yang lebih luas [8]. Dalam hal ini, tingkat persepsi ancaman dalam konflik tertentu dapat menjadi pendorong utama terkait keputusan untuk memberikan kontribusi Pasukan PBB. Kedekatan wilayah juga berperan penting dalam menerima kontribusi dari negara tetangga atau kawasan terdekat. Terdapat juga satu kemungkinan dimana negara-negara lebih besar dengan pola pikir internasionalis berpandangan bahwa kepentingan keamanan nasionalnya berada dalam konteks yang lebih global.
4. Institusi. Partisipasi dalam Pasukan PBB dapat berakar dari motivasi yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi suatu negara. Keputusan untuk terlibat dalam operasi PBB biasanya diambil dalam konteks hubungan sipil-militer [7]. Terdapat juga argumen bahwa besar, kualitas, dan postur angkatan bersenjata berkaitan dengan kontribusi negara tersebut pada operasi perdamaian PBB. Selain itu, pihak militer juga melihat operasi perdamaian PBB sebagai suatu hal yang menarik karena memberikan pengalaman internasional yang berharga bagi personil terkait, pandangan lain terkait hal ini adalah bahwa ini merupakan salah satu upaya "militer sibuk di luar negeri daripada terlibat dalam urusan domestik" suatu negara, atau rehabilitasi setelah periode kepemimpinan yang sebelumnya otoriter. Sementara bagi sebagaian negara, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB dapat juga dilihat sebagai peran yang memiliki prestige setelah Perang Dingin. Partisipasi ini dapat mencegah pemotongan anggaran militer secara signifikan akibat situasi damai pasca berakhirnya Perang Dingin.

Norma. Negara memberikan kontribusi pada Pasukan PBB dapat didasarkan pada alasan normatif. Alasan ini khususnya untuk "*self-images*" sebagai "*global good Samaritans* ", "*good international citizens*", atau sebagai anggota grup "*non-aligned* " dari negara yang mendukung PBB sebagai alternatif terhadap hegemoni "*great power*", atau sebaiknya merupakan hal yang seharusnya dilakuka . sementara beberapa negara mempertahankan komitmen prinsipnya pada PBB dengan melihatnya sebagai "*legitimate system*" dari mana manajemen konflik mengharapkan peran pendukung sebagai "*good international citizen*". Indonesia dalam perannya sebagai kontributor, secara normatif berkomitmen pada tujuan keamanan dan perdamaian PBB yang sejalan dengan konstitusi pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat. India memandang PBB sebagai suatu alternatif terhadap *great power hegemony* dan instrumen "*nonaligned approach*" terhadap keamanan dan perdamaian. Pandangan ini juga tampak dalam keterlibatan Brazil dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

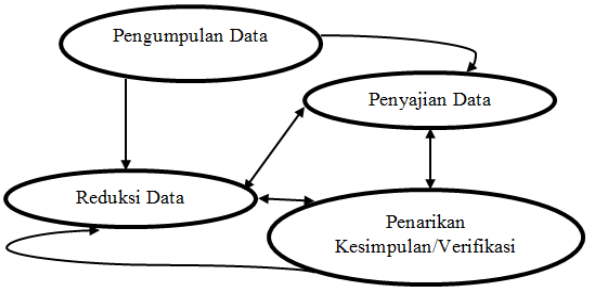
II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya [9]. Penelitian deskriptif *(descriptive research)* adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

Subjek penelitian dibutuhkan peneliti untuk mencari data beserta informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menganalisis peranan pasukan perdamaian Indonesia dalam misi keamanan di Lebanon pada tahun 2006-2012. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan subjek tunggal yaitu Agus Harimusti Yudhoyono yang pernah bergabung pada Kontingen Garuda XXIII-A sebagai pasukan perdamaian PBB.

Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman [10]. Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I. Analisis Interaktir Miles dan Huberman

DAFTAR PUSTAKA

[1] Setiawati, Siti Mutiah. Dilemma Indonesia dalam Menjalankan Peranan Penyelesaian Konflik Timur Tengah. *Artikel* Seminar Nasional. 2016

[2] Yulianto, Ari Mayor. *Lebanon Pra dan Pasca Perang 34 Hari Irael-Hizbullah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2010.

[3] Rachmat, Angga Nurdin. Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia di Lebanon Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol 12 No 1, pp 1-14. 2016.

[4] Sirmareza, Trio. Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force In Lebanon. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol 3 No 1, pp 1-21. 2017.

[5] Hutabarat, Leonard F. Kerangka Konseptual Kontribusi pada Pasukan Penjaga Perdamaian PBB: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.* Vol 11 No 1, pp 47-65. 2015.

[6] Islamiyah, Nur,. Trilaksana, Agus. Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestinaisrael 1967-1995. *Jurnal*. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol 4, No.1, pp 902-916. 2016.

[7] Sotomayor, Arturo C. Why Some States Participate in UN Peace Missions While Other Do Not : An Analysis of Civil-Military Relations and Its. 2010.

[8] Findlay, Trevor. *Challenges for the New Peacekeepers*, Oxford University Press / SIPRI, Oxford. 1996.

[9] Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.

[10] Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* edisi kedua. Jakarta: Erlangga. 2007.

PENGARUH PEMANFAATAN TEKHNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN ENREKANG

Israwaty Akhmad, Ahmad Mustanir, Muhammad Rohady Ramadhan
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
israwati@gmail.com, ahmadmustanir74@gmail.com, rohadyramadhan.@yahoo.co.id

ABSTRAK — Implementasi sistem informasi pada instansi pemerintah pada khususnya, cukup berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengembangkan teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi terkait pengelolaan keuangan, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektifitas penerapan teknologi informasi dan hubungannya dengan pengawasan yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Enrekang dengan SKPD nomor 41 unit. Analisis tersebut menunjukkan efektifitas sistem informasi keuangan daerah di Kota Enrekang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di Kota Enrekang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan total sampling 41 kuesioner. Untuk menguji sejauh mana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), maka menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap variabel independen, maka dengan menggunakan koefisien determinasi. Hasil akhir dari analisis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara signifikan terhadap ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Enrekang walaupun agak kekurangan tenaga.

***Kata Kunci* : Efektivitas dan penerapan**

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik. Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrative dan pelayanan barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi

internet yang digunakan oleh pemerintah tersebut dikenal dengan nama e-Governmant.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan APBD yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*goodgovernance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagipara pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai atau kualitas (Suwardjono,2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujud-kan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dewasa ini, tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahanyang baik semakin meningkat. Sehingga, pemerintah pusat dan pemerintah daerahterdorong untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk pertanggung-jawabandalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Karakteristik kualitatif laporankeuangan pemerintah yang merupakanprasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010) adalah:

1. Relevan,
2. Andal,
3. Dapat dibandingkan, dan
4. Dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapatdi dalam laporan keuangan pemerintahdaerah memenuhi kriteria karakteristikkualitatif, berarti pemerintah daerah mampumewujudkan transparansi dan akuntabilitasdalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat dan pemerintahdaerah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dansesuaikan dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi. Adapun kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari (PP No. 24 Tahun 2005): (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kualitas informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami? Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sector publik, termasuk pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik

dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemprosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untukpenyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu me-lakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan tek-nologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu system informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan system berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri,2011). Untuk menyajikan informasi keuanganyang handal kepada para pemakai agarsesuai dengan rencana yang ditetapkan,diperlukan media tertentu yang dipandangrelevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditunjukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif,dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001(Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal(16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik,pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang pada periode 2014 telah meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemerika Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Ini memberikan artibahwa masih adanya sejumlah cacatan yang harus ditindak lanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Peraturan pemeriksaan menyatakan catatan tersebut harus ditindak lanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam waktu 60 hari ke depan. Jika tidak, maka Pemkab. Enrekang terancam kena sanksi administrasi. Diantara catatan tersebut adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk segera menata secara baik dan benar tentangpelaporan keuangan dan pengelolaan asset daerah terutama mengenai dokumen-dokumen yang sah atas kepemilikan lahan asset dan dokumen pertanggungjawaban dari setiap belanja pegawa.

Namun sangat disayangkan tata kelola administrasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Enrekang yang tadinya sudah mendapatkan opini WDP (tahun anggaran 2014), justru mengalami kemunduruan yang sangat tajam dengan diraihnya opini dari BPK dengan predikat *Disclaimer* untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diatas,

maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bagaimanakah pengaruh penggunaan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan tersebut. Alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Pemkab. Enrekang karena adanya masalah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Enrekang. Oleh sebabitu penelitian ini difokuskan pada**"**Pengaruh Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Pengawasan KeuanganDaerah terhadap Kualitas LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang" dengan tujuan Untuk mengetahui Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Untuk mengetahui Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui Bagaimana bentuk pengawasan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

Selanjutnya, Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif dalam membuat pelaporan keuangan yang memenuhi karakteristik informasi, yaitu tepat waktu. Santika (2003:73) menyatakan indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu: (a) mencatat (*record*); (b) menyimpan (*store*); (c) mengolah (*process*); (d) mengambil kembali (*retrive*); (e) mengirim (*transmit*); dan (f) menerima (*receive*) informasi. Menurut Mulyanto (2009:43) teknologi informasi merupakan perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi menurut Lantip (2011:1) Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan*software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini,micro*), perangkat lunak (*software*),*database*, jaringan (*internet, internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson*et al*., 2000 dalam Arfianti, 2011).

Teknologi informasi dalam Indriantoro (1996) yang mengacu pada definisi yang digunakan oleh The management in the 1990s Research Program terdiri dari enam elemen yang terintegrasi dan berevolusi: Perangkat keras (hardware), berkisar dari mainframe skala besar sampai micro computer skala kecil, perangkat lunak (software), berkisar dari bahasa COBOL dan ekuivalen generasi keempatnya sampai expert system yang muncul seiring dengan perkembangan dalam artificial intelligence (kecerdasan tiruan), jaringan (networking), berkisar dari publik ke privat, broadband ke narrow brandWorkstation, Berkisar dari yang dirancang insinyur, dengan kapabilitas komputasi besar dan kemampuan untuk menyajikan grafik warna tiga dimensi,sampai workstation profesional yang digunakan oleh karyawan bagian pinjaman suatu bank atau analis pasar perusahaan consumer goods, robotik. Berkisar dari robot dengan "pandangan" dan "tangan" yang digunakan di pabrik ke berbagai alat yang sangat biasa bagi umumnya orang, sepertiautomatic teller machine, smart chips, Chips "pintar" yang digunakan pada produk untuk meningkatkan fungsionelitas atau reliabilitas. Definisi yang lebih sederhana dikemukakan Cash et al. (1992) dalam Indriantoro (1996) teknologi informasi adalah teknologi yang berkaitan dengan komputer, telekomunikasi, dan otomasi kantor. Teknologi yang berbasis internet digunakan untuk mendukung, mempermudah dan mengotomatisasi interaksi antara pemerintah dan stakeholder-nya. Diharapkan penggunaan teknologi informasi tersebut mampu mengurangi pengeluaran, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memperbarui proses administrasi (Achjari, 2003).

Menurut Diamond dalam Mulyana (2006 :124) Manfaat informasi keuangan yang terkandung di dalam neraca adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (Kepala Desa) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa

umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Berikutnya, Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif,dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah) Pasal(16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan PP No.41 tahun 2007tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsure pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Salah satu urusan pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah. Di dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada peren-canaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di-perlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada peren-canaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di-perlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
2. Pejabat-pejabat yang mengelola ke-uangan daerah,
3. Struktur APBD,
4. Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
5. Penyusunan dan penetapan APBD,
6. Pelaksanaan dan perubahan APBD,
7. Penatausahaan keuangan daerah,
8. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD
9. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
10. Pengelolaan kas umum negara,
11. Pengelolaan piutang daerah,
12. Pengelolaan investasi daerah,
13. Pengelolaan barang milik negara,

14. Pengelolaandana cadangan,
15. Pengelolaan utang daerah,
16. Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
17. Penyelesaian kerugian daerah,
18. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Bastian (2007) sistem pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Unsurunsur pokok dalam sistem pengendalian intern adalah: pertama, struktur organisasi yang memisahkan secara tegas tanggung jawab fungsional. Pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi-fungsi operasi dengan penyimpanan membuat catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan.Dalam pelaksanaan transaksi terdapat pngecekan internal diantara unit organisasi pelaksana.Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan untuk mengolah dan menganalisis penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan dan melihatpengaruh penggunaan teknologi informasidan pengawasan keuangan terhadapkualitas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Pemerintah Kabupaten Enrekang jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 41 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan Inspektorat.

Adapun tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuisioner, dan studi kepustakaan, sedangkan tekhnik analisis data yaitu analisis data secara deskriptif kuantitatif, dengan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik. Selanjutnyan dianalisis dengan analisis deskriptif uji regresi berganda dan pengujian hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka nilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto, 1995 (dalam Harifan, 2009), menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keter-pahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indriasari (2008), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah kuantitas dan kualitasnya baik,serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (seperti,jaringan dan *software*).

Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 11, variabel pemanfaatan teknologi informasi, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yangTCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kabupaten Enrekang, yaitu sebesar 50,66%, dimana pernyataannya "Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundangundangan". Hal ini menunjukkan bahwa setiap dinas/instansi di dalam mengolah data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan

peraturan perundangundangan yaitu Sistem informasi keuangan daerah (SIKD).

Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusatdan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi KeuanganDaerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. (PP 65 /2010). Pemerintahan Daerah sebagai organisasi sektor publik, agar dapat berjalan efektif,efisien, transparan dan bersih diperlukan dukungan dari sistem informasi akuntansi yangmemadai agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk manajemen keputusan dan pengendalian keputusan.

Alasan Utama Penggunaan IT atau teknologi Informasi dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah kabupaten enrekang adalah efisiensi, penghematan waktu dan biaya.Alasan lain termasuk peningkatan efektifitas, mencapai hasil/output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu di tambah dengan perlindungan atas aset Pemerintah Daerah. Dunia akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin kompleks, bukan hanya pada Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan, dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah tapi secara terinci menjurnal setiap belanja dan mencatat ke dalam buku besar. Teknologi informasi sangat berperan dalam kesuksesan kerjakhususnya di bidan keuangan SKPD yaitu Pembuat LKPD,pengurus asset, PPK, bendahara pengeluaran dll di setiap SKPD.

Sebuah solusi software berbasis aplikasi yang ringan, cepat, mudah digunakan, dan otomatis mencetak laporan keuangan utama seperti neraca, laba rugi,laporan keuangan pelengkap seperti cash flow, hutang piutang, buku besardan pencatatan pembukuan dari bendahara pengeluaran.Aplikasi ini yang ada di Kabupaten Enrekang akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Setiap kali ada masalah atau ada hal hal yang perlu di tambahkan akan di update menyesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai Amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri no 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah harus telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Permendagri tesebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Dalam rangka memberikan kemudahan setiap SKPD untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual tersebut, maka aplikasi ini hadir di kabupaten enrekang. Aplikasi ini di tujukan bagi Pejabat Penatausaha Keuangan setiap dinas / instansi atau fungsi akuntansi yang akan menyusun laporan keuangan dengan bantuan aplikasi komputer.

Kabupaten Enrekang baru sekitar 2 tahun menggunakan aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah) khusus di bidang keuangan untuk mencatat secara terperinci setiap transaksi keluar dan masuknya uang di setiap SKPD.Pejabat Penatusaha Keuangan (PPK) di setiap SKPDjuga menggunakan aplikasi tersebut membuat surat perintah membayar (SPM) atas pencairan dana rutin dan dana rekanan. Aplikasi ini dirancang satu file untuk satu bulan, namun dapat juga digunakan untuk satu tahun anggaran. Contoh penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Pemda Berbasis Akrual berbantuan komputer yang di rancang oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan yang di bentuk dalam satu file aplikasi,terdiri atas tiga menu utama yang dirinci menjadi sebelas menu, yaitu: Menu Setup User, Setup User, Bagan Akun Standar (BAS) Menu Input Data, Saldo Awal, Input Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Input Jurnal, Menu Cetak, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca.

Namun masih ada beberapa kelemahan atau kekurangan aplikasi yang terdapat di setiap SKPDKabupaten Enrekang khususnya bagi PPK dalam membuat laporan keuangan. Seharusnya PPK SKPD hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (sheet). Selanjutnya aplikasi secara otomatis akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo, dan laporan-laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, tapi hal ini masih dikerjakan secara manual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK(Rekening Koran). Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi. Langkah 1 (Kertas Kerja)

1. Fungsi Akuntansi di SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual.
2. Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo Neraca Setelah Penyesuaian dari Neraca Saldo Satuan Kerja menjadi Neraca Saldo Pemda dan diletakkan di kolom "Neraca Saldo Pemda" yang terdapat pada Kertas Kerja.
3. Akuntansi di SKPKD membuat jurnal eliminasi. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan eliminasi atas saldo pada akun-akun yang bersifat "reciprocals". Akun Reciprocal adalah akun-akun Rekening Koran (RK).
4. Fungsi Akuntansi di SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaiakan diletakkan pada kolom "Neraca Saldo Pemda Setelah Penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.
5. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan memidahkannya ke kolom "Laporan Realisasi Anggaran" yang terdapat pada Kertas Kerja.
6. Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi Akuntansi di SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Neraca dan memindahkannya ke kolom "Neraca" yang terdapat pada Kertas Kerja.
7. Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Fungsi Akuntansi di SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Sebagai catatan, neraca yang dihasilkan belum final karena PPK-SKPKD belum membuat Jurnal Penutup.

Langkah 2 (Jurnal Penutup). Jurnal penutup adalah jurnal akhir yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Jurnal Penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber , alokasi dan penggunaaan sumber daya ekonomi yang di kelola oleh setiap SKPD di kabupaten enrekang dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang meliputi :

1. Ketaatan terhadap APBN / PABD.
2. Informasi tentang realisasi pendapatan – LRA, belanja, surplus /defisi LRA.
3. Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan infomasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Juga

mengenai informasi realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektifitas penggunaan anggaran. Bukan cuma pemanfaatan tekonologi aplikasi SIADINDA yang digunakan para pembuat laporan keuangan di setiap SKPDkabupaten enrekang tapi di bidang Aset pun terdapat aplikasi khusus yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Dengan adanya teknologi informasi mengenai Aset pemerintah daerah akan dapat memenuhi fungsi fungsi :

1. Pemerintah Daerah mempunyai informasi yang akurat mengenai Barang dan Aset Daerah.
2. Penyelenggara Proses Penganggaran kebutuhan akan barang yang terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan.
3. Adanya standarisasi kode barang setiap dinas/instansi.
4. Proses Pemeliharaan barang yang teratur dan tertata guna sehingga berimbas pada efisiensi dan efektifitas biaya.
5. Pemanfaatan setiap jenis barang atau aset sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya

Pemanfaatan teknologi Informasi tersebut sangat mempengaruhi ketepatan waktu dan kemudahan dalam penginputan serta menelusuri anggaran dan barang-barang milik pemerintah daerah Kabupaten Enrekang agar terciptanya pelaporan keuangan yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja setiap dinas atau instansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berguna untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Proses pengerjaan pelaporan aset menjadi lambat di karenakan ada beberapa contoh kasus yaitu perintah dalam aplikasi yang belum bisa mengcover penggabungan aset rehab dengan induk sehingga masih di kerjakan secara manual, sehingga proses penyusutannya pun di kerjakan secara manual. Aplikasi yang di sediakan oleh pihak BPKP masih terus dalam tahap pengembangan.Laporan Aset menjadi tidak efisien dan tepat waktu sehingga menghambat para tim LKPD di setiap dinas / instansi membuat laporan keuangan.

Visi BPKP sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance.* Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014,Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja*" Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD".*

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

a. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

e. Hasil pengembangan adalah sebagai berikut:

1.	Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2.	Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3.	Program Aplikasi SIMDA Gaji
4.	Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5.	Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6.	Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi
7.	Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Tapi di Kabupaten Enrekang hasil pengembangan dari BPKP yang masuk hanya Teknologi Informasi MengenaiPenertibaan aset dan cara pelaporannya yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Aplikasi SIADINDA (Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah)yang di kelola setiap SKPD Kabupaten Enrekang bukan hasil pengembangan dari BPKP melainkan dari vendor selaku pihak ketiga yang menyediakan Aplikasi tersebut dan menempatkan operator khusus non PNS yang menguasai aplikasi SIADINDA di Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kenyataan selama ini di setiap Dinas / Instansi Pemerintahan Kabupaten Enrekang menggunakan Teknologi Informasi bidang Keuangan hanya di gunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK saja, tetapi bidang keuangan tidak saja melibatkan bendahara pengeluaran tetapi juga Bendahara Penerimaan , Bendahara Gaji pembuat LKPD. Mereka juga perlu menggunakan teknologi informasi yang tertuang dalam aplikasi agar memudahkan pekerjaan dan pelaporan.

Jika Pelaporan keuangan tersebut masih dilakukan secara manual, berkutat dengan tumpukan kertas, kalkulator, membuat dan mengisi kolom-kolom transaksi, serta harus teliti dalam mencatat data keuangan yang penting. Tentu saja ini akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Belum lagi adanya resiko human error dalam melakukan kalkulasi. Dengan menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Keuangan, akan membuat pencatatan menjadi lebih mudah, teratur, dan memberikan hasil yang akurat. Tidak hanya semata-mata menghindari kesalahan kalkulasi, tapi juga memberikan tinjauan yang menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Walaupun respon Pemerintah Kabupaten Enrekang baik terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dan sudah berpengaruh positif tapi masih perlu bekerja keras. Karena masih banyak kekurangan pada setiap aplikasi yang ada. Pengembang aplikasi selaku vendor swasta dan pihak BPKP perlu banyak mengupdate atau menambahkan sistem aplikasi secara lengkap sesuai kebutuhan dan permasalahan di setiap SKPD.

Terdapat juga beberapa SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Apabila Teknologi Informasi bisa di manfaatkan dengan baik dan di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang handal dan Aplikasi yang maju tentunya pengolahan data,penyusunan dan pelaporan keuangan bisa tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tidak juga di pungkiri kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya brainware (sumber daya manusia) yang mempunyai kualitas yang memadai dalam mengelola teknologi informasi keuangan daerah. Kendala lain adalah faktor keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, Pengadaan perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis, serta perangkat lunak yang belum terintegrasiberpadu (bergabung supaya menjadi kesatuan yang utuh). Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian oleh BPKP mengindikasikan belum maksimalnya upaya

pemda dalam mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari sedikitnya pemerintah daerah yang telah membuat kebijakan tentang: sistem dan prosedur aplikasi akuntansi keuangan; sistem dan prosedur penggunaan aplikasi kinerja; kebijakan tentang standar spesifikasi hardware teknologi informasi pemerintah daerah; dan keamanan (security) data/ informasi keuangan daerah; serta jenis informasi keuangan daerah yang perlu dimuat dalam website. Kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang hendaknya juga merancang sistem aplikasi komputer yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yaitu brainware (Programmer) ,koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website. Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Suatu entitas akuntansi dalam pemerintah daerah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya. Karena tata kelola administrasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Enrekang masih kurang maju secara teknologi hingga terdapat sejumlah cacatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Sehingga Kabupaten Enrekang mengalami kemunduruan dengan opini dari BPK yakni *Disclaimer* untuk tahun anggaran 2015.

Selanjutnya, Pengawasan keuangan daerah, kita harus mengetahui subjek- subjek dalam pengawasan keuangan daerah tersebut, untuk mengetahui hal tersebut kita dapat melihat dalam dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah adalah bendahara umum daerah yang diberi kewenangan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh badan internal dan juga eksternal yang merupakan dua badan yang yang berbeda, namun kedua-duanya juga ikut dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu badan pengawas internal atau juga Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten/kota.Pengawasan internal merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh badan external yang secara struktural berada diluar pemerintahan yaitu dilakukan oleh badan independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , adapun lingkup pemeriksaan yaitu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang memuat semua unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini "tidak wajar dan/atau disclaimer" diantaranya disebabkan oleh *kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait.* Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 378 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar menemukan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu pada efektifitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dalam lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun bupati/walikota. Kedudukan tersebut menyebabkan independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan akan sulit dilakukan, karena pengaruh dan intervensi dari kepala daerah tidak dapat dihindari, sehingga terkesan bahwa inspektorat provinsi, kabupaten / kota merupakan perangkat daerah, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terkesan lebih melindungi serta mengamankan kebijakan dan kepentingan pribadi kepala daerah daripada melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Terjadi banyak penyimpangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal.

Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah jika semakin baik pengawasan keuangan daerah maka kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik (Mardiasmo, 2001 dalam Fikri, 2011). Hasil penelitian ini sejalan de-ngan penelitian Fikri (2011), pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dilihat dari data distribusi frekuensi skor variabel pada tabel 12, variabel pengawasan keuangan daerah, dimana tingkat capaian res-ponden rata-rata untuk variabel pengawasan keuangan daerah berada pada kategori baik, dari penelitian ini ada item pernyataan yang TCRnya rendah yang perlu ditingkatkan SKPD Kabupaten Enrekang, yaitu sebesar 81,06%, dimana pernyataannya "Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah". Hal ini menunjukkan bahwa di dalam menyusun APBD ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu salah satunya perencanaan daerah. Jika dalam menyusun APBD tidak memperhatikan perencanaan daerah maka anggaran yang akan digunakan tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kab Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasankeuangan daerah maka semakin baik pulakualitas laporan keuangan pemerintahdaerah. Agar Laporan Keuangan punya kualitas yang bagus maka pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang perihal pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporannya. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan

kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menun-jukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Enrekang berjalan dengan baik. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi agar Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang lebih tertib sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporankeuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

[2] Desmiyawati. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi empiris pada SKPD Pemda Riau). Jurnal: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

[3] Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Enrekang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

[4] Harifan, Handriko.2009.Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Enrekang.*Tesis* .Padjajajran Bandung

[5] Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

[6] Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode RisetUntuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga

[7] Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

[8] Nasir, Azwir dan Oktari, Ranti. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasidan Pengendalian *Intern*Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. http://download.portalgaruda.org/article. di akses 13 Januari 2017.

[9[Nordiawan, Deddi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015Tentang Standar AkuntansiPemerintahan.

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Malaluihttp://www.google.com[20/09/2016]

[12] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui http://www.google.com [20/09/2016]

[13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

[14] Sekaran, Uma. 2006. Metodologi PenelitianUntuk Bisnis. Jakarta: SalembaEmpat

[15] Sugiyono. 2008. Metode Peneliatian Bisnis.Bandung: Alfabeta

[16] Sutaryo. 2011. nilai laporan keuangan pemerintah dengan e-government system http://Sutaryofe.Staff.Uns.Ac.Id/2011/06/20/Nilai-Laporan-Keuangan-Pemerintah-Dengan-E-Government-System/

[17] Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

[18] Tuasikal, Askam. 2007. PengaruhPengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan danPengelolaan Keuangan terhadapKinerja Unit Satuan Kerja PerangkatDaerah Pada Kabupaten dan Kota diPropinsi Maluku. *JurnalKeuangandan Perbankan.* Vol. 10No. 1 Hal. 66-82

[19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui http://www.google.com [9/10/2016]

[20] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui http://www.google.com[10/10/2016]

[21] Wahyuni, Asnita. 2011. PengaruhPenggunaan TI, Keahlian Pemakaidan Keterlibatan Pemakai terhadapEfektifitas Penerapan SIA. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri Padang

[22] Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem InformasiAkuntansi: Analisis, Desain danPemograman Komputer*.Yogyakarta: Penerbit Andi

[23] Widjajanto, Nugroho.2001.*Sistem InformasiAkuntansi*. Jakarta:Erlangga

[24] Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI TerhadapKeterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda DenganVariabel Intervening PengendalianIntern Akuntansi.*Jurnal SNA*. STIEST. Pignatelli: Surakarta

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Misnawati, Andi Astinah Adnan, Agustinus
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
Misnawati_se84@yahoo.com, andi.astinah.adnan@gmail.com, agustinus@yahoo.co.id

***ABSTRAK*—Tujuan penelitian ini adalah (a) menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana desa; (b) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabitas publik; dan (c) menganalisis dampak pengelolaan dana desa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik analsisi deskriptif dan analisis statistic regresi linear berganda dengan skala Likert untuk menguji pengaruh akuntabitas sebagai variabel X-X3 terhadap pengelolaan dana desa sebagai variabel Y. Hasil penelitian berdasarkan analisis deskriptif tabel frekunesi dan persentase menunjukkan: (1) Akuntabilitas Vertikal (X1) 72.07%; (2) Akuntabilitas Horizontal (X2) 65.34%; dan (3) Akuntabilitas Diagonal (X3) 60,63%. Secara kumulatif pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap pengelolaan dana desa sebanyak 66,01%. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan analisis statistic regresi linera berganda menunjukkan kekuatan pengaruh variabel akuntabilitas (X1-X3) secara simultan terhadap pengelolaan dana desa 61,10%. Dalam hal ini ada 38,90% ditentukan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian, jika variabel lainnya dalam keadaan constant. Signifikansi pemgaruh variabel akuntabilitas terhadap variabel pengelolaan dana desa ditentukan oleh uji F pada taraf kepercayaan 0,5% dimana F hit 3.31 > F tab 2,15 "sangat nyata". Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu: SDM pegawai; dan Sosialisasi pnyaluran dana desa. Adapun dampak pengelolaan dana desa, yaitu: (1) biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program; (2) kehidupan ekonomi dalam hal ini terjadi distorsi penghasilan, dan nilai tambah; (3) sikap publik, dalam hal ini menurunnya dukungan, dan partisipasi masyarakat pada pemerintah, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah desa; dan (4) lembaga dan sistem social dalam hal ini menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dan; solidaritas sosial.**

Kata Kunci —Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.Oleh karena itu desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna

penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukandukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP No. 72 Tahun 2005 telahmengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayananpada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan asli desa,adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kotauntuk memberikan transfer dana bagidesa, hibah ataupun donasi.

Salah satu bentuk transfer dari dana pemerintah adalah Alokasi Dana Desa(ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahanpusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelassebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukupdijelaskan mulai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), tata cara perhitungan besarananggaran per-desa, mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD),pengguna dana sampai dengan pertanggungjawabannya.

Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, antara lain yaitu : (1) ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat; (2) ADD merupakan bagian yang integraldari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya; dan (3) Penggunaan ADD ditetapkan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa; dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan deskrepsi pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD), maka sudah menjadi keharusan atau kewajiban bagi pemerintah Desa untuk membuat pertanggung jawaban atas penggunaan dana desa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara khususnya di pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran yang didasarkan pada prestasi kerja yang akan di capainya.Mardiasmo (2006:3) mengatakan bahwa akuntabiltas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) seperti yang dikutip oleh BPKP bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai: (a) integritas keuangan; (b) pengungkapan; dan (c) ketaatan terhadap peraturan

Jenis akuntabilitas ini memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas keuangan daerah.

Penerapan jenis akuntabitas keuangan tersebut, berdasarkan hasil pengamatan dan data awal yang peneliti peroleh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014-2015 pada beberapa Desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, terungkap beberapa gejala yang mengindikasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum dapat dipertanggung jawabkan secara representative dan proporsional sesuai aturan perundang-undangan berlaku.

Dalam hal ini, secara akumulatif, berdasarkan pelaporan pengelolaan dan penggunaan keuangan atau dana desa yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Desa dan juga hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014-2015, memperlihatkan data bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut, terdapat

beberapa pos anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dana desa digunakan untuk: (1) pengadaan meja kerja; (2) kursi tamu; (3) computer; (4) kipas angin dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, beberapa Kepala desa tidak dapat membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan Dana Desa secara akuntabel karena tidak berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnis yang telah ditetapkan sebagai Standar Operasional Prosdur (SOP). Dengan demikian, maka dapat diduga sementara bahwa gelaja tersebut disebabkan oleh: (1) pengelolaan dana desa belum sepenuhnya digunakan sesuai dengan program yang di rencanakan; (2) pemerintah desa belum dapat mengidentifikasi program penggunaan anggaran secara rinci sehingga laporan keuangannya mengalami keterlambatan; (3) sumber daya manusia pemerintah desa tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa, sehingga kurang disiplin dalam mentaatai aturan perundang-undangan yang mengatur tentang alokasi dana desa.

Berdasarkan beberapa gejala yang mengidikasikan pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tidak dapat mengelola dan menggunakan Alokasi dana Desa berdasarkan indikator dimensi akuntabilitas yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-R!), yaitu: (1) integrasi keuangan; (2) pengungkapan; dan (3) ketaatan terhadap aturan. Dengan demikian, dalam rangka mengungkap, mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan proporsional tentang pertanggunganjawaban pengelolaan Alokasi Dana DesaPerilaku Birokrasi.

Pada dimensi administrai publik sebagai administrasi publik yang muncul pada tahun 1970.(Nicholas Henry 1989). Sehubungan dengan hal tersebut, Frederickson (1988) mengungkapkan enam model dasar dalam administrasi publik kontenporer, yaitu: (1) Model birokrasi klasik; (2) Model neo birokrasi; (3) Model institusi; (4) Model hubungan kemanusiaan; (5) Model pilihan publik; dan (6) Model administrasi negara baru.

Warsito Utomo (2007) manyatakan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu administrasi negara, maka terjadi pergeseran perspektif *Aministration of Public* dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi pemerintahan; *Administration for Public* yang menekankan fungsi pemerintahan yang bertugas dalam *public Service; ke Administration by public* yangberorientasi bahwa *public demand are differentiated* dalam arti fungsi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator dan katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver seat*. Dimana determinasi pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving force.*

Menurut Keban (2004) bahwa kelembagaan sebagai bentuk organik dari sebuah organisiasi besar yang di kenal dengan nama birokrasi. Birokrasi tidak lagi menjadi salah satu agen tunggal implementasi fungsi pemerintahan, tetapi lebih berperan sebagai katalisator dan fasilitator antara pemerintah dengan masyarakat, Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Hegel bahwa birokrasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat yang dikenal dengan teori *Hegelian Bureaucracy*.

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan perspektif administrasi publik yang berorientasi pada *Administration for Public* dimana fungsi pemerintahan yang bertugas sebagai pelayanan publik *(public service)* senantiasa mengarahke *administration by public* bahwa *public demand are differentiated* dalam arti pemerintah sebagai pelayan publik.

Frederickson (1977) menawarkan pendekatan revitalisasi konsep publik antara lain melalui perspektif penyedia layanan *(The Service Providing Perspective)*. Dimana publik dipandang sebagai target dari pelayanan *(Custumer)*; dan perspektif kewarganegaraan *(The Citizen Perspective)* dalam hal ini masyarakat mendapatkan tempat yang cukup istimewa dalam kajian administrasi publik modern.

Lebih lanjut Frederickson (1977) menyatakan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar alasan atas pernyataan tersebut. yaitu: (1)

adanya tuntutan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan edukatif dengan menggunakan fundasi meritokrasi; dan (2) adanya tuntutan agar warga negara lebih *well informed,* sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam berbagai arena publik dan memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi. Oleh karenanya konsep publik seringkali dipadankan dengan konsep *Civil Society*. Administrasi Negara Baru, dengan focus "mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain, atau membuat organisasi" dapat berjalan kearah dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dikembangkan dengan sistem desentralisasi dan organisasi demokratis yang responsif dan mengundang partisipasi, serta dapat memberikan secara merata jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.

Frederick (dalam Martin, 1988) melihat peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Selanjutnya Frederick mengatakan bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya. Menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut, sehingga terbentuk apa yang disebut *"organized democracy"* .

Pandangan Frederick sejalan dengan ide Denhardt (2007) yang melihat bahwa administrasi publik, melalui pelayan-pelayan publiknya berperan memberikan atau menciptakan demokrasi. Rondinelli (2007) mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai *"democratic governance",* dengan dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip *good governance,* pemanfaatan teknologi, penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan kemitraan sektor publik.

Denhardt (2007) mendefinisikan kepentingan umum sebagai *"shared values"* atau nilai-nilai yang disepakati bersama oleh masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam*"The New Public Service (NPS), "New Public Administration"* (Bellone, 1980), *"The New Science of Organizations"* (Ramons, 1981), dan konsep terakhir disebut *New Public Management* (Frederickson, 1997).

New Public Management, ingin mengenalkan konsep-konsep yang biasanya yang diperlukan untuk kegiatan bisnis dan disektor privat yaitu mentransformasikan kinerja sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif *New Public Management* ini ialah mengatur dan mengendalikan pemerintah tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan *bisnis-run government like business.*

Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang di lakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka *Christopher Hoodlic London School Of Ecomics (1995)* mengatakan bahwa *New Public Management* merubah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara ligitimasi tidak lagi dipraktekkan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah.

Donald Kettle (dalam Thoha, 2009) menyebutnya dengan *"the global public management reform"* yang memfokuskan pada enam hal, yaitu: (1) menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; (2) mengubah perilaku birokrasi; (3) memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya; (4) pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif; (5) kemampuan merumuskan kebijakan; dan (6) berorientasi pada hasil *(output dan outcome).*

Sehubungan dengan eksistensi birokrasi dalam perspektif administrasi publik dalam dimensi *New Public Management* dan *New Publik Service,* maka ada sepuluh prinsip mewiraswastakan pemerintah menurut Osborne (2005), sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bersifat sebagai katalis sebagai fungsi yang mampu membuat kebijakan, peraturan, undang-undang dengan fungsi sebagai pelaksana.
2. Pemerintah milik masyarakat dimana masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengotrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah.
3. Pemerintah kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja.
4. Pemerintah berorientasi misi melakukan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif, dan menyederhanakan sistem administratif yang terlampau panjang dan menghambat.
5. Pemerintah berorientasi pada hasilmengubah pokus dari input (kepatuhan kepada peraturan dan membelanjakan anggaran sesuai dengan ketentuan) menjadi akuntabilitas pada keluaran *(output)* atau hasil.
6. Pemerintah berorientasi pelanggan yaitu memperlakukan masyarakat yang dilayani.
7. Pemerintah wiraswasta merupakan upaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh intansi pemerintah dari yang tidak produktif diupayakan berproduksi.
8. Pemeritah antisipati adalah pemerintahan yang berpikir ke depan. Pimpinan instansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya masalah dari pada memberikan pelayan untuk menghilangkan masalah.
9. Pemerintah desentralisasi yang mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organisasi atau sistem yang ada untuk langsung memberi pelayanan, atau sebagai pelaksana, atau lebih berani membuat keputusan.
10. Pemerintah berorientasi pasar adalah memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan memanfaatkan peraturan.

Tema pokok dalam *New Public Management* ini antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya *(costumers)* dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar *(market place)*. Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereformasi kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan *(rule-based)* dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat *(authoritydriven processes)* menjadi orintasi pasar *(market-based)*, dan dipacu untuk berkompetisi sehat *(competition-driven tactics)* (Agus Dwiyanto, 2008; Mansyur Ahmad, 2010; Keban, 2008; dan MifthaThoha, 2008).

Di dalam konsep *New Public Management* semua pimpinan (manajer) didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara-cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi melakukan *"rowing"* membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategi saja. Dengan demikian, kunci dari *New public management* adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unii-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi *profit non profit* (Osborne, David, 2005).

Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang di lakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka *Christopher Hoodlic London School Of Ecomics (1995)* mengatakan bahwa *New Public Managem*merubah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara ligitimasi tidak lagi dipraktekkan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah (Fadillah, 2001).

Untuk lebih mewujudkan konsep *New Public Management* dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan desentraalisasi proses pengambilan kebijakan.

Semenjak konsep *New Public Management* ini di kemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktek konsep ini di beberapa negara. Seperti misalnya, upaya melakukan privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah di beberapa negara mengalami banyak perubahan dan kemajuan (Toye, 2006). Pimpinan eksekutif yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja, dan melakukan *reengineering system public* (Barzelay,2001; Boston et an 1996; Pollitt dan Bouckaert, 2000) (Gatot, 2008).

Donald kettle (2000) menyebutnya dengan *"the global public management reform"* yang memfokuskan pada enam hal, yaitu: (1) Bagaimana pemerintah bisa menentukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil; (2) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi; bagaimana pemerintah bisa mengganti mekanisme tradisional "komando-komando" yang birokratis dengan strategi pasar yang mampu mengubah perilaku birokrasi; (3) Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik .atau paling tidak pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya; (4) Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan manajer-manajer terdepan insentif untuk memberikan pelayanan; (5) Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa memisahkan perannya sebagai pembeli pelayanan (kontraktor) dari perannya sebagai pemberi pelayanan yang sesungguhnya; (6) Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya *(output dan outcome)* ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur. Bagaimana mereka bisa menggantikan sistem yang berorientasi pada aturan *(rule-drivn systems)* kepada suatu sistem yang berorientasi pada alur bawah-atas *(bottom-up)* dan sistem berorientasi hasil.

Sama dengan pendapat Kettle di atas Jonathan Boston (!991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin *New Public Manajement* itu pada intinya sebagai berikut: lebih menekan pada proses penggelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan; perubahan dari penggunaan kontrol masukan *(imput controls)* ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target; devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, nonkomersial, akuntabilitas baru, disagregasi struktur birokrasi yang benar menjadi struktur instansi yang dikuasai otonomi, secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang nonkomersial, menggunakan referensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan remunerasi yang efektif dan efesien.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dengan pertimbangan: (1) Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu wilayah yang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa; (2) Kecamatan Anggeraja berada pada posisi strategis yang mudah diakses oleh warga masyarakat Kabupaten Enrekang; (3) Kecamatan Anggeraja merupakan wilayah yang berhasil melaksanakan pembangunan

desa dengan anggaran Alokasi Dana Desa. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif dan proporsional tentang akuntabilitas keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Anggraja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat diwilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa.

Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa oleh masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa kurang memahami system operasional prosedur dan pos-pos anggaran yang disyaratkan untuk pemanfaatan alokasi dana desa tersebut. Sebagaimana yang terjadi dibeberapa desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang bahwa ada banyak program-program pemerintah di bidang infra struktur, masih belum dapat mengatasi banyaknya persoalan.

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali.

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pembinaan ini memiliki cakupan yang cukup banyak, akan tetapi yang jelas pembinaan mengandung arti pemberdayaan masyarakat yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dan juga mengandung makna sebagai pembaruan, yaitu usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam hubungannya dengan pembinaan, Talidzuhu Ndraha mengungkapkan bahwa yang menjadi sasaran pembinaan

khususnya dalam membina kehidupan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangunkan, yang tidak sesuai dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diubah, yang melenceng atau menyalahi aturan harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi. Menghadirkan kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagai desa yang penduduknya sebahagian besar adalah berprofesi sebagai seorang petani, kegiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan secara bergotong- royong. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin.Prinsip aktualisasi diri aparat pemerintahan desa merupakan dimensi yang mempengaruhi pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri,dimana paradigm pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus kepada pengelolaan yang berorientasi kepuasaan masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahan kepada masyarakat diharapkan juga memiliki : (a) Memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya; (b) Memiliki perencanaan dalam pengambilan keputusan; (c) Memiliki tujuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat; (d) Dituntut untuk akuntabel dan transparan kepada masyarakat; (e) Memiliki standarisasi pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa,masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki.Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di desa Tumaratas yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya perbaikan dibidang pertanian maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa.Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan untuk pemberdayan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2003 tahun 2007 menjelaskan bahwa ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah azas merata dan adil. Merata artinya bahwa besarnya bagian ADD setara untuk setiap desa, dan adil adalah bahwa besarnya bagian ADD ditetapkan berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya: kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain).

Selanjutnya ADD didapatkan dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa dengan porsi minimal 10 persen. Tujuan diberlakukannya ADD adalah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,

meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).Sehubungan dengan hal diatas maka dipastikan Pelaksanaan Program ADD memiliki keterkaitan dengan peran pemimpin sebagai bagian yang diamanahi untuk menjalankan program tersebut. Lancar tidaknya program dan tinggi tidaknya partisipasi masyarakat di dalamnya adalah tergantung dari peran pemimpin itu sendiri. Terkait dengan peran pemimpin Ismail *dalam*Lestar (1991) menyatakan bahwa pemimpin berperan sebagai komunikator berfungsi untuk menerjemahkan perintah dan segala kebijakan dari pemerintahan di atasannya. Sementara itu, sebagai koordinator, pemimpin berfungsi untuk mengkoordinir perencanaan dari instansi "atas desa" kemudian melaksanakannya. Sedangkan sebagai motivator pemimpin berfungsi untuk senantiasa berusaha menyadarkan dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Peran pemimpin bahwa dengan secara langsung atau tidak akan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam kegiatan pemanfaatan ADD. Pemimpin dapat memengaruhi,menggerakkan,
mengkomunikasikan, menginformasikan secara berimbang, dan mengajak turut serta masyarakat, memengaruhi sikap masyarakat dalam berpartisipasi di kegiatan tersebut. Cohen dan Uphoff dalam Barlan (2011: 111) menjabarkan kegiatan partisipasi dalam empat tahapan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi.

Namum dalam pelaksanaannya, banyak praktik pemanfaatan ADD yang masih belum sesuai dengan standar dan prosedur serta belum mencapai tujuan utamanya untuk mendekatkan diri pada cita-cita kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Ayi (2011) dalam jurnal penelitiannya mengungkapkan bahwa prosedur formal perencanaan pembangunan dari bawah tidak sesuai harapan karena aspirasi warga desa yang disampaikan dalam Musrenbangdes tidak sampai ke pemerintah di atasnya. Pembangunan pedesaan cenderung masih menekankan aspek formalitas administrasi dalam artian program wajib dilaksanakan, meskipun belum sesuai dengan pemusatan partisipastif masyarakat. Peran pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat akan berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dan pada akhirnya kedaulatan dan kesejahteraan yang menjadi harapan masyarakat pedesaan dapat terwujud.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mesngatur bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Melalui ADD, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Aloksi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip yaitu pelaksanaan yang transparan/terbuka, peran aktif masyarakat mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertangggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, peningkatan fungsi peran lembaga kemasyarakatan, dan pelestarian kegiatan yang dikembangkan secara berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. Penggunaan AlokSI Dana Desa dibagi menjadi dua bidang, yaitu untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30% dan sebesar 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh akuntabitas publik terhadap pengelolaan Alokasi dana desa di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dapat diungkapkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Anggeraja diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: (a) belanja operasional Pemerintah Desa, meliputi: pengadaan ATK; pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa; perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat; (b) pembangunan desa, meliputi: penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program LPM, progam pokok PKK, Kepemudaan dan pembangunan infrastruktur desa. Dengan demikian, penggunnaan angaran atau dana tersebut harus dipertangungjawabkan dalam bentuk laporan berdasarkan mekanisme atau standar operasional prosedur, yaitu: (a) hasil analisis deskriptif pengaruh akuntabilitas publik dengan indicator: Akuntabilitas vertical 51,27%; Akuntabilitas horizontal 61,11%; dan Akuntabilitas diagonal 60.61%, persentase tersebut menunjukkan bahwa keterhubungan antar varibel tersebut "kurang signifikan"; dan (b) hasil analisis statistic menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan alokasi dana desa adalah "lemah", ha ini dibuktikan F hit 3.31 dengan probabilitas 0,00000, maka persamaan tersbut sangat nyata pada taraf signifikansi 5% (F hit 3.31 > F tab 2,15)

Berdasarkan deskripsi kesimpulan point 1, maka dapat diungkapkan beberapa factor yang mempengaruhi akuntabilitas publik, yaitu: (a) Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebagai faktor internal yang pada umumnya tergolong rendah, sehingga mengalami kesulitan pada saat menyusun surat pertanggungjawaban; (b) Sosialisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa tidak diikuti seluruh kelompok sasaran/pemerintah desa, sehingga mengalami hambatan dalam menyusun proposal permintaan pencairan anggaran pelaksanaan program atau pembangunan.

Deskripsi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Anggeraja yang cenderung kurang efektif, memberikan: (1) Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program; (2) Dampak pada kehidupan ekonomi dalam hal ini terjadi distorsi penghasilan, dan nilai tambah, sehingga tidak memberikan penguatan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; (3) Dampak pada sikap publik, dalam hal ini menurunnya dukungan, dan partisipasi masyarakat pada pemerintah, sehingga masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah desa; dan (4) Dampak pada lembaga dan sistem social dalam hal ini menurunnya kesadaran kolektif masyarakat dan; solidaritas social, sehingga berkurangnya nilai-nilai gotong royong dan nilai-nilai kearifan local.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdul Hakim,2006,*Reformasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,* Yogyakarta:Fakultas Ekonomi UGM.

[2] Anonim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka

[3] Budi Setiyono,2007, Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik,Prinsip-Prinsip Manajemmen PengelolaanNegara Terkini ,Kalam Nusantara,Jakarta.

[4] Bappenasi,2002. Publik Good Governance:Sebuah Paparan Singkat:Sekretariat Pengembangan Public Good Governance,Jakarta.

[5] Bukhari,2012, Sistem Pemerintahan Desa

[6] Cullis,John G.and Philip R, Jones.1992.Public Finance and *Public Choice: AnalitycalPerspectives.Singapore:Mc Graw –Hill Book Company.*

[7] E.Fernando M.Manullang, 2007,Menggapai hukum Berkeadilan,Penerbit Buku Kompas,Jakarta.

[8] Ferdi Tansala, Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

[9] Gross,Betram M1969.The New System Budgeting.Publik Administration Review,29(March-April).pp 113-137.

[10] I Gusti Ayu Rina Kusuma Dewi.2006.Pendapatan Daerah Sebagai Salah Satu Masalah Pada Pengelolaan Keuangan Daerah,Bandung-Bali.

[11] Imam Syaukani dan A.Ahsin Tohari,Dasar-dasar Politik Hukum , 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Gafa Media*, Yokyakarta

[12] Jamaluddin Ahmad, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Gafa Media*, Yokyakarta

[13] Jamaluddin Ahmad, 2011, *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*, Badan Penerbit UNM Makassar.

[14] Kamaruddin Sellang, 2016, *Administrasi dan Pelayanan Publik antara Teori dan Aplikasi. Ombak*

[15] Keban Y.T, 2014, enam dimensi strategis administrasi publik, gafa media, Yokyakarta

[16] Kusnendi, 2008; 96

[17] Lovelock dan Wright, 2005, *manajemen pemasaran jasa, indeks*, Jakarta.

[18] Moenir, 2002, *manajemen pelayanan umum di indonesia*, bumi aksara, Jakarta

[19] --------, 2008, *manajemen pelayanan umum*, bumi aksara, Jakrata

[20] Moh. Nasir, 2005, *metode penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

[21] Mustafa Hasbar, 2012, menguak perilaku organisasi ombak

[22] Ridwan dan Sunarto, 2007, *Pengantar Statistika untuk penelitian*, Alfabeta, Bandung

[23] Sedarmayanti, 2007, Good Governance (Keperintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik),Mandar Maju, Bandung

[24] Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006 *Reformasi pelayanan publik*, Bumi Aksara, Jakarta

[25] Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)* Alfabeta, Bandung.

[26] Said Mohammad, 2004, *pengaruh prilaku birokrasi terhadap kualitas pelayanan izin mendirikan bangunan*, Bandung.

[27] The Liang Gie, 1993, *ensiplopedia administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

[28] Winarti, 2000,*teori organisasi dan pengorganisasian*, Rajawali Pers,Jakarta.

[29] Zainuddin Samad, 2016,*birokrasi dalam pelayanan publik*,ombak anggota Ikapi, yogyakarta.

Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nurinayah
Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Nurinayah490@yahoo.com

ABSTRAK: Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi *convention on the rights of persons with disabillities* terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan concern antara kedua negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan *leading sector* kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan *Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade* dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta *disability-friendly* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kata kunci : *Kebijakan Indonesia, Kebijakan Australia, implementasi, CRPD.*

I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat (Budiardjo, 1996, p. 120). Hak asasi ini telah dimiliki oleh setiap manusia tanpa pengecualian apapun baik agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit bahkan bentuk fisik. Akan tetapi, dalam realitas tindakan pengecualian masih didapatkan oleh para penyandang disabilitas dikarenakan perbedaan fisik dan mental yang mereka miliki. Penyandang disabilitas sering mengalami masalah diskriminasi dalam hidup bermasyarakat, baik dalam lingkup negara maupun internasional.

Lebih lanjut, hak- hak asasi penyandang disabilitas menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dilindungi. Suatu negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dari pada warga negaranya, termasuk di dalamnya terkait pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari suatu negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memiliki kedudukan, hak asasi, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti halnya warga negara pada umumnya.

Dalam ranah internasional, hak asasi dan isu terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi isu yang krusial. Dan menunjukan perubahan paradigma internasional akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara lebih universal serta komprehensif, yang memandang isu penyandang disabilitas dalam dimensi lebih luas dan meliputi multisektor (*right based*). Pada tahun 2006, dibuatlah konvensi terkait hak-hak disabilitas atau yang dikenal

dengan CRPD (*Convention on the Right of Person with Disability*). CRPD diadopsi oleh PBB pada *general assembly* pada tanggal 13 Desember 2006 dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. (DSPD, 2016)

Konvensi ini membahas mengenai hak asasi para penyandang disabilitas secara komprehensif, dimana para penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak asasi dan kebutuhan yang sama dengan non-disabilitas.. Kemudian dimanifestasikan dalam 30 artikel terkait hak-hak yang harus dipenuhi suatu negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. CRPD telah ditanda tangani oleh 160 negara dan diratifikasi oleh 175 negara sama (DSPD, 2016). Indonesia dan Australia telah menandatangani serta meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia menandatangani pada 3 maret tahun 2007 dan meratifikasinya pada 10 November tahun 2011 (Edwards, 2014). Australia menandatangani konvensi pada 17 juli tahun 2008 dan meratifikasi pada tahun yang sama (McCallum, 2010).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), diperkirakan 15 % populasi dunia mengalami kecacatan atau penyandang disabilitas. Mayoritas penyandang disabilitas diperkirakan tinggal di negara berkembang, prevalensi kecacatan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia penduduk (Janet Lord, 2010). Sekitar 82 % dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak (ILO, 2013). Menurut data UNESCAP, kawasan Asia-Pasifik memiliki jumlah penyandang disabilitas mencapai 690 juta orang. Banyak dari meraka masih terpinggirkan serta terkecualikan dalam proses pemenuhan hak dan kebutuhannya (UNESCAP, 2012).

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki warga negera penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial tahun 2012, jumlah persentasi penyandang disabilitas mencapai 2,45% (Kesehatan, 2012). Dengan jumlah mencapai sebanyak 11,580,117 orang Dengan klasifikasi, sebanyak 3,474,035 (penyandang disabiltais penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabiltias mental) and 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis) (ILO, Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia, 2012). Dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas tersebut, terhitung sebesar 1.163.508 orang penyandang disabilitas yang menjadi sasaran kebijakan dan program pemerintah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah berperan aktif dan berupaya untuk menyelesaikan serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan estimasi tiga kebijakan spesifik melalui UU No 4 tahun 1997 "penyandang cacat", UU No 8 tahun 2011 " ratifikasi CRPD " dan UU No 8 tahun 2016 " hak-hak disabilitas" dan secara umum terdapat 114 kebijakan (UU, PP, Perda dan Perpres) yang terkait akan peraturan pemenuhan hak disabilitas. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah UU dan PP, yang masing-masing ada sebanyak 45 peraturan. Setelah itu disusul dengan keberadaan Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan.

Akantetapi dalam ranah realisasi dan implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas Indonesia masih menemui masalah serta hambatan. Berdasarkan penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Universitas Indonesia pada akhir 2016, mengestimasi bahwa keadaan penyandang disabilitas di Indonesia cenderung memprihatinkan. Lebih lanjut, tingkat pendidikan yang diraih oleh penyandang disabilitas juga lebih minim dibandingkan non-disabilitas. Jika 87,31% masyarakat non-disabilitas berpendidikan (setingkat SD ke atas), maka hanya 54,26% penyandang disabilitas yang bernasib serupa, bahkan 45,74% lainnya tidak lulus dan bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan dasar. Hal

tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab dari rendahnya serapan tenaga kerja dari para penyandang disabilitas (Haniy, 2016). Kemudian dalam hal aksesibilitas pemilu, masih banyak kendala-kendala teknis (*missing links*) di lapangan yang ditemukan seperti fasilitas TPU yang tidak pro-disabilitas serta minimnya arahan teknis mengenai tatacara pemberian suara dalam pemilu yang kemudian menjadikan suara mereka tidak sah dikarenakan kurangnya sosialisasi tadi.

Kemudian, dalam akses infrastruktur dan transportasi melalui penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta dengan menilai dari 10 stasiun kereta commuter yang menjadi *sample*, kondisinya 'tidak aksesibel' untuk para penyandang disabilitas (Artharini, 2016). Dengan pertimbangan penggunaan pintu otomatis yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses kereta, palang masuk ke platform kereta cenderung sempit sehingga kursi roda tak bisa masuk, tidak adanya petunjuk arah khusus bagi penyandang disabilitas dan tidak adanya akses kamar mandi yang *friendly* bagi mereka dan pegalaman ini juga dirasakan pada saat mengunjungi tempat umum lainnya seperti Mall, gedung-gedung pemerintahan dan sebagiannya. Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait hak para penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan kewajibannya sebagai negara, akan tetapi masalah terkait pemenuhan hak penyandang masih tetap terjadi dalam ranah domestik Indonesia.

Australia menjadi salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki *concern* terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut data *Australian Bureau Statistic* 2015 menyatakan bahwa jumlah penyandang mencapai 18,5% atau mencapai 4,3 juta penyandang disabilitas (Statistics, 2015). Kepedulian dan keseriusan Australia untuk mempromosikan, melindungi dan menjamin pemenuhan seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sepenuhnya oleh semua orang penyandang cacat. Australia menjadi salah satu negara pendonor terbesar kedua setelah Jepang untuk membantu penyandang disabilitas di dunia. Dalam kebijakan domestiknya, Pemerintah Australia menerapkan pendekatan *right-based* dan memiliki regulasi khusus untuk perlindungan terkait hak penyandang disabilitas yaitu *Disability Discrimination Act* 1992. Australia telah mengeluarkan 8 kebijakan terkait penyandang disabilitas yang diterapkan dalam skala nasional dan internasional.

Pada tahun 2008, Australia menjadi *one of the first Western countries* yang menandatangani dan meratifikasi konvensi disabilitas, sebagai bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah Australia untuk membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di dunia (DFAT, 2009). Dan menjadi salah satu negara yang diakui secara internasional, sebagai pendorong utama pengembangan dan pembangunan hak serta potensi penyandang disabilitas. Kemudian, memiliki kebijakan dan implementasi kebijakan yang cenderung lebih *friendly* (*disability-friendly policy*) terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui mengenai perbandingan terkait persamaan dan perbedaan kebijakan dan implementasi kebijakan terkait pemenuhan penyandang disabilitas antara Indonesia dan Australia.

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan penulis di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana perbandingan kebijakan Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas ?.

Tujuan Penelitian

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kewajiban menulis tesis Program Magister Ilmu Hubungan Internasional dan meraih gelar master.
2. Menjelaskan mengenai perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia terhadap pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga, pada akhir penelitian ini dapat memberikan *lesson learn* maupun paket kebijakan yang lebih baik untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Manfaat Penelitian

1. Secara akademik, penelitian tesis ini melakukan pengkajian lebih mendalam terkait studi mengenai kebijakan publik serta aplikasi kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap warga negaranya. Pengembangan ini dilakukan melalui pengkajian diadaptasinya nilai dan hak penyandang disabilitas yang termanifestasi dalam *CRPD (Convention on the Right of Person with Disability* oleh Indonesia dan Australia kedalam kebijakan masing-masing negara.
2. Secara praktik, penelitian tesis ini memberikan informasi tentang dinamika kebijakan publik Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian ini akan fokus untuk melakukan perbandingan mengenai persamaan dan perbedaan antara kebijakan serta implementasi kedua negara yaitu Indonesia dan Australia terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat diketahui dan di identifikasi terkait orientasi serta pembelajaran terkait kebijakan yang baik dan sesuai untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia agar kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa dirumuskan serta diimplementasikan secara lebih efektif dan komprehensif.

Kajian Pustaka

Dalam jurnal Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual oleh Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati1, Siti Mas'udah 2015 (UNAIR) (Tri Joko Sri Haryono, 2015). Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan konsep implementasi kebijakan. Penulis memaparkan mengenai kesetaraan hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh akses kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas.

Menurut Tri Joko Sri Haryono dkk, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun dalam faktanya di lapangan, penyandang disabilitas masih kesulitan untuk dapat memperoleh dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, olahraga, seni, dan budaya, serta kesehatan. Dan berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan dari negara (pusat/daerah) dalam prosesnya.

Dalam bidang kesehatan, wanita penyandang disabilitas mendapatkan permasalahan yang kompleks terutama dalam mengakses pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi mereka. Sterotype, stigma dan pandangan masyarakat terhadap wanit penyandang disabilitas menjadi faktor lain yang semakin mempersulit mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang mumpuni. lebih lanjut, penulis menyatakan bahwa proses realisasi kebijakan Indonesia terkait pelayanan kesehatan reproduksi perempuan belum secara efektif dilakukan. Hal ini terjadi karena kebijakan pelayanan kesehatan Indonesia masih didominasi pendekatan medis serta meletakan permasalahan terkait penyandang disabilitas dalam ranah masalah individual (*individual problem*), sehingga penyelesaian permasalahan terkait pelayanan kesehatan hanya menjadi ranah / concern daripada penyandang disabilitas itu sendiri dengan tenaga medis yang menanganinya.

Lebih lanjut, dalam laporan penelitian yang berjudul "Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia" oleh Dra. Arni Surwanti., M.Si dan Lela Hindasah., SE.,M.Si tahun 2013 (Dra. Arni Surwanti., 2013) Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konsep pemberdayaan ekonomi sebagai landasan konsep penelitian. Dra Arni Surwanti menjelaskan bahwa kebijakan dan metode dalam memberdayakan ekonomi para

penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif dan meliputi multi-sektor. Persoalan pemenuhan dan perlindungan ekonomi para penyandang disabilitas pada saat ini telah memiliki landasan hukum baik dalam skala internasional, nasional maupun daerah.

Dalam proses realisasi kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi disabilitas Indonesia masih mengalami kendala karena masih ditunjuk Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi utama bagi mereka. Kerjasama penanganan antar interdepartemental dn interinstitusi sudah dilakukan, akan tetapi dalam ranah implementasi dan koordinasi masih belum berjalan dengan baik. Lebih lanjut, penulis juga menjelaskan bahwa NGO dan DPO memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses realisasi kebijakan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti. Oleh karena itu peran masyarakat banyak sangat diperlukan. Tentunya suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan berhasil diatasi seperti : ketidaktersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan.

Dan faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Dalam buku yang berjudul "Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas" ditulis oleh Fajri Nursyamsi (Fajri Nursyamsi, 2015). Penulis telah menjelaskan mengenai kondisi basis hukum bagi penyandang disabilitas yang masih cenderung tidak mewakili dan tidak banyak berkembang di Indonesia. Hal ini menjadikan penyandang disabilitas masih masuk dalam obyek kebijakan yang hanya fokus kepada kesejahteraan, kesehatan, dan program santunan. Kondisi itu membuat penyandang disabilitas menjadi bagian yang terpisahkan dari masyarakat secara umum, yang kemudian mencederai prinsip persamaan (*equality*).Selain itu, fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang disabilitas relatif sangat terbatas sehingga menyulitkan mereka untuk bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Undang-Undang No 4 1997 "Penyandang Cacat" yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih menganggap penyandang disabilitas sebagai obyek dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang disusun masih didominasi dengan pendekatan (*charity based)*. Sedangkan cara pandang yang sekarang berkembang ada melihat interaksi antar manusia sebagai obyek utama, sehingga kebijakan yang disusun adalah untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi karena semua manusia memiliki hak yang sama (*right based)*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urgensi dari reformasi hukum terkait disabilitas harus diiringi dengan perhatian terhadap pengetahuan dan keberpihakan dari para pemegang kebijakan, terutama pembentuk Undang- undang. Kemudian, pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

berpangkal dari melembaganya sikap dan perilaku *stereotype* dan prejudisme mulai dari kalangan awam, kelompok intelektual hingga elit penguasa. Namun hal yang paling berbahaya adalah jika sikap tersebut tumbuh dan bersemayam dalam diri para penguasa. Sebagai *decision maker*, mereka berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM, karena dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan, memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Akibatnya, kebijakan yang lahir penuh dengan nuansa diskriminasi, sinisme, apriori bahkan apatis.

Selanjutnya, dalam jurnal yang berjudul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta oleh Lelly Nuraviva (Nuraviva, 2017). Penelitian menggunakan konsep kebijakan publik sebagai landasan teori dan menggunakan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Penulis menyatakan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha dengan mengeluarkan Kebijakan terkait aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara *(citizen)*. Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta. Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai *policy maker* pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara *(citizen)* yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara *(citizen)* untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker,* keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakoptimalan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain.

Dalam jurnal "*Models of Disability, Work and Welfare in Australia*" oleh Louise Humpage (Humpage, 2007). Penulis menjelaskan mengenai perubahan pendekatan dalam memahami penyandang disabilitas oleh masyarakat dan Pemerintah Australia dalam merumuskan kebijakan dari menggunakan pendekatan medis *medical approach* menjadi *sosial approach*. *Medical approach* merujuk pada terfokusnya pemenuhan penyandang disabilitas terkait proses perawatan/rehabilitas medis bahkan pemberian uang jaminan kesehatan "cured", sementara *social approach* lebih kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih luas dan meliputi interaksi sosial (*equality and accessibility*) dalam keseharian mereka seperti masyarakat lainnya. Sebelum dilakukannya konvensi terkait hak penyandang disabilitas CRPD, Pemerintah Australia menitik beratkan kebijakannya terkait penyandang disabilitas terfokus pada proses pemberian dana bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dimanifestasikan dalam kebijakan *Disability Support Pension* tahun 2005.

Kemudian, setelah Australia menandatangani konvensi hak penyandang disabilitas CRPD, Pemerintah Australia melakukan reformasi kebijakan secara komprehensif terkait penyandang disabilitas. dengan menimbang pendekatan sosial dalam proses perumusan kebijakan Australia dan fokus utama pada sektor ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan "*welfare to work policy*" yaitu dengan concern utama 'meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas Australia untuk berkontribusi secara aktif terhadap ekonomi dan

kemasyarakatan. Lebih lanjut, Pemerintah Australia menginginkan tersedianya keamanan, kenyamaanan, kesetaraan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapakan pekerjaan dan berbaur dengan lingkungan pekerjaan mereka.

Dalam jurnal yang berjudul *"Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective?"* oleh Terry Carney (Carney, 2015). Menjelaskan bahwa nilai dan norma yang dihasilkan dalam CRPD (30 artikel) telah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Australia untuk merumuskan kebijakan yang mendukung serta melindungi hak penyandang disabilitas di negaranya. Pemerintah Australia melakukan penyesuaian/ reformasi dengan nilai CRPD untuk kemudian diadopsi dalam hukum kebijakan nasional Australia, dan kemudian dapat berkoordinasi dengan solid dari kawasan pusat hingga wilayah untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuk implementasi konkrit Pemerintah Australia terhadap nilai dan norma CRPD, Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dalam skala nasional dan mencakup multi-sektor yaitu *National Disability Insurance Scheme*. Kebijakan asuransi bagi penyandang disabilitas ini dilakukan dalam aspek ekonomi maupun sosial dan meliputi multi aspek (hubungan keluarga dan lingkungan, pendidikan, akses publik, mobilitas dan infrastruktur, rehabilitasi dan perlindungan pekerjaan) serta menggunakan pendekatan self-problem mengidentifikasi masalah perindividu penyandang disabilitas serta dilaksanakan dalam skala nasional. Pemerintah Australia memiliki tujuan besar untuk menciptakan kebijakan yang dapat memenuhi, melindungi dan membangun "*disability trust*" dari para penyandang disabilitas di Australia.

Jurnal yang berjudul "*Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government*" oleh Karen Soldatic and Barbara Pini (Karen Soldatic, 2012). Penulis menyatakan bahwa isu tentang disabilitas di Australia telah menjadi prioritas kebijakan sosial sejak 1972. Kemudian, semakin mengalami perkembangan dan menunjukan perubahan dalam ranah *decision-making process* serta dengan dijadikannya disabilitas sebagai *subject policy*. Lebih lanjut, dibentuknya lembaga/komisi khusus yang menangani disabilitas *the Australian Council for the Rehabilitation of the Disabled* (ACROD) dan penanganan disabilitas menjadi agenda prioritas pemerintah nasional serta mencakup reformasi kesejahteraan yang lebih luas (*universal design*). Pemerintahan Perdana Menteri Howard menjadi titik balik fokusnya kebijakan domestik dan luar negeri Australia terkait hak disabilitas diantaranya seperti melakukan *re-regulation of the welfare–labour-market* dan mengeluarkan kebijakan yang pro-disabilitas, *Responsibility for disability open employment services* menjadi agenda administrasi pusat dalam Pemerintahan Howard.

Selama kepemimpinannya terjadi koordinasi yang *komprehensif Australians with disabilities, carers and the large network of disability service providers* secara aktif mengekspresikan dukungan mereka terkait pemenuhan hak disabilitas serta dalam ranah pendanaan dialokasikan oleh *primary government funding* dan koordinasi pemerintah pusat (partai buruh) untuk penyediaan pelayanan dan dukungan untuk penyandang disabilitas di seluruh Australia. Kebijakan yang sama diambil oleh Perdana Menteri Kevin Rudd yaitu *an extensive disability and carers' policy* yang berfokus pada partisipasi sosial dan ekonomi dan dukungan bagi penyandang disabilitas dan wali, bentuk baru kesepakatan antar pemerintah di bidang penyediaan layanan dan pengembangan strategi pemerintahan nasional untuk layanan disabilitas (*The National Disability Strategy*). Arah kebijakan PM Rudd ialah Agenda Inklusi Sosial Pemerintah Rudd menempatkan penekanan pada inklusi, partisipasi dan konsultasi publik, mencatat bahwa 'kapasitas untuk mempengaruhi *decision-maker* mengenai isu-isu kepentingan disabilitas akan inklusi.

Kerangka Teoritik

1. Konsep Public Policy Thomas R Dye

Thomas Dye menyatakan "*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do. Goverments do many things. They regulate conflict within society. They distribute a great*

variety of symbolic rewards and material services to members of the society and extract money from society, most often in the form of taxes. thus, public policies may regulate behavior, organize bureucracies, distribute benefits or extra taxes or all these things at once" (Dye, 1981).

2. Konsep Implementasi Kebijakan Van Meter and Van Horn

Van Meter dan Van Horn menyatakan *" Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"* (Najam, 1995, p. 14).

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah sebuah penelitian tipe kualitatif. Tehnik pengumpulan data akan dilakukan dengan mencara data primer dan juga sekunder. Pengumpulan data primer akan dilakukan (*in depth interview*) kepada informan yang berasal dari kalangan pemerintah / institusi terkait seperti Kementerian Sosial yang menjadi lembaga penanggung jawab terkait disabilitas di Indonesia, serta Dubes Australia untuk Indonesia terkait kebijakan disabilitas di Australia. Dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Governmental Organization (NGO) yang bergerak dibidang advokasi hak penyandang disabilitas. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan studi dokumen tentang kebijakan terkait disabilitas dan program-program pemenuhan hak-hak disabilitas di Indonesia dan Australia berupa dokumen, jurnal, laporan dan media elektronik terutama internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negaranya dan hal ini berlaku tanpa pengecualian. Lebih lanjut, peran Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik menjadi hal yang krusial karna menyangkut pada kelangsungan kehidupan dari warga negara. Sama halnya dalam membahas disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama karena merupakan warga dari suatu negara dengan berbagai kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Akantetapi dalam realisasinya konsep ini sering menghadapi ketidaksesuaian dimana Pemerintah belum bisa secara penuh memenuhi kewajibannya dalam bentuk kebijakan publik.

Permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan permasalahan HAM yang sejak lama dialami oleh banyak negara, begitu pula dengan Indonesia dan Australia. Kedua negara telah melakukan upaya terbaik mereka untuk dapat meminimalisir bahkan menyelesaikan permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan publik terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas seperti UU No 4 tahun 1997 tentang "penyandang cacat", bahkan meratifiksi *Convention on the Right of Person with Disability* dan merealisasikannya dalam UU No 8 tahun 2011 " ratifikasi CRPD " dan RUU No 8 tahun 2016 " hak-hak disabilitas". Akantetapi dalam Proses penanganan penyandang disabilitas di Indonesia masih berjalan lambat, hal ini terjadi karena masalah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia terdaftar dalam peraturan perundang-undangan, tapi lemah dalam proses realisasi atau implementasi kebijakan.

Belum sempurnanya koordinasi secara komprehensif dari stakeholder Pemerintah Indonesia untuk bekerjasama memenuhi hak penyandang disabilitas menjadi salah satu hambatan dalam realisasi kebijakan publik secara efektif. Lebih lanjut, masih rendahnya tingkat aksesibilitas infrastruktur dan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan di Indonesia menjadi masalah yang krusial bagi penyandang disabilitas.

Kemudian, masih menguatnya stigma, stereotype pemerintah dan warga Indonesia terkait penyandang disabilitas sebagai individu yang berkebutuhan khusus serta dianggap sebagai beban (undervalued) semakin menambah daftar tantangan yang harus dihadapi oleh penyandang

disabilitas di Indonesia. Dan masih di klasifikasikannya penyandang disabilitas sebagai obyek kebijakan dibawah penanganan Kementerian Sosial telah mengindikasikan masih digunakannya pendekatan medis berbasis santunan dalam proses realisasi/implementasi kebijakan Indonesia terhadap para penyandang disabilitas.

Pemerintah Australia memiliki masalah yang sama dengan Indonesia terkait penyandang disabilitas. Akantetapi dalam ranah implementasi Australia cenderung lebih baik dalam penanganan mengenai penyandang disabilitas. Australia telah sejak lama menunjukan perhatiannya terhadap penanganan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. hal ini terlihat dari reformasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Australia pasca ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* melalui kebijakan National Disability Strategi (state) dan National Disability Agreement (federal) oleh Australia. Dengan tujuan utama mengarusutamakan masalah pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai agenda nasional dan menjadi tanggung jawab komprehensif seluruh negara bagian di Australia.

Australia menjadikan *Departement of Social Services* serta *Departement Foreign Affairs & Trade* sebagai *leading actor* utama dalam proses implementasi kebijakan terkait disabilitas, dengan tujuan utama untuk mengarusutamakan permasalah terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai suatu masalah nasional dan internasional dunia. Sehingga dalam proses implementasi Pemerintah Australia mendapan dukungan dari INGO, IGO atau negara lain dan sebaliknya. Dan bahkan dapat melakukan dan menjalin kerjasama terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Australia juga memiliki lembaga/komisi khusus yang bernama *National Disability Service* yang bertugas sebagai lembaga advokasi, mengawasi dan memberikan masukan serta pelayanan khusus kepada para penyandang disabilitas di Australia terutama dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam hal aksesibilitas, Australia dinyatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat aksesibilitas terutama terkait infrastruktur yang baik dan friendly terhadap penyandang disabilitas. Dalam ranah implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas, Indonesia masih tertinggal dari Australia. Untuk menunjukannya, peneliti kemudian melakukan perbandingan implementasi kebijakan terhadap 4 bidang terkait seperti sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan antara Indonesia dan Australia. Kemudian, menghubungkannya dengan artikel/pasal yang terkait dalam *Convention on the Right of Person with Disability* tentang hak-hak penyandang disabilitas seperti*:*

1. *Sosial (**article 9,5 accesibility and equality & non discrimination)***

Di Indonesia, terkait aksesibilitas dan kesetaraan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait aksesibilitas sosial seperti UU No 4/1997 tentang penyandang disabilitas dan PP 43/1998 tentang upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Implementasinya proses penerapan kebijakan ini masih mengalami kendala dan hambatan. Dalam hal transportasi umum seperti bis (low entry) telah mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan menyediakan sebanyak 300 unit bis khusus pada april 2017 (Sari, 2017). Akantetapi masih terkendala terkait pengadaanya yang belum merata di seluruh Indonesia. Untuk sarana transportasi lain seperti kereta api, kapal, taxi maupun motor, belum dapat di akses secara komprehensif oleh penyandang disabilitas. Kemudian, jalan khusus penyandang disabilitas masih terbatas dan penyediaan kotak bahasa isyarat dalam televisi tapi hanya dilakukan pada beberapa program tv.

Australia memiliki tiga peraturan spesifik terkait aksesibilitas seperti *Disability Standarts for Accessible Public Transport 2002, Acces Building Standart 2010 dan Building Construction Authority (BCA Code)*. Dan semua transportasi publik telah disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas seperti bis (*smartbus*), taksi (*taxi subsidy scheme*) dan kapal ferry. Kebijakan ini telah di implementasikan keseluruh negara bagian di Australia. Selanjutnya,

terdapat penunjuk jalan berhuruf braile disetiap tiang lampu merah dan terdapat panduan suara disetiap tempat penyebrangan. Penyediaan AUSLAN (*Australian Language*) dalam program tv dan penyediaan "*closed captioning" live/typing* dalam setiap program tv. Australia juga memiliki *National Deaf TV Project* khusus untuk tuna rungu.

2. Ekonomi *(article 27 work and employment)*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dengan kuota minimal penempatan tenaga kerja disabilitas sebesar 1 % dan ditujukan bagi seluruh perusahaan di Indonesia , tetapi dalam proses implementasinya peraturan ini masih belum secara efektif dilakukan. Pelatihan juga diberikan kepada penyandang disabilitas tapi masih menggunakan paradigma tradisional (pelatihan jahit, menyulam dsb) (Latuconsina, 2014).

Sedangkan Australia memiliki landasan kebijakan seperti Fair Work Disability Act 2009, menganggap dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek yang berhak mendapat pekerjaan seperti orang pada umumnya melalui *Employed Acces Program* Penyandang disabilitas diberikan training pendidikan dan pelatihan skill khusus selama 1 tahun, kemudian pemerintah memberikan subsidi khusus kepada perusahaan yang memperkerjakan disabilitas. dan ditanggung jawabi oleh tiga badan pemerintahan Australia yaitu *Departement of Health Family , Department of Education Employment Training and Youth Affairs* dan *Departement of Social Services.*

3. Politik *(article 29 participation in political & public life)*

Kebijakan Indonesia terkait partisipasi politik seperti pemilu tertuang dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 diatur tentang pendataan pemilih hingga proses pemungutan suara yang mengakomodir para penyandang disabilitas. Akantetapi dalam ranah realisasi, Penyandang disabilitas masih terkecualikan dalam proses pemilu. Banyak dari mereka yang tidak dapat memberikan suara ke TPU karena tidak teraksesnya fasilitas pemilu untuk para penyandang disabilitas (Patty, 2016).

Australia memiliki kebijakan terkait hak-hak politik penyandang disabilitas (PWD) dalam "*National Disability Strategy*", memberikan mereka hak yang sama dengan non-disability (PWOD) untuk dapat mengakses hak mereka. *Australian Electoral Commission* (AEC) menyediakan berbagai layanan untuk memungkinkan orang-orang penyandang disabilitas mendaftarkan suara mereka dalam Pemilu Federal 2013 (AEC, 2013) seperti : Layanan pemungutan suara telepon untuk tuna netra atau memiliki penglihatan rendah dan*Your Official Guide to the Federal Election* tersedia dalam berbagai format yang mudah diakses

4. Kesehatan *(article 25, 27 health and rehabilitation & habilitation)*

Kebijakan Indonesia terkait kesehatan nasional dalam UU Nomor 40 tahun 2004, dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam realisasinya, Indonesia mengeluarkan program jaminan kesehatan sosial (jamkesos) dan menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu objek penerima manfaat dalam kebijakan tersebut.

Pemerintah kemudian mengeluarkan program keluarga sejahtera dengan orientasi pemberian *Conditional Cash Transfers (CCT)* berupa kartu kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas dalam kategori berat (Khafifah, 2016). Sementara itu, Australia secara spesifik mengeluarkan kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas "*National Disability Insurance Scheme* 2013", dimana semua penyandang disabilitas dari segala kategori akan mendapatkan asuransi/tunjangan dalam segala aspek kehidupan termasuk kesehatan fisik maupun mental oleh Pemerintah Australia.

IV. KESIMPULAN

Kerjasama secara komprehensif oleh pemerintah, masyarakat penyandang disabilitas dan international untuk menangani permasalahan terkait pemenuhan disabilitas. Indonesia dan Australia memiliki kesamaan terkait upaya ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* sebagai bentuk usaha kedua negara untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Akantetapi, dalam ranah realisasi dan implementasi Indonesia dan Australia cenderung berbeda diantaranya ; Indonesia belum memiliki komisi/lembaga khusus yang menangani penyandang disabilitas. Sementara Australia memiliki komisi/lembaga khusus untuk menangani penyandang disabilitas yaitu "*National Disability Services*". Indonesia masih menjadikan Departemen Kementerian Sosisal sebagai *leading actor* utama dalam implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas. Sementara Australia menjadikan *Departement of social Services serta Departement Foreign Affairs & Trade* sebagai *leading actor* utama dalam implementasi kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Lebih spesifik, terkait aksesibilitas publik Australia lebih ramah terhadap penyandang disabilitas dibanding dengan Indonesia. Dalam hal ketenagakerjaan, Australia memiliki sistem birokrasi dan implementasi yang komprehensif untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Indonesia masih mengalami hambatan dalam ranah implementasi karena kurangnya kerjasama antar *stakeholder* pemerintahan. Begitu pula dalam bidang kesehatan, Indonesia masih menerapkan pendekatan charity approach dengan memberikan bantuan berupa dana kesehatan (penyandang disabilitas berat).

V. DAFTAR PUSTAKA

[1] AEC. (2013, Juni 10). *Australian Federal Election 2013*. Retrieved Maret 8, 2018, from aec.gov.au: http://aec.gov.au/Elections/Federal_Elections/2013/index.htm

[2] Artharini. (2016, Mei 26). *Meski Ada Regulasi Hak Politik Penyandang Disabilitas Masih Diabaikan, Membuka Akses Transportasi untuk Kelompok Difabel*. Retrieved Januari 18, 2018, from nasional.kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09mesk

[3] Budiardjo, M. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakartra: Gramedia Pustaka Utama.

[4] Carney, T. (2015). Supported Decision-Making for People with Cognitive Impairments: An Australian Perspective? . *Law and Social Policy Journal VOL 4* , Pp 37-59 .

[5] DFAT. (2009, Juni 10). *Development for All: Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-2014*. Retrieved Januari 19, 2018, from dfat.gov.au: http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/development-for-all-towards-a-disability-inclusive-au

[6] Dra. Arni Surwanti., M. L. (2013). *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia.* Yogyakarta.

[7] DSPD. (2016, Mei 10). *Convention on the Rights of Persons with Disabilitiesl*. Retrieved Januari 17, 2018, from www.un.org: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

[8] Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy* . London : Prentice-Hall International, Inc.

[9] Edwards, N. (2014). Disability Rights in Indonesia? Problems with Ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Australian Asian Law Journal* , 3.

[10] Fajri Nursyamsi, E. D. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* . Jakarta : Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia .

[11] Haniy, S. U. (2016, Desember 17). *Mengapa partisipasi penyandang disabilitas dalam bursa tenaga kerja minim?* . Retrieved Januari 17, 2018, from www.rappler.com: https://www.rappler.com/indonesia/berita/155758-sebab-solusi-partisipasi-penyandang-disabilitas-

[12] Humpage, L. (2007). Models of Disability, Work and Welfare in Australia . *Social, Policy & Administration Journal* , pp 215-231.

[13] ILO. (2012). *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia.* Jakarta: International Labour International.

[14] ILO. (2013). *Fact sheet : Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia.* Jakarta : International labour International .

[15] Karen Soldatic, B. P. (2012). Continuity or Change? Disability Policy and the Rudd Government. *Australian Policy Journal* .

[16] Kesehatan, K. (2012). *Penyandang Disabilitas Indonesia.* Jakarta: Pusat Data dan informasi Kementerian Kesehatan RI.

[17] Khafifah, N. (2016, April 11). *Kemensos Sediakan Program Khusus untuk Ratusan Ribu Difabel*. Retrieved Maret 8, 2018, from news.detik.com: https://news.detik.com/berita/3184438/kemensos-sediakan-program-khusus-untuk-ratusan-ribu-difabel.

[18] Latuconsina, Z. (2014). Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas . *Assistant Legal Specialist PT.Huawei Tech Invesment Jurnal, Volume 9*.

[19] McCallum, R. C. (2010). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Some Reflections . *Legal Studies Research Paper University of Sydney* , 1-2.

[20] Najam, A. (1995). Policy Implementation : A Synthesis Perspective. *Public Policy Working Paper* .

[21] Nuraviva, L. (2017). . Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Surakarta . *Kebijakan Publik Jurnal* .

[22] Sari, N. (2017, Mei 12). *PT Transjakarta Beli 300 Bus Ramah Disabilitas Tahun 2017*. Retrieved 20 Januari, 2018, from https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/12/18122351/pt.transjakarta.beli.300.bus.ramah.disabilitas.tahun.2017

[23] Statistics, A. B. (2015, Januari 7). *Disability, Ageing and Carers, Australia: Summary of Findings*. Retrieved Januari 18, 2018, from www.abs.gov.au: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Latestproducts/4430.0Main%20Features12015?opendocument&tabname=Summ

[24] Tri Joko Sri Haryono, T. K. (2015). Kebijakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas. *Antropologi dan Sosiologi Politik Jurnal* .

[25] UNESCAP. (2012). *Strategi Incheon untuk Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas di Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa.* Bangkok : United Nations Economic and social for Asia and Pacific.

INOVASI PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA

Retnowati WD Tuti, Kurniasih Mufidayati, Mawar

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jakarta, Indonesia
retnowatiwdtuti@yahoo.com; kmf0219@gmail.com; mawarhidayat22@gmail.com

ABSTRAK : Latar Belakang Masalah, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling terakhir membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sebelum orde reformasi DKI Jakarta terkenal dengan buruknya Pelayanan Publik. Segala urusan dapat terselesaikan dengan adanya uang pelicin. Namun ketika memasuki Orde Reformasi DKI Jakarta mulai berbenah untuk mengutamakan Kepuasan Masyarakat, bahkan DKI Jakarta banyak melakukan terobosan atau Inovasi Pelayanan yang dilakukan, seperti AJIB; IMB 3 jam, online pendaftaran perizinan. Penelitian ini dibatasi pada pelayanan AJIB dan IMB 3.0 di PTSP Cengkareng. Beranjak dari pembatasan masalah tersebut, maka Rumusan Masalah : 1). Bagaimanakah Pelaksanaan Inovasi Pelayanan AJIB dan IMB 3.0 di PTSP Cengkareng Jakarta Barat ?; 2). Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat nya ? Tujuan Penelitian untuk menganalisis : 1). Proses Pelaksanaan Inovasi Pelayanan AJIB dan IMB 3.0 di PTSP Cengkareng Jakarta Barat 2). Untuk menemukan Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan nya. Metode Penelitian: Diskriptif; Pendekatan Penelitian : Kualitatif; Teknik Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Penentuan Informan : Purposif dan Accidental Sampling. Teknik Analisis Data menggunakan Mac Nabb. Uji Keabsahan Data : Triangulasi. Hasil Penelitian: AJIB dilaksanakan dengan online dan offline. Jenis kendaraan yang digunakan AJIB : motor dan mobil keliling. AJIB membantu kelancaran dan mempercepat proses pelayanan IMB 3.0. Pelayanan IMB 3.0 diberikan dengan gratis asalkan tidak melalui calo, disediakan desain rumah gratis. Namun, terdapat kelemahan yaitu belum banyak masyarakat yang urus IMB 3.0; terdapat banyak calo; kurang pegawai; dan Ruang pelayanan sempit.

Kata Kunci : ***Inovasi, Pelayanan, Terpadu, Satu Pintu***

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling terakhir membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu. Sebelum orde reformasi DKI Jakarta terkenal dengan buruknya Pelayanan Publik yang dilakukan Pemerintah Daerah. Contoh: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan masih terpencar di berbagai Instansi, masyarakat mendatangi banyak instansi, kurang lebih 10 instansi dengan biaya tidak resmi yang mahal, untuk mengurus berbagai persyaratan IMB. Selain itu: "Perusahaan Daerah Air Minum mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena kinerja nya yang buruk, menjanjikan air PAM yang diterima masyarakat sudah steril dan layak minum langsung dari kran yang disediakan di tempat umum seperti di Singapura dan Malaysia. "Faktanya berbeda. Jangankan langsung minum dari kran, untuk memasak saja tidak layak akibat kotor berwarna cokelat terkadang hitam dan ada cacing," kata Lulung wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ditegaskan pula, selama delapan tahun Hariadi Priyohutomo menjabat Dirut PAM Jaya, pelayanan kedua operator mendapat nilai merah.

Bahkan tidak pernah memberi kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dan dirut tersebut dipecat" (DPRD : Kinerja PDAM DKI Jaya Buruk Http://www.republika.co.id/berita/breakingnews/metropolitan/10/05/08/114817-dprd-kinerja-pdam-dki-jaya-buruk.

Namun ketika memasuki Orde Reformasi DKI Jakarta mulai berbenah untuk mengutamakan Kepuasan n gratisMasyarakat bahwa DKI Jakarta banyak melakukan terobosan atau Inovasi Pelayanan seperti pengurusan IMB hanya melalui satu instansi saja yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu bentuk inovasi lain MPP (Mall Pelayanan Publik), AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor), PATEN di Kelurahan, online pengurusan perizinan, dll. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk inovasi pelayanan publik apa saja yang sudah dan akan dilakukan Provinsi DKI Jakarta**.** Kemudian penelitian ini difokuskan pada bentuk-bentuk Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta.

Perumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apakah Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Inovasi Pelayanan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta?.

Tujuan Penelitian untuk menganalis :

1. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta ?
2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pelaksanaan Inovasi Pelayanan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta.

Manfaat Penelitian

Secara Teoritis, Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atas Penerapan Teori Inovasi Pelayanan, dimana Atribut Inovasi Pelayanan menurut Rogers yang dijadikan aspeknya, yaitu : 1). *Relative Advantage* (keuntungan relatif); 2). *Compatibility* (kesesuaian); 3). *Complexity* (kerumitan); 4). *Reliability* (kemungkinan dilakukan percobaan); dan 5*). Observability* (dapat diamati).

Secara Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi UP PTSP Kecamatan Cengkareng dan Provinsi DKI Jakarta sebagai masukan dalam menyusun Kebijakan yang akan datang.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama, dengan judul Inovasi Pelayanan Publik (Studi Upaya Inovasi Paket Perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan) oleh Sintia Andayani (2016). Diungkapkan oleh peneliti bahwa temuannya adalah upaya inovasi paket perizinan meningkatkan Kualitas pelayanan di BPPT Sidoarjo, yaitu : Pertama, melalui langkah penyederhanaan persyaratan yang menjadi lebih ringkas dibandingkan apabila masyarakat mengurus satu persatu. Sehingga melalui paket perizinan berkas yang dibawa masyarakat saat pengajuan pengurusan perizinan akan lebih sedikit dari segi kuantitas. Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi lebih mudah saat melakukan verifikasi berkas pengajuan perizinan di *costumer service* dan meminimalkan kesalahan verifikasi yang seringkali terjadi karena berkas yang terlalu banyak. Kedua, dalam hal waktu penyelesaian, melalui inovasi paket akan menjadi lebih cepat dibanding dengan pengurusan tanpa paket sehingga lebih menghemat waktu bagi pengguna layanan. Karena apabila menggunakan paket waktu penyelesaian cukup 14 hari untuk paket 1 dan 10 hari waktu penyelesaian untuk paket 2. Ketiga, upaya inovasi paket perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah penghematan biaya bagi pemohon hal ini berkaitan pula dengan penyederhanaan persyaratan karena melalui paket perizinan jumlah fotocopy dan materai akan berkurang sehingga terjadi penghematan (Dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016)

Penelitian Kedua, dengan judul Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya oleh Muhammad Insa Ansari (2016). Peneliti

mengungkapkan bahwa Hasil Penelitian, diantaranya adalah: Pertama, keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat Daya memiliki landasan hukum yang kuat dan dalam menjalankan tugas memiliki pelimpahan kewenangan dari atasan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya selalu berpedoman pada standar operating prosedur (SOP), dimana sejumlah SOP tersebut diatur dalam peraturan bupati. Ketiga, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerapkan sistem pelayanan ke bawah. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar membentuk kantor perwakilan di Lambaro dalam melayani perizinan dari pelaku usaha dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat Daya membuka loket perizinan di beberapa kecamatan. Ini merupakan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka membantu pelaku usaha (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 17-35).

Penelitian Ketiga, dengan Judul Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya oleh Maria Agustini Permata Sari (2014). Sebagai daerah yang masih terhitung baru, Kabupaten Kubu Raya sudah berhasil melaksanakan pelayanan publik yang baik khususnya di bidang perijinan, hal ini dibuktikan antara lain dengan diraihnya berbagai penghargaan dan meningkatnya tren realisasi ijin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) setiap tahunnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat terjadinya inovasi tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala BPMPT serta data sekunder. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah penyederhanaan jumlah ijin, pembatasan calo perijinan dan penyederhanaan *business process*. Faktor pendorong lahirnya inovasi yang dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah komitmen Bupati dan pimpinan BPMPT dalam memperbaiki kualitas pelayanan perijinan, serta sumber daya manusia BPMT yang memiliki semangat kerja tinggi. Sedangkan masalah yang menjadi faktor penghambat lahirnya inovasi adalah mutasi pegawai. Kesimpulan, meningkatnya tren realisasi ijin yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) setiap tahunnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya serta untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat terjadinya inovasi tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala BPMPT serta data sekunder. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa inovasi yang sudah dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah penyederhanaan jumlah ijin, pembatasan calo perijinan dan penyederhanaan *business process*. Faktor pendorong lahirnya inovasi yang dilakukan oleh BPMPT Kubu Raya adalah komitmen Bupati dan pimpinan BPMPT dalam memperbaiki kualitas pelayanan perijinan, serta sumber daya manusia BPMT yang memiliki semangat kerja tinggi. Sedangkan masalah yang menjadi faktor penghambat lahirnya inovasi adalah mutasi pegawai (Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 2 / 2014).

Penelitian Keempat, Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar oleh Dewi Puspita Sari, Nurlinah, dan A.Lukman Irwan (2013); Jurnal ini menjelaskan tentang model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan pemerintah Kota Makassar mendapatkan sorotan dari berbagai pihak terutama dari aspek kinerja pelayanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan pandangan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk inovasi pelayanan Unit

Pelayanan Perizinan, faktor- faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan, model inovasi pelayanan prerizinan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan PAD di Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar dan sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik (Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, Juli 2013) .

Penelitian Kelima, yang berjudul Efektivitas Penyelenggaraan *E-Government* Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang oleh Raharwindy Kharisma Sudrajat, Endah Setyowati, Sukanto (2015). Diungkapkan bahwa *Traditional government* yang identik dengan antrian yang panjang dan juga *maladministration* sehingga menuntut adanya transformasi birokrasi pemerintahan untuk mengembangkan *electronic government*. Meskipun pemerintah selalu mengembangkan program baru untuk memperbaiki pelayanan, tetap selalu ada permasalahan yang terjadi dalam lingkup internal maupun dari masyarakat. Hasil penelitian penyelenggaraan *e-Government* pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang sudah cukup efektif bila mana tujuan dari diselenggarakannya *e-Government* disesuaikan dengan tujuan *e-Government* nasional Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pertama, tujuan *e-Government*, BP2T Kota Malang sudah membuat jaringan informasi yang dapat diakses secara bebas dan dimanapun dengan melalui *website* perizinan, yang mana didalam *website* perizinan tersebut terdapat berberapa fasilitas mengenai pelayanan perizinan serta informasi mengenai pelayanan perizinan. Hanya saja untuk transaksi pelayanan secara elektronik belum bisa dilakukan dikeranakan belum adanya dasar hukum yang jelas mengenai penyelenggaraan *e-Government* di Kota Malang dan pelayanan di BP2T Kota Malang sendiri masih semi konvensional. Kedua, hubungan yang interaktif dengan dunia usaha. Pegawai pada BP2T Kota Malang hanya sebagai pelaksana dan penggerak program *e-Government*, sedangkan untuk pembuatan *website* maupun untuk melengkapai sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan *e-Government* dilakukan oleh pihak ketiga *(vendor)*. Jadi dalam mengembangkan *e-Government* tersebut BP2T Kota Malang tidak berdiri sendiri melainkan adanya hubungan yang intraktif dengan pelaku usaha sebagai pihak ketiga. Ketiga, pada BP2T Kota Malang telah menyiapkan fasilitas untuk melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga lain yang bisa melalui *email* maupun telepon seluler, ataupun bisa mengunjungi *website* perizinan. Tidak hanya itu masyarakatpun dapat melakukan pengaduan secara elektronik dan dapat berintraksi dengan BP2T Kota Malang melalui jejaring sosial twitter. Keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintaah dan pemerintah daerah otonom. Pada BP2T Kota Malang sudah membuat Sistem Informasi Manajemen yang berguna untuk memberikan pelaporaan statistik terhadap perkembangan pelayanan perizinan, hanya saja untuk SIM tersebut arsip-arsip pelayanan perizinan masih belum semuanya digital. Adapun proses kerja yang transparan, masyarakat atupun pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melihat perkembangan pelayanan perizinan maupun informasi-informasi mengenai pelayanan perizinan melalui *website* perizinan. Adapun untuk faktor penghambat penyelenggaraan *e-Government* pada BP2T Kota Malang, yaitu: 1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang masih semi konvensional. 2) Belum adanya peraturan mengenai penyelenggaraan perizinan dengan menggunakan *e-Government*. 3) Masih adanya kekurangan infrastruktur seperti belum adanya digital signature dan *wifi hotspot* yang hanya digunakan oleh BP2T Kota Malang (tidak gratis untuk masyarakat) (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.12, Tahun 2013, Hal. 2145-2151).

Temuan Penelitian Sintia Andayani (2016) tentang Inovasi Pelayanan Publik (Studi Upaya Inovasi Paket Perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, adalah dengan paket perizinan dapat dilakukan penyederhanaan, penyingkatan waktu, dan hemat biaya dalam proses perizinan. Sementara itu,

Temuan Penelitian Muhammad Insa Ansari (2016) tentang Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya, adalah SOP dominan diikuti dan pembentukan Pelayanan s/d ke bawah; sedangkan Temuan Penelitian Maria Agustini Permata Sari (2014) tentang Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya adalah terdapat penyederhanaan jumlah ijin, pembatasan calo perijinan dan penyederhanaan *business process;* komitmen pimpinan dan semangat tinggi para pegawai. Lebih lanjut, Dewi Puspita Sari, Nurlinah, dan A.Lukman Irwan (2013) tentang Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar; Temuannya : adanya model inovasi pelayanan perizinan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya,

Efektivitas Penyelenggaraan *E-Government* Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang oleh Raharwindy Kharisma Sudrajat, Endah Setyowati, Sukanto (2015), Temuannya : jaringan informasi dapat diakses secara bebas dan dimanapun saja melalui website perizinan, hanya belum berdasar hukum dan hubungan yang interaktif dengan dunia usaha.

Dari kelima penelitian di atas inovasi pelayanan yang dilakukan masih bersifat smoot/ bertahap, sementara penelitian Inovasi Pelayanan di DKI Jakarta bersifat radikal, sangat cepat.. Disinilah letak kebaruan penelitian ini/State of The Art nya.

Teori Inovasi Pelayanan

Pengertian Inovasi

Menurut Damanpour (Yogi,2008:3) inovasi dapat berupa produk maupun jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur administrasi, atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sementara Wijayanti (2008:42) berpendapat bahwa inovasi pada sektor publik lebih ditekankan aspek "perbaikan" yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas, murah serta terjangkau.

Menurut Quinn (Edy Sutrisno,2010:104 – 105), menegasan bahwa inovasi terdiri dari proses tekhnologis, manajerial dan sosial, dimana gagasan atau konsep baru pertama kali diperkenalkan untuk dipraktikkan dalam suatu kulur.

Adapula yang berpendapat bahwa inovasi adalah adopsi awal dari gagasan – gagasan baru (Rogers dan Kim, 1985). Inovasi disamakan dengan perbaikan – perbaikan dan perubahan – perubahan mendasar namun bukan perubahan revolusioner (Merritt,1984).

Menurut West (Edy Sutrisno,2010:105), inovasi adalah pengenalan cara baru yang lebih baik dalam mengerjakan berbagai hal di tempat kerja. Inovasi tidak mengisyaratkan pembaruan secara absolut dan perubahan bisa dipandang sebagai suatu inovasi jika perubahan tersebut dianggap baru bagi seorang, kelompok atau organisasi yang memperkenalkannya.

Menurut Robbin (Kusdi,2009:224) inovasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, inovasi tekologis (*thcnological innovation),* yaitu menyangkut penggunaan alat, teknik, mesin, atau sistem – sistem baru yang ditujukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang lebih unggul. Kedua, inovasi administratif (*administrative innovation)*, yaitu implementasi berbagai perubahan pada struktur dan proses administratif dalam pengelolaan organisasi. Secara umum, mengembangkan inovasi dibutuhkan perubahan struktural ke arah organisasi yang lebih organik. Artinya, ciri – ciri organisasi mekanistik, seperti prosedur dan aturan – aturan yang ketat, hierarki dan kontrol, sentralisasi pengmabilan keputusan, sedapat mungkin perlu dikurangi.

Menurut Johanes Basuki (2013:179) Inovasi Pelayanan Publik adalah pergeseran makna, prinsip – prinsip, proses, prosedur dan model pelayanan publik yang lama ke yang baru dan dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Evert M.Rongers(Yogi, 2008:9) mendefinisikanbahwa inovasi sebagai sebuah ide, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi pelayanan publik adalah penerapan ide – ide, baik berupa suatu produk ataupun jasa dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan yang sudah ada sehingga tercapainya suatu keefektivitasan dan keefisienan.

Tipologi Inovasi Dalam Sektor Publik

Menurut Khairul Muluk (2008:45) terdapat 5 tipologi Inovasi yang ada didalam sektor publik:

1. Inovasi Produk/Jasa pelayanan : perubahan bentuk dan desain produk atau layanan baru atau memperbaharui layanan yang sudah ada.
2. Inovasi Proses pelayanan : pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebutuhan kebijakan untuk berinovasi.
3. Inovasi Metode pelayanan : Perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam hal memberikan pelayanan.
4. Inovasi Kebijakan : Mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru.
5. Inovasi Sistem : Cara baru atau yang diperbarui dalam interaksi dengan aktor lain dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Level Inovasi

Aspek penting lain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang berlangsung. Mulgan dan Albury berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai transformatif. (Khairul Muluk,2008:46):

1. Inovasi Inkremental
   Yaitu inovasi yang terjadi membawa perubahan – perubahan kecil terhadap proses layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi yang berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian inovasi inkremental memainkan peran penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan serta mendukung nilai tambah uang.
2. Inovasi Radikal,
   Yaitu merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara – cara yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan yang lama terabaikan.
3. Inovasi Transformatif
   Yaitu inovasi yang membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dengan mentransformasi semua sektor dan secara dramatis mengibah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.

Kategori Inovasi

Terdapat dua kategori Inovasi yang diungkapkan Khairul Muluk (2008:48), yaitu :

1. *Sustaining Innovation* (Inovasi terusan): merupakan inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap berdasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang telah berjalan atau produk yang sudah ada.
2. *Discontinues Innovation* (Inovasi terputus): merupakan inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Atribut Inovasi

Selanjutnya inovasi dapat berarti menggantikan cara, teknologi, atau penemuan lama yang sudah tidak efektif dalam menjawab suatu kebutuhan tertentu. Walaupun tidak ada

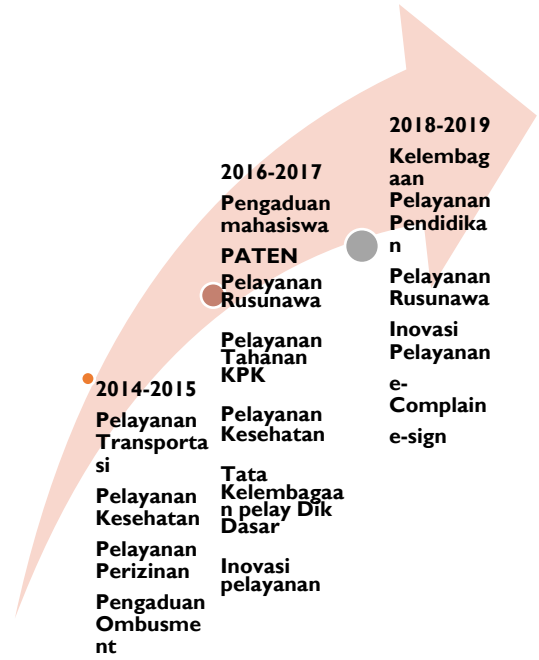
kesepamahan definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi memiliki ciri khas dari inovasi itu sendiri.

Menurut Evert M.Rongers (Yogi, 2008: 16-18) mencoba mendifinisikan inovasi pelayanan publik melalui sudut pandangnya, dan menyimpulkan atribut dalam sebuah inovasi, yaitu:

1. *Relative Advantage* (keuntungan relatif),
   Inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruanyang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri dan berbeda dengan lainnya.
2. *Compatibility* (kesesuaian)
   Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompitabel atau sesuai dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari transisi menuju inovasi yang baru dan memudahkan proses adaptasi secara lebih cepat.
3. *Complexity* (kerumitan)
   Dengan inovasi yang baru kemungkinan tingkat kerumitan menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya, namun demikian karena sebuah inovasi sebenarnya menawarkan cara yang lebih baik, sehingga hanya diperlukan proses adaptasi.
4. *Reliability* (kemungkinan dilakukan percobaan).
   Inovasi bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan inovasi yang lama, sehingga diperlukan fase "uji coba" dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk mencobanya.
5. *Observability* (dapat diamati)
   Inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana inovasi tersebut dapat mengasilkan sesuatu yang lebih baik.

Dengan atribut sebagaimana tersebut, maka sebuah inovasi merupakan cara baru yang dipercaya mampu menggantikan cara – cara lama dalam proses maupun hasilnya. Dengan demikian, inovasi mencoba untuk secara terus menerus mampu menggantikan dan mengembangkan cara – cara (metode) lama, bahkan prinsip – prinsip lama yang sudah tidak relevan lagi termasuk model, prosedur yang sudah dinilai usang dan lebih dari itu menurut evaluasi dan masukan para pelanggan tidak efektif dan efisien, harus segera diganti dengan yang baru.

Road Map Penelitian Tim Peneliti



Kerangka Teoritik:

Keinginan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat mendorong DPMPTSP untuk melakukan Inovasi Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Inovasi Pelayanan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Yang dibatasi pada Pelayanan AJIB dan IMB 3.0 Cengkareng Jakarta Barat. Teori yang digunakan untuk membedah Inovasi Pelayanan dalam penelitian ini menggunakan Teori Roger dengan 5 atributnya sebagai aspek dalam penelitian Kualitatif ini, yaitu: 1). *Relative Advantage* (keuntungan relatif); 2). *Compatibility* (kesesuaian); 3). *Complexity* (kerumitan); 4). *Reliability* (kemungkinan dilakukan percobaan); dan 5*). Observability* (dapat diamati).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif Analitis.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian:

Penelitian tentang Inovasi Pelayanan AJIB dan IMB 3.0 berlokasi di UP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cengkareng Jakarta Barat.

Waktu Penelitian dari bulan Januari-Maret 2018

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Observasi partisipasi
2. Wawancara Mendalam, dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara
3. Telaah dokumentasi

Observasi dilakukan dengan mengamati bentuk-bentuk inovasi pelayanan dari pendaftaran berkas samapai dengan dokumen selesai.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis yang dipersiapkan sebelumnya berdasarkan beberapa atribut Inovasi yang menjadi indikator, yaitu : 1).*Relative Advantage* (keuntungan relatif); 2). 2).*Compatibility* (kesesuaian); 3). *Complexity* (kerumitan); 4). *Reliability* (kemungkinan dilakukan percobaan); dan 5*).Observability* (dapat diamati); yang ditujukan pada Informan masyarakat yang urus dokumen dan Pegawai Dinas PM & PTSP;

Dokumen yang diacu dalam penelitian ini antara lain : 1).Buku Laporan Tahunan; 2). Buku Hasil Audit; 3). Formulir yang ada; 4). LAKIP Dinas 2017;formulir2; 5) Surat Edaran Gubernur tentang AJIB dan IMB 3.0

Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini Informan ditentukan secara Purposif , bagi Pegawai PTSP sebanyak 2 orang; bagi Masyarakat yang mengurus dokumen secara Accidental Sampling sebanyak 3 orang

Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Mac Nabb (2002:148) yang mengkatagorikan tahapan analisis data penelitian ke dalam 6 (enam) tahapan kegiatan, yaitu :1).*Organize the Data* (Pengorganisasian Data); 2).*Generate Categories, Themes and Patterns*; 3).*Code the Data* (Pengkodean Data); 4). *Apply the Ideas, Theme and Categories* (Penerapan Ide, Tema dan Kategorisasi); 5). *Search for Alternative Eksplanations* (Pencarian Alternatif Penjelasan); dan 6). *Write and Present the Report* (Menulis dan Menyajikan Laporan). Uji Keabsahan Data menggunakan Triangulasi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Pelaksanaan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor)

Metode Layanan AJIB :

1). Metode Order *Online*

Order *online* adalah memesan layanan AJIB via aplikasi maupun *whatsapp*. Order layanan AJIB menggunakan aplikasi di *handphone,* terlebih dahulu mendownload aplikasi AJIB di HP berbasis *android* maupun IOS,

Sedangkan aplikasi AJIB yang digunakan petugas adalah aplikasi AJIB internal.

Petugas menerima order layanan AJIB melalui aplikasi di *handphone* petugas AJIB.

Petugas AJIB dibekali mesin EDC untuk melayani pemasukan daerah dari retribusi. Mesin EDC yang digunakan oleh petugas AJIB merupakan hasil kerja sama dengan bank DKI, untuk mempermudah dan memberikan layanan yang transparan dan akuntabel.

2). Metode *Order offline,* caranya *:*

a) Telp *call center* unt jemput dan antar berkas
b) Atau ketika datang ke kantor PTSP, masy minta diteruskan oleh AJIB untuk antar dan jemput izin yang sudah jadi.
c) AJIB Motor

AJIB : *Mobile Service Unit* (MSU)

a) Perizinan bisa diproses sehari ;
b) Jenis Izin yg diproses di MSU antara lain: Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM), Legalisir Perizinan, dan Izin Penelitian. Lokasi MSU : kawasan industri, pelabuhan, kawasan perkantoran dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Faktor Pendukung

a) Teknologi aplikasi handphone
b) Petugas AJIB difasilitasi Motor dinas
c) Call Center DPMPTSP/ AJIB DKI Jakarta bertugas menerima order layanan offline
d) Petugas AJIB telah ditraining : standar pelayanan maupun pengetahuan syarat-syarat perizinan
e) Petugas AJIB dapat mengedukasi pemohon di lapangan.
f) AJIB Mobil (MSU)

Faktor Penghambat :

a) Kurangnya Sosialisasi layanan AJIB kepada warga DKI Jakarta.
b) Sulitnya menghubungi call center AJIB
c) Over load petugas call center (30 orang) unt se DKI JKT
d) Ketidakjelasan dalam memonitor berkas perizinan yang ingin dilakukan oleh pemohon.
e) Lambat Melayani Keluhan

Hasil Penelitian Inovasi Pelayann Publik IMB 3.0 sebagai berikut :

Tahapan Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan IMB Selesai 3 Jam :

1. 1 jam untuk pembuatan KRK
2. 30 menit untuk konsultasi pemohon/warga
3. 1.30 jam untuk proses pembuatan lampiran gambar serta SK IMB
4. Luas lahan perencanaan dan/atau bangunan maksimal sampai dengan 200m $^{2.}$. Lahan kosong belum ada bangunan atau lahan sudah ada bangunan tetapi bangunan tidak dipakai lagi dan akan dirobohkan.
5. Pemasukan berkas paling lambat hari Kamis dan Jumat, proses pengukuran dilakukan hari Sabtu atau Minggu serta proses pembuatan KRK dan IMB 3.0 dilakukan hanya di hari Rabu.
6. Updating peta dasar hasil pengukuran lahan khusus untuk IMB 3.0 dikirim ke tim Pengolah Data Sistem Aplikasi melalui email muhardiyan.erawan@gmail.com paling lambat hari Senin pukul 12.00 WIB
7. Kepala Kantor Kota PTSP dan Kasatlak PTSP Kecamatan melakukan updating peta dasar ke BPTSP.yantek@Jakarta.go.id
8. Ketentuan desain mengikuti pilihan template desain yang akan digambarkan oleh arsitek berupa denah, 2 tambak dan 1 potongan bangunan serta tidak ada perubahan desain ketika gambar lampiran IMB telah tercetak mengikuti pilihan desain yg disediakan
9. Penentuan lokasi yang diizinkan dan persyaratan lainnya ditentukan dan terlampir dalam Surat Edaran.

Dari Sudut pandang Rogers (2008) inovasi sebagai sebuah ide, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi, Pelayanan IMB 3.0 merupakan ide yang revolusioner dari Pemda DKI Jakarta dan diterima sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat.

Karena Inovasi Pelayanan IMB 3.0 :

1). bertujuan untuk memperbaiki pelayanan IMB yang sebelumnya diselesaikan dengan waktu lama dan melalui berbagai SKPD;
2). Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Dengan cepat penyelesaian dokumen IMB maka mendorong masyarakat DKI Jakarta yang memiliki lahan seluas/ luas kurang dari 200 m^2 untuk membuat IMB. Bahkan dengan adanya retribusi gratis sangat mendrong sekali masyarakat untuk membuat IMB.

Selain itu ditinjau dari atribut Inovasi Pelayanan menurut Rogers dalam Yogi (2008) :

a). Keuntungan Relatif;

Inovasi Pelayanan IMB 3.0 ini memberikan banyak keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah. Bagi masyarakat, keuntungan yang diperoleh antara lain retribusi gratis, Design Rumah Gratis, waktu lebih cepat

selesai. Bagi Pemda, keuntungannya mendapatkan data base tata ruang dengan tepat tidak kira-kira, ini penting untuk gerak Pemda dalam melakukan perubahan/pembangunan ke depan.

a) Kesesuaian;
b) Izin Mendirikan Bangunan diberikan asal sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan daerah cagar budaya, bukan daerah resapan air.
c) Kerumitan; masyarakat dengan adanya Pelayanan IMB 3.0 urusan lebih lancar dan mudah tidak ada kerumitannya.
d) Kemungkinan dilakukan percobaan, pada tahap Pelayanan IMB 3.0 awalnya baru diterapkan di 3 Kecamatan; tahun 2016 tambah 8 kecamatan; 2017 tambah 32 kecamatan; 2018 semua kecamatanf
e) Dapat diamati, pelayanan baru tersebut prosesnya dapat diamati di kantor kecamatan dan hasil produknya juga dapat dilihat.

Dari analisis di atas, dari hasil wawancara dengan pegawai maupun masyarakat masih terdapat kelemahan yaitu belum banyak masyarakat yang tahu atau kurang sosialisasi dan masih banyak calo.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan Untuk AJIB dan IMB 3.0

Pelayanan Gratis Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dan Pelayanan IMB 3.0 sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan masyarakat cukup puas

Faktor Pendukung AJIB:

1. Teknologi aplikasi handphone
2. Petugas AJIB difasilitasi Motor dinas
3. Call Center DPMPTSP/ AJIB DKI Jakarta bertugas menerima order layanan offline
4. Petugas AJIB telah ditraining : standar pelayanan maupun pengetahuan syarat-syarat perizinan
5. Petugas AJIB dapat mengedukasi pemohon di lapangan.
6. AJIB Mobil (MSU)

Faktor Pendukung IMB 3.0

1. Gratis;
2. Desain tersedia;
3. Cepat;

Faktor Penghambat AJIB

1. Kurangnya Sosialisasi layanan AJIB kepada warga DKI Jakarta.
2. Sulitnya menghubungi call center AJIB
3. Over load petugas call center (30 orang) unt se DKI JKT
4. Ketidakjelasan dalam memonitor berkas perizinan yang ingin dilakukan oleh pemohon.
5. Lambat Melayani Keluhan

Faktor Penghambat IMB 3.0

1. Kurang sosialisasi
2. Calo masih banyak
3. Ruang pelayanan PTSP Cengkareng Sempit

Rekomendasi

Untuk Pelayanan AJIB

1. Ditingkatkan Sosialisasi layanan AJIB kepada warga DKI Jakarta.
2. Tenaga di call center AJIB ditambah
3. Perlu tambahan menu dalam Aplikasi untuk memonitor Proses penyelesaian berkas pemohon.
4. Manajemen pengaduan perlu dikelola lebih baik untuk Pelayanan IMB 3.0
5. Sosialisasi Pelayanan IMB selesai 3 Jam perlu ditingkatkan sehingga masyarakat makin banyak yang membuat IMB;
6. Perluasan Ruang Pelayanan di PTSP Cengkareng
7. Perlu diterbitkan peraturan Perundang-undangan tentang larangan adanya Calo.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B., 2003, *The New Public Service: Serving, Not Steering,* New York: M.E. Sharpe (references)

[2] Lovelock, Christopher H.. 1992. *Managing Services : Marketing, Operations, and Human Resources*. 2nd edition, New Jersey, Prentice Hall (references)

[3] Moleong, L.J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya (references)

[4] Parasuraman, Zethitamal dan Berry, 2000. SERVQUAL, (references)

[5] Dewi Puspita Sari, Nurlinah, dan A.Lukman Irwan Government, 2013. Inovasi Pelayanan Perizinan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Makassar; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, Juli 2013 (in presszs)

[6] Maria Agustini Permata Sari, 2014. Inovasi Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (Bpmpt) Kabupaten Kubu Raya; Jurnal Borneo Administrator / Volume 10 / No. 2 / 2014) (in press).

[7] Muhammad Insa Ansari (2016). Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Usaha di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 17-35(in press).

[8] Raharwindy Kharisma Sudrajat, Endah Setyowati, Sukanto, 2015. Efektivitas Penyelenggaraan *E-Government* Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang ; Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No.12, Tahun 2013, Hal. 2145-2151(in press).

[9] Sintia Andayani, 2016. Studi Upaya Inovasi Paket Perizinan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan; Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016(in press).

[10] Wenny Aztriyani Pahusa dan Retnowati WD Tuti, "Simyandu"Is Forms Of Innovation In Public Service Agency Integrated Licencing Services Of South Tangerang City, Proceeding Seminar International IMC, 15 Oktober 2016 (in press)

[11] Retnowati WD Tuti, 2013. Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bogor: Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Program Pascasarjana-Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang (in press)

[12] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

[13] DPRD : Kinerja PDAM DKI Jaya Buruk Http://www.republika.co.id/berita/ breaking-news/metropolitan/10/05/08/114817-dprd-kinerja-pdam-dki-jaya-buruk.

Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia-Thailand Dalam Menanggulangi HIV AIDS

Revlinur Rahmawati
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca sarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Revlinurrahmawati@gmail.com

ABSTRAK —Kasus HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang kerap kali menjadi problem kemasyarakatan yang serius, kasus ini berkembang dengan pesat di dunia dan penyebaran virus HIV yang semakin pesat di berbagai negara menjadi sebuah permasalahan yang besar, PBB melalui program Millennium Development Goals menyantumkan HIV/AIDS sebagai focus bagi negara-negara untuk ditangani dengan serius.Penyebaran HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama dan hukum bahkan dampak secara nyata, cepat atau lambat, menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik di Indonesia maupun Thailand kasus ini menjadi suatu masalah social yang harus di tanggulangi dengan serius oleh pemerintah, tujuan dari peniltian ini sendiri untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang diberlakukan dari pemerintah Indonesia dan Thailand seerta perbandingan dari kebijakan-kebijakan kedua Negara tersebut dalam menanggulangi kasus ini. Metode penelitian ini yang menggunakan teori kebijakan publik, dimana antara Indonesia dan Thailand memiliki perbedaan kebijakan dalam implementasi program kebijakan dalam penanggulangan HIV AIDS.

Kata Kunci —*Kebijakan Publik, Penanggulangan, HIV/AIDS, Indonesia, Thailand*

I. PENDAHULUAN

Kasus HIV/AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan yang kerap kali menjadi problem kemasyarakatan yang serius, kasus ini berkembang dengan pesat di dunia dan penyebaran virus HIV yang semakin pesat di berbagai negara menjadi sebuah permasalahan yang besar, PBB melalui program Millennium Development Goals menyantumkan HIV/AIDS sebagai focus bagi negara-negara untuk ditangani dengan serius. Di Indonesia sendiri, Kementerian kesehatan republic Indonesia direktoral jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit melaporkan terkait perkembangan HIV/AIDS di Indonesia, dimana HIV dari bulan januari sampai dengan maret 2017 jumlah infeksi HIV yang dilaporkan sebanyak 10.376 orang, persentase infeksi HIV tertinggi dilaporlkan pada kelompok umur 25-49 tahun. Dimana 17.6 % terjadi pada masa produktif antara 20-24 tahun. Hal tersebut akan berdampak sangat besar ada perekonomian suatu negara untuk jangka panjang.

Epidemi HIV/AIDS di Indonesia sudah berlangsung selama 15 tahun dan diduga masih akan berkepanjangan karena masih terdapatnya faktor-faktor yang memudahkan penularan penyakit ini. Dua cara penularan infeksi HIV saat ini adalah melalui hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan Napza suntik. Dalam sepuluh tahun mendatang, penyakit ini mungkin belum akan dapat ditanggulangi sehingga masih merupakan kesehatan masyarakat dan juga mempunyai implikasi sosial – ekonomi yang luas. Penderitaan bukan saja akan dialami oleh orang yang tertulari HIV/AIDS tetapi juga akan dirasakan oleh keluarga dan masyarakat. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegah dan obat yang dapat menyembuhkan. (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2007)

Penyebaran HIV/AIDS bukan semata-mata masalah kesehatan tetapi mempunyai implikasi

politik, ekonomi, sosial, etis, agama dan hukum bahkan dampak secara nyata, cepat atau lambat, menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2007)

Penyakit infeksi HIV adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk melawan segala penyakit yang datang. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala yang timbul setelah kekebalan menurun. Gejala yang timbul antara lain demam, batuk, atau diare yang terus-menerus, berat badan menurun, timbulnya bercak-bercak merah kehitaman pada area tertentu, dan lain-lain. Kumpulan gejala penyakit akibat lemahnya sistem kekebalan tubuh inilah yang disebut AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Perjalanan dari awal terinfeksi HIV sampai terlihat gejala-gejala di atas atau yang kita sebut penyakit AIDS memerlukan waktu sampai 5-7 tahun. HIV dapat ditularkan melalui: darah, jarum suntik, tindik atau tato yang tidak steril secara bergantian, air mani (cairan, bukan sperma), cairan vagina, dan air susu ibu (ASI). (ESQ-news, 2009)

Dalam kasus HIV/AIDS ini perlunya peran pemerintah dalam menangani penyebaran virus serta permasalaan-permasalahan yang terjadi pada pengidap HIV/AIDS itu sendiri. Stigma dan Diskriminasi telah menjadi hukuman social bagi masyarakat di berbagai belahan dunia terhadap pengidap penyakit tersebut bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa penolakan, pengasingan oleh masyarakat hingga keluarga, diskriminasi dan penghindaran atas orang yang terinfeksi HIV, hal tersebut menimbulkan lingkungan yang tidak kondusif dan dapat memperburuk kondisi ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) hal-hal tersebut bersipat patal bagi proses penyembuhan bahkan proses untuk mengetahui perkembangan penyakit karena orang menjadi enggan melakukan tes HIV dikarenakan rasa minder yang dirasakan terlebih dahulu.

Kasus yang bersifat diskriminatif masih banyak dilakukan dan dijumpai di masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS, Diskriminasi merupakan perlakuan yang membeda-bedakan berdasarkan ras,jenis kelamin dan lain sebagainya. Diskriminasi terhadap ODHA kerap dijumpai, bahkan banyak juga terjadi pada pelayanan kesehatan dimana pengidap HIV/AIDS tidak mendapat pelayanan kesehatan dengan baik, pun tetjadi penolakan perawatan, kasus diskriminatif tidak hanya dalam pelayanan kesehatan, namun juga terjadi dalam pekerjaan, pendidikan, spritualitas. Dimana dalam masyarakat pengidap HIV/AIDS di anggap malapetaka dan sampah masyarakat yang harus dihindari, dan dalam spritualitas dimana penyakit tersebut merupakan sebuah kutukan sehingga mereka dipandang sebelah mata sebagai orang yang kerap melakukan dosa atau pendosa sehingga mendapat azab dari tuhan, hal seperti ini atau doktrin-doktrin seperti ini lah yang membuat para pengidap ODHA semakin merasa terpukur, yang dimana sesungguhnya mereka memerlukan support dari orang-orang sekitar terutama keluaga, kerabat serta pelayanan kesehatan yang baik serta kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan mereka.

Sejak ditemukannya kasus HIV AIDS pertama di Indonesia, pemerintah telah banyak merumuskan kebijakan-kebijakan dan dilaksanakan baik menyangkut program, pencegahan, pengobatan dan hal-hal lainnya yang terkait penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

HIV AIDS tidak hanya menyangkut masalah kesehatan tapi juga masalah social, yang kita hadapi bersama, maraknya pergaulan bebas remaja dan pelacuran berujung pada terinfeksinya seseorang dengan virus HIV.

Masalah HIV AIDS ini juga dihadapi oleh Negara Thailand, yang merupakan bagian dari perserikatan negara-negara di Asia Tenggara, virus HIV AIDS di negara seribu candi ini juga menjadi sorotan dimana mempunyai tingkat penyberan virus yang cukup tinggi, karena maraknya prostitusi di negara tersebut. Meskipun

di Asia jumlah penderita HIV AIDS tergolong kecil disbanding Afrika, namun penyakit ini masih menjadi ancaman bagi kestabilan Negara. (Shantic, 2017)

Untuk menangani kasus ini tentunya setiap negara memiliki kebijakan-kebijakan masing-masing dalam penanggulangan terhadap HIV AIDS, dari perbedaan kebijakan tersebut dapat memungkinkan terjadinya perbedaan hasil pula dalam penanggulangan HIV AIDS.

A. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian yang Penulis paparkan di atas, maka Rumusan Masalah yang bisa di ambil adalah "Bagaimana perbendingan kebijakan Indonesia - Thailand dalam penanggulangan HIV/AIDS?"

B. *Tujuan dan Manfaat Penelitian*

Tujuan dari penerilitan ini, Dalam Penulisan Jurnal ini, adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untukmengetahui perbandingan kebijakan Inodnesia – Thailand dalam menangani kasus HIV/AIDS
2. Untuk mengetahui perbedaan kebijakan kedua Negara, dan dapat menjadi referensi dalam melihat tolak ukur keberhasilan dari kebijakan masing-masing, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik lagi.

Manfaar Riset, dimana Setelah melihat latar belakang dan tujuang yang telah dipaparkan, adapaun harapan penulis agar tesis ini dapat berkontribusi sebagai berikut :

1. Secara Akademis
   Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan akademis untuk para penstudi Hubungan Internasional yang focus pada kajian politik baik dalam dan luar negri, terkhusus nya dalam perbandingan kebijakan antara Negara satu dan lainnya dalam menangani isu yang sama-sama sedang dihadapi sebuah negara.
2. Secara Praktis
   Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan rujukan dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dalam negeri terutama dalam bidang kesehatan, terkhusus dalam menanggulangi kasus serius seperti virus HIV AIDS yang dapat menjadi bencana dikemudian hari jika tidak ditanggulangi dengan baik, demi kepentingan nasional dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

C. *Kajian Pustaka*

Dalam penelitian Zaris Budi, dengan judul "Kebijakan tentang pengendalian HIV AIDS di Inondeia "2013 Indonesia adalah salah satu dari negara di asia tenggara yang memiliki kerentanan HIV yang berdampak pada perubahan ekonomi dan kehidupan social. Penularan HIV umumnya terjadi akibat perilaku manusia, sehingga menempatkan individu dalam situasi yang rentan terhadap infeksi. Dalam menangani penularan HIV dan menanggulangi permasalahan ini, dalam penelitian ini dimana Indonesia memiliki Strategi pencegahan HIV melalui program nasional, meliputi kebijakan umum dan kebijakan operasional serta tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan umum dimana upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, upaya pencegahan HIV AIDS pada anak sekolah, remaja dan masyarakat umum diselenggarkan melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi guna mendorong kehidupan yang lebih sehat, upaya penanggulangan hiv aids merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehta,pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.

Kebijakan Operasional dimana pemerintah pusat bertugas melakukan regulasi dan standarisasi secara nasional kegiatan program AIDS dan pelayanan bagi ODHA, penyelenggaraan dan pelaksanaan program dilakukan sesuai azas desentralisasi dengan

kabupaten/kota sebagai titik berat manajemen program, pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya ARV maupun reagen pemeriksaan secara berkesinambungan, Pengembangan layanan bagi Odha dilakukan melalui pengkajian menyeluruh dari berbagai aspek yang meliputi : situasi epidemi daerah, beban masalah dan kemampuan, komitmen, strategi dan perencanaan, kesinambungan, fasilitas, SDM dan pembiayaan. Sesuai dengan kewenangannya pengembangan layanan ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diberitahukan kepada yang bersangkutan tetapi wajib dirahasiakan kepada pihak lain;

Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada Odha. Keberpihakan kepada Odha dan masyarakat (patient and community centered); Upaya mengurangi infeksi HIV pada pengguna napza suntik melalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction) dilaksanakan secara komprehensif dengan juga mengupayakan penyembuhan dari ketergantungan napza; Penguatan dan pengembangan program diprioritaskan bagi peningkatan mutu pelayanan, dan kemudahan akses terhadap pencegahan, pelayanan dan pengobatan bagi Odha Layanan bagi Odha dilakukan secara holistik, komprehensif dan integratif sesuai dengan konsep layanan perawatan yang berkesinambungan; Pengembangan layanan dilakukan secara bertahap pada seluruh pelayanan yang ada sesuai dengan fungsi dan strata pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan sarana, tenaga dan dana. (Budi, 2013)

Dalam penelitian lainnya Tri Rini Puji Lestari dengan judul "Kebijakan Pengendalian HIV/AIDS di Denpasar" dimana Kebijakan penanggulangan HIV AIDS sangat ditentukan oleh cara pandang pemerintah terhadap penyakit HIV AIDS, saat ini di indonesia kebijakan lebih terfokus pada penanganan kasus, dimana upaya penanggulangan HIV AIDS harus memperhatikan nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta keadilan dan kesetaraan gender. Dengan meninggkatkan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit dengan memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya nya HIV, perawatan dan dukungan pengobatan, serta dukungan kepada ODHA dan mereka yang terdampak HIV AIDS bertujuan untuk memberdayakan dan mempertahankan kehidupan social ekonomi yang layak dan produktif. (Lestari, 2013)

Dalam penelitian selanjutnya Phoolchareon dengan judul "Evolution of Thailand's strategy to cope with the HIV/AIDS epidemic" upaya Negara Thailand dalam mengatasi dan menanggulangi HIV AIDS dimana sector perekonomiannya melallui pariwisata memang mengalami kemerosotan dengan masalah virus HIV yang sedang mengancam, namun dengan sikap siaga Thailand melakukan pengendalian terhadap kasus ini, selain mengatasi isu tersebut, Thailnd melakukan tindakan pencegahan dalam rangka mengurngi jumlah penderita HIV. "Thailand's strategy for HIV/AIDS prevention and care has evolved through a number of stages. The evolution of the policy may be categorized into three main phases – confrontation with the new epidemic; creation of unified alliances; and alleviation of the consequences of HIV/AIDS" (Phoolchareon, 2005). Di Thailand raja pemegang kekuasaan tertinggi, dalam menanggapi kasus ini raja menegaskan bahwa "The HIV/AIDS strategy has evolved to become an integral part of broader political reform in terms of decentralization, universal health care coverage and public sector reform. Evaluations should be conducted to assess the capabilities of local authorities and communities to manage the extensive endeavours of the HIV/AIDS programme. As financial support from central authorities declines, the firmness of the foundation of Thai society with respect to its ability to cope with the AIDS threat will be tested." (Phoolchareon, 2005).

Bentuk kepedulian masyarakat, pemerintah, serta semua subyek pembangun negara dalam mengatasi kasus HIV/AIDS di Thailand ditunjukkan dengan dibangunnya hospice sebagai tempat ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). ODHA Thailand merasa mereka dianggap sama seperti manusia dengan keadaan normal dan sehat dengan adanya hospice. Bentuk kepedulian ini berawal dari kesadaran pemerintah yang memberikan praktik langsung kepada masyarakat, sehingga kesadaranpun timbul pula di tengah-tengah masyarakat akan pencegahan virus HIV. (Phoolchareon, 2005)

Selanjutnya Dalam penelitian Elizabeth McCrocklin dan Elizabeth Wiley dengan judul "Thailand : Addressing HIV/AIDS Proven Solutions and New Problems" dalam penelitian ini dimana penulis menujjukan keunggulan dari cara Thailand dalam menanggulangi HIV AIDS terutama dalam epidemic yang dipicu oleh seks komersial, dimana kebijakan ini melibatkan beberapa sector kunci kementerian kesehatan, terutama pemilik rumah seks komersilan, dan pemerintah provinsi, dimana sosialisasinya dalam mempromosikan kondoms dalam seks komersial, Pemimpin pusat melakukan penceghan dan pengendalian prioritas utama, "AIDS prevention and control became a national priority at the highest level, emphasizing progressive policies to encourage safer behavior. Thailandís response was based on a political commitment to tackle difficult social issues, such as sexual behavior and commercial sex work. The government, in particular the prime minister, made HIV/AIDS prevention a priority and focused on decreasing high-risk behavior" (Wiley, 2005).

D. *Kerangka Teori*

Konsep Kebijakan Publik oleh Thomas R. Dye

Kebijakan Publik atau Public Policy merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengkiat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkaan sanksi.

Menurut Thomas R. Dye (1981) kebijakan publik ialah apa yang dilakukan maupun apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, menurut Thomas R.Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan public adalah "segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilannya". Dalam pemahaman bahwa "keputusan" termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk "tidak memutuskan" untuk mengurus suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada apa yang didefinisikan oleh Thomas R.Dye di atas.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

a) Kebijakan public berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaanya.
b) Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
c) Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Dalam melakukan perumusan kebijakan Publik dapat dilakukan melalui beberapa tahap penyusunan :

Yang pertama penyusunan agenda, dimana pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan penyusunan agenda sebagai agenda bersama. yang kedua formulasi kebijakan, dimana pada tahap ini para pejabat merumuskan suaru alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga adopsi kebijakan, dimana pada tahap ini, alternative kebijakan yang di adposi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. Yang ke empat implementasi kebijakan dimana pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit teknis pemerintah dengan mendayagunakan sumber daya finansial dan manusia, yang terakhir penilaian kebiajakan, dimana pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutfi,

legislative dan peradilan memenuhi persyarakatan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Moleong (2005) bahwa penelitian kualitatif memiliki makna untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sebuah perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yang bertujuang untuk menggambarkan fakta-fakta kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan pemerintah Thailand dalam menanggulangi kasus HIV AIDS di Negara masing-masing.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua yakni data primer Adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dari informan serta hasil observasi. dan data sekunder Adalah data yang diperoleh melalui media seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam teknik pengumpulan data, dimana Metode pengumpulan data dimana penulis menggunakan telaah pustaka atau Library Reseach, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya, literature ini bisa berupa buku-buku, Jurnal, Dokumen, Situs Internet dan Surat kabar dimana yang terpercaya ataupun Laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yangs edang peneulis teliti.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Komisi Penanggulangan AIDS mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan penanggulangan di tingkat nasional. Masing-masing instansi terkait di tingkat pusat diharuskan membentuk kelompok kerja penanggulangan HIV/AIDS dan membuat rencana penanggulangan yang selaras dengan Strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan, dan menyiapkan sumber daya terutama tenaga dan dana. (Komisi Pneanggulangan HIV AIDS, 2017)

Kebijakan public yang dimana melalui proses perumusan kebijakan sampai evaluasi kebijakan, dalam program kebijakan HIV AIDS di Inonesia sendiri berupa Pencegahan, Pengobatan perawatan serta dukungan terhadap ODHA, menciptakan lingkungan kondusif, serta kesinambungan penanggulangan.

Kebijakan public di Thailand terkait kasus penanggulangan HIV AIDS, berupa pencegahan, pengobatan serta perawatan terhadap ODHA, dukungan dan lingkungan yang kondusif, serta kesinambungan penanggulangan. dalam kebijakan nya tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan, namun implementasi dari program-program tersebut memiliki perbedaan antara Indonesia dan Thailand. Dari metode penelitian adalah antara lain paradigma penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data (disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Berikut contoh penulisan Numbering:

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah berupaya keras untuk menanggulangi HIV/AIDS, Strategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS pertama dirumuskan dan digunakan sejak tahun 1994. Berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi akhir-akhir ini telah mendorong semua pihak untuk menyusu strategi nasional yang sesuai dengan kondisi saat ini, data epidemologis menunjukkan bahwa penularan HIV di Inonesia dari tahun ketahum semakin memprihatinkan. Kenaikan jumlah kasus baru dari mereka yang tertulat HIV meningkat sangat tajam.

Tabel I. Jumlah Infeksi HIV yang dilaporkan menurut tahun sampai dengan maret 2017

NO	Tahun	Jumlah kasus HIV/AIDS
1	S.d 2005	859
2	2006	7,196
3	2007	6,048
4	2008	10,362
5	2009	9,793
6	2010	21,591
7	2011	21,031
8	2012	21,511
9	2013	29,037
10	2014	32,711
11	2015	30,935
12	2016	41,250
13	Maret 2017	10,376
	Total	242,699

Dari data di atas, dimana setiap tahunnya di Idonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi dalam kasus HIV AIDS, setiap tahunnya penderita HIV AIDS terus meningkat, terutama dalam populasi kunci, akan kita lihat dalam table di bawah ini.

Tabel II. Persentase infeksi HIV yang dilaporkan menurut kelompok Umur.

No	tahun	20-24	%	25-49	%
1	2010	3,480	16,1%	15,648	72.5%
2	2011	3,113	14.8%	15,490	73.7%
3	2012	2,964	13.8%	15,133	70,4%
4	2013	4,493	15.5%	20,976	72,2%
5	2014	4,894	15.0%	23,512	71.9%
6	2015	4,871	15.7%	21,810	70.55%
7	2016	7,154	17.3%	28,602	69.3%
8	2017	1,823	17.6%	7,220	69.6%

1. Kebijakan Indonesia

a. Pencegahan

Dari tabel di atas dapat kita lihat dimana penderita HIV AIDS banyak pada masa yang masih produktif, di Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan pencegahan sebagai kebijakan pertama, yang program nya berupa melakukan komunikasi informasi dan edukasi pada populasi kunci terutama dalam mengetahui bahayanya HIV AIDS. Pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat rentan termasuk kelompok marginal, serta perhatian terhadap nilai-nilai agama dan budaya, norma masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan. Peningkatan pengetahuan untuk pendidikan formal dan non formal maupun pendidikan umum dan agama dilakukan dengan mengintegrasikan materi HIV AIDS secara sistematis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik, tutor, pelatih, tenaga pembimbing, birokrat dan pimpinan unit kerja yang dapat menerusaknnya kepada bawahan dan anak didiknya. Untuk dapat melaksanakan kegiatan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) dengan baik, perlu meningkatkan kemampuan tenaga yang berada di barisan terdepan seperti tenaga kesehatan, pekerja social, penyuluh lapangan, guru, pelatih utama dan lain lain.

Upaya pencegahan pada populasi beresiko tinggi seperti Penjaja Seks (PS) dan pelanggannya, ODHA dan pasangannya, penyalahguna Napza, dan petugas yang karena pekerjaannya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS melalui pencegahan yang efektif seperti penggunaan kondom, penerapan pengurangan dampak buruk (harm reduction), penerapan kewaspadaan umum (universal precautions) dan sebagainya.

Kegitan-kegiatan dalam program pencegahan

a) Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi
b) Menurunkan kerentanan
c) Meningkatkan penggunaan kondom (namun menuai kontroversi)
d) meningkatkan penyediaan darah yang aman untuk transfusi
e) meningkatkan upaya penurunan prevalensi infeksi menular seksual
f) meningkatkan upaya pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya
g) meningkatkan penerapan kewaspadaan universal
h) menininggkatkan upaya pengurangan penularan HIV pada penyalahgunaan napza suntik.

b. *Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA*

Salah satu keputusan penting dalam sidang PBB yang khusus membahas HIV/AIDS (UNGASS) pada tahun 2001 adalah perlunya memperluas pelayanan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA serta melindungi hak-hak azasi mereka (mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi).

Upaya pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat dan keluarga (community and home – based care) serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.(Komisi Penanggulangan AIDS, 2016)

Kegiatan-kegiatan nya berupa meningkatkan pelaksanaan Advokasi kepada pengambil keputusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan penyediaan obat, dukungan terhadap ODHA tanpa adanya diskriminasi terhadap ODHA dalam masa perawatan dan pengobatan.

c. *Lingkungan Kondusif*

Upaya komunikasi, informasi dan edukasi dalam penanggulangan HIV AIDS telah dilakukan dalam kegiatan pencegahan namun masih sering terjadi diskirminasi terhadap penderita HIV AIDS, perlunya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses penyembuhan agar tidak menjadi hambatan bagi penanggulangan dalam kasus ini. Kegiatan dalam program ini di antaranya melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi stig,a dan diskriminasi serta pelanggaran hak azasi terhadap ODHA dan keleuarganya.

d. *Kesinambungan Penanggulangan*

Agar tujuan dari penanggulangan HIV AIDS ini dapat dicapai, harus adanya kerjasama antara Pemeirntah pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat itu sendiri dalam mencapai tujuan bersama demi mengurangi masalah sosial yang terjadi. Perlunya komitmen yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat pada semua tingkat untuk mendorong pihak yang terlibat dalan pemanggulangan ini, kegitan nya antara lain melakukan advokasi, pelatihan pendidikan, peningkatan mutu dan sarana, serta pendanaan dalam menjalankan program.

2. *Kebijakan Thailand*

Thailand merupakan bagian dari perserikatan negara-negara di asia tenggara, dengan kondisi negara yang lebih maju jika dibandingkan dari negar alainnya, kemajuan Thailand ini terutama dari bidang pariwisatanya yang menjadi pesona dari negara gajah putih ini, namun negara ini juga dikenal dengan wisata dunia malamnya yang gemerlap, termasuk prostitusi, sehingga menyebabkan negara ini menghadapi masalah HIV AIDS yang cukup serius, pada tahun 2016 menurut data UNAIDS dimana Of Thailand's population of more than 60 million, in 2016 it was estimated that 450,000 people were living with HIV and that 6,400 people died of AIDS-related illnesses.1 After sub-Saharan Africa, Asia and the Pacific is the region with the largest number of people living with HIV, with Thailand accounting for approximately 9%.(UNAIDS, 2017)dalam kasus ini Thailandmengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi HIV AIDS sebagai berikut :

a. *Pencegahan*

Di Thailand sendiri, penularan HIV AIDS banyak melalui seks bebas baik melalui prostitusi, hubungan sesama jenis terutama (men who have sex with men) serta penggunaan jarum suntik atau narkoba, transgender, dalam kebijakan ini pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan dimana mensosialisasikan sex aman dengan menggunakan kondom, serta melakukan pencegahan dengan mensosialisasikan pentingnya melakukan pemeriksaan setiap bulannya pada pekerja sex komersial. Dalam kebijakan pencegahan, Thailand melakukan program tes HIV AIDS terutama bagi populasi kunci (anak muda dibawa usia 25 tahun) dimana jika hasil dari tes tersebut mereka terinfeksi HIV, agar segera melakukan perawatan dan pengobatan. Serta pendekatan yang lebih sistematis terhadap pendidikan

tentang HIV AIDS di sekolah ataupun masyarakat.

b. *Perawatan dan pengobatan, dukungan terhadap ODHA*

Dalam kebijakan perawatan dan pengobatan, dimana program dari kebijakan ini Thailand memberikan pengobatan antiretroviral (ART) secara gratis sebagai bagian dari skema asuransi kesehatan dari Negara. Setelah itu program lainnya dimana orang yang telah di diagnosis terkena virus HIV AIDS untuk segera menerima perawatan dan pengobatan.

Dalam program dukungan terhadap ODHA, dimana Thailand sendiri memiliki rumah *Hospice*sebagai tempat ODHA (orang dengan HIV/AIDS), dimana ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah yang memberikan praktik langsung kepada masyarakat, sehingga kesadaran pun timbul di tengah masyarakat akan pencegahan virus HIV ini perlu nya dukungan terhadap penderita nya dalam menjalani proses penyembuhan. Sehingga mereka bisa merasa bahwa mereka sama dengan masyarakat normal lainnya, dan dengan adanya dukungan tersebut membuat proses pengobatan lebih kondusif.

c. *Kerjasama dalam penanggulangan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA*

Dalam peroses penanggulangan perlunya kerjasama antara pemerintah masyarakat dan keluarga, dan dalam proses penyembuhan perlunya ditanamkan pemahaman agama bagi ODHA, dimana menanamkan nilai dan norma-norma yang perlu ditanamkan kembali pada penderita untuk merubah hidup sehat, dan selama ODHA melakukan perawatan dan pengobatan di rumah Hospice dimana diharapkan keluarga tidak hanya menitipkan mereka untuk sembuh disana, namun mereka (penderita hiv aids) juga membutuhkan dukungan moral dari keluarga seperti melakukan kunjungan pada mereka sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap mereka. Kehadiran keluarga untuk selalu siap sedia sangat dibutuhkan oleh seorang yang dinyatakan positif HIV AIDS. Dukungan keluarga yang minim pada hospice untuk ODHA menjadi kelemahan bagi ODHA untuk peningkatan kualitas hidup penderita.

Meredanya virus HIV/AIDS di Thailand terbentuk karena kesinergisan dari masyarakat, pemerintah, dan biksu sebagai pihak yang menjangkau perwujudan Thailand bebas HIV/AIDS. Masyarakat sebagai komponen utama yang harus disamakan persepsinya dalam mengatasi masalah HIV/AIDS ini memang memiliki kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan akibat pola perilaku individu yang melanggar norma dan lingkungan sehingga mengakibatkan seseorang terinfeksi virus.(Avert, 2017)

IV. KESIMPULAN

Indonesia dan Thailand termasuk salah satu Negara di Asia Tenggara yang mengalami epidemic HIV AIDS dengan prevalensi yang meningkat tajam dari tahun ke tahun, dimana pengalamam di banyak negara yang terlanda kasus HIV/AIDS secara luas memperlihatkan dampaknya yang cukup besar bagi Negara, terutama dalam dampak sosial dan ekonomi yang memprihatinkan, kerugian ekonomi timbul akibat beban ekonomi langsung yang harus ditanggung oleh keluarga dan masyarakat untuk pengobatan perawatan, serta yang mengidap penyakit menjadi tanggungan keluarga karna tidak mampu untuk produktif kembali, serta masalah sosial dimana timbulnya stigmatisasi, diskriminasi serta pelanggaran HAM terhadap ODHA dan keluarganya, tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kelangsungan kesejahteraan suatu Negara, Indonesia dan Thaliand sendiri terus berupaya dalam menanggulangi masalah serius ini. Kebijakan penanggulangan HIV AIDS antara Indonesia dan Thaliand memiliki banyak kebijakan yang sama, namun dalam implementasi program dan kegiatan memiliki perbedaan yang cukup terlihat, dan berbeda kebijakan maka hasil dari penanggulangan kedua negara pun tentu akan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] UNAIDS. (2017). Retrieved from www.unaids.org: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf

[2] Wiley, E. M. (2005). Thailand : Addressing HIV/AIDS Proven [3]Solutions and New Problems. *web.Worldbank.org* .

[4] Avert. (2017). *Information on HIV in Thailand.* Retrieved from https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/asia-pacific/thailand

[5] Budi, Z. (2013). *Kebijakan Tentang Pengendalian HIV AIDS di Indonesia*. Retrieved from https://zarisbudi.wordpress.com/2013/05/13/kebijakan-tentang-pengendalian-hiv-aids-di-indonesia/

[6] ESQ-news. (2009). *Model Penanggulangan HIV/AIDS*. Retrieved from http://www.esq-news.com/2009/12/17/model-penanggulangan-hivaids/

[7] Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. (2007). *Kementrian bidang koordinator kesejahteraan rakyat*. Retrieved from http://www.aidsindonesia.or.id/repo/perpustakaan/StrategiNas20032007.pdf

[8] Komisi Penanggulangan AIDS. (2016). *perawatan dan pengobatan HIV* Retrieved from Komisi Penanggulangan AIDS: http://www.aidsindonesia.or.id/

[9] Komisi Pneanggulangan HIV AIDS. (2017). *Strategi dan Rencana Naasional penanggulangan HIV AIDS.* Komisi Penanggulangan Aids.

[10] Lestari, T. R. (2013). Kebijakan Pengendalian HIV AIDS di Denpasar. *journal.fkm.ui.ac.id* .

[11] Phoolchareon. (2005). Evolution Of Thailand's strategy to cope with the HIV/AIDS epidemic.

[12] Shantic. (2017). *HIV AIDS dan Dilema Masyarakat Thailand*. Retrieved from https://shantica.blogspot.co.id/2017/09/hivaids-dan-dilema-masyarakat-thailand.html

IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN ENREKANG

Rijal, Lahibu Tuwu, Andi Nilwana, Kamaruddin Sellang,
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
rijal@gmail.com, tuwulahibu@yahoo.co.id, andi_nilwana@yahoo.com,
kamaruddinsellang@yahoo.co.id

ABSTRAK — Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati Enrekang, untuk mengetahui beberapa permasalahan yang akan datang oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan One Stop Integrated Layanan, untuk mengetahui kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang. Penelitian dilakukan di Enrekang dengan metode Investment and One Stop Integrated Services. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan, menafsirkan kondisi eksisting, proses going going atau berkembang kecenderungan dimana responden atau informan teken dengan menggunakan purposive. teknik sampling Responden atau informan dipilih oleh pertimbangan peneliti sendiri, terutama mereka yang terlibat dalam layanan perizinan inmanagement dan layanan non-perizinan dan yang mengetahui masalah yang terjadi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dimulai pada bulan Oktober sampai Desember 2016. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan model liner atau dikenal sebagai model analisis arus dalam proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekang belum terintegrasi dengan benar. Hal ini disebabkan beberapa faktor, namun faktor utamanya disebabkan oleh kurangnya dukungan tim teknis karena kurang koordinasi dan pengorganisasian.

Kesimpulan: Untuk menerapkan keseluruhan prinsip One Stop Integrated Services diperlukan pengaturan peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih. dalam kinerja pelayanan, penempatan tim teknis di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikan insentif penggajian yang diimbangi dengan tanggung jawab tim teknis.

Kata kunci: *Implementasi.*

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayaan publik. Menurut Pasal 4 Undang-undang ini, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.Berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum pada dasarnya merupakan segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentua peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara menurut PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan PP tersebut, ruang lingkup pelayanan publik dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:Pelayanan barang publik, Pelayanan jasa publik, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik dan Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Selanjutnya pada Pasal 25 ayat (4) dinyatakan bahwa Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, dan selanjutnya pada ayat (5) dinyatakan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Hal ini mengandung arti bahwa yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah lembaga atau institusi yang mengelola sistem pelayanan terpadu satu pintuDi dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.Prinsip-prinsip PTSP di dalam Perpres tersebut adalah prinsip keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas dan aksebilitas.

Pelayanan terpadu pada dasarnya juga telah diatur melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan diakukan oleh perangkat daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan system satu pintu.Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dimana masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan cukup datang ke satu tempat dan mengambil di tempat yang sama. Masyarakat cukup berhubungan dengan custumer service tanpa harus terlibat proses di back office. Pada mekanisme pelayanan satu pintu, proses perizinan dan non perizinan juga bisa dilakukan secara pararel.

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan kalangan dunia usaha sering

mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu proses yang tidak pasti atau tidak terukur, dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lainnya dan dari meja satu ke meja berikutnya ketika ingin mendapatkan perizinan. Hal ini selanjutnya membuat masyarakat seringkali merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah tanpa bisa melakukan komplain atau pengaduan, sehingga berakibat pada munculnya citra buruk kinerja pemerintah dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks yang dilingkupi aturan ketat serta tingginya tuntutan publik memang harus diakui tak mudah bagi aparatur melaksanakan tugas pelayanan kepada publik. Tetapi apapaun alasannya, pelayanan publik yang bagus menjadi sesuatu yang harus dilakukan (keniscayaan), karena memang sudah disuratkan dalam peraturan yang mengikat. Pelayanan yang berkualitas harus dilaksanakan, karena memang aparatur diangkat dengan tugas untuk melayani. Oleh karena itu paradigma berpikir aparat pemerintah menjadi ”kunci” penting untuk mempercepat terwujudnya pelayanan yang baik/prima.Untuk mewujudkan pelayanan prima diperlukan dukungan semua stake holder mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan juga tentunya asosiasi-asosiasi pengusaha, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan SKPD teknis melalui Tim Teknis yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.Di tahun kedua masa pemerintahan Bupati Enrekang H. Muslimin Bando dan Wakil Bupati H.M. Amiruddin, yaitu tahun 2014, Bupati Enrekang terobsesi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Enrekang, khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan. Keinginan ini muncul didorong kemauan untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik secara prima kepada warga masyarakat di Kabupaten Enrekang, di samping adanya masukan dari warga masyarakat kepada Bupati Enrekang ketika memperoleh perlakuan pelayanan yang tidak memuaskan dari aparatur pemerintah. Pelayanan tidak hanya memakan waktu lama, akan tetapi juga dibutuhkan biaya tinggi dan proses yang berbelit-belit, serta lokasi kantor satuan kerja perangkat daerah teknis yang memproses perizinan dan non perizinan masih terpencar-pencar. Upaya Bupati dalam memperbaiki kualitas layanan diwujudkan melalui suatu kebijakan pendelegasian kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada instansi yang mengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Hal ini sejalan dengan rencana aksi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi dengan memperbaiki kualitas layanan publik melalui pengintegrasian pelayanan perizinan ke dalam sistem satu pintu.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang biasa disingkat PTSP merupakan suatu pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian poduk pelayanan melalui satu pintu. Akan tetapi didalam proses tersebut, tim teknis memiliki peran yang sangat menentukan karena yang melaksanakan pemeriksaan lokasi dan yang memberikan pertimbangan layak tidaknya suatu permohonan izin dapat diproses lebih lanjut adalah tim teknis, termasuk memberikan dasar pengenaan retribusi bagi izin-izin tertentu yang yang memang masih ditarik retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola di PTSP sebanyak 86 jenis, dan berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Pengelola perizinan dan non perizinan dalam sistem PTSP, KPMPTSP Kabupaten Enrekang bertindak sebagai kordinator Tim

Teknis dari SKPD terkait. Koordinasi ini sangat diperlukan karena dalam menerbitkan suatu izin maupun non izin diperlukan pertimbangan teknis dari SKPD teknis terkait. Untuk menjalankan hal tersebut, Bupati Enrekang juga telah menerbitkan SK Tim Teknis yang akan membantu KPMPTSP serta menjadi bagian integral dalam mengelola perizinan dan non perizinan.Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa disana sini masih ditemukan adanya permasalahan yang sering muncul serta adanya keluhan masyarakat bahwa pelayanan yang ada masih belum sesuai keinginan pelanggan maupun masih ditemukan adanya kesan pelayanan yang lambat. Pelayanan perizinan yang terkesan berbelit-belit, prosedur yang panjang, waktu yang lama, dan pemohon sering harus mendatangi lagi instansi-instansi terkait untuk sekedar meminta rekomendasi adalah potret belum sempurnanya pelayanan publik. Kondisi seperti ini sudah pasti berpengaruh besar terhadap lambanya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.Kondisi pelayanan yang terlihat belum menunjukkan adanya integrasi antar instansi-instansi yang terkait yang menyebabkan masih ditemukan adanya pengaduan masyarakan khususnya pengguna jasa layanan perizinan yang menyampaikan lambannya pelayanan, termasuk disiplin waktu kerja.

Dari jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola dan diterbitkan tersebut berdasarkan pengamatan terhadap sistem aplikasi perizinan yang digunakan dalam pelayanan perizinan tersebut, jumlah penerbitan izin dan non izin yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya terkait dengan waktu penyelesaian izin dan non izin berkisar 30%. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka tema yang diajukan dalam rangka penulisan tesis ini adalah " Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Enrekang". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kondisi pelayanan perizinan di KPMPTSP Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan PTSP, Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pelaksanaan PTSP dan Mengetahui kemungkinan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan PTSP.

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik seperti pelayanan perizinan dan non perizinan. Secara eksplisit, Sianipar (1999:5) menjelaskan bahwa pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sector publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Model implementasi kebijakan publik secara garis besar dibagi dua, yaitu implementasi system rasional (*top-down*) dan model implementasi kebijakan *bottom up*. Menurut Parsons (2006), model implementasi system rasional (*top*-down) inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Rousseau bahwa segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta, segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia. Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah system.Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Edward III (1980) dalam Yousa (2007), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemkakan sebagai berikut, yaitu:

1. Apa yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan.
2. Apa yang menjadi factor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, Edward III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi);
2. *Resourcess* (sumber-sumber);
3. *Dispotition or Attitud*e (sikap);
4. *Bureaucratic Sturucture* (struktur birokrasi).

Menurut George C. Edwards III dalam Winarno (2007:108) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi. Implementasi adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak bisa mengurangi permasalahan yang timbul meskipun telah diimplementasikan, akan mengalami kegagalan.Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga variabel, yaitu (Nugroho, 2008): variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen. Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bawha setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2004:163) model manajemen implementasi menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

1. Implementasi strategi
2. Pengorganisasian
3. Penggerakan dan kepemimpinan
4. Pengendalian

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan Adanya Implementasi Kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Identifikasi Faktor Faktor yang mempengaruhi ImplementasiPeneliti mencoba mengadopsi pendapat George Edward III dalam penelitian Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka perlu sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi); Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta

memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

2. *Resourcess* (sumber-sumber); Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah:Staf yang relative cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Dispotition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
4. *Bureaucratic Sturucture* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan jumlah responden sebanyak 10 orang. Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Dengan tekhnik analisis data dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data dalam penelitian ini maka akan digunakan tekhnik triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2004, 100-105).Sedangkan kata *public policy* yang seringkali diterjemahkan bebas dengan kebijakan publik dalam khasanah ilmu administrasi publik memaknai secara beragam yaitu tergantung sudut mana akan digunakan menurut Lester (2000:104).

Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.Terhadap perumusan kebijakan dalam pelayanan minimum sejak awal harus dirumuskan standar pokok pelaksanaan dan standar pokok audit implementasi kebijakannya. Penentuan standar pokok pelaksanaan dan standar pokok audit implementasinya dikelompokkan dalam tiga isu utama, yaitu:

1. Kebijakan dari pelayanan minimum, yaitu kebijakan yang sudah ada dan kebijakan yang akan dibuat.
2. Implementasi pelayanan minimum terdiri dari manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, mekanisme dan pembiayaan.
3. Nilai pelayanan minimum yang terdiri dari indikator, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan rensponsibilitas.

Tugas pemberian pelayanan minimum ini merupakan tugas pokok yang dilaksanakan oleh pemerintah dan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintahan. Karena itu tugas pelayanan minimum harus dijadikan komitmen yang kemudian disusun dalam rancangan strategis, system evaluasi, system pendampingan dan system audit secara baik dan proporsional. Untuk menilai seberapa seberapa

jauh pemerintah sudah melaksanakan standar pelayanan minimum sesuai dengan misi, standar acuan, dan standar audit terhadap tugasnya adalah terletak pada nilai akuntabilitas, karena akuntabilitas adalah ruh/jiwa dari prinsip goog governance.Setiap kebijakan publik harus diarahkan untuk mengintervensi faktor-faktor yang memungkinkan penguatan *civil society*. Tujuannya agar proses penguatan *civil society* berjalan bersamaan dengan berlangsungnya proses kebijakan publik. Dengan kata lain, peluang penguatan *civil society* harus dibuka sejak awal proses perumusan kebijakan publik berlangsung hingga tahap evaluasi secara berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan salah satu prinsip penting dari *good governanc*e.

Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan peningkatan peran serta masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup penyelenggaraan *public good* dan *public regulation* dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan perizinan. Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi *public regulation*, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pelayanan perizinan, diantaranya mengatur mengenai pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan penyederhanaan pelayanan perizinan, untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah terobosan dan pola pikir progresif yang mengarah pada perubahan dalam merumuskan dan menyusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang berorientasi pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat. Keberadaan PTSP ini diharapkan akan menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan pelayanan perizinan dan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan daya saing serta sebagai wadah untuk optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
2. Bagi dunia usaha, memberikan akses yang lebih luas dan kemudahan dalam memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keperluan berusaha dan berinvestasi.
3. Bagi masyarakat, memberikan kepastian hokum dan keadilan dalam memperoleh atau menerima pelayanan perizinan yang sederhana, terukur, transparan dan terjangkau.

Pengaturan pelayanan publik melalui Peraturan Daerah merupakan suatu rekomendasi. Pada era otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mampu membangun kelembagaan daerah yang professional, sehingga dapat mengupayakan pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. Untuk menciptakan kelembagaan tersebut pemerintah daerah harus menyiapkan SDM yang berkualitas. Kunci dari pelayanan publik terletak pada kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang.Pelayanan publik yang mengerti akan kebutuhan masyarakat akan menciptakan budaya dan pola hubungan yang positif antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pola hubungan semacam ini akan mengembalikan paradigma kekuasaan ke dalam ruang publik sehinga kekuasaan akan menjadi terbatas dan pemilik kekuasaan akan kembali di tangan rakyat. Sisi keuntungan apabila pelayanan publik ini dimasukkan dalam Peraturan Daerah adalah:Jaminan hukum, Terjaminnya mekanisme dan prosedur pelayanan publik, Adanya jaminan hukum dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi dari masyarakat, Terciptanya akuntablitas.

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur

pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memilikiimplikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus oleh jajaran aparatur pemerintah daerah. Sub Aspek Kinerja Kebijakan Produk hukum tentang pelaksanaan pelayanan perizinan Sebelum pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelaksanaan pelayanan perizinan dilaksanakan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, sehingga setiap orang, badan hukum atau badan usaha yang akan membutuhkan pelayanan perizinan akan mendatangi tiap-tiap SKPD yang mengelola perizinan.Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perbaikan Pelayanan Aparatur Dalam Rangka Meningkatkan Citra Pemerintah Di Mata Masyarakat dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, maka Kabupaten Enrekang menjadikan terobosan dasar kebijakan di atas untuk mengintegrasikan terciptanya keseragaman pola penyelenggaraan pelayanan izin yang lebih efisien, sehingga di awal kepemimpinan Bupati Muslimin Bando, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur mengenai susunan organisasi perangkat daerah dilakukan perubahan sebagaimana terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini, Pelayanan Terpadu Satu Pintu digabung dengan urusan Penanaman Modal.

Sebagai payung hukum untuk melaksanakan PTSP maka Bupati Enrekang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.Sebagaimana disampaikan oleh MB selaku Bupati Enrekang:"Untuk perbaikan kualitas dan percepatan proses pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan maka saya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. Dengan pendelegasian kewenangan ini maka segala kewenangan tanggungjawab berada pada Kepala KPMPTSP akan tetapi Kepala Kantor harus mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Bupati Enrekang".

Menurut SS, yang menjabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha KPMPTSP Kabupaten Enrekang:"Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perizinan dan non perizinan yang kami keluarkan mulai dari proses penerimaan berkas sampai dengan terbitnya izin. Cuma masih ada beberapa kendala yang kami hadapi terkait dengan izin yang masih terkait dengan SKPD lain".

Sedangkan menurut YL, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota dan pedesaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang:"Begini pak, kami juga harus diberikan dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin sebelum mengeluarkan BAP".Seperti yang diungkapkan oleh NR yang menjabat Kepala KPMPTSP Kabupaten Enrekang:"Memang sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014, semua jenis pelayanan perizinan dikelola dan dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, tetapi kenyataannya dapat dikatakan secara substansi belum sepenuhnya seperti itu karena masih ada beberapa SKPD yang tidak mau memberikan pertimbangan teknis kalau yang bermohon izin tidak mendatangi secara langsung SKPD yang terkait"

Sedangkan menurut HN, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang:"Kewenangan dan tanggung jawab pelayanan perizinan seharusnya mutlak di tangan KPMPTSP sebagai instansi yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mengelola perizinan, akan tetapi bagaimana kami dapat memberikan pertimbangan teknis kalau pemohon

tidak datang kepada kami untuk kami wawancarai".Dalam melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut serta untuk memenuhi amanat Undang-undang Pelayanan Publik maka dibuat standar operasional prosedur (SOP) yang juga ditetapkan oleh Bupati Enrekang, yaitu Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud di atas berkaitan dengan dasar hukum, kegiatan, pelaksana dan mutu baku pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi proses pemberian pelayanan perizinan masih banyak yang tidak sesuai dengan SOP. Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan diketahui terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelayanan bahkan banyak yang tidak sesuai SOP.Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan berbagai terobosan-terobosan seperti melaksanakan rapat-rapat tim teknis, sosialisasi ke semua Kecamatan, akan tetapi belum begitu memberikan perubahan yang signifikan.Langkah-langkah konkrit selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pendekatan-pendekatan dan komunikasi personal kepada pimpinan SKPD dan tim teknis meskipun dalam suasana yang non formil.Perizinan pada dasarnya memiliki fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah, namun karena cara pandang terhadap kewenangan yang diterimanya, maka hal ini pun juga dapat disikapi secara berbeda pula.

Hal ini dikatakan oleh MS yang menjabat sebagai Asisten Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang :"Pelayanan publik terutama pelayanan perizinan terkait dengan ketidakpastian waktu dan biaya serta ketimpangan dari sisi SDM serta sarana dan prasarana dan kualitas SDM menjadi permasalahan mendasar untuk memperbaiki kualitas pelayanan perizinan". Menurut NM, selaku kepala seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: "Pelayanan yang kami laksanakan sudah sesuai dengan tupoksi yang ada, akan tetapi banyak yang terkendala di tim teknis sehingga kita sebagai pelaksana menjadi kerepotan karena proses izin terlalu lama".

Hal ini juga disampaikan oleh YL yang merupakan salah satu staf seksi perizinan dan non perizinan:"Mengapa hingga saat ini masih ada SKPD yang kurang tanggap dalam menindaklanjuti permohonan perizinan dari masyarakat".Hal senada juga diungkapkan oleh SF yang merupakan salah satu pemohon izin:"Menurut saya, kalau mengurus perizinan harusnya kita cukup memasukkan berkas di PTSP. kalau kondisinya seperti ini cukup merepotkan karena kita harus bolak-balik ke SKPD yang terkait".

Lingkungan Implementasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik. Di era otonomi daerah, dimana kewenangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pelayanan masyarakat yang sudah diberikan kepada daerah menuntut masing-masing daerah memperbaiki system pelayanan publik di tingkat daerah. Begitu juga peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Dalam mencapai tujuannya suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola system. Agar system ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting diantaranya pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek yang lain. Hal ini akan menjadikan sumber daya manusia sebagai salah satu indicator penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vita. Karenanya, peran dan fungsi sumber daya

manusia tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya tidak akan berjalan dengan maksimal.

Bagi sector publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang professional dan kompeten.Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelayanan, mengingat bahwa sumber daya manusia aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi. Arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur Negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional. Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Hal tersebut sebenarnya menyiratkan semakin pentingnya upaya pengembangan kompetensi aparatur pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.Terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu didukung dengan sumber daya manusia pelayanan yang handal, serta ketersediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, SDM pelayanan sebagai kunci keberhasilan kinerja organisasi pelayanan publik harus mendapatkan perhatian utama dalam perbaikan kualitas pelayanan. Untuk itu, pemilihan dan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki merupakan salah satu penentu keberhasilan pelayanan publik. Dalam hubungan ini organisasi pelayanan publik harus berupaya melakukan pencarian dan penempatan pegawai dan menerapkan *the right man on the right place,* yaitu menentukan orang yang tepat pada setiap bentuk dan jenis pelayanan. Organisasi dituntut untuk secara terbuka melakukan proses pemilihan dan penempatan SDM, yaitu dengan menyusun kebijakan serta aturan yang jelas mengenai semua persyaratan bagi posisi-posisi pekerjaan yang akan diisi, serta menerapkan system yang baku sebagai pedoman kegiatan tersebut.

Kelemahan utama SDM pelayanan publik adalah profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Kondisi aparatur pelayanan publik tersebut, pada hakikatnya tidak terlepas dari permasalahan yang menyangkut:

1. Permasalahan instrumental, yaitu masih adanya berbagai peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian yang tumpang tindih (*overlapping*), saling bertentangan satu sama lain antara antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang ada di atasnya, banyak peraturan perundang-undangan yang sudah *obsolete*, serta berbagai kondisi yang belum ada peraturan perundang-undangannya (vakum).
2. Permasalahan faktual berupa kondisi dan kemampuan aparatur pelayanan, sulitnya mengubah *mindset* serta tingginya ego-sektoral dan konflik kepentingan yang masih mewarnai berbagai institusi penyelengara pemerintahan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa pengembangan kebijakan dan strategi peningkatan kompetensi SDM pelayanan di masing-masing daerah berbeda-beda, namun secara umum beberapa strategi yang dilakukan adalah diklat-diklat teknis dan dilakukan magang di beberapa daerah yang pelayanannya cukup maju. Bahkan di beberapa daerah telah melakukan studi banding untuk melihat bagaimana cara kerja aparatur pelayanan pada unit pelayanan publik di Negara tertentu. Penggunaan seragam khusus agar memberikan kesan keramahtamahan dan adanya unit pelayanan unggulan merupakan strategi lain dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari segi pengembangan perilaku, beberapa daerah juga telah melakukan pelatihan-pelatihan *services excellence* bekerja sama dengan beberapa lembaga

konsultan bidang pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan, salah satu faktor yang menjadikan pelayanan terhambat oleh karena kurangnya SDM khususnya untuk keterampilan-keterampilan tertentu. Hal tersebut juga diperparah karena masih tingginya ego sektoral masing-masing SKPD. Masyarakat (pemohon) Masyarakat dalam hal ini orang ataupun badan mengajukan permohonan izin kepada satuan kerja perangkat daerah/instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.Untuk mengajukan permohonan izin, pemohon datang ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengambil formulir permohonan. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi berkas sesuai yang dipersyaratkan, untuk selanjutnya menyerahkan pada loket pendaftaran. Formulir permohonan dapat juga diperoleh pada Kantor Kecamatan terdekat. Proses penyelenggaraan perizinan harus terpadu, lintas sektor akan tetapi dikoordinasikan oleh satu instansi pemerintah yang telah diberi kewenangan untuk mengambil keputusan final. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Deregulasi dan debirokratisasi perizinan merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbaharui proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah yang selama ini dirasakan masih terlalu berbelit-belit, untuk disempurnakan melalui proses percepatan pelayanan dengan melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan secara terpadu lewat sistem satu pintu. Meskipun demikian, pelaksanaan pelayanan perizinan mendapatkan begitu banyak kendala, bahkan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh karena masih kurangnya dukungan dari instansi-instansi terkait. Seperti yang diungkapkan NM yang menjabat kepala seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:"Akan sangat susah kita melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh karena kurangnya dukungan dari para Tim Teknis terkait. Mereka menganggap bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Teknis adalah tugas sampingan sehingga kewajiban sebagai Tim Teknis tidak diaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Hal yang lain dikemukakan oleh AN, salah satu anggota Tim Teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Enrekang: "Kita sebagai Tim Teknis merasa serba salah karena di kantor kami juga memiliki tanggung jawab yang harus kami laksanakan"

Hal yang sama diungkapkan oleh JS, sebagai anggota Tim Teknis dari Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang:"Kami mohon maaf karena sebagai staf pada kantor LHKP, kami harus mendahulukan tugas pokok kami sebelum mengerjakan yang lainnya. Kami harus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan langsung kami sebelum menindak lanjuti surat dari PTSP"Sedangkan menurut SM, salah satu Tim Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang mengungkapkan:"Harusnya kami diberikan fasilitas yang memadai, termasuk memberikan honor tim setiap bulan supaya menambah semangat kami dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis".

Era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering kita dengar, dimana tuntutan perubahan sering disuarakan, baik oleh individu ataupun oleh anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima. Secara umum, pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan masyarakat karena terkesan masih berbelit-belit, mahal, lama dan cenderung tidak efisien dan efektif. Dalam penelitian ini,

pada kenyataannnya dalam mengurus perizinan meskipun diberi label Pelayanan Terpadu Satu Pintu, akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Enrekang pada praktiknya belum terlaksana secara terpadu. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi, akan tetapi pada intinya disebabkan oleh karena belum optimalnya dukungan dari Tim Teknis SKPD. Meskipun telah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang semua pelayanan perizinan yang ada harus dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Enrekang, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa izin yang mengaruskan pemohon harus mendatangi SKPD yang terkait. Kondisi seperti ini tentu saja masih jauh dari konsep PTSP yang seharusnya. Kurangnya dukungan Tim Teknis yang mengakibatkan tidak optimalnya implementasi PTSP, merujuk pada teori George Edward III dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Communication* (Komunikasi).

   Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Kondisi yang terjadi adalah ada ketidak seragaman pemahaman dari para pelaksana sehingga dari beberapa sumber informasi yang berbeda melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan PTSP sehingga konsep PTSP yang sesungguhnya tidak berjalan dengan maksimal.

   Seperti yang disampaikan oleh YL, selaku salah satu anggota Tim Teknis bahwa berkas permohonan harus dibawa ke Kantornya untuk diperiksa sebelum mereka melaksanakan pemeriksaan lapangan. Hal tersebut terjadi oleh karena informasi dan pemahaman yang tidak seragam dalam melaksanakan konsep PTSP sehingga penerapannya di lapangan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. *Resourcess* (sumber daya)

   Yang termasuk sumber daya menurut George Edward III diantaranya adalah staf yang cukup serta memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, informasi yang memadai dan relevan, dukungan dari lingkungan dan wewenang yang dimiliki. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSP adalah keterbatasan jumlah personil institusi Kantor PTSP. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan secara umum kepada masyarakat karena disamping melaksanakan tugas pelayanan, mereka juga harus melaksanakan tugas administrasi yang lain sehingga tugas pelayanan kadang kala terhambat. Disamping itu, SKPD yang terkait juga banyak yang kekurangan tenaga termasuk masih adanya beberapa pegawai yang belum begitu menguasai tupoksi dari jabatan yang didudukinya sehingga mereka kesulitan dalam memberikan pertimbangan teknis terhadap perizinan yang terkait dengan mereka.

   Hal lain yang menjadi kendala yang terkait dengan sumber daya adalah persoalan kewenangan tim teknis yang masih ambigu. Seperti yang terjadi pada salah satu SKPD dimana kewenangan memberikan rekomendasi itu ada pada pimpinan SKPD-nya sehingga tim teknis yang melaksanakan pemeriksaan lokasi masih harus menyodorkan kepada pimpinan SKPD-nya untuk ditandatangani, pada hal sudah jelas diatur bahwa hal seperti itu cukup tim teknis yang melaksanakan pemeriksaan lokasi yang menandatangani. Hal terakhir yang terkait dengan sumber daya adalah bahwa ketersediaan sarana dan prasarana termasuk dana masih sangat kurang sehingga operasional pelaksanaan PTSP sering terhambat. Akan tetapi kondisi tersebut dapat dimaklumi oleh karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sehingga disetiap SKPD dilaksanakan pengetatan anggaran. Bahkan personil yang

ditunjuk sebagai tim teknis tidak diberikan honorarium. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap mobilitas tim teknis dalam memberikan dukungan pelaksanaan PTSP.

3. *Dispotition or Attitude* (sikap).

   Ada tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan yang telah dibuat. Dari fenomena-fenomena yang ada kita dapat melihat bahwa konsep PTSP masih ada tarik menarik khususnya antara institusi pemerintah sendiri. Hal ini diakibatkan karena masih adanya adanya oknum-oknum yang menganggap bahwa dengan adanya PTSP maka mereka akan kehilangan peran ataupun "lahan" yang selama ini telah mereka nikmati. Hal tersebut tentu terkait dengan pola lama sikap dan perilaku dari para pelaksana pelayanan publik.

4. *Bureautic structure* (struktur birokrasi).

   Pelaksana suatu kebijakan tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan, baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu kendala dalam pelaksanaan konsep PTSP di Kabupaten dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa yang mengelola PTSP di Kabupaten Enrekang masih berstatus Kantor, sedangkan SKPD-SKPD yang terkait umumnya adalah berstatus Dinas ataupu Badan yang mana tingkat eselon mereka lebih tinggi dari kantor PTSP. Hal ini sedikit banyak berpengaruh dalam melaksanakan fungsi koordinasi karena adanya karena adanya beban psikologis dari personil kantor PTSP dalam melaksanakan fungsi tersebut, meskipun didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008, termasuk di dalam Perbup Nomor 14 Tahun 2014 serta Keputusan Bupati Nomor 453/KEP/VIII/2014 dinyatakan bahwa tim teknis berada di bawah koordinasi Kepala instansi yang mengelola PTSP. Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III maka factor yang paling dominan yang menyebabkan implementasi PTSP di Kabupaten Enrekang dalam jangka pendek belum berjalan maksimal adalah factor komitmen yang terkait dengan perilaku dari tim teknis. Komitmen yang masih kurang menyebabkan pelayanan publik terkesan dinomorduakan. Hal ini sejalan dengan pendapat George Edward III (1980) dan Van Horn & Van Meter (1975) bahwa disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksana kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam implementasi PTSP di Kabupaten Enrekang diantaranya adalah faktor komunikasi ataupun koordinasi antara penerima kewenangan dengan pihak-pihak yang terkait, faktor sumber daya yang terbatas, faktor sikap ataupun komitmen dan faktor struktur birokrasi.

3. Upaya-upaya jangka pendek yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah berupaya untuk membangun kepedulian, partisipasi dan komitmen para pihak-pihak terkait untuk terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahmad, Jamaluddin, 2011, *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusani,* Badan Penerbit UNM, Makassar.

[2] Ahmad, Jamaluddin, 2015, *Metode Penelitian Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi,* Gava Media, Yogyakarta.

[3] Bogdan, R and Taylor, S.J, 1975. *Introduction to Qualitative Research Methode,*New York : John Willey and Sons.

[4] Budi Winarno, 2002. *Teori dan Proses KebijakanPublik,* Media Presindo, Yogyakarta.

[5] Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy.* USA : Prientice-Hall, INC., Englewood Cliffs, NJ.

[6] Doing Business 2016. *International Fiane*

*Cooperation*The World BankGroup. USA

[7] Edward III, George.C, 1980, *Implementasi Public Policy,* CongressionalQuaterly Press, Washington.

[8] J.P.G Sianipar, 1999, *Manajemen Pelayanan Publik,* Jakarta : LAN

[9] Kirk and Miller, 1986, *Validity and Qualitative Research,* Beverly Hills, CA:Jossey - Bass.

[10] Laswell, Harold D dan Abraham Kaplan, 1970, Power and Society, Yale University Press, New Haven.

[11] Moleong, L.J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

[12] M.B Miles, A.M. Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif,* Universitas Indonesia Press, Jakarta

[13] Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi,* Alex Media Komputindo, Jakarta.

[14] Nawawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

[15] Salisbury, David F, 1988, *Effective Drill and Practice Strategies dalam Jonassen,* dalam Denhardt dan Denhardt, 2003. *Global Public Management Reform. Public Administration Review*. Arizona State University

[16] Sutopo H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian.* Surakarta : Universitas Sebelas Maret

[17] Siagian, P Sondang, 2001, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya,* Jakarta: Bumi Aksara

[18] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

[19] Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Bupati Enrekang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

[21] Peraturan Bupati Enrekang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

[22] Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

[23] Keputusan Bupati Enrekang Nomor 453/KEP/VIII/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang

[24] Peraturan Pemerintah Nomo 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[25] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang PedomanOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

[26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

[27] Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

[28] Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah

[29] Wahab, Solichin Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.*

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS KOTA KECAMATAN ENREKANG

Rosmawati, Herman Demak, Andi Nilwana
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
Rosmawati@yahoo.com, herman.lppmstisip@gmail.com, andi.nilwana@yahoo.com

ABSTRAK - Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Puskesmas Enrekang sudah berjalan cukup baik, dilihat dari komunikasi dapat disimpulkan bahwa transmisi atau proses informasi belum dilakukan dengan baik atau 49,75% serta kejelasan informasi kurang jelas atau 49,75%. Sumber daya yang dinilai dengan jumlah dan kualitas staf cukup, atau 75,25%, pengetahuan informasi Staf / Petugas sudah tahu dengan baik atau 71%. otoritas eksekutif sudah berkinerja baik atau 73,50%. sarana dan prasarana yang memadai atau 74,25%. Disposisi dilihat dari sikap pelaksana sudah berkinerja baik atau 71,25% .Struktur birokrasi dilihat dari sikap pelaksana sudah berkinerja baik atau 72,75% dan fragmentasi atau koordinasi pelaksana program Keamanan Nasional Kesehatan (JKN) di Kecamatan Puskesmas Enrekang belum berjalan baik atau 49,25%

Kata kunci: ***komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi***

I. PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan merupakan hubungan dimana negara bertindak sebagai penjamin, dan warga negara sebagai pihak yang dijamin. Untuk mendapatkan jaminan tersebut maka warga negara berkewajiban memberikan perikatan material dengan cara membayar iuran. Maka negara pun menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kewajiban negara tersebut. Dokumen hukum tersebut dasar pengertian yang sangat umum tentang kesehatan, dimana kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Layanan kesehatan yang dimaksud oleh UUD 1945 tersebut adalah Pemeliharaan kesehatan mencakup upaya penaggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan.

Implementasi undang-undang selanjutnya dinamakan kebijakan, kebijakan adalah proses hukum social, dimana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relative dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses social dapat "diperbaiki". Kebijakan kerapkali langsung terkait agenda-agenda atau tindakan yang terjadwal dalam fungsi dan penugasan. Agenda kebijakan didefenisikan sebagai tuntutan-tuntutan agar pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Barbara berpendapat bahwa agenda kebijakan berlangsung ketika pejabat public belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberikan perhatian secara personal dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa memisahkan aspek hukum dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya, apalagi terhadap bidang kesehatan yang merupakan urusan hak asasi manusia yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945. Negara memberikan perhatian yang penuh, wujud dari perhatian tersebut adalah membuat sistem Jaminan Sosial Nasional sekaligus lembaga penyelenggara Jaminan Sosial. Kedudukan BPJS sangat istimewa

bila dibandingkan dengan lembaga negara setingkat kementrian lainnya, karena BPJS selain sebagai lembaga publik juga diberikan otoritas oleh negara untuk melakukan pengelolahan dana dari aset BPJS yang dikumpulkan dari iuran pemerintah berupa investasi dan bisnis. Selain itu BPJS tidak bisa dipailitkan, karena BPJS dipersonifikasi sebagai negara.

Berdasarkan Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80% rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap "teranaktirikan" dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, karena tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

Sedangkan berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kabuptn Enrekang sudah 30 % penerima JKN. Dalam hal meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten Enrekang dari 13 puskesmas yang tersebar di 12 Kecamatan, beberapa diantaranya telah memberikan pelayanan rawat inap, 7sekaligus unit gawat darurat 24 jam. Salah satunya Puskesmas Kota Enrekang. Namun terkait dengan banyaknya keluhan tentang kasus yang tidak terlayani, Kepala Dinas Kesehatan mangatakan ada beberapa jenis pelayanan yang tidak ditanggung di antaranya operasi jantung, ct scan, cuci darah, bedah syaraf, bedah plastic, dan penyakit kelamin

Problematika utama pelayanan akses kesehatan di Indonesia yaitu isu kemiskinan, terutama kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural. Karena pendapatan ekonomi yang tidak sama sekaligus kesenjangan yang sangat tajam antara warga negara sehingga mengakibatkan setiap warga negara mendapatkan layanan ekonomi yang berbeda berdasarkan pada kepemilikan harta untuk membayar biaya kesehatan. Kondisi seperti itu kian menjadi ketika negara pun turut serta melakukan pilihan yang sama yaitu komersialisasi program kesehatan melalui pengelompokan layanan berdasarkan pada nilai *financial* yang ditanggung oleh rakyat.

Setidaknya dari fenomena tersebut dapat dihipotesakan bahwa pada dasarnya pemerintah menginginkan agar semua rakyat Indonesia wajib mengikuti terlibat aktif dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Formula penjaminan berupa asurnasi sosial karena asuransi kesehatan dipandang merupakan kesadaran masyarakat modern dalam sebuah Negara yang relativ sudah memulai pintu kemajuan dalam hal kebijakan kesehatan. Pelaksanaan BPJS di Indonesia tidak berjalan mulus sebagaimana yang direncanakan, banyak sekali kendala yang didapat di lapangan. Kesemua kendala tersebut akhirnya menjadi alasan bagi sebagian praktisi kesehatan berkesimpulan bahwa BPJS merupakan kebijakan setengah hati. Kebijakan setengah hati berarti masih terdapatnya kesenjangan antara prinsip hak-hak konstitusi rakyat mendapatkan jaminan kesehatan, dengan pola kapitalisasi layanan kesehatan oleh pemerintah.

Publik menilai sistem pelaksanaan KJS dibawah kontrol PT Askes terbukti masih berantakan mulai dari sistem proses kepesertaan, layanan kesehatan, pembayaran, dan mekanisme kerjasama dengan RS, bahkan berpotensi terjadinya praktek korupsi bernilai milyaran rupiah. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, UU BPJS pasal 60 telah mengamanahkan bahwa BPJS kesehatan diharuskan beroperasi dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 januari 2014. Kemudian pasal 59 menjelaskan bahwa dewan komisaris dan direksi PT Askes diangkat menjadi dewan pengawas dan direksi BPJS kesehatan untuk jangka waktu 2 tahun. Maka, sejak 1 januari 2014 PT Askes akan bertransformasi menjadi BPJS kesehatan.

Sistem BPJS menetapkan bahwa kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh warga bahkan warga asing dengan ketentuan tertentu sebagaimana ketentuan UU BPJS pasal 14. Mekanisme pembayaran dan kerjasama dengan RS juga berpotensi besar memperumit pelaksanaan BPJS jika tidak menggunakan sistem yang baik, apalagi faktanya di beberapa daerah khususnya di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan ditemukan bahwa infrastruktur,

SDM, dan sarana kesehatan sering tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi anehnya masyarakat sudah harus dipaksakan mengikuti asuransi sosial dan dipaksa membayar iuran kepada BPJS Kesehatan selain itu sistem pelaksanaan BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT ASKES masih berantakan dan jauh dari prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), transparansi dan akuntabilitas. Pada proses kepesertaan, sebagaimana rencana BPJS kesehatan bahwa pemilik kartu Jamkesda dan Jamkesmas secara nasional secara otomatis terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Faktanya, kepesertaan BPJS dimulai dari nol dimana baik pemegang Jamkesda maupun Jamkesmas terpaksa harus mendaftar kembali ke BPJS kesehatan. Data laporan kemenkes RI pada tahun 2007 juga menunjukkan bahwa PT ASKES memeliki catatan negatif diantaranya ;

1. Saat menjadi operator Askeskin, pencetakan kartu peserta tidak selesai dan 20% jatuh ke orang mampu,
2. Klaim RS tidak diselesaikan dan bidan desa tidak memperoleh intensif yang dijanjikan, hingga ASKES menghutang ke RS sebesar 1,2 trilun rupiah,
3. PT Askes melakukan kecurangan dengan membuka apotik di RS melalui mekanime kerjasama dengan dokter sehingga berdampak pada klaim RS yang sangat besar dan tidak logis,
4. PT Askes malah mendepositokan 950 M dan 400 M di berbagai cabang, padahal secara bersamaan terjadi klaim dari RS yang lama belum dibayar,
5. Terjadi kekacauan menagement di lapangan dan PT ASKES tidak pernah mengirimkan laporan ke Kemenkes RI. Maka BPJS kesehatan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah di bawah kendali PT AKSES berpotensi membawa pada kemunduran layanan kesehatan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang

George C. Edward III dalam dalam AG. Subarsono (2005: 90-91), bahwa berhasil atau terhambatnya suatu proses implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

a. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); ”komunikasi merupakan salah-satu variable penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik..

b. Sumber daya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats)*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau sikap

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan polapola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata

dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluankeperluan publik (*public affair).*
2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi".

"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang merupakan salah satu puskesmas menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan menurut Sugiyono, (2010 ;37) dengan melakukan survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antar variabel secara sosiologis maupun psikologis. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang mendapat layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sebanyak 19.134 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah pasien penerima kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekangyang dijadikan sampel berjumlah 99 orang.

Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi, melalui kajian literatur, dokumen, peraturan dan undang-undang serta kajian referensi lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga Negara Indonesia dengan sistem penjaminan kesehatan secara nasional. Selama ini penjaminan kesehatan hanya diperuntukkan untuk orang miskin dan tidak mampu yang dibantu dalam skema jaminan kesehatan masyarakat (Jankesmas).

Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada warga Kabupaten Enrekang berdasarkan kerangka konsep Edward III dinilai berdasarkan variabel keberhasilan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya pada Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudahmengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akanmereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga implementasi program harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementerprogram tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap programyang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.

Terdapat dua indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu :

a. Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

   Berikut hasil pengamatan penulis bahwa transmisi atau proses penyampaian informasiimplementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang belum berjalan dengan baikatau 49,75%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 8 orang atau 8,08% menyatakan sangat baik, 11 orang atau 11,11% menyatakan baik, 52 orang atau 52,53% yang menyatakan kurang baik dan yang menyatakan tidak baik28 orang atau 28,28%.

b. Kejelasan Informasi

   Kejelasan informasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang kurang jelas atau 49,75%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 7 orang atau 7,07% menyatakan sangat jelas, 14 orang atau 14,14% menyatakan jelas, 49 orang atau 49,50% yang menyatakan kurang jelas dan yang menyatakan tidak jelas 29orang atau 29,29%.

2. Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersedian sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yangmendukung jalannya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Enrekang, khususnya pada Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang. Indikator sumber daya terdiri dari daribeberapa elemen, yaitu :

a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu)

   Jumlah dan mutu staf dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah mencukupi atau 75,25%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 35 orang atau 35,35% menyatakan sangat mencukupi, 40 orang atau 40,41% menyatakan mencukupi, 14 orang atau 14,14% yang menyatakan kurang mencukupi dan yang menyatakan tidak mencukupi 10 orang atau 10,10%.

b. Informasi yang dibutuhkan

   Informasi pengetahuan Staf/Pegawai terhadap implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudahmengetahui dengan dengan baik atau 71%. Hal ini dapat

kita lihat dari tanggapan responden yakni 27 orang atau 27,27% menyatakan sangat mengetahui, 42 orang atau 42,43% menyatakan mengetahui, 17 orang atau 17,17% yang menyatakan kurang mengetahui dan yang menyatakan tidak mengetahui 13 orang atau 13,13%.

c. Kewenangan

Wewenang para pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudahterlaksana dengan baik atau 73,50%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 32 orang atau 32,32% menyatakan sangat baik, 38 orang atau 38,39% menyatakan baik, 20 orang atau 20,20% yang menyatakan kurang baik dan yang menyatakan tidak baik 9 orang atau 9,09%.

d. Sarana yang dibutuhkan

Sarana dan prasarana dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudahmemadai atau 74,25%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 29 orang atau 29,29% menyatakan sangat memadai, 45 orang atau 45,46% menyatakan memadai, 18 orang atau 18,18% yang menyatakan kurang memadai dan yang menyatakan tidak memadai 7 orang atau 7,07%.

3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana)

Salah satu faktor yang memepengaruhi efektifitas implementasi kebijakanadalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi darikebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jikapandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka prosesimplementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam disposisipengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akanmenimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakanbila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan olehpejabat-pejabat yang lebih atas.

Sikap para pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudahterlaksana dengan baik atau 71,25%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 29 orang atau 29,29% menyatakan sangat baik, 38 orang atau 38,39% menyatakan baik, 20 orang atau 20,20% yang menyatakan kurang baik dan tidak ada responden yang menyatakan tidak baik 12 orang atau 12,12%.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, variable keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudahtersedia atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yangseharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atauterealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yangbegitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika strukturbirokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkansumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukungkebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi denganbaik.

Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar yang dimaksudkan adalahStandar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

a. Standar operasional prosedur

Standar operasional prosedur pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudahterlaksana dengan baik atau 72,75%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 29 orang atau 29,29% menyatakan sangat baik, 42 orang atau 42,43% menyatakan baik, 18 orang atau 18,18% yang menyatakan kurang baik dan yang menyatakan tidak baik 10 orang atau 10,10%.

b. Fragmentasi

Fragmentasi atau koordinasi pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang belum terlaksana dengan baik atau 49,25%. Hal ini dapat kita lihat dari tanggapan responden yakni 7 orang atau 7,07% menyatakan sangat baik, 17 orang atau 17,17% menyatakan baik, 41 orang atau 41,42% yang menyatakan kurang baik yang menyatakan tidak baik 34 orang atau 34,34%.

Secara umum implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang dapat dikategorikan baik atau sudah standar operasional prosedur. Hal itu berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari sumber data berupa kuesioner wawancara dan dokumentasi. Adapun pembahasan hasil penelitian secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga implementasi program harus dikomunikasikan kepada pihak yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut.Ada dua indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi (Proses Penyampaian Informasi) dan Kejelasan Informasi.

2. Sumber daya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersedian sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi,wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Enrekang, khususnya pada Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang.

3. Disposisi

Faktor yang memepengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dalam disposisi pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.

Selain itu Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi standar

yang dimaksudkan adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan dilihat dari beberapa aspek yang telah penulis teliti yaitu :

a. Pada Aspek komunikasi dapat disimpulkan bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang belum terlaksana dengan baik atau 49,75% begitu halnya kejelasan informasi implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang kurang jelas atau 49,75%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang merupakan sasarandari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum memahami isi programJaminan Kesehatan Nasional (JKN).
b. Pada aspek sumber dayadapat disimpulkan bahwa jumlah dan mutu staf dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah mencukupi atau 75,25%, informasi pengetahuan Staf/Pegawai terhadap implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah mengetahui dengan dengan baik atau 71%. wewenang para pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah terlaksana dengan baik atau 73,50%. sarana dan prasarana dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah memadai atau 74,25%.
c. Pada aspek disposisidapat disimpulkanbahwa sikap para pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah terlaksana dengan baik atau 71,25%..
d. Pada aspek struktur birokrasidapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang sudah terlaksana dengan baik atau 72,75%. Begitu halnya fragmentasi atau koordinasi pelaksanaprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang belum terlaksana dengan baik atau 49,25%.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Komunikasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementer program tersebut akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap program yang akan diterapkan kepada sasaran dari program tersebut
2. Ketersedian sumber daya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi,wewenang, dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Enrekang, khususnya pada Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang.
3. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.
4. Untuk struktur birokrasi sudah cukup baik, terbukti dengan berhasilnya Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang mendapatkan penghargaan, namun dari koordinasi masih perlu di tingkatkan

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

a. Pentingnya Pemerintah Kabupaten Enrekang dan jajaran instansi terkaitmengoptimalkan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengantujuan, misi dan sasaran yang diiginkan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang bersih dan sehat serta meringankan beban pembiayaan

pengobatan. Puskesmas KotaKabupaten Enrekang sebagai pelaksana program kesehatan gratis diharapkan untuk mengintensifkan sosialisasi danpenyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta lebih berkomitmen dalammenjalankan tugasnya.

b. Diharapkan kepada pemerhati masalah kesehatan, lembaga swadayamasyarakat (LSM), Yayasan Kesehatan, Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan, Pengusaha, Stakeholder dan Elemen Masyarakat lainnya untuk mengambil peran dan berpartisipasi dalam mendukung programprogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi tecapainya masyarakat yang sehat.
c. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti program program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segera melaporkan ke pimpinan puskesmas untuk dicarikansolusinya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdullah, Syukur, 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep Pendekatan,dan Relevansinya dalam Pembangunan*. Persadi, Makassar

[2] Abidin, Zainal Zaid. 2002. *Kebijakan Publik.* Yayasan Pancur Siwah, Yogyakarta

[3] Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung

[4] Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan.* Badan Penerbit UNM. Makassar,

[5] ----------2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi.* Jogyakarta: Gava Media.

[6] Aime, Heene, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik.* Bandung: PT Refika Aditama, Bandung

[7] Albrow, Martin, 2007, *Birokrasi (Terjemahan). (*Cetakan Keempat) Yogyakarta: Tiara Wacana. Yogyakarta

[8] Ali Mufiz. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara.* Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta:

[9] Mannulang, M. 1987. *Dasar-Dasar Manajemen.*Ghalia Indonesia, Jakarta

[10] McKenzie F. James, dkk. 2003. *Kesehatan Masyarakat Suatu Pengantar Edisi 4,* Buku Kedokteran EGC, Jakarta

[11] Moleong J. Lexi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*PT Remaja Rosdakarya. Bandung:

[12] Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek.* PMN, Surabaya

[13] Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi),*Pustaka Pelajar, Yogyakarta

[14] Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Alfabeta, Bandung:

[15] Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*,Bandung : Alfabeta.

[16] Sujana Nana, & Lincolin Arsyad, 1992. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi.* Sinar Baru, Bandung

[17] Suradinata Ermaya, 1994. *Teori dan Praktek Kebijaksanaan Negara*, Ramadhan, Bandung

[18] Tachjan.H.2006. *Implementasi kebjakan Publik*. AIPI Bandung Luslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.

[19] Umar Husain, 1999, *Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi,* PT. Gramedia, Jakarta.

[20] Wahab Solichin Abdul. 2008. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara.*Bumi Aksara, Jakarta.

[21] Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

[1] Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 *Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan*

[2] Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 *Tentang Jaminan Kesehatan*

[3] Pergub Sulsel Nomor 13 Tahun 2008 *tentang pedoman pelaksanaan kesehatan Gratis di Provinsi Sulsel.*

[4] Perda No. 2 Tahun 2009 *tentang Pelaksanaan Kesehatan Gratis.*

[5] Undang-Undang RI Nomor. 40 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*

[6] Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIFATIF DI DAERAH

Rusman Sitonda, Rais Rahmat Razak, Lahibu Tuwu
Magister Administrasi Publik STISIP Muhammadiyah Rappang
Sidenreng Rappang, Indonesia
rusmansitonda@gmail.com, mraisrahmat@yahoo.com, lahibutuwu@yahoo.co.id

ABSTRAK — Sistem perencanaan partisifatif tercipta apabila perencanaan tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrik masyarakat yang dalam proses penyusunannya benar-banar melibatkan masyarakat. Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan proses perencanaan pembangunan pada klasifikasi berpengaruh, namun hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu (1) Faktor kemauan yang ditandai dengan adanya motif seseorang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan. (2) Faktor Kesempatan yang ditandai dengan tersedianya waktu untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan (3) dan faktor kemampuan yang ditandai oleh kemampuan baca tulis dan tingkat pengetahuan masyarakat. Kondisi ini pada umumnya di Desa dan Kelurahan memiliki kompetensi dan ketrampilan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan Musrenbang.

Kata Kunci — Partisipasi Masyarakat, Proses Perencanaan, Pembangunan.

I. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan daerah dapat dipandang sebagai suatu formulasi atau rumusan mengenai aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka mencapai suatu kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah pembangunan.

Secara umum kita mengenal dua model perencanaan yaitu : (1). Perencanaan yang ditentukan langsung dari pusat atau pemerintah yang lebih tinggi (top-down), sehingga pemerintah daerah hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang sudah ada; dan (2). Perencanaan partisipatif (button-up) yang merupakan hasil dari pergulatan masyarakat setempat dengan menggunakan mekanisme formal dan nonformal (bersifat partisifatif). Kualitas dari perencanaan daerah dan implikasinya pada kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh model yang dipilih.

Suatu perencanaan disebut partisifatif apabila perencanaan tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrik dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masayarakat. Perlu disadari, bahwa ada beberapa kendala yang muncul apabila perencanaan harus melibatkan massa rakyat. Pertama, kenyataan bahwa massa rakyat umumnya adalah pihak yang tidak memiliki kesempatan menikmati pendidikan formal yang memadai. Karena rendahnya kemampuan baca tulis dan keterbatasan pengetahuan, massa rakyat sulit bisa ambil bagian secara produktif dalam proses prencanaan pembangunan daerah. Kedua, Massa rakyat telah ditradisikan dalam proses politik yang mengekor, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk oleh yang dituakan atau ditokohkan dalam suatu kelompok masyarakat. Akibatnya, ketika ada kebutuhan untuk mendorong adanya prakarsa masyarakat dalam perencanaan pembangunan hal ini tidak sertamerta bisa dilakukan.

Perencanaan daerah yang berbasis prakarsa rakyat (partisipatif) pada dasarnya membutuhkan dua syarat utama, yaitu : (1). Perlu adanya suatu langkah dalam rangka proses policy reform, yakni adanya perubahan kebijakan menyangkut

perubahan atas kebijakan-kebijakan yang membentengi, membatasi dan tidak memberikan pengakuan pada aspirasi rakyat. Artinya, perencanaan hanya bisa dijalankan bila sejumlah proses awal dilakukan seperti pengembangan pendidikan politik dan upaya-upaya untuk memperluas ruang politik rakyat. (2). Perencanaan dalam konteks ini dapat dipandang dan ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan politik yakni proses yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhannya, menyadari keterlibatan politiknya, dan menentuakan apa yang hendak dirumuskan oleh penguasa.

Lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 memberikan pengaruh yang cukup mendasar terhadap pelaksanaan proses perencanaan di daerah. Hal –hal yang sangat prinsip antara lain adalah : (1). Mekanisme atau hirearki perencanaan pembangunan nasional di daerah yakni dengan diberlakukannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlaku selama 20 tahun. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) yang berlaku selam 5 tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku tiap satu tahun yang merupakan turunan dari RKPD. (2). Mekanisme penganggaran daerah menghasilkan produk APBD sebagai bentuk operasional dari perencanaan pembangunan di atur dengan undang-undang yang berbeda, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (3). Dengan pengaturan yang berbeda antara sistem perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran mengakibatkan sering terjadi terputusnya proses perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran, meskipun dalam UU No. 17 tahun 2003 pasal 18 disebutkan, bahwa arah kebijakan pembangunan harus selajan dengan rencana kerja pemerinta daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. (4). Implikasi-implikasi yang timbul karena perbedaan persepsi tentang perundangan dalam proses perencanaan pada akhirnya mengakibatkan keberagaman model mekanisme perencanaan pembangunan di berbagai daerah.

Pada sisi lain, berkembangnya konsep pemberdayaan memerlukan tumbuhnya sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan (power). Sebagai suatau alternatif pembangunan, paradigma pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, alngsung melalui partisispasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK, 2007). Selvia (2010: 77) menyatakan bahwa patisipasi adalah *the taking part in one ore more phases of the process.* Sedangkan Keith Davis (1967) menyatakan bahwa patisipasi "*as mental and emotional involment of persons of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them"*

Verhangen (1979) dalam Mardikanto (2003: 34) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (2003) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan.

Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan

beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat (rewards) yang dapat diharapkan (Kunaryo, 2004: 44).

Partisipasi masyarakat menurut Ratan Waluyo (2001: 20) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Conyers (2001: 51) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakata, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap poyek tersebut; dan (3) yang mendorong adanya partisiapsi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat seringkali terhambat oleh persepsi yang kurang tepat, yang menilai masyarakat sulit diajak maju oleh sebab itu kesulitan penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat juga disebabkan karena sudah adanya campur tangan dari pihak penguasa. Berikut adalah macam tipologi partisipasi masyarakat:

1. Partisipasi Pasif/manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek yang memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran;
2. Partisipasi Informatif memilki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberikesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat;
3. Partisipasi konsultatif dengan karateristik masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, tidak ada peluang pembuatan keputusan bersama, dan para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagi masukan) atau tindak lanjut;
4. Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajan atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan dan asyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan;
5. Partisipasi Fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keptusan-keputusan utama yang di sepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya;
6. Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metoda interdisipliner yang mencari keragaman prespektik dalam proses belajar mengajar yang terstuktur dan sisteatis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan merek, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegitan;
7. Self mobilization (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.

Adapun tahapan dalam melakukan partisipasi dapat diuraikan dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan, Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2003: 60).
2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan Rizal (2001: 34) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu : partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan target. Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Widodo, 2006: 19).
3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2003: 69).
4. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2003: 80).
5. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2003: 85).

Endarlin (2003: 44) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut: (1). Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.; (2). Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar; meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi; (3). Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya; (4). Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan; (5). Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Isbandi Rahminto (2007:77) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1). Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; (2). Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi; (3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Lebih rinci Slamet menjelaskan tiga persyaratan yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi adalah sebagai berikut: *Pertama* Kemauan. Secara psikologis kemauan berpartisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan, dorongan atau tekanan dari pihak luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan berpartisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang: (a) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan; (b) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya; (c) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas sendiri; (d) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan; (e) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Kedua,. Kemampuan. Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik itu antara lain adalah: (a) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah; (b) Kemampuan untuk memahami kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia; (c) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki. Grindel (2005: 90) kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan., pada hakikatnya kemampuan individu tersuusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Ketiga, Kesempatan. Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi ini sangat dipengaruhi oleh: (a) Kemauan politik dari penguasa/pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan; (b) Kesempatan untuk memperoleh informasi; (c) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya; (d) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna; (e) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan mempergunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan; (f) Kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Mardikanto (2003: 100) menjelaskan adanya kesempatan yang diberikan, sering merupakan faktor pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan sangat menentukan kemampuannya. Kemauan untuk berpartisipasi

merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Sebab, kesempatan dan kemampuan yang cukup, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk (turut) membangun. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemam-puan dan aktif memburu serta memanfaatkan setiap kesempatan. (Carl Bellene, 2000: 57).Mardikanto (2003:111) menjelaskan beberapa kesempatan yang dimaksud adalah kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembagunan, baik dalam pengambilan kepu-tusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan; sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah. Selain hal tersebut terdapat kesempatankesempatan yang lain diantaranya kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.

Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk peralatan perlengkapan penunjangnya). Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan, dan Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat (Usman Hamaru, 2008: 65).

Adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan untuk menggerakkkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Usman Hamaru (2008:74) menjelaskan yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah; (1). Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya); (2). Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki; (3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Yadav dalam Mardikanto (2003: 77) mengemukakan adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu : partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan "pemerintah" kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, memberikan indikasi adanya pengakuan (aparat) pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemauan dan kemampuan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Stoner, 2003: 44).

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat.

Peran keterlibatan partisipasi juga penting karena pelembagaan sebagai sebuah strategi dilakukan justru untuk menghindari dominasi keputusan masyarakat oleh elit lokal, gagalnya pemberian ruang bagi kaum marginal, serta

menghindari bias partisipasi. Dominasi keputusan masyarakat oleh elit dapat menyebabkan adanya perilaku mengambil untung secara berlebihan dan menggagalkan relasi timbal balik antara pemilik dengan wakilnya dalam mekanisme pendelegasian. Kegagalan pemberian ruang bagi kaum marginal menyebabkan partisipasi semu dan buruknya kolektifitas sebagai awal dari komitmen sosial. Pemberian ruang bagi kaum marginal adalah tahapan pengkapasitasan dan pendayaan bagi lapisan masyarakat yang terisolir secara sosial, ekonomi, dan geografi.

Tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu; (1) instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik: (2) banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat; (3) banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat.

Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat berjalan baik adalah: (1) diperlukan instrument hukum yang secara subtantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas; (2) perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah yang peka terhadap kepentingan publik; dan (3) masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang terorgasisir dan independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.

Partisipasi (Keterlibatan) Masyarakat: (1) Ikut menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah; (2) Ikut memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan; (3) Ikut memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan; (4) Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif yang diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan indikator variable penelitian dengan menggunakan "regresi linear berganda" dengan bantuan program microsta SPSS, juga menggunakan teknik analisis data tabel frekuensi untuk data kualitatif dengan menggunakan "Skala Litker" yang akan dideskripsikan secara kuantitatif.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner
   Kuesioner ditujukan kepada responden untuk mendapatkan data primer yang terkait dengan variabel penelitian, yaitu partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
2. Wawancara
   Wawancara langsung *(interview)* yaitu teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan yang berkaitan dengan variabel penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)*.
3. Observasi
   Observasi dalam penelitian ini adalah dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk menjaring data pada saat kejadian itu berlangsung.
4. Dokumentasi
   Teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu teknik mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian sebagai sumber data baik dalam bentuk dokumen surat keputusan, literatur ilmiah, Koran, buleting, jurnal dan arsip.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembagunan yang direncanakan oleh pemerintah partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan

mereka. Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa prasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan (Sumodingrat, 2000: 88).

Conyers (dalam Mubiyarto, 2002: 19) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

1. Partisipasi pada Tahap Perencanaan

Sehubungan dengan hal partisipasi masyarakat diatas, maka peneliti melihat sajauhmana keterlibatan masyarakat dalam mengambil peran dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan pada berbagai tingkatan. Pada tingkatan desa sebagai organisasi terkecil dalam suatu masyarakat dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

Tabel. I.1
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanann Musrenbang Tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F Skor	(%)
1.	Sangat terlibat	5	0	0	0
2.	Cukup terlibat	4	0	0	0
3.	Terlibat	3	39	108	79,60
4.	Kurang terlibat	2	10	20	20,40
5.	Sangat tidak terlibat	1	0	0	0
	Jumlah		49	128	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 1.1: mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan melibatkan masyarakat dari berbagai golongan, hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "terlibat" dengan 79,60%, dan pada klasfikasi "kurang terlibat" dengan 20,40%. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang karena disebabkan oleh himbauan dan undangan Kepala Desa agar supaya masyarakat dari berbagai golongan supaya menghadiri Musrembang.

Sejalan dengan hal tersebut, Menurut Peters (dalam Mubyarto, 2005: 90), partisipasi dapat tumbuh subur pada tata pemerintahan yang lebih menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dibanding hirarki dan teknokrasi. Kebijakan bukan persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokrasi oleh sekelompok orang yang dipercaya untuk merumuskannya, tetapi kebijakan merupakan ruang bagi teknokrat dan masyarakat untuk melakukan kerjasama dan menggabungkan pengetahuan. Oleh karena itu dalam menetapkan kebijakan harus melibatkan pihak yang luas dan menjamin kepentingan stakeholders.

Mengapa pelibatan masyarakat dalam perencanaan kebijakan pembangunan penting dilakukan, karena pelibatan masyarakat dalam membuat kebijakan merupakan faktor utama dalam good governance yang memberikan

manfaat besar terhadap kepentingan public, diantaranya meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat dan sebagai sumber bahan masukan terhadap pemerintah sebelum memutuskan kebijakan. Bagi pendukung partisipasi, keunggulan partisipasi adalah menjamin ketercapaian tujuan, menjamin keberlanjutan, menjamin terakomodasinya suara kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan. Bagi pengkritik model partisipasi berpendapat bahwa partisipasi dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan waktu untuk formulasi kebijakan.

Oleh karena itu partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.(Siti Irene, 2011: 50) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyebutkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. (Ibnu Kencana, 2002: 132)

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Sumarto, 2003:17) Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataaannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan.masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Siti Fatimah, 2012:10)

Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Sedangkan Keith davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Selain itu Alastaire White, mengemukan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat.(dalam Sunarti, 2003: 76).

Tabel I.2
Keterlibatan Masyarakat dalam Konteks Identifikasi Program Pada Musrenbang Tingkat Desa

No.	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F Skor	(%)
1.	Sangat terlibat	5	0	0	0
2.	Cukup terlibat	4	0	0	0
3.	Terlibat	3	10	30	20,40
4.	Kurang terlibat	2	39	78	79,60
5.	Sangat tidak terlibat	1	0	0	0
	Jumlah		49	108	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 1.2, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan melibatkan masyarakat dari berbagai golongan, hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "terlibat" dengan 20,40%, dan pada klasfikasi "kurang terlibat" dengan 79,60%. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pada tahapan identifikasi program pada saat Musrenbang disebabkan oleh masyarakat cenderung menganut sistem perwakilan ketokohan yang akan mengusulkan program/kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka mengidentifikasi program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat diperlukan karena identifikasi adalah kegiatan menentukan atau menetapkan identitas (ciri-ciri atau keadaan khusus) seseorang atau benda. Kegiatan identifikasi merupakan kegiatan awal dan merupakan kegiatan awal dan merupakan salah satu tujuan dari asesmen; dengan telah dilakukan identifikasi tersebut maka asesmen sudah mulai dilaksanakan, asesmen selanjutnya akan lebih dipermudah karena sudah ada data identitas seseorang yang akan diasesmen lebih lanjut. Identifikasi merupakan kegiatan menelaah atau mencari, menemukan, mengumpulkan, data dan informasi dari "kebutuhan" lapangan. Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan terasa yang sifatnya mendesak dan kebutuhan terduga yang sifatnya tidak mendesak.

Fungsi dan tujuan identifikasi kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan masyarakat. Untuk mengetahui berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pendukung pelaksanaan program dan mempermudah dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Fungsi agar program yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan

Strategi program pembangunan muncul sebagai alternatif dalam penyusunan rencana pembangunan menggantikan model perencanaan lama (konvensional), yaitu perencanaan jangka panjang *(long-range planning)* maupun perencanaan yang berbasis pada tujuan. Kebutuhan sebuah perencanaan strategis disebabkan perubahan eksternal yang terjadi dengan cepat dan tidak menentu. Hal ini menuntut sebuah organisasi atau komunitas untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan itu secara internal agar mampu mempertahankan fungsi dan peranannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada kelompok sasaran. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengatasi lingkungan eksternal dan secara berkelanjutan melakukan kajian terhadap kapasitas internal sebagai prasyarat untuk tetap memelihara dan mempertahankan eksistensinya.

Identifikasi program pada penerapan model perencanaan konvensional berangkat dari asumsi penetapan tujuan jangka panjang sebagai *entry point* dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara dalam perencanaan strategis berangkat dari visi, misi dan nilai-nilai yang menjadi dasar untuk merespon perubahan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategis merupakan bagian dari perubahan itu sendiri. Proses ini dilakukan melalui kajian sistematis yang memadukan visi, misi, serta perkembangan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan sebagai lingkungan internal suatu organisasi untuk menentukan arah yang ingin dicapai.

Tabel I.3
Keterlibatan Masyarakat Dalam Konteks Perumusan Program Mengklasifikasikan Program/Kegiatan Pada Musrenbang Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F dan Skor	(%)
1.	Sangat teribat	5	0	0	0
2.	Cukup terlibat	4	0	0	0
3.	Terlibat	3	10	30	20,40
4.	Kurang terlibat	2	39	78	79,60
5.	Sangat tidak terlibat	1	0	0	0
	Jumlah		49	108	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 1.3 mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam konteks perumusan program dalam Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan hanya diikuti oleh sebagian kecil masyarakat yaitu pada klasifikasi "terlibat" dengan 20,40%, dan pada klasfikasi "kurang terlibat" dengan 79,60%. Pada tahapan pengklasifikasian program, keterlibatan masyarakat kurang disebabkan oleh karena pada tahapan ini aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang berkompeten untuk mengklasifikasikannya kemudian diusulkan ke pada SKPD masing-masing sesuai dengan urusan dan tufoksi SKPD tersebut, sebagai contoh untuk urusan Infrastruktur di usulkan ke Dinas PU, Jalan Tani diusukan ke Dinas Pertanian, urusan kesehatan ke Dinas Kesehatan dan seterusnya.

Dalam hal ini, proses penyusunan program harus dapat menjabarkan inisiatif menjadi beberapa program yang akan dilaksanakan beberapa tahun yang akan datang, memperkirakan investasi yang diperlukan untuk setiap program, menghitung perkiraan penerimaan yang dapat diperoleh dan menghitung perkiraan laba yang akan diperoleh. Penyusunan anggaran bertujuan untuk menentukan kegiatan tahun berikutnya dan sumber daya yang diperlukan. Anggaran disusun berdasarkan iniatif yang telah dirumuskan. Anggaran yang baik adalah: merupakan rencana tindakan terperinci, merupakan rencana satu-dua tahunan, menguraikan biaya yang diperlukan, mengidentifikasi pencapaian terpenting kegiatan tersebut, menyebutkan siapa yang akan bertanggung jawab, sebagai referensi menyusun rencana kinerja individual, ditulis secara singkat namun lengkap, alat untuk memantau kinerja dan diperbarui apabila terjadi perubahan-perubahan.

Beberapa asumsi yang dipakai untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan sebuah peogram, yaitu :(1) Rakyatlah yang paling tahu kebutuhannya, karena rakyat mempunyai hak untuk mengidentifikasikan dan menentukan kebutuhan pembangunan di lokalnya; (2) Partisipasi sosial dapat menjamin kepentingan dan suara-suara kelompok yang selama ini dimarjinalkan dalam berbagai aspek pembangunan; (3) Partisipasi sosial dalam pengawasan terhadap proses pembangunan dapat menjamin tidak terjadinya berbagai penyimpangan, penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; partisipasi dalam pemanfaatan; dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut

nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Partisipasi dalam perumusan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini Uphoff menegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan konstribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program.

Tabel I.4
Keterlibatan Masyarakat Dalam Konteks Penyusunan Program
Pada Musrenbang Tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F Skor	(%)
1.	Sangat teribat	5	0	0	0
2.	Cukup terlibat	4	0	0	0
3.	Terlibat	3	9	27	18,37
4.	Kurang terlibat	2	40	80	81,63
5.	Sangat tidak terlibat	1	0	0	0
	Jumlah		49	107	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 1.4; mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan, khususnya dalam konteks penyusunan program kurang melibatkan masyarakat hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yaitu pada klasifikasi "terlibat" dengan 18,37%, dan pada klasfikasi "kurang terlibat" dengan 81,93%. Kurangnya masyarakat yang terlibat dalam penyusunan program dikarenakan keterbatas pengetahuan masyarakat tentang masalah-masalah program pembangunan yang menjadi prioritas di desanya.

Disadari bahwa, penyusunan program adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka panjang (umumnya untuk jangka waktu 3-5 tahun), dan penaksiran jumlah sumber-sumber *(resources)* yang akan dialokasikan pada setiap program. Program umumnya disusun sesuai dengan jenis atau keluarga produk *(product lines)*. Program sering pula disebut dengan perencanaan jangka panjang *(long-range planning)*. Dalam penyusunan program terdapat tiga kegiatan pokok, yaitu : (1) Peninjauan kembali terhadap program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah rusahaan sangat diperlukan; (2) Mempertimbangkan usulan program baru. Dalam hal ini manajemen dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif, yaitu : menerima atau menolak usulan program baru; (3) Mengkoordinasi program-program dalam suatu sistem penyusunan program secara formal : Sistem penyusunan program secara formal diperlukan oleh setiap organisasi, baik dalam kegiatan peninjauan kembali program-program yang sedang dilaksanakan maupun dalam pengambilan keputusan atas program baru.

Proses penyusunan program umumnya dimulai beberapa bulan menjelang dimulainya proses penyusunan anggaran. Penyusunan program yang formal umumnya melalui tahap-tahap sebagai berikut : (1) Penentuan tujuan dan strategi dasar oleh manajemen puncak, yang hasilnya disebarkan kepada para manajer operasi;

(2) Berpedoman pada tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, para manajer operasi membuat usulan-usulan program untuk didiskusikan dengan manajemen puncak; (3) Usulan program tersebut didiskusikan oleh manajemen puncak dan para manajer operasi, jika perlu diadakan revisi, penambahan atau pengurangan, sehingga ditetapkan sebagai suatu program perusahaan secara keseluruhan.

Penyusunan program adalah proses pembuatan keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program tersebut. Program adalah kegiatan pokok yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.

Kegiatan Pokok Penyusunan Program. Untuk perusahaan yang sudah berjalan dan sudah memiliki program yang sedang berjalan, urutan ketiga macam kegiatan pokok penyusunan program tersebut meliputi: (1) Penelaahan program yang sedang berjalan; (2) Penyusunan dan analisis usulan program baru dan pembuatan keputusan atas usulan program tersebut; (3) Sistem pengkoordinasian program yang terpisah sehíngga dapat mengoptimalkan fungsi perusahaan sebagai suatu kesatuan.

I. Pada Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembanguan yang ada di dalamnya (owner).

Pembangunan desa mempunyai makna membangun masyarakat perdesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek di masyarakat (Adisasmita, 2006:34). Salah satu tujuan kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahannya dan penyediaan infrastruktur perdesaan. Dari 3 sasaran utama kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) adalah : 1) Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan dan 3) Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 2.1
Peran Aktif Masyarakat Dalam Konteks Pengawasan Pelaksanaan Program Pembangunan Pada Tingkat Desa

No	Jawaban Responde	Skor	Frek.	F Skor	(%)
1.	Sangat Aktif	5	0	0	0
2.	Cukup aktif	4	0	0	0
3.	Aktif	3	20	60	40,81
4.	Kurang aktif	2	29	58	59,19
5.	Sangat tidak aktif	1	0	0	0
	Jumlah		49	118	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 2.1 mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan terhadap program pembangunan yang ada didesanya berada pada klasifikasi "kurang aktif" dengan 59,19% dan pada klasifikasi "aktif" dengan 40,81%. Data tersebut mengungkapkan bahwa kurang teribatnya masyarakat dalam melakukan pengawasan tersebut karena kehadiran program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diharapkan, sehingga masyarakat tidak peduli terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan, dimana peran aktif masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan. Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adanya suatu proses perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, maka pengawasan dapat disebut sebagai bagian dari manajemen. Hal mana disebut demikian karena dalam proses manajemen yang lengkap dan sempurna dilakukannya fungsi-fungsi manajemen, antara lain menurut Terry sebagaimana dikutip Panglaikim dan Kansil (1960) *dalam* Supriatna (1997) yaitu meliputi empat fungsi manajemen masing-masing *Planning, Organizing, Actuiting, and Controlling*.

Nawawi (2003) menyatakan pengawasan masyarakat (*social control*) disingkat dalam bahasa Indonesia (*Wasmas*) adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan dan lain-lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit organisasi kerja non profit di bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Zainum (2004) menyatakan masyarakatpun melakukan pengawasan terhadap manajemen sumber daya manusia berupa pengawasan masyarakat (*Wasmas*) yang dapat dilakukan melalui media massa, termasuk surat pembaca, melalui kotak pos 5000, melalui surat ke instansi masing-masing, melalui petisi atau resolusi melalui demonstrasi, melalui lembaga perwakilan, melalui delegasi dan melalui pengaduan ke Pengadilan Umum dan/atau pengadilan Tata Usaha Negara yang secara khusus menampung pengaduan masyarakat bila mana terdapat tindakan melanggar hukum dari pejabat maupun pegawai pemerintah.

Secara teknis, pengawasan dimuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 9 ayat (1) menyatakan masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; pasal (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

Secara nyata dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat (*social control*) dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada organ pemerintah yang berkompoten dalam melaksanakan pelayanan umum (*public service*) dalam bentuk pikiran, ide/gagasan, maupun keluhan pengaduan yang bersifat positif atau membangun secara langsung maupun melalui medium/sarana lain (media massa).

Dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat (*social control*) tidak terlepas dari norma umum pengawasan sehingga tujuannya tidak berorientasi subyektivitas akan tetapi berorientasi obyektivitas. Pengawasan masyarakat (*social control*) yang dilakukan masyarakat di desa penelitian, ditujukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya) sebagai suatu reaksi yang timbul akibat kinerja pemerintah desa yang tidak maksimal dalam pelaksanaa kegiatan pembangunan secara umum. Dari beberapa permasalahan yang terjadi, bermula dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa yang tidak melibatkan atau mengikutsertakan warga dalam pengambilan keputusan.

Tabel 2.2

Peran Aktif Masyarakat Dalam Konteks Koordinasi Pelaksanann Program Pembangunan Pada Tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F. Skor	(%)
1.	Sangat aktif	5	0	0	0
2.	Cukup aktif	4	0	0	0
3.	Aktif	3	11	33	22,44
4.	Kurang aktif	2	48	96	77,56
5.	Sangat tidak aktif	1	0	0	0
	Jumlah		49	129	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 2.2; mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan pada tingkat desa terlihat aktivitas masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya kurang terlibat dalam kegiatan koordinasi dalam hal lebih mengefektifkan pelaksananan program pembangunan yang ada didesanya. Hal ini dikarenakan oleh kurang terbukanya pemerintah desa yaitu aparat yang terbitkan dalam kegiatan program pembangunan untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Kondisi tersebut dibuktikan oleh jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "kurang aktif" dengan 77,56%, dan pada klasfikasi "terlibat" dengan 22,44%.

Dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan, khususnya yang ada didesa, maka peran masyarakat dalam bentuk koordinasi dengan pemerintah desa sangat diperlukan sebagai instrument pengawasan. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses

pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Menurut James G March dan Herben A Simon, bahwa Koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantungan.

Koordinasi menurut Terry, adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.

Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda, agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Adapun tujuan koordinasi, yaitu: (1) untuk menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi; (2) untuk mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan; (3) untuk menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

Dengan demikian, koordinasi memiliki syarat-syarat yakni : (1) *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian; (2) *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba; (3) *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai; (4) *Esprit de Corps,* bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat. Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut **:** (1) Koordinasi adalah dinamis, bukan statis; (2) Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran; (3) Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Koordinasi merupakan tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut: (a) Kesatuan Tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi; (b) Komunikasi, tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya

komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut : (a). Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian dalam suatu lingkungan; (b) Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan; (c) Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial dari generasi yang satu ke generasi yang lain.

Tabel 2.3
Peran Aktif Masyarakat Dalam Konteks Swadaya Program Pembangunan pada tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F Skor	(%)
1.	Sangat teribat	5	0	0	0
2.	Cukup terlibat	4	0	0	0
3.	Terlibat	3	25	75	51,02
4.	Kurang terlibat	2	24	48	48.98
5.	Sangat tidak terlibat	1	0	0	0
	Jumlah		49	123	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 2.3: mengungkapkan bahwa salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah adanya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di Desa dan Kelurahan yang melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari kegiatan swadaya masyarakat, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "terlibat" dengan 51,02%, dan pada klasfikasi "kurang terlibat" dengan 48,98%.

Peran Swadaya Masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan, hususnya terlihat dalam aktivtas membangun infrastruktur (sarana prasarana) dengan mendapatkan bantuan dari pemerintah tanpa memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat. Hal ini peran masyarakat dan partisipasinya cukup dibutuhkan dalam penyelesaian sarana dan prasarana yang dibangun di Desa yang mendapatkan bantuan. Manun perlu disadari kesadaran akan swadaya masih cukup rendah, dimana masyarakat hanya mengharapkan bantuan itu diperoleh kemudian dikerajakan ala kadarnya bahwa ini bantuan Pemerintah untuk rakyat. Padahal pembangunan itu akan dirasakan dan dinikmati oleh mereka secara keseluruhan.

Target minimal pemberdayaan adalah membangun perubahan pola pikir masyarakat. Dari menengadahkan tangan menjadi menelungkupkan tangan bukan hanya menerima namun juga memiliki. Sebenarnya masyarakat sejak dulu memiliki kesadaran itu namun menjadi berubah, apakah kerena akibat kemiskinan struktural, ya kemiskinan struktural karena, selama ini berhadapan dengan pemerintahan yang kurang trasparan, sehingga mereka ragu dalam mengulurkan sumbangannya pada pembangunan terutama yang melibatkan pemerintah.

Hal inilah membangun kesadaran yang secara transparan bahwa membangunan itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Setelah banyak kita rasakan hasil pekerjaan prasarana yang melibatkan masyarakat dapat terukur kesadaran swadaya baik uang, material maupun tenaga adalah dari kualitas, volume atau kuantitas cukup dapat dirasakan dan terukur secara pasti. Pembangunan yang terencana dengan baik, administrasi yang jujur dan transaparan, serta hasilnya berkualitas pasti akan memunculkan kesadaran untuk berswadaya, bahkan di masa datang akan melahirkan kemandirian, didukung dengan peningkatan ekonomi dan kualitas hidup mereka. Misalkan pembangunan rabat beton atau sender irigasi mereka akan meraskan tebal, tinggi dan panjang yang tercapai, serta kualitas bangunan baik beton maupun sender. Dimana keawetannya, ketebalan,

kekerasannya akan berbeda antara yang tinggi swadayanya dengan rendah swadayanya.

II. Partisipasi Pada Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi. Sedangkan partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. (Josef Riwu, 2007:127).

Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dan partisipasi masyarakat juga berarti adanya keterlibatan langsung bagi warga dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol serta koordinasi dalam mempertahankan hak-hak sosialnya. Jika dikaitkan dengan tingkat kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat dikaitkan dengan partisipasi sebagaimana dijelaskan oleh Shery Arstein, maka peran serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan ke dalam anak tangga sebagai berikut : (a) *Citizen power* Pada tahap ini terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi kontrol masyarakat, pelimpahan, dan kemitraan. (b) *Tokenism* Pada tahap ini hanya sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat mendengar dan memiliki hak untuk member suara, tetapi pendapat mereka belum menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Tingkatan meliputi penetraman, konsultasi, dan informasi; (c) *Non partipation* Pada tahap ini masyarakat hanya menjadi objek. Tingkatan ini meliputi terapi dan manipulasi. Berdasarkan anak tangga dapat diasumsikan bahwa partisipasi yang mampu menggerakkan dinamika masyarakat adalah partisipasi yang diklasifikasikan ke dalam *citizen power,* karena dalam konteks inilah terdapat ketelibatan masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis.

Secara khusus lagi peter Oakley mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : (a) *Manipulation* Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indotrinasi; (b) *consultation* Stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan; (c) *Consensus building* Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok; (d) *Decision-making Consensus* terjadi disarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu; (e) *Risk-taking* Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan, dan impikasi.

Tabel 3.1
Peran Masyarakat Dalam Konteks Rasa Memiliki Hasil Pembangunan
Pada Tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F. Skor	(%)
1.	Sangat merasa memiliki	5	0	0	0
2.	Cukup merasa memiliki	4	0	0	0
3.	Memiliki	3	10	30	20,40
4.	Kurang memiliki	2	39	78	79,60
5.	Sangat tidak memiliki	1	0	0	0
	Jumlah		49	108	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 3.1; mengungkapkan bahwa penyelesaian program pembangunan yang ada di desa dan Kelurahan terkesan tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang dirumuskan dan ditetapkan dalam Musrenbang tingkat Desa dan kelurahan, sehingga kurang memotivasi masyarakat untuk merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Kondisi masyarakat seperti ini dibuktikan oleh jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "kurang merasa memiliki" dengan 79,60%, dan pada klasfikasi "merasa memiliki" dengan 20,40%.

Rasa memiliki (*sense of belonging*) merupakan ekspresi jiwa yang penting dalam kehidupan seseorang. Rasa memiliki juga akan memiliki dampak yang nyata terlihat secara signifikan di dalam perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki rasa memiliki akan bertindak peduli, terikat, memiliki empati, termotivasi bahkan mampu memberdayakan dirinya sendiri meskipun tidak ada stimulan. Contoh konkret rasa memiliki di dalam kehidupan adalah ketika seseorang merasa memiliki rumah, maka dia akan senantiasa menjaga dan membersihkan rumah tersebut terlebih rumah tersebut adalah tempat bernaungnya. Ketika seseorang memiliki anak, maka dia akan berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan ketika seseorang memelihara binatang peliharaan seperti burung ataupun kucing, dia akan menjaga agar binatang peliharaannya tidak mati kelaparan dan dapat selalu sehat.

Rasa memiliki ini cenderung tidak terlihat di dalam dunia kerja. Cukup banyak dari kita yang memandang pekerjaan sebagai beban dan tempat bekerja hanya sebagai pihak yang memasok gaji untuk melangsungkan kehidupan kita. Ironisnya rasa memiliki ini hampir luntur (bahasa halus dari nyaris tidak ada) di dalam perusahaan. Kita seringkali menyepelekan hal-hal kecil yang jika digabung secara keseluruhan berpotensi merugikan perusahaan tempat kita bekerja dan mencari nafkah ini.

Acapkali kita melakukan pemborosan yang tidak disengaja yang terjadi karena sikap ketidakpedulian yang merupakan buah dari tidak adanya rasa memiliki. Contoh rasa tidak memiliki, yaitu: Lupa mematikan air di kamar kecil, lupa mematikan pendingin udara ketika tidak ada orang bahkan lupa menutup valve secara rapat, lupa memeriksa apakah suku cadang yang digunakan untuk sarana produksi masih ada atau tidak dan yang lebih parah adalah lupa melayani pelanggan dengan baik serta tidak jujur dengan menyembunyikan fakta akan berdampak sangat besar bagi perusahaan tempat kita mencari nafkah.

Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita peduli dan mengembangkan rasa memiliki terhadap terhadap sesuatu yang menjadi sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan yang digarap dengan rasa syukur, rasa memiliki dan rasa cinta akan memberikan hasil yang memadai bagi penggarapnya, demikian pula dengan pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan dan rasa cinta. Singkatnya sikap memiliki terhadap hasil pembangunan akan memberikan hasil yang positif bagi kelangsungan kehidupan kita.

Tabel 3.2
Peran Masyarakat Dalam Konteks Pemeliharaan Hasil Pembangunan Tingkat Desa

No	Jawaban Responden	Skor	Frek.	F . Skor	(%)
1.	Sangat memelihara	5	0	0	0
2.	Cukup memelihara	4	0	0	0
3.	Memelihara	3	10	30	20,40
4.	Kurang memelihara	2	39	78	79,60
5.	Sangat tidak memelihara	1	0	0	0
	Jumlah		49	108	100,00

Sumber: Hasil olahan data primer, 2016.

Tabel 3.2 mengungkapkan bahwa hasil-hasil pembangunan yang telah ada di desa dan kelurahan terlihat kurang dipelihara oleh masyarakat secara swadaya karena keterbatasan dana dan kurang rasa memiliki atas hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu ada beberapa hasil pembangunan yang tidak terpelihara dengan baik. Dalam hal ini pemerintah desa juga tidak menyiapkan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur pembangunan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh jawaban responden yang paling banyak pada klasifikasi "kurang memelihara" dengan 79,60%, dan pada klasfikasi "memelihara" dengan 20,40%.

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara fasilitas Produksi termasuk mesin dan alat-alat produksi lainnya atau untuk memperbaikinya sampai pada suatu kondisi yang dapat diterima. Selain itu pemeliharaan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menjaga fasilitas-fasilitas dan peralatan pabrik serta mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar tercapai suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan dan sesuai dengan yang direncanakan.

Aktifitas pemeliharaan (*maintenance*) sangat diperlukan karena: (1) Setiap peralatan mempunyai umur penggunaan (*useful life*).suatu saat dapat mengalami kegagalan/kerusakan; (2) Kita tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan peralatan akan mengalami kerusakan (*failure*); dan (3) Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan umur penggunaan dengan melakukan perawatan. Pemeliharaan (*maintenance*) berperang penting dalam kegiatan produksi dari suatu perusahaan yang menyangkut kelancaran atau kemacetan produksi, volume produksi, serta agar produk dapat diproduksi dan diterima konsumen tepat pada waktunya (tidak terlambat) dan menjaga agar tidak terdapat sumber daya kerja (mesin dan karyawan) yang menganggur karena kerusakan (*downtime*) pada mesin sewaktu proses produksi sehingga dapat meminimalkan biaya kehilangan produksi atau bila mungkin biaya tersebut dapat dihilangkan.

Dengan demikian, pemeliharaan memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan fungsi-fungsi lain dari suatu perusahaan. Karena pentingnya aktivitas pemeliharaan maka diperlukan perencanaan yang matang untuk menjalankannya, sehingga terhentinya proses produksi akibat rusak dapat dikurangi seminimum mungkin. Pemeliharaan yang baik akan mengakibatkan kinerja perusahaan meningkat, kebutuhan konsumen dapat terpengaruhi tepat waktu, serta nilai investasi yang dialokasikan untuk peralatan dan mesin dapat diminimalkan. Selain itu pemeliharaan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan mengurangi *waste* yang berarti mengurangi ongkos produksi.

Pelaksanaan dari perawatan ini memerlukan beberapa hal penting, yaitu diantaranya: (1) Orang yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan; (2) Perencanaan dan penjadwalan perawatan; (3) Pengawasan untuk dapat menjaga agar tujuan perawatan dapat terpenuhi; (4) Diperlukan pula penyesuaian bila terjadi suatu penyimpangan, perubahan terhadap kinerja produksi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan partisipatif secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memamfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Karena itu pembangunan partisipatif merupakan pembangunan yang berangkat dari perencanaan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri sebagai obyek dan subyek pembangunan;

2. Partisipasi merupakan keiukutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tiga hal yaitu: Partisipasi pada tahap perencanaan pembangunan, partisipasi pada saat pelaksanaan pembangunan dan partisipasi pada saat pemamfaatan hasil pembangunan, berdasarkan (1) hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpangaruh secara siginifikan terhadap perencanan pembangunan, yaitu: variabel Perencanan (X1) dengan 80,11%; dan variabel Pelaksanaan (X2) dengan 62,60%; dan variabel pemanfaatan hasil pembangunan (X3) dengan 79,60%; dan (2) hasil analisis statistic, yaitu pengaruh variabel X secara simultan terhadap Y pada kategori "sangat nyata" pada taraf 5% (t hit 4,15 > t tab 2,60) dan 1% (t hit 4.15 > tab 2,91).
3. Keterhubungan antara variabel partisipasi masyarakat dengan variabel perencanaan pembangunan pada klasifikasi "berpengaruh", namun dalam hal ini tidak terlepas dati beberapa factor yang ikut mempengaruhi partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebagai factor penghambat: (a) factor kemauan; (b) factor kesempatan; dan (c) factor kemampuan. Kondisi ini di Desa dan Kelurahan pada umumnya memiliki komptensi dan keterampilan yang berkaitan dengan tahapan-tahapan Musrembang.
4. Dampak dari hasil perencanaan pembangunan yang menunjukkan adanya ketidaksesuain antara harapan dan kebutuhan masyarakat pada tingkat desa dan kelurahan, sehingga masyarakat memiliki sikap yang kurang merespon hasil pembangunan yang ada. Pernyataan sikap tersebut, terlihat pada: (1) pelembagaan nilai-nilai partipasi sebagai sebuah sendi demokrasi belum menjadi prioritas masyarakat; (2) peran aktif masyarakat, khususnya dalam konteks Musrembang tingkat Desa dan Kelurahan belum terwujud sesuai dengan harapan pemerintah, karena belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan (3). Banyaknya peraturan yang meredan keinginan masyarakat untuk berpastisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Abipradja, Soedjono. 2001. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Surabaya Airlangga University Press.

[2] Achmad Mansyur, 2010. *Teori-Teori Mutakhir Administrasi Publik*. Yogyakarta, Rangkang Edication.

[3] Ahmad Jamaluddin, 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi), Yokyakarta, Gava Media.

[4] Bryant dan White. 2000. *Manajemen Pembangunan: Untuk Negara Berkembang.* LP3ES. Jakarta

[5] Burhan Bunging, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif,* Yogyakarta: UGM Press.

[6] Handoko, T. hani. 2008. *Manajemen* Edisi 2. Yogyakarta: BPFE

[7] Hamaru, Usman. 2010. Strategi Pengembangan Koordinasi Perencanaan Terpadu Bappeda Provinsi Gorongtalo. UNM. Makassar,

[8] Holil Soelaiman. 2000. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung,

[9] Ibrahim, H. Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya.* Bandung: Refika Aditama

[10] Isbandi Rukminto, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan.* Depok: FISIP UI Press.

[11] Keban, Jeremias, T. 2008. *Dimensi-Dimensi Strategik Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu.* Yogyakarta. Gaya Media.

[12] Kunaryo. 2004. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan.* Jakarta: UI PRESS.

[13] Mardikantoro, 2003. *Partisipasi Masysrakat dan Perencanaan Pembangunan.* Yogyakarta: UGM Press,

[14] Osborne, David. Ted Gaebler. 2002. *Meriusahakan Birokrasi Reiventing Government.* Terjemahan oleh Abdul Rosyid 1999. Jakarta: Teruna grafica.

[15] Ratam, Waluyo, 2001. *"Peranan Birokrasi Dalam Pembangunan"* Makalah Disampaikan pada Diskusi Panel Persada Makassar

[16] Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: gramedia Pustaka Utama.

[17] Rizal, Suryadi. 2001. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.

[18] Rokhman, Ali. 2005; *Visi Publik, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Imu politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

[19] Stoner, James. A,F. Charles Wankel. 2003. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen* (1) Terjemahan oleh Sahat Simamora, 1993. Jakarta: Renika Cipta.

[20] Silvia Bolgherini 2010, "*Participation*" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science*.

[21] Semardayanti, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Hajimasagung.

[22] Tjokroamidjojo. Bintoro. 2004. *Perencanaan Pembangunan.* Jakrta: Hajimasagung.

[23] Tjokrowinoto, 2001. *Manajemen Pembangunan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP DISIPLIN KERJA KARYAWAN PADA PT. BANK SUMUT CABANG SUKARAMAI

Sjahril Effendy, Juliandri Raka Putra
Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sjahrileff@gmail.com

ABSTRAK : Disiplin kerja karyawan pada PT. Pank Sumut Cabang sukaramai mengalami penurunan. Penurunan ini berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan yang tidak optimal. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi yang belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai yang diuji secara parsial dan simultan.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan asosiatif. Seluruh populasi sebanyak 124 responden digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda uji-t dan uji-F serta uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai. (2) Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai. (3) Ada pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan PT.Bank Sumut Cabang Sukaramai (4) Ada pengaruh gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja karyawan PT. Bank sumut Cabang Sukaramai.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

I. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang kompeten dengan disiplin yang baik, dapat mendorong keberhasilan bisnis suatu perusahaan PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai menyadari hal tersebut, karena semakin baik disiplin kerja karyawan, semakin baik pula kinerja yang dicapai. Kekurangan PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai selama ini adalah banyaknya karyawan yang tidak patuh yang mengakibatkan turunnya disiplin kerja. Indikasi kekurangan itu antara lain kurang sesuainya gaya kepemimpinan yang diterapkan pada karyawan, masalah lingkungan kerja yang timbul yaitu kurangnya fasilitas pada kantor, sehingga lingkungan kerja tidak nyaman kemudian budaya organisasi tidak sepenuhnya diterapkan oleh semua karyawan, sehingga budaya organisasi PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai menjadi lemah. Fenomena yang ada diperusahaan ini mengalami penurunan disiplin kerja. Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk diteliti dengan judul: "Pengaruh gaya Kepemimpinan, Lingkungan kerja dan Budaya organisasi terhadap disiplin keja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai. (2) Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (3) Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja

karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (4) Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan lingkungan kerja, dan budaya organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja karyawan PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (3) Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (4) Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan lingkungan kerja dan budaya organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

Manfaat penelitian adalah (1) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya (2) hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dan para investor.

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. (Hasibuan, 2005:193) [1].

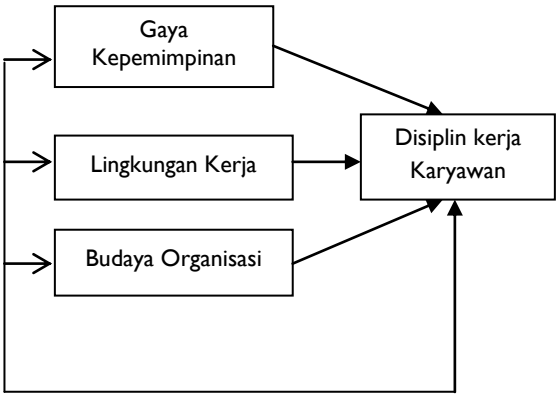
Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkordinasikan dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Darwin, 2004:56) [2].

Perilaku kepemimpinan memusatkan pada gaya pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Para peneliti telah mengidentifikasikan dua gaya kepemimpinan gaya dengan orientasi tugas *(task oriented)* dan gaya dengan orientasi karyawan (*employee oriented)* (Handoko, 2014:297) [3].

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang disesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2001:183) [4].

Budaya organisasi menyangkut bagaimana para anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah para anggota organisasi menyukainya atau tidak, karena para anggota menyerap budaya organisasi berdasarkan dari apa yang mereka lihat atau dengat didalam organisasi. Dan anggota organisasi cenderung mempersepsikan sama tentang budaya dalam organisasi tersebut meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda ataupun bekeja pada tingkat-tingkat keaslian yang berlainan dalam organisasi tersebut (Robbins, 2002:279) [5].

Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Kerangka Konseptual
(Sumber : Diolah oleh Peneliti)

Hipotesis :

1. Ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai
2. Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.
3. Ada pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.
4. Ada pengaruh gaya kepemimpinan lingkungan kerja, dan budaya organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data serta penampilan hasilnya.

Populasi penelitian adalah seluruh karyawan tetap PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai yang berjumlah 124 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi sebanyak 124 orang karyawan tetap.

Tempat penelitian di kantor PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai. Yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2017.

Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan studi dokumentasi dan dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrument. Teknik analisis data adalah dengan analisis regresi linear berganda, melakukan uji-t dan uji-F serta koefisien determinasi.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian, dilakukan dulu pengujian asumsi klasik yang meliputi : uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah data dilakukan uji asumsi klasik dan diperoleh data yang berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas, maka selanjutnya data dapat dianalisis dengan analisis regresi linear berganda.

1. Analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS Versi 20.00

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coeeficeents		Standardized coefficients	t	Sig
		B	Std. error	Beta		
1	(constant)	4,929	2,078		6,898	,000
	Gaya kepemimpinan	,370	,113	,056	2,125	,000
	lingkungan kerja	,222	,081	,002	1,822	,016
	budaya organisasi	,178	,117	,138	1,782	,001

a. Dependent Variable : Disiplin Kerja

Hasil pada tabel diatas dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda, sehingga diketahui persamaan sebagai berikut :

Y = 4,929 + 0,370 x1 + 0,222 x2 + 0,778 x3

2. Uji Hipotesos

a. Uji secara parsial (uji-t)

Tabel 2. Hasil uji Parsial (uji-t)
Cofficients[a]

Model		Unstandardized Coeeficeents		Standardized coefficients	t	Sig
		B	Std. error	Beta		
1	(constant)	4,929	2,078		6,898	,000
	Gaya kepemimpinan	,370	,113	,056	2,125	,000
	lingkungan kerja	222	,081	,002	1,822	,016
	budaya organisasi	178	,117	,138	1,782	,001

a. Dependent variabel : disiplin kerja

Hasil pengujian statistik t pada tabel 2 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.
Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat α = 0,05 dengan nilai t untuk n = 124 – 2 = 122 adalah 1,657. Untuk itu t_{hitung} = 2,125 dan t_{tabel} = 1,657.

Untuk itu t_{hitung} = 2,125 dan t_{tabel} = 1,657.
Dengan demikian $-t_{tabel} \leq t_{hitung}$ dan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$
(-1,657 ≤ 2,125 ≥ 1,657) dan nilai signifikansi sebesar 0,00 (< 0,05) artinya Ho ditolak dan Ha diterima.
Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

b) Pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.
Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat α = 0,05 dengan nilai t untuk n = 124 – 2 = 122 adalah 1,657. Untuk itu t_{hitung} =1,822 dan t_{tabel} = 1,657.

Dengan demikian – $t_{tabel} \leq t_{hitung}$ dan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$
(-1,657 ≤ 1,822 ≥ 1,657) dan nilai signifikansi sebesar 0,016.
(<0,05) artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

c) Pengaruh Budaya Organisasi terhadap disiplin Kerja Karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai
Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat α = 0,05 dengan nilai t untuk n = 124 – 2 = 122 adalah 1,657.
Untuk itu t_{hitung} = 1,782 dan t_{tabel} = 1,657.

Dengan demikian – $t_{tabel} \leq t_{hitung}$ dan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ (-1,657 ≤ 1,822 ≥ 1,657) dan nilai signifikansi sebesar 0,001. (<0,05) artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

b. Uji Simultan (uji-F)

Tabel 3. Hasil uji Simultan (uji-F)

ANOVA[a]

Model		Sum of square	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	4,493	3	1,498	2,922	,000
	Residual	198,213	122	1,625		
	Total	202,706	125			

a. Dependent variable : Disiplin Kerja
b. Predictors : (constant), gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, budaya organisasi.

Untuk menguji hipotesis : Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan kerja dan Budaya organisasi secara simultan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai, maka dilakukan uji-F pada tingkat α = 5%. Nilai F_{hitung} untuk n = 124. F_{tabel} = n-k-1 = 124 – 3 – 1 = 120.
F_{hitung} = 2,922 dan F_{tabel} = 2,68

Dari hasil uji ANOVA *(Analysis of Variance)* pada tabel diatas, di dapat F_{hitung} sebesar 2,922 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,68.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa – $F_{tabel} \leq F_{hitung} \geq F_{tabel}$ (-2,68≤2,922≥2,68), sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan gaya kepemimpinan lingkungan kerja, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

c. Koefisien Determinasi

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. Error of the estimate
1	,571[a]	,410	,422	1,27464

a. Predictors : (constant), Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Budaya organisasi.
b. Dependent Variable : Disiplin Kerja.

Pada tabel 4 diatas menunjukkan nilai R square (R^2) sebesar 0,410. Angka ini mengidentifikasikan bahwa disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (Variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Gaya Kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi (Variabel independen) sebesar 41% sedangkan sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian terhadap kesesuaian teori, pendapat, maupun penelitian terdahulu yaitu Antara lain sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini sejalan dengan salah satu teori, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan karyawan tergantung dari gaya kepemimpinan itu sendiri, dimana gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan (Thoha, 2010:49) [6].

   Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja.

b. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yugusna, dkk (2016) menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja.

c. Budaya organisasi sangat mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Budaya yang kuat pada suatu perusahaan akan menjadi suatu panutan dan kebiasaan bagi karyawan. Sehingga semakin baik budaya yang ada pada perusahaan akan dapat meningkatkan disiplin kerja karyawan.

d. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan menjadi penghalang dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi (Singodimejo, 2002:212).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : (1) Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (2) Lingkungan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (3) Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai (4) Gaya Kepemimpinan, lingkungan kerja dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Bank Sumut Cabang Sukaramai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Malayu S.P. Hasibuan, "Manajemen Sumber Daya Manusia" (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara, hal. 193, 2005.

[2] Sudarwan Danim, "Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok", Jakarta : Rineka Cipta Utama, hal. 56, 2004.

[3] T. Hani Handoko, "Manajemen", Jakarta : BPFE, hal. 297, 2014.

[4] S. Alex Nitisemito, "Manajemen Personalia", Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 183, 2001.

[5] Stephens P. Robbins, "Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi", alih Bahasa oleh Halida dan Dewi Sartika, edisi kelima, Jakarta : Erlangga, hal. 279, 2002).

[6] Miftah Thoha, "Kepemimpinan Dalam Manajemen', edisi 12, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 49, 2010.

[7] Dewi Andriani, "Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja Karyawan PT. Hassco Multi Kimindo Sidoarjo. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol.8 No.4 November 2010.

[8] Indra Yugusman, dkk, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja dan Kedisiplinan Karyawan (Studi Empiris Pada Perusahaan SPBU 44.501.29 Randu Garut Semarang), Journal of Management, volume 2 No.2 Maret 2016.

[9] Singodimejo, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Surabaya : SMMAS, hal. 212, 2002.

PENGARUH *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR* (OCB) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI STRES KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN UTARA

Syaiful Bahri[1], Muhammad Zaki[2], Fahrizal Zulkarnain[3]
Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Denai No. 217, Medan 20371
zacky.ti@gmail.com, bahri.syaiful80@yahoo.com, zulkarnain_fahrizal@yahoo.com

ABSTRAK - Sumber daya manusia merupakan motor penggerak jalannya perusahaan serta aset terpenting bagi perusahaan. Permasalahan yang berkembang di PLN UIP SUMBAGUT yaitu terindikasi bahwa pegawai belum memiliki tingkat kinerja yang optimal, hal ini ditunjukkan dengan hasil pencapaian kinerja yang tidak memenuhi target. Tidak semua karyawan menerapkan perilaku OCB, memperhatikan lingkungan kerja dan beberapa pegawai mengalami stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OCB terhadap stres kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja, pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OCB tidak mempengaruhi stres kerja, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap stres kerja, stres kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai, OCB berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, OCB tidak mempengaruhi kinerja pegawai melalui stres kerja dan lingkungan kerja tidak mempengaruhi kinerja pegawai melalui stres kerja

Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Lingkungan Kerja, OCB, Stres Kerja

I. PENDAHULUAN

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu [5] Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor dan diantaranya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Organizational Citizenship Behaviour* (OCB), lingkungan kerja dan stres kerja. OCB merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja. OCB ini melibatkan beberapa pelaku meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi *volunteer* untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja [10].

Lingkungan kerja dapat didefenisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar karyawan yang dapat memengaruhi karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaanya, baik yang bersifat fisik maupun psikis [9] Selanjutnya stress kerja adalah sebagai suatu kondisi yang dinamis dalam mana seseorang individu dihadapkan pada suatu peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan individu tersebut dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting [7].

PLN UIP SUMBAGUT sebelumnya bernama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II (PLN UIP II) dan sebelumnya bernama PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh, dan Riau (PIKITRING SUAR). PLN UIP SUMBAGUT saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki agar dapat memberikan kinerja yang menunjang perusahaan untuk menjadi lebih baik. Saat ini perusahaan sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas perusahaan demi mencapai predikat perusahaan taraf internasional. Setiap semesternya, PLN UIP SUMBAGUT melakukan penilaian kinerja pada seluruh pegawai. Permasalahan yang berkembang saat ini merupakan fenomena di lapangan yang mengindikasikan bahwa pegawai pada PLN UIP SUMBAGUT belum memiliki tingkat kinerja yang optimal, hal ini ditunjukkan dengan hasil pencapaian kinerja yang tidak memenuhi target. Hasil pencapaian kinerja pegawai PLN UIP SUMBAGUT disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pencapaian Kinerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan SUMBAGUT Tahun 2013-2017

No	Tahun	Realisasi Kinerja	Unit Kerja
1	2013	77,80	UIP II
2	2014	74,60	UIP II
3	2015	87,59	UIP II
4	2016	95,67	UIP SUMBAGUT
5	2017	86,30	UIP SUMBAGUT

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa realisasi kinerja menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan belum mencapai target yang ditetapkan. PLN UIP SUMBAGUT mempunyai pedoman perilaku yang menjadi landasan pegawai dalam melakukan aktivitas keseharian dalam membangun kinerja di perusahaan. Pedoman perilaku tersebut dikenal dengan istilah SIPP (Saling percaya – Integritas – Peduli – Pembelajaran). Namun dalam faktanya, tidak semua pegawai mengikuti pedoman perilaku yang telah dijabarkan diatas seperti masih adanya pegawai yang tidak saling menghargai antara yang satu dengan lainnya, belum memberikan yang terbaik pada pekerjaannya, tidak saling membantu dan lain sebainya yang dapat memperlemah perilaku OCB suatu perusahaan.

Fenomena lainnya yang terjadi adalah kondisi lingkungan kerja yang dinilai tidak terlalu nyaman bagi pegawai karena terdapat tumpukan-tumpukan kertas di meja dan lingkungan sekitar sehingga membuat pegawai tidak merasa nyaman. Selain faktor yang telah disebutkan, tingginya beban kerja pegawai juga menyebabkan tingkat stres pegawai meningkat. Hal lainnya yang memicu tingkat stres pegawai adalah adanya beberapa pegawai yang tidak saling membantu untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga beban kerja tidak merata serta dekorasi lingkungan yang monoton membuat pegawai merasa jenuh. Hal-hal tersebut telah mempengaruhi tingkat kinerja pegawai PLN UIP SUMBAGUT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OCB terhadap stres kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja, pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja dan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara OCB dengan stres kerja [11], dengan hasil penelitian bahwa OCB mempengaruhi stres kerja. Pekerja yang memenuhi perannya sebagai anggota organisasi akan menunjukkan *organizational citizenship behaviour* dalam menambahkan pemenuhan peran sebagai pemegang jabatan akan mendapatkan stres pada pekerjaannya,

Selanjutnya terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja [6]. Hasil peneliatian menunjukkan bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap stres kerja karyawan.

Sealain itu penelitian juga membahas tentang analisis pengaruh stres kerja dan motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan dengan pengalaman kerja sebagai variabel pemoderasi [2]. Ditemukan bukti bahwa pengalaman kerja mampu memoderasi stres kerja terhadap kinerja sementara pengalaman kerja tidak mampu memoderasi pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja.

Selanjutnya terdapat pengaruh OCB terhadap kinerja pegawai [8]. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang berguna untuk menyajikan informasi empiris tentang pengaruh kepribadian, pemberdayaan, OCB terhadap kinerja pegawai dengan dimoderasi modal sosial yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepribadian berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, Kepribadian berpengaruh positif dansignifikan terhadap kinerja pegawai, Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, Kepribadian tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, Pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, OCB tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa OCB memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pegawai, namun OCB tidak memediasi pengaruh kepribadian terhadap kinerja pegawai. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa modal sosial tepat digunakan sebagai variabel moderating, yang berperan memoderasi hubungan antara pemberdayaan dengan kinerja pegawai.

Penelitian lain yang terkait dengan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai [3]. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara lingkungan kantor dan produktivitas karyawan. Komponen perilaku lingkungan perkantoran memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas, daripada komponen fisik saja. Dan Kepuasan Karyawan terhadap.

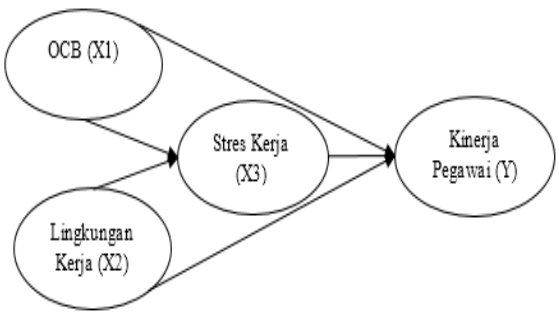
II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian assosiatif. Untuk setiap variabel terdapat indikator dalam melakukan penilaian yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Variabel Operasional

Variabel	Indikator
Kinerja Karyawan (Y)	Standar karyawan Pengetahuan tentang pekerjaan Kuantitas Ketepatan waktu
Organizational Citizenship Behaviour (OCB) (X1)	Membantu rekan kerja Mengikuti perkembangan kemajuan perusahaan Kesungguhan mengikuti rapat-rapat perusahaan Mengikuti pelatihan
Lingkungan Kerja (X2)	Penerangan / cahaya ditempat kerja Temperatur / suhu udara ditempat kerja Bau tidak sedap ditempat kerja Tata warna ditempat kerja
Stres Kerja (X3)	Masalah ketenangan dalam bekerja Beban pekerjaan yang berlebihan Instruksi atasan yang kurang jelas Kurangnya waktu untuk istirahat

Kerangka konseptual dalam penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Beberapa hipotesa dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1: OCB (X1) berpengaruh terhadap Stres Kerja (X3).

H2: Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh terhadap Stres Kerja (X3).

H3: Stres kerja (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y).

H4: OCB (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y).

H5: Lingkungan kerja (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan (Y).

H6: OCB (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) melalui Stres Kerja (X3).

H7: Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) melalui Stres Kerja (X3).

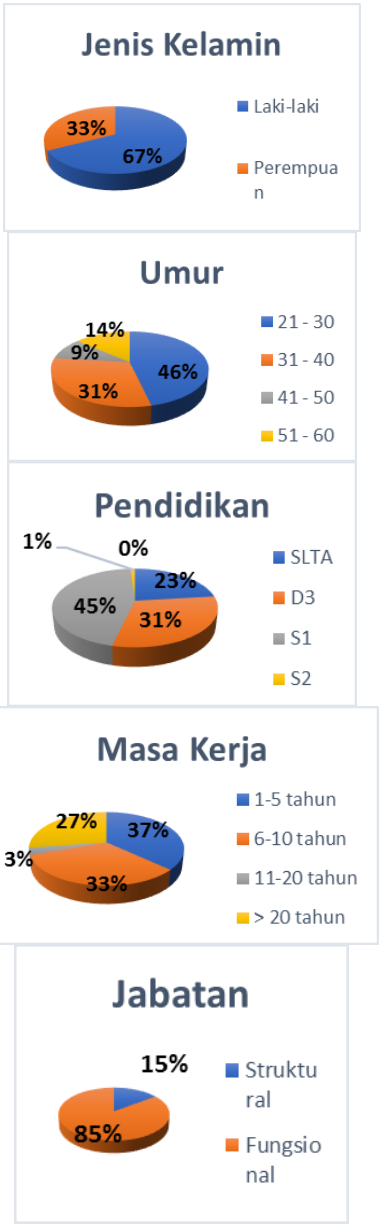
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *probability sampling* yaitu *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin* [1]. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 95 orang. Rangkaian teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji validitas dan reliabilitas
2. Analisis deskriptif
   a. Analisis deskriptif responden
   b. Analisis deskriptif variabel penelitian
3. Uji asumsi klasik
   a. Normalitas
   b. Multikolinieritas
   c. Heterokedastisitas
4. Uji hipotesis
   a. Uji parsial dengan t-*test*
   b. Koefisien determinasi (R^2)
5. Analisis jalur

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskriptif Umum Responden

Analisis deskriptif responden dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Deskripsi Responden

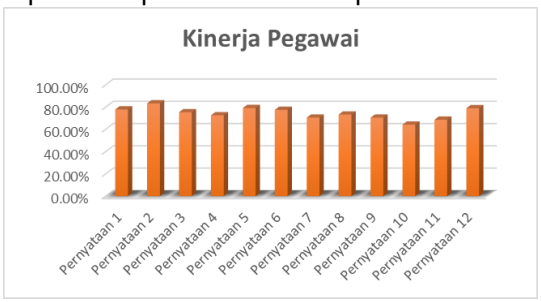
3.2. Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Deskripsi Variabel Penelitian

No	Variabel	N	Skor Jawaban	Skor Total	Persentase	Kategori
1.	Kinerja Pegawai	95	4237	5700	74,33%	Baik
2.	OCB	95	3662	5225	70,08%	Baik
3.	Lingkungan Kerja	95	3863	5225	73,93%	Baik
4.	Stres Kerja	95	3275	4750	68,94%	Baik

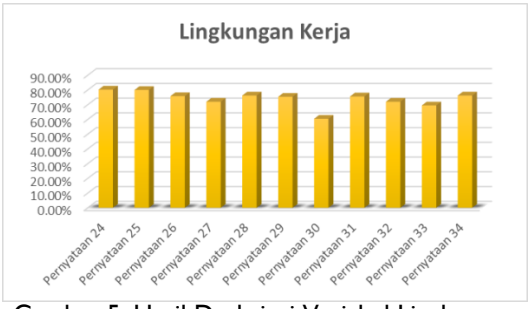
Hasil analisis deskriptif untuk setiap variabel dapat dilihat pada Gambar 3 sampai 6.



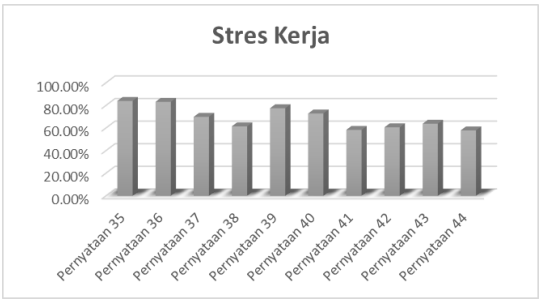
Gambar 3. Hasil Deskripsi Variabel Kinerja Pegawai



Gambar 4. Hasil Deskripsi Variabel OCB



Gambar 5. Hasil Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja



Gambar 6. Hasil Deskripsi Variabel Stres Kerja

3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil r_{hitung} dibandingkan dengan r_{tabel} yang diperoleh dengan cara meilhat table r *product moment* dengan $\alpha = 0,05$ dan df = 95 – 2 = 93. Maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,202. Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyatan dinyatakan valid dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada tahapan penelitian berikutnya. Variabel dinyatakan reliabel apabila nilai hitung *cronbach's alpha* lebih besar daripada 0,6. Maka dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai hitung *cronbach's alpha* lebih besar dari pada 0,6 (0,874 > 0,6). Maka seluruh pernyataan pada kuesioner adalah reliabel.

3.4. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji SPSS diketahui bahwa data semua variabel menunjukkan nilai sig > α (0,05) (Kinerja Pegawai: 0,064; OCB: 0,175; Lingkungan Kerja: 0,052; Stres Kerja: 0,082)

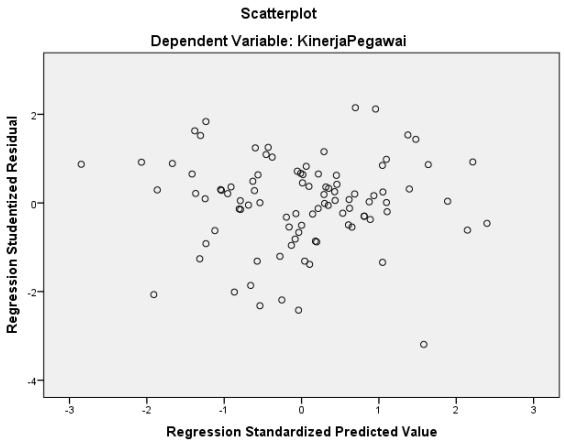
maka dapat disimpulkan bahwa data sampel berdistribusi normal.

Dari hasil uji SPSS terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
OCB	0,816	1,225
Lingkungan Kerja	0,739	1,353
Stres Kerja	0,892	1,121

Pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.



Gambar 7. Uji Heterokedastisitas

3.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian yaitu uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R^2). Hasil uji t dan R^2 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter Model

Model	*Standardized Coefficients Beta*	t	Sig.	R^2
Persamaan Struktural 1 (X_1, X_2 ke Y_1)				
$X_1 = P1$ X_1Y_1	-0,023	-0,209	0,835	0,108
$X_2 = P2$ X_2Y_1	0,338	3,101	0,003	
Persamaan Struktural 2 (X_1, X_2, Y_1 ke Y_2)				
$X_1 = P3$ X_1Y_2	0,461	5,476	0,000	0,474
$X_2 = P4$ X_2Y_2	0,294	3,325	0,001	
$Y_1 = P5$ Y_1Y_2	0,136	1,688	0,095	

Untuk mengetahui kesimpulan dari hipotesis maka dibandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}. Jika nilai $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak memiliki pengaruh) dan jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_A diterima (memiliki pengaruh) dan jika nilai Sig. < 0,05 maka memiliki pengaruh signifikan.

Adapun contoh dari penentuan kesimpulan hipotesis dapat dilihat pada 2 contoh sebagai berikut.

1. Langkah-langkah pembuktian hipotesis pengaruh OCB terhadap stres kerja adalah sebagai berikut:
   a. H_0 : OCB tidak berpengaruh terhadap Stres Kerja.
      H_A : OCB berpengaruh terhadap Stres Kerja.
   b. H_0 diterima jika ($-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$).
      H_A diterima jika ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$).
   c. t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada dengan taraf signifikansi 0,05/2 = 0,025 dan derajat kebebasan df = 95 – 3 = 92, hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,98609.
   d. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ (-1,98609 ≤ -0,209 ≤ 1,98609).

e. H_0 diterima yang berarti OCB tidak berpengaruh terhadap Stres Kerja.

2. Langkah-langkah pembuktian hipotesis pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja adalah sebagai berikut.
   a. H_0 : Lingkungan Kerja tidak berpengaruh terhadap Stres Kerja.
      H_A : Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Stres Kerja.
   b. H_0 diterima jika ($-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$).
      H_A diterima jika ($-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$).
   c. t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada dengan taraf signifikansi 0,05/2 = 0,025 dan derajat kebebasan df = 95 – 3 = 92, hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,98609.
   d. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,101 > 1,98609) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,003 < 0,05).
   e. H_A diterima yang berarti Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Stres Kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa OCB tidak memiliki pengaruh terhadap stres kerja, lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap stres kerja, stres kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, OCB memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Untuk analisis jalur maka dilakukan perbandingan antara nilai *direct* dan nilai *indirect* yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	*Direct*	*Indirect*	Kriteria	Kesimpulan
OCB	0,461	-0,003	*Direct Effect* < *Indirect* = *Intervening*	Stres Kerja bukan merupakan Variabel *Intervening*
Lingkungan Kerja	0,294	0,046	*Direct Effect* < *Indirect* = *Intervening*	Stres Kerja bukan merupakan Variabel *Intervening*

OCB tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja dan lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai melalui stres kerja.

3.5. Pembahasan

Pegawai yang memiliki perilaku OCB tidak mempengaruhi stres kerja yang ada pada dirinya. Hal ini disebabkan karena lebih banyak pegawai yang telah mengikuti pedoman perilaku pada PT. PLN (Persero) yaitu SIPP (Saling percaya – Integritas – Peduli – Pembelajaran) sehingga mereka tidak lagi pamrih dalam membantu pegawai lain yang membutuhkan bantuan seperti mengerjakan pekerjaan teman yang tidak masuk kerja, rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan perusahaan, dengan senang hati mematuhi kebijakan perusahaan dan lain sebagainya.

Lingkungan kerja memiliki pegaruh signifikan terhadap stres kerja. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan di setiap indikator lingkungan kerja menunjukkan bahwa lingkungan kerja pada tempat mereka bekerja membuat mereka merasa nyaman pada saat bekerja seperti pernyataan sirkulasi udara pada ruangan kerja membuat saya merasa nyaman, pewarnaan ruangan sudah tertata dengan baik, ventilasi udara di tempat kerja cukup baik dan jawaban rata-rata responden untuk pernyataan tersebut yaitu setuju. Lingkungan kerja yang nyaman akan mempengaruhi tingkat stres pegawai. Senada dengan penelitian [6] bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi stress kerja. Pegawai yang memiliki stres kerja tidak mempengaruhi kinerjanya pada saat menjalankan pekerjaannya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya adalah hampir 50% kuesioner diisi oleh pegawai dengan rentang usia 21 – 30 tahun yang masih dikategorikan usia muda sehingga mereka tidak terlalu terkena dampak stres dari pekerjaan. Faktor lain seperti remunerasi dan benefit pegawai PLN UIP SUMBAGUT sangat baik dan sesuai dengan pemberian beban kerja yang diberikan sehingga pegawai merasa tidak terbebani dengan tugas yang diberikan walaupun dia sering mendapat

pekerjaan secara mendadak, mendapat pekerjaan yang terlalu banyak dan lain sebagainya.

OCB berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan di setiap indikator menunjukkan bahwa banyak pegawai yang menerapkan perilaku OCB yang berdampak langsung kepada kinerja pegawai seperti pernyataan saya pernah dengan senang hati membantu teman sekerja yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan, saya pernah mengerjakan pekerjaan teman saya yang tidak masuk kerja, saya selalu terlibat dalam fungsi-fungsi perusahaan dan jawaban responden untuk pernyataan tersebut adalah setuju. Seanada dengan [8] bahwa OCB dapat mempengaruhi kinerja pegawai .

Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan di setiap indikator yang menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai seperti pernyataan pencahayaan di ruangan kerja membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya dan jawaban responden untuk pernyataan ini adalah setuju. Hal ini sanada dengan [3] bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Jika lingkungan kerja baik dan nyaman maka kinerja pegawai juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

Stres Kerja dalam model penelitian ini tidak mengintervening hubungan antara OCB terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT. Variabel Stres Kerja tidak mengakibatkan variabel OCB mempengaruhi variabel Kinerja Pegawai secara tidak langsung. Dengan kat lain, variabel OCB berpengaruh langsung terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai pengaruh tidak langsung variabel OCB terhadap Kinerja Pegawai melalui variabel Stres Kerja nilainya lebih kecil dari nilai pengaruh langsung variabel OCB terhadap Kinerja Pegawai (-0,003 < 0,461). Kinerja pegawai dapat meningkat dengan adanya perilaku OCB dari pegawai tanpa pegawai tersebut mengalami stres kerja.

Stres Kerja dalam model penelitian ini tidak mengintervening hubungan antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT. Variabel Stres Kerja tidak mengakibatkan variabel Lingkungan Kerja mempengaruhi variabel Kinerja Pegawai secara tidak langsung. Dengan kata lain, variabel Lingkungan Kerja berpengaruh langsung terhadap Kinerja Pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai pengaruh tidak langsung variabel Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui variabel Stres Kerja nilainya lebih kecil dari nilai pengaruh langsung variabel Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai (0,046 < 0,294). Kinerja pegawai dapat meningkat dengan lingkungan kerja yang nyaman tanpa pegawai tersebut mengalami stres kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. *Organizational Citizenship Behaviour* (OCB) tidak berpengaruh terhadap Stres Kerja pegawai PLN UIP SUMBAGUT.
2. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Stres Kerja pegawai PLN UIP SUMBAGUT.
3. Stres Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT.
4. OCB berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT.
5. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT.
6. OCB tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT melalui Stres Kerja.
7. Lingkungan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai PLN UIP SUMBAGUT melalui Stres Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ghozali, Imam, 2015, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM. SPSS 21*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

[2] Haryanti, Ni Putu Premierita dan I Komang Ardana, 2014, "Analisis Pengaruh Stres Kerja Dan Motivasi Intrinsik Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi*", Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 8.*

[3] Massoudi, Aram Hanna dan Samir Salah Aldin Hamdi, 2017, "The Consequence of work environment on Employees Productivity*", IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM).*

[4] Mohammed dkk, 2010, "Implications of Piety (Taqwa) on Organizational Citizenship Behavior (OCB) from Islamic Perspective: A Study of Professionals in Southeast Asia"*, International Conference of the Academy of HRD (Asia Chapter).*

[5] Rivai Veithzal, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan : dari Teori dan Praktik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

[6] Rizki, Muhammad, Djamhur Hamid dan Yuniadi Mayowan, 2016, *"Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Stres Kerja Karyawan (Studi pada Karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Malang)", Jurnal Administrasi Bisnis UNIBRAW.*

[7] Robbins, 2013, *Organizational Behavior*, Edisi kelima belas, Pearson, Boston.

[8] Rozak, Hasan Abdul, 2015, *"Pengaruh Kepribadian Dan Pemberdayaan Terhadap Kinerja Melalui Organizational Citizenship Behavior Dengan Modal Sosial Sebagai Variabel Moderating", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U).*

[9] Suparyadi, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Jakarta.

[10] Titisari, Purnamie, 2014, *Peranan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

[11] Widjajani, Susi dan Yuli Kurniati, 2010, *"Moderasi Gender pada Hubungan Antara Organizational Citizenship Behavior dengan Work-Family Conflict, Role Overload, dan Job Stress", Jurnal Universitas Proklamasi 45.*

Kebijakan KJRI Johor Bahru Dalam Mengatasi Permasalahan Pelayanan Pendidikan Bagi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia

Untari Narulita Madyar Dewi
Magister Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Pasca Sarjana,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
narulitamd@gmail.com

***ABSTRAK* — Pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi manusia (*human basic need*) dan hak setiap warga negara. Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran di Malaysia. Terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran, salah satunya adalah permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran di Semenanjung Malaysia. Menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru tahun 2015, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru dan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak TKI.**

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu wawancara semi-terstruktur dan pengumpulan data tidak langsung dilakukan secara *library research* dan *internet-based research*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah kebijakan KJRI Johor Bahru meliputi 3 hal (i) Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan Sekolah Indonesia Johor Bahru, (ii) Kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia dalam pendirian *Indonesian Community Centre* (ICC) Muar, (iii) Kerja sama dengan PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC Kuantan, Pahang. Hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru yaitu ketersediaan bangunan sekolah, perizinan, dan dokumen pribadi anak. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak TKI perlu diapresiasi sebagai bentuk kemajuan hak asasi manusia.

Kata Kunci — ***Kebijakan KJRI Johor Bahru, hak pendidikan, anak tenaga kerja Indonesia***

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir isu mengenai pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Isu pekerja migran sangat strategis selain terkait dengan besarnya jumlah pekerja, juga terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di luar negeri, khususnya yang berada di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 50-51)

Malaysia menjadi negara primadona tujuan pekerja migran di luar negeri. Penulis mengamati bahwa alasan ekonomi menjadi faktor pendorong utama pekerja migran untuk bermigrasi ke luar negeri. Mengingat masih terbatasnya peluang kerja di negeri sendiri, serta masih adanya pengangguran dan kemiskinan. Bermigrasi menjadi sebuah instrumen utama para pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. (Tjiptoherijanto, 1999, hal. 109)

Dengan banyaknya tenaga kerja Indonesia di Malaysia, ternyata hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah anak pekerja migran di

Malaysia yang tidak berdokumen kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikannya. Hak dasar tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh negara karena kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Yusro B. Ambary selaku Koordinator Fungsi KBRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa CLC yang diakui oleh kerajaan Malaysia hanya di negeri bagian Sabah. Sementara CLC yang berada di Semanjung Malaysia tidak akui keberadaannya. (Wahyudi, 2018)

Komitmen negara yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana mengatakan bahwa kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih mengalami kendala, khususnya dalam menghadirkan CLC di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, upaya pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia tetap dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. (Salengke, 2017) Dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, pada Pasal 28 (1) disebutkan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. (CRC, 1989) Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Preambule UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI 1945)

Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian dalam ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (Undang-Undang Dasar RI 1945) (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Berdasarkan hal diatas penulis akan mengkaji mengenai pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran yang khususnya berada di Johor Bahru. Pekerja migran Indonesia yang berada di Johor Bahru Malaysia menurut data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru terdapat 360.000 ribu pekerja migran berada di wilayah Johor Bahru Malaysia. Jumlah ini belum ditambah dengan pekerja migran ilegal. Sementara itu, dari data KJRI Johor Bahru di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni di Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. (Firdaus, 2017) (Aulia, 2015)

Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia. Bahkan, di antaranya berstatus ilegal karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status ilegal tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak boleh mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. (Witantra, 2017) (Windary, 2013)

Persoalan lainnya berkaitan dengan status keimigrasian orang tua anak pekerja migran. Menurut peraturan imigrasi Malaysia, para pekerja non-profesional dilarang menikah dengan sesama pekerja. Di sisi lain, banyak kasus TKI

yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan, setidaknya ada 53.000 anak WNI ilegal di Semenanjung Malaysia dan lebih dari separuh belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki izin tinggal.

Para orang tua anak pekerja migran di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor-sektor informal, ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, dan pekerja pabrik. Bagi pekerja migran yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengakses pendidikan terhambat oleh jarak tempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah yang jaraknya relatif jauh, dengan estimasi waktu perjalanan memerlukan dua hingga enam jam perjalanan. Meskipun jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju sekolah, mereka tetap harus pergi pulang setiap hari. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dideportasi karena berstatus ilegal. (Aulia, 2015)

Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru selaku wakil pemerintah di luar negeri memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak WNI. Mengingat cukup banyak anak WNI lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, penulis mengamati adanya permasalahan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Semenajung Malaysia, khususnya di Johor Bahru Malaysia.

Berdasarkan uraian permasalahan terhadap akses pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia dan untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat dan instansi-instansi yang terkait
2. Salah satu dasar pertimbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya
3. Salah satu upaya mendorong peneliti-peneliti dari studi Ilmu Hubungan Internasional untuk melakukan penelitian atau riset lain mengenai pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di wilayah Semenanjung Malaysia.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia dan hambatan apa saja yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan masalah pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, penulis mengamati keenam tulisan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shylvia Windary yang diterbitkan pada tahun 2013. Shylvia mengamati adanya kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan anak pekerja migran Indonesia

yang berada di Sabah. Untuk mengatasi persoalan akses pendidikan anak pekerja migran di Sabah, peran Pemerintah Indonesia diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu:

a. Merancang nota kesepahaman sebagai kerangka legal kerja sama dengan Malaysia
b. Menyelesaikan masalah dokumen resmi keimigrasian pekerja migran ilegal melalui proses legalisasi dan itsbat nikah
c. Membangun Sekolah Indonesia Kota Kinabalu

Selain itu, terdapat 3 peran signifikan dari NGO seperti 1) Mengupayakan diplomasi dan mendesak perusahaan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk proses belajar mengajar, 2) Menyediakan tenaga pengajar, dan 3) Mengupayakan dana bantuan untuk proses pendidikan melalui lembaga Internasional lainnya.

2. Penelitian dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur pada tahun 2016 yang berfokus pada pelayanan pendidikan dari Pemerintah Indonesia untuk anak-anak pekerja migran Indonesia di luar negeri melalui Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 7 Tahun 2015 dan No. 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Dengan dasar tersebut, hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki beberapa sekolah Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Community Learning Center, dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah dan Sarawak, serta Indonesian Community Centre/ Sekolah Indonesia Johor Bahru di Johor Bahru, Pahang, dan Muar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Anastasia Christie pada tahun 2016 yang mengambil fokus kajian mengenai permasalahan pendidikan anak pekerja migran di Sabah. Dalam penelitiannya, Desy mengemukakan bahwa selain adanya peran dari Pemerintah Indonesia, ternyata ada peran dari lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam mengatasi persoalan pendidikan anak pekerja migran. LSM Humana Child Aid Society membantu pemerintah dalam pelayanan pendidikan dan mencukupi ketersediaan tenaga pendidik di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Community Learning Center.

4. Penelitian ini adalah hasil dari *Proceedings of INTCESS15-2nd International Conference on Education and Social Sciences* dengan judul makalah "*Right to Education for Children of Indonesian Migrant Workers*" karya Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si pada tahun 2015. Maya menegaskan pada Konvenan Internasional ICESCR yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, negara yang telah meratifikasi tersebut memiliki kapasitas untuk memenuhi hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut pemerintah Indonesia bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan guna memenuhi empat indikator yang disebutkan dalam ICESCR General Comment Number 13, Pemerintah Indonesia mendirikan sekolah formal dan informal baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5. Penelitian ini merupakan makalah yang ditulis oleh Abas Basori seorang Staf Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahun 2010. Abas memberikan gambaran dari dua sudut pandang yaitu dari perspektif Indonesia dan perspektif Malaysia. Abas menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama melalui Annual Consultation tahun 2004 dan dilanjutkan pada tahun 2006 dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan PM Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia). Hasil dari kesepakatan tersebut adalah menunjuk LSM Humana Child Aid Society untuk membantu pelayanan pendidikan anak

pekerja migran Indonesia di Sabah. Dua perspektif yang dikemukakan oleh Abas adalah:

a. Perspektif Indonesia –anak pekerja migran Indonesia yang terlahir dan besar di luar negeri khusunya di Sabah tetap harus mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Karena hal itu telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
b. Perspektif Malaysia –pada dasarnya sebelum 2002 anak pekerja migran bisa bersekolah di sekolah-sekolah Malaysia meski tanpa dokumen. Akan tetapi, pada tahun 2001 Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai perburuhan dan pendidikan. Dengan adanya peraturan tersebut para pekerja migran Indonesia kesulitan dalam menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Malaysia karena keterbatasan dokumen anak seperti akta kelahiran anak, izin kerja, dan izin tinggal anak/ orang tua.

6. Tulisan ini merupakan hasil wawancara semi-terstruktur yang dilakukan penulis dengan Fungsi Pelaksana Penerangan, Sosial, dan Budaya KJRI Johor Bahru, Anang Fauzi Firdaus, memalui e-mail pada tanggal 21 November 2017. Penulis mengajukan sebelas pertanyaan yang kemudian dirangkum menjadi uraian sebagai berikut:
   a. Perwakilan Republik Indonesia di Johor Bahru (KRI-JB) secara resmi dibuka pada 11 Maret 1996 dengan menyelenggarakan fungsi di antaranya mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang.
   b. KJRI Johor Bahru termasuk dalam kategori Perwakilan RI dengan status citizen service. Hal ini berarti bahwa fungsi pelayanan dan perlindungan WNI menjadi prioritas utama dari KJRI Johor Bahru. Mengingat bahwa jumlah WNI legal di wilayah Johor Bahru sekitar 360.000 sedangkan WNI undocumented diperkirakan jumlahnya cukup signifikan.
   c. Pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru menjadi salah satu program utama dari KJRI Johor Bahru. Hingga bulan November 2017 terdapat 234 siswa/i yang bersekolah di SIJB dengan perkiraan anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan sebanyak 50-100 anak.
   d. Pada dasarnya Pemerintah Malaysia melarang pekerja migran Indonesia untuk membawa keluarga ataupun menikah, dengan demikian seharusnya pekerja migran Indonesia tidak boleh membawa anak atau memiliki anak di Malaysia karena anak-anak tersebut tidak akan memperoleh izin tinggal. Tanpa izin tinggal, anak-anak tersebut tidak bisa bersekolah di Malaysia.

Untuk melengkapi keenam tulisan tersebut, dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Mengingat bahwa peran KJRI Johor Bahru dalam memprakarsai pendirian Rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru pada tahun 2013 terus berlanjut hingga telah di resmikan menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru pada 11 Januari 2015. Hal inilah yang memberikan peluang bagi penulis untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia.

Di sisi lain, penulis akan mengelompokkan hambatan-hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia sesuai dengan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999. Dalam *Article* 13 (2) mengenai *the right to receive an education – some general remarks*, disebutkan bahwa terdapat empat indikator yaitu *availability; accessibility* yang terdiri

dari *(non-discrimination, physical accessibility, economic accessibility); acceptability;* dan *adaptability*. Dengan mendalami bagaimana kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, diharapkan dapat memberikan temuan baru dalam menyelesaikan masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri.

Penulis menggunakan Teori Sistem Pemerintahan Indonesia, Konsep *Civil Society*, Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO), dan 4 Indikator menurut ICESCR *General Comment Number* 13.

1. Teori Sistem Pemerintahan

Teori merupakan alat yang menggabungkan dan merangkai konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan "mengapa", yang berarti bahwa berteori merupakan upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. (Mas'oed, Mohtar, 1990, hal. 186) Sementara itu, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lain. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri, sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ismail Suny mempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. (Noviati, 2013)

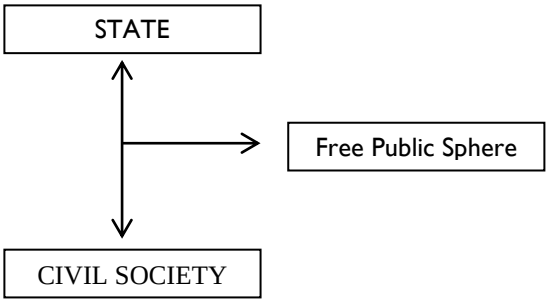
2. Konsep *Civil Society*

Konsep *civil society* dapat diartikan beragam sesuai dengan penekanan yang diberikan oleh pencetus. Misalnya Victor Perez-Diaz memahami konsep *civil society* dengan menekankan pada suatu proses sejarah yang tak terputuskan. Perez-Diaz berpendapat bahwa makna *civil society* adalah keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri, di mana satu sama lainnya saling menopang.

Sementara itu menurut Michael Walker (1995) menyatakan bahwa *civil society* merupakan suatu *space* atau ruang yang terletak antara negara di satu pihak, dan masyarakat di pihak lain dan dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Asosiasi tersebut bisa dalam bentuk yang beragam seperti ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis, rukun tetangga dan rukun warga, ikatan profesi, LSM dan lain sebagainya.

Pendapat lainnya mengungkapkan bahwa *civil society* merupakan bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial, misalnya saja keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara yang sifatnya independen. Menurut Eisenstadt (1995) yang dimaksud *civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen. (Gaffar, 2006, hal. 175-196) Berikut ini bagan interaksi negara (*state*) dan *civil society*:

Bagan 1 Interaksi Negara dan *Civil Society*



Sumber: (Gaffar, 2006, hal. 194)

3. Konsep *Non-Governmental Organization* (NGO)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi ini tidak menggantungkan diri pada pemerintah/ negara, terutama dalam hal dukungan finansial dan sarana/ prasarana. Meskipun dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional, tidak berarti bahwa kalangan NGO bisa terlepas dari pemerintah. (Gaffar, 2006, hal. 200-216) Keberadaan NGO ada yang bersifat organisasi internasional yang lebih dikenal sebagai INGO (*International Non-Governmental Organization*) dan ada pula yang bersifat intra-nasional yang disebut sebagai NGO. Perbedaan antara kedua hanya pada keanggotaan organisasi, mitra kerja sama serta ruang lingkup kegiatan organisasinya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa status suatu organisasi sebagai NGO yang bersifat intra-nasional atau di dalam negeri saja, tidaklah menghambat organisasi beserta tokoh-tokohnya untuk dikenal secara internasional dan bisa menjadi aktor internasional. (Drs. Teuku May Rudy, 2009, hal. 19) NGO di Indonesia paling diharapkan dapat memainkan peranan untuk mengisi ruang publik atau *free public sphere* dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik. (Gaffar, 2006, hal. 199)

4. Empat Indikator Menurut ICESCR *General Comment Number* 13

Guna memberikan pemahaman mengenai implementasi hak untuk mendapatkan pendidikan, penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999.

Tabel 1 Empat Indikator ICESCR General Comment Number 13

Indikator	Penjelasan
Availability	Functioning educational institutions and programmes have to be available in sufficient quantity within the jurisdiction of State party. What they require to function depends upon numerous factors, including the developmental context within which they operate: for example, all institutions and programmes are likely to require building or other protection from the elements, sanitation facilities for both sexes, safe drinking water, trained teachers receiving domestically competitive salaries, teaching materials, and so on. While some will also require facilities such as a library, computer facilities and information technology
Accessibility	Educational institutions and programmes have to be accessible to everyone, without discrimination, within the jurisdiction of the State party.
i. Non-discrimination	Education must be accessible to all, especially the most vulnerable groups, in law and fact, without discrimination on any of the prohibited grounds
ii. Physical accessibility	Education has to be within safe physical reach, either by attendance at some reasonably convenient geographic location (e.g. a neighbourhood school) or via modern technology (e.g. access to a "distance learning" programme)
iii. Economic accessibility	Education has to be affordable to all. This dimension of accessibility is subject to the differential wording of article 13 (2) in relation to primary, secondary and higher education: whereas primary education shall be available "free for all", States parties are required to progressively introduce free secondary and higher education
Acceptability	The form and substance of education, including curricula and teaching methods, have to be acceptable (e.g. relevant, culturally appropriate and of good quality) to studens and, in appropriate cases, parents; this is subject to the educational objectives required by article 13 (1) and such minimum educational standards as may be approved by the State (see art. 13 (3) and (4))
Adaptability	Education has to be flexible so it can adapt to the needs of changing societies and communities and respond to the needs of students within their diverse social and cultural settings

Sumber: (CESCR, 1999)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis akan menemukan data-data numerik mengingat penelitian ini akan mengkaji mengenai pendirian Sekolah Indonesia Johor Bahru. (Bakry, 2016, hal. 63-64)

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data pertama dan data sekunder baik melalui wawancara informan maupun studi pustaka. Rencana penelitian di antaranya yakni Yogyakarta, Jakarta, dan di Johor Bahru, Malaysia. Namun, saat ini penulis baru melakukan wawancara semi terstruktur dengan Fungsi Pelaksana Pensosbud KJRI Johor Bahru melalui e-mail dan wawancara dengan Jurnalis Kompas TV yang meliput anak-anak TKI di Johor Bahru pada tahun 2016. Untuk mendapatkan data sekunder melalui jurnal, artikel, buku, dan lainnya, penulis melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan daerah DIY atau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Balai Layanan Perpustakaan (Grhatama Pustaka) dan perpustakaan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk membatasi kajian yang diteliti penulis memfokuskan problem TKI pada permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian penulis memfokuskan pada hambatan-hambatan yang temui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Selain penulis membatasi jangkauan kajian yang akan diteliti penulis juga membatasi rentan waktu penelitian pada tahun 2010 hingga tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini memiliki temuan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki kapasitas dibidangnya. Menurut Christopher Lamont, wawancara umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda, pertama wawancara terstruktur (*structured interview*), kedua wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan ketiga wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *data collection methods* yang kedua yaitu wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Metode wawancara ini beroperasi dengan tingkat fleksibilitas, akan tetapi peneliti tetap mempertahankan struktur dasar selama melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dengan metode ini sangat umum digunakan oleh peneliti di lingkungan studi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan topik penelitian studi HI menyasar melakukan wawancara kepada para elite, karena itu metode ini juga disebut sebagai wawancara elite (*elite interviews*). Pengumpulan data secara tidak langsung akan dilakukan secara *library research* dan *internet-based research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyangkut penelitian yang sedang dilakukan. (Bakry, 2016, hal. 151-154)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan dasar dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia, maka Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Diartikan bahwa antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa saling bekerja sama memenuhi amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kerja sama yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru melalui Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendirikan sekolah rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru. Konsul Jenderal RI Johor Bahru

pada 27 Juni 2014 telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan RI. Dalam kesempatan tersebut Menteri Pendidikan RI menyatakan dukungannya atas pengembangan SIJB Johor Bahru. Komitmen tersebut kembali disampaikan oleh Menteri Pendidikan RI dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada tanggal 4 Februari 2015. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Gambar 1 Sekolah Indonesia Johor Bahru



Sumber: (KJRI Johor Bahru, 2017)

Sesuai dengan pemahaman konseptual dari Eisenstadt mengenai *civil society*, maka kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru salah satunya berbentuk kerja sama KJRI Johor Bahru dengan tokoh-tokoh masyarakat dan diaspora Indonesia dalam pendirian *Indonesian Community Centre* (ICC) di Muar, Johor. ICC Muar resmi didirikan pada 24 September 2016. Pendirian ICC di wilayah kerja KJRI Johor Bahru merupakan bentuk partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat dan diaspora Indonesia untuk bekerjasama dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan WNI di luar negeri, termasuk permasalahan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. Berdirinya ICC bertujuan sebagai wadah interaksi WNI yang berada di negara bagian di Malaysia. Program ICC meliputi kegiatan edukatif untuk anak-anak. Selain itu, melalui program ICC ini anak-anak diperkenalkan dengan materi-materi terkait dengan Indonesia seperti kewarganegaraan, pelajaran sains, sejarah, bahasa, dan budaya. (Kemlu, 2017) (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

ICC Muar berlokasi kurang lebih 2,5 jam perjalanan dari Johor Bahru. Proses pembelajaran ICC Muar bertempat di rumah Ibu Lasmi, seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Malaysia. ICC Muar hingga saat ini terdapat 10 siswa/i aktif yang terdiri dari PAUD-SD. Aktivitas belajar mengajar dilaksanakan 5 hari dalam seminggu yaitu hari Selasa hingga Sabtu. (KJRI Johor Bahru, 2017) Menurut Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Haris Nugroho, menyebutkan bahwa penyelenggaraan ICC Muar sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak WNI di bidang pendidikan yang diberikan oleh KJRI Johor Bahru. Dalam kunjungan Konjen RI Johor Bahru ke ICC Muar, Haris Nugroho juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola ICC Muar yang telah menyediakan tempat untuk aktivitas belajar dan apresiasi kepada ketua kampung Bakri Muar yang telah mendukung pendirian ICC Muar selama ini. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Gambar 2 *Indonesian Community Centre* Muar



Sumber: (KJRI Johor Bahru, 2017)

Berkaitan dengan kebijakan KJRI Johor Bahru dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru, selain keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dalam pendirian ICC di Muar. Terdapat peran LSM yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat

Indonesia (PERMAI) di Malaysia. PERMAI di Malaysia merupakan bentuk NGO yang bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat Indonesia di Malaysia. PERMAI diharapkan menjadi mitra KBRI dalam mengatasi masalah sosial dari para tenaga kerja Indonesia dan WNI yang tinggal di Malaysia. PERMAI berdiri pada tanggal 17 April 1977, kemudian disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Umum ke-II pada 18 Juli 2010 yang bertempat di Aula Sultan Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur Malaysia. (PERMAI, 1977)

KJRI Johor Bahru bekerjasama dengan PERMAI untuk merintis *Indonesian Community Centre* (ICC) di Kuantan, Pahang. ICC Pahang berjarak kurang lebih 6 jam perjalanan dari Johor Bahru. ICC Pahang telah diresmikan oleh Konsul Jenderal RI Johor Bahru pada 18 Februari 2017 yang bertempat di Universiti Malaysia Pahang (UMP). Tujuan berdirinya ICC Kuantan merupakah bentuk interaksi WNI yang berada di Pahang melalui program kegiatan educatif untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Pendirian ICC Pahang merupakan hasil kerjasama yang dilakukan KJRI Johor Bahru bersama tokoh-tokoh masyarakat Indonesia di Pahang yang tergabung dalam PERMAI. Selain itu, adanya kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang karena telah menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar. Program ICC telah berjalan setiap minggunya sejak bulan Maret 2017 dengan penyediaan fasilitas ruang kelas dalam lingkungan kampus Universiti Malaysia Pahang di Gambang, Pahang. Proses belajar mengajar di ICC Pahang hanya beroperasi seminggu sekali yaitu pada hari Sabtu. (KJRI Johor Bahru, 2017)

Gambar 3 *Indonesian Community Centre Pahang*



Hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di antaranya adalah perizinan operasional sekolah. Menurut Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan izin operasional Sekolah Indonesia Luar Negeri atas rekomendasi dari Menteri Luar Negeri. Pada bulan Desember 2015, Menlu RI telah menyampaikan surat rekomendasi penerbitan izin operasional Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga saat ini belum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Persoalan lainnya terkait perizinan adalah izin Pemerintah Malaysia. Pada dasarnya kegiatan layanan pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk anak-anak yang berada di Sabah dan Sarawak. KJRI Johor Bahru telah mengusulkan pokok-pokok pembahasan terkait dengan perluasan izin pelayanan pendidikan di Semenanjung. Usulan KJRI Johor Bahru tersebut diharapkan dapat dimasukkan dalam *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia dalam bidang pendidikan. Namun, pada 23 April 2014 pihak Pemerintah Negeri Johor menyarankan agar aktivitas pendidikan dilakukan dalam format *Community Center* bukan Sekolah Indonesia Luar Negeri seperti Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Selain persoalan di atas, KJRI Johor Bahru dalam pendirian ICC di Muar masih bertempat di rumah Ibu Lasmi, seorang WNI yang telah menjadi *permanent resident* di Muar. Sementara itu, tempat belajar mengajar ICC Pahang menggunakan salah satu ruang kelas di lingkungan kampus UMP. Hal ini berkat kerjasama dengan dosen-dosen Indonesia di UMP. Dengan demikian, fasilitas pendukung lainnya seperti sanitasi dan ketersediaan air minum masih menyesuaikan tempat yang telah ada. Dalam aktivitas belajar di ICC Muar dilakukan dengan mengirimkan guru setiap hari Jumat untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa/i, di samping itu Ibu Lasmi juga membantu kegiatan pembelajaran.

Aksesibilitas sesuai dengan ICESCR *General Comment Number* 13 dibedakan dalam 3 hal: pertama, non-diskriminasi; kedua, aksesibilitas fisik; ketiga, aksesibilitas ekonomi. Hambatan yang ditemui dalam memenuhi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Semanjung Malaysia adalah layanan pendidikan belum dapat diakses oleh semua anak-anak TKI usia sekolah mengingat keterbatasan dokumen pribadi anak. KJRI Johor Bahru tahun 2015 mencatat mencatat sedikitnya ada 2.500 anak TKI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Secara aksesibilitas fisik pada dasarnya KJRI Johor Bahru telah berupaya mendirikan ICC di Muar dan ICC di Pahang agar anak-anak TKI dan para orang tua dapat menjangkau sekolah di wilayah terdekat mereka. Dengan demikian, anak-anak di Muar dan Pahang tersebut tidak harus bersekolah di SIJB/ ICC Johor Bahru yang harus menempuh perjalanan cukup jauh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan KJRI Johor Bahru dalam mengatasi permasalahan pelayanan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan Sekolah Indonesia Johor Bahru
2. Melakukan kerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia dalam pendirian *Indonesian Community Centre* (ICC) Muar
3. Melakukan kerja sama dengan PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC Kuantan, Pahang

Sementara itu, hambatan yang ditemui oleh KJRI Johor Bahru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Johor Bahru Malaysia yaitu:

1. Ketersediaan bangunan sekolah di ICC Muar dan ICC Pahang, fasilitas pendukung pendidikan seperti sanitasi, perpustakaan, dan komputer
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI belum mengeluarkan Surat Keputusan izin operasional Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) dan belum adanya izin dari Pemerintah Malaysia terkait dengan perluasan izin layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah Semenanjung.
3. Layanan pendidikan belum dapat diakses oleh semua anak-anak TKI usia sekolah mengingat keterbatasan dokumen pribadi anak seperti akta kelahiran dan dokumen resmi kependudukan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Aulia, L. (2015, Agustus 14). Sekolah Indonesia Johor Bahru: Membayangkan Indonesia. *Harian Kompas*, p. 11.

[2] Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[3] Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[4] Committee on Economic, Social, and Cultural Rights. (1999). *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights - General Comment Number 13.*

[5] CRC. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child.* Retrieved Februari 9, 2018, from UNICEF: https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf

[6] Drs. Teuku May Rudy, S. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional.* Bandung: PT Refika Aditama.

[7] Firdaus, A. F. (2017, November 21). Wawancara semi terstruktur melalui e-mail dengan Fungsi Pelaksana Pensosbud KJRI Johor Bahru dengan judul Term of Reference (ToR) Proposal Tesis Mengenai Analisis Tata Kelola Kebijakan KJRI Johor Bahru dalam Pelayanan Pendidikan Anak TKI. (U. N. Dewi, Pewawancara)

[8] Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

[9] ICC Johor Bahru. (2017, Januari). *ICC Muar*. Retrieved Februari 28, 2018, from Indonesian Community Centre Johor Bahru: http://iccjohorbahru.blogspot.co.id/2017/01/icc-muar.html

[10] KBRI Kuala Lumpur. (2017, Februari 27). *Booklet Pelayanan Pendidikan Sekolah Indonesia.* Retrieved Oktober 31, 2017, from KBRI Kuala Lumpur Malaysia: http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/27/booklet-layanan-pendidikan/

[11] Kemlu. (2017, Maret 17). *Menlu Retno Tinjau Pusat Pelayanan Pelatihan WNI di Johor Bahru*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri RI: https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Retno-Tinjau-Pusat-Pelayanan-Pelatihan-WNI-di-Johor-Bahru.aspx

[12] KJRI Johor Bahru. (2017, November 23). *Dukung Anak-Anak WNI terus belajar, Konjen RI Johor Bahru kunjungi ICC Muar*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri : https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Dukung-anak-anak-WNI-terus-belajar,-Konjen-RI-Johor-Bahru-kunjungi-ICC-Muar.aspx

[13] KJRI Johor Bahru. (2017, Februari 18). *KJRI Johor Bahru dan Tokoh Masyarakat Indonesia Pahang Rintis Indonesian Community Centre (ICC)*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri: https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/KJRI-Johor-Bahru-Dan-Tokoh-Masyarakat-Indonesia-Pahang-Rintis-Indonesian-Community-Centre-(ICC).aspx

[14] KJRI Johor Bahru. (2017, September 06). *Kunjungan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA., ke Johor Bahru.* Dipetik Februari 28, 2018, dari Kementerian Luar Negeri: https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Kunjungan-Prof.-Dr.-Ir.-Mohammad-Nuh,-DEA.,-ke-Johor-Bahru,-5-%E2%80%93-7-September-2017.aspx

[15] KJRI Johor Bahru. (2018, Februari 24). *Indonesian Community Centre Pahang Terus Berikan Layanan Pendidikan*. Retrieved Februari 28, 2018, from Kementerian Luar Negeri: https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Indonesian-Community-Centre-Pahang-Terus-Berikan-Layanan-Pendidikan.aspx

[16] Mas'oed, Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. In M. Mas'oed, *Teori* (p. 186). Jakarta: LP3ES.

[17] Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2*, 334-354.

[18] PERMAI. (1977, April 17). *Sejarah PERMAI*. Retrieved Maret 01, 2018, from Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia: http://permai-malaysia.blogspot.co.id/

[19] Salengke, T. (2017). *Ketika Anak Migran Ilegal Kesulitan Bersekolah di Malaysia.* Kuala Lumpur: Staf kantor Perwakilan RI dan Koordinator Pendidikan Non-Formal sekaligus Ketua Pokjar UT Indonesia se-Malaysia.

[20] Suardi, R. (2017, Maret 28). *ICC Pahang*. Retrieved Februari 28, 2018, from Guru/ Pendidik di Sekolah Indonesia Johor Bahru: https://kofarkor.wordpress.com/2017/03/28/icc-pahang/

[21] Tjiptoherijanto, P. (1999). Migrasi Internasional: Proses, Sistem, dan Masalah Kebijakan. In P. M. Arif Nasution, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara* (pp. 107-134). Bandung: Penerbit Alumni.

[22] Undang-Undang Dasar RI 1945.

[23] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

[24] Wahyudi, R. (2018, Maret 01). *Hak Pendidikan Anak-Anak Buruh Migran di Malaysia Masih Sulit Dipenuhi oleh Negara.* Retrieved Maret 02, 2018, from Buruh Migran: https://buruhmigran.or.id/2018/03/01/httpsburuhmigran-or-id20180301hak-pendidikan-anak-anak-buruh-migran-di-malaysia-masih-sulit-dipenuhi-oleh-negara/

[25] Windary, S. (2013). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah.* Yogyakarta: Tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional UGM.

[26] Witantra, C. B. (2017, Desember 1). Wawancara Hasil Liputan Seorang Jurnalis Kompas TV dalam Program Berkas Kompas Episode 203 Bagian 1-3 dengan berjudul Hidup di Tanah Air Mereka. (U. N. Dewi, Interviewer) Jakarta: Kompas TV.

[27] Wuryandari, G. (2016). Diplomasi Bilateral Indonesia dalam Isu Pekerja Migran. In N. Sriyanto, R. E. Yustiningrum, G. Wuryandari, & A. N. Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional* (pp. 50-51). Yogyakarta: Graha Ilmu.

PEMILIHAN STRATEGI PEMASARAN DESA WISATA EDUKASI DENGAN METODE QSPM

Cahyani Kurniastuti
Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang
Tangerang, Indonesia
safa.raihan@gmail.com

***ABSTRAK*-Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas pemilihan strategi pemasaran yang tepat untuk Pengembangan Potensi Desa Tanjungsari yang merupakan desa Petani Pengasapan Ikan Menjadi Desa Wisata Edukasi Berbasis Perikanan Di Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal- Jawa Tengah melalui pendekatan *Quantitative Strategic Planning Matrix*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara mendalam, menyebarkan kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Matriks EFAS (*External Factor Analysis Summary*), Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*), Matriks IE (*Internal External*), Matriks SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threath*), *Grand Strategy Matrix* dan QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*).**

Berdasarkan analisis matriks EFAS, Matriks IFAS, Analisis SPACE, Matriks IE, dan Matriks Grand Strategy yang menyusun tahap 2 didapatkan beberapa alternatif strategi yang akan dipilih yaitu Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Pengembangan Pasar, dan Strategi Pengembangan Produk. Selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas strategi yang dengan melakukan tabulasi prioritas strategi maka terpilih dengan Total *Attractiveness Score 6.97* adalah Strategi Penetrasi Pasar, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sekarang sudah ada melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, Desa wisata, Wisata Edukasi, QSPM

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan bagi masyarakat pedesaan dan dapat menyumbangkan devisa bagi negara. Berdasarkan proyeksi ekonomi Indonesia 2017: Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia: 134 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh kemampuan ekonomi daerah (*local genuine*) dan pengelolaan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Jika masing-masing daerah mampu meningkatkan nilai tambah SDA nya maka akan meningkatkan perekonomian secara makro. Sejak era reformasi sebagian kewenangan daerah diperluas, salah satunya adalah kegiatan ekonomi daerah. Karenanya, kini kekuatan ekonomi daerah diantara potensi SDA, ekonomi kreatif dan pariwisata.

Menurut Spillane (1987), dalam buku Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis *Democratic Governance*, peranan pariwisata dalam pembangunan pada garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayan kita kepada wisatawan-wisatawan asing). Secara nyata, kegiatan pariwisata memberikan manfaat pada penjualan, keuntungan, lapangan kerja, pendapatan pajak dan penghasilan dalam suatu daerah. Lundberg dalam bukunya Ekonomi Pariwisata (1997:3), Menurut *World Tourism Organization*, suatu badan yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa, kepariwisataan adalah industri terbesar di dunia. *World Travel and Tourism Council* sebuah organisasi yang berada di Brussel dan terdiri atas

pimpinan eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar yang mewakili semua sektor usaha pariwisata dunia membiayai suatu penelitian yang dibuat oleh *Wharton Economic Forecasting Association* menyatakan bahwa kepariwisataan tumbuh hampir dua kali kecepatan pertumbuhan GNP. Isu strategis yang terkait dengan sektor pariwisata dalam RPJMN 2015-2019 antara lain; Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sasaran pertumbuhan pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel I. Sasaran Pembangunan Pariwisata

SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

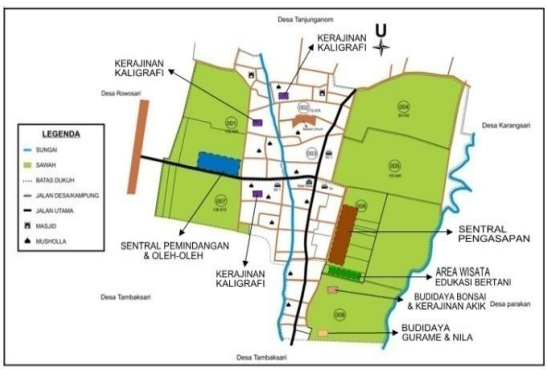
	URAIAN SASARAN	Baseline 2014 *)	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,0 %	9,2 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,3 juta	20,0 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	251 juta	275 juta
4	Devisa (Milliar USD)	10,69	20

Keterangan:
**) Sumber: Kementerian Parekraf*

Salah satu kebijakan pembangunan pariwisata yang digariskan dalam RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional), yaitu Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri, dengan strategi; (1) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata *Meeting Incentive Conference and Exhibition* (MICE) & *Event*, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu; (2) meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata. Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (a) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, wisata kebugaran (*wellness*) berbasis budaya nusantara, serta wisata kawasan terpadu.

Hal tersebut membuka peluang bagi Desa Tanjungsari untuk memanfaatkan potensi dan keunggulan desa untuk menjadi desa wisata khususnya wisata edukasi.

Desa Tanjungsari memiliki luas wilayah 104 Ha dimana 70 Ha dimanfaatkan untuk bidang pertanian dengan hasil dari pertanian yaitu padi sedangkan 34 Ha dipergunakan untuk permukiman. Berdasarkan data statistik penduduk terakhir yaitu pada tahun 2017 Luas permukiman dihuni oleh 4005 jiwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1981 jiwa dan perempuan 2024 jiwa yang merupakan sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam yang ada.



Gambar I. Peta Wilayah Desa Tanjungsari

Oleh karena itu dalam menentukan strategi pemasaran Desa Tanjungsari penulis menggunakan teknik perumusan strategi yang dipadukan menjadi kerangka kerja pembuatan keputusan tiga tahap, yaitu langkah pertama dari kerangka kerja perumusan terdiri dari Matriks EFAS, Matriks IFAS, dan Matriks Profil Persaingan.(CPM).Tahap kedua yang disebut

dengan tahap pencocokan, memfokuskan pada menghasilkan strategi alternative yang layak dengan memadukan faktor-faktor eksternal dan internal diantaranya matriks SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Streghts) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Matriks selanjutnya dalam tahap pencocokan yaitu *Matriks SPACE, Matriks Internal-Eksternal*, dan *Matriks Grand Strategy*. Tahap ketiga disebut dengan tahap keputusan, menggunakan satu macam teknik, yaitu *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM) dimana teknik ini akan mengungkapkan daya tarik relative dari strategi alternative dan menjadi dasar sasaran untuk memilih strategi spesifik.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang sesuai untuk diterapkan dalam pengembangan potensi desa wisata edukasi.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan gambaran maupun informasi kepada pembaca bahwa usaha pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai sektor. Salah satunya dengan usaha di bidang pariwisata khususnya wisata edukasi.
2. Memberikan sumbangan wacana baru bagi dunia akademik tentang kajian ilmiah di bidang pemasaran tentang pemilihan strategi pemasaran untuk wisata edukasi dengan metode QSPM

Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik

1. Strategi Pemasaran

Menurut Olson Jerry dalam bukunya *Consumer Behavior & Marketing strategy* (2013:27) Strategi pemasaran dari sudut pandang analisis konsumen adalah serangkaian rangsangan ditempatkan pada lingkungan konsumen yang dirancang untuk memengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Stimulus ini melibatkan produk, merek, kemasan, iklan, kupon, kartu kredit, label harga, komunikasi para penjual, dan pada beberapa kasus, suara (musik), wewangian (parfum), dan petunjuk sensori lainnya.

Gugup Kismono, dalam bukunya Pengantar Bisnis, (2012:323) mengungkapkan Startegi Pemasaran adalah rencana untuk memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkan, dan memelihara bauran pemasaran yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Langkah-langkah pengembangan strategi pemasaran umumnya mencakup perencanaan strategi, pemilihan pasar sasaran, mendesain bauran pemasaran, dan menganalisis lingkungan pemasaran.

Berdasarkan konsep diatas, yang dimaksud dengan strategi pemasaran dalam penelitian ini adalah serangkaian rangsangan ditempatkan pada lingkungan konsumen yang dirancang untuk memengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen dengan langkah-langkah yang mencakup perencanaan strategi, pemilihan pasar sasaran, mendesain bauran pemasaran, dan menganalisis lingkungan pemasaran.

2. Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.(Wiendu, 1993:1-2)

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. (Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Desa Wisata adalah Desa yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi baik daya tarik yang berupa keindahan alam maupun kearifan lokal yang apabila dikelola dengan

baik akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga desa tersebut.

3. Wisata Edukasi

Beberapa definisi dan pengertian dari wisata edukasi adalah sebagai berikut:

Australian Capital Tourism (2004) mendefinisikan wisata edukasi sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan yang berusia 15 tahun ke atas dengan tujuan utama untuk pendidikan (*education*) dan lama tinggal kurang dari 12 bulan.

Wisata edukasi adalah sebuah gagasan baru yang menerapkan pendidikan nonformal akan suatu pengetahuan kepada wisatawan saat berkunjung ke suatu objek wisata. Di dalam objek wisata tersebut para pengunjung bisa mendapatkan pengetahuan selagi mereka berwisata dengan cara yang menyenangkan. Melalui metode ini proses pembelajaran lebih cepat dimengerti dan lebih mudah diingat karena sangat menyenangkan. Dalam metode wisata edukasi ini dapat dilakukan melalui program seperti Gathering, Outing, dan Outbound. Konsep Wisata edukasi ini muncul karena proses pendidikan yang formal sangat membosankan dan sangat tidak fleksibel, karena itu wisata edukasi dijadikan jalan keluar baru dalam proses pendidikan karena tidak formal, kaku dan membosankan. Wisata edukasi ini juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan unsur wisata. Manfaat yang ada dalam konsep ini juga sangat bagus karena para pengunjung diberikan pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan di bangku sekolah dengan penyampaian yang tidak kaku dan formal.

4. QSPM

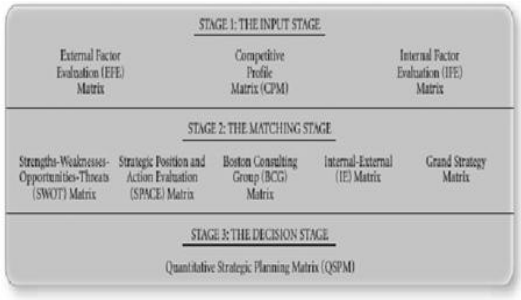
Matrik QSPM digunakan untuk mengevaluasi dan memilih strategi terbaik yang paling cocok dengan lingkungan internal dan eksternal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Alternatif strategi yang memiliki nilai total terbesar pada matrik QSPM merupakan strategi yang paling baik untuk dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan. Analisis QSPM merupakan analisis tahap akhir yang digunakan dalam menentukan pilihan prioritas strategi pemasaran. Matrik QSPM (Quantitative Strategies Planning Matrik) prioritas strategi pemasaran

Enam langkah penyusunan matriks QSPM adalah sebagai berikut :

1. Membuat daftar peluang/ancaman eksternal dan kekuatan/kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam QSPM. Informasi ini diperoleh dari matriks EFAS dan IFAS.
2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal (bobot yang diberikan sama dengan bobot pada matriks EFAS dan IFAS).
3. Evaluasi matriks tahap 2 (pencocokan) dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan.
4. Tentukan nilai daya tarik (Attractive Scores-AS) didefinisikan sebagai angka yang mengindetifikasikan daya tarik relatif masing-masing strategi dalam setiap alternatif tertentu.
5. Hitung total daya tarik (Total Attractive Score-TAS) yang diperoleh dengan mengalikan bobot dengan attratctive scores.
6. Hitung penjumlahan total nilai daya tarik. Nilai TAS yang tertinggi menunjukan bahwa strategi tersebut merupakan strategi terbaik untuk diprioritaskan.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode QSPM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), Kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Untuk menentukan strategi pemasaran dalam mengembangkan potensi desa Tanjungsari menjadi desa wisata edukasi penulis menggunakan tekhnik perumusan strategi dengan kerangka kerja analitis perumusan strategi sebagai berikut:



Gambar II. Kerangka Kerja Merumuskam Strategi. Sumber :Strategic Management Concept and Cases; Fred R. david (2015: 258)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Matirks EFAS (*External Factor Analysis Summary*)

Faktor-faktor Strategis External	Bobot (b)	Rating (r)	Skor Bobot Kekuatan (rxb)
Peluang/ *Opportunity*			
Sektor Pariwisata yang semakin berkembang dan semakin diminati.	0.14	3	0.42
Adapemberdayaan ekonomi masyarakat	0.09	4	0.36
Teknologi yang semakin berkembang	0.09	3	0.27
Peningkatan kebutuhan masyarakat akan wisata edukasi	0.10	3	0.30
Tersedia sumber daya pengelola pariwisata yang profesional dalam menerapkan teknologi informasi	0.09	3	0.27
Ancaman/ *Threath*			
Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata kurang kondusif	0.09	2	0.18
Rendahnya investasi swasta maupun pemerintah dalam pengembangan desa wisata edukasi	0.10	3	0.30
Adanya persaingan dalam promosi	0.09	2	0.18
Tuntutan konsumen semakin tinggi akan pelayanan prima	0.10	2	0.20
Kenaikan bahan makanan, tarif listrik dan biaya hidup lainnya dapat menurunkan minat berwisata	0.12	3	0.36
Jumlah	**1.00**		**2.84**

Hasil skor dari matriks EFAS pada tabel di atas adalah 2.84. Angka ini mengindikasikan bahwa Desa wisata Tanjungsari merespon dengan baik peluang dan ancaman dalam industri pariwisata. dengan kata lain, mampu menarik keuntungan dari peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negatif potensial dari ancaman eksternal. Skor bobot kekuatan tertinggi dari faktor strategis external adalah Sektor Pariwisata yang semakin berkembang dan semakin diminati dengan jumlah skor 0.42, Peluang ini bisa dimanfaatkan dengan cara mengkemas paket wisata edukasi dalam berbagai harga dan varian dengan menonjolkan keunggulan potensi di bidang pertanian, perikanan, kerajinan kaligrafi dan seni bonsai. Selain itu strategi menciptakan program dan mengembangkan program-program yang menarik yang berbasis budaya lokal dan ramah lingkungan.

2. Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary)*

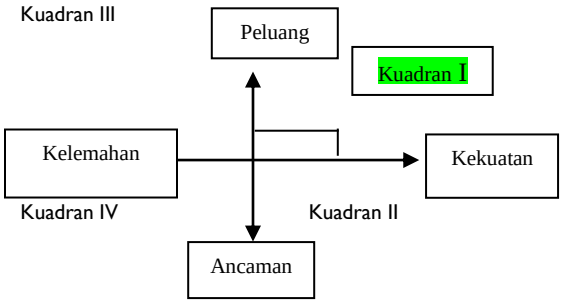
Faktor-faktor Strategis Internal	Bobot (b)	Rating (r)	Skor Bobot Kekuatan (rxb)
Kekuatan/Strenght			
Pemandangan alam yang indah, berhawa sejuk dan masih asri.	0.07	3	0.21
Objek Wisata yang unik dan menarik dengan menonjolkanpotensi-potensi Desa	0.08	3	0.24
Keramahan masyarakat sekitar	0.10	4	0.40
Keamanan lokasi Desa	0.10	4	0.40
Banyak masyarakat yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mendukung desa wisata	0.12	4	0.48
Kelemahan/*Weakness*			
Adanya obyek wisata sejenis di tempat lain	0.11	2	0.22
Lokasi sulit dijangkau	0.08	2	0.16
Sistem sanitasi yang masih sederhana	0.11	2	0.22
Sarana dan prasarana desa terbatas	0.10	2	0.20
Promosi belum maksimal	0.12	2	0.24
Jumlah	**1.00**		**2.77**

Analisis matriks IFAS merupakan hasil dari identifikasi faktor-faktor internal berupa Kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang berpengaruh pada Desa wisata edukasi Tanjungsari. Hasil total skor bobot dari matriks IFAS pada tabel di atas adalah 2.77. Angka ini mengindikasikan bahwa Desa wisata Tanjungsari memiliki kemampuan internal yang kuat dan keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi terhadap sumberdaya internal yang dimilikinya. Faktor strategis kekuatan internal tertinggi yang dimiliki oleh Desa Tanjungsari adalah banyak masyarakat yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mendukung desa wisata dengan skor bobot kekuatan sebesar 0.48. Maka kekuatan ini bisa dimanfaatkan dengan mengkemas paket wisata edukasi dengan menonjolkan keunggulan potensi di bidang pertanian, perikanan, kerajinan kaligrafi dan seni bonsai dan mengembangkan program-program yang menarik dengan memberdayakan masyarakat lokal diantaranya dengan menyediakan tour guide, menyediakan fasilitas bercocok tanam, pengolahan ikan, menyediakan pendamping belajar seni kaligrafi dan bonsai.

Selain itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menyiapkan merchandise yang bisa dijual seperti ikan pindang dan ikan asap, kerajinan kaligrafi, bonsai ataupun batu akik sebagai oleh-oleh khas Desa tanjungsari. Sedangkan skor bobot faktor kelemahan yang tertinggi sebesar 0.24 ada pada faktor promosi yang belum maksimal.

3. Matriks SWOT

Diagram analisis SWOT yang berdasarkan pada skor matrik IFAS dan EFAS untuk mengetahui posisi desa wisata edukasi Tanjungsari Berdasarkan hasil skor matrik IFAS dan EFAS diperoleh : Koordinat sumbu X = Skor kekuatan –Skor kelemahan(1,73-1.04 = 0,69).Koordinat sumbu Y = Skor peluang - Skor ancaman (1,62-1,22 = 0.40). Jadi koordinat desa wisata edukasi Tanjungsari pada diagram analisis SWOT adalah (0.69, 0.40).



Gambar III. Diagram Analisis SWOT

4. *Competitive Profile Matrix*

Competitive Profile Matrix (CPM)					
		Desa Tanjungsari		**Desa Tambaksari**	
Critical Success Factors	Weight	Rating	Score	Rating	Score
Kualitas sumber daya manusia	0.23	4	0.93	3	0.70
Promosi kepariwisataan	0.13	3	0.38	4	0.50
Sumber daya alam dan lingkungan	0.13	3	0.40	4	0.53
Sarana dan prasarana kepariwisataan	0.23	3	0.68	4	0.90
Dukungan pemerintah, swasta, dan lembaga terkait	0.29	3	0.86	4	1.14
Totals	**1.00**		**3.23**		**3.77**

Hasil Pembobotan dan Penilaian Peringkat CPM Setelah mengetahui faktor penentu keberhasilan dari Desa Tanjungsari adalah 3.23 sedangkan Score dari Desa Tambaksari melebihi yang diperoleh desa Tanjungsari yaitu 3.77. ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Desa Tambaksari lebih unggul 0.54 dibandingkan dengan desa Tanjungsari.Hal ini bisa dilihat dari segi promosi kepariwisataan lebih unggul 0.12. Perbandingan dari segi sumber daya alam dan lingkungan Desa Tambaksari lebih unggul 0.13. dan dalam segi sarana dan prasarana Desa Tambaksari juga lebih unggul 0.22. Dukungan pemerintah, swasta, dan lembaga terkaitpun Desa Tambaksari lebih unggul 0.28. Keunggulan yang dimiliki oleh Desa Tanjungsari dibandingkan dengan Desa tambaksari adalah dalam segi kualitas sumber daya manusia dengan score 0.93 sedangkan score yang didapat Desa Tambaksari 0.70. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan terus meningkatkan kualitas SDM karena Sumber daya manusia merupakan pelaku pariwisata yang memegang peranan sangat penting. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah atraksi wisata akan memberikan keunggulan tertentu, sehingga mampu untuk bersaing dengan daya tarik wisata yang sejenis, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan cara memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya pengembangan desa wisata edukasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang manajemen kepariwisataan.

5. Matriks Strategic Position And Action Evaluation (SPACE)

X = CP + IP

= -2.4 + 4,2
= 1.8
Y = SP + FP
= -3.0 + 1.2
= - 1.8

X-axis	**1.8**
Y-axis	**-1.8**

Internal Analysis:		*External Analysis:*	
Financial Position (FP)		**Stability Position (SP)**	
Kekuatan dana dari pemerintah desa	3	Adaptasi terhadap teknologi	-2
Pendapatan desa meningkat dibandingkan tahun lalu	3 0	Variasi permintaan manfaat wisata pendidikan Rentang harga dengan desa wisata lain` Tekanan persaingan yang tinggi Resiko kegagalan	-3 -3 -4 -3
Financial Position (FP) Average	**1.2**	**Stability Position (SP) Average**	**-3.0**
Internal Analysis:		*External Analysis:*	
Competitive Position (CP)		**Industry Position (IP)**	
Kualitas sumber daya manusia	-1	Daya tarik obyek wisata	3
Kualitas sumber daya alam	-3	Variasi jenis usaha	6
Dukungan pemerintah desa	-2	Stabilitas usaha masyarakat	4
Harga yang kompetitif	-3	Potensi pertumbuhan	4
Mutu obyek wisata	-3	Teknologi menunjang	4
Competitive Position (CP) Average	**-2.4**	**Industry Position (IP) Average**	**4.2**

X = CP + IP

= -2.4 + 4,2
= 1.8
Y = SP + FP
= -3.0 + 1.2
= - 1.8

X-axis	**1.8**
Y-axis	**-1.8**

6. *Grand Strategy Matrix*

External Factor Evaluation Matrix (EFE)			
Opportunities	**Weight**	**Rating**	**Weighted Score**
Sektor pariwisata yang semakin berkembang dan semakin diminati	0.14	3	0.41
Ada pemberdayaan ekonomi masyarakat	0.09	4	0.36
Teknologi yang semakin berkembang	0.09	3	0.27
Peningkatan kebutuhan masyarakat akan wisata edukasi	0.10	3	0.30
Tersedia sumber daya pengelola pariwisata yang profesional dalam menerapkan teknologi informasi	0.09	3	0.27
Threats	**Weight**	**Rating**	**Weighted Score**
Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata kurang kondusif	0.09	2	0.17
Rendahnya investasi swasta maupun pemerintah dalam pengembangan desa wisata edukasi	0.10	3	0.29
Adanya persaingan dalam promosi	0.09	2	0.18
Tuntutan konsumen semakin tinggi akan pelayanan prima	0.10	2	0.20
Kenaikan bahan makanan, tarif listrik dan biaya hidup lainnya dapat menurunkan minat berwisata	0.12	3	0.36
TOTALS	**1.00**		**2.81**
Internal Factor Evaluation Matrix (IFE)			
Strengths	**Weight**	**Rating**	**Weighted Score**
Pemandangan alam yang indah, berhawa sejuk dan masih asri	0.07	3	0.21
Objek wisata yang unik dan menarik dengan menonjolkan potensi-potensi desa	0.08	3	0.24
Keramahan masyarakat sekitar	0.10	4	0.40
Keamanan lokasi desa	0.10	4	0.40
Banyak masyarakat yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mendukung desa wisata	0.12	4	0.48
Weaknesses	**Weight**	**Rating**	**Weighted Score**
Adanya obyek wisata sejenis di tempat lain	0.11	2	0.22
Lokasi sulit dijangkau	0.08	2	0.16
Sistem sanitasi yang masih sederhana	0.11	2	0.22
Sarana dan prasarana desa terbatas	0.10	2	0.20
Promosi belum maksimal	0.12	2	0.24

Dari *matriks Grand Strategy* posisi Desa Tanjungsari berada pada kuadran I yaitu dalam posisi strategis yang baik sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tanjungsari mampu memanfaatkan peluang eksternal dalam banyak bidang. Strategi yang tepat dalam kuadran I yaitu pengembangan pasar, penetrasi pasar dan pengembangan produk.

7. Matriks Quantitative Strategic Planning (QSPM)

		penetrasi Pasar		*Pengembangan Pasar*		*Pengembangan Produk*	
Opportunities	**Weight**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Sektor pariwisata yang semakin berkembang dan semakin diminati	0.14	3	0.41	3	0.41	2	0.28
Ada pemberdayaan ekonomi asyarakat	0.09	3	0.27	3	0.27	2	0.18
Teknologi yang semakin erkembang	0.09	2	0.18	2	0.18	4	0.36
Peningkatan kebutuhan masyarakat akan wisata edukasi	0.10	2	0.20	2	0.20	3	0.3
Tersedia sumber daya pengelola pariwisata yang profesional dalam menerapkan teknologi informasi	0.09	3	0.27	3	0.27	2	0.18
Threats	**Weight**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Kebijakan pemerintah di bidang pariwisata kurang kondusif	0.09	3	0.26	3	0.26	2	0.18
Rendahnya investasi swasta maupun pemerintah dalam pengembangan desa wisata edukasi	0.10	3	0.29	3	0.29	4	0.4
Adanya persaingan dalam promosi	0.09	4	0.36	2	0.18	3	0.27
Tuntutan konsumen semakin tinggi akan pelayanan prima	0.10	3	0.30	3	0.30	4	0.4
Kenaikan bahan makanan, tarif listrik dan biaya hidup lainnya	0.12	3	0.36	3	0.36	2	0.24

dapat menurunkan minat berwisata							
Strengths	**Weight**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Pemandangan alam yang indah, berhawa sejuk dan masih asri	0.07	4	0.28	2	0.14	3	0.21
Objek wisata yang unik dan menarik dengan menonjolkan potensi-potensi desa	0.08	4	0.32	2	0.16	2	0.6
Keramahan masyarakat sekitar	0.10	4	0.41	3	0.31	2	0.2
Keamanan lokasi desa	0.10	4	0.42	2	0.21	2	0.2
Banyak masyarakat yang memiliki keahlian dan ketrampilan untuk mendukung desa wisata	0.12	3	0.36	3	0.36	2	0.24
Weaknesses	**Weight**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**	**AS**	**TAS**
Adanya obyek wisata sejenis di tempat lain	0.11	4	0.44	4	0.44	2	0.22
Lokasi sulit dijangkau	0.08	3	0.24	2	0.16	1	0.08
Sistem sanitasi yang masih sederhana	0.11	2	0.22	2	0.22	1	0.11
Sarana dan prasarana desa terbatas	0.10	4	0.40	3	0.30	1	0.1
Promosi belum maksimal	0.12	4	0.48	4	0.48	3	0.36
TOTAL			**6.97**		**5.50**		**4.67**

Berdasarkan analisis matriks EFAS, Matriks IFAS, Analisis SPACE, Matriks IE, dan Matriks Grand Strategy yang menyusun tahap 2 didapatkan beberapa alternatif strategi yang akan dipilih yaitu Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Pengembangan Pasar, dan Strategi Pengembangan Produk. Selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas strategi yang dengan melakukan tabulasi prioritas strategi maka terpilih dengan Total Attractiveness Score 6.97 adalah Strategi Penetrasi Pasar, kemudian strategi yang kedua adalah strategi Pengembangan Pasar dengan Total Attractiveness Score 5.50, dan strategi dengan Total Attractiveness Score terendah 4.67 yaitu strategi Pengembangan Produk. Ini artinya bahwa strategi pemasaran yang paling cocok untuk diterapkan untuk pengembangan desa wisata edukasi Tanjungsari yaitu Strategi Penetrasi pasar. Yang dimaksud dengan Strategi penetrasi pasar yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sekarang sudah ada melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Contohnya dengan menambah jumlah tenaga pemasaran, meningkatkan pengeluaran untuk biaya iklan. Dalam scope manajemen pemasaran meliputi kegiatan 4P dan 3P (*Product, Price, Place, Promotion) + (People, process, Phisical Evidence).*

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan mempergunakan metode QSPM untuk menunjang keberhasilan wisata edukasi Tanjungsari maka strategi yang dianjurkan atau diusulkan adalah strategi penetrasi pasar, yaitu berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang sekarang sudah ada melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik. Contohnya dengan menambah jumlah tenaga pemasaran, meningkatkan pengeluaran untuk biaya iklan. Dalam scope manajemen pemasaran meliputi kegiatan 4P dan 3P (*Product, Price, Place, Promotion) + (People, process, Phisical Evidence).* Memperhatikan hasil dari penelitian ini dimana skor terendah ada pada promosi yang belum maksimal.

Hal ini bisa diatasi dengan melakukan promosi dan publikasi tentang keunggulan obyek wisata dan meningkatkan peran serta pemerintah dengan membuat proposal kerjasama dengan pemerintah dalam mempromosikan obyek wisata Desa Tanjungsari.

Salah satu cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di desa Tanjungsari adalah melalui sarana komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara komunikasi secara langsung adalah *word of mouth* atau dari mulut ke mulut. Sedangkan media komunikasi secara tidak langsung bisa berupa pembuatan brosur, promosi

melalui koran atau majalah, melalui media internet dan radio. Strategi promosi dan publikasi dapat diimplementasikan dengan mengadakan program-program sebagai berikut:

a. Promosi dan publikasi tentang obyek wisata edukasi melalui media cetak (brosur, majalah, koran, maupun pamphlet), audio visual (iklan) dan website baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Promosi ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan biro perjalanan besar dan kecil yang ada di dalam negeri serta yang ada di luar negeri.

b. Pembuatan website khusus yang hanya memuat tentang obyek wisata edukasi Tanjungsari. Di dalamnya ditonjolkan keunggulan-keunggulan dari wisata edukasi dan fasilitas yang disediakan oleh Desa Tanjungsari.

c. Teknik online, Hadirnya sosial media yang didukung oleh kekuatan internet saat ini berpotensi mendukung keberhasilan promosi suatu usaha. Pengelola dapat memanfaatkan teknologi untuk gencar berpromosi. Dapat dilakukan dengan facebook, twitter, path, Google, Market Place maupun instagram.

d. Mengadakan kerjasama dengan travel-travel yang ada untuk melakukan promosi secara gencar tentang obyek wisata.Cara ini bisa di satukan dengan situs hotel Traveloka.com

e. Teknik selanjutnya dapat dengan cara menjalin kooperasi dan koordinasi bersama agen penyelenggara perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A, Yoeti, Oka. Edisi Revisi 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Angkasa

[2] Buchari Alma, 2013. *Manajemen Pemasaran Dan pemasaran Jasa*. Cetakan Kesepuluh. Alfabeta, Bandung.

[3] Care Tourism. 2009. "Dampak Ekonomi Apa Yang diperoleh daripariwisata"https://caretourism.wordpress.com/2009/03/21/dampak-ekonomi-apa-yang-diperoleh-dari-pariwisata? in press"

[4] Cristina Ratu, 2016, "Strategi Pemasaran Desa Wisata Blimbingsari Kabupaten Jembrana", *Jurnal destinasi Pariwisata*, Vol. 4, No. 1, hal. 60-67. ISSN:2338-8811.

[5] Creswell. John W, 2016. Research Design: "Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[6] David. Fred R, 2015. *Strategic Management Concept and Cases.Fifteenth Edition"*. Pearson Education Limited. England.

[7] Djam'an Satori. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung.

[8] Pearce, John A. 2013. *Manajemen Strategis*, *Formulation, Implementation, and Control* Cetakan Pertama. Edisi Keduabelas. Mc Graw Hill. New York.

[9] Tjiptono, Fandy. 2012. Pemasaran Strategik: "Mengupas Pemasaran Strategik, Branding

[10] Vanessa Gaffar. 2011. "Pengaruh Strategi Positioning Museum Terhadap Kunjungan Wisata Edukasi Di Kota Bandung *(Survey Segmen Pasar Generasi Y)Tourism and Hospitality Essentials (THE)" Journal*, Vol. I, No. 1, 2011 – 15

[11] Yin, 2015. Studi Kasus Desain Dan Metode, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

PENGARUH KARAKTERISTIK PEGAWAI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA

Fajar Pasaribu
Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, Indonesia
fajarpasaribu53@yahoo.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pegawai yang dilihat dari umur, jenis kelamin, status pernikahan, dan masa kerjas terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 83 pegawai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara . Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Selanjutnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : karakteristik pengawai yang terdiri dari: 1) Umur pegawai berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai; 2) Jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai; 3) Status pernikahan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai; dan 4) Masa kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai.

Kata Kunci : Karakteristik Pegawai, Produktivitas

I. PENDAHULUAN

Kegiatan operasional organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, oleh karena itu sumber daya manusia adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi. Sumber daya manusia adalah harta atau aset yang paling berharga dan paling penting dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, karena keberhasilan organisasi ditentukan oleh unsur manusia (Ardana dkk., 2012:3). Sumber daya manusia termasuk didalamnya adalah pegawai merupakan salah satu komponen yang mendukung dalam menentukan maju mundurnya suatu organisasi termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang ahli dalam berbagai bidang demi menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satu perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara sudah banyak melahirkan sarjana-sarjana yang mumpuni sesuai dengan visi dan misinya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebutuhan zaman demi meningkatkan sumber daya manusia yang unggul cerdas dan terpercaya. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, wibawa dan disiplin sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dengan memberikan pelayanan sesuai tuntutan.

Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran keberhasilan pegawai yang memiliki sikap mental untuk selalu berusaha meningkatkan mutu kehidupannya. Seorang pegawai dinilai produktif jikalau memiliki sikap mental untuk terus memacu dan mendorong dirinya agar tidak cepat merasa puas, tetapi terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia karena makna produktivitas adalah keinginan (*the will*) dan upaya (*effort*) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan danpenghidupan disegala bidang.

Dewasa ini produktivitas mendapat perhatian cukup besar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari individu yang melakukan kegiatan. Namun individu yang dimaksud adalah individu sebagai tenaga yang memiliki kualitas kerja yang memadai. Sedarmayanti (2001), mengemukakan bahwa produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas pencapaian kerja yang maksimal dengan efisiensi salah satu masukan tenaga kerja yang mencakup kuantitas dan kualitas dalam satuan waktu tertentu.

Masalah peningkatan produktivitas merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap orgainisasi. Oleh karena itu, salah satu usaha yang konkrit dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban tugas/pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Produktivitas kerja individu, perlu ditingkatkan secara terus-menerus, baik melalui pendidikan formal maupun latihan dan pengembangan, agar produktivitas organisasi dapat lebih ditingkatkan.

Produktivitas kerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Menurut Stoner dan Freeman (2007), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja ini terdiri dari faktor internal (faktor-faktor yang melekat pada diri pegawai itu sendiri) dan faktor eksternal (faktor-faktor yang mendorong motivasi kerja yang berasal dari luar).Faktor internal tak lain adalah karakteristik pegawai itu sendiri yaitu unsur internal yang melekat pada pegawai itu sendiri seperti : umur, jenis kelamin, status pernikahan, dan masa kerja (Robbins, 2001).

Elemen karakteristik ini sangat berperan menentukan kemampuan kerja, dan produktivitas pegawai. Umur pegawai merupakan penentu dinamika kerja. Untuk pegawai fungsional umur optimum merupakan puncak prestasi kerja. Selanjutnya unsur karakteristik ini juga menentukan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Kinerja organisasai yang sangat mudah diukur adalah hasil kerja atau keberhasilan sasaran tugas.

Robbins (2001), mengemukakan bahwa terdapat dua alasan yang menjelaskan tentang hubungan antara usia kerja dengan produktivitas kerja seseorang yaitu Pertama, ada keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Kedua, adalah realita bahwa angkatan kerja menua.

Berdasarkan uraian diatas, usia dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa produktivitas kerja merosot dengan makin tuanya seseorang. Robbins (2001), mengandaikan keterampilan seorang individu terutama kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan koordinasi makin menurun dengan berjalannya waktu, kebosanaan pekerjaan yang berlarut-larut, dan kurangnya rangsangan intelektual pada usia tua, dapat berpengaruh pada berkurangnya produktivitas.

Selanjutnya *gender* atau perbedaan jenis kelamin seorang pegawai disinyalir memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam mempengaruhi produktivitas kerja. Studi-studi psikologis telah menemukan bahwa wanita lebih bersedia untuk memenuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dari pada wanita dalam memiliki pengharapan untuk sukses, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerja diantara keduanya (Robbins, 2001).

Salah satu hal yang nampak membedakan diantara kedua jenis kelamin, khususnya saat pegawai memiliki anak-anak prasekolah. Wanita-wanita yang bekerja lebih mungkin untuk memilih pekerjaan paruh waktu, jadwal kerja fleksibel, dan *telokomuning* (mengerjakan pekerjaan kantor di rumah), agar bisa menampung tanggung jawab terhadap keluarga (Shellenbarger,1991)

Disamping itu, dilihat dari tingkat kemangkiran (*absence*), wanita mempunyai tingkat kemangkiran yang lebih tinggi dari pada pria (Scott and McClellan, 1990). Hal ini terkait

dengan fitrah dari seorang wanita, yang mengharuskan mereka absen dari tempat kerjanya (misalnya kerena hamil, *haid*, atau ada anak yang sakit). Kondisi-kondisi yang demikian bagaimanapun dapat mempengaruhi produktivitas kerjanya dari masing-masing *gender* tersebut.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh Leigh (1983), dimana menurut pemahamannya bahwa tidak terdapat perbedaan berarti dalam produktivitas perkerjaan antara wanita dan pria. Hal ini disebabkan oleh makin kuatnya tuntutan emansipasi wanita yang telah mensejajarkan posisi wanita dengan pria

Selanjutnya status pernikahan seseorang dapat pula berdampak pada produktivitas kerja orang tersebut. Robbins (2001), mengemukakan bahwa pernikahan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membantu suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih berharga dan penting. Seseorang yang telah menikah akan merasa lebih mantap dengan pekerjaannya yang sekarang, hal ini dikarenakan ia melihat bahwa pekerjaan tersebut sebagai jaminan untuk masa depannya. Karyawan yang menikah akan lebih sedikit absensinya, perputaran kenaga kerja yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya yang bujangan. Sangat mungkin bahwa karyawan yang tekun dan puas lebih besar kemungkinannya terdapat pada karyawan yang menikah. Selain itu, karyawan yang sudah menikah biasanya akan lebih tanggung jawab dalam pekerjaannya dibandingkan mereka yang belum menikah. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa status pernikahan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap produktivitas kerja pegawai.

Faktor internal tak lain adalah karakteristik pegawai adalah masa kerja. Masa kerja didefinisikan sebagai lamanya pegawai telah bekerja disuatu institusi tertentu. Robbins (2001), mengemukakan, bahwa terdapat suatu hubungan yang positif antara masa kerja dan produktivitas pekerjaan. Masa kerja sering diekspresikan dengan pengalaman kerja. Semakin lama masa kerja seorang pegawai, semakin banyak kemungkinan pegawai tersebut memiliki pengalaman kerja tentang suatu pekerjaan. Semakin lama masa kerja pegawai, semakin banyak pula kemungkinan pegawai tersebut mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang akan mendukung pekerjaan mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ditemukan permasalahan masih ada pegawai yang terlambat hadir, adanya beberapa pegawai yang sering mendapat teguran disebabkan melalaikan beberapa pekerjaan yang harus segera dilaporkan. Selain itu beberapa pegawai yang memperpanjang jam istirahatnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah karakteristik pegawai yang dilihat dari umur, jenis kelamin, status pernikahan dan masa kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *descriptive* dan *verificative*. Penelitian *descriptive* dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik pegawai yang dilihat dari umur, jenis kelamin, status pernikahan, masa kerja, dan produktivitas. Sedangkan penelitian *verificative* ditujukan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian.

B. Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini konsep karakterisitik pegawai dan produktivitas kerja pegawai diuraikan ke dalam indikator. Kemudian masing-masing indikator diberi pembobotan atas dasar skala distribusional (*Likert Scale*). Berikut ini dirumuskan operasional variabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Umur pegawai (X_1) Umur merupakan tingkat usia produktif pegawai yang mempengaruhi dinamika kerja.	Umur atau usia produktif pegawai	Tingkat Umur produktif pegawai antara : 1. n < 21 th 2. 21 – 30 th 3. 31 – 40 th 4. 41 – 50 th 5. n > 50 th	interval
Jenis Kelamin (X_2) *Gender* merupakan perbedaan jenis kelamin yang disinyalir memiliki kontribusi dalam mempengaruhi produktivitas.	Perbedaan jenis kelamin pegawai	Tingkat Perbedaan Jenis Kelamin pegawai dimana : 1. Wanita / perempuan 2. Laki-laki	Nominal
Status Pernikahan (X_3) Status Pernikahan adalah status yang membedakan seseorang telah menikah atau belum dalam suatu organisasi.	Perbedaan status pernikahan pegawai	Tingkat Perbedaan status pegawai dimana: 1. Tidak menikah 2. Menikah	Nominal
Masa Kerja (X_4) Masa kerja adalah lamanya pengalaman kerja seorang pegawai dalam suatu organisasi	Lamanya masa kerja pegawai	Tingkat perbedaan masa kerja, meliputi : 1. Masa kerja 1 – 5 th 2. Masa kerja 6 – 10 th 3. Masa kerja 11 – 20 th 4. Masa keja 21 – 30 th 5. Masa kerja n > 31 th	Interval
Produktivitas Kerja Pegawai (Y) Sikap mental pegawai untuk melakukan perbaikan dan peningkatan hasil kerja pegawai	Tingkat sikap mental pegawai untuk melakukan perbaikan dan peningkatan hasil kerja pegawai	• Peningkatan motivasi • Peningkatan disiplin • Peningkatan Kreatif • Peningkatan inovatif • Dinamis • Profesional	Ordinal

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian semua pegawai di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara keseluruhannya berjumlah 152 orang. Selanjutnya teknik penarikan sampel menggunakan rumus Slovin (Umar, 2004) sebagai berikut :.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :
N = Ukuran populasi
n = Ukuran sampel
e = Persentase kelonggaran kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir (5%)

Dengan rumus diatas diperoleh sampel berjumlah 110 orang

D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner.

E. Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan apakah alat ukur yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*) untuk mengukur apa yang seharusnya menjadi fungsi ukurnya dilakukan dengan menggunakan responden sebagai alat ukur melalui uji validitas dan uji reliabilitas

F. Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi liner berganda dan menggunakan uji hipotesis berupa uji t dan dan uji F serta mengukur koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi liniear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yang terdiri dari umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja terhadap variabel terikat yaitu produktivitas. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.663	3.333		1.999	.049		
	X1	-3.347	1.216	-.706	-2.752	.007	.136	7.344
	X2	6.009	1.129	.520	5.324	.000	.937	1.067
	X3	2.903	1.285	.233	2.259	.027	.845	1.184
	X4	2.825	1.153	.611	2.450	.017	.144	6.949

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Persamaan regresi untuk model penelitian diperoleh sebagai berikut ini :

$$Y = 6{,}663 - 3{,}347\ X_1 + 6{,}009\ X_2 + 2{,}903\ X_3 + 2{,}825\ X_4 + u_t$$

Dimana :

X_1 = Umur Pegawai
X_2 = Perbedaan Jenis Kelamin Pegawai
X_3 = Status Pernikahan Pegawai
X_4 = Masa Kerja Pegawai
Y = Produktivitas Kerja Pegawai

Berdasarkan persamaan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: nilai koefisien yang tercatat dari hasil regresi diatas untuk b_1 adalah negatif sebesar 3,347 menunjukkan bahwa umur pegawai memberikan dampak negatif (berlawanan) dalam peningkatan produktivitas pegawai. Hal ini berarti bahwa semakin berumur seorang pegawai (bertambah umurnya) maka tingkat kecepatan, kecekatan, koordinasi, dan ketelitian, makin berkurang, yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan produktivitas kerja pegawai. Nilai koefisien yang tercatat dari hasil regresi diatas untuk b_2 adalah positif sebesar 6,009 menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin pegawai memberikan dampak dalam peningkatan produktivitas pegawai. Hal ini berarti bahwa jenis kelamin yang memperlihatkan sifat laki-laki berdampak pada peningkatan produktivitas kerja pegawai. Nilai koefisien yang tercatat dari hasil regresi diatas untuk b_3 adalah positif sebesar 2,903 menunjukkan bahwa perbedaan status pernikahan pegawai memberikan dampak positif dalam peningkatan produktivitas pegawai. Hal ini berarti bahwa pegawai yang menikah cenderung berdampak pada peningkatan produktivitas kerja pegawai. Sedangkan pegawai yang tidak menikah cenderung kurang dalam meningkatkan produktivitas kerja. Nilai koefisien yang tercatat dari hasil regresi diatas untuk b_4 adalah positif sebesar 2,825 menunjukkan bahwa perbedaan masa kerja pegawai memberikan dampak positif dalam peningkatan produktivitas pegawai. Hal ini berarti bahwa semakin lama masa kerja pegawai maka makin produktivitas pegawai yang bersangkutan.

B. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis statistik yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Adapun hipotesis statistik yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Umur pegawai (X_1), Jenis kelamin pegawai (X_2), Status Pernikahan Pegawai (X_3), dan Masa Kerja Pegawai (X_4) berpengaruh baik parsial (masing–masing) maupun simultan (keseluruhan) terhadap produktivitas kerja pegawai.

Untuk menguji hipotesis tersebut diatas, dilakukan dengan menggunakan dua cara :

a. Pengujian Secara Parsial

Pengujian secara parsial dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Umur pegawai (X_1), perbedaan jenis kelamin pegawai (X_2), perbedaan status pernikahan pegawai (X_3), dan perbedaan masa

kerja pegawai (X_4), secara parsial berpengaruh secara positif terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y), dimana hasilnya dapat dilihat sebagaimana berikut ini :

1) Pengujian secara parsial pengaruh umur pegawai (X_1) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).
   Berdasarkan hasil hasil uji individu pada Tabel 2, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar – 2,752 memiliki nilai p-value dibawah 5%. Dengan demikian, maka variabel X_1 signifikasi pada level 95% (α = 5%) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai p-value < 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti *umur pegawai* (X_1) secara parsial berpengaruh negatif terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y).
2) Pengujian secara parsial "Pengaruh Jenis Kelamin Pegawai (X_2) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y).
   Berdasarkan pada hasil uji individu Tabel 2, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,324 memiliki nilai p-value dibawah 5%. Dengan demikian, maka variabel X_2 signifikasi pada level 95% (α = 5%) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam criteria pengujian, jika nilai p-value < 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti *jenis kelamin pegawai* (X_2) secara parsial berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).
3) Pengujian secara parsial "Pengaruh Status Pernikahan (X_3) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y).
   Berdasarkan pada hasil uji individu pada Tabel 2, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,259 memiliki nilai p-value dibawah 5%. Dengan demikian, maka variabel X_3 signifikasi pada level 95% (α = 5%) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai p-value < 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti status pernikahan pegawai (X_3) secara parsial berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).
4) Pengujian secara parsial "pengaruh masa kerja pegawai (X_4) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).
   Berdasarkan pada hasil uji individu diatas, ditunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,450 memiliki nilai p-value dibawah 5%. Dengan demikian, maka variabel X_4 signifikasi pada level 95% (α = 5%) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika nilai p-value < 5% maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti masa kerja pegawai (X_4) secara parsial berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).

b. Pengujian secara bersama-sama

Hasil pengujian secara bersama-sama terhadap hipotesis statistik yang pertama dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 3

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	411.877	4	102.969	8.398	.000[a]
	Residual	956.394	78	12.261		
	Total	1368.271	82			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada hasil uji keseluruhan diatas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} = 8,398 pada tingkat signifikasi 95% (α = 5%) sehingga sesuai dengan ketentuan dalam kriteria pengujian, jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa *umur pegawai* (X_1), *jenis kelamin pegawai* (X_2), *status pernikahan pegawai* (X_3), dan *perbedaan masa kerja pegawai* (X_4) secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).

Koefisien Determinasi (R^2).

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh variabel independen (X) terhadap variabel dependennya, atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi yang diberikan oleh karakteristik pegawai (X_i) terhadap produktivitas kerja pegawai, sebagaimana berikut ini :

Tabel 4

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.549[a]	.301	.265	3.5016373	1.673

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y

Dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2), diketahui nilainya sebesar 0,301. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh secara bersama-sama yang diberikan oleh variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja terhadap produktivitas kerja pegawai adalah sebesar 30,1%. Sedangkan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Mengacu pada nilai koefisien determinasi (R^2) atau keeratan hubungan sebesar 30,1% tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 X_2 X_3 X_4 mempunyai tingkat pengaruh yang "cukup rendah" terhadap variabel Y (Guilford, 1996).

PEMBAHASAN

Pengaruh *Umur pegawai* (X_1) Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai(Y)

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel *umur pegawai* (X_1) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) adalah negatif sebesar –3,347 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien regresinya. Dilihat dari uji keberartian diketahui bahwa nilai t_{hitung} = –2,752 dengan nilai p-valuenya lebih kecil dari α = 5%. Dengan demikian, nilai t_{hitung} signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari variabel umur pegawai secara individu terhadap produktivitas kerja pegawai (Y). Semakin tuanya seseorang pegawai maka tingkat kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan koordinasi pegawai makin menurun, disamping itu kebosanaan makin menyelimuti mereka, sehingga berpengaruh pada menurunnya produktivitas kerja pegawai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amron (2009); Sunar (2012); Wisnu Sentana (2013); Herawati (2013) dan Kumbadewi dkk (2016) yang menyatakan bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya Robbins (2001), mengemukakan bahwa hubungan usia pegawai dengan produktivitas merupakan isu yang sangat penting, dengan alasan : (1) ada keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Benar atau tidaknya pernyataan tersebut masih dalam perdebatan, hanya saja banyak orang meyakininya dan bertindak atas dasar keyakinan itu. (2) realita bahwa angkatan kerja akan menua. Usia mempengaruhi produktivitas seseorang, terutama dengan makin bertambah tuanya seseorang. Sering ditemui ketrampilan seseorang individu, terutama kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan koordinasi mengikis/menurun seiring dengan berjalannya waktu, dan bahwa kebosanan yang berlarut-larut dan kurangnya rangsangan intelektual semuanya menyumbang pada berkurangnya produktivitas. Hal tersebut karena tugas keseharian yang dikerjakan pegawai, cenderung memberikan kebosanan kepada karyawan dalam bekerja. Akibatnya, karyawan kadangkala merasa jenuh dalam pekerjaannya. Hal demikian itu merupakan indikator bagi penurunan produktivitas.

Dalam pendapat yang berbeda, dikemukakan oleh Mc. Evoy and Carsio, (1989). Mereka berpendapat bahwa ada keyakinan yang meluas tentang produktivitas kerja yang makin meningkat pada saat usia pegawai makin tua (ideal) untuk bidang pegerjaan mereka. Dimana pada saat usia pegawai makin tua (ideal) untuk bidang pekerjaan mereka, maka pegawai dapat mengembangkan kecepatan, kecekatan, kekuatan, dan koordinasi dalam mendukung bidang pekerjaannya sehingga produktivitas mereka dapat meningkat.

Dalam pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Mc. Evoy and Carsio (1989), Siagian (1995), mengemukakan bahwa bertambahnya umur dapat meningkatkan kedewasaan teknis dan kedewasaan psikologis. Dikaitkan dengan kedewasaan teknis yaitu ketrampilan

melaksanakan tugas tertentu yang makin meningkat sejalan dengan makin lamanya pegawai bekerja (berkarya). Sedangkan kedewasaan psikologis dalam artian semakin lanjut usia seseorang, diharapkan makin mampu menunjukkan kematangan jiwa, dalam arti makin bijaksana, makin mampu berpikir secara rasional, makin mampu mengandalkan emosi, makin toleran terhadap pandangan dan perilaku yang berbeda dari pandangan dan perilaku sendiri, serta makin mampu mengendalikan emosi dan sifat-sifat lain yang menunjukkan kematangan intelektual dan psikologisnya.

Pengaruh Jenis kelamin pegawai (X_2) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (Y)

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel jenis kelamin pegawai (X_2) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) adalah positif sebesar 6,009 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien regresinya. Dilihat dari uji keberartian diketahui bahwa nilai t_{hitung} = 5,324 dengan nilai p-valuenya lebih kecil dari α = 5%. Dengan demikian, nilai t_{hitung} signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel jenis kelamin pegawai (X_2) secara individu terhadap produktivitas kerja pegawai (Y). Jenis kelamin para pegawai merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian secara wajar karena dengan demikian perlakuan terhadap mereka dapat disesuaikan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi anggota organisasi yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Herawati (2013) yang menyatakan jenis kelamin berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Jenis kelamin akan mempengaruhi tinggi rendahnya produktivtas kerja. Tenaga kerja laki- laki dianggap akan lebih produktif karena memiliki tenaga yang lebih besar daripada perempuan. Hasil penelitian ini , memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Mackintosh (2002), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jenis kelamin dengan produktivitas kerja pegawai. Mackintosh mengemukakan bahwa jenis kelamin laki-laki (atau wanita mendekati sifat laki-laki) mampu mencapai produktivitas yang tinggi, sebaliknya jenis kelamin wanita (atau laki-laki mendekati sifat wanita) kurang mampu mencapai produktivitas yang tinggi atau berada dibawah produktivitas laki-laki.

Siagian (1995), mengemukakan terdapat dua perbedaan penting untuk mendapatkan perhatian berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin antar karyawan dan karyawati dalam suatu organisasi, yaitu (1) Pegawai wanita kecenderungan untuk berhenti bekerja lebih besar dibandingkan kaum pria. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah karena menikah, bertambahnya jumlah anak, dan penghasilan dari satu sumber yang dianggap memadai, dan suami dipindahkan ke tempat lain oleh instansi atau perusahaannya sehingga istripun harus ikut pindah; (2) Tingkat kemangkiran (cuti) di tempat tugas, dimana pengalaman banyak organisasi menunjukkan bahwa tingkat kemangkiran pegawai wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai pria. Hal ini mudah dipahami, adanya kehamilan, kelahiran, dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga yang bagaimanapun juga mengharuskannya mendahulukannya pengurusan rumah tangga dibandingkan dengan penitian karier.

Pengaruh *Status Pernikahan Pegawai* (X_3) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai(Y)

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel status pernikahan pegawai (X_3) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) adalah positif sebesar 2,903 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien regresinya. Dilihat dari uji keberartian diketahui bahwa nilai t_{hitung} = 2,259 dengan nilai p-valuenya lebih kecil dari α = 5%. Dengan demikian, nilai t_{hitung} signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel status pernikahan pegawai (X_3) secara individu terhadap produktivitas kerja pegawai (Y). Seseorang yang telah menikah akan merasa lebih mantap dengan pekerjaannya yang sekarang, hal ini dikarenakan ia melihat bahwa pekerjaan tersebut sebagai jaminan untuk masa depannya. Pegawai yang menikah akan lebih sedikit absensinya, perputaran tenaga kerja yang

rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada rekan sekerjanya yang bujangan. Selain itu, karyawan yang sudah menikah biasanya akan lebih tanggung jawab dalam pekerjaannya dibandingkan mereka yang belum menikah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Koster (2002), bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara status pernikahan dengan produktivitas kerja pegawai. Pegawai yang menikah kecendrungan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan karyawan yang belum menikah. Selanjutnya Robbins (2001), mengemukakan bahwa terdapat riset konsisten yang menunjukkan bahwa karyawan yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami pergantian yang lebih rendah, dan lebih puas dengan pekerjan mereka dari pada rekan mereka yang bujangan. Perkawinan memaksakan peningkatan tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadilebih berharga dan penting. Sangat mungkin bahwa karyawan yang tekun dan puas lebih besar kemungkinannya terdapat pada karyawan yang menikah.

Status pernikahan akan terefleksi dalam berbagai bentuk seperti kesetiaan kepada pasangannya masing-masing dalam hal kehidupan seksual, kelanggengan hubungan suami istri yang hanya dipisahkan oleh kematian, dan tanggung jawab untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dipastikan bahwa faktor-faktor demikian berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan organisasinya.

Pengaruh *Masa Kerja Pegawai* (X_4) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai(Y)

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel masa kerja pegawai (X_4) terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) adalah positif sebesar 2,825 sebagaimana diperlihatkan oleh koefisien regresinya. Dilihat dari uji keberartian diketahui bahwa nilai t_{hitung} = 2,450 dengan nilai p-valuenya lebih kecil dari α = 5%. Dengan demikian, nilai t_{hitung} signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari variabel masa kerja pegawai (X_4) secara individu terhadap produktivitas kerja pegawai (Y). Semakin lama masa kerja pegawai maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya yang tinggi dibandingkan karyawan yang baru. Pegawai yang mempunyai masa kerja yang lebih lama, memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan formal maupun non formal dari perusahaan, yang dapat berdampak pada peningkatan kemampuan, pengalaman, dan kecakapan pegawai dalam mendukung peningkatkan produktivitas kerja dan kemajuan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Koster (2002); Ayu Adiati (2013); dan Kumbadewi dkk (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara masa kerja dengan produktivitas kerja pegawai. Masa kerja sesorang dalam organisasi perlu diketahui karena masa kerja itu dapat merupakan salah satu indikator tentang kecenderungan para pekerja dalam berbagai segi kehidupan organisasional, misalnya dikaitkan dengan produktivitas kerja. Selanjutnya Robbins (2001) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara senioritas (masa kerja) dengan produktivitas. Jika senioritas didefinisikan sebagai masa kerja seseorang dalam menjalankan pekerjaan tertentu, maka dikatakan terdapat hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas pekerjaan. Masa kerja yang diekspresikan sebagai pengalaman kerja, merupakan peramalan yang baik terhadap produktivitas karyawan.

Pengaruh *Umur pegawai* (X_1), Jenis kelamin pegawai (X_2), *Status Pernikahan Pegawai* (X_3), dan *Masa Kerja Pegawai* (X_4) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai(Y)

Hasil pengujian hipotesis atas arah pengaruh variabel umur pegawai (X_1), jenis kelamin pegawai (X_2), status pernikahan pegawai (X_3), dan masa kerja pegawai (X_4) secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai (Y) adalah positif dilihat dari uji keberartian diketahui bahwa nilai F_{hitung} = 8,398 dengan nilai p-valuenya lebih kecil dari α = 5%. Dengan demikian, nilai F_{hitung} signifikan pada derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari

variabel umur pegawai (X_1), jenis kelamin pegawai (X_2), status pernikahan pegawai (X_3), dan variabel masa kerja pegawai (X_4) secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).

Selanjutnya berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,301. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh secara bersama-sama yang diberikan oleh variabel umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja terhadap produktivitas kerja pegawai adalah sebesar 30,1%. Sedangkan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumar *et al*. (2011) terhadap para pekerja di sektor perbankan menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara karakretistik pekerjaan dan tingkat produktivitas karyawan yang ditunjukkan oleh peningkatan kepuasan kerja dan motivasi kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Umur berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
2. Jenis kelamin berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
3. Status pernikahan berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
4. Masa kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Pegawai
5. Umur, jenis kelamin, status pernikahan, dan masa kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai

DAFTAR PUSTAKA

[1] Amron & Taufik Imran.2009. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Produtivitas Tenaga Kerja Pada Outlet Telekomunikasi Seluler Kota Makassar. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia*

[2] Ardana, I Komang., Ni Wayan Mujiati dan I Wayan Mudiartha Utama. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

[3] Herawati, Nur dan Hadi Sasana. 2013.Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin dan Umur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Shutllecock Kota Tegal. *Diponegoro Journal Of Economics.* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-8 http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme ISSN (Online): 2337-3814

[4] Koster, Wayan. 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pegawai, *Survey di* PT Asuransi Akenlife, Jurnal Universitas Terbuka, Vol. I No. 3, Mei 2002, p. 233 – 244.

[5] Kumbadewi, Luh Sri,I Wayan Suwendra, Gede Putu Agus Jana Susila. 2016. Pengaruh umur, pengalaman kerja, upah, teknologi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 4Tahun 2016)

[6] Kumar, Aneel, Qaisar Abbas, Ikhtiar Ali Ghumro, and Ashi Zeeshan. . 2011. Job Characteristics as Predictors of Job Satisfaction and Motivation. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, I (4): 206-216.

[7] Leigh, J.P., 1983, *Sex Differences in Absenteeism*, "Industrial Relations, pp. 349 – 361.

[8] McEvoy G. M., and W. F. Cascio, 1989, *Cumulative Evidence of the Relationship between Employee Age and Job Performance,* Journal of Applied Psychology, February 1989, pp. 11 – 17

[9] Robbins, P . Stephen, 2001. *Organizational Behavior*, 9th edition, Prentice Hall International, Inc. New Jersey.

[10] Schellenbarger, 1991, *More Job Seekers Put Family Need First,* Wall Street Journal, November 1991, pp. 1 – 18

[11] Scott, K.D., and E. L. McClellan, 1990, *Gender Differences in Absenteeism,* Public Personnel Management, pp. 229 – 53

[12] Sedarmayanti, 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

[13] Stoner, J. A. F , Edward Freeman, and Gilbert. 2007. *Management.*: Prentice Hall India Pvt.Ltd

[14] Siagian, S.P, 1995. Teori Motivasi dan Aplikasi. Rineka Cipta, Jakarta.

[15] Sunar.2012. Pengaruh Faktor biografis (usia, masa kerJa, Dan gender) terhadap Produktivitas karyawAn (studi kasus pt bank X). Forum Ilmiah Volume 9 Nomer 1, Mei 2012

[16] Umar, Husein. 2004. Desain Penelitian MSDM dan Perilaku karyawan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.I

Prinsip Syariah Dalam Akad Pembukaan *Letter of Credit* Ekspor Pada Bank Syariah

Muhammad Rizal, Roni Sutrisno
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
rizmomx@rocketmail.com, ronisutrisno.sh@gmail.com

ABSTRAK- Nasabah yang ingin menggunakan L/C dalam tranksaksinya diluar negeri pihak Bank memberikan form akad untuk pembukaan L/C ekspor sebagai bentuk persetujuan Nasabah dan Bank. Namun akad yang digunakan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah dengan yang telah ditetap dalam Islam. Salah satunya di dalam pelaksanaan akad wakalah terdapat ketidak sesuaian dengan syariah, karena isi perjanjiannya tidak memuat tanggungjawab pihak jika terjadi force majure dan tidak memuat kapan berakhirnya wakalah tersebut dan hal-hal lain. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana pengaturan prinsip syariah dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah?" Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan prinsip syariah dalam akad pembuatan letter of credit ekspor pada bank syariah.

Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian akan mengkaji bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan nonhukum. Kesimpulannya adalah bahwa syarat dalam akad pembukaan letter of credit eksport pada bank syariah harus sesuai Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002 pada Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakat, Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah. Disisi lain dalam akad tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah dalam islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak lain, tidak ada unsur penipuan dan judi sehingga nasabah yang menggunakan jasa Letter of Credit merasa aman untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Kata Kunci : ***Perdagangan Interansional, Letter of credit, Ekspor***

I. PENDAHULUAN

Saat ini *Letter Of Credit* (L/C) dapat mengurangi resiko masing-masing pihak dimana adanya jarak dan faktor tidak saling mengenal antara eksportir dan importir dapat dialihkan pada pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari pengertian L/C sebagai "jaminan pembayaran bersyarat" yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (a*dvising*/*negotiating* bank) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary*/penikmat) dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu[1], dimana produknya adalah barang dan jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produk itu.[2] Ditinjau dari perspektif perbankan merupakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi suatu kebutuhan layann perbankan nasabah atau *counterpart* bank.[3]

Akan tetapi mekanisme transaksi L/C impor maupun L/C ekspor konvensional yang merupakan salah satu jasa perbankan dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penentuan biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank terkait pemberian fasilitas pinjaman bagi importir yang tidak mempunyai dana yang cukup di bank merupakan suatu hal yang bertentangan dengan

prinsip syariah. Maka untuk memenuhi prinsip tersebut dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis, termasuk dalam perdagangan internasional kemudian muncul L/C dalam perbankan syariah yang berbasis syariah, yaitu L/C impor dan ekspor syariah.

Adapun pengaturan L/C dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilihat pada pasal 19 ayat (1) huruf p yang menyebutkan salah satu kegiatan usaha bank syariah adalah memberikan fasilitas *Letter Of Credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip Syariah.[4] Undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai L/C yang sesuai dengan prinsip Syariah secara khusus, namun pada pasal 1 angka 12 dijelaskan tentang prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.[5] Lembaga ini berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Ekonomi Syariah. Disamping itu, DSN juga berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Lembaga DSN beranggotakan ahli hukum Islam. Praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan Syariah muamalah.[6]

Dalam perbankan syariah banyak sekali akad-akad syariah yang digunakan untuk produk-produk yang dikeluarkan, salah satunya adalah akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. *"Wakalah* secara bahasa berarti perlindungan *(al Hizb), Pencukupan (al kifayah)*, Tanggungan *(al-dhaman),* atau Pendelegasian *(al tafwidh)"*[7] Dalam pembuatan Akad wakalah jumhur ulama mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *Wakalah* itu adalah Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), Orang yang diwakilkan. (*Al-Wakil*), Objek yang diwakilkan. Shighat. Unsur-Unsur Akad *wakalah*, serta berakhirnya *Wakalah* semua hal tersebut harus ada dalam pembuatannya.

Dalam praktek perbankan, *wakalah* lazim diaplikasikan untuk produk transfer uang. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai *muwakil*, yakni pihak yang mewakilkan pekerjaan transfer uang kepada pihak yang dituju, sedangkan bank bertindak sebagai pihak wakil dari nasabah. *Taukilnya* berupa transfer uang. Untuk transaksi transfer tersebut, biasanya nasabah akan membayarkan uang sebagai *fee*.

Akad Wakalah sebagai salah satu akad dalam aplikasi perbankan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan jasa tertentu. Akad wakalah ini menjadi sangat penting dan akan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah. Nasabah yang ingin menggunakan L/C dalam tranksaksinya diluar negeri pihak Bank memberikan form akad untuk pembukaan L/C ekspor sebagai bentuk persetujuan Nasabah dan Bank. Namun akad yang digunakan oleh bank syariah apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah dengan yang telah ditetap dalam Islam. Salah satunya di dalam pelaksanaan akad wakalah terdapat ketidak sesuaian dengan syariah, karena isi perjanjiannya tidak memuat tanggungjawab pihak jika terjadi *force majure* dan tidak memuat kapan berakhirnya wakalah tersebut dan hal-hal lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui

1. Pengaturan prinsip syariah dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).[8] Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[9]

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.[10]

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.[11] Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyakurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.[12]

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[13]

Prinsip-prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada al- Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. *Efisiensi* mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. *Keadilan* mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. *Kebersamaan* mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.[14] Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, system pengawasan yang indenpenden dan efektif,industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (*gharar*), dan (*maisir*) spekulatif.[15]

Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur

deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.[16]

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani tranksaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (*dual system bank*), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.[17]

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil in akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank- bank dengan metode lain.[18]

Letter of Credit (L/C)

Sejak kapan *Letter Of Credit* sebagai sistem pembayaran dalam transaksi perdagangan mula-mula dipergunakan tidak dapat dinyatakan dengan pasti.[19] Meskipun demikian sudah dapat diduga bahwa cara pembayaran ini dalam salah satu bentuknya telah dipergunakan orang pada masa ramainya perdagangan di roma tatkala negara tersebut memegang peran penting dalam perdaganagan dunia. Perkembangan bentuk yang sederhana sampai menjadi bentuk kredit yang modern dimulai kira-kira pada abad ke-17 dan di negara Inggris lah kredit documenter ini berkembangan menjadi bentuknya seperti yang sekarang. Apa sebab bentuk kredit ini mengalami kemajuan pesan disana; hal ini disebabkan karena sebegitu jauh di negara tersebut tersedia kondisi-kondisi yang membantu berkembang kredit dokumenter itu.

Sebelum tahun 1914 di London telah menguasai monopoli dalam bidang lalu lintas perdagangan luar negeri. Kota ini telah memiliki pula pasar uang dan modal yang telah maju dan sangat luas. Selain daripada itu para banker di London memiliki pengalaman-pengalaman yang luas dalam bidang pembiayaan internasional,

sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dari seluruh dunia. Posisi yang sedemikian baik ini telah mengakibatkan mata uang poundsterling dapat diterima di negara manapun dan menjadi valuta dunia. Akibat turutan lain daripada ialah pembiayaan dan pembayaran dari tranksaksi perdagangan antar negara baik antara Amerika utara dan Amerika selatan maupun antara di Eropa dapat diselesaikan dengan baik melalui London.

Dengan pecahnya Perang Dunia I ternyata membawa akibat adanya perubahan keadaan secara radikal. Sebagai akibat dari penjualan senjata, Amerika Serikat telah mengalami jaman keemasan dan segera dapat menarik sebagian besar dari lalu lintas keuangan dunia. Sebaliknya posisi London dalam perdagangan dunia semakin lama semakin kurang maju. Dengan diterimanya *Federal Reserve Act* pada tahun 1914 pasar diskonto di New York semakin berkembang dan akhirnya New York menjadi pusat keuangan dunia menggeser kedudukan London.

Kemudian dalam beberapa tahun berikutnya dunia pengangkutan barang-barang dalam perdagangan internasional mengalami perkembangan pesat sehubungan dengan kemajuan teknologi. Barang tidak lagi diangkut sebagai barang-barang yang terpisah-pisah tetapi sudah dimasukan kedalam suatu container. Hal semacam itu menjadi pendorong untuk meninjau kembali *Uniform Customs and Practice* yang telah ada, sampai pada akhirnya pada tahun 1974 dengan *Publication* No.290 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 oktober 1975 *International Chamber of Commerce* berhasil mengadakan revisi.

Menurut Amir MS yang dikutip oleh Agus Svarnha Nurpatria dalam tesisnya[20] mengatakan *Letter of credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi syarat yang tercantum di dalam surat itu.

Serta menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak[21] *Letter of Credit* adalah suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa barang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu.

Peranan L/C dalam perdagangan internasional adalah untuk memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, serta menjamin kelengkapan dokumen pengiriman barang.[22] Begitu pentingnya peranan L/C dalam perdagangan internasional, dari sekian banyak jenis L/C seperti: *Irrevocable L/C, Revocable L/C, Sight L/C, Usance L/C, Transferable L/C, Restricted L/C, Unrestricted L/C, Confirmed L/C, Unconfirmed L/C, Red Clause L/C, Differed Payment L/C, Back to back L/C, Revolving L/C, Periodic L/C, Straight L/C, Negotiating L/C, Standby L/C*, dalam penulisan ini, dititikberatkan pada salah satu jenis L/C, yaitu *Red Clause L/C*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Pencarian bahannya didasarkan pada bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier dan wawancara dengan ahli fikih muamalah sebagai narasumber. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas dan prinsip-prinsip syariah dalam islam serta pengaturan lain yang terkait penelitian ini.

Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan, karena penelitian ini akan mengkaji suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan bank syariah dan akad pembukaan letter of credit. Dalam melakukan kajian, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengikat.[23]

Pendekatan konseptual digunakan untuk memaknai, amanah dan bebas riba, yang merupakan prinsip-prinsip yang berlaku dalam bermuamalah, yang merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, oleh karena itu perlu dijabarkan dan dicari unsur-unsurnya sehingga dapat dirumuskan dalam suatu peraturan.

Konsep

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan, Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa DSN No.35/DSN-MUI/IX/2002 yang mengatur tentang akad-akad untuk Letter of Credit (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah.

Keadilan, amanah, tidak mengandung riba adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam Islam yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah.

Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan kegiatan pencarian, penelusuran dan membaca secara mendalam terhadap semua literatur, yang disebut dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.[24] Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai beriku:

1. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu
   a. UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Peraturan.
   b. Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
   c. Al-Quran dan As-Sunnah.
   d. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.
   e. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, artiket baik disurat kabar maupun di internet, makalah-makalah yang disampaikaan dalam petemuan ilmiah dan seminar yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membantu memahami bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk mendukung dan untuk mendapatkan penjelasan lebh lanjut tentang bahan-bahan hukum diatas, penelitia melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap tahu dan ahli tentang obyek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah ahli fikih muamalah.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Bahan-bahan hukum yang diperoleh selama proses penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber akan diolah melalui proses penalaran hukum yang logis dan kemudian dilakukan analisis. Dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif,[25] yaitu melakukan studi terhadap bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan kemudian dikaji dengan prinsip-prinsip hukum islam yaitu keadilan, amanah dan bebas riba sehingga akan dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang seharusnya diatur dalam akad pembukaan letter of credit ekspor pada bank syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara definitif yang dimaksud dengan pembiayaan *Letter of Credit* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.[26] *Letter of Credit* adalah suatu perintah (order) yang biasanya dilakukan oleh pembeli atau importer yang ditujukan kepada bank untuk membuka L/C agar membayar sejumlah uang kepada penjual atau eksportir.[27]

Bentuk perwakilan dalam L/C digunakan oleh Nasabah untuk proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan asset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak meminta fee. Bentuk wakalah dalam model operasioanal seperti ini adalah nasabah mewakilkan kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam penyimpanan dana dan mendatangkan barang yang dipesan nasabah.[28]

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi Islam.[29] Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank syariah yang murni berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya tidak boleh melaksanakan atau membuka cabang untuk melakukan jasa-jasa bank konvensional. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang dapat membuka cabang atau unit usaha syariah. Ketentuan mengenai kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah lebih lanjut diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Pinsip Syariah. Dalam Pasal tere\sebut dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehatian-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang termasuk didalamnya adalah memberikan fasilitias *Letter of Credit* berdasarkan prinsip syariah.[30]

L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. dalam Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002, ketentuan akad-akad untuk Letter of Credit (L/C) Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:

1. Akad Wakalah bil Ujrah, dengan ketentuan:
   a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
   b. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*), selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;
   c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, dengan ketentuan:
   a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
   b. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
   c. Bank memberikan dana talangan (Qard) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
   d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
   e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
   f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).
3. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, dengan ketentuan:
   a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
   b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
   c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank L/C (*issuing bank*).

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
   - Pembayaran ujrah;
   - Pengembalian dan mudharabah;
   - pembayaran bagi hasil
f. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

4. Akad Musyarakat, dengan ketentuan:
   a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
   b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
   c. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*);
   d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*);
   e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk:
      - Pengembalian dana Musyarakah;
      - Pembayaran bagi hasil.
5. Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah, dengan ketentuan:
   a. Bank membeli barang dari eksportir;
   b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
   c. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
   d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo.

Menurut Ahmad Azha Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah SAW.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mudharat* harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur.

Sebagai suatu akad, wakalah dan murabahah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat- syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus wakalah dan murabahah itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu (1) adanya para pihak (dalam konteks wakalah adalah pihak yang mewakilkan dan wakil, dalam murabahah adalah penjual dan pembeli), (2) adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul, dan (3) adanya obyek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa). Untuk wakalah obyeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual beli murabahah obyeknya adalah benda, bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan.

Para ulama kontemporer menambahkan unsur akad yang keempat, yaitu tujuan akad.[31] Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda dengan imbalan, tujuan perwakilan adalah pemindahan kuasa atas suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Tujuan akad menjadi penting sesuai maksud mereka mengadakan akad. Oleh kerenanya disyaratkan tujuan itu tidak bertentangan dengan syariah.

Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap wakalah dan murabahah, ada empat macam, yaitu (1) syarat terbentuknya akad, yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian ijab dan kabul, adanya kesatuan majlis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditransaksikan, obyek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah. (2) syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat fasid, bebas dari garar, bebas dari paksaan, penyerahan obyek tidak menimbulkan bahaya. (3)

syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh bertindak hukum, adanya kewenangan atas obyek. (4) syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan. Syarat ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan yang diwakilkan (al-wakil) dalam akad wakalah, juga penjual dan pembeli dalam akad murabahah.

Jual beli murabahah harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus dimaksud adalah (1) harga pokok (modal) barang diketahui, (2) disepakati keuntungan yang diberikan, (3) imbalan atas barang, bila tidak berupa uang, harus merupakan benda bercontoh (*misli*) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh (*qimi*).

Aplikasi dalam bank syariah akad *Wakalah bil Ujrah* dapat digunakan sebagai perjanjian pembukaan L/C dan penyelesaian kewajiban dari kemungkinan I di atas, dimana nasabah menunjuk bank sebagai wakil dalam hal pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor hingga urusan pembayaran kepada *beneficiary* (penerima L/C). Secara sederhana prinsip ini dapat terlaksana apabila nasabah memiliki dana cukup dan membayar lunas tepat waktu sehingga proses L/C selesai dan bank memperoleh *fee* atau *ujrah* (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Sedang *fee* yang diperoleh bank syariah, merujuk dari pendapat Imam Malik di atas, *fee* tidak berkaitan dengan keuntungan komoditi yang diimpor, *fee* yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.

Dengan menggunakan akad *wakalah bil ujrah,* bank harus memperhatikan unsur-unsur dan syarat-syarat umum akad wakalah yang telah disebutkan di atas. Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta *urbun* dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. Urbun tersebut harus diperhitungkan dalam harga barang.. Saat proses pembayaran lunas maka jaminan (agunan) harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.

Selain rukun untuk memenuhi akad tersebut, pihak bank juga mengedepankan prinsip yang harus mengedepankan keadilan antara nasabah dan bank sebagai pihak yang diserahkan amanah untuk melakukan transaksi sehingga harus memberikan pelayanan yang baik, transparansi dan memperhatikan hak dan kewajiban sesama. Adapun prinsipnya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan nilai.
2. Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak, pihak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan dan atau penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.
3. Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* dalam hidup bermasyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak *mudharat*. Akan tetapi kalua hanya berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan *mudharat* yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

4. Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesutau yang menjadi haknya secara seimbang (*proposional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.

Di sisi masyarakat sebagai pengguna jasa layanan berkeyakinan penuh bahwa dalam konsepsi perbankan syariah terdapat nilai-nilai:[32]

1. Islam memandang harta yang memilki oleh manusia adalah titipan/ amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola dan memanfaatkannya harus sesuai ajaran Islam,
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam.
3. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelolaan pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank.
4. Ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham, pengelola Bank dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Sementara dari sisi bank, bahwa agar keyakinan nasabah ini direspon sebagai pemberian amanah maka kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional perbankan syariah maka harus memilki kualifikasi yang *shidiq* (benar dan jujur), *tabligh* (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (kompeten dan profesional) dan memiliki komitmen dalam pengebangan SDM secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat dalam akad pembukaan *letter of credit eksport* pada bank syariah harus sesuai Fatwa no.35/DSN-MUI/IX/2002 pada Akad Wakalah bil Ujrah, Akad Wakalah bil Ujrah dan Qard, Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudarabah, Akad Musyarakat, Akad al-Bai' (Jual Beli) dan Wakalah. Disisi lain dalam akad tersebut juga harus memenuhi prinsip syariah dalam islam, yaitu tidak mengandung unsur riba, tidak membahayakan pihak lain, tidak ada unsur penipuan dan judi sehingga nasabah yang menggunakan jasa *Letter of Credit* merasa aman untuk menjalankan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, (2001). Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Impor & Imbal Beli. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, (2011). Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[3] Ahmad Ifham Sholihin, (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[4] Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[5] Muhamad Syafi'i Antonio, (2005). Bank Syariah dari teori ke praktek. Jakarta, Gema Insani.

[6] Agustianto,"Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syariah",http://www.agustiantocentre.com, (Akses internet 8 oktober 2017).

[7] Karim Helmi. (2002). Fiqih Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[8] M. Syafi'i Antonio, (2006). Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.

[9] Suharso ,(2005) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang : CV.Widya Karya.

[10] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.

[11] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.

[12] Sutan Remy Sjahdeini, (2007). Perbankan Islam, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3.

[13] M. Nur Rianto Al-Arif, (2012). Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, Bandung: CV Pustaka Setia.

[14] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.

[15] Jundiani, (2009). Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Malang: UIN Malang Press.

[16] M. Syafi'i Antonio, (2006). Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4.

[17] Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, (2011). Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah, Jakarta.

[18] Edy Wibowo, (2005) Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I.

[19] Hartono Hadisoeprapto, (1997). Kredit berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Penerbit Liberty Yogyakarta.

[20] Agus Svarnha Nurpatria, (2007). Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

[21] Agus Svarnha Nurpatria, (2007). Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) Pada CV. Golden Teak Garden Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

[22] Amir MS, (2002) Kontrak Dagang Ekspor ,PPM, Jakarta.

[23] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

[24] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

[25] Peter Mahmud Marzuki, (2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.

[26] Zainduddin Ali, (2008). Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.

[27] Hartono Hadisoeprapto, (1991). Kredit Berdokumen (Letter of Credit) cara Pembayaran dalam jual Beli Perniagaan, Yogyakarta: Liberty.

[28] Imam Mustofa, (2016). Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[29] Adiwarman A Karim, (2013). Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan edisi Kelima, (Jakarta: Rajagarfindo Persada.

[30] Ahmad Azhar Basyir, (2000) Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press.

[31] Wahbah al-Zuhaili, (1989). al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Damaskus; Dar al Fikr.

[32] Maltuf Fitri, (2015) "Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah", dalam Jurnal ekonomi Islam, Vol. VI, edisi 1.

Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pada Perawat

Novan Riansyah, Susanto
Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
novanriansyahh@gmail.com, susanto@umy.ac.id

ABSTRAK-Dalam industri rumah sakit, Perawat merupakan karyawan lini depan yang lebih sering berinteraksi dengan pasien, sehingga kinerja perawat berperan penting pada keberhasilan sebuah rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat OCB pada perawat dan pengaruh motivasi dan kepuasan kerja pada perawat di RSUD Kota yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh perawat di RSUD Kota Yogyakarta dengan sampel 62 responden perawat rawat inap dan menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan terhadap OCB dengan kontribusi sebesar F = 230,258 dan p = 0,000 (p <0,001) dan nilai ΔR = 0,883. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan kontribusi 0,910 dengan p = 0,001 (p <0,005) dan nilai β = 0,385 dan ΔR = 0,828. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan koefisien korelasi 0,928 dengan p = 0,000 (p <0,001) dan β = 0,578 dan ΔR = 0,861. Kedua variabel independen secara simultan dan masing-masing variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kewargaan organisasional perawat di RSUD Yogyakarta.

Kata Kunci : *Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, OCB*

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan organisasi penyedia jasa kesehatan. Bagi organisasi penyedia jasa, kualitas pelayanan adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Tuntutan pelayanan kesehatan juga sejalan dengan visi indonesia sehat 2010 dimana masyarakat harus hidup dalam lingkungan yang sehat, dengan perilaku sehat dan mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan untuk bermutu secara adil dan merata sehingga akan berpengaruh pada kualitas sumber daya masyarakat.[1]

Tujuan utama kegiatan di rumah sakit adalah melayani pasien dan juga keluarganya dalam berbagai bentuk pelayanan yang bermutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu yakni memberikan produk yang benar-benar memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu atau masyarakat sehingga pelayanan kesehatan harus secara serius untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat terpuaskan. Rumah sakit juga diharakan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat sesuai standart dan etika.[2-3]

Dalam industri rumah sakit, Perawat merupakan karyawan lini depan yang lebih sering berinteraksi dengan pasien, sehingga kinerja perawat berperan penting pada keberhasilan sebuah rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi pelanggan. Cara meningkatkan kualitas pelayanan dengan memahami dan memperlakukan karyawan lini depan dengan tepat karena karyawan yang memiliki kontak dengan elanggan adalah sumber kunci bagi perusahaan jasa. Pada saat terjadi interaksi antara pelanggan dengan karyawan lini depan, maka kinerja perusahaan pada saat itu sepenuhnya ditentukan oleh kinerja karyawan tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan

pada saat itu akan menentukan apakah konsumen akan mengkonsumsi lagi jasa tersebut pada kesempatan berikutnya.[4]

Pihak rumah sakit seharusnya memenuhi harapan dan keinginan dari masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang kondusif yaitu dengan menciptakan atmosfir yang mengutamakan kepentingan pasien dengan pemberdayaan perawat sebagai subjek yang dinamis untuk melakukan tindakan produktif dalam suatu tim. Keberhasilanorganisasi dalam mencapai tujuan tidak hanya ditentukan oleh perilaku karyawan yang menjadi tugas sesuai deskripsi pekerjaannya (*in role behavior*), tetapi perilaku karyawan yang berada di luar deskripsi kerjanya (*extra rolebehavior*) juga mendukung berfungsinya suatu organisasi. Perilaku karyawan di luar tugas yang tercantum pada deskripsi pekerjaannya disebut dengan *organizational citizenship behavior* (OCB). OCB ini tercermin melalui perilaku suka menolong orang lain, menjadi *volunteer* untuk tugas-tugas ekstra. Dengan adanya OCB yang tinggi pada perawat diharapkan dapat berdampak baik bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dalam hal ini diharapkan perawat dapat lebih cakap, lebih responsif, lebih sigap, ramah terhadap pasien maupun keluarga pasien dalam menjalankan tugas dan tetap bertahan di rumah sakit serta merasa mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih maksimal dan optimal.[5-6]

Sesuai dengan hasil dari pengamatan di RSUD Yogyakarta sejak November 2015 hingga bulan Agustus 2017 di Rumah Sakit Umum daerah Yogyakarta, bahwa perilaku OCB sudah menjadi prioritas dengan guna menunjang standart akreditasi dengan artian menentukan baik buruknya mutu rumah sakit umum daerah Yogyakarta.Pelaksanaan OCB diantara perawat Rumah Sakit khususnya perawat rawat inap masih terdapat kekurangan, contohnya ketika pergantian shift perawat yang telah berakhir dengan perawat shift jaga selanjutnya di bangsal rawat inap masih banyak perawat yang mengakhiri shift jaga sesuai dengan jadwal walaupun perawat dengan shift jaga selanjutnya belum datang atau berhalangan hadir tepat waktu. Selain itu, cerminan perilaku OCB terhadap pasien masih peneliti dapatkan kekurangan. Pada saat perawat sedang melakukan tugas yang berhubungan dengan deskripsi kerja dan terdapat pasien atau keluarga pasien yang bertanya maka perawat yang bersangkutan nampak tidak acuh dan tidak tersenyum.Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan komite keperawatan terkait OCB pada perawat di RSUD Yogyakarta, diperoleh data bahwa terdapat kasus etik yang dibahas dan diaudit terkait etik seperti tata krama dan sopan santun.

Perawat harus memiliki kemampuan, kemauan dan perilaku kesukarelaan yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. OCB sangat berpengaruh pada kesuksesan organisasi, dalam hal ini adalah rumah sakit. Banyak faktor yang mempengaruhi OCB, diantaranya adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Bila individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada pekerjaanya, maka individu tersebut akan melakukan pekerjaan dengan baik, mampu memenuhi tuntutan tugas-tugas dan mempu mengupayakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka mendukung hasil kerja atau tujuan tertentu sesuai dengan yang diharapkan.[7-8]

Faktor lain yang dapat mempengaruhi OCB adalah motivasi kerja, motivasi kerja adalah kesediaan untuk mengeluarkan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan oleh kemampuan usaha dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor instrinsik maupun ekstrisik yang dapat mengarahkannya pada pencapaian suatu tujuan tertentu. Motivasi kerja bergantung pada persepsi pekerja terhadap pengalaman pekerjaan mereka. Perilaku akan muncul jika ada persepsi positif dan sikap kerja yang positif. Jika karyawan dalam organisasi memiliki OCB, karyawan dapat mengendalikan perilakunya sendiri dan karyawan tersebut akan berusaha untuk meningkatkan potensi yang

dimiliki untuk kemajuan perusahaan yang menaunginya.[8-9]

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui

1. Pengaruh kepuasan kerja terhadap *organizational citizenship behavior* (OCB) perawat di RSUD Kota Yogyakarta
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap organizational *citizenship behavior* (OCB) perawat di RSUD Kota Yogyakarta
3. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi kerja Terhadap*Organizational Citizenship Behavior* (OCB) pada Perawat di RSUD Kota Yogyakarta

Kajian Pustaka

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja dapat dipahami melalui tiga aspek, pertama, kepuasankerja merupakan bentuk respon pekerja terhadap kondisi lingkungan. Kedua, kepuasan kerja sering ditemukan oleh hasil pekerjaan atau kinerja. Ketiga, kepuasan kerja terkait dengan sikap lainnya dan dimiliki oleh setiap pekerja.[10]

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum seseorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya anjaran yang diterima seorang pekerja, banyaknya yang mereka yakini dan seharusnya yang mereka terima. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja tersebut, sedangkan yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif. Menurut Robbins terdapat beberapa ciri-ciri karyawan yang memiliki kepuasan kerja, yaitu tingkat kemangkiran yang rendah, memiliki kesehatan yang lebih baik, lebih prodouktif dan tingkat *turn over (*keluar) lebih rendah.[11]

Aspek-aspek kepuasan kerja yang dituangkan dalam *The Minnesota Satisfaction Questionnaire (*MSQ) mengukur dua puluh aspek kepuasan kerja dan merupakan pengukuran yang populer. MSQ terbagi dalam tiga aspek, yaitu aspek intrinsik, aspek ekstrinsik dan aspek general satisfaction. Ketiga aspek tersebut diukur melalui 20 indikator atau kebutuhan elemen atau kondisi penguat spesifik yang penting dalam menciptakan kepuasan kerja. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut :[12]

1. *Activity*, yaitu seberapa jauh pekerjaan tersebut tetap dpat menyibukkan individu.
2. *Independence*, yaitu kewenangan untuk dapat bekerja sendiri.
3. *Variety*, yaitu kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda-beda.
4. *Social status*, yaitu pengakuan masyarakat luas tentang status pekerjaan
5. *Moral values*, yaitu pekerjaan tidak berhubungan dengan segala sesuatu yang dapat mengganggu hati nurani.
6. *Security* yaitu kepastian kerja yang diberikan
7. *Social service*, yaitu kesempatan untuk membantu orang lain mengerjakan tugas.
8. *Authority,* yaitu memiliki kewewenangan terhadap orang lain
9. *Ability utilization*, yaitu kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang ada.
10. *Responsibility*, yaitu tanggung jawab dalam membuat keputusan dan tindakan.
11. *Creativity*, kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang ada.
12. *Achievement,* yaitu perasaan yang didapat ketika menyelesaikan suatu tugas
13. *Compensation,* yaitu besarnya imbalan atau upah yang diterima
14. *Advancement,* yaitu kesempatan untuk memperoleh promosi
15. *Coworkers,* yaitu seberapa baik hubungan antara sesama rekan kerja
16. *Human relations supervisions*, yaitu kemampuan atasan dalam menjalin hubungan intrepersonal
17. *Technical supervisions* yaitu kemampuan atau skill atasan menyangkut segala sesuatu yang berhubungand engan pekerjaan.
18. *Company policies and practis*e, yaitu seberapa jauh perusahaan menyenangkan para pekerja.
19. *Working conditions,* yaitu kondisi pekerjaan seperti jam kerja, temperatur, perlengkaan kantor serta lokasi pekerjaan.
20. *Recognition,* yaitu pujian yang diperoleh ketika menyelesaikan pekerjaan yang baik.

Motivasi Kerja

Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan oleh kemampuan usaha dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu. Menurut Luthans motivasi diartikan sebagai sebuat proses yang dimulai dari adanya kekurangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang memunculkan perilaku atau dorongan guna mencapai sebuah tujuan spesifik atau insentif.[13-14]

Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori dua faktor dari Herzberg. Teori dua faktor disebut juga sebagai teori motivasi-hygine, teori ini dikembangkan oleh Herzberg yang dikenal dengan "Model Dua Faktor" dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor *hygiene*.

Menurut teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu faktor pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan satisfer atau intrinsic motivation dan faktor kesehatan (*hygiene*) yang disebut juga dengan disatisfier atau ekstrinsic motivaton. Teori Herzberg ini melihat ada dua faktor yang mendorong karyawan termotivasi, yaitu faktor instrinsik yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang dan faktor ekstrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya bekerja. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasi antara lain ialah, pekerjaan itu sendiri, keberhasilan yang diraih, tanggung jawab, peluang untuk maju, dan pengakuan. Sedangkan yang tergolong faktor hygienis antara lain: kondisi kerja, gaji, hubungan interpersonal, pengawasan, keadaan perusahaan.[15]

Menurut Herzberg aspek-aspek motivasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor motivasional atau faktor intrinsik:

a. Pekerjaan itu sendiri (*Work it self*), yaitu tipe pekerjaan yang mencakup kompleksitas pekerjaan, standar pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan karyawan
b. Keberhasilan (*Achievement*), yaitu merupakan keberhasilan yang diperoleh karyawan dalam setiap kegiatan/tugas yang dilaksanakan atau pencapaian prestasi karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan demikian prestasi yang dicapai dalam pekerjaan akan menimbulkan sikap positif dan selalu ingin melakukan pekerjaan dengan penuh tantangan.
c. Tanggung jawab, yaitu merupakan kewajiban karyawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ditugaskan atau melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengarahan yang diterima.
d. Peluang untuk maju (*Advance*), yaitu pengembangan potensi diri seseorang karyawan dalam melakukan pekerjaan, kesempatan untuk mengembangkan karir, memperoleh prestasi dan kedudukan.
e. Pengakuan (*Recognition*), yaitu adanya pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi atau keberhasilan yang telah dicapai oleh karyawan.

2. Hygiene Factor atau faktor ekstrinsik:

a. Kondisi kerja (*Working Condition*), yaitu menyangkut keadaan lingkungan fisik dimana karyawan bekerja, seperti ruangan, suhu udara, pengaturan cahaya, ventilasi dan perlengkapan kerja.
b. Gaji (*Salary*), yaitu imbalan yang diberikan kepada karyawan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.
c. Hubungan interpersonal, yaitu suatu ikatan atau interaksi antar karyawan dalam melakukan pekerjaan.
d. Pengawasan (*supervisi*), yaitu supervisor mengkoordinasikan sistem kerjanya dalam tiga hal, yaitu melakukan dengan memberi pentunjuk/pengarahan, memantau proses pelaksanaan pekerjaan, dan menilai hasil dari sistem kerja yang diikuti dengan melakukan umpan bailk (feedback).
e. Perusahaan (*company*), yaitu suatu organisasi tempat bekerja yang dapat memberikan rasa kebanggan bagi setiap karyawan yang bekerja di dalamnya.

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku individu yang diskresioner, tidak secara langsung atau secara eksplisit diakui oleh sistem *reward* formal, tetapi secara agregat meningkatkan fungsi efektif organisasi. Dapat diartikan bahwa perilaku OCB bukan merupakan persyaratan dari peran atau deskripsi pekerjaan, kontrak kerja dengan organisasi namun sebagai perilaku sosial yang secara pribadi sukarela dilakukan terhadap sesama karyawan maupun organisasi sehingga jika tidak dilakukan pun tidak diberikan hukuman.[16]

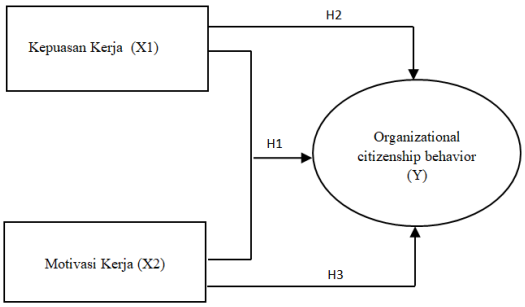
OCB merupakan konsep yang penting karena memberikan keuntungan pada organisasi. OCB berkontribusi langsung pada performa organisasi, yaitu dengan membuat organisasi menjadi tempat yang menarik untuk bekerja dengan rekan kerja. Hal ini karena setiap karyawan memperlakukan rekan kerjanya dengan ramah dan penuh pertimbangan.[17]

1. Dimensi-dimensi *Organizational Citizenship Behavior* (OCB).[18]
2. *Altruism*, merupakan perilaku menolong orang lain secara sukarela khususnya yang berhubungan dengan tugas di luar tanggungjawabnya dalam organisasi.
3. *Courtesy,* merupakan perilaku dimana karyawan bersikap sopan dan sesuai aturan, sehingga dapat mencegah timbulnya konflik interpersonal dalam organisasi.
4. *Sportsmanship,* merupakan perilaku yang menunjukkan daya toleransi yang tinggi terhadap organisasi sehingga seseorang akan berperilaku positif dan menghindari keluhan.
5. *Conscientiousness,* merupakan perilaku sukarela yang melebihi persyaratan dasar atau minimum pekerjaan dalam mematuhi aturan kerja maupun kehadirannya dalam organisasi.
6. *Civic virtue,* merupakan perilaku yang menunjukkan partisipasi dan kepeduian terhadap keberlangsungan hidup organisasi, seperti menghadiri rapat-rapat organisasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepuasan kerja menjadi prediktor utama OCB. Berikut adalah beberapa hal yang mempengaruhi OCB.[19]

1. Kepuasan kerja
   Kepuasan kerja memiliki hubungan positif dengan kinerja dan OCB. Individu dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki kemungkinan untuk berperilaku OCB.
2. Persepsi peran
   Persepsi peran meliputi konflik peran dan ambiguitas peran, keduanya ditemukan secara signifikan berhubungan negatif dengan OCB.
3. Perilaku Pemimpin
   Kepemimpinan memiliki pengaruh kuat pada karyawan untuk berperilaku OCB, namun tidak dikaitkan dengan gaya kepemimpinan tertentu, tetapi adalah kualitas hubungan karyawan dengan kepemimpinanya.
4. Persepsi keadilan
   Mengacu pada perasaan karyawan pada keputusan organisasi, apakah mereka dilibatkan dalam ide dan aspirasi, dan juga apakah mereka merasa cukup dihargai dan diberikan tanggung jawab. Persepsi keadilan berpengaruh positif dengan OCB.
5. Disposisi individu
   Kepribadian individu meliputi efektifitas positif, efektivitas negatif, kesadaran dan keramahan telah ditemukan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku OCB. Kepribadian dapat menjadi ukuran penting dalam mengendalikan pengaruh terhadap perilaku.
6. Teori motivasi
   Sumber motivasi individu dapat berdampak pada tingkatan OCB. Sebagai pengembanan individu dalam organisasi, teori motivasi kurang berlaku sebagai antecendents.
7. Usia
   Usia pekerja yang lebih muda dan lebih tua dapat melihat pekerjaan dan diri secara fundamental berbeda bukanlah hal baru. Tahun-tahun awal (20-34 tahun) adalah tahun-tahun menetapkan pendirian, tahun-tahun berikutnya (35-55 tahun) adalah rasa kuat diri dalam kehidupan dan pekerjaan.

Kerangka Konsep dan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas diajukan hipotesis bahwa sebagai berikut :

1. Kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior (OCB) perawat di RSUD Kota Yogyakarta.
2. Terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) perawat di RSUD Kota Yogyakarta
3. Terdapat pengaruhh motivasi kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) perawat di RSUD Kota Yogyakarta

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas (kepuasan kerja dan motivasi kerja) dengan variabel tergantung (OCB) melalui pengujian hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah eluruh perawat di RSUD Kota Yogyakarta. Jumlah sampel yang diajukan dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin sebanyak 62 orang perawat rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta dengan menggunakan teknik simple random sampling.[20]

DEFINISI OPERASIONAL

Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan keadaan mengenai rasa suka seseorang karyawan pada sebagian atau keseluruhan pekerjaan. Indikator diukur berdasarkan Weiss dkk (1976).Activity, Independence, Variety, Social Status, Moral status, Security, Social service, Authority, Ability utilization, Rresponsibilit, Creativity, Achievement, CompensationAdvancement, Co-workers, Human relation supervisions, Technical supervisions, CompanyPolices and practise, Working conditions, Recognitions.[21]

Motivasi Kerja

Suatu pembukuan perilaku yang ditandai oleh bentuk-bentuk aktivitas atau kegiatan melalui proses psikologis, baik yang dipengaruhi oleh faktor instrinsik maupun ekstrinsik yang dapat mengarahkannya dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Indikator yang diukur berdasarkan aspek motivasi yang diungkapkan oleh Herzberg.[22]

1) Motivasi kerja Intrinsik
   a. Pekerjaan itu sendiri
   b. Keberhasilan yang diraih
   c. Tanggung Jawab
   d. Peluang untuk maju
   e. Pengakuan
2) Motivasi kerja ekstrinsik
   a. Kondisi kerja
   b. Gaji
   c. Hubungan interpersonal
   d. Pengawasan
   e. Keadaan perusahaan

Organizational Citizenship Behavior

Beberapa perilaku meliputi tolong menolong, mengerjakan tugas yang bukan menjadi tanggung jawabnya dengan sukarela, mematuhi aturan dan efektif dalam waktu. Indikator yang diukur berdasarkan dimensi OCB dari Organ.[23]

1. Alturism
2. Courstesy
3. Sportmanship
4. Conscentiousness
5. Civic Virtue

Instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar pertanyaan yang disusun sebagai hasil justifikasi teori yang berasal dari beberapa konstruk atau indikator yang membentuk

variabel-variabel laten yang diteliti. Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala pengukuran berupa skala Liker. Skala ini merupakan skala interval yang digunakan untuk mengukur aitem-aitem pertanyaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden terpilih. Data yang dikumpulkan merupakan data primer. Kuesioner tersebut merupakan kuesioner tertutup yaitu responden hanya diberi kesempatan untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapatnya.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik parametrik dengan teknik analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression*). Penelitian menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda karena bertujuan untuk menguji pengaruh antara dua varibel bebas (kepuasan kerja dan motivasi kerja) dan satu variabel tergantung (OCB) dengan jenis datanya berupa skor interval atau rasio.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

A. Skala Kepuasan Kerja

Hasil uji coba dan seleksi aitem terhadap skala kepuasan kerja, menghasilkan 19 aitem valid dan 1 aitem gugur yaitu pada nomor 19. Diketahui koefisien korelasi aitem total (rit) terendah 0, 428 pada aitem nomor 6 dan koefisien korelasi atem total (rit) tertinggi 0,765 pada nomor aitem 14. Aitem-aitem dengan kualitas baik akan digunakan sebagai alat ukur penelitian dengan nomor baru. Berdasarkan hasil analisis koefisien *alpha* diperoleh indeks alat ukur sebesar 0,919 yang berarti bahwa alat ukur tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat yang memadai dalam pengumpulan data penelitian.

B. Skala Motivasi Kerja

Hasil uji coba dan seleksi aitem terhadap skala motivasi kerja, menghasilkan 17 aitem valid dan 4 aitem gugur yaitu pada nomor 3, 7, 13 dan 21. Diketahui koefisien korelasi aitem total (rit) terendah 0, 450 pada aitem nomor 9 dan koefisien korelasi atem total (rit) tertinggi 0,771 pada nomor aitem 17. Aitem-aitem dengan kualitas baik akan digunakan sebagai alat ukur penelitian dengan nomor baru. Berdasarkan hasil analisis koefisien *alpha* diperoleh indeks alat ukur sebesar 0,923 yang berarti bahwa alat ukur tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat yang memadai dalam pengumpulan data penelitian

C. Skala OCB

Hasil uji coba dan seleksi aitem terhadap skala OCB, menghasilkan 18 aitem valid dan 4 aitem gugur yaitu pada nomor 2, 13, 19 dan 21. Diketahui koefisien korelasi aitem total (rit) terendah 0, 443 pada aitem nomor 1 dan koefisien korelasi atem total (rit) tertinggi 0,727 pada nomor aitem 17. Aitem-aitem dengan kualitas baik akan digunakan sebagai alat ukur penelitian dengan nomor baru. Berdasarkan hasil analisis koefisien *alpha* diperoleh indeks alat ukur sebesar 0,911 yang berarti bahwa alat ukur tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat yang memadai dalam pengumpulan data penelitian.

Hasil Penelitian

A. Data Deskriptif Penelitian

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian Empirik

Variabel	Skor Empirik			
	Mean	SD	Min	Max
Kepuasan Kerja	79,98	18,539	48	111
Motivasi Kerja	78,13	21,274	37	114
OCB	80,16	20,633	38	117

Tabel 2. Deskripsi Data Penelitian Hipotetik

Variabel	Skor Hipotetik			
	μ	σ	Min	Max
Kepuasan Kerja	47,5	9,5	19	76
Motivasi Kerja	42,5	8,5	17	68
OCB	45	9	18	72

Berdasarkan kategorisasi skor kepuasan kerja, motivasi kerja dan OCB pada perawat rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta sebanyak 62 perawat, maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian yang memiliki kepuasan kerja berada pada kategori tinggi (83,87%), subjek penelitian yang memiliki motivasi kerja berada pada kategori tinggi (91,93%) dan subjek penelitian memiliki tingkat OCB yang tinggi (90,32%).

B. Uji Asumsi

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas sebaran yang tertera pada tabel 3, menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dengan p=0,633 (p > 0,05) dapat dinyatakan memiliki sebaran normal, variabel motivasi kerja dengan p=0,545 (p > 0.05) dapat dinyatakan memiliki sebaran normal dan variabel OCB dengan p=0,731 (p > 0,05) dapat dinyatakan memiliki sebaran yang normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Sebaran

Variabel	K-SZ	*Sig*	Keterangan
Kepuasan Kerja	0,746	0,633	Normal
Motivasi Kerja	0,800	0,545	Normal
OCB	0,688	0,731	Normal

2) Uji Linearitas

Berdasarkan hasil uji linear, variabel OCB dengan variabel kepuasan kerja memiliki nilai F *linearity* sebesar 323,190 dengan p=0,000 (p < 0,05) yang berarti hubungan variabel OCB dengan variabel kepuasan kerja adalah linear. Sama halnya dengan variabel OCB dengan variabel motivasi kerja dapat dikatakan memiliki hubungan yang linear. Hal tersebut nampak dari nilai F *linearity* 316,160 dengan p=0,000 (p < 0,05).

3) Uji Multikolinearitas

Semua variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
Kepuasan Kerja	0,174	5,743	Tidak terjadi Multikolinearitas
Motivasi Kerja	0,175	5,743	Tidak terjadi Multikolinearitas

4) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terkait variabel kepuasan kerja dan motivsi kerja terhadap OCB. Analisis regresi berganda dipilih untuk menganalisis pengajuan hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Analiisi Regresi Berganda

Variabel	*rxy*	F	Sig	ΔR	(β)
X1 & X2 dengan Y	-	230, 258	0,000	0,883	-
X1 dengan Y	0,910	-	0,001	0,828	0,385
X2 dengan Y	0,928	-	0,000	0,861	0,578

a. Uji Hipotesis 1

Diketahui bahwa kepuasan kerja dan motivasi kerja memberikan kontribusi dengan nilai F=230,258 dan p = 0,000 (p < 0,001) serta nilai ΔR=0,883terhadap variabel OCB. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas yaitu kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel *organizational citienship behavior (OCB),* maka hipotesis dinyatakan diterima.

b. Uji Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diketahui bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap OCB dengan koefisien korelasi sebesar 0,910 dengan p = 0,001 (p < 0,005) dan nilai $\beta = 0{,}385$ serta ΔR= 0,828. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja terdapat pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap OCB pada perawat rawat inap di RSUD

Kota Yogyakarta, maka hipotesis dinyatakan diterima.

c. Uji Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis regresi maka diketahui bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhdap OCB pada perawat di RSUD Kota Yogyakarta. Diketahui bahwa Motivasi kerja memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap OCB dengan koefisien korelasi sebesar 0,928 dengan p = 0,000 (p < 0,001) dan $\beta = 0{,}578$ serta ΔR= 0,861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja terdapat pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap OCB pada perawat rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta, maka hipotesis dinyatakan diterima.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Perawat RSUD Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi dengan secara simultan mampu mempengaruhi organizational citizenship behavior. Dari hasil uji regresi linier berganda diketahui bahwa kepuasan kerja memiliki nilai F 230,258 dan p = 0,000 (p < 0,001) serta nilai ΔR=0,883berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai maka semakin tinggi organizational citizenship behavior pegawai/karyawan.

Perawat yang memiliki kepuasan kerja ditunjukkan oleh sikap yang tidak pernah absen, datang tepat waktu, bersemangat dan akan membantu rekan kerja yang lainnya. Hal ini karena individu memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan selalu bersikap positif dalam menghadapi permasalahan dalam bekerja. Maka karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap sesuai aspek dan karakteristik OCB dalam bekerja karena kepuasan yang tinggi akan mendorong seorang karyawan memiliki perilaku menolong sesama karyawan bahkan untuk membantu organisasi lebih maju. Motivasi kerja yang dimiliki oleh seorang pegawai melalui tingkat kegigihan akan membangkitkan semangat kerja yang ada dalam dirinya. Dengan motivasi kerja yang tinggi tersebut pegawai akan mencurahkan kemampuannya untuk perusahaan, dengan begitu tujuan dari perusahaan akan tercapai. Di bantu dengan rasa kepuasan kerja yang dimiliki oleh pegawai dapat membuat pegawai selalu berpikir positif dan bekerja secara positif untuk melakukan hal-hal lain selain pekerjaannya.[23]

Kepuasan kerja dan motivasi kerja sangat baik bagi karyawan RSUD Kota Yogyakarta, karena pegawai yang puas dan termotivasi mampu bekerja dengan baik secara formal (in-role) atau pun informal (extra-role). Antonio dan Sutanto (2014) menyampaikan hal senada, perusahaan yang sukses memerlukan karyawan yang mampu dan mau mengerjakan tugas yang bukan termasuk tugas formal mereka.[24]

B. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Perawat RSUD Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) perawat RSUD Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya (β) 0,385 dan nilai signifikansi 0,000 dimana signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,01) dan ΔR= 0,828. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan, karena kepuasana seorang pegawai atau karyawan dapat membawa perusahaan kearah yang baik. Tingkat kepuasan pegawai dengan pekerjaan dapat membuat pegawai tersebut selalu merasa nyaman saat bekerja, dengan begitu pegawai mampu. Karyawan yang puas cenderung untuk berbicara secara positif mengenai organisasinya, menolong orang lain atau rekan kerjanya dan berusaha untuk melakukan lebih dari yang diharapkan dalam pekerjaannya.[25]

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulani (2005) yang menapatkan hasil bahwa responden yang memiliki kepuasan kerja

yang tinggi akan cenderung memiliki OCB yang tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Dengan kata lain jika perawat memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka tingkat OCB perawat juga akan meningkat.[26]

C. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Perawat RSUD Kota Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel motivasi kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB) perawat RSUD Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dari besarnya (β) 0,578 dan nilai signifikansi 0,000; dimana signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,01), dan ΔR= 0,861. Karyawan yang memiliki kesediaan untuk mengeluarkan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan oleh kemampuan usaha dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu yang dipengaruhi oleh faktor instrinsik maupun ekstrisik yang dapat mengarahkannya pada pencapaian suatu tujuan tertentu adalah karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi.[27]

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian dari Sutanto & Antonio (2014) yang mendapatkan hasil bahwa motivasi kerja secara significant berpengaruh terhadap OCB. Hal itu dapat terjadi karena motivasi yang tinggi mendorong karyawan supaya dapat menguatkan karakternya. Karyawan dimotivasi untuk dapat memenuhi standar pribadinya dan mengejar pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus, karyawan akan lebih mengejar tujuan dari perusahaannya dan kemudian akan memperlihatkan perilaku *good citizenship* dalam perusahaan sehingga karyawan akan lebih *respect* pada perusahaan dan dapat menjalankan perilaku sesuai deskripsi kerja maupun ekstra deskripsi kerja.[28]

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Kepuasan kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pada perawat di RSUD Kota Yogyakarta.
2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pada perawat di RSUD Kota Yogyakarta.
3. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Organizational Citizenship Behavior* pada perawat di RSUD Kota Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

[1] Sujudi, (2004). Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta, Departemen Kesehatan.

[2] Aditama, T.Y, (2003). Manajemen AdministrasiRumah Sakit, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Universitas Indonrsia (UI-Press).

[3] Sujudi, (2004). Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta, Departemen Kesehatan.

[4] Gronross, (2000). Service management and Marketing. Published by John Wiley and Sons LTD. England.

[5] Rahayu, W. (2005). Hubungan Internal Locus of Control dengan Organizational Citizenship Behavior pada Perawat Rumah Sakit. Skripsi, Tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Wangsa Manggala.

[6] Organ, D. W., Poskadoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behaviour: It's nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

[7] Lepine, J. A., Ernes, A, D.E. (2002) The Nature and Dimensionality of OCB : A Critical Review and Meta Analysis. Journal of Applied Psychology 87. 01. 52-65.

[8] Robbins, (2006). perilaku organisasi.edisi 12 Jakarta: Salemba 4.

[9] Wulani. F, (2005). Sikap kerja dan implikasi dalam pengelolaan sumber daya manusia: suatu kajian terhadaporganizational citizenship behavior. Jurnal Studi Bisnis, Vol. 3, No. 1.

[10] Luthans, (2006). Perilaku Organisasi.Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

[11] Robbins, (2006). perilaku organisasi.edisi 12 Jakarta: Salemba 4.

[12] Weiss, D.J., Dkk. (1967). Minnesota Studies In Vocational Rehabilitation: xxii. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Universitas Of Minnesota.

[13] Robbins (2006). perilaku organisasi.edisi 12 Jakarta: Salemba 4.

[14] Safaria, T. (2004). Kepemimpinan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

[15] Gibson, dkk. (1994). Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.

[16] Rini, Gita Setya (2014). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Organizational Citizenship Behavior. Studi kasus pada Karyawan Bank Indonesia Kantor PerwakilaPurwekerto.Semarang: Universitas Dipenogoro.

[17] Teresia, N., dan Suyasa, S. Y. T. P. (2008). Komitmen Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan call centre di PT. X. Phronesis Jurnal Ilmiah psikologi Industri dan Organisasi. 10(2) 154-169.

[18] Organ, D. W., Poskadoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behaviour: It's nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

[19] Jahangir, N., Akbar, M. M., Haq, M. (2004). Organizational Citizenship Behavior: it's nature and antecedents. BRAC University Journal, 1, 75-85.

[20] Umar, H. (2004), Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet ke 6, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

[21] Weiss, D.J., Dkk. (1967). Minnesota Studies In Vocational Rehabilitation: xxii. Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Universitas Of Minnesota.

[22] Gibson, dkk. (1994). Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.

[23] Organ, D. W., Poskadoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behaviour: It's nature, antecedents, and consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

[24] Sutanto, M.E & Antonio, E.N. (2014). Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja karyawan terhadap organxational citizenship behavior di CV Supratex. Jurnal Manajemen Bisnis, 3 (2): 20-29.

[25] Robbins (2006). perilaku organisasi.edisi 12 Jakarta: Salemba 4.

[26] Wulani. F, (2005). Sikap kerja dan implikasi dalam pengelolaan sumber daya manusia: suatu kajian terhadaporganizational citizenship behavior. Jurnal Studi Bisnis, Vol. 3, No. 1.

[27] Robbins (2006). perilaku organisasi.edisi 12 Jakarta: Salemba 4.

[28] Sutanto, M.E & Antonio, E.N. (2014). Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja karyawan terhadap organxational citizenship behavior di CV Supratex. Jurnal Manajemen Bisnis, 3 (2): 20-29.

SIMBIOSIS MUTUALISME DALAM BISNIS OJEK ON-LINE (GOJEK) DI YOGYAKARTA

[1]R. Nanang W, [2]Bambang N, [3]Jumintono.
Program Pasca Sarjana ,Master Pendidikan Vokasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
nanawrt@gmail.com, bambangnoor23@gmail.com, masmintosragen@gmail.com

ABSTRAK; Perkembangan Ilmu dan teknologi saat ini sangant pesat sekali tanpa perlu menghitung tahun untuk mencipta atau menemukan suatu hal yang baru.dalam perkembangannya internet semakin lekat dengan kehidupan di sekitar kita. Dalam dunia transportasi di Yogyakarta moda angkutan umum hanya menjadi sebuah sejarah perkembangan kota karena kemajuan jaman yag seba cepat ini. Penelitian ini akan meneliti tentang adanya hubungan simbiosis mutualisme dalam bisnin jasa layanan on-line Gojek di Yogyakarta antara gojek selaku penyedia aplikasi, driver sebagai mitra utama dalam menjalankan jasa transportasi dan yang lainnya, pemilik outlet/resto/apotek sebagai mitra penyedia layanan kebutuhan,serta konsumen costumer sebagai pemakai layanan bisnis jasa on-line Gojek. Penelitian ini adalah model penelitian lapangan (*field research*) bersifat diskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data secara observasi dan wawancara yang mendalam.

Kata kunci; *simbiosis mutualisme*

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan saran umum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya diyogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dikota ini traonsportasi merupakan hal yang sangat pokok sebagai penenunjang kegiatan masyarakat dijogja. Namun belakangan moda angkutan umum ini berhenti karena mahalnya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan ,selain hal tersebut sejak diterbitkannya UU No. 22 tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan serta mulai beroperasinya tranjogja yang nota bene lebih murah dan lebih nyaman membuat ankutan kota ini gulung tikar.hal ini berdampak pada pelayanan pada masyarakat, selain nyaman dan murah masyarakat juga menuntut transportasi itu cepat sehingga dapat menghemat waktu, hal tersebut belum mampu diwujudkan oleh pemerintah Yogyakarta karena keterbatasan armada tranjogja.

Selain hal tersebut keberadaan taksi manual juga tidak menjadi daya tarik karena biaya yang mahal,b ahkan ojek manual juga masih dianggap mahal bagi masyarakat jogja. Para pebisnis online mengambil peluang dari kondisi tersebut karena melihat semua orang telah terbiasa menggunakan gatget. apalagi sejak ditemukannya media internet seperti dunia yang besar ini terbuka bagi kita. Teknologi saat ini membuat orang ketergantungan terhadap internet hal inilah yang menggugah penulis untuk melakukan penelitian tentang bisnis on-line Go-jek yang mampu menciptakan bukan hanya sekedar lapangan pekerjan baru namun juga mampu menciptakan peluang yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam jaringan bisnis tersebut.

Mutualisme adalah hubungan menarik antara spesies yang telah berevolusi untuk bekerja dan hidup bersama untuk bertahan hidup. Untuk hubungan harus diklasifikasikan sebagai benar-benar mutualisme, kedua spesies yang terlibat harus mendapatkan keuntungan dalam beberapa cara. Prinsip simbiosis Mutualisme ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu kondisi antara kita sebagai penjual dengan si pembeli ini juga untung ataupun sebaliknya (Hatta: 2011).

Bisnis adalah suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut (L.R Dicksee). Bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara berulang-ulang, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan pengertian bisnis(paterson dan plowman). Senada dengan plowman, Meriem Websler menyatakan Bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang; kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan; Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik dan lain lain (Merriam Webster). Bisnis adalah keseluruhan aktivitas yang terorganisir dalam bidang perniagaan dan industry penyediaan barang dan jasa agar terpenuhi kebutuhan masyarakat sera dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat (selman dan lackson) dari pengertian para pakar dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah ssuatu bentuk aktifitas yang terorganisir untuk melakukan usaha atau kegiatan dalam bentuk barang atau jasa untuk memperoleh rabat atau keuntungan.

Bisnis online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan didunia maya untuk menghasilkan uang(Top Lintas.com). Bisnis online adalah segala bentuk kegiatan dengan menggunakan fasilitas internet untuk mencapai tujuan. Bisnis online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online (melalui internet). Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet, bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online ini bisa meliputi kegiatan jual beli online, maupun menyediakan jasa secara online, dan banyak jenis bisnis lainnya yang bisa kita temukan di online di berbagai bidang industri. Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa bisnis online adalah aktifitas bisnis dengan sarana utama internet sebagai media bisnis untuk memperoleh keuntungan

Perusahaan Go-jek berdiri pada tahun 2010 bermula sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnnya.

Go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.

Kecepatan
Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.

Inovasi
Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup Anda.

Dampak Sosial
Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.

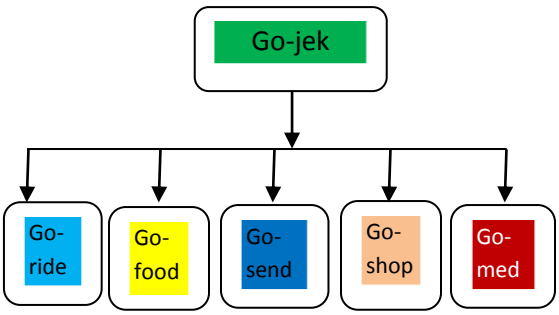


Gambar 1: bentuk kemitraan bisnis online go-jek

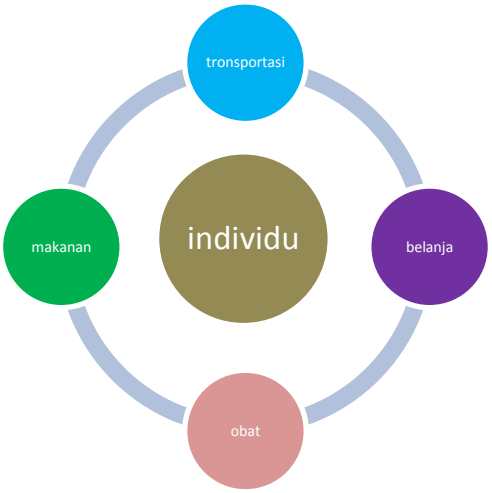
Jenis peyanan dalam Go-jek antara lain :

1. Go-Ride yaitu jasa layanan untuk mengantar individu dari suatu tempat ke tempat yang lain
2. Go-Food yaitu jasa layanan untuk memenuhi consumen dalam pengadaan makanan
3. Go-Send yaitu jasa layanan untuk masyarakat dalam hal pengiriman barang/paket dalam kota
4. Go-Mart/Shop yaitu jasa layanan untuk masyarakat dalam hal belanja ke supermarket

5. Go-Medical yaitu jasa layanan untuk masyarakat dalam hal pembelian obat di Apotik.



Gambar 2; jasa layanan yang ditawarkan gojek



Gambar 4; kebutuhan harian individu

II. METODE PENELITIAN

A. *Paradikma Penelitian*

berdasarkan observasi dilapangan terlihat bahwa dengan adanya layanan jasa online gojek terliha bahwa semua merasa terbantu serta dimudahkan dalam menjalankan rutinitas kesehariannya tergambar sebagai berikut



Gambar 3;bentuk saling menbutuhkan dalam halmenjalankan bisnis online

Sementara dalam aktifitas keseharian seorang individu selalu ingin serba cepat dan praktis, dan dalam hal ini gojek berusaha memenuhi tuntutan masyarakat secara umum tersebut.

Subyek penelitian adalah semua elemen yang terlibat dalam aktifitas bisnis jasa online gojek yang terdiri dari 4 kelompok besar yaitu;perusahaan gojek dalam hal ini diwakili manajemen wilayah jogja,mitra gojek sebagai driver,mitra gojek sebagai pemilik outlet serta konsumen/costumer sebagai pengguna layanan jasa on-line gojek.

Obyek penelitian adalah tingkat kepuasan serta bentuk keuntungan yang diperoleh oleh semua pelaku yang terlibat dalam bisnin jasa on-line gojek.

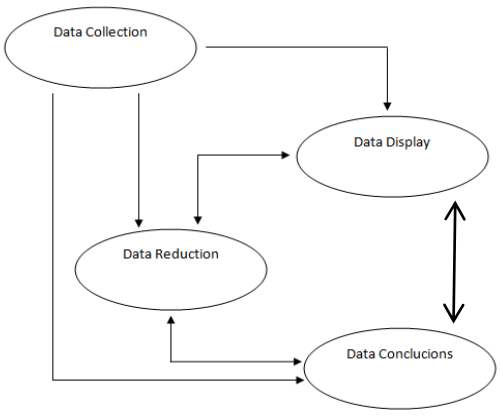
B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan langsung kelapangan dengan hasil: kantor go-jek setiap hari selalu ramai oleh para calon mitra gojek yang ingin bergabung, didalam kantor go-jek karyawan terbagi dalam beberapa divisi antara lain: (1) divisi go-food Untuk mengurusi para calon mitra pemilik *outlet* makanan; (2) divisi go-ride dan go-car bertugas mengurusi calon mitra sebagai *driver; (3)divisi peerimaan dokumen driver; (4)* divisi *costumer service,* mengurusi para driver yangterjadi masalah dilapangan(terkena *suspended*). Wawancara yang mendalam pada para pelaku yang terlibat dalam bisnis jasa on-line gojek yang

terwakili menjadi empat kelompok besar yaitu; perusahaan gojek dalam hal ini diwakili manajemen wilayah jogja, mitra gojek sebagai driver, mitra gojek sebagai pemilik outlet dan konsumen/costumer sebagai pengguna layanan jasa on-line gojek.

C. Analisa Data

Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara, pengamatan, kuesioner, dan dokumentasi dianalisis serta diinterpretasi untuk memenuhi tuntutan tujuan penelitian. Agar penyajian data lebih bermakna dan mudah dipahami maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Data disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Agar penyajian data lebih bermakna dan mudah dipahami maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analysis interactive. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion).



Gambar 5. Komponen dalam Analisis data(interaktif model)

Analisis data model model miles dan hubermen secara garis besar dibagi menjadi empat periode yaitu:

1. *Data collection* (koleksi data)

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara secara detail dan mendalam sehingga akan tercapai pada titik kejenuhan data.pada proses ini peneliti harus mencatat secara teliti karena data yang diperoleh akan sangat dan belum tertata secara rapi.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Langkah berikutnya adalah reduksi data pada tahap ini selama periode wawancara peneliti juga sudah mulai meilih dan memilah data yang memang penting dan dibutuhkan dalam penelitian ini

3. *Data Display* (penyajian data)

Langkah berikutnya yaitu display data dan juga melakukan analisis data ,dalam tahap ini peneliti secara terbuka mendiskusikan hasil temuan penelitiannya dengan teman sejawat atau pembimbing penelitian untuk dikaji bersama

4. *Conclution drawing/verifying*

Pada tahap ini setelah melalui diskusi peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukannya. Jika Kesimpulan yang diambil didukung dengan bukti yang kuat dan dapat menjawab rumusan masalah maka kesimpulan tersebut kredibel. Apabila kesimpulan yang dibuat belum didukung bukti yang kuat dan belum dapat menjawab rumusan masalah maka peneliti akan kembali kelapangan untuk mencari bukti bukti yang mendukung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Managemen Gojek

Menciptakan lapangan kerja baru, ataupun memberi peluang pekerjaan sampingan dengan penghasilan tambahan yang menjanjikan tanpa kehilangan pekerjaan utama, membuat dampak positif di dalam kehidupan

bermasyarakat, memudahkan akses mayarakat dalam hal jasa transportasi dan jasa layanan yang lainnya, missal pengiriman barang (go send), pemesanan makanan (go food), pembelian obat (go Med)

Mtra penyedia layanan

Masyarakat yang jadi mitra layanan merasa terbantukan dengan adanya go-jek. omset meningkat antara 20-50%, apalagi go-food saat bulan puasa mencapai 100%, mitra juga senang produk nya dikenal khalayak umum. serta pendapatan juga meningkat, secara langsung juga produk mereka juga sudah terpampang pada aplikasi go-jek sehingga biaya promosi ikut berkurang. *Branded* perusahaan danproduknya semakin terkenal dikalangan masysrakat.

Mitra Driver

Dengan bergabung menjadi mitra driver pendapatan keluarga meningkat, pendapatan rata-rata driver diatas upah minimum regional, sehingga kesejahteraan meningkat.

Konsumen

Dengan adanya layanan jasa Gojek masyarakat merasa terbantu akan adanya transportasi yang mudah, cepat dan murah, bisa menghemat waktu. Dalam segi pengadaan makanan dan lainnya masyarakat merasa senang, tidak perlu repot antri di rumah makan tinggal menunggu pesanan datang. waktu di rumah dan keluarga bisa lebih leluasa, komsumen juga merasa tertolong jika ada barang/dokumen yang penting tertinggal dirumah atau harus mengantar barang dengan cepat dan banyak ke beberapa tempat (saat antar parcel/bingkisan lebaran), dalam pengadaan obat tingal nunggu saja tanpa harus pergi meninggalkan yang sakit dirumah, hemat waktu.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian

Diskriptif kualitatif diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Misi dari pihak Go-jek tercapai dengan 3 slogan utama mereka yaitu Kecepatan, inovasi dan dampak sosial, Gojek juga butuh mitra untuk menjalankan bisnisnya.
2. Para mitra go-jek merasa diuntungkan dan merasa semakin sejahtera dengan keberadaan Go-jek di Yogyakarta
3. Konsumen merasa terbantu dengan adanya Go-jek dalam hal transportasi dan yang lainnya (pengadaan makanan, pengiriman barang atau pembelanjaan)
4. Dalam bisnis online Go-jek memang betul betul terjadi hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) antara semua pihak yang terlibat dalan bisnis online tersebut (Gojekelaku penyedia aplikasi, mitra gojek sebagai pelaku di lapangan dan Konsumen selaku pemakai)

DAFTAR PUSTAKA

LR.Dicksee. *Business Organisation.*www.*Depository*.com

Merriam webster. *Engish dictionary.www.merriam webster.com*

Matthew B. Miles,A. Michael Huberman,Johnny Saldana. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* London: Sage publiscation.Icn

Muh Hatta (2011). *Simbiosis mutualisme dalam bisnis.* malang:

Peterson and Plowman(1958), *Business Organisation and management* Homewood, Ill., R.D. Irwin

Akad Murabahah dan Implementasinya Pada Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Mangga Dua Jakarta Pusat 2017

[1]Rahman Shaleh, [2]Sudarno Shobron
Program Studi Magister Hukum Islam Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
rahman200284@yahoo.co.id, ss175@ums.ac.id

***ABSTRAK*: Bank Muamalat Indonesia (BMI) berawal dari keinginan mendirikan bank yang bebas bunga, maka prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksinya adalah prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil (*mudharabah*), jual beli (*Murabahah*), sewa menyewa (*ijarah*) dan jasa. Beberapa prinsip operasional tersebut, prinsip jual beli yang diwujudkan dalam akad pembiayaan *Murabahah* merupakan prinsip operasional yang paling popular dipraktikkan oleh Bank Muamalat Indonesia, salah satunya adalah produk pembiayaan KPR iB Muamalat. Produk KPR iB Muamalat adalah pembiayaan yang akan membantu nasabah dalam memiliki rumah tinggal baik baru maupun *secondary*. Pembiayaan ini juga dapat digunakan untuk *take over* KPR dari bank lain, pembangunan rumah atau renovasi rumah. KPR iB Muamalat menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan akad jual beli atas barang tertentu, bank menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, harga jual tersebut disetujui pembeli. *Murabahah* sebagai akad dalam produk Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus diterapkan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta sejalan dengan fatwa DSN MUI dan Lembaga Fatwa International. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi *Murabahah* pada KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan masuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan design deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta analisis secara mendalam dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penerapan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat *Murabahah* dalam praktik KPR iB Muamalat dengan cara meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri menggunakan akad *wakalah* sementara bank belum memiliki rumah tersebut . Praktik seperti ini termasuk kesalahan dalam penerapan akad *Murabahah* sehingga diperlukan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi praktik *Murabahah* di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua.**

Kata Kunci : *murabahah*; wakalah; pembiayaan.

I. PENDAHULUAN

Bank Syariah lahir dilatarbelakangi oleh sebuah keinginan untuk menciptakan sistem perbankan yang bebas dari praktik riba. Semangat menghidupkan sistem perekonomian islam (*Islamic Economic System*) berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat diterapkan dalam aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat. Upaya awal penerapan perbankan model ini ditandai dengan dua gerakan *renaissance* Islam modern : Neorevivalis dan Modernis[1]

Dewasa ini perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Kinerja ini semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia, ketika perbankan konvensional banyak terpuruk, perbankan syariah mampu bertahan bahkan menunjukkan perkembangannya. Terbukti pada saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan dan membuktikan ketahanaan likuiditasnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Perbankan

[1] Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition of Riba and it s Contemporary Interpretation*, (Leiden EJ Brill, 1996), hlm.1-3.

syariah menjadi salah satu industri keuangan yang tumbuh pesat beberapa tahun ini. Sebagai lembaga intermediasi, bank bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat berupa kredit atau pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 tahun 1998), maka dapat dikatakan perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi menjadikan sektor riil dan keuangan akan terkointegrasi.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) berusaha untuk mewujudkan misinya membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan anggota dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) seluruh cabang termasuk Bank Muamalat Cabang Mangga Dua berusaha menerapkan prinsip-prinsip operasional syariah sebagaimana yang ada dalam fiqih mu'amalah seperti bagi hasil, jual beli, sewa menyewa dan jasa. Dari beberapa prinsip operasional tersebut, prinsip jual beli yang diwujudkan dalam akad pembiayaan Murabahah merupakan prinsip operasional yang paling popular dipraktikkan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua.

Murabahah menjadi skema pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Muamalat Cabang Mangga Dua. Di Indonesia , dari berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, produk Murabahah yang paling banyak dipraktikkan dalam pembiayaan kepada nasabah. Ada sekitar 60 % dari produk perbankan syariah menggunakan transaksi akad Murabahah.Sisanya sebanyak 40% menggunakan skema akad mudharabah.[2]

Fungsi Bank Muamalat Cabang Mangga Dua dalam pembiayaan Murabahah ini adalah sebagai penyedia barang untuk kepentingan nasabah, Singkatnya Bank Muamalat Cabang Mangga Dua membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan. Dengan kata lain, Murabahah adalah akad penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.3Dalam akad ini, pihak Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan.[4]

Namun, dalam praktiknya sebagaimana observasi penulis terhadap ketidaksesuaian implementasi Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua, dalam akadnya menyebutkan bahwa pembelian obyek Murabahah diwakilkan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi Murabahah pihak Bank Muamalat Cabang Mangga Dua tidak menyerahkan barang, melainkan menyerahkan uang kepada nasabah. Alasan yang populer, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri. Praktek ini berdampak pada anggapan masyarakat bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Dalam hukum Islam, salah satu ketentuan dasar penjualan adalah barangnya harus dimiliki oleh penjual ketika penjualan tersebut berlangsung. Ketentuan ini juga berlaku dalam penjualan dengan cara Murabahah. Sedangkan menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang syariah karena termasuk transaksi yang bathi[5]Para ulama syariah terdahulu telah memberikan alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut.Akan tetapi, Menurut seorang pakar ekonomi Islam M. Syafi'i

[2]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta:PT Raja Grafindo Persada , 2005) hlm.184-185.

[3]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Grafiti, 2005), hlm. 64.

[4]Abduallah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 147.

[5]Dalam hadits Rasulullah SAW " *Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan jual beli , tiadak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu* (H.R Abu Daud, menurut Al-Albani derajat hadits ini hasan shahih)

Antonio, beberapa ulama syariah modern, dalam konteks jual beli Murabahah membedakan antara menjual "belum ada barang" dan menjual tanpa kepemilikan barang.[6]

Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN- MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, ketentuan pertama, butir 9 disebutkan bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli, jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa akad Murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya dahulu baru dilakukan akad Murabahah, tidak diperkenankan melakukan akad Murabahah jika tidak ada barangnya.[7]

Bank Muamalat Cabang Mangga Dua yang hanya memberikan uang kepada nasabah untuk dibelikan sendiri baranganya atau pihak Bank Syariah menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya tersebut. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat Murabahah itu sendiri, yang pada hakikatnya Murabahah adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya ditentukan oleh aturan syariat. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka kesan yang kita dapat dari proses ini penjual menjual barang yang belum ia miliki padahal ini jelas menyalahi aturan syariat. Dalam hadits dijelaskan

لابيع إلاّ فيما تملك

Artinya:*"Tidaklah sah jual beli, kecuali yang dapat dimiliki."*[8]

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yakni: 1) Apa saja jenis produk *Murabahah* di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua?, 2) Bagaimana praktik pelaksanaan *Murabahah* di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua?, 3) Apakah praktik akad *Murabahah* KPR iB Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Mangga dua sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Murabahah* dan Fatwa DSN –MUI ?, dan 4) Apakah ada praktik *Murabahah* KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Mangga Dua yang mengandung nilai riba?

Untuk mencarikan solusi dari problem akademik di atas, maka perlu dijelakan kerangka teroitik tentang murabahah. Kata *Murabahah* berasal Bahasa Arab yaitu dari akar kata ربح dalam ilmu shorof terdapat tambahan alif menjadi رابح (*raabaha*) يرابح(*yurabihu*) , مرابحة (*murabahatan*), yang berarti perdagangan yang menguntungkan, رابحه على بضاعته [9], dan menjual sesuatu barang yang memberikan keuntungan [10] Kata *Murabahah* juga berasal dari kata ربح (*ribhun*) atau ربح (*rubhun*) yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.[11]

Menurut fuqaha (para ahli hukum Islam), pengertian *Murabahah* adalah البيع بالرأس المال وربح معلوم (*al-bai' birasil maal waribhun ma'lum*) artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.[12]

Ibnu Qudamah seorang ulama mazhab hambali berpendapat tentang *Murabahah*

والمرابحة أن يبيعه بربح فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة

[6]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (*Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.104.

[7]Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

[8]HR. Abu Dawud, lihat Musthafa Diib Al Bugha, *Ikhtisar Hukum-hukum Islam Praktis,*(Semarang*:* CV As-Syifa, 1994), hlm.470., Hadits ini dinilai Shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami,* nomor Hadits 7083., HR. al-Khamsah dan dianggap *shahih* oleh at-Tirmizi, Ibn Huzaimah dan al-Hakim, lihat as-Shan'ani, *Subul as-Salam*, hlm. 16.

[9] Majma al-lughah Al-Arabiyyah , *Mu'jamul Washit*, (Kairo : Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyah, 2011), hlm.334.

[10] Asy-Syihab al-Jundi, *Al-Aqdu al-Murabahah baina al-Fiqh al islami wa al-Ta"amuli al-Mashrafi*, Saudi Arabia: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986, hlm. 15. Sebagaimana juga dikutip Fathurrahman Djamil dalam buku Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan kedua, hlm. 108.

[11] Muhammad Usman Syubair, *Al-Mu'amalat al-Muliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al- Islami*, Yordan: Dar al-Nafais, 1996, h. 216. Sebagaimana juga dikutip Fathurrahman Djamil dalam buku Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan kedua, hlm. 108.

[12] Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, (Kairo:Darul Hadis, 1995) Jilid IV, hlm. 199.

"*Murabahah* adalah seseorang menjual suatu barang dengan keuntungan dengan menyebutkan modalnya (harga belinya) 100 (dirham) dan dia menjualnya dengan keuntungan 10 (dirham)[13]

Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini dengan "penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut".[14] Para fuqaha mensifati *Murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (*dhaman buyu' al-amanah*). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.[15] Ulama Syafiiyah mendifinisikan *Murabahah* sebagai jual beli sebagaimana modal pembelian dan dijual kembali dengan menyebutkan harga beli dilebihkan satu dirham pada setiap sepuluh dirham dan sebagainya, dengan syarat kedua belah pihak mengetahui modalnya[16]

Al-Mawardi berpendapat bahwa *murabahah* dengan mengatakan

وَاَمَّا بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ فَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ واحد فَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ لَا يُكْرَهُ.

"*Adapun bentuk Murabahah adalah seseorang mengatakan saya menjual kepadamu baju ini dengan cara murabahah dengan menjual 100 dirham dan aku mendapat keuntungan sebanyak 1 dirham pada 10 dirham , maka yang demikian itu hukumnya boleh."*[17]

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.[18] Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *Murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan.[19]

Sebagaimanana telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya , *Murabahah* menurut Ibnu Rusyd al Maliki adalah jual beli komoditas dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan.[20]Menurut Antonio "*bai Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *Murabahah,* penjual harus memberitau harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya."[21]

Murabahah dalam istilah para ulama fiqih terdahulu adalah bagian dari jual beli amanah; yaitu penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli[22]. Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam memandang sah atau tidaknya dalam *Murabahah*, hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur'an bagaimanapun juga, tidak pernah secara langsung membicarakan tentang *Murabahah*, meski disana terdapat tentang acuan jual-beli, laba-rugi dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang memiliki rujukan langsung kepada *Murabahah.*

Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafii yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *Murabahah* adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan suatu hadits pun. Al Kaff, seorang kritikus *Murabahah* kontemporer menyimpulkan bahwa *Murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak di kenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya". Menurutnya, para ulama mulai menyatakan

[13] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni,* (Kairo:Darul Hadis, 1995) Jilid IV, hlm. 200.

[14] Muhammad Usman Syubair, *Al-Mu'amalat al-Muliyah...,* hlm. 217.

[15] *Ibid*., hlm. 217.

[16] Nawawi*, Almajmu syarhil muhzzab*, (Beirut : Daar Kutub : tt) jilid I , hlm. 3765.

[17]Al-Mawardi, *Al-Hawii Al-Kabiir* , (Beirut : Daar Kutub : 2002) Jilid 5, hlm. 279.

[18]Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.116-117.

[19]Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar ModalIndonesia dan Malaysia*,(Jakarta: Ciputat Press Group, 2009) , hlm. 76.

[20]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Celebes Timur UH III, 2008), hlm.103-104.

[21]Muhammad Syafi"i Antonio*, Bank Syari"ah ;Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.101.

[22] Kementerian Agama Islam Kuwait , *Al Mausu'ah Al-Kuwaytiyyah*, Jilid XXXVI, hlm. 318.

pendapat mereka mengenai *Murabahah* pada seperempat pertama abad kedua hijriyah. Mengingat tidak adanya rujukan lagi dalam Al-Quran maupun hadits shahih yang diterima umum, para fuqaha harus membenarkan *Murabahah* dengan dasar yang lain. Imam Malik membenarkan keabsahannya dengan merujuk pada praktek penduduk Madinah.[23]

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang/objek jual beli tertentu dengan kesepakatan harga antara pemjual dan pembeli, setelah penjual menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang ditetapkan. Diperbolehkan juga mengambil keuntungan murabahah dengan margin atau prosentase dari harga barang/objek *Murabahah*.

Menurut ilmu fiqih, pembahasan *Murabahah* masuk ke dalam bab *bai (jual-beli).* Hukum jual beli adalah boleh [24] . Dalam mazhab Hanafi adapun Imam Nawawi menerangkan dalam AlMajmu bahwa jual beli adalah مقابلة مال بمال تمليكا menukar sesutu dengan sesuatu untuk menjadikannya sebagai hak milik, ibnu Qudamah berpendapat sama dengan Annawawi yakni مقابلة مال بمال تمليكا وتملكا

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa dasar hukum dari akad *Murabahah* adalah seperti hukum *bai* (jual beli). Pada banyak literatur fiqih *Murabahah* dimasukkan kedalam pembahasan *bai* (jual beli)

Dasar Hukum *Murabahah* adalah Q.S. An-Nisa (4): 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan keridoan (suka sama suka) diantara kamu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu"

[23]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.

[24] Al Juzairy, *Al-Fiqhul Ilsmai Ala Mazahibil Arbaah* ,(Beirut: Maktabah At-tauqifiyyah) :jilid 3 hlm.153.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah lapangan (*Field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung atau kegiatan di lapangan penelitian). Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi,[25] maka pendekatannya adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari nara sumber dalam bentuk deskripsi verbal. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Analisis data dengan menggunakan *verstehen*, yakni menginterpretasi data-data yang dikumpulkan dengan logika induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembiayaan *Murabahah*

Penyaluran pembiayaan, Bank Muamalat Cabang Mangga Dua menggunakan prosedur yang diterapkan pada bank umum lainnya, namun dalam konsep pengaplikasiannya tetap tidak melalaikan dari sistem syariah yang berlaku dan sesuai dengan undang-undang perbankan syariah di Indonesia.

Nasabah dalam pengajuan pembiayaan, harus melewati proses yang ditentukan oleh Bank Muamalat. Dimulai nasabah datang meminta pembiayaan sampai pembiayaan tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan account manager atau dengan Relationship Manager Bank Muamalat Cabang Mangga Dua.

Prosedur permohonan pembiayaan *Murabahah* tidak berbeda jauh dengan permohonan pembiayaan pada akad mudharabah atau musyarakah. Adapun prosedur pembiayaan *Murabahah* adalah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan.

[25]Suharsimi Arikunto,. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipt, 2002 hlm. 23

Proses Awal. Pembiayaan KPR iB Muamalat menggunakan akad *Murabahah* yaitu calon nasabah datang kepada Bank Muamalat Cabang Mangga dua untuk membeli rumah, apartement atau ruko. Calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh *account manager* atau *Relationship manager* yang bersangkutan. Formulir pembiayaan *Murabahah* tersebut berisi data-data pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung adalah data yang berhubungan dengan kedudukan legalitas calon nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lain-lain.[26]

Setelah data-data yang diperlukan diserahkan kepada *account manager* atau *Relationship Manager*, tahap selanjutnya adalah Bank Muamalat mencari informasi tentang kebenaran data yang telah diberikan dan mencari kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. *Account manager* bisa secara langsung memantau keadaan calon nasabah atau mencari informasi melalui data-data yang diberikan kepada Bank Muamalat.

Proses awal pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh *account manager* dalam menilai calon nasabahnya, misalnya karakter. Karakter ini berhubungan dengan kejujuran, moral (*good attitude*) dan kesediaan calon nasabah untuk bekerja sama dengan Bank Muamalat. Faktor ini menjadi perhatian, karena Bank Muamalat Cabang Mangga Dua ingin agar pelunasan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sehingga Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus berhati-hati agar tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki niat yang tidak baik. Oleh karena itu, Bank Muamalat harus menyelidiki calon nasabah tersebut apakah memiliki itikad yang baik dalam melaksanakan transaksi di Bank Muamalat.

Untuk menilai karakter calon nasabah, *account manager* dapat mengumpulkan informasi dari beberapa sumber sebagai berikut:

Sesama *Account manager*, baik antar Bank Muamalat maupun dari bank yang berbeda. Bila pengecekan terhadap nasabah dilakukan ke bank lain, ini disebut dengan bank checking atau BI *checking*. Apabila dalam proses awal *Account Manager* telah menemukan kebenaran tentang data tersebut maka *account manager* harus mensurvei langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan data-data calon nasabah tersebut dan Bank Muamalat Cabang Mangga Dua harus mengambil keputusan yang tepat apakah permohonan pembiayaan *Murabahah* layak untuk dibiayai atau tidak. Pada Tahap melakukan survei langsung ke lapangan *account manager* harus mencari informasi bagaimana kelancaran calon nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila *account manager* sudah menemukan kebenaran tentang data calon nasabah maka hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Laporan hasil kunjungan diisi oleh *account manager* dan melaporkan hasil kunjungan kepada pihak komite untuk dimintai pendapatnya tentang keadaan kondisi calon nasabah tersebut.

Account manager atau *Relationship Manager* juga membuat usulan pembiayaan. Usulan pembiayaan merupakan dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan baik itu *Murabahah, ijarah,* maupun *musyarakah* kepada nasabah yang diajukan. Dan usulan pembiayaan itu dilaporkan kepada pihak komite untuk dimintai keputusan apakah calon nasabah tersebut layak.[27] Usulan pembiayaan yaitu berupa dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diajukan kepada komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan.[28]

Usulan pembiayaan *Murabahah* dalam setiap pengajuan pembiayaan nasabah atau calon nasabah Bank Muamalat Cabang Mangga

[26] Wawancara dengan Branch Manager tanggal 5 Juli 2017 pukul. 13.00-15.00 WIB

[27] Wawancara dengan Relationship Manager Bank Muamalat Cabang Mangga Dua Tanggal 6 Juli 2017

[28] Wawancara Relationship Manager tanggal 6 Juli 2017 pukul. 13.00-15.00 WIB

Dua secara keseluruhan baik itu KPR iB Muamalat maupun pembiayaan apartement dan ruko maka usulan pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut harus mendapat persetujuan komite pembiayaan Bank Muamalat Pusat. Bagian yang akan memproses adalah *Retail Financing Consumer*

Retail Financing Consumer menganalisa pembiayaan yang meliputi KPR, renovasi rumah dan multiguna, sedangkan SME (*Small Medium enterprise*) menganalisa pembiayaan investasi seperti ruko , gedung kantor yang nilainya maksimal 10 Milyar[29]

Proses Analisa, tidak hanya dilakukan bank konvensional tapi juga dilakukan pada Bank Muamalat. Karena bank syariah adalah bank yang merupakan amanah bagi para nasabah yang menitipkan dananya, maka Bank Muamalat Cabang Mangga Dua wajib menyalurkan dana tersebut ke dalam pembiayaan yang benar-benar syariah supaya Bank Muamalat Cabang Mangga Dua terhindar dari sistem yang *syubhat* dan dalam fungsi bank yang sifatnya *financing* Bank Muamalat Cabang Mangga Dua sesuai dengan arahan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Proses analisa ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua. Oleh karena itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa. Jika pejabat bank salah menganalisa maka kemungkinan bisa menimbulkan kemacetan pembayaran pada nasabah dan bank menanggung kerugian.

Setiap Bank Muamalat Cabang Mangga dua memberikan pembiayaan kepada nasabah tentu ada resiko yang harus ditanggung. Resiko tersebut muncul karena beberapa faktor diantaranya karena ketidakmampuan pejabat bank dalam menganalisa, sehingga analisa yang dihasilkan tidak tepat. Oleh karena itu setiap pejabat bank yang bertugas menyalurkan dana harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menganalisa karena hasil analisa itu akan menentukan keberhasilan proyek atau usaha akan dibiayai.

Analisa Pembiayaan terdiri dari dua golongan data atau informasi yaitu data kuantitatif atau data kualitatif. Ataupun data kuantitatif yaitu bank menganalisa kondisi calon nasabah berdasarkan kemampuan untuk membayar dan ini dilihat dari beberapa aspek. Analisa kuantitatif merupakan gambaran dari kesehatan keuangan calon nasabah yang tercermin dari penghasilan, likuiditas keuangan dapat dilihat rekening koran nasabah.

Akan tetapi kondisi perorangan tidak dapat seluruhnya tercermin dari angka-angka dalam laporan keuangan, karena masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu analisa yang tidak berdasarkan angka. Analisa yang tidak berdasarkan angka ini disebut analisa kualitatif. Dari analisa kualitatif dapat memberi gambaran yang utuh mengenai calon nasabah dan pengaruhnya terhadap resiko pembiayaan yang akan diberikan pada calon nasabah tersebut.

Analisa kualitatif biasanya berhubungan dengan etika. Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa nasabah peseorangan diantaranya meliputi informasi terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Dalam melakukan peroses analisa dua petugas yang melakukan analisa yaitu: pertama analisa yang dilakukan oleh bagian pembiayaan *(account manager)* yang tugasnya menganalisa data kuantitatif yang berupa analisa *income*. *Account manager* juga melakukan analisa terhadap calon nasabah individu/ pribadi cukup dengan menganalisa sumber pengembalian yang dilihat dari slip gaji calon nasabah.

Analisa yang kedua yaitu dilakukan oleh support pembiayaan yaitu bagian administrasi dan pembiayaan hukum (legal) yang tugasnya menganalisa yuridis secara hukum atas profil nasabah, analisa jaminan, dan taksasi jaminan. Tujuan dari adanya support pembiayaan adalah untuk membantu mempercepat proses pembiayaan, membantu mempercepat proses pencairan dana dan pengadministrasian pembiayaan, melakukan pemeriksaan. Dalam akad *Murabahah* KPR iB Muamalat bagian legal tugasnya menilai apakah barang yang dijadikan jaminan layak atau tidak untuk diberikan dan untuk sekaligus membantu

[29] Wawancara dengan Branch Manager tanggal 5 Juli 2017 pukul. 13.00-15.00 WIB

memberikan solusi apabila ada pembiayaan yang bermasalah dan akan diselesaikan secara hukum.

Setiap *account manager* harus mengajukan permohonan analisa yuridis serta dilengkapi dengan data-data nasabah. Setelah data-data nasabah lengkap maka diserahkan ke bagian legal untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan bagian legal akan memberi keterangan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan dan apabila data-data tesebut terdapat kekurangan atau belum lengkap maka tugas bagian *account manager* untuk menyampaikan kepada nasabah untuk memenuhi kekurangan data tersebut sebelum usulan pembiayaan diserahkan ke komite pembiayaan.

Setelah data-data dari nasabah sudah dipenuhi maka bagian legal menganalisa data yang diperolehnya dan memberikan laporan hasil analisanya yang dituangkan dalam bentuk memorandum. Apabila hasil analisa tersebut ingin dilanjutkan maka setiap lembar hasil analisa harus diberi paraf dan ditandatangani. Kemudian laporan tersebut segera dikirim ke *account manager*.[30]

Standar data-data yang harus dilengkapi adalah fotocopy SIM/KTP, fotocopy kartu keluarga sebagai alat untuk melihat struktur keturunan nasabah, status dan alamat, fotocopy NPWP tujuannya untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, status perkawinan untuk melihat status nasabah apakah sudah berkeluarga atau belum dan untuk melihat apakah nasabah tersebut cacat hukum atau tidak, fotocopy dokumen jaminan sebagai persyaratan pembiayaan tujuannya untuk membuktikan jaminan yang diagunkan nasabah kepada Bank Muamalat Cabang Mangga dua status jaminannya benar-benar dimiliki nasabah atau milik orang lain dan juga untuk membuktikan apakah nasabah tersebut sah menurut hukum dalam kepemilikannya. Jika jaminan tersebut milik orang lain maka diperlukan surat persetujuan dari pemberi jaminan. Dan bila jaminan tersebut milik pribadi maka diperlukan surat persetujuan dari suami atau istri jika calon nasabah tersebut telah berkeluarga.[31]Hasil analisa yang dilakukan oleh masing-masing pejabat bank akan dikumpulkan dalam file pembiayaan.

Proses Penyelidikan/ Taksasi Jaminan

Untuk menghindari terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh nasabah maka *account manager* harus melakukan perintah yang ditujukan kepada bagian *support* pembiayaan untuk melakukan proses penilaian dan penyelidikan. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut apabila dokumen tersebut telah lengkap dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi.

Namun apabila dokumen yang dibutuhkan tersebut belum lengkap maka pejabat penilaian akan meminta kepada *account manager* untuk memenuhi dokumen tersebut. Pejabat penilaian dan peyelidikan akan meyelidiki data-data barang jaminan yang digunakan oleh nasabah. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan membantu bank untuk menyelidiki kelayakan usaha nasabah dan untuk menyelidiki harga atau nilai harta yang diagunkan.

Pejabat penilaian dan penyelidikan dapat melakukan tugasnya dengan meninjau langsung ketempat lokasi jaminan berada dan memberikan penilaian terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan perbankan kemudian memberikan informasi tentang keadaan barang yang sedang dijaminkan. Dalam pembiayaan KPR iB Muamalat barang jaminan yang dijamin tersebut adalah rumah yang akan dibeli oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua baik rumah tersebut baru maupun *second*. Setelah dilakukan pengecekan maka Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang memberikan data tentang kenyataan yang ditemukan di lapangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya kerugian yang besar karena nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya dan untuk menghindari dari kemungkinan adanya

[30] Wawancara dengan Branch Manager tanggal 5 Juli 2017 pukul. 13.00-15.00 WIB

[31] Wawancara dengan FM bank Muamalat Cabang Mangga Dua, tanggal 5 Juli 2017 pukul. 15.30-17.00 WIB

pesengketaan atau perselisihan atau jaminan tersebut telah diagunkan pada bank lain.

Hasil dari penilaian dan penyelidikan barang jaminan tersebut akan dilaporkan kepada bagian support dan dibuat surat keterangan kepada *account manager* yang bersangkutan dan disetujui oleh kepala bagian urusan support pembiayaan.

1. Proses Persetujuan

   Proses persetujuan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh *account manager* setelah melakukan proses awal dan proses analisa adalah mengajukan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Pembiayaan diberikan tergantung kepada pengambilan keputusan komite Bank Muamalat Indonesia Pusat yang menyatakan setuju atau tidak setuju. Keputusan ini dapat dilihat melalui memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan adalah suatu analisa yang menggambarkan tentang kualitas permintaan baru yang diajukan nasabah.

   Bila keputusan komite pembiayaan menyatakan setuju akan memberikan pembiayaan maka ada dua hal yang harus dilakukan oleh *account manager* yaitu:

   a. Membuat Surat Persetujuan Prinsip (SPP) yang merupakan surat penawaran yang datangnya dari Bank Muamalat yang akan menawarkan beberapa syarat kepada nasabah, jika nasabah menyatakan setuju dan sanggup untuk memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan Bank Muamalat cabang Mangga Dua dalam batas waktu tertentu maka nasabah tersebut harus menandatangani surat persetujuan prinsip tersebut. Sebaliknya apabila nasabah keberatan atas persyaratan yang diajukan Bank Muamalat Cabang Mangga Dua maka nasabah boleh menyampaikan keberatan atas persyaratan tersebut secara tertulis dan Bank Muamalat Cabang Mangga Dua akan mempertimbangkan atas pengajuan persyaratan tersebut dan melakukan pertimbangan dengan membuat perubahan pada persyaratan tersebut dalam masa berlakunya surat penawaran.
   b. Mempersiapkan proses pengikatan, untuk melengkapi proses pengikatan maka bagian urusan support pembiayaan terutama bagian legal dan pimpinan cabang yang bersangkutan harus segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan.

   Pengikatan adalah suatu bentuk perikatan yang berhubungan dengan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara orang / pihak atau lebih dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang disepakati bersama untuk suatu periode tertentu. Biaya yang timbul dari proses pengikatan ini diganti dan dibayar oleh nasabah, seperti biaya administrasi materil, biaya penyelenggaraan pengikatan (notaris) atau biaya roya (pelepasan jaminan). Biaya-biaya tersebut harus disampaikan kepada nasabah dan tercantum dalam akad perjanjian secara jelas. Biaya ini dapat dibayar langsung oleh nasabah atau melalui pemotongan dari nilai pembiayaan yang diterima.[32]

2. Proses Pencairan

   Setelah melalui berbagai proses yaitu proses awal, proses analisa, proses penyelidikan dan proses persetujuan maka proses selanjutnya adalah proses pencairan. Permintaan pencairan fasilitas pembiayaan *Murabahah* biasanya diajukan oleh *account manager* yang bersangkutan kepada bagian support pembiayaan. Proses pencairan fasilitas pembiayaan *Murabahah* dilakukan oleh bagian seksi administrasi yang merupakan salah satu bagian terpenting dari support pembiayaan.

   Sebelum melakukan pencairan, ada hal-hal yang perlu dilakukan, Yaitu memeriksa kelengkapan dokumen pencairan fasilitas pembiayaan *Murabahah*, misalnya usulan pembiayaan, MAP keputusan komite pembiayaan, surat keterangan dan notaris sebagai bukti akad, memeriksa kelengkapan persyaratan pendropingan, membubuhi *flat*

[32] Wawancara dengan FM manager Bank Muamalat Cabang Mangga Dua 6 Juli 2017

droping pada beberapa dokumen, misalnya Bank Indonesia.

Usulan pembiayaan fasilitas *Murabahah* yang telah ditanda tangani komite pembiayaan baik yang asli maupun yang dicopy harus dibubuhi *flat droping* yang asli. Usulan pembiayaan yang telah dibubuhi *flat droping* kemudian disimpan di file pembiayaan sebagai bukti realisasi pembiayaan sedangkan usulan pembiayaan yang telah dibubuhi flat pembayaran disimpan dalam *loan document* yang sudah dilengkapi dengan surat perintah realisasi pembayaran, surat sanggup untuk mengembalikan kewajiban, dan jadwal angsuran. Dokumen yang sudah disimpan didalam file pembiayaan adalah dokumen yang dicopi sedangkan dokumen yang asli disimpan di *safe keeping*.

Dalam melakukan pencairan fasilitas pembiayaan *Murabahah*, maka setiap pejabat seksi administrasi pembiayaan harus memperhatikan dengan seksama mengenai dokumentasi, keterangan tentang jaminan, dan proses persetujuan. Pencairan dana dapat dilakukan setelah dokumen yang dipersyaratkan telah dilengkapi dan diperiksa keabsahannya dan sudah dilakukan pengikatan oleh pejabat hukum. Kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke administrasi pembiayaan. Apabila terjadi kekurangan atau ketidaklengkapan untuk menyetujui usulan pembiayaan sesuai ketentuan.

Nasabah yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan *Murabahah*, namun karena sesuatu hal, mungkin disebabkan karena bangkrut atau bencana lain yang menimpanya sehingga nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka nasabah tersebut boleh meminta pada Bank Muamalat untuk memperpanjang jadwal angsuran dengan tidak menambah atau mengurangi flafond. Peristiwa ini disebut penangguhan pelunasan. Perpanjangan pelunasan pemberian akad *Murabahah* ini akan menyebabkan perubahan persyaratan dan penjadwalan ulang namun tidak mempengaruhi jumlah plafond sebelumnya.

3. Pelunasan Pembiayaan

Apabila nasabah tersebut telah selesai menunaikan kewajibannya terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan telah menyelesaikan seluruh administrasinya maka bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jaminan nasabah yang telah diagunkan kepada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua yang dijadikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Maka tugas dari *account manager* adalah membuat surat kepada komite pembiayaan yang isinya menyatakan bahwa nasabah tersebut telah melunasi seluruh kewajibannya dengan melampirkan bukti pelunasan dan membuat surat permohonan untuk memberikan persetujuan pengeluaran dokumen jaminan. Setiap nasabah yang akan melakukan pelunasan pembiayaan *Murabahah*, maka *account manager* harus menginstruksikan kebagian operasional pembiayaan untuk mendapat rekening nasabah untuk pelunasan.

B. KPR IB Muamalat dalam Perspektif Fiqih

Pada dasarnya konsep KPR merupakan produk konvensional dengan transaksi pembelian rumah menggunakan perjanjian hutang piutang. Caranya adalah, pihak yang hendak membeli rumah mengajukan proposal kepada salah satu bank untuk menjaminnya sejumlah uang seharga rumah tersebut. Pihak Bank membayarkan biaya rumah tersebut bagi si pembeli, dan bank menarik pembayarannya secara kredit bulanan dari si pembeli dengan bunganya, yang jumlahnya pada akhirnya nanti bisa mencapai tiga kali lipat atau lebih sesuai dengan lamanya pembayaran.

Dalam tinjauan ilmu fiqih bahwa pembelian rumah melalui pendanaan bank (perjanjian hutang) itu hukumnya haram, karena dalam perjanjian tersebut dianggap sebagai pinjaman berbunga yang jelas sekali mengandung riba. Transaksi ini jelas merugikan pihak pembeli karena dalam pembayaran angsuran setiap bulan bergantung pada fluktuasi suku bunganya. Konsep

kredit rumah ini masih banyak diterapkan di bank-bank konvensional di Indonesia.[33]

Perbankan Islam kemudian mengadopsi konsep kredit rumah ini ke dalam jenis produk pendanaan dengan akad *Murabahah*. Pihak bank membeli rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh bank dan nasabah. Produk pembiayaan ini dikenal sebagai kredit rumah syariah. Fatwa DSN MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000 telah menjamin keabsahan dan diperbolehkannya transaksi *Murabahah*, termasuk dalam hal ini pembiayaan rumah di Bank Syariah.
Dasar hukum *Murabahah*:
Firman Allah SWT dalam Al Qur'an:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…" (Al-Baqarah: 275)
Hadits:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلي أجل والمقارضة وأخلاة البر باشعير للبيت لا للبيع

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280 , kitab at-Tijarah)

Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أنه سئل رسول الله صلى الله علية وسلم عن العربان في البيع فأحله[34]

"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

4. Kaidah ushul fiqh

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها[35]

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kredit kepemilikan rumah haruslah terhindar dari praktek *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan), dan *bathil* (ketidak adilan). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur dan jelas harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan serta menyebutkan keuntungan yang diambil. Nasabah kemudian membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan bank .

Dalam bank konvensional, riba ditemui ketika nasabah meminjam uang untuk membeli rumah. Sedangkan pada bank syariah tidak meminjamkan uang tetapi menjual rumah tersebut kepada nasabah.[36] Akad yang dipakai adalah jual dan beli. Ulama-ulama yang berkeberatan dengan praktek jual beli dengan kredit (*Murabahah*) adalah ulama-ulama yang bermahzab Hanafi dan Syafi'i, mereka berpendapat bahwa pembelian dengan kredit adalah sebagai *riba annasiah*, yaitu berwujud tambahan yang dibebankan kepada pihak kreditur (orang yang berhutang), dan tentunya hal ini sangat memberatkan bagi pihak yang berhutang.

Ulama yang menyatakan bahwa pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain seperti Imam Thawus, Al Hakam, Hammad, serta

[33] Ash-Shawi, Shalah dan al-Muslih, Abdullah, *Fikih ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001) h. 363.

[34] As-Syaukani , *Nailul Autar*, (Kairo : Daar Kutub Al-Mishriyyah, 1990) jilid 5, hlm.162

[35] Ibnu Nujaim, Al *Asybah wa an-nadzair*, (Kairo: Al-Maktabah At-Tauqifiyyah, tt) hlm.60,

[36] Muhammad.2002. Lembaga Kuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta : UII Press. hlm. 147

Yusuf Qardhawi dan kebanyakan ulama, asalkan perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terpaut jauh sehingga memberatkan kreditur. Jual beli kredit diperbolehkan, sebab dengan pembelian kredit dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seseorang, dan dapat memperlancar usahanya. Hukum Islam memandang fenomena pembiayaan KPR Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam, namun yang perlu diperhatikan adalah mengenai *margin flat*, yang dapat mendatangkan manfaat, tetapi juga mendatangkan mudharat pada pihak nasabah. *Margin flat* akan memberikan keuntungan kepada nasabah pada saat suku bunga BI stabil sehingga kesepakatan pembiayaan tidak mengalami perubahan sampai akhir pembiayaan, jika terjadi keadaan sebaliknya akan berpengaruh terhadap nasabah.

C. Implementasi *Murabahah* pada KPR IB Muamalat

1. Penetapan Harga dalam Pembiayaan *Murabahah*

Bukti atau contoh riil dalam penetapan harga yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah pihak Bank Muamalat sudah merumuskan harga pembiayaan dan jumlah harga yang harus dibayarkan perbulan. Misalnya pembiayaan dengan harga 100.000.000,- dengan keuntungan bagi pihak Bank Muamalat 20.000.000,- sehingga nasabah harus mengembalikan pembayaran 120.000.000,- per bulan sebagai uang pengembalian kepada Bank Muamalat yang di dalamnya sudah termasuk keuntungan dan harga pokok. Jadi, margin/keuntungan yang di dapat oleh Bank Muamalat ialah 20% dari total pembiayaan equivalen dengan 1.6 % per bulan.

Berdasarkan kajian literatur fiqih klasik dan modern pelaksanaan penetapan harga seperti itu diperbolehkan, dengan syarat modalnya harus diketahui lebih awal dan keuntungannya benar-benar disepakati bersama. Ketentuan *Murabahah* seperti itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam al-Syairazi di dalam *Al-Muhadzab* yang menjelaskan, *Murabahah* adalah (penjual) menjelaskan modal dan kadar labanya dengan mengatakan, misalnya, "Harganya seratus dan aku menjual kepada kamu dengan modalnya, dengan laba satu dirham untuk setiap sepuluh dirham."[37]

Begitupun pendapat Ibn Qudamah di dalam Asy-Syarh al-Kabîr yang menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah menjual dengan laba yang disepakati, lalu dikatakan, misalnya,"Modalku di dalamnya seratus. Aku menjual kepada kamu dengan laba sepuluh." Ini adalah boleh, tidak ada perbedaan pendapat tentang keabsahannya.[38]

Berbeda halnya dengan pendapat atau pengertian *Murabahah* yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, yaitu penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.[39] Yang ini menunjukan bahwa yang menentukan keuntungan bagi penjual adalah murni oleh pembeli. Kesan seperti ini menunjukan pada pengertian atau mekanisme *Murabahah* yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasullullah yang memberikan keleluasaan memberikan keuntungan untuk penjual kepada pembeli semata.

Teori di atas menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat. Dengan tiga prinsip dasarnya adalah:

a. Kaidah Fiqhiyyah.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

[37] Al-Syirazi, *al- Muhadzab,* (tp: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 1, hlm. 288.

[38] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* (tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), Jilid 4, hlm.102.

[39] Lihat pengertian *Murabahah* pada pembahasan sebelumnya

"Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boleh sampai ada dalil yang yang mengaharamkannya."

b. Kaidah Fiqhiyyah

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Kebiasaan adalah bagian dari hukum."[40]

c. Hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Kaum muslimin bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."[41]

Dari paparan di atas ada beberapa hal yang dapat kita ketahui bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua yang telah menentukan rincian harga sebelum akad dilaksanakan itu telah memenuhi ketentuan syariat berdasarkan pendapat ulama dengan sudah terjadi perluasan dalam bentuk akad. Begitupun jika kita kaitkan pelaksanaan tersebut dengan apa yang telah di jabarkan oleh Imam Hanafi dalam pembahsannya mengenai *sighoh akad,* yang di dalamnya banyak pilihan atau keringanan pada tatanan pelaksanaannya. [42]

2. Tidak Menerapkan *Murabahah* bil wa'dil mulzim (Transaksi *Murabahah* dengan janji mengikat)

Mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat (ilzami), boleh saja ia mengingkari janjinya untuk membeli. Ini merupakan keputusan Majma Al-Fiqh Al Islami(Divisi fiqh OKI) no. 40-41 (2/5, 3/5) tahun 1988, yang berbunyi " Janji dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam transaksi *Murabahah lil Amir Bissyira'* boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapatkan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad. Dan akad atas barang yang belum dimiliki hukumnya bertentangan dengan larangan nabi menjual barang yang belum dimiliki[43]

Keputusan ini juga merupakan standar yang diterapkan oleh AAOIFI dalam *mikyar Murabahah*, pasal 2.3.1, yang berbunyi "Dokumen janji atau yang sejenisnya mengandung perjanjian tidak boleh dibuat mengikat kedua belah pihak (Lembaga keuangan dan nasabah) karena perjanjian yang mengikat kedua pihak menyerupai akad jual beli sebelum barang dimiliki[44]

Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat imam syafii dalam kitab Al-umm

وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال ابتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع،

" *Apabila* sesorang *menunjuk sebuah barang kepada orang lain seraya berkata " Engkau beli barang ini, setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan'. Orang yang diperintah boleh membelinya. Adapun orang yang mengajukan permintaan boleh mengajukan khiyar (boleh beli/tidak). Jika keduanya*

[40] Asjmuni A Rahman, *Qowa"idul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 88.

[41] at-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi , Kitab al-Ahkam*, Kairo: Darul Hadits No. Hadits 1272.

[42] Lihat pembahasan mengenai akad di dalam *kitab Al-Fiqh ala Madahibil Al'Arba'ah,* karya Abdurrahman al-Jaziry, terj. H. Zuhri, Semarang: CV. Asyifa", jilid III, hlm. 318-331.

[43] Journal Fiqh Council , Edisi V , Jilid 11, hlm.963.

[44] AAOIFI .Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution. *Al-Maayir As-Syar'iyyah*, (Bahrain : Darul Maiman, 1437), hlm. 93.

pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal karena merka menjual –belikan barang yang belum dimiliki penjualnya [45]

Praktik dalam transaksi di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua Nasabah datang ke bank lalu menyampaikan keinginannya untuk membeli rumah melalui KPR iB Muamalat dengan menjelaskan spesifikasi yang diinginkan dan berjanji membelinya jika bank telah membeli rumah tersebut.

Majelis akad sesudah dilakukan proses awal berupa verifikasi data nasabah, persetujuan dari komite pembiayaan dalam hal ini adalah Bank Muamalat Pusat maka barulah dilaksanakan akad ini, seandainya nasabah tersebut tidak jadi membeli KPR iB Muamalat maka Bank Muamalat tidak memaksakan nasabah tersebut bahkan bank menanggung kerugian apabila batal akad jual belinya . Menurut pengamatan penulis Bank Muamalat Cabang Mangga Dua telah melaksanakan prinsip *Murabahah lil Amir Bissyira* sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih mu'amalah.

D. Penerapan Fatwa DSN MUI pada akad *Murabahah* di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua

Penerapan akad *Murabahah* pada bank syariah tidak terlepas dari ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional karena merupakan panduan yang telah disepakati dalam menerapkan fikih muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, berikut ini adalah ketentuan fatwa dalam akad *Murabahah*;

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000[46]

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 nomor I Bank Muamalat Cabang Mangga Dua mennyediakan barang yang halal dan bebas dari riba produk yang disediakan antara lain ; mobil, rumah , ruko, apartemen dan produk murabahah umroh.

[45] As-Syafii , *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al Ma'rifat, 1990) Jilid 3 hlm. 39.

[46] Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV000 tentang *Murabahah*. Kumpulan Fatwa DSN MUI

2. Fatwa DSN MUI terkait dengan uang muka *Murabahah*

Ketentuan umum uang muka berdasarkan Fatwa Nomor: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka *Murabahah*, sebagai berikut;

a. Akad pembiayaan *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
c. Jika nasabah membatalkan akad *Murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Implementasi fatwa ini, Bank Muamalat Cabang Mangga Dua melalui pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) telah menerapkan ketentuan sebagaimana fatwa tersebut. Pengamatan penulis nasabah tidak membayar apapun dari uang muka selama barang belum dimiliki bank. Hal ini juga sejalan dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI yang menegaskan " Haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk *Murabahah* sebelum barang tersebut dimilikinya . Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad *Murabahah* sebelum pihak lembaga keuangan syraiah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama[47]

Karena tahap ini hanya sekedar janji dari kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, maka Bank Muamalat tidak boleh meminta atau mewajibkan uang muka (*down payment*) kepada nasabah yang ingin melakukan *Murabahah.* Hal ini juga sesuai dengan fatwa haramnya menarik uang muka pada tahap belum adanya barang dan belum adanya kesepakatan yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami no.72 (3/8) tahun 1993) yang berbunyi "Tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahap janji yang dilakukan dalam transaksi *Murabahah lil amir bisysyiraa*, dan uang muka boleh diambil pada tahap selanjutnya"[48]

3. Fatwa Nomor: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dala *Murabahah*

Salah satu prinsip dasar dalam *Murabahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Terkadang, penjual atau Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*). Berdasarkan ketentuan ini, diskon tersebut merupakan hak nasabah. Jadi, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Namun jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Dan yang terpenting, pelaksanaan akad ini harus dilaksanakan.

Penerapannya dalam transaksi produk KPR iB Muamalat yaitu Bank Muamalat menerapkan prinsip diskon potongan harga.

[47] AAOIFI. *Accounting and Auditing*..., hlm. 94.
[48] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VIII, Jilid , hlm. 641.

4. Fatwa Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan *Murabahah*

Pada umumnya, sistem pembayaran dalam akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Dalam hal ini, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran karena nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Fatwa ini merupakan pedoman atas kebolehan pemberian potongan terhadap pelunasan *Murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan juga besaran potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Penerapannya di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua, bank tetap menerapkan potongan pelunasan *Murabahah* sebagai reward atas kecepatan dan usaha nasabah dalam membayar.

5. Fatwa Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*

Pada umumnya sistem pembayaran dalam akad *Murabahah* dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah, bagi nasabah yang melakukan pembayaran cicilan tepat waktu akan mendapatkan penghargaan, juga sebaliknya nasabah yang mengalami penurunan dalam melakukan pembayaran cicilan dapat diberi keringanan (*mukafaah tasji'iyah)* yang diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran. Fatwa ini merupakan pedoman atas kebolehan pemberian potongan terhadap tagihan *Murabahah*.

Penerapannya, pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua telah memberikan potongan harga tersebut.

6. Fatwa Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Apabila nasabah tidak mampu membayar sesuai sistem pembayaran dalam akad *Murabahah*, maka harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a. Obyek *Murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS;
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Dengan demikian, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *Murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Implementasinya pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua , Bank

melalukan *Rescheduling* terhadap pelunasan hutang. Dengan memberikan nasabah kelonggaran jika belum mampu membayar pada bulan yang telah ditentukan maka bisa dibayar kepada bulan berikutnya. Atau dengan cara yang lain melalui pembuatan skema cicilan yang baru yang sesuai dengan kemampuan nasabah[49]

7. Fatwa Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

   Untuk meringankan nasabah yang mengalami penurunan dalam pembayaran cicilan sesuai dengan system pembayaran pada akad *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah dapat mewujudkannya dengan yang tidak melanggar prinsip ajaran Islam. Salah satunya dengan penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*.

8. Fatwa Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad *Murabahah*

   Salah satu upaya meringankan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran tagihan *Murabahah*, dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.

   Dengan demikian, LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

   Akad *Murabahah* dihentikan dengan cara:

   a. Obyek *Murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
   b. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
   c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
   d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
   e. LKS dan nasabah ex-*Murabahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:

   Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*;*Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh); atau *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

9. Fatwa Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah*

   Pengakuan keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah* yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dikenal dengan dua metode, yaitu metode proporsional dan metode anuitas. Salah satu metode menimbulkan permasalahan bagi kalangan industri dan masyarakat, sehingga memerlukan kejelasan dari aspek syariah mengenai kedua metode tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat.

   Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan Metode Proporsional *(Thariqah Mubasyirah)* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga

[49] Wawancara dengan Branch Manager Bank Muamalat Cabang Mangga Dua tanggal 7 Juli 2017

jual, *tsaman)* yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih *(al-atsman al-muhashshalah);* dan juga Metode Anuitas *(Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah)* adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih *(al-Tatsman al-mutabaqqiyah).*

Ada beberapa ketentuan khusus dalam permasalahan ini, diantaranya ialah: Pengakuan keuntungan *Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang *(al-tujjar),* yaitu secara proporsional **boleh** dilakukan selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan para pedagang; Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) **boleh** dilakukan secara Proporsional dan secara Anuitas selama sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku di kalangan LKS; Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan *mashlahah* LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat; Metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas; Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan barus ada selama jangka waktu angsuran; keuntungan *at-tamwil bi alMurabahah* (pembiayaan *Murabahah*) tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan *Murabahah* berakhir/lunas dibayar.

E. Praktik pembiayaan *Murabahah* yang tidak sesuai dengan fatwa DSN- MUI

Adanya model atau jenis *Murabahah* yang boleh diwakilkan dan praktik ini disahkan oleh fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* menjadikan Bank Muamalat Cabang Mangga Dua lebih cendrung mempraktikan *Murabahah* model seperti ini dari pada *Murabahah* langsung dengan berbagai argument bahwa hal ini lebih efisien dari segi biaya dan alokasi waktu.

Beberapa kasus praktek *Murabahah* menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan-aturan yang mendasari adanya transaksi *Murabahah* itu sendiri. Penyimpangan itu berupa selipan akad wakalah dalam transaksi *Murabahah*. *Wakalah* dalam transaksi *Murabahah* terjadi melalui proses perwakilan antara pihak perbankan kepada nasabah. Dengan praktik pihak bank mewakilkan kepada pihak nasabah untuk melakukan pembelian sendiri barang yang diinginkan kepada supplier setelah mendapatkan uang pembelian dari bank. Praktek *Murabahah* semacam ini menyerupai transaksi kredit pada perbankan konvensional, Karena dalam *Murabahah* yang diselipi akad *wakalah* penyerahan bukan dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk uang *cash* yang hal ini juga dipraktekkan dalam perbankan konvensional melalui pinjaman kredit.

Namun perlu diingat bahwa, praktik *Murabahah* diwakilkan (*bil wakalah*) berpotensi terhadap pelanggaran akad *Murabahah* sangat besar yang dilakukan oleh nasabah di banding dengan *Murabahah* langsung dan praktik semacam ini berpotensi pada praktik jual beli semula atau ada unsur riba di dalamnya karena tidak sedikit kasus penentuan harga jual barang yang diperjualbelikan telah ditetapkan jauh sebelumnya, sebelum harga perolehan barang yang menjadi obyek jual beli *Murabahah* diketahui secara pasti.

Akibat lain dari praktik jual beli seperti ini adalah seringnya ada kelebihan

dana akibat dari selisih penggunaan dana secara rill untuk membeli barang yang telah disepakati dengan jumlah nominal sesuai dengan aplikasi pengajuan pembiayaan *Murabahah* sehingga selisih tersebut bisa disalahgunakan oleh nasabah untuk keperluan lain. Sebenarnya selisih dana pembiayaan tersebut bisa diketahui oleh pihak bank, tetapi selama temuan penulis di lapangan, Bank Muamalat Cabang Mangga Dua belum pernah mencoba meminta kembali selisih dana pembiayaan terebut dari nasabah atau mengurangi dari total pembiayaan *Murabahah* yang telah disepakati diawal. Hal ini adalah adanya diskon dari supplier yang menurut sebagian perbankan syariah masih dianggap menjadi haknya sehingga tidak mengurangi jumlah pembiayaan *Murabahah* padahal diskon tersebut merupakan hak nasabah.

Faktor adanya jaminan atau tidak, kebijakan rescheduling terhadap nasabah yang mengalami kebangkrutan dalam *Murabahah*, ada atau tidaknya uang muka serta potongan pelunasan pembiayaan *Murabahah* merupakan hal-hal yang tidak mempengaruhi sahnya jual beli *Murabahah*, dan selagi jual beli tersebut tidak didasarkan atas barang yang menjadi obyek tetapi didasarkan atas faktor lain, dan karena kebijakan-kebijakan tersebut tidak menyangkut unsur pokok dalam jual beli *Murabahah*.

Murabahah model ini sudah tidak murni lagi, tetapi sudah dipelintir dan bahkan hanya menjadi *hilah* (akal-akalan) saja sehingga dapat terjebak pada pemberlakuan model pinjaman kredit seperti pada perbankan konvensional.

Dalam kasus semacam ini diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun Dewan Syariah Nasional agar praktek *Murabahah* sesuai dengan teori dasar yang melandasinya. Jika tidak ada pengawasan yang ketat bisa diprediksikan keberadaan perbankan syariah di Indonesia akan menyerupai praktek perbankan konvensioal yang selama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan syariah.

F. Riba dalam akad KPR Muamalat

Penerapan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia, berdasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang atau objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. karena itulah maka kemudian nasabah berhubungan dengan Bank Muamalat. Namun Bank Muamalat tidak memiliki *inventory* terhadap barang atau objek yang dibutuhkan nasabah, maka bank Muamalat mempunyai rekanan developer. Dengan demikian, disatu sisi Bank Muamalat bertindak selaku penjual, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati. Harga yang disepakati adalah harga jual, yaitu harga beli plus *margin* (keuntungan) dan biaya- biaya yang timbul dari proses pembelian barang tersebut.

Pada saat harga jual disepakati, maka pihak Bank Muamalat menyerahkan barang yang dipesan tersebut sesuai dengan kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu yang disepakati.

Pendapat Sjahdeni bahwa Bank berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional yaitu sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada pihak yang mengalami kekurangan dana dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*) tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu pembagian keuntungan dan kerugian (*Profit And Loss Sharing* Atau PLS *Principle*)[50]

[50] Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.(* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm.1 .

Menurut Muhammad Taqi Al-Usmani, *Murabahah* hendaknya hanya digunakan terbatas kepada hal- hal dimana *musyarakah* atau *mudharabah* tidak dapat digunakan sebagai cara bagi bank untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.[51]

Pelaksanaan *Murabahah* bil Wakalah

Mengenai persoalan pihak Bank Muamalat Cabang Mangga dua hanya memberikan uang kepada nasabah untuk dibelikan sendiri baranganya atau pihak Bank Muamalat Cabang Mangga dua menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama Bank Muamalat Cabang Mangga dua yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya Bank Muamalat Cabang Mangga dua tersebut. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat *Murabahah* itu sendiri, yang pada hakikatnya *Murabahah* adalah proses jual beli yang syarat dan rukun nya di tentukan oleh aturan syara‟. Apabila pola ini tetap dilakukan, maka kesan yang kita dapat dari proses ini penjual menjual barang yang belum ia miliki padahal ini jelas menyalahi aturan syara‟.

Sebagaimana dalam hadits,

لا بيع إلا فيما يملك

Artinya**:**"Tidaklah sah jual beli, kecuali yang dapat dimiliki."[52]

Menurut al-Baghawi, yang dikutip oleh Asy-Syaukani, bahwa larangan di dalam hadis tersebut adalah larangan menjual barang yang belum dimiliki atau tidak menjadi milik. Adapun menjual sesuatu yang ada di dalam tanggungan itu boleh secara akad *salam* dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad.[53] Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada/ tidaknya obyek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur *garar*, yaitu jual-beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.[54]

Dzahir larangan ini menunjukan kepada kita haram menjual apa yang belum menjadi milik, dan belum masuk ke dalam kesanggupan penjual. Dalam pada itu, dikecualikan penjualan menggunakan akad *salam*. Menurut Ibnul Qoyyim, penjualan *salam* itu berdiri sendiri tidak dikhususkan dari larangan ini, karena *salam* itu adalah akad terhadap sesuatu yang di dalamnya terdapat tanggung jawab penjual yang telah disifatkan, hanya saja belum saja belum menjadi benda.[55]

Apabila tetap itu terlaksana karena alasan sistem dan pelaksanaan yang rumit, maka itu adalah resiko atau konsekuensi bagi bank sebagai penyedia pembiayaan *Murabahah* tersebut. Adapun mengenai sistem yang ada pada institusi tersebut, maka itu dapat di sesuaikan dan saya yakin itu dapat dilakukan apabila pihak bank serius ingin menerapkan konsep *Murabahah* tersebut agar sesuai dengan syariat.

Adapula alasan yang disampaikan apabila konsep dengan dua akad ini dilaksanakan, memungkinkan terjadi ketidaksesuian dengan yang diinginkan pihak nasabah atas barang yang dinginkannya. Mengenai alasan yang satu ini, sebenarnya ini adalah alasan yang kurang kuat karena itu dapat ditangani melalui majalah katalog yang itu dapat meminimalisir adanya ketidaksesuian dengan keinginan para nasabah, mulai dari warna, bentuk, dan lain sebagainya. Praktik seperti ini pun sebenarnya tidak dapat

[51] M. Taqi Al-Usmani, *An Introduction to Islamic Financing*, Pakistan: Maktaba Ma‟ariful Qur‟an, 2000, hlm. 95.

[52] HR. Abu Dawud, lihat Musthafa Diibul Bigha, *Ikhtisar Hukum-hukum Islam Praktis,* Semarang*:* CV As-Syifa, 1994, hlm.470,. Hadits ini dinilai Shahih oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami‟,* nomor Hadits 7083., HR. al-Khamsah dan dianggap *shahih* oleh at-Tirmizi, Ibn Huzaimah dan al-Hakim, lihat ash-Shan‟ani, *Subul as-Salam*, hlm. 16.

[53] Yusuf al-Qardawi, *Bai 'al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira Kama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyyah,* tp: Mathba'ah Wahbah, 1987*,* h. 57. Ini pun bisa dilihat di dalam *kitab Nailul Author,* karya Imam As-Syaukany, terj. KH Adib Bisry, Semarang: CV. As-Syifa, 1994, jilid 4, hlm. 484.

[54] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*.... hlm. 429.

[55] Muhammad hasby As-Syiddiqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum,* (Semarang: PT Petraya Mitrajaya, 2001) jilid 7, hlm. 25.

diterima oleh standar internasional.[56] Bahkan DPS *Dallah al-Barakah* tidak memperbolehkan hal tersebut dilaksanakan, sebagai tindakan preventif agar tidak mendekati pada riba yang diharamkan.[57] Begitu pula seorang pakar ekonomi Islam, yaitu Umar Chapra, dengan tegas mengatakan bahwa *Murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihakan kepada nasabah.[58] Perjanjian tersebut sah secara hukum syariah apabila pihak bank harus menandatangani 2 perjanjian terpisah. Yang satu perjanjian dengan pemasok barang, dan yang satu lagi dengan nasabah. Artinya tidak sah apabila pihak bank hanya menandatangani 1 perjanjian saja dan menyerahkan pembeliannya kepada nasabah.

Hadits Rasulullah Sallahu alaihi wasallam juga menguatkan tentang larangan jual beli yang belum menjadi hak milik, yang artinya:

"*Diriwayatkan dari hakim bin Hizam, ia berkata wahai Rasulullah seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar ? maka Nabi Sallahu alaihi wasallam menjawab "Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*! (H. R Abu Dawud)

Dalam hadits yang lain Nabi *Sallahu Alaihi Wasallam* bersabda

لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[59]

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu* "

Sering terjadi kesalahan dalam praktik *Murabahah* tahap ini, calon nasabah datang kepada bank sebelumnya ia telah melakukan transaksi beli terlebih dahulu kepada pihak developer, bahkan membayarkan uang muka kepada developer, baru kemudian datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*. Maka hal ini tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori riba.

Karena hakikatnya bank tidak membeli secara langsung, karena developer telah menjualnya ke nasabah tersebut . Bank hanya melunasi utang nasabah kepada pihak pengembang secara tunai dan nanti menariknya dari nasabah secara kredit dengan ditambah laba, maka hakikat transaksi ini meminjamkan uang dengan tambahan.

Kesalahan yang terjadi dengan wakalah dalam akad *Murabahah* ini dengan contoh kasus sebagai berikut;

Nasabah ingin membeli rumah seharga 600 juta lalu Bank Muamalat mntransfer uang kepada nasabah sebesar 400 juta yaitu 80 persen dari harga rumah, kemudian mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima dari pihak developer. Setelah itu Bank Muamalat mencatat kewajiban nasabah membayar pihak bank sebesar dana yang diberikan ditambah dengan laba yang disepakati dengan cara angsuran. Praktik ini merupakan hilah (rekayasa) pelegalan riba, karena bank belum memiliki rumah yang merupakan objek jual beli *Murabahah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Murabahah* menggunakan metode wakalah kepada nasabah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua itu menyalahi aturan fiqih mu'amalah.

Kenyataannya dalam praktik yang diterapkan oleh Bank Muamalat sebenarnya sama dengan apa yang dipraktikkan oleh Bank konvensional dari sisi prosedur dan pembiayaan. Karena Bank Muamalat hanya menjadi mediasi pembiayaan kredit uang saja dalam KPR iB Muamalat.

[56]Lihat aturan juristik yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution)

[57] Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam,* hlm. 78.

[58] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 65.

[59] *Sunan At-Tirmidzi kitab Al-Buyu'* (1234), *Sunan An-Nasai kitab Al-Buyu'* (4611), *Sunan Abi Dawud kitab Al-Buyu'* (3504), *Sunan Ibnu Majah kitab At-Tijarat* (2188), *Musnad Ahmad bin Hambal* (175/2), *Sunan Ad-Darimi kitab al-buyu'* (2560)

Murabahah yang terjadi di Bank Muamalat adalah kamuflase dari utang pitang (kredit) sebenarnya itu bunga dan riba hal tersebut bisa tercermin dari transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat yaitu:

1. Bank Muamalat bukan bertindak sebagai penjual barang dan tidak bertanggung jawab pada kerusakan barang tersebut.
2. Bank Muamalat menggunakan besarnya keuntungan didasarkan pada perhitungan jangka waktu pelunasan yang lama. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Bank Muamalat hanya memberikan pembiayaan untuk membeli rumah dan bukan sebagai pihak penjual yang telah memiliki barang tersebut maka sama halnya dengan menerapkan *riba qard* yaitu mengambil kelebihan dari utang piutang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan berpikir dalam memahami permasalahan-permasalahan, disertai apa yang telah dipaparkan pada pembahasan dalam kajian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Produk jasa *Murabahah* yang ada pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua adalah pembiayaan rumah KPR yang disebut dengan KPR iB Muamalat. KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan rumah indent, pembangunan dan renovasi
2. Seorang calon nasabah harus melewati berbagai tahapan atau proses. nasabah datang meminta pembiayaan sampai pembiayaan itu layak atau tidak layak untuk diberikan. Nasabah yang datang mengajukan pembiayaan biasanya berkonsultasi terlebih dahulu dengan *account manager atau* dengan *Relationship Manager* Bank Muamalat Cabang Mangga Dua.
3. Prosedur permohonan pembiayaan *Murabahah* tidak berbeda jauh dengan permohonan pembiayaan yang lainnya. Adapun prosedur pembiayaan *Murabahah* adalah meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan.
4. Tidak semua praktik *Murabahah* di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua keliru, Ada beberapa hal praktiknya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Mikyar Syar'iyyah.
5. Pelaksanaan *Murabahah* menggunakan *wakalah* kepada nasabah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua itu menyalahi aturan fiqih mu'amalah. Kenyataannya dalam praktik yang diterapkan oleh Bank Muamalat sebenarnya sama dengan apa yang dipraktikkan oleh Bank konvensional dari sisi prosedur dan pembiayaan. Karena Bank Muamalat hanya menjadi mediasi pembiayaan kredit uang saja dalam KPR iB Muamalat.
6. *Murabahah* yang terjadi di Bank Muamalat Cabang Mangga Dua adalah kamuflase dari utang piutang (kredit) sebenarnya itu bunga dan riba hal tersebut bisa tercermin dari transaksi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Cabang Mangga Dua hanya memberikan pembiayaan untuk membeli rumah dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah dan bukan sebagai pihak penjual yang telah memiliki barang tersebut maka sama halnya dengan menerapkan *riba qard* yaitu mengambil kelebihan dari utang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] AAOIFI .Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution. (1437 H). *Al-Maayir As-Syar'iyyah*, Bahrain : Darul Maiman.

[2] Abdullah Saeed (1996). *Islamic Banking and Interest: A study of Prohibition of Riba and it s Contemporary Interpretation* , Leiden : EJ Brill

[3] Abdullah Seed. (2004). *Menyoal Bank Syariah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalis*. Jakarta: Paramadina.

[4] Abdullah Saeed. (2003). *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[5] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq.

[6] *As-Shan'ani.*(1998) . *Subul as-Salam syarhu Bulugul Maram*. Beirut: Daar Al fikr : 2002

[7] Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul haq.

[8] Adrian Sutedi. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan Dari Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

[9] Ahmad Dahlan. (2012)*., Bank Syariah* ,Yogyakarta : Teras.

[10] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut : Daarul Fikr

[11] Al Juzairy, *Al-Fiqhul Islami ala mazahibil arbaah* , Beirut: Maktabah At-Tauqifiyyah

[12] Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* , Kairo: Darul Hadits

[13] Al-Qurtubi. (1964). *Jami li ahkamil Al-Quran*. Kairo: Dar Kutub Al-Misriyyah

[14] Al-Mawardi (2000), *Al-Hawii Al-Kabiir* , Beirut : Daar Al Fikr

[15] An Nawawi, *Al-Majmu Syarhil Muhazzab* , Beirut: Dar Al Fikr

[16] Asjmuni A Rahman. (1976). *Qawa"idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.

[17] Ash-Shawi, Shalah dan al-Muslih, Abdullah. (2001). *Fikih ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

[18] Asy-Syihab al-Jundi. (1986). *Al-aqdu al-Murabahah baina al-Fiqh al islami wa al-Ta'amuli al-Mashrafi*. Saudi Arabia: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.

[19] As-Syafii . (1990). *Al-Umm*, Beirut: Dar Al Ma'rifat.

[20] As-Syarbiny. (1997). *Mugnil Muhtaj Syarhu Minhajut Tolibin.* Beirut : Darul Ma'rifat

[21] Az-Zuhaili, Wahbah . (2002). *Alfiqhul Islami Wa adillatuhu*. Beirut : Darul Fikr.

[22] Bagya Agung Prabowo. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

[23] Buku Standar Produk *Murabahah*, Otoritas Jasa Keuangan

[24] Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.

[25] Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqih mu'amalah*. Yogyakarta: Celebes Timur UH III.

[26] Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*.

[27] Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.

[28] Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*.

[29] Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah*.

[30] Fatawa Lajnah Damam Buku Elektronik, Maktabah Syamilah versi 3m39

[31] Gemala Dewi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum dalam perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, *Edisi Revisi Cetakan ke 3*. Jakarta: Kencana.

[32] Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Ciputat Press Group.

[34] Ibnu Nujaim *Al Asybah wa an-nadzair*, Kairo: Al-Maktabah At-Tauqifiyyah

[35] Ibnul Qayyim .(1999). *'ilam Al-Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamiin*. Beirut : Dar Kutub Al- Ilmiyah, 1999) cetakan I

[36] Ibn Qudamah (1995), *Al-Mugmi*, Kairo: Darul Hadis

[37] Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta:PT Raja Grafindo Persada.

[38] Kementerian Agama Islam Kuwait. (2007). *Al-Mausuah Al fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, *cetakan kedua.* Kuwait

[39] Lukman Hakim. (2012) *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*.Yogyakarta: Erlangga.

[40] Majma al-lughah Al-Arabiyyah .(2011). *Mu'jamul Washit*. Kairo : Maktabah As-Syuruq Ad-Dauliyah

[41] M. Abdul manan. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

[42] Muhammad. (2002). *Lembaga Kuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta : UII Press.

[43] Muhammad Hasby As-Syidiqi. (2001). *Koleksi Hadits-Hadits Hukum.* Semarang: PT Petraya Mitrajaya.

[44] Muhammad Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta : Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.

[45] Muhammad Syafi'i Antonio*. (2001). Bank Syari'ah;Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

[46] Muhammad Usman Syubair. (1996). *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al- Islami*. Yordan: Dar al-Nafais.

[47] Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

[48] Muslim.(2001). *Shahih Muslim*, Cairo : Darul Hadits.

[49] Musthafa Diibul Bugha. (1994). *Ikhtisar Hukum-hukum Islam Praktis.* Semarang: CV As-Syifa.

[50] M. Taqi Al-Usmani. (2000). *An Introduction to Islamic Financing*. Pakistan: Maktaba Ma"ariful Qur'an.

[51] Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabheta.

[52] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka.

[53] Sutan Remy Sjahdeini. (2007). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

[54] Syofian S, Harahap. (2004). *Akuntasi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE- Usakti.

[55] Tim Redaksi. (2008). *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.

[56] Undang-Undang N0. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

[57] Veithzal Rivai. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Press.

[58] Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

[59] Wahbah az-Zuhaily. (2002). *Alfiqhul Islami Wa adillatuhu*. beirut : Darul Fikr.

[60] Yusuf Assubaily. (2005). *Al-Khadamat Al-Istitsmariyah fil masharif wa Ahkamuha Fil Fiqhil Islami*. Dammam: Dar Ibnul Jauzi.

[61] Yusuf al-Qardawi. (1987). *Bai' al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira' Kama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyyah,* tp: Mathba"ah Wahbah.

JURNAL

Altaleb, Ghassan Salem: (2005), Assess the Financial Performance of the Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, dalam *Jordan Journal of Applied Sciences and humanity*, 8 (1)

Journal Fiqh Council , Edisi V , Jilid 11

M. Syafi"i Anwar, Alternatif Terhadap Sistem Bunga, dalam *Jurnal Ulumul Qur"an II*, Edisi 9 Oktober 1991

Organization Development at E-Commerce Online Pharmacy Based on Open System Method

Arsepta Kurnia Sandra., Fithriwati, D.
Fakultas Psikologi Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Unversitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
arseptaks@windowslive.com

ABSTRAK PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce online pharmacy yakni penyedia layanan transaksi jual beli obat oleh pasien atau konsumen melalui internet online. Sebagai perusahaan start up, PT. X mengalami berbagai tantangan dalam mengelola sistem dalam mengarahkan pergerakan proses bisnis guna mencapai tujuan organisasi. Analisa menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi pada PT. X. Penelitian ini bertujuan mengungkap permasalahan secara mendalam guna menentukan intervensi yang sesuai. Pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakan guna menggali permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Pemetaan permasalahan menggunakan metode diagnosis open sistem. Adapun, dalam memperkuat diagnosis peneliti menggunakan metode stream analysis guna mengungkap sebab akibat core permasalahan sehingga dapat menentukan intervensi lanjut. Hasil diagnosis menunjukan bahwa ketiadaan arah tujuan spesifik serta pembaharuan struktur berdampak pada aktivitas organisasi sehingga dibutuhkan intervensi yang sesuai guna memperbaiki kinerja organisasi. Intervensi yang direkomendasikan oleh peneliti guna memperbaiki inti permasalahan pada PT. X adalah modul pembentukan visi misi dan pembaharuan struktur organisasi. Harapannya, dengan modul dan pembaharuan struktur organisasi perusahaan dapat menentukan prioritas kebutuhan dengan merujuk pada satu tujuan guna mencapai efisiensi kebutuhan organisasi.

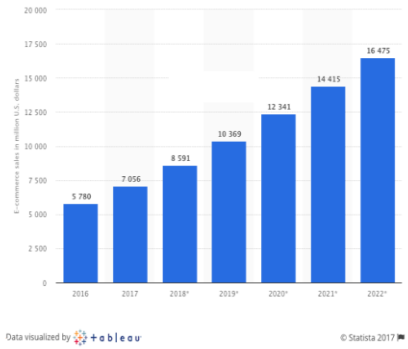
Kata kunci : open system, diagnosing, corporate, organization development, e-commerce online pharmacy.

I. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan gambaran dari satu kesatuan organisasi yang bergerak dinamis guna bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Cummings & Worley (2015) menjelaskan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka merespon perubahan – perubahan lingkungan serta mendapatkan stimulus atau pengaruh dari luar. Stimulus atau pengaruh lingkungan tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu stimulus lingkungan ekstnal dan internal. Faktor stimulus internal, berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.

Stimulus eksternal adalah lingkungan umum serta lingkungan industri di luar internal perusahaan yang merupakan suatu peluang atau hambatan bagi perusahaan. Stimulus yang berasal dari faktor lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Tidak hanya semata-mata merefleksikan lingkungan ekologi, tetapi juga menjelaskan gambaran keseluruhan terhadap kekuatan lingkungan eksternal yang dapat berdampak pada aktivitas organisasi dari segala aspek sehingga dalam menghadapi persaingan dunia bisnis diperlukan suatu strategi yang tepat guna memenangkan persaingan tersebut. Data (statista.com) mengenai trend pengguna transaksi online khususnya di Indonesia meningkat pertahunnya. Peningkatan pengguna transaksi jual beli online khususnya di Indonesia menjadi peluang besar bagi pengusaha dalam mendirikan perusahaannya.

Gambar 1 Grafik Peningkatan E-Commerce



Berdasarkan pertumbuhan grafik e-commerce diatas, tampak bahwa bisnis e-commerce di Indonesia berpotensi meningkat hingga tahun 2022, dimulai dari tahun 2016 ke 2017 meningkat sebanyak 1.276, pada tahun 2017 ke 2018 diprediksikan akan meningkat sebanyak 1.535, pada tahun 2018 ke 2019 diprediksikan akan meningkat sebanyak 1.778, 2019 ke 2020 diprediksikan akan meningkat sebanyak 1.974, 2020 ke 2021 diprediksi akan meningkat sebanyak 2.072, 2021 ke 2022 diprediksikan akan meningkat sebanyak 2.060.

Data peningkatan jumlah e-commerce tersebut menunjukkan adanya peningkatan minat perusahaan dalam bergerak dan berkembang di dunia bisnis teknologi Indonesia. Selain itu, peningkatan jumlah perusahaan yang bergerak di dunia bisnis teknologi atau biasa yang disebut e-commerce adalah merupakan salah satu dampak dari peningkatan arus globalisasi teknologi. Bara (2014) mengemukakan globalisasi teknologi hadir sebagai bentuk tatanan baru kehidupan yang bersinergi tanpa batas geografis, batas ekonomi maupun batas budaya. Globalisasi merupakan perubahan kondisi di masyarakat dengan menekankan keterkaitan antar elemen, dan dengan semakin canggihnya teknologi baik dari segi komunikasi maupun informasi maka semakin tingginya kemungkinan perluasan komunikasi dan hubungan baik pertukaran budaya, ekonomi, sosial dan hubungan antar negara dan jaringan perkembangan dunia internasional.

Hal tersebut memprediksikan kondisi masa depan bahwa teknologi dapat menjadi media jalinan hubungan ekonomi, sosial, dan segala hal secara internasional antara negara-negara di dunia tanpa memandang batas wilayah, status sosial maupun perkembangan yang ada di dalamnya. Sejalan dengan peningkatan jumlah e-commerce, globalisasi teknologi yang terjadi mampu membuka peluang ekonomi khususnya mengembangkan bisnis dengan tantangan jumlah kompetitor yang meningkat.

Salah satu perusahaan yang meramaikan dunia e-commerce tersebut adalah PT. X. PT. X merupakan layanan farmasi dan pemesanan obat berbasis aplikasi yang dibentuk pada tahun 2013 dengan beberapa karyawan. PT. X merupakan anak perusahaan dari PT. XA yaitu perusahaan waralaba yang bergerak dibidang penjualan obat. Pada perjalanannya, PT. X menghadapi berbagai kendala guna menghadapi tantangan global serta kompetitor.

Tantangan global yang dialami oleh PT. X berasal dari aturan pemerintah dan persaingan bisnis dengan kompetitor yang bergerak pada proses bisnis serupa. Tantangan kompetitor merupakan tantangan yang cukup dipertimbangkan. Pasalnya, kompetitor PT. X yaitu HD, AA dan layanan pemesanan obat lainnya berlomba lomba memberikan pelayanan terbaik dari segi kemudahan dalam mengakses aplikasi serta keramahan dalam melayani setiap pasien. Selain itu, tantangan global lainnya adalah perluasan mitra. Sebagai perusahaan startup PT. X memerlukan perluasan mitra guna membentuk jaringan agar dapat bertahan guna memperluas akses pasar.

Sejak tahun 2012 hingga 2017 saat ini PT. X menerima 1 penghargaan yang merepresentasikan kinerja perusahaan dalam tetap eksis dan bertahan sebagai layanan pemesanan obat terbaik di Indonesia, namun demikian sejalan dengan data peningkatan e-commerce di Indonesia berdampak pada ketatnya persaingan PT. X dengan kompetitor e-commerce lainnya sehingga membutuhkan strategi pengembangan untuk menghadapi kompetitor.

Menurut Cummings & Worley (2015) organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka merespon perubahan – perubahan lingkungan serta mendapatkan stimulus atau pengaruh dari luar. Situasi tersebut menggambarkan kondisi yang dialami oleh PT. X saat ini, hasil wawancara dengan Direktur PT. X pada tanggal 25 november 2017 mengungkap bahwa PT. X mengalami hambatan pengiriman disebabkan oleh salah satu media pengiriman melakukan blocking application terhadap layanan PT. X dan hal tersebut berpotensi mempengaruhi peningkatan omset dan revenue PT. X. Selain itu, PT. X berupaya bergerak menyusun strategi guna menghadapi ancaman kompetitor. Kompetitor tersebut adalah HD, AA dan GM. Kemudian usia PT. X yang baru berdiri kurang dari 5 tahun atau masuk dalam kategori *startup company* mengakibatkan kondisi yang dialami cenderung berubah. Selain itu, ketiadaan target jangka panjang juga menjadi permasalahan tersendiri pada PT. X, pasalnya ketiadaan tujuan jangka panjang berdampak pada pemenuhan kebutuhan sumberdaya sehingga menimbulkan ambiguitas perusahaan dalam menfokuskan tujuan dan memaksimalkan energi. Berbagai permasalahan menimbulkan dampak bagi pencapaian organisasi diantaranya ketiadaan laba, kepuasan karyawan yang rendah dan berbagai permasalahan sistem aplikasi layanan pemesanan obat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan diagnosis lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas, maka asesmen diperlukan bagi organisasi untuk mengvaluasi strategi, penekanan arah bisnis perusahaan dan juga proses PT. X dalam menjalankan fungsi organisasi. Fokus utama dalam diagnosis ialah, bagaimana cara PT. X dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Oleh karena itu, hasil diagnosis akan menuntun pada intervensi yang cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam PT. X.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2011). Williams (Moleong, 2011) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Metode kualitatif adalah metode dimana data diintepretasikan melalui analisis pemaknaan (West dan Turner, 2008). Data diperoleh berdasarkan hasil pengukuran (observasi) yang berhubungan dengan kategori dan berbentuk pernyataan atau kata-kata. Data penelitian kualitatif pada umumnya didapat melalui wawancara. Oleh karena itu, data kualitatif bersifat subjektif sehingga setiap orang memiliki interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda terhadap data tersebut sehingga guna meminimalisir subjektivitas peneliti menggunakan studi dokumen.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Creswell (1998) menjelaskan bahwa studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau sebuah kasus dan bisa juga beragam kasus. Studi kasus melibatkan pengumpulan data yang banyak karena peneliti mencoba untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Penerapan studi kasus dapat menggunakan beberapa metode diantaranya observasi (terlampir), wawancara dan studi dokumen atau metode gabungan dari keduanya.

Tabel 1 Studi Dokumen Demografi

No	Daftar Dokumen	ACC
1	*Annual Report*	X
2	NPS (*Network Promote Statistic*)	X
3	Data Demografik Karyawan	V
4	Informasi *Revenue* Tiga Tahun Terakhir	X
5	*Performance Appraisal*	X
6	Company Profile	X
7	Ketersediaan Barang/Alat Kerja	V
8	Struktur Organisasi (confidential)	V
9	Job Description	X

Data studi dokumen yang digunakan pada penelitian berupa data yang dapat diakses melalui izin otoritas manajemen berkaitan dengan confindensialitas perusahaan. Namun demikian, ketidaktersediaan data menjadi keterbatasan lain peneliti dalam menggunakan data studi dokumen secara menyeluruh. Dengan demikian, data studi dokumen yang digunakan berupa data demografi karyawan, ketersediaan alat kerja dan *unpublished organization structure*.

Responden yang berpartisipasi dalam wawancara dipilih dari populasi karyawan PT. X Indonesia, untuk sampel diambil berdasarkan tingkat jabatan dan departemen yang ada di PT. X. Karyawan dengan jabatan Direktur maupun staf pada masing-masing departemen dipilih sebagai sampel dari karyawan yang ada di PT. X secara menyeluruh untuk menjadi responden.

Tabel 2 Responden Wawancara

Departemen	Divisi	Jabatan	Jumlah
HR	Recruitment	Lead	1
	Comben	Lead	1
	OD	Lead	1
Finance	Finance & Acc	Lead	1
Operational	HC	Lead	1
	-	Lead	1
-	-	Direktur	1
IT	Developer	Lead	1
	Content	Lead	1
Merchant Relation	-	Lead	1
Significant person	*Informal interview*	Lead, Staff	2
Jumlah Total			**11**

Pada kasus ini peneliti menggunakan teknik diagnosa open system untuk melihat letak permasalahan yang ada di organisasi dan bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kelangsungan organisasi. Open system merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk mendeteksi atau mendiagnosa letak permasalahan di dalam sebuah organisasi dimulai dari identifikasi output organisasi sampai dengan desain komponen dan input organisasi (Cummings & Worley, 2015). Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi organisasi secara menyeluruh baik secara sistem, proses bisnis, dan kebijakan yang diterapkan. Adapun peneliti menggunakan sistematika pola stream analisis dalam menguraikan dinamika permasalahan yang mempengaruhi efektivitas organisasi.

Tabel 3 Sumber Data Berdasarkan Komponen Open Sistem

Komponen *Open System*	Metode Pengumpulan Data		
	Observasi	Wawancara	Studi Dokumen
***Input* Organisasi**			
General Environtment	-	x	x
Task Environtment	-	x	x
Enected Environtment	-	x	-
Desain Komponen			
Strategi	-	x	-
Teknologi	x	x	x
Struktur Organisasi	x	x	x
Manajemen Sumber Daya	-	x	x
Proses Manajemen	-	x	-
Kultur Organisasi	x	x	x
***Output* Organisasi**			
Kinerja	-	x	x
Produktifitas	-	x	x
Kepuasan *Stakeholder*	-	x	-

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil temuan Studi Dokumen Data Demografi

Tabel 4 Berdasarkan Jenis Kelamin

JK	JUMLAH
L	4
P	24
Jumlah	28

Secara keseluruhan, PT. X memiliki 4 karyawan berjenis kelamin laki laki dan 24 karyawan berjenis kelamin perempuan. Mayoritas karyawan pada PT. X didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

Tabel 5 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	1
S1	11
D3	1
SMK	11
SMF	3
PROFESI APOTEKER	1
Jumlah	28

Secara keseluruhan, karyawan yang bekerja pada PT. X memiliki latarbelakang pendidikan S1 dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun demikian, terdapat beberapa karyawan yang memiliki latarbelakang pendidikan Sekolah Menengah Farmasi (SMF), S1, S2 dan Profesi Apoteker.

Tabel 6 Berdasarkan Usia

TAHUN LAHIR	USIA	JUMLAH
1999 - 2017	18	6
1998 - 2017	19	2
1997 - 2017	20	1
1996 -2017	21	1
1993 - 2017	24	5
1992 - 2017	25	4
1991 - 2017	26	2
1990 - 2017	27	2
1989 - 2017	28	2
1986 - 2017	31	1
1983 - 2017	34	1
Jumlah		27

Secara keseluruhan karyawan yang bekerja pada PT. X bergerak pada rentang usia 18 hinnga 34 tahun. Namun demikian, mayoritas karyawan yang bekerja pada PT. X berada pada rentang usia 18, 24 dan 25 tahun.

Tabel 7 Berdasarkan Waktu Lama Bekerja

DOJ	LAMA KERJA	USIA	JUMLAH
2013 - 2017	4 Tahun	28	1
2014 - 2017	3 Tahun	25-27	2
2015 - 2017	2 Tahun		
2016 - 2017	1 Tahun	21-31	4
-	10 Bulan	18-34	21
Jumlah			**28**

Secara keseluruhan, ditinjau dari lama masa kerja karyawan terlama sebanyak 1 orang kurang lebih 4 tahun, sebanyak 2 karyawan bermasa kerja 3 tahun, sebanyak 4 karyawan bermasa kerja 1 tahun dan sebanyak 21 karyawan bermasa kerja 10 bulan atau kurang dari 1 tahun.

Tabel 8 Sebaran Mitra PT. X

No	Provinsi	Jumlah Cabang
1	Jawa Barat	78
2	Jawa Timur	71
3	Yogyakarta	56
4	Jawa Tengah	49
5	DKI Jakarta	48
6	Sumatera Selatan	19
7	Banten	16
8	Papua	12
9	Bali	10
10	Nusa Tenggara Timur	9
11	Sumatera utara	8
12	Sulawesi Selatan	5
13	Kalimantan Timur	4
14	Bangka Belitung	3
15	Kalimantan Selatan	3

16	Kalimantan Tengah	2
17	Kalimantan Barat	1
18	Kepulauan Riau	2
19	Lampung	2
20	Nusa Tenggara Barat	1
21	Bengkulu	1
22	Jambi	1
23	Papua Barat	1
24	Sulawesi Tengah	1
25	Timor Leste	1
Jumlah		**404**

Sebaran mitra pada PT. X berada pada area Negara Indonesia yaitu pada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, Jambi, Papua Barat dan Sulawesi Tengah. Adapun mitra yang berasal dari Negara Timor Leste menjadi satu satunya mitra yang berada diluar Negara Indonesia.

B. Pengelompokkan Temuan Berdasarkan Elemen Open Sistem

Tabel 9 Gabungan data wawancara observasi dan studi dokumen

Elemen organisasi		**Temuan**
Output	Kinerja	Instability revenue. Money support dari holding. (Source: wawancara)
Desain component	Produktifitas	Produktivitas karyawan : Sepanjang tahun 2017 (23 karyawan) 8 diantaranya mengalami pergantian. *Turnover* rate tinggi. (Source: studi dokumen & wawancara) Produktivitas penjualan : Transaksi, penjualan, omset meningkat. (Source: studi dokumen & wawancara)
	Stakeholder Satisfaction	274 consumen, 207 diantaranya menyatakan puas. 67 tidak puas karena sistem. (source: studi dokumen) Fasilitas tercukupi, kebebasan berpendapat, saling memberi feedback baik antar karyawan atau atasan karyawan. (source: wawancara, observasi)
	Strategi	Tidak terdapat visi. Terdapat misi dan diketahui oleh beberapa karyawan. Selebihnya tidak mengetahui. (source: wawancara, observasi)
	Teknologi	Fasilitas tercukupi dan mendukung aktivitas organisasi, namun belum kukuhnya sistem keuangan spesifik. (source: wawancara, studi dokumen, observasi)
	Struktur Organisasi	Tidak terdapat struktur terdokumentasi. Karyawan tidak memahami struktur. Jalur koordinasi lapangan tidak mengalami kendala. Perbedaan struktur dengan aktivitas kerja organisasi. (source: wawancara, studi dokumen)
	Manajemen Sumber Daya	Tidak terdapat divisi HRM. Fungsi HR dijalankan oleh holding berupa pemenuhan kebutuhan (rekrutmen seleksi), pelaksanaan sistem reward (compenisation benefit) dengan skema yang dibentuk oleh direktur PT. X. (source: wawancara)
	Proses Manajemen	Pengambilan keputusan dilakukan melalui media strategic meeting, morning briefing dengan dukungan teknologi skype wa telegram.

	Kultur Organisasi	Satu sama lain membutuhkan pendapat, feedback dengan divisi lain. Setiap karyawan dapat mengungkapkan pendapat, direktur memberi ruang karyawan untuk mengungkapkan pendapat dan memberi feedback. Memberikan pembelajaran baru dan melakukan sharing. (source: wawancara)
Input	General Environment	Competitor PT. X yaitu GJ dan HD berkolaborasi. GJ merupakan jasa yang digunakan PT. X dalam melaksanakan proses bisnis. Aturan penjualan online resep dan obat bebas terbatas oleh pemerintah. Aturan ekspedisi pengiriman obat cair dan cream. (source: studi dokumen, wawancara)
	Task Environment	GJ sebagai jasa yang digunakan PT. X melakukan pemblokiran. AA competitor PT. X melakukan plagiarism pola layanan dengan PT. X. Mitra belum memahami sepenuhnya alur kerja PT. X. Start-up Company, usia 5 tahun. (source: wawancara, observasi)
	Enacted Environment	Beberapa karyawan berpendapat PT. X berkembang lebih, memiliki potensi untuk berkembang, memandang kompetitor semakin mengejar dan perlu menangani mitra. (source: wawancara, observasi)

Kekuatan yang mendasari berjalannya kegiatan dan optimalisasi kinerja organisasi di PT. X berasal dari internal dan eksternal. Kekuatan internal antara lain adalah kultur organisasi yang kuat, kesadaran akan competitor, proses pengambilan keputusan yang cepat sedangkan kekuatan eksternal yang mendasari berjalannya kegiatan organisasi antara lain adalah dukungan serta fasilitas yang diberikan oleh PT PT. XA baik dari segi pengelolaan SDM maupun Financial support.

Kekuatan internal pertama adalah kultur organisasi, kultur organisasi yang kuat tercermin pada norma norma informal yang dimiliki setiap kelompok divisi maupun individu dalam melakukan aktivitas kerja seperti budaya mengembangkan diri, kemauan untuk belajar yang tinggi, budaya mendengarkan pendapat, menerima masukan, kebutuhan akan feedback disetiap individu, budaya saling membantu antar satu divisi dan divisi lain. Selain itu, rendahnya rentang hierarki jabatan serta minimnya gap antar level jabatan memudahkan pemecahan masalah akan suatu kendala cenderung dapat terselesaikan. Kedua adalah proses pengambilan keputusan yang cepat, pengambilan keputusan yang cepat tidak lain didukung oleh tersedianya media komunikasi selama 24jam dan budaya antar divisi dalam menerima feedback dan masukan memudahkan proses pengambilan keputusan guna menemukan solusi terhadap permasalahan organisasi. Ketiga adalah kekuatan akan kesadaran karyawan terhadap adanya competitor, seluruh divisi memahami bahwa competitor pesaing PT. X adalah HD dan AA. Kesadaran yang dimiliki memicu karyawan untuk mencari tau kelebihan dan kekurangan competitor sehingga mampu memberikan kontribusi inovasi teknik dalam menghadapi ancaman akan adanya competitor serta meningkatkan kualitas organisasi dalam menghadapi ancaman kompetitor.

Kekuatan eksternal yang mendasari berjalannya kegiatan organisasi adalah fasilitas dukungan oleh PT. XA baik dari segi financial maupun pengelolaan SDM. Pemberian sistem reward yang dibentuk oleh Direktur PT. X dalam memenuhi kebutuhan guna membangkitkan motivasi ekstrinsik pada karyawan dikelola oleh HR PT. XA. Hal ini terjadi sebab PT. X tidak memilik divisi pengelolaan SDM didalam badan organisasi sehingga fungsi pengelolaan SDM secara keseluruhan dikelola oleh HR PT. XA. Selain memfasilitasi pengelolaan SDM PT. X, PT. XA memberikan pinjaman hutang kepada PT. X guna melakukan penggajian dan dukungan penambahan sumber daya bagi karyawan PT. X. Seluruh kekuatan internal dan eksternal tersebut berdampak positif bagi berjalannya sistem dan fungsi pengelolaan organisasi serta menjadi kunci tercapainya tujuan organisasi dari segi peningkatan omset.

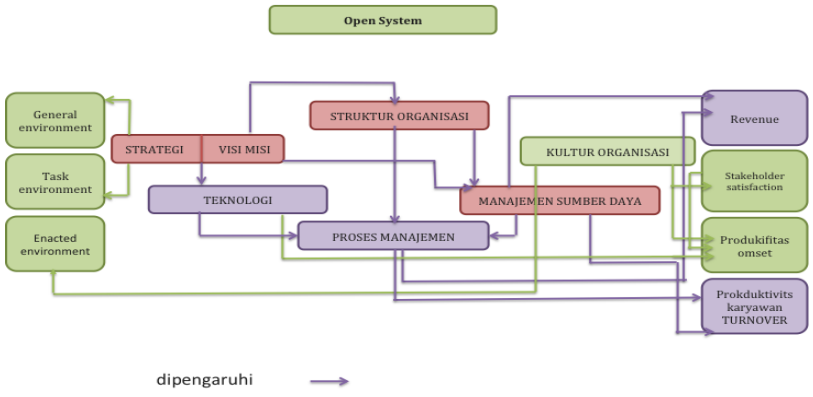
Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan PT. X yang memicu tidak tercapainya tujuan organisasi berupa stabilitas revenue dan tingginya tingkat *turnover*. Kelemahan tersebut antara lain ketiadaan arah tujuan jangka panjang organisasi, standarisasi alur koordinasi, standarisasi pengelolaan sistem keuangan, standarisasi kinerja pada beberapa divisi, dan perencanaan SDM.

Pertama, arah tujuan jangka panjang organisasi, belum adanya arah tujuan jangka panjang organisasi berdampak pada perencanaan efisiensi biaya serta sumber daya manusia dalam mengoptimalkan kinerja. Selain itu, perubahan fluktuatif alur koordinasi kerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh belum adanya arah tujuan jangka panjang organisasi sehingga berdampak pada formasi kerja yang cenderung mudah berubah. Kedua, standarisasi alur koordinasi, standarisasi alur koordinasi pada PT. X tercermin pada struktur organisasi yang dibentuk sekitar tahun 2016 akhir. Perbedaan antara struktur dan realita alur koordinasi yang dilakukan oleh karyawan memicu ambiguitas serta intensitas tinggi karyawan dalam melakukan short cut koordinasi sehingga memicu kesalahpahaman hubungan antar individu. Selain itu, belum adanya pembaharuan struktur memicu double job pada berapa karyawan sehingga memunculkan ambiguitas tugas dan tanggung jawab akan sebuah penyelesaian tugas.

Ketiga adalah standarisasi kinerja, ketiadaan standarisasi kinerja pada beberapa divisi berupa tidak adanya aturan baku pengerjaan dan pengambilan keputusan sehingga berdampak pada kemandirian individu dalam mengerjakan tugas. Keempat adalah standarisasi pengelolaan sistem keuangan, ketiadaan standarisasi pengelolaan sistem keuangan berupa tidak adanya ketetapan pasti akan aturan penggunaan uang baik refund, voucher dan sistem keuangan pada jurnal penyesuaian guna pengambilan keputusan keuangan berdampak secara tidak langsung langsung pada pertimbangan kebutuhan keuangan serta efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh PT. X.

Kelima adalah perencanaan SDM, belum adanya strategi perencanaan SDM dan standar kemampuan SDM dalam mendukung optimalisasi sistem PT. X berdampak pada terhambatnya aktivitas kerja individu guna menunjang efektivitas organisasi. Angka *turnover* yang tinggi pada PT. X cenderung dipengaruhi oleh kurang sesuainya kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas serta keberlanjutan kontrak kerja mengindikasikan bahwa optimalisasi kinerja individu dalam menjalankan aktifitas kerja mengalami hambatan. Ketidak sesuaian kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas memicu kelancaran aktivitas individu dalam mendukung pencapaian organisasi. Selain itu, mayoritas karyawan yang tidak melanjutkan kontrak kerja mengindikasikan ketidakpuasan berada dalam lingkungan organisasi sehingga berdampak pada terhentinya kegiatan aktifitas individu sementara.

B. Pembahasan



Hasil keseluruhan temuan kekuatan dan kelemahan menunjukan PT. X memiliki berbagai faktor yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi optimalisasi kinerja organisasi. Melalui metode stream analysis peneliti lebih lanjut menguraikan factor yang mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Porras (1987) menjelaskan stream berfungsi guna mengidentifikasi permasalahan sebab akibat dari suatu masalah. Cummings & Worley (2015) menjelaskan bahwa metode open sistem berfungsi dalam mempotrait kinerja organisasi ditinjau dari output organisasi yakni *stakeholder satisfaction*, produktivitas organisasi dan stabilitas revenue. Dengan menggunakan prinsip stream analysis peneliti menggabungkan kedua metode diagnosa sebagai satu kesatuan yang melengkapi dan memudahkan peneliti dalam menguraikan sebab akibat yang terdapat pada sebuah organisasi.

Kondisi *stakeholder satisfaction* yakni terbagi 3 diantaranya mitra, customer dan karyawan. Pertama, peneliti akan menguraikan kondisi *stakeholder satisfaction* ditinjau dari kepuasan kerja karyawan. Hasil wawancara pada seluruh partisipan mengindikasikan kepuasan kerja karyawan kurang lebih dipengaruhi oleh atmosfer kepemimpinan yang diberikan oleh Direktur. Hal ini sejalan dengan temuan Rumawas (2003) yakni kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.

Kondisi *stakeholder satisfaction* kedua mitra, mitra merupakan partner PT. X dalam melakukan aktivitas bisnis. Mitra PT. X adalah apotek yang menerima pesanan melalui jasa PT. X, pada prosesnya PT. X mengalami berbagai kendala salah satunya mitra belum memiliki kesadaran tinggi akan kehadiran PT. X sehingga mempersulit koordinasi ketika mengalami kendala dalam pemesanan obat. Permasalahan tersebut ditanggulangi manajemen dengan membentuk divisi mitra guna melakukan fokus secara menyeluruh kepada mitra. Upaya tersebut sejalan dengan temuan Alexander (2005) tentang pentingnya organisasi dalam memberikan fokus perhatian untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang kuat dengan kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) agar meningkatkan kemungkinan hubungan akan berlanjut.

Kondisi *stakeholder satisfaction* ketiga diungkap melalui hasil studi dokumen ditemukan bahwa 207 konsumen menyatakan ungkapan kepuasan dan 67 tidak. Setelah dianalisa secara mendalam, 67 yang menyatakan ungkapan ketidakpuasan dipengaruhi oleh sistem yang belum maksimal. Dewantara (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap penggunaan sistem transaksi jual beli online pada Konsumen "Z" dengan adanya peningkatan kepuasan maka dapat meningkatkan penggunaan sistem transaksi jual beli online pada Konsumen "Z" dan dengan proses tersebut dapat mendukung konsumen untuk melakukan transaksi secara online. Dengan tingginya jumlah ungkapan kepuasan dibandingkan ketidak puasan, jika mengacu pada penelitian pembanding mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan sistem transaksi jual beli online dipengaruhi oleh kepuasan konsumen dalam bertransaksi jual beli online.

Kondisi produktivitas omset transaksi mengalami peningkatan setiap bulannya. Hasil wawancara mengungkap melalui tinjauan data NPS terdapat peningkatan transaksi jual beli pada PT. X per April hingga Desember. Kondisi produktivitas omset yang meningkat dapat dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya adalah baiknya kualitas layanan yang diberikan oleh PT. X sehingga memicu konsumen untuk membeli. Temuan ini sejalan dengan penelitian bahwa adanya peningkatan transaksi dipengaruhi oleh kepuasan transaksi jual beli customer PT. X yang berdampak pada pengulangan transaksi jual beli online. Sidharta & Suzanto (2015) menemukan bahwa kepuasan konsumen pada saat bertransaksi berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen dalam membentuk sikap dan perilaku untuk melakukan pembelian ulang di e-commerce. Selaras dengan data studi dokumen yang mengungkap tingginya tingkat kepuasan customer dengan penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kepuasan customer

menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kenaikan transaksi jual beli atau produktivitas omset PT. X.

Kondisi produktivitas kerja karyawan mengalami penurunan, hasil studi dokumen menunjukan sepanjang tahun 2017 ditemukan bahwa tingkat turn over pada PT. X cukup tinggi yakni 8 dari 23 karyawan mengalami pergantian. Selain itu, sepanjang tahun 2016 karyawan operasional tidak melanjutkan kontrak, mengalami sakit dan mengajukan pengunduran diri. Slavianska (2012) dalam penelitiannya mengungkap bahwa *turnover* karyawan dapat dipengaruhi oleh aplikasi HRM pada perusahaan. Karyawan yang berfikir untuk melakukan perpindahan perusahaan dan tidak melanjutkan kerja disebabkan oleh ketidakjelasan sistem promosi yang jelas sehingga berpotensi untuk karyawan berpindah kerja. Studi dokumen mengungkap bahwa fungsi HRM pada PT. X dilakukan oleh perusahaan inti tanpa menyesuaikan kebutuhan PT. X dan belum terdapat strategi SDM dalam mendukung aktivitas organisasi. Penelitian tersebut linier dengan temuan peneliti bahwa ketiadaan fungsi HR diindikasikan menjadi salah satu factor yang mampu mempengaruhi karyawan dalam memutuskan pergi atau tidak melanjutkan kerja.

Selain itu, struktur yang berfungsi sebagai alat manajemen produktivitas mengarahkan individu dan kelompok pada tugas spesifik tidak berfungsi secara maksimal. Ketiadaan pembaharuan struktur dan dokumentasi jobdes menjadi permasalahan yang memicu karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Arifin (2006) menjelaskan struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara efektif dalam menggerakan perusahaan. Nasron & Astuti (2015) menemukan bahwa manajemen produktifitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, hal ini berarti bahwa apabila perusahaan lebih memiliki manajemen produktifitas yang tinggi terhadap perusahaan maka produktivitas kerja juga akan mengalami peningkatan. Pada kasus PT. X, tingkat *turnover* yang tinggi diindikasikan merupakan hasil dari struktur organisasi yang tidak berfungsi secara optimal sehingga mempengaruhi produktivitas karyawan.

Kemudian, struktur yang tidak berfungsi secara optimal cenderung berpengaruh pada produktivitas dari segi efisiensi tenaga kerja. Arifin (2006) mengemukakan fungsi struktur organisasi ditinjau dari perspektif pendekatan fungsional terbagi dalam tiga fungsi dasar yaitu fungsi pembiayaan, fungsi operasi dan fungsi infestasi. Nasron & Astuti (2015) menjelaskan efesiensi tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja, hal ini berarti bahwa apabila perusahaan memiliki efisiensi tenaga kerja maka produktivitas kerja juga akan mengalami peningkatan. Sehingga dengan kedua temuan tersebut menjelaskan bahwa keabsenan struktur juga berdampak kepada fungsi operasi (efisiensi tenaga kerja) karyawan pada PT. X.

Kondisi revenue pada PT. X cenderung tidak stabil, jika ditinjau dari temuan Yousman (2008) terkait profitabilitas, peningkatan profitabilitas memerlukan peninjauan faktor – faktor yang mempengaruhinya, yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Faktor – faktor internal perusahaan tersebut antara lain manajemen perusahaan, organisasi, budaya perusahaan, sumber daya manusia, pengelolaan modal, pengeloalaan asset, pengelolaan sistem keuangan, pengalaman dan inovasi. Pada PT. X belum terdapatnya pengelolaan perencanaan SDM dan belum optimalnya fungsi struktur organisasi mengindikasikan menjadi factor yang secara tidak langsung berkontribusi dalam stabilitas revenue sehingga menghambat peningkatan profitabilitas perusahaan. Arifin (2006) mengemukakan fungsi struktur organisasi ditinjau dari perspektif pendekatan fungsional terbagi dalam tiga fungsi dasar yaitu fungsi pembiayaan, fungsi operasi dan fungsi infestasi. Penelitian tersebut jika dikaitkan dengan temuan pada PT. X mengungkap bahwa ketiadaan pembaharuan struktur yang belum berfungsi secara optimal mempengaruhi pada fungsi pembiayaan sehingga berdampak pada instability revenue PT. X.

Jika diuraikan secara mendalam melalui berbagai literature diatas, permasalahan produktivitas karyawan yang rendah ditandai dengan *turnover* tinggi serta *instability revenue* yang dimiliki perusahaan dipengaruhi oleh kurangnya optimalisasi fungsi alat manajemen kinerja yang spesifik berupa struktur organisasi, perubahan struktur dan belum dilakukannya pembaharuan struktur pada PT. X kurang lebih disebabkan oleh ketiadaan arah tujuan organisasi yang belum terbentuk secara harfiah. Tjahyono (2011) menjelaskan tanpa visi, sebuah organisasi tidak akan mampu merancang suatu rencana dan bagaimana untuk mencapainya, atau kapan perusahaan telah sampai pada tujuannya. tidak ada yang dapat diciptakan atau dicapai tanpa visi, tanpa visi perusahaan akan melangkah tanpa arah. John (2000) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pernyataan visi dan kinerja perusahaan. Linier dengan pemaparan tersebut ketiadaan visi dapat dikatakan berdampak pada beberapa elemen organisasi khususnya perencanaan aktivitas organisasi seperti perbedaan formasi kerja dengan realita lapangan dan ketiadaan gambaran strategi perencanaan SDM sehingga dengan permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah intervensi inti agar memperbaiki kinerja organisasi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dinamika permasalahan pada PT. X, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi PT. X belum berkembang secara optimal. Dari 6 (enam) variabel dalam proses diagnosa pengembangan ditemukan (tiga) variabel yaitu teknologi, proses manajemen dan kultur organisasi berjalan secara maksimal. Tetapi terdapat 3 (tiga) variable yang memiliki permasalahan sehingga mempengaruhi output organisasi yaitu visi misi organisasi, struktur organisasi dan pengelolaan SDM sehingga perlu adanya intervensi lanjut guna pengembangan PT. X ke depan untuk tetap eksis menghadapi tantangan perubahan global baik perubahan internal maupun perubahan eksternal.

Kunci utama suatu organisasi untuk tetap eksis dalam menghadapi perubahan adalah kejelasan strategi dan kultur organisasi yang memediasi tersampaikannya cita cita/harapan organisasi dan implementasi dari cita cita/harapan organisasi. Sehubungan dengan itu kejelasan visi misi, struktur serta pengelolaan SDM PT. X saat ini akan mempersulit kinerja organisasi dan dasar pengambilan keputusan yang dibutuhkan organisasi untuk pengembangan organisasi kedepan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi lanjut guna memperbaiki inti permasalahan pada PT. X adalah berkaitan dengan kebutuhan penekanan arah tujuan organisasi dan dilanjutkan dengan penyederhanaan arah tujuan organisasi dalam formasi kerja serta kebutuhan perencanaan SDM dalam mendukung arah tujuan organisasi tercapai dengan memuaskan. Kebutuhan arah penekanan tujuan organisasi dapat dituangkan dalam sebuah intervensi seperti pembentukan visi misi.

Bhatt (2005) mengemukakan perusahaan dengan pernyataan visi formal memiliki pengembalian atas ekuitas pemegang saham dua kali lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan tanpa pernyataan visi. Pembentukan visi misi diharapkan mampu menjadi pijakan pengambilan keputusan guna mengarahkan seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai visi misi serta mengoptimalkan produktifitas sumber daya dalam melakukan aktivitas kerja sehingga kedepannya dapat mengontrol stabilitas keuangan dan menunjang efektivitas organisasi. Selain pembentukan visi misi, proses penyampaian visi misi juga penting untuk dikomunikasikan kepada karyawan. Sebab menurut Taiwo, Lawal & Agwu (2016) pernyataan visi dan misi yang dibuat dan diterapkan dengan benar dapat mempengaruhi karyawan organisasi dalam aktivitas sehari-hari karyawan dan membantu pencapaian tujuan organisasi dengan misi dan visi sebagai cahaya penuntun.

Selain itu, peneliti melampirkan modul pembentukan struktur organisasi serta perencanaan SDM sebagai tahap lanjut implementasi visi misi guna menunjang kinerja organsasi, dengan demikian harapannya dapat

memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas kerja organisasi. Namun demikian, adapun keterbatasan penelitian dalam menjelaskan secara rinci data kasus serta publikasi lampiran modul struktur dan perencanaan SDM terkait azas konfidensialitas sehingga modul dan pengolahaan data tersaji tidak dapat di*publish* secara rinci.

V. DAFTAR PUSTAKA

[1] Alexander, C.S. (2017). *How Important Are Stakeholder Relationships?.* King's College : Paul Miesing, State University of New York at Albany

[2] Arifin, Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, Jakarta. Badan Usaha Milik Negara

[3] Bhatt, G.D. (2000). Information dynamics, learning and knowledge creation in organizations. *The Learning Organization, 7(2): 89–99 (90);*

[4] Bara, B. (2014). *Analisis Globalisasi yang Berdampak Pada Perilaku Menyimpang Anak Remaja. https://www.kompasiana.com/bayubara/a nalisis-globalisasi-yang-berdampak-pada-perilaku-menyimpang-anakremaja _54f84b1ea3331af608b50a0* 24 Februari 2014 19:56 Diperbarui: 24 Juni 2015 01:31 diakses pada pukul 00.02 23 November 2017 kamis).

[5] Cummings, T. G. & Worley, C. G. (2015). *Organization Development & Change, 10th Edition.* United State of America: Cengage Learning.

[6] Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design : choosingamong five tradition*. London : Sage Publication.

[7] *Statista. (2017). https://www.statista.com/statistics/280925/b2c-e-commerce-sales-in-indonesia/.* (diakses pukul 12.00 23 november 2017 kamis).

[8] Iwan Sidharta Boy Suzanto. (2015). Pengaruh Keupasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce. *Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 9, No. 1, Juni 2015, 23-36 ISSN 2442-4943.*

[9] John, R. C. (2005). Mission Statements Make Cents. *Journal Of Business Strategy, Vol 45*

[10] Porras, J. I., & Robertson, P. J. (1987). Organization development theory: A typology and evalu-ation. In R. W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), *Research in organizational change and development, vol. 1: 1-57.* Greenwich, CT: JAI Press

[11] Moleong. L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualititatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

[12] Nasron., Astuti, T.B. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja (Studi Pada Karyawan Bagian Produksi PT Mazuvo Indo).* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala.

[13] Rumawas, W. (2003). *Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan.* Faculty of Social and Political Science, Sam Ratulangi University Manado, North Sulawesi

[14] Sugara, A., Dewantara, R.Y. (2017). Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen "Z"). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 52 No. 1 November 2017|.*

[15] Taiwo, A.A., Lawal, F.A., & Agwu, M.E. (2016). Vision and Mission in Organization: Myth or Heuristic Device?. *The International Journal Of Business & Management* (ISSN 2321–8916). Vol 4 Issue 3 March, 2016. Page 127 - 134.

[16] Tjahyono, H. (2011). *Culture Based Leadership*. Jakarta: PT Gramedia.

[17] Viara Slavianska. (2012). Measuring The Impact of Human Resource Management Practices on Employee Turnover. *Problem of Management in The 21ST Century Volume 4, 2012 63.*

[18] West, R., & Turner, L. H. (2008). *Pengantar teori komunikasi 1, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.

[19] Yousman, W. (2008). I*dentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kemampulabaan Perusahaan Studi Kasus Kontraktor PT. NKP.* Program Studi Teknik Sipil Tesis Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik : Universitas Indonesia.

Determinan Kecurangan Laporan Keuangan : Pengujian Teori Fraud Diamond

Triana Zuhrotun Aulia
Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Tangerang, Indonesia
tzahrotunaulia@gmail.com

ABSTRAK — Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi tindakan kecurangan laporan keuangan dalam perspektif *fraud diamond* pada industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tindakan manipulasi laporan keuangan diukur dengan *Discresionary Accrual* (DA), sedangkan teori *fraud diamond* yang terdiri dari *pressure, opportunity, rationalization* dan *capability* diproksi dengan variabel yang diadaptasi dalam SAS no.99 terdiri dari ; 1) *financial stability,* 2) *external pressure*, 3) *personal financial needed*, 4) *target pressure,* 5) *nature of industry*, 6) *ineffective monitoring, 7)organization structure, 8) rationalization dan 9) capability*. Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan yang konsisten terdaftar di BEI selama tahun 2012-2016. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Tipe data adalah data panel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan Eviews 9.0. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, yang mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan yaitu *financial stability, eksternal pressure, financial target* dan *capability*. Sedangkan variabel yang lain tidak mampu mendeteksi tindakan *financial fraud statement* atau manipulasi laporan keuangan..

Kata Kunci — Kecurangan laporan keuangan, fraud diamond.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Untuk itu diperlukan laporan keuangan yang berkualitas yang yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari andal, relevan, dapat dibandingkan *(comparability),* dan dapat dipahami *(understandability)* [1](IAI, 2015).

Beberapa penyimpangan laporan keuangan yang dilakukan bank antara lain adalah Bank Century yang diduga membuat banyak kesalahan material dalam laporan keuangan sehingga informasi tersebut menyesatkan banyak pihak [2] (Prisca, 2013). Selain itu terdapat kasus laporan ganda Bank Lippo yang memanipulasi laporan keuangannya agar bisa mendapat rekapitulasi dari pemerintah [2] (Prisca, 2013). Perilaku kecurangan dalam penyajian laporan keuangan penting menjadi perhatian agar tindakan ini dapat dideteksi dan dihilangkan. Sehingga laporan keuangan akan dapat dipercaya oleh pihak pemegang kepentingan dan masyarakat.

Dalam menjalankan aktifitasnya, perbankan dituntut memiliki integritas tinggi untuk menarik kepercayaan dari masyarakat dalam rangka menjalin hubungan kerja [3](Nuri, 2012). Apabila perusahaan melakukan kecurangan akuntansi otomatis kepercayaan masyarakat ataupun investor akan berkurang dan satu persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana yang telah disimpan di bank sehingga bisa menimbulkan *rush* dan bank dapat mengalami kolaps dan BI akan menutupnya [3](Nuri, 2012). Dengan pertimbangan tersebut dan semakin banyaknya kasus kecurangan akuntansi yang melibatkan perusahaan perbankan, maka penting dilakukan penelitian kecurangan akuntansi untuk mengetahui faktor apa yang mendorong perusahaan melakukan kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi di Indonesia diduga sudah menahun, namun belum terdapat kajian teoritis dan empiris secara komprehensif penyebab terjadinya kecurangan. Oleh karena itu isu ini tidak cukup hanya dikaji oleh ilmu akuntansi, tetapi perlu melibatkan disiplin ilmu yang lain.

Rumusan Masalah

Dari uraian penjelasan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *pressure* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah *opportunity* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah *rasionalization* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah *capability* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan laporan keuangan dari perspektif *fraud diamond theory* yaitu *financial stability, eksternal pressure, personal financial need, financial target, nature of indutry, ineffective monitoring, organizational structure, rationalization* dan *capabilit* yang diadopsi pada SAS No.99.

Kajian Pustaka

Teori Agensi

Dalam teori agensi dijelaskan mengenai pemisahan pengelolaan perusahaan dari pemiliknya. Pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga professional (agen/manajer)[4](Jensen dan Meckling, 1976). Dalam praktek bisnis modern, kontrak keagenan dijadikan alat mencapai tujuan pemilik perusahaan yaitu memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan memilih sumber daya manusia yang profesional dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam teori agensi, diasumsikan baik pemilik maupun agen merupakan orang yang rasional yang termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hal ini yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan [4](Jensen dan Meckling, 1976.

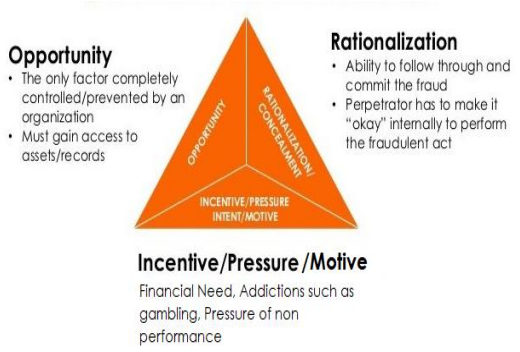
Teori *Fraud Triangle*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau organisasi yang dapat merugikan individu atau entitas atau pihak lain [5](Ernst & Young LLP, 2009). Sedangkan *Fraud triangle theory* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) dalam [6](Skousen, 2009) dan diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99 yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan.

Fraud triangle menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud:

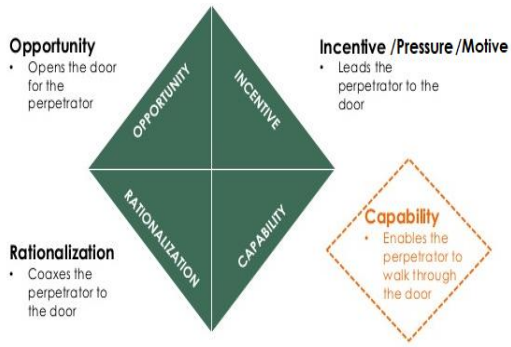
1. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif / tekanan / kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat berupa kebutuhan keuangan maupun non keuangan mencakup gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Menurut SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability, external pressure, personal financial need,* dan *financial targets.*
2. *Opportunity* (peluang), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi.
3. *Rationalization* (rasionalisasi), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*.

Ketiga komponen di atas digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Teori Fraud Triangle

Secara lebih jelas, elemen dari *fraud diamond* dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Teori Fraud Diamond

Teori *Fraud Diamond*

Fraud diamond merupakan pandangan baru mengenai faktor penyebab terjadinya fraud selain 3 (tiga) faktor penyebab kecurangan (*fraud triangle*) yang telah dikemukakan. Gagasan mengenai penyempurnaan fraud triangle model ini dikemukakan oleh [7](Wolfe dan Hermanson, 2004).

Elemen yang ditambahkan pada f*raud diamond theory* adalah *capability* (kemampuan). Terjadinya fraud umumnya dilakukan oleh orang tertentu yang mempunyai kemampuan *(capabilty)* khusus yang berada dalam perusahaan [7](Wolfe dan Hermanson, 2004). Adapun elemen yang digunakan sebagai indikator dari *capability* yang dapat digunakan dalam memprediksi *fraud* yaitu [8](Kassem and Higson, 2012) :

1. posisi atau fungsi resmi dalam organisasi;
2. kapasitas untuk memahami dan memanfaatkan sistem akuntansi dan kelemahan pengendalian internal;
3. keyakinan bahwa dia tidak akanterdeteksi atau jika tertangkap dia akan keluar denganmudah;
4. kemampuan untuk mengatasi stres yangditimbul pada lingkungan yang baik ketika dia melakukanperbuatan buruk.

Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalampelaporan laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansiberterima umum. Menurut Wells, 2011 dalam [9] (Sihombing, 2014) kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus, antara lain:

1. Pemalsuan, pengubahan, atau manipulasi catatan keuangan *(financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
2. Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
3. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan danmengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
4. Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dandiungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansiyang digunakan dalam membuat laporan keuangan [10] (Rezaee, 2002).

Kerangka Teoritik

A. Tekanan *(Pressure)* dan Kecurangan Laporan Keuangan

Tekanan adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor berikut : 1) *financial stability,* 2) *external pressure*, 3) *personal financial needed* dan 4) *target pressure* [6] (Skousen et al., 2009).

Stabilitas perusahaan *(financial stability),* merupakan tekanan bagi manajemen untuk dapat mengelola dan memaksimalkan aset yang dimiliki saat ini. Iklim bisnis yang tidak pasti mengakibatkan manajer berusaha menjaga kinerjanya yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. [2] (Prisca, 2013). Proksi yang digunakan untuk mengukur *financial stability* adalah perubahan aset (ACHANGE).

Tekanan yang muncul dari pihak ketiga atas kewajiban keuangan yang harus diselesaikan perusahaan *(external pressure)*. Dorongan ini muncul karena kebutuhan akan pinjaman baru ataukewajiban untuk membayar pinjaman tersebut. Leverage (LEV) digunakan sebagai proksi tekanan eksternal di mana leverage yang tinggi akan menimbulkan tekanan pada manajemen mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. [6](Skousen et al., 2009).

Tekanan juga muncul dari kebutuhan finansial pribadi manajer *(personal financial needed)* dimana pihak manajer sekaligus sebagai pemegang saham (OSHIP) harus membuat kebijakan yang dipengaruhi oleh tekanan akan kebutuhan financial pribadi dari manajer [2] (Prisca, 2013).

Tekanan selanjutnya yang muncul adalah target keuangan tertentu yang ingin dicapai oleh direksi atau manajemen *(target pressure)* sehingga mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan [2] (Prisca, 2013). Target pressure diproksi oleh *return on assets* (ROA).

Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

X1 : ACHANGE berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

X2 : LEV berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

X3 : OSHIP berpengaruh Positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

X4 : ROA berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

B. Kesempatan *(Opportunity)* dan Kecurangan Laporan keuangan

Kesempatan merupakan peluang terjadinya kecurangan. Pada umunya kesempatan melakukan manipulasi laporan keuangan disebabkan karena karakteristik industri/perusahaan *(nature of industry)* dan *ineffective monitoring*. Kesempatan muncul dari karakteristik perusahaan *(Nature of Industry)* dimana dalam perusahaan (perbankan) memiliki standar / aturan tertentu yang harus ditaati yang justru menjadi sarana dalam manipulasi laporan keuangan [6](Skousen et al., 2009).

Nature of industry diproksi dengan perbandingan piutang (kredit yang diberikan) dan pendapatan (RECREV). Akun piutang merupakan akun yang memerlukan penilaian subjektif dalammemperkirakan tidak tertagihnya piutang. Manajer yang fokus pada akun ini akan terdorong melakukan kecurangan laporan keuangan [11] (Rahmawati, 2014)

Kesempatan melakukan manipulasi laporan keuangan juga muncul karena kurangnya pengawasan dari pihak manajemen *(ineffective monitoring)* yaitu keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan [12] (Norbarani, 2012). Proksi yang digunakan adalah jumlah dari komite audit yang dimiliki perusahaan (ACSIZE).

Organizational Structure adalah keadaan dimana perusahaan mempunyai struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil. Kompleksitas dan ketidakstabilan struktur organisasi perusahaan ditandai dengan adanya integritas manajemen dengan opini audit. opini audit [13] (Francis and Krishnan, 1999) menyimpulkan bahwa kelebihan dari penggunaan diskresionari akrual dari praktik

manajemen laba akan menyebabkan opini audit tidak wajar (OPAUD). Tindakan manajemen laba tersebut tentunya karena manajemen merasionalisasikan perbuatannya.

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

X5 : RECREV berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

X6 : ACSIZE berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

X7 : OPAUD berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

C. Rasionalisasi *(Rationalization)* dan kecurangan laporan keuangan

Rasionalisasi adalah pembenaran atas tindakan yang dilakukan yang dihubungkan dengan sikap dan karakter pelaku [14](Rustendi, 2009). Pembenaran ini bisa terjadi saat pelaku ingin membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, pelaku merasa berhak mendapatkan sesuatu yang lebih (posisi, gaji, promosi) karena telah lama mengabdi pada perusahaan, atau pelaku mengambil sebagian keuntungan karena perusahaan telah menghasilkan keuntungan yang besar [2] (Prisca, 2013).

Hall [14] (dalam Rustendi, 2009) mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam tindak kecurangan didorong oleh interaksi antara kekuatan dalam kepribadian individu dengan lingkungan eksternal (auditor). Dalam hal ini risiko terjadinya kecurangan cenderung akan semakin besar apabila seseorang berada dalam tekanan situasional, ada kesempatan, dan yang bersangkutan memiliki integritas yang rendah.

Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah :

X7 : AUDCHANGE berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

D. *Capability* dan Kecurangan Laporan Keuangan

Capability adalah gambaran kemampuan yang terdiri atas (daya dan kapasitas) seseorang untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. CEO, direksi, maupun kepala divisi lainnya merupakan faktor penentu terjadinya kecurangan [7] (Wolfe dan Hermanson, 2004). Dengan jabatan dan pengaruhnya terhadap orang lain serta kemampuan dalam memanfaatkan keadaan yang dapat mendorong tindakan kecurangan yang dilakukan.

Salah satu indikator dalam mendeteksi kecurangan adalah perubahan CEO atau direksi (DIRCHANGE). Direksi memiliki akses langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya meskipun melanggar batasan dalam SAK. Kecurangan ini sering disebut sebagai manajemen laba.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis dalam penelitianini adalah:

X8 : DIRCHANGE berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan

II. METODE PENELITIAN

A. *Pendekatan Penelitian*

Metode penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Data penelitian berupa data sekunder. Jenis data adalah data panel. Unit analisis adalah perusahaan. Analisis data menggunakan program eviews 9.0[15](Wing, 2015).

Populasi adalah seluruh perusahaan sektor perbankan yang konsisten terdaftar di BEI periode 2012-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 26 perusahaan atau 130 *firm-years.*

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemilihan estimasi model regresi

   Untuk menentukan model data yang tepat untuk digunakan dalam analisis regresi data panel melalui uji chow, uji hausman dan langrange multiplier.

2. Uji Model (F statistik)

   Digunakan untuk menguji apakah model regresi yang diestimasi layak (andal) atau tidak

3. Koefisien Determinasi *(Adjusted R-Square)*

   Koefisien Determinasi menjelaskan variasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen-nya.

4. Uji Hipotesis (t statistik)

   Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui ada/atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat nya secara parsial.

5. Analisis Regresi Berganda (Data panel)

B. *Definisi dan Operasionalisasi Variabel*

1. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel yang dikembangkan dari komponen *fraud diamond* yaitu *pressure, opportunity dan rationalization* dan *capability*. Karena tidak dapat diteliti secara langsung maka diperlukan proksi-proksi tertentu untuk mengukurnya yang diadopsi dari *Statement of Auditing Standards* No. 99 (SAS No.99).

Berikut penjelasan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Tabel I. Definisi Dan Operasional Variabel Independen

(SAS No.99)	Definisi	Proksi
Fraud Risk Factor : PRESSURE		
Financial Stability **(X1)**	Keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil.	Perubahan/Pertumbuhan Aset (ACHANGE)
External Pressure **(X2)**	Tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi syarat atau harapan dari pihak ketiga.	Leverage (LEV)
Personal Financial Need **(X3)**	Suatu keadaan dimana keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan.	Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen (OSHIP)
Financial Targets **(X4)**	Tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen.	*Return On Assets* (ROA)
Fraud Risk Factor : OPPORTUNITY		
Nature Of Industry **(X5)**	Berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar.	

(SAS No.99)	Definisi	Proksi
Ineffective Monitoring **(X6)**	Keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawas yang efektif memantau kinerja perusahaan.	Jumlah komite audit /3* (ACSIZE)
Organizational Structure **(X7)**	Struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil.	Opini Audit (OPAUD)
Fraud Risk Factor : RATIONALIZATION		
Rationalization **(X8)**	Sikap/rasionalisasi auditor yang memungkinkan untuk terlibat dalam dan/atau membenarkan kecurangan pelaporan keuangan.	Pergantian Auditor (AUDCHANGE)
Fraud Risk Factor : CAPABILITY		
Capabiity **(X9)**	Kemampuan yang terdiri atas (daya dan kapasitas) seseorang untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan.	Pergantian direksi (DIRCHANGE)

Sumber : Skousen (2009)

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kecurangan laporan keuangan *(Financial Statement Fraud)*. Kecurangan laporan keuangan adalah tindakan salah saji dari laporan keuangan yang dianggap tidak material tetapi pada akhirnya menjadi fraud besar-besaran dan menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material [10] (Rezaee, 2002). Salah satu bentuk kecurangan laporan keuanganadalah manajemen laba (earnings management) yang muncul karena adanya kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk memilih metode akuntansi tertentu sehingga dapat memanipulasi laba perusahaan yang akhirnya mendatangkan keuntungan bagi dirinya.

Untuk mengukur discretionary accruals, terlebih dahulu menghitung total accrual untuk tiap perusahaan i di tahun t dengan metode modifikasi Jones [16](Dechow, 1995) yaitu:

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Dimana,
TACit = Total akrual
Nlit = Laba Bersih
CFOit = Arus kas Operasi

Nilai total accrual (TAC) diestimasi dengan persaman regresi OLS sebagai berikut:

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta 1 \frac{1}{A_{it-1}} + \beta 2 \frac{\Delta REV_t}{A_{it-1}} + \beta 3 \frac{PPET_t}{A_{it-1}} + \varepsilon$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accrual* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDA_{it} = \beta 1 \frac{1}{A_{it-1}} + \beta 2 \left(\frac{\Delta REV_t}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_t}{A_{it-1}} \right) + \beta 3 \frac{PPET_t}{A_{it-1}} + \varepsilon$$

Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it}} - NDA_{it}$$

Dimana,

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t
NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t
TACit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

NIit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t
Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1
ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
ΔRect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t e = error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian menyimpulkan bahwa model *random effect* lebih tepat dibandingkan *common* dan *fixed.* Berikut output model estimasi terpilih *random effect model* (REM) adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Output Random Effect Model (Rem)

Dependent Variable: DACC
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 25/01/2018 Time: 11:30
Sample: 2012 2016
Periods included: 5
Cross-sections included: 26
Total panel (balanced) observations: 130
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,1864	0,3173	-0,5874	0,5583
ACHANGE	0,6586	0,0592	11,1249	0,0000
LEV	-0,0055	0,0027	-2,0464	0,0435
OSHIP	0,3454	0,3215	1,0744	0,2854
ROA	1,8529	0,6175	3,0008	0,0034
RECREV	-0,0003	0,0065	-0,0486	0,9613
ACSIZE	-0,0667	0,0503	-1,3264	0,1878
OPAUD	-0,0224	0,0185	-1,21	0,2293
AUDCHANGE	-0,0089	0,0192	-0,4651	0,6429
DIRCHANGE	-0,0002	0,0024	2,6079	0,0120
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.013414	0.8164
Idiosyncratic random			0.006362	0.1836
Weighted Statistics				
R-squared	0.151205	Mean dependent var		0.212955
Adjusted R-	0.100277	S.D. dependent var		0.007231
S.E. of regression	0.006859	Sum squared resid		0.002352
F-statistic	2.969.003	Durbin-Watson stat		1.484.501
Prob(F-statistic)	0.040620			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.339912	Mean dependent var		0.806296
Sum squared	0.013901	Durbin-Watson stat		0.251208

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel Ii1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Keputusan	Kesimpulan
H1	Thitung 11,124 > 1,657, α = 0,000	Diterima
H2	Thitung -2,046 > 1,657, α = 0,043	Diterima
H3	Thitung 1,074 < 1,657, α = 0,285	Ditolak
H4	Thitung 3,000 > 1,657, α = 0,003	Diterima
H5	Thitung -0,048 < 1,657, α = 0,961	Ditolak
H6	Thitung -1,326 < 1,657, α = 0,187	Ditolak
H7	Thitung -1,210 < 1,657, α = 0,229	Ditolak
H8	Thitung -0,465 < 1,657, α = 0,642	Ditolak
H9	Thitung -0,000 < 1,657, α = 0,012	Diterima

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa :

1. Variabel perubahan aset (ACHANGE) menunjukkan kondisi keuangan dalam keadaan stabil. Stabilitas keuangan menyebabkan ekspektasi investor akan prospek perusahaan juga akan tinggi, sejalan dengan hal itu muncul juga risiko perusahaan juga semakin tinggi, manajemen mungkin untuk melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menyelaraskan prospek dan risiko dimata investor.
2. *External pressure* yang diproksi dengan *leverage* (LEV). Leverage tinggi menunjukkan adanya tekanan dari pihak kreditur atas pelunasan hutang. Manajemen terdorong melakukan manipulasi laporan keuangan untukmenjaga kepercayaan kreditur atas pelunasan hutang perusahaan atau adanya motivasi pembiayaan baru dari pihak luar
3. *Personal Financial Need* menunjukkan jumlah kepemilkan saham manajemen (OSHIP) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan manajemen di perusahaan sample relatif kecil sehingga tidak ada intervensi dalam penyusunan laporan kuangan yang bersifat oportunis.
4. *Financial target* yang diproksi dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap terhadap tindakan financial statement fraud yang ditunjukkan dengan DA. ROA merupakan tekanan untuk mencapai target keuangan yang ditetapkan oleh direksi / manajemen. Hal ini mendorong manajemen

perusahaan memenuhi target para analisis seperti tahun sebelumnya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan.

5. *Nature Of Industry* yang diproksi RECREV tidak berpengaruh terhadap tindakan manipulasi laporan keuangan. Perbankan merupakan sektor yang punya karakteristik khusus yang tidak dimiliki sektor lain. Banyak aturan/standar yang diwajibkan yang mengharuskan penggunaan estimasi dan taksiran yang dilakukan oleh manajemendalam laporan keuangan dan masih dalam koridor aturan/standar akuntansi keuangan.
6. *Ineffective Monitoring* yang diproksi dengan jumlah komite audit (ACSIZE) tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite audit yang dimiliki perusahaan sampel terbukti independen sehingga mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik, sehingga cenderung tidak melakukan kecurangan.
7. *Organizational Structure* yang diproksi dengan opini audit (OPAUD) tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan laporan keuangan. Hasil opini audit tidak menunjukkan integritas dari pihak manajemen terhadap risiko audit yang dihadapi.
8. *Rationalization* yang diproksi dengan pergantian auditor (AUDCHANGE) tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan laporan keuangan. Pergantian auditor dalam dunia perbankan cenderung rendah sehingga sulit mendeteksi kemungkinan keterlibatan dalam dan/atau membenarkan kecurangan pelaporan keuangan dalam perusahaan yang di audit.
9. *Capability* yang diproksi dengan penggantian manajer atau direksi (DIRCHANGE) berpengaruh terhadap tindakan kecurangan laporan keuangan. Direktur memiliki kemampuan dalam melakukan tindak kecurangan, karena mereka dianggap mengetahui celah-celah dan pandai melihat peluang di dalam fungsi tertentu yang berpotensi untuk dilakukannya kecurangan. Kecurangan yang sering terjadi dan dilakukan oleh direksi adalah manajemen laba. Direksi memiliki kemampuan khusus dalam melakukan kecurangan seperti manajemen laba dan penerapan kebijakan akuntansi tertentu sesuai dengan tujuannya, dengan cara memengaruhi manajer beserta bawahannya yang lain untuk dapat mengikuti maksud dan tujuannya

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendeteksian financial statement fraud yang diproksi *Discresionary Acrual* (DA) secara simultan mampu dijelaskan oleh teori *fraud diamond* yang diadopsi oleh SAS no. 99 yakni *financial stability, eksternal pressure, personal financial need, financial target, nature of indutry, ineffective monitoring, organizational structure, rationalization* dan *capability.* Namun secara parsial, yang mampu mendeteksi tindakan *financial statement fraud* yaitu *financial stability, eksternal pressure, dan financial target* dan *capability*. Sedangkan variabel yang lain tidak mampu mendeteksi tindakan *financial fraud statement* atau manipulasi laporan keuangan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pertama, pemilihan proksi yang mungkin kurang mampu digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan. Terutama untuk variabel rasionalisasi yang secara signifikan tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan proksi untuk variabel tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Kedua, penggunaan objek penelitian yang lebih luas dan memperpanjang tahun penelitian memungkinkan hasil yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

[2] Prisca. Kusumawardhani. (2013). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3

[3] Nuri, Oki. H. (2012). Cara Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting Dengan Menggunakan Rasio – Rasio Finansial.Diakses: http://eprints.undip.ac.id/35309/1/Skripsi_16.pdf

[4] Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costsand Ownership Structure . "Journal of Financial Economics", Oktober, 1976, V. 3, No.4, pp.305-360. Avalaible from: http://papers.ssrn.com

[5] Ernst, dan Young. (2009). Detecting Financial Statement Fraud. Diakses: http://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/FIDSFIDetectingFinancialStatementFraudd.pdf/$FILE/FIDSFI_DetectingFinancialStatementFraud.pdf

[6] Skousen, C. J., K. R. Smith, dan C. J. Wright. (2009). Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99. Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economis, Vol. 13, h. 53-81

[7] Wolfe, David T., and Dana R. Hermanson. (2004). The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. CPA Journal. 74.12: 38-42 [8] Kassem and Higson, 2012)

[9] Sihombing, (2014). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. Diponegoro Journal of Accounting - Vol.03, No.2, 2014

[10] Rezaee, Z. (2002). Financial Statement Fraud: Prevention and Detection. John Wiley & Sons

[11] Rahmawati. (2014) Rachmawati, Kusuma K dan Marsono. Pengaruh Faktor-Faktor dalam Perspektif Fraud Triangle Terhadap Fraudulent Financial Statement. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1. Semarang.

[12] Norbarani, Listiana. (2012). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Triangle Yang Diadopsi Dalam Sas No.99. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

[13] Francis, J., and J. Krishnan. 1999. "Accounting Accruals and Auditor Reporting Conservatism". Contemporary Accounting Research 17: 135-165.

[14] Rustendi, Tedi. (2009). Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Fraud : Suatu Kajian Teoritis Bagi Kepentingan Audit Internal. Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.2. h.705-714.

[15] Wing,W.W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Edisi Ketiga, Cetakan pertama.UPP STIM YKPN.Yogyakarta

[16] Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P, (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review 70, 193-225.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Prosedur Audit

Widia Astuty
Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan, Indonesia
widiamaksi@gmail.com

ABSTRAK — Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur prosedur audit yang terdiri dari tekanan waktu, materialitas dan tindakan supervisi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena semakin tingginya tingkat kebutuhan para pengguna laporan keuangan atas laporan audit yang berkualitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive dan verificative. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Metode survey dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap Penghentian prematur prosedur audit. Materialitas berpengaruh signifikan terhadap Penghentian prematur prosedur audit. Tindakan supervisi berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit. Selanjutnya tekanan waktu, materialitas dan tindakan supervisi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur prosedur audit.

Kata Kunci — Waktu, Materisalitas, Supervisi, Prosedur Audit

I. PENDAHULUAN

Jasa audit akuntan public diperlukan untuk menentukan kehandalam laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan. Akuntan publik atau auditor independen adalah akuntan publik bersertifikat atau kantor akuntan publik yang melakukan audit atas entitas keuangan komersial dan nonkomersial (Menurut Arens, *et al*, 2011).

Penggolongan jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jasa *assurance* dan jasa *nonassurance* (Arens, *et al*, 2011). Jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambil keputusan, dimana jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa *assurance* bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa dan individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusan.

Proses audit merupakan salah satu jasa *assurance*. Pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil keputusan (Weningtyas, dkk. 2006). Proses audit yang baik mampu meningkatkan kualitas informasi sekaligus dengan konteks yang terkandung didalamnya, namun dalam prakteknya terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan sering terjadinya perilaku pengurangan kualitas audit *(Reduced Audit Quality Behaviors)*. Alderman, dkk. (1982) menyatakan bahwa fenomena perilaku pengurangan kualitas audit semakin banyak terjadi di dalam suatu proses audit.

Bentuk pengurangan kualitas audit salah satunya adalah penghentian prematur atas prosedur audit. Malone, dkk. (1996) mendeskripsikan 4 penghentian prematur atas prosedur audit sebagai tindakan yang dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan salah satu perilaku pengurangan kualiatas audit (Coram, 2004). Penghentian prematur atas prosedur audit dapat berakibat pada informasi yang telah dikumpulkan oleh auditor ketika melakukan penghentian prematur atas prosedur audit menjadi tidak valid dan tidak akurat, hal ini dapat menyebabkan kemungkinan auditor melakukan kesalahan yang lebih besar.

Praktik penghentian prematur atas prosedur audit yang terjadi tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan auditor karena apabila salah satu langkah dalam prosedur audit dihilangkan maka kemungkinan auditor membuat judgment yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Herningsih, 2001). Penghentian prematur atas prosedur audit dapat terjadi berkenaan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap, dan mengabaikan prosedur audit, tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. penghentian prematur sebagai suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain. Penghentian prematur atas prosedur audit merupakan tindakan yang berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang disyaratkan, tidak melakukan pekerjaan secara lengkap dan mengabaikan prosedur audit tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya.

Kasus yang terjadi pada Kepala Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M Yasin & Rekan, Hasnil MM terdakwa korupsi penyelewengan pajak penghasilan pada Tahun 2001 dan 2002 di Kabupaten Langkat bersama mantan Sekda Langkat Surya Djahisa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (29/5/2013). Hasnil didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,193 miliar. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Choirun Parapat disebutkan, Surya Djahisa saat menjabat Kabag Keuangan Pemkab Langkat menunjuk KAP Hasnil M Yasin & Rekan untuk menyusun perubahan tarif pajak penghasilan PPH Pasal 21 untuk tahun fiskal 2001 dan 2002 untuk disesuaikan dengan tarif baru. "Terdakwa sebagai Kepala Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M Yasin & Rekan ditunjuk melaksanakan pekerjaan kompensasi/ restitusi dengan jangka waktu pekerjaan paling lama 6 bulan," kata Choirun dihadapan majelis hakim yang diketuai Marlianis. Selanjutnya, Pemkab Langkat memperoleh dana kompensasi atau restitusi sebesar Rp5,9 miliar. "Sesuai surat perjanjian, KAP Hasnil M Yasin & Rekan memperoleh honorium sebesar 20% dari Rp5,9 yaitu Rp1,19 miliar. Terdakwa mendapat bagian sekitar Rp400 juta dan Surya Djahisa mendapat bagian sekitar Rp793 juta," kata jaksa. Ternyata, penunjukan langsung KAP Hasnil M Yasin & Rekan melanggar Pasal 17 Keppres No 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penetapan honorarium sebesar 20% dari kompensasi/ restitusi pajak dinilai bertentangan dengan Pasal 28 Ayat 7 Keppres No 18 Tahun 2000. Kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian Rp1,193 miliar. Nilai kerugian ini sesuai hasil penghitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut. Seperti halnya Surya Djahisa, pada persidangan JPU mendakwa Hasnil telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Hasnil dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20

Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman 20 tahun penjara.

Selanjutnya seorang akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009. Biasa Sitepu selaku auditor melakukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke BRI, terdapat empat kegiatan yang tidak masuk dalam data laporan yang diajukan ke BRI, sedangkan data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap tetapi dalam laporan keuangan yang diberikan Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang dibuat tidak semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik (Kompas.com., 18 Mei 2010).Hal tersebut terjadi karena Auditor dengan sengaja melakukan penghentian prematur atas prosedur audit yang berimbas pada kredit macet untuk pengembangan usaha perusahaan Raden Motor.

Ada beberapa alasan mengapa auditor melakukan penghentian prematur prosedur audit, seperti terbatasnya jangka waktu pengauditan yang ditetapkan, nilai materialitas dari prosedur tersebut atau prosedur audit tidak material, dan tindakan supervisi (Alderman,1982). Raghunathan (1991) menyatakan bahwa penghentian prematur atas prosedur audit pada program audit sebelum menyelesaikan satu atau lebih prosedur audit yang dibutuhkan timbul akibat tekanan waktu. Adanya tekanan waktu menuntut auditor untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera. Sososutikno (2003) mengungkapkan, pada auditor professional mengahadapi tekanan waktu dalam bidang pengauditan dapat menimbulkan stres yang tinggi dan mempengaruhi sikap, niat dan perilaku auditor, selain itu mengurangi perhatian mereka terhadap aspek kualitatif dari indikasi salah saji yang potensial dalam pelaporan keuangan.

Tekanan waktu yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik kepada auditornya bertujuan untuk mengurangi biaya audit. Semakin cepat waktu pengerjaan audit, maka biaya pelaksanaan audit akan semakin kecil. Menurut penelitian Heriningsih (2001) auditor yang melakukan penghentian prematur atas prosedur audit sebagian besar disebabkan oleh *time pressure*/tekanan waktu yang membuat auditor ingin menyelesaikan pekerjaan audit tepat waktu. Efisiensi biaya serta waktu yang dipaksakan kepada auditor tentu dapat menimbulkan time pressure atau tekanan waktu. Adapun yang dimaksud dengan tekanan waktu (time pressure) adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Selanjutnya materialitas merupakan besarnya salah saji dari informasi akuntansi, yang mana dalam kondisi tertentu akan berpengaruh terhadap perubahan pengambilan keputusan yang diambil atas informasi yang mengandung salah saji tersebut. Saat Auditor menetapkan bahwa materialitas pada suatu akun rendah, maka terdapat kecenderungan bagi Auditor untuk mengabaikan prosedur audit tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena Auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari suatu akun tertentu, nilainya tidaklah material sehingga tidak berpengaruh apapun pada opini audit. Pengabaian seperti inilah yang menimbulkan penghentian premature atas prosedur audit (Weningtyas, dkk., 2006).

Tindakan Supervisi adalah suatu usaha merencanakan, mengatur, mengkoordinir, dan mengontrol yang bertujuan untuk mencapai hasil melalui orang lain. Supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksaan dan pihak lain (seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan) agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Inti dari tindakan supervisi audit itu sendiri adalah tindakan kepemimpinan dalam memaksimalkan pengawasan auditor senior terhadap auditor junior yang dilakukan untuk mencapai tujuan hasil kerja yang memuaskan (Foqoh,2014). Pengaruh tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit adalah tindakan mengawasi dan mengarahkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior yang diukur dari sikap kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan. Dalam Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP), supervisi merupakan hal yang penting. Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam bekerja dan mereview pekerjaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruh penghentian prematur prosedur audit yang terdiri dari tekanan waktu, materialitas, dan tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur prosedur audit pada Kantor Akuntan Publik di kota Medan.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *descriptive* dan *verificative*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *survey*. Metode *survey* dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

B. Operasionalisasi Variabel

Adapun variabel-variabel dan indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Tekanan waktu (X_1) (Anggaran waktu yang sangat penting bagi semua KAP karena menyediakan dasar untuk memperkirakan biaya audit, pengalokasian staf ke dalam pekerjaan audit, dan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja auditor	1. Ketepatan dan 2. Tambahan Waktu, 3. Pemenuhan target dengan Waktu yang ditentukan, 4. Beban yang ditanggung dengan keterbatasan waktu.	Interval
Materialitas (X_2) (Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut	1. Seberapa penting tingkat materialitas 2. Pengetahuan tingkat materialitas 3. risiko audit 4. Tingkat materialitas antar perusahaan.	Interval
Tindakan Supervisi (X_3) (Tindakan mengawasi dan mengarahkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor senior yang diukur dari sikap kepemimpinan dan mentoring, kondisi kerja, dan penugasan).	1. kebingungan karyawan akan peran 2. Supervisor yang berorientasi pada pekerjaan 3. Membantu memecahkan masalah	Interval
Penghentian prematur atas prosedur audit (Y) (Tindakan penghentian terhadap prosedur audit atau tidak melengkapi langkah prosedur audit yang disyaratkan tetapi auditor berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya)	1. Mengakhiri program audit sebelum waktunya 2. Penghentian terhadap prosedur audit yang di isyaratkan 3. Mengabaikan prosedur audit 4. Pemberian opini atas laporan keuangan tanpa peninjauan mendalam	Interval

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang tersebar di 20 Kantor Akuntan Publik yang ada di kota Medan. Teknik penarikan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu mengambil seluruh anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian yaitu berjumlah 42 orang.

D. Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner disebarluaskan ke responden penelitian peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen terhadap kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2007). Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah data valid. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan apakah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kriteria uji reliabilitas dilakukan dengan pengujian *Cronbach Alpha* (α). Suatu variable dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*> 0,60 (Ghozali, 2007).

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi tiap-tiap butir pertanyaan yang disajikan mempunyai nilai koefisien (r_{xy}) yang lebih besar dari koefisien korelasi kritis (r_{tabel}) atau nilai signifikansinya dibawah 0,05 . Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap butir yang terdapat dalam semua pertanyaan dapat dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai acuan pengukuran variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa angka koefisien *Alpha Cronbach* (α) lebih mendekati 1 dibanding mendekati 0,6 sehingga dapat diambil keputusan bahwa daftar pertanyaan yang disajikan handal (reliabel) untuk digunakan.

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur prosedur audit adalah metode analisis deskriptif. Sedangkan analisis verifikatif dilakukan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghentian prematur prosedur audit yang terdiri dari tekanan waktu, materialitas dan tindakan supervisi dengan metode *analisis regresi linier berganda.* Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan model struktural yang dihipotesiskan diperoleh hasil perhitungan dengan analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Tabel 1 Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.977	10.406		2.151	.000
Tekanan Waktu	.258	.186	.235	2.387	.002
Materialitas	.515	.202	.425	2.550	.000
Tindakan Supervisi	.266	.174	.262	2.095	.003

a. Dependent Variable: Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Berdasarkan tabel di atas hasil dari proses yang menggunakan program software SPSS sebagai penghitungan, maka hasilnya sebagai berikut :

$$Y = 11.977 + 0.258X1 + 0.515X2 + 0.266X3$$

Interpretasi dari persamaan regresi diatas adalah

a. Konstanta (a) mempunyai regresi sebesar 11.977, artinya jika variabel tekanan waktu (X_1) , materialitas (X_2), dan tindakan supervisi (X_3) dianggap konstan, maka penghentian prematur pada prosedur audit sudah terbentuk sebesar 11.977.
b. Tekanan Waktu (X_1) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.258, artinya bahwa Apabila variabel tekanan waktu (X_1) ditingkatkan 1 satuan, maka akan meningkatkan Penghentian Prematur pada Prosedur Audit sebesar 0.258.
c. Materialitas (X_2) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.515 artinya bahwa apabila kenaikan variabel materialitas (X_2) ditingkatkan 1 satuan, maka akan meningkatkan penghentian prematur pada prosedur audit sebesar 0,515.

d. Tindakan Supervisi (X_3) mempunyai koefisien regresi sebesar 0.266 artinya bahwa apabila kenaikan variabel Tindakan Supervisi (X_3) ditingkatkan 1 satuan, maka akan meningkatkan penghentian prematur pada prosedur audit sebesar 0,266.

Tabel 2 ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77.397	3	25.799	3.767	.003[a]
	Residual	261.071	28	9.324		
	Total	338.469	31			

a. Predictors: (Constant), Tindakan Supervisi, Materialitas, Tekanan Waktu
b.Dependent Variable: Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun. Berdasarkan hasil pengujian statistik untuk model dengan variabel tekanan waktu (X_1), materialitas (X_2) dan tindakan supervisi serta variabel dependen penghentian prematur pada prosedur audit (Y) diperoleh hasil sebagai berikut. Koefisien determinasi dengan nilai *R Square* sebesar 0,229 berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 22,90%, sisanya sebesar 77,10% diterangkan oleh variabel lain diluar model yang terangkum dalam *error*.

Tabel 3. Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478[a]	.229	.146	3.05352

a. Predictors: (Constant), Tindakan Supervisi, Materialitas, Tekanan Waktu
b. Dependent Variable: Penghentian Prematur atas Prosedur Audit

B. Pembahasan

Pengaruh Tekanan Waktu terhadap Penghentian Prematur pada Prosedur Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Ketepatan dan tambahan waktu, pemenuhan target dengan waktu yang ditentukan, dan beban yang ditanggung dengan keterbatasan waktu merupakan indikator-indikator dari tekanan waktu yang berpengaruh terhadap penghentian prematur pada prosedur. Keberadaan tekanan waktu ini akan memaksa auditor untuk menyelesaikan pekerjaan audit secepat mungkin atau sesuai dengan anggaran waktu yang telah ditetapkan. Semakin besarnya tekanan waktu yang diterima auditor pada saat melakukan audit, maka semakin tinggi tingkat kemungkinan auditor untuk melakukan penghentian prematur pada prosedur audit. Pelaksanaan prosedur audit seperti ini tentu saja tidak akan sama hasilnya apabila prosedur audit dilakukan dalam kondisi tanpa tekanan waktu. Tekanan waktu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit (Suryanita dkk, 2007).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alderman dan Dietrick (1982), Coram *et al.* (2000), Heriningsih (2001), Soobaroyen dan Chengabroyan (2006), serta Weningtyas dkk (2006), Budiman (2013), Kumala (2013), dan Aini (2015) yang menyatakan bahwa tekanan waktu berpengaruh terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Tekanan waktu (*time pressure*) merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berbeda dengan hasil penelitian Raghunathan (1991), Malone dan Robert (1996), serta Wahyudi (2011) menyatakan bahwa tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Pengaruh Materialitas terhadap Penghentian Prematur pada Prosedur Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel materialitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tingkat materialitas, risiko audi, dan tingkat materialitas antar perusahaan merupakan indikator-indikator dari materialitas yang berpengaruh terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Saat auditor menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur rendah, maka terdapat kecenderungan bagi auditor untuk mengabaikan prosedur tersebut. Pengabaian ini dilakukan karena auditor beranggapan jika ditemukan salah saji dari pelaksanaan suatu prosedur audit yang nilainya tidak material maka tidak berpengaruh pada opini audit. Pengabaian seperti inilah yang menimbulkan penghentian prematur atas prosedur audit. Semakin rendahnya nilai materialitas pada sebuah akun atau prosedur maka semakin tinggi tingkat kemungkinan auditor melakukan penghentian prematur pada prosedur audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Weningtyas (2006), Wahyudi, dkk. (2011), Budiman (2013) yang menyatakan materialitas berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh presepsi dari auditor sendiri. Pengaruh ini menunjukkan bahwa auditor menganggap bahwa prosedur audit memiliki tingkat materialitas yang rendah dalam mendeteksi salah saji maka auditor akan cendrung untuk meninggalkan prosedur tersebut.

Pengaruh Tindakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur pada Prosedur Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tindakan supervisi berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Kebingungan karyawan akan peran, supervisor yang berorientasi pada pekerjaan, dan membantu memecahkan masalah merupakan indikator-indikator dari tindakan supervisi yang berpengaruh pada penghentian prematur pada prosedur audit. Penerapan fungsi supervisi yang baik dapat mengurangi terjadinya tindakan penghentian prematur atas prosedur audit karena bentuk penyimpangan ini dapat terdeteksi lebih dini. Tindakan supervisi sangat menentukan penghentian prematur atas prosedur audit yang di ambil atau dilakukan oleh auditor sebab atasan atau pemegang wewenang sangat menentukan langkah-langkah audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrini, dkk.(2014) dan Aini (2015) yang menyatakan tindakan supervisi berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Maulina, dkk. (2010) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Pengaruh Tekanan Waktu, Materialitas dan Tindakan Supervisi secara secara bersama-sama terhadap Penghentian Prematur pada Prosedur Audit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan waktu, materialitas dan tindakan supervisi secara bersama-sama pengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit. Hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi menunjukkan nilai 22,90 %, artinya pengaruh dari Tekanan Waktu, Materialitas dan Tindakan Supervisi hanya sebesar 22,90% dan sisanya sebesar 77,10% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia Syafrina Sholehati (2015) dan Fuqoh Amaliyah (2015) yang menyatakan tekanan waktu, materialitas, dan tindakan supervisi berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Tekanan waktu berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit.
2) Materialitas berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur pada prosedur audit.
3) Tindakan Supervisi berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4) Tekanan waktu, materialitas, dan tindakan supervisi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alderman, C Wayne dan James W. Deitrick. *Auditor's perceptions of Time Budget Pressures and Premature Sign Offs* : A Replication and Extension. Auditing : A Journal of Practice and Theory,1982.

[2] Aini,Fifi Aprilia Nurul. Pengaruh Tekanan Waktu, Tindakan Supervisi, *Locus Of Control* Terhadap Penghentian Prematur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 3, 2015.

[3] Arens, Alvin A., R.J. Randal, M.S. Beasley dan A.A Jusuf. *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia) Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

[4] Asrini, K.J., E. Sujana, dan N.A. Darmawan. Pengaruh Tekanan Waktu, Locus Of Control dan Tindakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Bali). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1* 2 (1, 2014

[5] Budiman, Nita Andriyani. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Auditor terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis,* UNISNU: Jepara, 2013.

[6] Coram, Paul, Juliana Ng dan David Woodliff, "*The Effect of Time Budget Pressure and Risk of Error on Auditor Performance*", Working paper, The University of Melbourne, 2000

[7] _____ The Effect of Risk of Misstatement on The Propensity to Commit Reduced Audit Quality Acts Under Time Budget Pressure. *Auditing: A Journal of Practice & Theory Vol.23 No. 2,* 2004.

[8] Fuqoh. *Pengaruh Tekanan waktu, Materialitas dan Tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit studi empiris pada perwakilan kantor BPKP Yogyakarta*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

[9] Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

[10] Heriningsih, Sucahyo. "*Penghentian prematur atas prosedur audit : Studi empiris pada kantor akuntan publik*". Tesis Pascasarjana, Universitas GajahMadaYogyakarta, 2001.

[11] Kompas.com. *Akuntan Publik diduga terlibat,* 18 Mei 2010

[12] Kumala, S.N. Pemengaruh Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit pada Auditor di KAP Surabaya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi* 1 (1), 2013.

[13] Malone, Charles F, Robin W. Roberts. Factors Associated with the Incidence of Reduced Audit Quality Behaviors, Auditing : *A Journal of Practice and Theory Vol. 15 No. 2,* 1996.

[14] Maulina, Anggraini, dan Anwar. *Pengaruh Tekanan Waktu Dan Tindakan Supervisi Terhadap Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010.

[15] Soobaroyen, Teerooven dan Chelven Chengabroyan. "Auditors' Perceptions of Time Budget Pressure, Premature Sign Offs and Under-Reporting of Chargeable Time: Evidence from a Developing Country", *International Journal of Auditing.* Vol.10, no.3, hal 201-218, 2006.

[16] Sososutikno Christina. "*Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Audit*". Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya, 2003.

[17] Suryanita, Dody, Hanung Triatmoko. Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 10 No.1, 2007.

[18] Raghunathan, B. *Premature Signing-Off on Audit Procedures*: An Analysis. Accounting Horizons, 71-19, 2002.

[19] Tipikor Medan.com., Rabu 29 Mei 2013. *Hakim tolak eksepsi Surya djahisa*.

[20] Waggoner, J. B. and James D. Cashell. The Impact of Time Pressure on Auditor's Performance.*Ohio CPA Journal. Vol. 50,* 1991.

[21] Wahyudi, Imam, Jurica Lucyanda, dan Loekman H. Suhud, "Praktik Penghentian Prematur atas Prosedur Audit", *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2, 2011.

[22] Weningtyas, Suryanita, dkk. 2006. *Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit*, Simposium Nasional Akuntansi ke IX, Padang.